



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas taufiq, hidayah, dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua. Hanya dengan bimbingan dan tuntunan-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kotawaringin Barat Akhir Tahun Anggaran 2014 ini dapat disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penyampaian LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Akhir Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan implementasi dari pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Tujuannya adalah untuk memberikan keterangan kepada DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan selama kurun waktu tahun anggaran 2014. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah tersebut, LKPJ ini lebih merupakan *progress report* (catatan atas capaian kemajuan) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dicapai selama tahun 2014, sekaligus sebagai bentuk nyata upaya menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Pedoman yang digunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah seperti tercantum dalam peraturan tersebut mensyaratkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2014 dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Target Anggaran Pendapatan pada tahun 2014 berjumlah Rp. 1.010.072.414.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.012.105.155.890,39 atau 100,20%, sedangkan Target Belanja berjumlah Rp. 1.113.961.783.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.054.386.956.575,30 atau 94,62% .

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, realisasi anggaran yang disampaikan dalam LKPJ ini, belum merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2014, karena laporan keuangan daerah akan disampaikan setelah adanya hasil pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam laporan ini juga disampaikan rincian dana Tugas Pembantuan tahun 2013 yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebesar Rp. 32.687.015.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 31.738.320.513,00 atau 97,00 %.

Kemajuan dan keberhasilan telah dapat diraih, berkat hasil pikir dan kerja bersama-sama dengan seluruh *stakeholders* pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat. Akan tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masalah dan tantangan dalam pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, serta belum dapat diwujudkannya seluruh aspirasi warga Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk itu, catatan-catatan dan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap LKPJ ini nantinya akan dijadikan masukan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa yang akan datang.

Akhirnya Kami berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat, serta dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di masa mendatang.

Terima kasih.

BAPPEDA	
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	
JABATAN	PARAF
Wabup	
Sekda	
Asisten	
Kepala	
Sekretaris	
Kabid	

Pangkalan Bun, April 2015

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Dr. H. UJANG ISKANDAR, S.T., M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	xii
Daftar Grafik	xii
Daftar Diagram	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Dasar Hukum.....	I-1
1.2. Gambaran Umum Daerah	I-2
1.2.1 Kondisi Geografis Daerah	I-4
A. Letak Geografis	I-4
B. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	I-4
C. Kondisi Topografi	I-5
D. Geologi	I-6
E. Hidrologi	I-9
F. Klimatologi	I-10
1.2.2 Gambaran Umum Demografi	I-11
A. Kependudukan	I-11
B. Ketenagakerjaan	I-14
1.2.3 Kondisi Perekonomian Daerah	I-16
A. Potensi Unggulan Daerah	I-16
a. Pertanian	I-16
b. Peternakan	I-18
c. Kehutanan	I-19
d. Perkebunan.....	I-20
e. Perikanan	I-24
f. Pariwisata	I-27
g. Komoditas Unggulan Daerah	I-29
B. Perekonomian Kabupaten Kotawaringin	
Barat	I-32
a. Struktur Perekonomian	I-32
b. Pertumbuhan Ekonomi	I-36
c. PDRB Perkapita	I-37
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	II-1
2.1 Visi dan Misi	II-1

2.1.1	Visi	II-1
2.1.2	Misi	II-2
2.1.3	Tujuan dan Sasaran	II-4
2.1.4	Agenda Pembangunan	II-6
2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	II-7
2.3	Prioritas Daerah	II-15
BAB III	KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .	III-1
3.1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	III-1
3.1.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	III-1
3.1.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	III-3
3.1.3	Permasalahan dan Solusi	III-6
3.2	Pengelolaan Belanja Daerah	III-7
3.2.1	Kebijakan Umum Keuangan Daerah	III-7
3.2.2	Target dan Realisai Belanja	III-9
3.2.3	Permasalahan dan Solusi	III-10
BAB IV	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1	Urusan Wajib Yang Dilaksanakan	IV-1
4.1.1	Urusan Pendidikan	IV-1
4.1.2	Urusan Kesehatan	IV-24
4.1.3	Urusan Lingkungan Hidup	IV-73
4.1.4	Urusan Pekerjaan Umum	IV-109
4.1.5	Urusan Penataan Ruang	IV-130
4.1.6	Urusan Perencanaan Pembangunan	IV-134
4.1.7	Urusan Perumahan	IV-153
4.1.8	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	IV-161
4.1.9	Urusan Penanaman Modal	IV-168
4.1.10	Urusan Koperasi dan UKM	IV-174
4.1.11	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	IV-186
4.1.12	Urusan Ketenagakerjaan	IV-197
4.1.13	Urusan Ketahanan Pangan	IV-212
4.1.14	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-232
4.1.15	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	IV-246
4.1.16	Urusan Perhubungan	IV-258
4.1.17	Urusan Komunikasi dan Informatika	IV-274

4.1.18	Urusan Pertanahan	IV-280
4.1.19	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik DN	IV-283
4.1.20	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	IV-308
20.1	Sekretariat Daerah	IV-308
20.2	Sekretariat DPRD	IV-326
20.3	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	IV-339
20.4	Badan Kepegawaian	IV-352
20.5	Inspektorat Kabupaten	IV-373
20.6	Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan	IV-383
20.7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	IV-392
20.8	Kantor Kecamatan	IV-403
8.a	Kec. Arut Selatan	IV-403
8.b	Kecamatan	IV-412
8.c	Kecamatan Kumai	IV-422
8.d	Kecamatan Pangkalan Banteng	IV-431
8.e	Kecamatan Pangkalan Lada	IV-439
8.f	Kecamatan Arut Utara	IV-447
4.1.21	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	IV-455
4.1.22	Urusan Sosial	IV-471
4.1.23	Urusan Kebudayaan	IV-488
4.1.24	Urusan Statistik	IV-495
4.1.25	Urusan Kearsipan	IV-500
4.1.26	Urusan Perpustakaan.....	IV-512
4.2	Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan	IV-520
4.2.1	Urusan Kelautan dan Perikanan	IV-520
4.2.2	Urusan Pertanian	IV-537
2.1	Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan	IV-537
2.2	Sub Sektor Perkebunan	IV-564
4.2.3	Urusan Kehutanan	IV-579
4.2.4	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	IV-594
4.2.5	Urusan Pariwisata	IV-600
4.2.6	Urusan Industri	IV-616
4.2.7	Urusan Perdagangan	IV-628

4.2.8	Urusan Ketrasmigrasian	IV-641
BAB V	TUGAS PEMBANTUAN	V-1
5.1	Tugas Pembantuan yang diterima	V-1
5.1.1	Dinas Perkebunan	V-2
5.1.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	V-8
5.1.3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	V-12
5.1.4	Dinas Kesehatan	V-16
5.1.5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V-25
5.1.6	RSUD Sultan Imanuddin	V-28
5.2	Penyelenggaraan Urusan Bersama	V-31
5.2.1	BPMD	V-31
5.3	Penyelenggaraan Dana Kantor Pusat	V-35
5.3.1	Dinas Pekerjaan Umum	V-36
BAB VI	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	VI-1
6.1	Kerjasama Daerah dengan Pihak Ke-tiga	VI-1
6.1.1	Dinas Kesehatan	VI-1
1.1	Program Tuberculosis (TB)	VI-1
1.2	Program Malaria	VI-3
1.3	Program HIV	VI-5
1.4	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	VI-6
6.1.2	RSUD Sultan Imanuddin	VI-8
6.1.3	Inspektorat Kabupaten	VI-13
6.1.4	Sekretariat DPRD	VI-14
6.2	Koordinasi dengan Instansi Vertkal di Daerah	VI-16
6.2.1	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	VI-16
6.2.2	Pemeliharaan Keamanan	VI-18
6.3	Pembinaan Batas Wilayah	VI-19
6.4	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	VI-22
6.5	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	VI-27

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan.....	I-4
Tabel 1.2	Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat	I-6
Tabel 1.3	Formasi Geologi Di Kabupaten Kotawaringin Barat	I-8
Tabel 1.4	Nama-Nama Sungai di Kotawaringin Barat Menurut	
	Panjang yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata	
	Kedalaman	I-9
Tabel 1.5	Suhu Udara Rata-rata, Maksimum/Minimum di Stasiun	
	Meteorologi Pangkalan Bun Th 2011 – 2013	I-10
Tabel 1.6	Kecepatan Angin Rata-rata di Pangkalan Bun	I-10
Tabel 1.7	Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan	I-11
Tabel 1.8	Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhannya	I-11
Tabel 1.9	Banyaknya Rumah Tangga dan Rasio Jenis Kelamin	I-12
Tabel 1.10	Penduduk Menurut Kelompok Umur	I-12
Tabel 1.11	Kepadatan Penduduk per Desa dan Rumah Tangga.....	I-14
Tabel 1.12	Penduduk menurut Kegiatan Utama	I-14
Tabel 1.13	Kondisi Ketenagakerjaan	I-14
Tabel 1.14	Penduduk menurut Lapangan Usaha.....	I-15
Tabel 1.15	Populasi Ternak di Kab. Kotawaringin Barat.....	I-18
Tabel 1.16	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya	I-20
Tabel 1.17	Jumlah Produksi Hasil Hutan	I-20
Tabel 1.18	Potensi Lahan di wilayah Kotawaringin Barat	I-20
Tabel 1.19	Luas Areal Perkebunan Per Komoditi	I-21
Tabel 1.20	Luas Areal Perkebunan berdasarkan Kepemilikan	I-21
Tabel 1.21	Produksi Perkebunan per Komoditi.....	I-22
Tabel 1.22	Nama Perusahaan Perkebunan di Kotawaringin Barat.....	I-22
Tabel 1.23	Pabrik CPO di Kab. di Kotawaringin Barat	I-23
Tabel 1.24	Pabrik PKO di Kab. di Kotawaringin Barat	I-24
Tabel 1.25	Jumlah Produksi Sektor Perikanan	I-25
Tabel 1.26	Potensi Obyek Wisata di Kab. di Kotawaringin Barat.....	I-28
Tabel 1.27	Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan	I-29
Tabel 1.28	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011	
	s/d 2014 Atas Dasar Harga Konstan Th. 2000.....	I-34
Tabel 1.29	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011	
	s/d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku	I-35

Tabel 1.24	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kotawaringin Barat	I-36
Tabel 1.24	PDRB Perkapita Kab. Kotawaringin Barat	I-37
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014	III-3
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014	III-9
Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan.....	IV-1
Tabel 4.2	Program/Kegiatan Urusan Pendidikan	IV-6
Tabel 4.3	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan	IV-25
Tabel 4.4	Program/Kegiatan Urusan Kesehatan.....	IV-29
Tabel 4.5	Jumlah Kotak Sampah dan Volume Sampah.....	IV-90
Tabel 4.6	Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup	IV-93
Tabel 4.7	Klasifikasi Jalan berdasarkan Statusnya.....	IV-110
Tabel 4.8	Klasifikasi Jalan berdasarkan Jenis Permukaannya	IV-110
Tabel 4.9	Klasifikasi Jalan berdasarkan Kondisi Fisiknya	IV-111
Tabel 4.10	Klasifikasi Jalan berdasarkan Kelas Jalan	IV-111
Tabel 4.11	Klasifikasi Jembatan berdasarkan Kondisi Fisiknya.....	IV-111
Tabel 4.12	Indikator Rasio Jaringan Irigasi	IV-112
Tabel 4.13	Indikator Rasio TPS per satuan penduduk.....	IV-113
Tabel 4.14	Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum	IV-115
Tabel 4.15	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang.....	IV-132
Tabel 4.16	Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang.....	IV-133
Tabel 4.17	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan.....	IV-135
Tabel 4.18	Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan	IV-133
Tabel 4.19	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perumahan	IV-155
Tabel 4.20	Program/Kegiatan Urusan Perumahan	IV-133
Tabel 4.21	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	IV-163
Tabel 4.22	Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	IV-164
Tabel 4.23	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal ...	IV-169
Tabel 4.24	Nilai Realisasi dan Pertumbuhan Investasi PMA/ PMDN.....	IV-169
Tabel 4.25	Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal.....	IV-171
Tabel 4.26	Jumlah Koperasi dan Statusnya.....	IV-175
Tabel 4.27	Perkembangan Jumlah dan Jenis UMKM	IV-175
Tabel 4.28	Penilaian Kondisi KSP/ USP	IV-176
Tabel 4.29	Program/Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM.....	IV-177

Tabel 4.30	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	IV-187
Tabel 4.31	Program/Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catpil.....	IV-188
Tabel 4.32	Statistik Ketenagakerjaan Kab. Kotawaringin Barat	IV-197
Tabel 4.33	Kondisi Pasar Kerja di Kab. Kotawaringin Barat	IV-197
Tabel 4.34	Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan.....	IV-199
Tabel 4.35	Program/Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan	IV-217
Tabel 4.36	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-233
Tabel 4.37	Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-234
Tabel 4.38	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	IV-249
Tabel 4.39	Jumlah Peserta KB Aktif	IV-249
Tabel 4.40	Program/ Kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	IV-251
Tabel 4.41	Jumlah Sistem Jaringan Transportasi	IV-259
Tabel 4.42	Jumlah Sarana Pendukung Keselamatan lalu lintas	IV-259
Tabel 4.43	Jumlah Kendaraan yang di uji	IV-260
Tabel 4.44	Program/Kegiatan Urusan Perhubungan	IV-262
Tabel 4.45	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika	IV-275
Tabel 4.46	Program/ Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika	IV-276
Tabel 4.47	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pertanahan	IV-281
Tabel 4.48	Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	IV-282
Tabel 4.49	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	IV-284
Tabel 4.50	Pelanggaran Perda di Kab. Kotawaringin Barat	IV-285
Tabel 4.51	Program/ Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	IV-286
Tabel 4.52	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah	IV-309
Tabel 4.53	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD	IV-327

Tabel 4.54	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh DPKD	IV-341
Tabel 4.55	Usul dan Alokasi formasi PNS	IV-353
Tabel 4.56	Komposisi Penerimaan PNS menurut golongan	IV-354
Tabel 4.57	Penyelenggaraan Administrasi Kepangkatan PNS	IV-354
Tabel 4.58	Data Base Kepegawaian.....	IV-355
Tabel 4.59	Penanganan Kasus-kasus PNS	IV-355
Tabel 4.60	Penghargaan PNS berprestasi.....	IV-356
Tabel 4.61	Realisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	IV-356
Tabel 4.62	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian	IV-358
Tabel 4.63	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten	IV-376
Tabel 4.64	Jenis dan Realisasi Perizinan di Kab. Ktw. Barat.....	IV-384
Tabel 4.65	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh KPTP	IV-386
Tabel 4.66	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh BPBD	IV-394
Tabel 4.67	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arut Selatan.....	IV-404
Tabel 4.68	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kotawaringin Lama.....	IV-413

Tabel 4.69	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kumai	IV-423
Tabel 4.70	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkalan Banteng	IV-431
Tabel 4.71	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkalan Lada	IV-440
Tabel 4.72	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arut Utara	IV-448
Tabel 4.73	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV-455
Tabel 4.74	Program/ Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV-457
Tabel 4.75	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Sosial.....	IV-472
Tabel 4.76	Program/ Kegiatan Urusan Sosial	IV-474
Tabel 4.77	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan	IV-489
Tabel 4.78	Program/ Kegiatan Urusan Kebudayaan.....	IV-491
Tabel 4.79	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik.....	IV-497
Tabel 4.80	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan	IV-501
Tabel 4.81	Program/ Kegiatan Urusan Kearsipan.....	IV-502
Tabel 4.82	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan	IV-514
Tabel 4.83	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan	IV-516
Tabel 4.84	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	IV-521
Tabel 4.85	Program/ Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan.....	IV-522
Tabel 4.86	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pertanian	IV-538
Tabel 4.88	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Komoditi Pertanian	IV-558
Tabel 4.89	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Tanaman Sayur-Sayuran	IV-558

Tabel 4.90	Populasi Ternak di Kab. Kotawaringin Barat.....	IV-559
Tabel 4.91	Produksi Daging di Kab. Kotawaringin Barat	IV-559
Tabel 4.92	Pendapatan Asli Daerah dari Dinas Pertanian dan Peternakan	IV-562
Tabel 4.93	Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Karet, Kelapa dan Kelapa Sawit per Kecamatan	IV-565
Tabel 4.94	Luas Areal dan Produksi Kopi dan Lada per kecamatan.	IV-566
Tabel 4.95	Luas Areal dan Produksi Mente dan Aren per kecamatan. ..	IV-567
Tabel 4.96	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pertanian Sub sektor Perkebunan	IV-568
Tabel 4.97	Program/ Kegiatan Urusan Pertanian	IV-569
Tabel 4.98	Luas Potensi Hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan SK MENHUT NO: SK.529/ Menhut- II/2012...	IV-580
Tabel 4.99	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan	IV-580
Tabel 4.100	Program/ Kegiatan Urusan Kehutanan	IV-581
Tabel 4.101	Volume dan Nilai Ekspor Sektor Pertambangan	IV-596
Tabel 4.102	Program/ Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	IV-597
Tabel 4.103	Potensi Obyek Wisata di Kab. Kotawaringin Barat.....	IV-602
Tabel 4.104	Program/ Kegiatan Urusan Pariwisata	IV-603
Tabel 4.105	Jml. Produksi Komoditas Kayu Sektor Perindustrian	IV-617
Tabel 4.106	Nilai Ekspor Komoditas Kayu Sektor Perindustrian.....	IV-617
Tabel 4.107	Perkembangan Potensi Industri Kecil Menengah.....	IV-618
Tabel 4.108	Program/ Kegiatan Urusan Industri	IV-619
Tabel 4.109	Perkembangan Jumlah Industri di Ktw. Barat	IV-627
Tabel 4.110	Nilai dan Realisasi Volume Ekspor Perdagangan	IV-632
Tabel 4.111	Program/ Kegiatan Urusan Perdagangan	IV-632
Tabel 4.112	Data Transmigran dan Penempatannya	IV-642
Tabel 4.113	Program/ Kegiatan Urusan Transmigrasi	IV-644

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Wilayah Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat	I-5
Gambar 2.2	Peta Geologi Wilayah Kab. Kotawaringin Barat	I-9

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 - 2014.....	I-36
Grafik 4.1	Capaian Penanaman Bibit Tanaman Ruang Terbuka Hijau ...	IV-88
Grafik 4.2	Peningkatan Biopori Tahun 2012 – 2014	IV-89

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Piramida Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013	I-13
Diagram 4.1	Peningkatan Jumlah Kotak Sampah per tahun	IV-90
Diagram 4.2	Persentase wanita umur 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut umur perkawinan pertama	IV-248
Diagram 4.3	Persentase wanita umur 15-49 tahun yang berstatus kawin menurut penggunaan alat KB.....	IV-248

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan besar dari penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban, salah satunya melalui mekanisme kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27 ayat (2) mengamanatkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan, bahwa LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.

Pelaksanaan LKPJ juga dilakukan sebagai proses pencapaian kinerja dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang

merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD saat ini merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.

Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Hubungan kemitraan juga bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga antar kedua lembaga dapat membangun hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung, bukan menjadi lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsinya masing-masing.

Begitu pula dalam penetapan anggaran dilakukan bersama-sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. LKPJ merupakan sarana sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan menjadi media evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

LKPJ yang disusun memiliki makna yang sangat strategis dalam proses pembangunan untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program yang dilaksanakan. Melalui mekanisme ini, progres dan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan dapat dicermati dan dilakukan penilaian, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk perbaikan dan penajaman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

1.1 DASAR HUKUM

Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 1).
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH

1.2.1 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

A. Letak Geografis

Secara geografis berdasarkan Peta RTRWK tahun 2003 letak Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada posisi 1°26' - 3°33' Lintang Selatan, dan 111°20'-112°6' Bujur Timur. Namun berdasarkan peta rekomendasi RTRWK tahun 2009 berada pada posisi 1°26' - 3°33' Lintang Selatan, dan 111°13'-112°6' Bujur Timur.

B. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di bagian barat dan memiliki Daerah Aliran Sungai Arut, Sungai Kumai dan Sungai Lamandau, dengan ibukota Pangkalan Bun. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km² atau sekitar 6,2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Dua kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai.

Tabel 1.1
Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

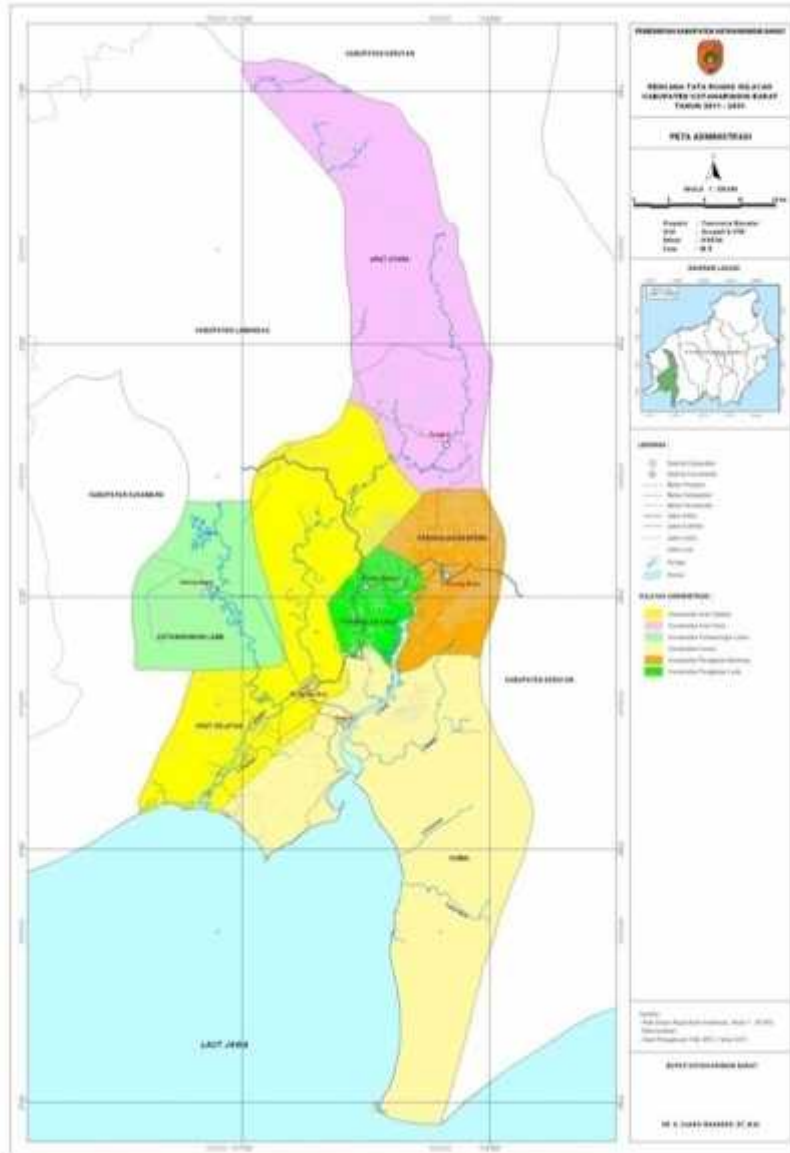
Kecamatan	Luas (KM²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1. Kotawaringin Lama	1.218	11,32
2. Arut Selatan	2.400	22,31
3. Kumai	2.921	27,15
4. Pangkalan Banteng	1.306	12,14
5. Pangkalan Lada	229	2,13
6. Arut Utara	2.685	24,96
Jumlah	10.759	100,00

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014

Secara administratif letak geografis Kabupaten Kotawaringin Barat berbatasan dengan :

-) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
-) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
-) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan;
-) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara.

Gambaran letak geografis dan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat secara detail dapat dilihat pada **Gambar 1.1** sebagai berikut :



Gambar 1.1
Wilayah Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat
(Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat)

C. Kondisi Topografi

Kedaaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari:

1. Sebelah utara adalah pegunungan dan macam tanah latosol tahan terhadap erosi;
2. Bagian tengah terdiri dari tanah podsolik merah kuning juga tahan terhadap erosi;
3. Sebelah selatan adalah danau dan rawa alluvial/organosol banyak mengandung air.

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau, mudah tergenang, berawa-rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Ketinggian merupakan faktor yang penting dalam penyebaran kegiatan budidaya terutama pertanian, sehingga ketinggian merupakan faktor yang perlu diperhatikan didalam pembangunan pertanian dalam arti luas.

Ketinggian tempat dari permukaan air laut berpengaruh terhadap suhu udara, yaitu setiap naik 100 m suhu akan turun rata - rata 0,6⁰, sehingga makin tinggi suatu tempat akan menyebabkan daerah tersebut mempunyai suhu lebih rendah. Dilihat dari kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan kemiringan lahan, mayoritas lahan di daerah ini dapat diarahkan penggunaannya untuk budidaya pertanian, jika faktor lain mendukung.

Lahan ini adalah lahan yang mempunyai kemiringan < 40%. Lahan yang mempunyai kemiringan > 40% termasuk peka terhadap erosi. Kelerengan di atas 40 penyebarannya terkonsentrasi di bagian utara, dimana ketinggian wilayahnya di atas 500 meter di atas permukaan laut. Tipe kelas lereng ini hanya terdapat di wilayah Kecamatan Arut Utara.

Tabel 1.2
Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kecamatan	Luas (Ha)				
		0 – 2 %	2 – 15 %	15 – 40 %	> 40 %	Jumlah
1	Kotawaringin Lama	45.903,35	64.739,94	3.000,60	0	113.643,89
2	Arut Selatan	113.593,76	69.107,06	34.963,03	0	217.663,86
3	Kumai	278.812,90	22.572,55	0	0	301.385,44
4	Pangkalan Banteng	16.610,11	56.222,47	0	0	72.832,58
5	Pangkalan Lada	7.189,56	24.120,18	0	0	31.309,74
6	Arut Utara	0	292.410,98	121.342,23	72.460,00	249.450,98
Jumlah		462.109,98	292.410,98	159.305,86	72.460,00	986.286,49
%		46,85	29,65	16,15	7,35	100

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat

D. Geologi

Jenis tanah di daerah selatan berbeda dengan jenis tanah yang terdapat di daerah utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

Podsolik Merah Kuning, tanah podsolik merah kuning merupakan jenis tanah yang sering dijumpai terletak menyebar di tengah sampai hulu sungai Kecamatan Arut Utara, sebagian kecil terdapat di Kecamatan Arut Selatan dan kecamatan Kumai. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsolik ini adalah warna merah kuning dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki drainase baik dengan reaksi tanah masam.

Kompleks Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol), tanah regosol podsol merupakan jenis tanah terletak menyebar di tengah Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Selatan dan sedikit Kecamatan Kotawaringin Lama. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsol ini adalah warna coklat dengan tekstur halus sampai kasar dan memiliki drainase baik dengan reaksi tanah masam.

Kompleks Regosol (Podsol), dijumpai menyebar di bagian timur Kecamatan Kumai, tanah ini bersolum dalam terbentuk dari bahan induk endapan pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, dengan warna tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam.

Aluvial, jenis tanah ini terbentuk hasil endapan, banyak terdapat di sekitar daerah aliran Sungai Lamandau, Arut, dan Kumai serta di daerah pantai sampai ke bagian tengah Kecamatan Kumai. Tanah tersebut relatif lebih subur jika dibandingkan dengan tanah-tanah yang mengalami perkembangan lanjut.

Organosol, tanah ini terbentuk dari bahan organik yang tertimbun di tempat tersebut, menyebar di Kecamatan Kumai dan sedikit di Kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan. Warna tanah ini hitam bersifat asam.

Oksisol (Lateritik), Jenis tanah oksilik (lateritik) terdapat bagian atas (hulu) Kecamatan Arut Utara. Keadaan medan bergelombang, berbukit, dan bergunung dengan solum tanahnya dalam. Tanah jenis ini memiliki tekstur halus, berdrainase baik, hanya saja daerah ini curah hujan sangat tinggi. Warna tanah oksilik adalah kuning kemerahan dan termasuk jenis tanah yang telah lanjut mengalami perkembangan pelapukan.

Sedangkan susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat tersusun atas 10 formasi, yaitu :

1. Batuan Terobosan Sintang;
2. Granit Mandahan;
3. Granit Sukadana;
4. Batuan GA Berapi;
5. Tonalik Sepauk;
6. Formasi Dahor;
7. Endapan Rawa;
8. Batuan Gunung api;
9. Alluvium; dan
10. Formasi Laut.

Rincian mengenai susunan geologi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada **Tabel 1.3.** berikut ini :

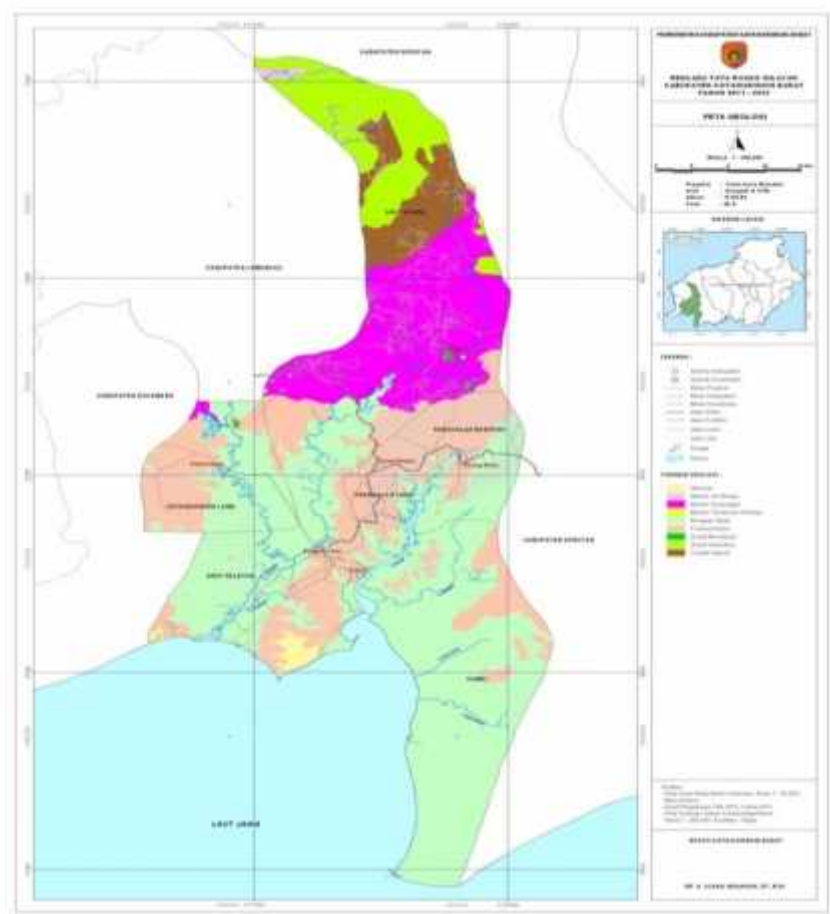
Tabel 1.3
Formasi Geologi Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No .	Jenis Formasi	Kecamatan						Jumlah	Persentase (%)
		Ktw. Lama	Arut Selatan	Kumai*	Arut Utara	Pangkalan Banteng	Pangkalan Lada		
1.	Batuan Terobosan Sintang	0	0	0	89,22	0	0	89,22	0,01
2.	Granit Mandahan	265,77	0	0	1.159,50	0	0	1.425,27	0,16
3.	Granit Sukadana	0	0	0	84.598,66	0	0	84.598,66	9,71
4.	Batuan GA Berapi	10.173,09	0	0	2.115,31	0	0	12.288,40	1,41
5.	Tonalit Sepauk	0	0	0	47.049,37	0	0	47.049,37	5,40
6.	Formasi Dahor	50.565,04	50.084,89	57.449,03	5.959,05	34.956,68	24.208,56	223.223,25	25,61
7.	Endapan Rawa	52.640,00	118.916,03	120.353,27	0	37.083,02	7.101,18	336.093,50	38,56
8.	Batuan Gunung api	0	48.533,61	0	108.479,87	792,87	0	157.806,35	18,11
9.	Alluvium	0	129,33	6.912,01	0	0	0	7.041,34	0,81
10.	Formasi Laut	0	0	1.997,15	0	0	0	1.997,15	0,23
JUMLAH		113.643,89	217.663,86	186.711,46	249.450,98	72.832,57	31.309,74	871.612,50	100,00

Sumber : Diolah dari Peta Geologi Kalimantan Tengah, Tahun 2004

* Luas lebih kecil, karena sebagian data tidak ada di Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting

Berdasarkan **Tabel 1.3** di atas terlihat bahwa formasi geologi terbanyak yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah formasi endapan rawa dan formasi dahor masing-masing seluas 336.093,50 Ha dan 223.223,25 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai persebaran susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat dilihat pada **Gambar 1.2**.



Gambar 1.2
Peta Geologi Wilayah Kab. Kotawaringin Barat

E. Hidrologi

Di daerah Kalimantan pada umumnya sungai sangat berperan penting di dalam kehidupan masyarakat selain tempat untuk mencari nafkah juga berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi. Demikian pula di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sungai berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat di dalam melakukan aktivitasnya.

Tabel 1.4
Nama-Nama Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-Rata	
				Kedalaman (M)	Lebar (M)
1.	Sungai Kumai	175,00	100,00	6,00	300,00
2.	Sungai Arut	250,00	190,00	4,00	100,00
3.	Sungai Lamandau	300,00	250,00	6,00	200,00

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014

F. Klimatologi

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada daerah beriklim panas dan lembab. Hal ini disebabkan karena secara geografis, masih terletak di sekitar khatulistiwa dan bercurah hujan tinggi. Suhu maksimum berkisar 30,7°C – 32,8°C dan suhu minimum antara 21,8[C - 23,5[C. Rata-rata kecepatan angin dalam 10 tahun terakhir berkisar antara 4 - 6 knot.

Kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan September. Jumlah hari hujan 202 hari. Curah hujan di Kabupaten Kotawaringin Barat mulai dari wilayah selatan hingga ke pedalaman semakin meningkat. Jumlah curah hujan 3.000 mm/tahun dalam 10 tahun terakhir. Rincian kondisi suhu udara, kecepatan angin dan banyaknya curah hujan disajikan pada **Tabel 1.5**, **Tabel 1.6** dan **Tabel 1.7**.

Tabel 1.5
Suhu Udara Rata-rata, Maksimum/Minimum di Stasiun Meteorologi Pangkalan Bun Tahun 2011 – 2013

Bulan		Suhu Udara (°C)					
		2 0 1 1		2 0 1 2		2 0 1 3	
		Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	32,9	33,8	22,9	32,9	23,0	32,5	23,4
02.	33,5	32,7	22,1	32,8	23,0	32,7	23,3
03.	32,7	32,7	22,2	32,9	23,1	33,8	23,5
04.	32,7	33,3	22,4	33,5	23,4	32,8	23,6
05.	33,6	33,5	22,8	33,5	23,1	32,6	23,9
06.	32,6	32,6	22,4	32,6	22,6	33,1	23,6
07.	32,5	32,2	21,5	31,2	22,4	31,6	22,5
08.	32,6	31,8	22,0	32,2	21,2	31,5	22,5
09.	31,4	32,4	22,0	33,0	22,0	32,1	23,0
10.	33,3	32,6	23,2	33,6	23,0	33,4	22,9
11.	32,5	32,6	23,2	33,0	23,3	32,5	23,0
12.	32,6	32,5	23,2	32,3	23,2	31,9	23,4

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 1.6
Kecepatan Angin Rata-rata di Stasiun Meteorologi Pangkalan Bun (Knot), Tahun 2011 – 2013

Bulan	Kecepatan Angin					
	2 0 1 1		2 0 1 2		2 0 1 3	
	Maks.	Rata-rata	Maks.	Rata-rata	Maks	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Januari	16	5	13,0	7,6	15	2,5
02. Pebruari	12	5	14,0	7,8	11	2,1
03. Maret	14	5	15,0	8,0	15	2,2
04. April	17	2	12,0	7,6	16	2,3
05. Mei	13	2	33,5	7,5	16	2,2
06. Juni	12	3	16,0	9,2	21	2,1
07. Juli	15	3	18,0	10,4	16	2,4
08. Agustus	13	3	14,0	10,4	15	3,2
09. September	19	4	14,0	10,0	15	3,0
10. Oktober	17	3	12,0	8,6	15	2,8
11. Nopember	11	2	16,0	8,2	22	2,3
12. Desember	14	3	12,0	7,4	14	2,4

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 1.7
Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan di Stasiun Meteorologi Pangkalan Bun Tahun 2011 - 2013

Bulan		Jumlah Hari Hujan			Curah Hujan (mm)		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
01. Januari	24	26	19	151,0	227,4	152,5	
02. Pebruari	15	23	19	77,0	202,3	180,9	
03. Maret	25	25	25	254,0	164,3	233,2	
04. April	23	17	24	306,0	362,6	326,0	
05. Mei	16	8	22	128,0	123,0	236,2	
06. Juni	6	11	15	16,0	68,5	229,0	
07. Juli	8	11	18	79,0	68,6	224,3	
08. Agustus	8	11	15	41,0	81,3	201,1	
09. September	11	4	18	117,0	4	146,7	
10. Oktober	22	16	12	178,0	181,2	139,2	
11. Nopember	24	21	25	253,0	231,8	341,7	
12. Desember	23	27	27	487,0	351,8	353,4	
Jumlah	205	200	239	2 087,0	2 066,8	2 764,2	

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014

1.2.2 GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI

A. Kependudukan

Secara umum keadaan sosial budaya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam proses pertumbuhan sejalan dengan dinamika pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2013 sebesar 261.200 jiwa. Angka ini juga berarti secara proporsional jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 10,95 % dari jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang sebanyak 2.384.700 jiwa atau juga terbesar ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas. Lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.8
Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan, Tahun 2010 – 2013

No	Kecamatan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Laju Pertumb. 2012-2013
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)		
1	Kotawaringin Lama	16 796	17 321	17 777	18 232	2,56
2	Arut Selatan	98 406	101 999	105 176	108 378	3,04
3	Kumai	46 544	48 176	49 612	51 056	2,91
4	Pangkalan Banteng	30 597	32 309	33 890	35 525	4,82
5	Pangkalan Lada	27 934	28 928	29 804	30 686	2,96
6	Arut Utara	15 526	16 167	16 740	17 323	3,48
Kotawaringin Barat		235 803	244 900	253 000	261 200	3,24

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran, kematian dan migrasi. Kelahiran dan migrasi masuk merupakan faktor penambah pada pertumbuhan penduduk, sedangkan kematian dan migrasi keluar merupakan faktor pengurang. Pada pertengahan tahun 2013 penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan 3,24 %, dari 253.000 jiwa pada tahun 2012 menjadi 261.200 jiwa pada pertengahan tahun 2013.

Rasio jenis kelamin dan Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur serta kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada **Tabel 1.9** , **Tabel 1.10** dan **Tabel 1.11**.

Tabel 1.9
Banyaknya Rumah tangga, Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan Th. 2013

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kotawaringin Lama	4 980	9 650	8 582	18 232	112,45
2	Arut Selatan	28 757	56 442	51 936	108 378	108,68
3	Kumai	11 648	26 689	24 367	51 056	109,53
4	Pangkalan Banteng	10 019	19 148	16 377	35 525	116,92
5	Pangkalan Lada	8 410	16 323	14 363	30 686	113,65
6	Arut Utara	4 786	9 948	7 375	17 323	134,89
Jumlah 2013		68 600	138 200	123 000	261 200	112,36
2012		66 929	133 800	119 200	253 000	112,25

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh *sex ratio* yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2013 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 112 penduduk laki-laki, dimana nilai perbandingan jenis kelamin terbesar terdapat di Kecamatan Arut Utara sebesar 135 yang berarti bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 135 penduduk laki-laki.

Tabel 1.10
Penduduk Kotawaringin Barat Menurut Kelompok Umur, Jenis kelamin,
dan Rasio Jenis Kelamin, Tahun 2013

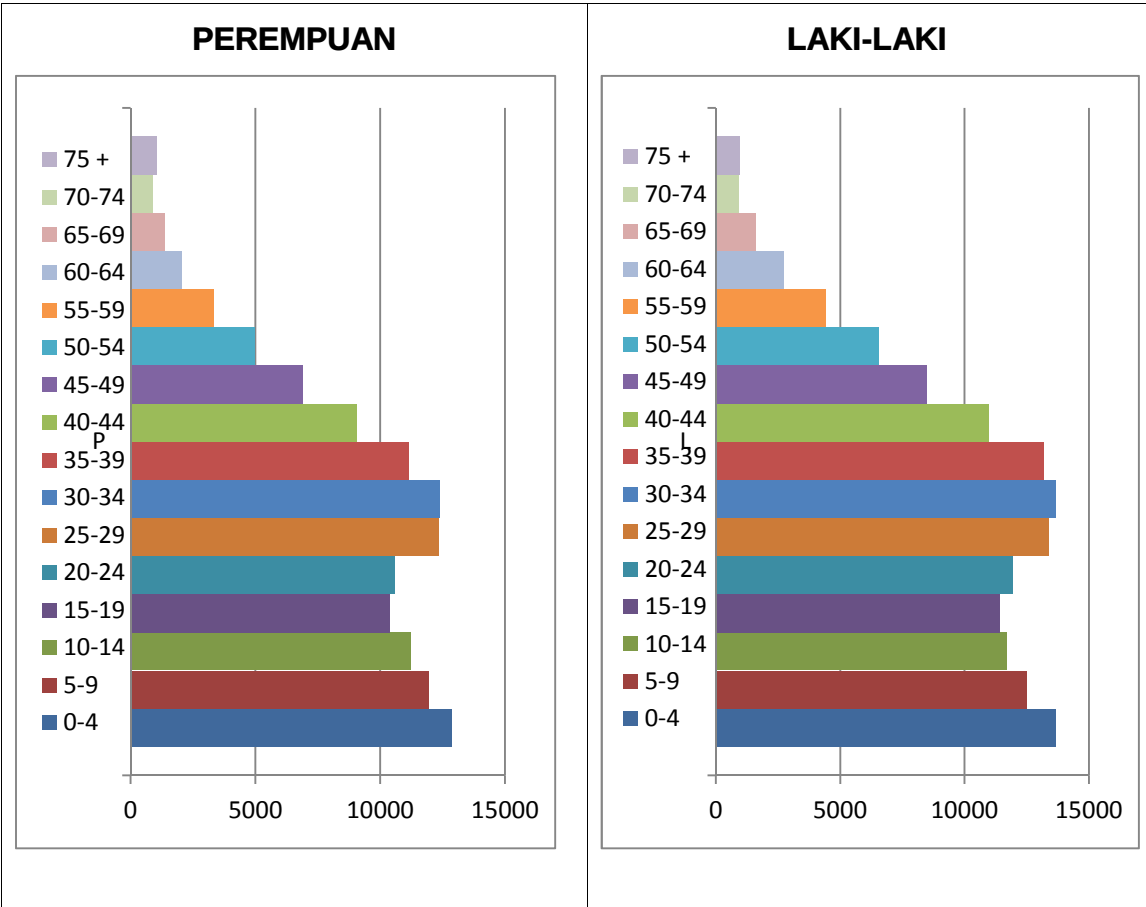
Kelompok Umur	Jenis Kelamin			Seks Rasio	% terhadap Jumlah Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0 – 4	13 670	12 882	26 552	106,12	10,17
5 – 9	12 491	11 947	24 438	104,55	9,36
10 – 14	11 712	11 253	22 965	104,08	8,79
15 – 19	11 429	10 396	21 825	109,94	8,36
20 – 24	11 942	10 596	22 538	112,70	8,63
25 – 29	13 403	12 354	25 757	108,49	9,86
30 – 34	13 660	12 405	26 065	110,12	9,98
35 – 39	13 193	11 145	24 608	115,58	9,42
40 – 44	10 990	9 078	20 068	121,06	7,68

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			Seks Rasio	% terhadap Jumlah Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
45 – 49	8 475	6 922	15 397	122,44	5,89
50 – 54	6 570	4 982	11 552	131,87	4,42
55 – 59	4 428	3 369	7 797	131,43	2,99
60 – 64	2 754	2 058	4 812	133,82	1,84
65 – 69	1 608	1 381	2 989	116,44	1,14
70 - 74	929	908	1 837	102,31	0,70
75 +	946	1 054	2 000	89,75	0,77
Jumlah	138 200	123 000	261 200	112,36	100,00

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014

Tabel diatas memperlihatkan penduduk kelompok umur 0 - 4 tahun lebih banyak dibanding penduduk kelompok umur 5 - 9 tahun. Hal ini mengindikasikan tingkat fertilitas pada tahun 2013 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2012.

Diagram 1.1
Piramida Penduduk Kotawaringin Barat Tahun 2013



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BPS)

Dari piramida penduduk tersebut terlihat komposisi penduduk Kotawaringin Barat didominasi oleh penduduk muda/dewasa, kemudian kelompok penduduk laki-laki yang termasuk angkatan kerja atau usia 15 tahun ke atas jumlahnya lebih besar dibanding penduduk perempuan di usia yang sama.

Tabel 1.11
Kepadatan Penduduk, Rata-rata Penduduk per Desa/Kelurahan dan per Rumah Tangga Menurut Kecamatan, 2013

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Rata-rata Penduduk	
			Per Desa	Per Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kotawaringin Lama	14,97	1 072,47	3,66
2	Arut Selatan	45,16	5 418,90	3,77
3	Kumai	17,48	2 836,44	4,38
4	Pangkalan Banteng	27,20	2 089,71	3,55
5	Pangkalan Lada	134,00	2 789,64	3,65
6	Arut Utara	6,45	1 574,82	3,62
Jumlah 2013		24,28	2 778,72	3,81
2012		22,78	2 607,90	3,78

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014

Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat akhir tahun 2013 sebesar 24,28 jiwa per km², Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Pangkalan Lada yaitu 134,00 jiwa per km² dan disusul Kecamatan Arut Selatan 45,16 jiwa per km², Kecamatan Pangkalan Banteng 27,20 jiwa per km², Kecamatan Kumai 17,48 jiwa per km², Kecamatan Kotawaringin Lama 14,97 jiwa per km² dan terakhir Kecamatan Arut Utara 6,45 jiwa per km².

B. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, dimana penduduk tersebut di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2013 sebanyak 184.860 jiwa yang terbagi dalam 5 kegiatan utama seperti yang terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.12
Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2013

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun 2012		Tahun 2013	
		jiwa	%	jiwa	%
I	Angkatan Kerja	120 613	70,75	124 101	67,13
1.	Bekerja	117 762	69,08	119 533	64,66
2.	Pengangguran	2 851	1,67	4 568	2,47
II	Bukan Angkatan Kerja	49 855	29,25	60 759	32,87
1.	Sekolah	11 158	6,55	15 141	8,19
2.	Mengurus Rumah Tangga	35 276	20,69	39 732	21,49
3.	Lainnya	3 421	2,01	5 886	3,18
Jumlah		170 468	100	184 860	100

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat

Pada tahun 2013, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki penduduk dengan usia kerja sebanyak 184.860 jiwa. Dari 184.860 penduduk usia kerja tersebut 67,13 persen merupakan angkatan kerja sementara 32,87 persen bukan merupakan angkatan kerja. Jumlah tersebut masih berada dibawah target RPJMD pada tahun

2013 yang mana mensyaratkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 75 persen.

Dari 124.101 penduduk Kotawaringin Barat yang menjadi angkatan kerja, terdapat pengangguran sebanyak 4.568 orang atau 3,68 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tersebut masih diatas target RPJMD 2013 yang sebesar 2,3 persen. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat mewujudkan target tersebut.

Tabel 1.13
Kondisi Angkatan Kerja (AK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2008 – 2013

No.	Tahun	Angkatan Kerja/ AK (Jiwa)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) %	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %
1.	2008	112.285	67,73	94,57	5,43
2.	2009	103.945	64,98	95,26	4,74
3.	2010	120.734	65,41	95,54	4,46
4.	2011	123.110	74,04	97,19	2,81
5.	2012	120.613	70,75	97,64	2,36
6.	2013	124.101	67,13	96,32	3,68

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BPS)

Sektor Pertanian masih mendominasi dalam penyediaan lapangan usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2013 yaitu sebesar 38,07 %, diikuti oleh sektor Perdagangan sebesar 17,60 % seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.14
Persentase dan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 - 2013

No.	Lapangan Pekerjaan	2011		2012		2013	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	50.545	42,05	47.612	40,43	45.505	38,07
2	Pertambangan & Penggalian	12.434	10,34	13.704	11,64	13.662	11,43
3	Industri Pengolahan	7.530	6,26	7.761	6,59	9.848	8,24
4	Listrik , Gas & Air	670	0,56	526	0,45	513	0,43
5	Bangunan/ Konstruksi	4.583	3,81	6.031	5,12	8.628	7,22
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi	19.948	16,60	21.811	18,52	21.040	17,60
7	Angkutan, Pergudangan & Komunikasi	5.574	4,64	5.350	4,54	6.469	5,41
8	Keuangan, Perbankan & Jasa Perusahaan	2.566	2,13	803	0,68	1.132	0,95
9	Jasa-jasa	16.351	13,60	14.164	12,03	12.736	10,65
JUMLAH		120.201		117.762		119.533	

Sumber: Data BPS Kabupaten Kotawaringin Barat

1.2.3 KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH

A. Potensi Unggulan Daerah

Potensi unggulan daerah dapat diartikan sebagai sumber daya baik alam maupun buatan yang terkandung dalam suatu wilayah yang memiliki nilai bobot lebih dan diperkirakan dapat menjadi komoditas unggulan daerah sehingga dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Potensi unggulan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan dapat menciptakan peluang investasi yang menghasilkan komoditas unggulan daerah, sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Potensi unggulan daerah didasarkan pada sektor yang memberikan kontribusi besar dalam pembentukan PDRB. Peranan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB memberikan kontribusi sebesar 42,42 % pada tahun 2014. Peranan sektor pertanian sub sektor perkebunan memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 35,40%. Sub sektor tanaman perkebunan mencakup komoditas, karet, kelapa, kelapa sawit dan sejenisnya. Dari komoditas-komoditas tersebut, produksi kelapa sawit memberi andil terbesar di sub sektor tanaman perkebunan, sehingga bila terjadi perubahan produksi atau harga, akan sangat berpengaruh besar terhadap sub sektor ini.

Sub sektor lainnya adalah sub sektor perikanan, sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya, sub sektor tanaman bahan makanan (tabama), kehutanan dengan komoditi hasil hutan bukan kayu, yaitu rotan, jelutung dan kulit gembor. Selain itu Kabupaten Kotawaringin Barat juga memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan.

Potensi Unggulan Daerah ditentukan atas dasar pertimbangan dan kriteria :

- 1) Komoditas yang diunggulkan merupakan motor penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Mencerminkan potensi sumber daya alam dan secara ekonomi;
- 3) Memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan sektor lainnya;
- 4) Mampu menciptakan peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal;
- 5) Memiliki keramahan lingkungan dan efek kerusakan yang kecil terhadap alam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat ditetapkan Potensi Unggulan Daerah sebagai berikut :

a. Pertanian

Pada tahun 2014 capaian produksi tanaman pangan secara umum cukup menggembirakan. Produksi padi mencapai angka 29.482 ton, (naik 0,69 % dari tahun 2013 yang sebesar 27.278 ton). Peningkatan produksi padi ini disebabkan oleh peningkatan produktifitas tanaman yang mencapai 3,08 ton/ha. Produksi tanaman Palawija pada tahun 2014 umumnya mengalami penurunan, kecuali produksi jagung sebesar 2.308 ton Pipilan

Kering (PK), (naik 28,29% dari tahun 2013 yang mencapai 1.799 ton PK). Kondisi penurunan produksi tanaman palawija ini disebabkan masih terbatasnya stimulus yang berikan pemerintah karena lebih mendorong pengembangan tanaman padi. Selain itu, masih rendahnya motivasi petani untuk menanam tanaman palawija karena alasan pemasaran, resiko usaha yang tinggi karena serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan kegagalan panen. Dukungan dan bantuan pemerintah umumnya akan membuat petani lebih berminat menanam tanaman padi dan sayur-sayuran.

Produksi kedelai, kacang tanah dan kacang hijau tahun 2014 masing-masing sebesar 2,36 ton, 105,79 ton dan 2,37 ton. Angka produksi ketiga komoditi ini turun masing-masing sebesar 83,15%, 9,03% dan 79,0% dibandingkan angka produksi tahun 2013. Untuk komoditi lainnya, yakni ubi kayu dan ubi jalar produksinya juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013, yaitu masing-masing sebesar 4.934 ton (turun 20,83%) dan 900,51 ton (turun 27,94%).

Usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Kotawaringin Barat baru sebagian kecil yang berorientasi pasar, karena hasil produksi umumnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan petani sendiri. Selain itu, lahan-lahan pertanian yang baru dikembangkan belum berfungsi secara optimal, disisi lain tingginya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke perkebunan sawit dan karet menjadi tantangan tersendiri.

Upaya mendorong dan mengoptimalkan sentra-sentra baru pengembangan padi yang lebih tertata secara kewilayahan terus dilakukan. Tahun 2014 dilaksanakan rehabilitasi/optimalisasi lahan sawah seluas 100 ha, dan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 14.133 meter. Dalam bidang perbenihan dilaksanakan pengembangan Balai Benih Padi di Tanjung Terantang seluas 25 ha dan penangkaran benih padi seluas 25 ha di tingkat petani penangkar. Balai Benih Padi ini akan terus dioptimalkan fungsinya dalam rangka pemenuhan penyediaan benih unggul berkualitas bagi petani.

Produktivitas dan produksi tanaman pangan perlu terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah (penyediaan pangan bagi masyarakat di daerah secara mandiri), seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan pangan di dalam negeri. Pembangunan sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pertanian. Hal ini akan dapat dicapai melalui perluasan/rehab/optimasi lahan pertanian dan pengamanan produksi pertanian sehingga

produksi pertanian dapat ditingkatkan. Peningkatan mutu dan kualitas produk perlu dilakukan perbaikan pengolahan pasca panen dan sistem pemasarannya.

Selain faktor fisik, faktor sumber daya petani dan kelembagaannya juga perlu terus dikembangkan agar petani mampu mengelola usaha taninya secara lebih optimal, mandiri dan lebih baik. Lembaga penyuluh pertanian juga perlu terus didorong fungsi dan perannya dalam rangka pendampingan peningkatan kesejahteraan petani.

b. Peternakan

Sektor peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat terus didorong peran strategisnya terutama dalam rangka peningkatan produksi daging untuk mencapai kemandirian atau mengurangi ketergantungan dari luar daerah. Capaian produksi daging sapi potong pada tahun 2014 sebesar 552,94 ton, sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 551,99 ton.

Peningkatan produksi daging sapi potong diikuti juga dengan kenaikan produksi ternak kambing/domba dan unggas. Produksi daging kambing/domba tahun 2014 sebesar 49,62 ton, meningkat dibanding tahun 2013 yang mencapai 49,43 ton. Hanya produksi daging ternak babi yang mengalami penurunan dimana pada tahun 2014 sebesar 93,25 ton sedikit turun dibandingkan produksi tahun 2013 yang mencapai 94 ton. Produksi daging ternak unggas juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2014 produksinya mencapai 1.292,21 ton dibandingkan pada tahun 2013 yang hanya sebesar 1.218,71 ton.

Populasi ternak terus mengalami peningkatan pada tahun 2014, Populasi ternak sapi potong pada akhir tahun 2014 telah mencapai 13.155 ekor (naik 18% dari tahun 2013 yang mencapai 11.148 ekor). Populasi Ternak Kambing/Domba mencapai 2.398 ekor (naik 13,22%), Babi 5.498 ekor (naik 3,21%), Ayam Buras 343.941 ekor (naik 0,50%), Ayam Ras Pedaging 166.973 ekor (naik 2%), Ayam Ras Petelur populasinya tetap sebanyak 10.000 ekor, dan Itik 40.317 ekor (naik 1,53%).

Tabel 1.15
Populasi Ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013-2014

No.	Jenis Ternak	Satuan	Populasi		
			2013	2014	Δ (%)
1	Sapi	Ekor	11.148	13.155	18,00
2	Kambing/Domba	Ekor	2.118	2.398	13,22
3	Babi	Ekor	5.327	5.498	3,21
4	Ayam Buras	Ekor	342.230	343.941	0,50
5	Ayam Ras Pedaging	Ekor	163.699	166.973	2,00
6	Ayam Ras Petelur	Ekor	10.000	10.000	0,00
7	Itik	Ekor	39.708	40.317	1,53

Sumber data : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Ktw. Barat

Pemotongan ternak sapi potong tahun 2014 tercatat sebanyak 3.456 ekor dengan tingkat produksi daging mencapai 552,96 ton, sedangkan ternak Kambing/Domba sebesar 3.684 ekor dengan produksi daging mencapai 49,642 ton. Di sisi lain, produksi telur pada tahun 2014 mengalami peningkatan, dimana produksi telur ayam buras mencapai 208,76 ton, ayam ras 32 ton dan itik sebesar 133,42 ton.

Pada tahun 2014 sarana pendukung Pusat Pembibitan Ternak terus dilengkapi sehingga telah berfungsi sebagai inkubator perbibitan ternak. Dalam bidang perbibitan ternak sapi kinerja petugas Inseminasi Buatan (IB) cukup baik, dimana dengan fasilitasi pelaksanaan IB atau kawin suntik berhasil dilahirkan anak sapi/pedet sebanyak 1.539 ekor (100% dari target yang ditetapkan yaitu 1.536 ekor). Secara umum produksi ternak di Kotawaringin Barat dalam tahun 2014 mengalami kenaikan. Namun demikian dalam rangka peningkatan populasi dan produksi ternak, perlu diperhatikan aspek budidaya peternakan yang terencana dengan baik. Kedepan, populasi dan produksi ternak diharapkan dapat terus meningkat, sehingga tidak hanya mampu memenuhi konsumsi lokal daerah saja tetapi juga dapat meluas hingga pasar ekspor.

Dalam konteks ini, terobosan ke depan yaitu dengan pengembangan peternakan dengan pendekatan sistem integrasi sawit-sapi yang melibatkan pihak swasta, pengembangan teknologi *embrio transfer*, pengembangan sistem pemasaran ternak secara efektif melalui revitalisasi tempat pemotongan hewan dan pengamanan produksi ternak untuk menekan angka kematian ternak.

c. Kehutanan

Sumber Daya Alam Kabupaten Kotawaringin Barat di Sub Sektor Kehutanan sangat besar, namun demikian kelestarian kawasan hutan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem di alam sangat perlu diperhatikan. Karena dengan ekosistem yang lestari maka akan menunjang ketersediaan fungsi kehidupan. Paradigma lama yang mengeksploitasi kayu sebagai hasil hutan unggulan mulai menurun seiring dengan semakin baiknya penegakan hukum dalam mengatasi *illegal logging* dan tuntutan dunia untuk terus mempertahankan fungsi dan kawasan hutan sebagai paru-paru dunia dan penyerap karbon.

Kelestarian hutan sebagai penjaga iklim dari pemanasan global harus terus ditingkatkan. Hal tersebut hanya dapat terjadi jika fungsi dan kawasan hutan dapat terus dilestarikan dan dijaga. Sampai tahun 2014 luas kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat menurut fungsinya berdasarkan SK Menhut Nomor : 529 Tahun 2012 tanggal 25 September 2012 adalah sebagaimana **Tabel 1.16** berikut :

Tabel 1.16
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya

No	Fungsi	Luas (Ha)	%
1	Arel Penggunaan Lainnya (APL)	235,731	23.90
2	Hutan Lindung (HL)	9,698	1.00
3	Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	156,003	15.8
4	Hutan Produksi (HP)	257,045	26.10
5	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	49,314	5.00
6	Kawasan Konservasi Perairan (KKP)	16,482	1.70
7	Kawasan Suaka Alam /Pelestarian Alam (KSA/PA)	239,091	24.30
8	Sungai	22,073	2.20
Jumlah		985,437	100.00

Sumber: Dinas Kehutanan Kab.Kotawaringin Barat

Adapun jumlah produksi hasil hutan sektor kehutanan dilihat berdasarkan jenis komoditas kayu di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.17
Jumlah Produksi Hasil Hutan Sektor Kehutanan Tahun 2010-2014

Komoditas (Kelompok)	Jumlah Produksi (dalam M ³)			
	2011	2012	2013	2014
Kayu Meranti	41.088,97	43.775,35	27.689,61	40.219,03
Kayu Rimba Campuran	1.787,26	1.996,07	2.772,03	6.223,98
Kayu Indah	133,04	68,87	-	-
Jumlah	43.009,27	45.840,29	30.461,64	46.443,01

Sumber : Dinas Kehutanan Kab.Kotawaringin Barat

d. Perkebunan

Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas wilayah 1.075.900 Ha. mempunyai potensi lahan perkebunan seluas 281.780 Ha. Dari luasan tersebut 192.846,56 Ha diantaranya telah ditanami. Secara terperinci potensi lahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.18
Potensi Lahan di wilayah Kotawaringin Barat Tahun 2014

NO	Peruntukan	Luas (Ha)	%
1.	Konsesi Kehutanan	565.028,00	53,13
2.	Konsesi Transmigrasi	28.164,00	2,64
3.	Kawasan Pengembangan	76.911,38	7,23
4.	Konsesi Budidaya Perkebunan	192.846,56	18,13
5.	Kawasan Non Perkebunan	191.309,00	17,99
6.	Danau dan Sungai	9.142,00	0,88
Jumlah		1.063.400,94	100

Sumber : Data Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

Terdapat 5 komoditi perkebunan utama yang berkembang di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai tahun 2014 yang diusahakan pada areal seluas 192.846,56 Ha. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 204.868,62 terdapat penurunan sebesar 12.022,06 Ha. Penurunan ini disebabkan oleh dikeluarkannya data luasan pada 5 Perkebunan Besar Swasta (PBS) Kelapa Sawit yang merupakan perusahaan lintas daerah.

Data PBS lintas daerah dikelola oleh Dinas Perkebunan Provinsi yaitu seluas 29.586,91 Ha. Jika data yang dikeluarkan dan data penurunan disinkronkan maka terdapat peningkatan perluasan areal sebesar 17.564,84 Ha (29.586,91-12.022,06). Data luas 5 komoditi secara terperinci disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 1.19
Luas Areal Perkebunan Per Komoditi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012- 2014

No	Komoditi	2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)
1	Karet	17.407,00	17.451,50	17.907,00
2	Kelapa	1.181,51	1.176,51	1.069,52
3	Lada	970,20	875,20	268,95
4	Kelapa sawit	213.547,21	184.695,33	173.048,34
5	Nilam	-	-	-
6	Lain-lain	341,50	313,50	243,50
	Jumlah	233.447,42	204.868,62	192.846,56

Sumber : Data Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

Luas kebun di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 didominasi oleh perkebunan besar swasta 67,29 %, dibandingkan perkebunan besar negara 1,16 % dan perkebunan rakyat 31,56 % , yang terperinci seperti pada tabel berikut ini :

Tabel. 1.20
Luas Areal Perkebunan Berdasarkan Kategori Kepemilikan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2014

No	Kepemilikan Kebun	2012		2013		2014	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Perkebunan Rakyat	59.812,68	25,62	59.898,69	25,62	60.859,01	31.55
2	Perkebunan Besar Negara	2.220,00	0,95	2.220,00	0,95	2.220,00	1,16
3	Perkebunan Besar Swasta	171.414,74	73,43	142.749,93	73,43	129.767,55	67.29
	Jumlah	233.447,42	100	204.868,62	100	192.846,56	100

Sumber : Data Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

Produksi perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 meningkat, dibanding pada tahun 2013. Produksi kebun didominasi oleh produk kelapa sawit yang terperinci seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 1.21
Produksi perkebunan per komoditi di Kab. Kotawaringin Barat
Tahun 2012 - 2014

No.	Komoditi	2012 (Ton)	2013 (Ton)	2014 (Ton)	Keterangan
1.	Karet	6.481,13	8.012,06	7.619,22	Karet Kering
2.	Kelapa	356,23	358,57	343,83	Kopra
3.	Lada	426,98	316,81	268,95	Biji Kering
4.	Kelapa sawit	3.901.270,81	3.020.668,88	3.585.307,15	TBS
5.	Nilam	--	--	-	Brangkanan
6.	Lain-lain	22,30	21,50	20,24	

Sumber : Data Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

Pengembangan perkebunan dengan menggunakan tanaman tahunan yang berupa pohon, merupakan teknologi yang kompatibel dengan persyaratan ekologis, dapat memberikan fungsi hutan yang berbeda dengan hutan produksi. Pengembangan perkebunan pada dasarnya berupa membangun suasana harmonis antara unsur-unsur ekologi, ekonomi dan sosial budaya, sehingga nantinya bisa menjadi Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN).

Dalam konteks ini termasuk di dalamnya adalah pengembangan kebun sebagai sumber pangan dalam arti luas. Upaya untuk mendorong pengembangan perkebunan di daerah, pemerintah telah memberikan kemudahan bagi para investor untuk menanamkan investasinya di daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/ Permentan/ OT.140/ 9/ 2013, Tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Ijin Usaha Perkebunan.

Sampai dengan Tahun 2014 perusahaan Perkebunan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 20 perusahaan perkebunan. Perusahaan perkebunan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 1.22
Nama Perusahaan Perkebunan yang beroperasi di Kab. Ktw. Barat
s/d tahun 2014

No	Perusahaan	Komoditi	Pola Pengembangan	Lokasi Kecamatan
1	PT. Meta Epsi Agro	K. sawit	Plasma (KKPA)	Arsel, Kumai. P. Lada
2	PT. Primasentosa Pratama Putra	K. Sawit	Non PIR	P. Lada
3	PT.Persada Bina Nusantara Abadi	K. Sawit	Non PIR	Arut Utara
4	PT. Surya Indah Nusantara	K. Sawit	Non PIR	Arut Utara

No	Perusahaan	Komoditi	Pola Pengembangan	Lokasi Kecamatan
	Pagi			
5	PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi	K. Sawit	Non PIR	P.Lada-Arsel
6	PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur	K. Sawit	Non PIR	P.Banteng-Aruta
7	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah	K. Sawit	Non PIR	P. Banteng
8	PT. Agro Menara Rahmat	K. Sawit	Non PIR	Arut Selatan
9	PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona	K. Sawit	Non PIR	P.Lada-Aruta
10	PT. Bumi Langgeng Perdana Trada	K. Sawit	Inti - Plasma	Kumai
11	PT. Bangun Jaya Alam Permai	K. Sawit	Non PIR	P. Banteng- Aruta
12	PT. Mitra Mendawai Sejati	K. Sawit	Non PIR	Arut Selatan, Aruta
13	PT. Satya Kisma Usaha	K. Sawit	Non PIR	Arut Selatan
14	PT. Kalimantan Sawit Abadi	K. Sawit	Non PIR	Arsel, Kolam
15	PT. Sawit Sumber Mas Sarana	K. Sawit	Non PIR	Arsel, Aruta, Kolam
16	PT. Surya Sawit Sejati	K. Sawit	Non PIR	P. Lada, Arsel
17	PT. PTPN XIII	Karet	PIR - SUS	P. Banteng
18	PT. Bumitama Gunajaya Abadi	K. Sawit	Inti-Plasma	Ktw. Lama
19	PT. Arut Sawit Mandiri	K. Sawit	Inti-Plasma	Aruta
20	PT. Andalan Sukses Makmur	K. Sawit	Inti-Plasma	Kumai

Sumber : Data Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

Sampai dengan Tahun 2014 di Kabupaten Kotawaringin Barat telah dibangun dan operasional sebanyak 14 unit Pabrik *Crude Palm Oil* (CPO) serta 4 unit Pabrik Inti Sawit / *Palm Kernel Oil* (PKO), terperinci seperti disajikan pada tabel-tabel berikut :

Tabel. 1.23
Pabrik CPO di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Kapasitas Terpasang (Ton/Jam)	Kapasitas Terpakai (Ton/Jam)
1	PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi	Kec. P. Lada	60	60
2	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah	Kec. P. Lada	60	60
3	PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona	Kec. P. Banteng	60	60
4	PT. Surya Indah Nusantara Pagi	Kec. Arut Utara	45	45
5	PT. Sabut Mas Abadi	Kec. P. Lada	30	30
7	PT. Bangun Jaya Alam	Kec. Arut Utara	120	120

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Kapasitas Terpasang (Ton/Jam)	Kapasitas Terpakai (Ton/Jam)
	Permai			
8	PT. Sawit Sumbermas Sarana-I	Kec. Arut Selatan	90	90
9	PT. Sawit Sumbermas Sarana-II	Kec. Arut Selatan	90	90
10	PT. Kalimantan Sawit Abadi	Kec. Arut Selatan	45	45
11	PT. Bumitama Gunajaya Abadi	Kec. Kolam	90	60
12	PT. Bumi Langgeng	Kec. Kumai	45	45
13	PT. Surya Sawit Sejati	Kec. Kumai	60	60
14	PT. Mitra Mendawai Putra	Kec. Arsel	60	60

Sumber : Data Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

Tabel. 1.24
Pabrik PKO di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Kapasitas Terpasang (Ton/Jam)	Kapasitas Terpakai (Ton/Jam)
1	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah	Kec. P. Lada	7,5	7,5
2	PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona	Kec. P. Banteng	7,5	7,5
3	PT. Bangun Jaya Alam Permai	Kec. Arut Utara	15,0	15,0
4	PT. Mitra Mendawai Sejati	Kec. Arsel	7,5	7,5

Sumber : Data Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

e. Perikanan

Produksi ikan di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama ini masih bertumpu pada usaha penangkapan ikan, yaitu perairan laut dan perairan umum (sungai, danau, rawa). Peningkatan produksi ikan perairan umum berhubungan dengan permintaan pasar yang meningkat dan sumberdaya perairan umum yang potensial, maka perlu adanya peningkatan dan revitalisasi pembangunan perikanan melalui pengembangan sarana-prasarana produksi perikanan dan kelautan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih tertinggal perlu dilakukan, terutama di kawasan perairan umum dan pantai. Hal tersebut dilakukan guna peningkatan hasil usaha dan pengembangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain hal tersebut diatas, perlu juga dilakukan perlindungan dan pengembangan reservasi ikan (sungai).

Dalam perdagangan skala besar, sektor ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan nilai ekspor. Padahal dilihat dari potensi yang ada, sektor ini memiliki potensi yang besar dalam menunjang pemasukan devisa negara terutama dari perikanan laut. Adapun jumlah produksi sektor perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.25
Jumlah Produksi Sektor Perikanan Tahun 2012 - 2014

No	Komoditas	Produk	Jumlah Produksi (Ton)		
			2012	2013	2014
I	Produksi Perikanan	Perikanan Tangkap dan Budidaya	12.486,7	13.506,7	16.345,53
A.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Perikanan Tangkap	10.127,9	10.684,1	12.165,80
1	Perairan Laut	Perikanan Tangkap	9.001,50	9.511,90	10.602,1
2	Perairan Umum	Perikanan Tangkap	1.126,36	1.172,20	1.563,7
B	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Perikanan Tambak, Kolam, Keramba, dan Laut	2.358,8	2.822,6	4.179,73
1	Budidaya Air Payau	Perikanan Tambak	588,59	995,00	750,82
2	Budidaya Air Tawar	Perikanan Kolam, Keramba, Jaring Apung	1.549,88	1.740,07	3.140,66
3	Budidaya Perairan Laut	Perikanan Budidaya Laut	230,36	87,5	288,25
II	Jumlah Hasil Olahan	Pengolahan Hasil Perikanan	5.506,50	5.105	6.620

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kotawaringin Barat

Dengan panjang garis pantai 178 Km, produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 mencapai 12.165,80 ton/tahun yang terdiri dari hasil produksi perairan laut sebesar 10.602,1 ton dan perairan umum mencapai 1.563,7 ton. Jumlah kapal penangkapan ikan perairan laut terdiri dari 962 kapal ukuran 0 – 5 GT, 156 kapal ukuran 5 - 30 GT, dan 4 kapal ukuran lebih dari 30 GT. Jumlah kapal penangkapan ikan perairan umum terdiri dari 279 buah perahu tanpa motor dan 254 buah motor tempel.

Alat tangkap perairan laut terdiri dari jaring insang tetap sebanyak 254 buah, jaring tiga lapis sebanyak 379 buah, jaring insang hanyut sebanyak 212 buah, *purseine* sebanyak 28 buah, rawai sebanyak 95 buah, serok sebanyak 25 buah lain-lain sebanyak 369 buah. Alat tangkap perairan umum terdiri dari jaring insang tetap sebanyak 414 buah, bubu sebanyak 244 buah, pancing sebanyak 212 buah, rawai sebanyak 87 buah, jala tebar sebanyak 131 buah.

Potensi usaha budidaya tambak di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 35.200 Ha. Dari luasan tersebut yang sudah diusahakan dan aktif beroperasi seluas 652 Ha atau sebanyak 168 Rumah Tangga Perikanan (RTP), terdapat di Kecamatan Kumai seluas 590 Ha atau 373 unit tambak atau 147 RTP dan Kecamatan Arut Selatan 62 Ha yang terdiri dari 24 unit tambak atau 21 RTP dengan total produksi 750,81 ton, terdiri dari udang, bandeng dan ikan lainnya. Hampir 110 unit tambak rakyat tidak beroperasi lagi karena pembudidaya kekurangan modal dan sarana/prasarana masih terbatas. Di Desa Sungai Bakau tidak beroperasi karena pembangunan irigasi yang menyebabkan tambak tidak bisa dimanfaatkan lagi akibat kelebihan air tawar yang masuk ke tambak.

Untuk perkembangan usaha budidaya kolam ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah berkembang di 6 (enam) Kecamatan terdiri dari Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, Kotawaringin Lama, Kumai dan Arut Utara, terdiri dari 1.080 RTP dengan luas areal 22,92 Ha dan 2.310 unit. Hasil produksi sebesar 1.392 ton terdiri dari ikan mas, nila, lele, gurame dan patin.

Usaha budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) di Kabupaten Kotawaringin Barat berada di sepanjang daerah aliran sungai Arut dan Lamandau. Areal yang telah dimanfaatkan sebesar 5,15 Ha atau sebanyak 2.785 unit. Jumlah hasil produksi sebesar 1.719 ton terdiri dari ikan nila, patin, mas, toman, baung, bawal dan ikan lainnya.

Usaha budidaya rumput laut hanya di Desa Teluk Bogam dengan jumlah 30 RTP, luas areal 5 Ha atau sebanyak 300 unit. Jumlah produksi sebesar 288,25 ton basah. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan pembudidaya kekurangan bibit rumput laut terutama pada musim penghujan. Mereka tidak bisa mempertahankan bibit rumput laut untuk bisa dijadikan bibit setelah musim hujan berakhir.

Usaha budidaya mina padi masih belum dikembangkan, untuk menyebarluaskan usaha budidaya mina padi, pada tahun 2014 dibuat kawasan terpadu pertanian di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Pangkalan Banteng yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan juga atas keinginan dari masyarakat setempat.

Sasaran produksi usaha budidaya ikan pada tahun 2014 sebesar 4.175 ton dan mencakup rumah tangga perikanan (RTP) sebanyak 1.537 RTP, dengan rincian : jumlah unit usaha budidaya tambak 652 unit, dengan produktivitas 600-850 kg/unit, kolam ikan 1.104 unit, dengan produktivitas 200-350 kg/unit, karamba 2.622 unit dengan produktivitas 200-500 kg/unit, mina padi sebanyak 140 ha dengan produktivitas 500-700 kg/unit serta rumput laut 300 unit dengan produktivitas 3.500-5.000 kg basah/unit.

Perkembangan pengendalian mutu dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum masih sangat minim sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilihat dari jumlah unit pengolahan, pabrik es dan lain sebagainya yang mendukung kegiatan pengendalian mutu dan pemasaran hasil perikanan. Namun demikian dalam beberapa tahun ini usaha untuk meningkatkan mutu produk hasil perikanan serta perluasan pasar ikan telah banyak diusahakan, antara lain :

1. Pembangunan gedung outlet pemasaran ikan;
2. Pengadaan alat penampung ikan, alat penghancur es, ice storage, long pan dan ice can;
3. Pengadaan box dingin (*cool box*) untuk menjaga rantai dingin;
4. Pembangunan pasar ikan;

5. Peralatan outlet pemasaran ikan.

Pengendalian mutu produk hasil perikanan sangat bergantung pada sarana rantai dingin, hal ini karena produk perikanan merupakan jenis produk yang mudah busuk (*Ferisablefood*) dimana perlu terjaga rantai dingin dari pasca penangkapan/pasca budidaya hingga sampai ke konsumen. Untuk itu mutlak dibutuhkan es yang begitu banyak, dengan jumlah produksi ikan mencapai 6.620 ton pertahun baik Odari penangkapan maupun budidaya berarti diperlukan sekurangnya 10.210 ton es per tahun. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi bidang pengolahan dan pembinaan mutu untuk memberikan fasilitas dan sarana guna menunjang rantai dingin produk hasil perikanan.

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 difokuskan pada pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan penertiban ijin usaha perikanan. Hasil pengawasan lapangan berupa pelarangan penggunaan alat/bahan penangkap ikan yang dilarang seperti strum, tuba, *trawl* dan potasium sebanyak 2 kasus, dan perijinan usaha penangkapan ikan 1 kasus.

Salah satu program pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat mendesak adalah pembentukan daerah suaka perikanan, dimana hal ini sangat penting guna menjaga dan melestarikan sumberdaya kelautan dan perikanan dari kerusakan yang tidak diinginkan. Pada perkembangan beberapa tahun ini telah pula disusun zonasi/daerah sumberdaya kelautan.

Beberapa potensi sumberdaya kelautan yang dapat dikelola menjadi daerah suaka antara lain :

1. Gosong Senggora;
2. Gosong Sepagar;
3. Gosong Sebogor-Lubang Buaya;
4. Danau Masorayan;
5. Danau Seluluk;
6. Danau Terusan;
7. Danau Gatal Kiri-Kanan.

f. Pariwisata

Secara umum Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Potensi wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup beraneka ragam jenisnya. Secara garis besar, jenis wisata yang ditawarkan, yaitu :

1. Wisata alam, antara lain : Taman Nasional Tanjung Puting, Air Terjun Patih Mambang, Arung Jeram, Danau Gatal dan Danau Masorayan;
2. Wisata sejarah/budaya/religi, antara lain : Istana Kuning, Astana Alnursari Kotawaringin, Masjid Kyai Gede, Palagan Sambu, Istana Mangkubumi, Batu Patahan dan Tiang Pantar.

3. Wisata Bahari, antara lain : Pantai Kubu, Tanjung Keluang, Pantai Teluk Bogam, dan Tanjung Penghujan.

Obyek wisata Taman Nasional Tanjung Puting adalah salah satu obyek wisata Taman Nasional yang sudah menjadi *icon* dunia, dimana jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2013 sebanyak 8.439 orang dan tahun 2014 meningkat menjadi 11.000 orang. Jumlah wisatawan nusantara tahun 2013 sebanyak 4.916 orang dan tahun 2014 meningkat menjadi 5.035 orang, sedangkan lama kunjungan wisatawan meningkat, dari 1 hari menjadi 2 - 3 hari.

Obyek wisata sejarah, budaya dan religi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Istana Kuning, Istana Mangkubumi, Kolam Pemandian Putri Raja dan Makam Raja-Raja Kutaringin yang terletak di tengah kota Pangkalan Bun. Astana Al Nursari, Masjid Kyai Gede dan Makam Kyai Gede terletak di Kecamatan Kotawaringin Lama.

Obyek wisata alam dan pantai di Kabupaten Kotawaringin yaitu obyek wisata Bugamraya yang terdiri dari Taman Wisata Alam Tanjung Penghujan, Pantai Kubu, Pantai Tanjung Keluang, Gosong Senggora dan Air Terjun Patih Mambang, dengan alamnya yang asli. Kunjungan wisatawan ke obyek wisata Bugamraya pada tahun 2013 sebanyak 48.366 orang dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 57.031 orang.

Tabel 1.26
Potensi Objek Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Objek Yang Dinikmati	Ciri Khas Yang Ditonjolkan
1	Pantai Kubu dan Tanjung Keluang	Kec. Kumai	Alam	Keindahan alam
2	Pantai Teluk Bogam	Kec. Kumai	Alam	Keindahan Alam
3	Tanjung Penghujan	Kec. Kumai	Alam	Keindahan Alam
4	Istana Kotawaringin	Kec. Ktw. Lama	Sejarah/Budaya	Barang Kuno/Antik peninggalan Kerajaan Islam Pertama di Kalteng
5	Istana Kuning	Kec. Arut Selatan	Sejarah/Budaya	Kerajaan yang dipindahkan dari Kotawaringin
6	Mesjid Kyai Gede	Kec. Ktw. Lama	Sejarah/Budaya	Mesjid Kuno Peninggalan Kerajaan Islam Pertama di Kalteng
7	Tudung Saji dan Batu Kecubung	Kec. Arut Selatan	Budaya/Seni	Nilai Seni
8	Taman Nasional Tanjung Puting	Kec. Kumai	Alam	Keindahan alam, serta Pusat Rehabilitasi Orang Utan dan Satwa Langka lainnya

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Objek Yang Dinikmati	Ciri Khas Yang Ditonjolkan
9	Pantai Sei Uambang	Kec. Kumai	Alam	Keindahan Alam
10	Danau Burung	Kec. Kumai	Alam	Keindahan Alam
11	Danau Gatal	Kec. Ktw. Lama	Alam	Keindahan Alam
12	Upacara Tiwah	Kec. Arut Utara	Budaya	Upacara Tradisional Suku Dayak
13	Riam Senamang	Kec. Arut Utara	Alam	Keindahan Alam
14	Palagan Sambu	Kec. Arut Utara	Sejarah	Nilai Sejarah

Sumber : Laporan Penyusunan Data Base Spasial Potensi Pariwisata Kalimantan Tengah

g. Komoditas Unggulan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi pengembangan ekonomi yang sangat tinggi. Hal ini selain terlihat dari potensi sumber daya alamnya yang melimpah, juga dibuktikan dengan pertumbuhan ekonominya yang selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut ditopang oleh beberapa sektor yang memberikan kontribusi cukup signifikan melalui komoditi/ produk/ jenis usaha unggulannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) unggulan di Kabupaten Kotawaringin Barat telah ditetapkan sejumlah KPJU yang telah unggul dalam sejumlah kriteria tertentu dalam mencapai tujuan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing serta pertumbuhan ekonomi di masa datang, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.27
Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	KPJU	Skor Terbobot	No.	KPJU	Skor Terbobot
	Pertanian/ Tanaman Pangan			Pertambangan dan Bahan Galian	
1.	Padi Sawah	0,313	1.	Emas	0,324
2.	Jagung Manis	0,226	2.	Batu Gunung	0,213
3.	Kacang Tanah	0,216	3.	Pasir Zirkon	0,174
4.	Ubi Kayu	0,127	4.	Tanah Urug	0,157
5.	Ubi Jalar	0,118	5.	Pasir Batu	0,132
	Pertanian/ Hortikultura			Industri Pengolahan	
1.	Sawi	0,405	1.	Amplang	0,344
2.	Pisang	0,201	2.	Roti	0,268
3.	Kacang Panjang	0,184	3.	Kue Jajanan	0,160
4.	Nangka	0,109	4.	Batako	0,122
5.	Rambutan	0,101	5.	Batu Bata	0,106

No.	KPJU	Skor Terbobot	No.	KPJU	Skor Terbobot
	Pertanian/ Perkebunan			Perdagangan	
1.	Kelapa Sawit	0,358	1.	Pakaian Jadi	0,233
2.	Karet	0,320	2.	Ikan	0,232
3.	Kelapa (dalam)	0,132	3.	Toko Sembako	0,182
4.	Lada	0,126	4.	Emas	0,177
5.	Jabon	0,064	5.	Sayuran	0,176
	Pertanian/ Peternakan			Pariwisata, Hotel dan Restoran	
1.	Sapi Pedaging	0,389		Warung Kopi	0,308
2.	Ayam Ras Pedaging	0,344		Hotel (melati)	0,231
3.	Ayam Buras	0,122		Wisata Alam	0,208
4.	Walet	0,088		Rumah Makan	0,156
5.	Entog (itik)	0,058		Losmen	0,097
	Pertanian/ Perikanan			Transportasi	
1.	Ikan Nila (kolam)	0,258	1.	Angkutan Barang	0,306
2.	Ikan Mas (kolam)	0,220	2.	Angkutan Antar Kota	0,263
3.	Ikan Patin (kolam)	0,219	3.	Taksi	0,157
4.	Ikan Lela Dumbo (kolam)	0,158	4.	Angkutan Kota	0,145
5.	Kerang (tangkap)	0,145	5.	Speed Boat	0,129
	Kehutanan (non kayu)			Konstruksi dan Jasa Usaha	
1.	Rotan	0,321	1.	Tukang Batu	0,263
2.	Kayu Gembor	0,227	2.	Tukang Bangunan	0,245
3.	Nipah	0,202	3.	Bengkel Motor	0,225
4.	Gaharu	0,168	4.	Jasa Cuci Mobil	0,198
5.	Damar	0,081	5.	Buruh Harian	0,069

Sumber : Penelitian Pengembangan KPJU Unggulan oleh Bank Indonesia Th.2013

Dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan serta titik kekuatan dan titik kritis terhadap KPJU unggulan maka telah direkomendasikan beberapa masukan sebagai berikut:

a. Padi Sawah

Rekomendasi bagi pelaku UMKM dengan menggunakan varietas atau bibit unggul yang sesuai dengan kondisi alam setempat, sehingga hasil yang akan diperoleh akan lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi. Selain itu dapat pula dengan membranding beras sendiri dengan gaya yang lebih baik. Bagi Instansi Pemerintah Terkait dengan memberikan bantuan modal dan teknologi modern serta dengan pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam budidaya padi sawah.

b. Karet

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah meningkatkan kualitas dengan penggunaan bibit berkualitas dan proses pemeliharaan yang baik. Selain itu membentuk klaster karet dan asosiasi petani karet. Bagi Instansi Pemerintah Terkait, upaya yang dapat ditempuh dengan peningkatan transparansi harga, penguatan teknologi dan inovasi di setiap lini produk. Selain itu pendirian pabrik pengolahan karet di wilayah yang belum tersedia serta proyek pengadaan industri karet setengah jadi sehingga tidak menjual bahan mentah saja. Bagi Perbankan pendirian perbankan pada setiap kecamatan yang belum tersedia, sehingga mempermudah akses permodalan.

c. Kelapa Sawit

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah meningkatkan kualitas produk. Penting sekali bagi pembudidaya dalam memperhatikan bibit yang digunakan berkualitas atau tidak. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah menyediakan bibit unggul, pengembangan bibit unggul bersama pelaku UMKM secara mandiri, pengadaan pabrik pengolahan sawit di wilayah yang belum tersedia, peningkatan pelatihan sosialisasi teknik budaya. Bagi Perbankan dengan meningkatkan kemudahan akses permodalan, dan sosialisasi besaran kredit pembiayaan.

d. Sapi Pedaging

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah mengembangkan agribisnis pembibitan sapi potong, pemanfaatan sumber daya lokal potensial yang ada di lokasi usaha yang tersedia dengan mudah dan harga murah, mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan budidaya . Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah memfasilitasi dan advokasi terutama dalam dukungan modal, inovasi teknologi, pembinaan kepada petani terkait teknik pembibitan serta manajemen usaha, dan mendatangkan sapi betina untuk pembibitan sapi. Bagi Perbankan dengan pemberian bantuan modal.

e. Ayam Ras Pedaging

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah dengan pengadaan bibit dan pakan secara mandiri. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah dengan pembinaan dan pelatihan untuk pembibitan ayam potong dan pembuatan pakan yang baik, berkualitas, efektif dan efisien dalam pembiayaan. Bagi perbankan adalah mempermudah akses permodalan yaitu dengan membangun jaringan perbankan di lokasi-lokasi yang belum tersedia.

f. Ikan Patin (kolam)

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah meningkatkan kualitas produk dan membangun pembibitan patin. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan penggunaan bibit unggul, efisiensi dalam proses budidaya, baik dalam pembuatan kolam, pengawasan kualitas air, proses pengiriman yang sesuai standar serta melakukan inovasi produk olahan dari ikan patin. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah pemberian pelatihan dan pembinaan dalam

pembibitan ikan patin dan teknik budidaya yang baik, efisien dan berdaya hasil maksimal. Bagi perbankan dengan memberikan bantuan kredit syari'ah dalam pengembangan usaha budidaya maupun pembibitan patin.

g. Ikan Nila (kolam)

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah menekan biaya produksi dengan mencari alternatif bahan baku yang lebih murah namun tetap berkualitas.

Hal tersebut dapat pula ditempuh dengan membuat pakan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Selain itu dapat pula memasuki segmen pasar baru serta meningkatkan cakupan distribusinya, meningkatkan produk olahanyang bervariasi dan berdaya saing. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah dukungan modal dan inovasi teknologi terutama dalam pembuatan pakan ikan, pembinaan dan pelatihan kepada petani terkait teknik budidaya dan pengolahan pakan. Bagi perbankan dengan menyediakan fasilitas pinjaman tanpa bunga dapat menjadi solusi bagi petani ikan agar memudahkan mereka dalam pembudidayaan.

B. Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat

a. Struktur Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat

Struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2011 – 2014 masih menunjukkan kecenderungan yang relatif sama, dimana sektor pertanian merupakan andalan dan unggulan dalam menggerakkan roda perekonomian. Pada 2014 kontribusi sektor pertanian mencapai 42,42 persen dari seluruh produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Berlaku (HB). Angka tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 40,88. Peningkatan ini disebabkan oleh peranan kontribusi Sektor Pertanian khususnya pada Sub Sektor Bahan Makanan, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan yang kesemuanya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran menempati urutan kedua terbesar dalam besaran kontribusi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014, yaitu sebesar 15,61 persen. Posisi ketiga dalam struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 ini ditempati oleh Sektor Industri Pengolahan 13,20 persen.

Sektor Transportasi dan Komunikasi menempati posisi keempat terbesar dalam hal kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 yaitu sebesar 9,61 persen. Posisi kelima dalam memberi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 yaitu Sektor Jasa-jasa dengan kontribusi mencapai 9,00 persen disusul oleh Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 5,95 persen.

Keenam sektor-sektor tersebut diatas menempati kontribusi pada urutan pertama sampai dengan keenam yang merupakan sektor-sektor yang sangat besar mempengaruhi naik turunnya laju pertumbuhan PDRB 2014 Kabupaten

Kotawaringin Barat secara signifikan. Sedangkan tiga sektor lainnya memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB 2014, yakni posisi ketujuh dengan kontribusi sebesar 2,83 persen adalah sektor bangunan, posisi delapan sektor pertambangan dan penggalan dengan kontribusi 1,05 persen dan yang terakhir dengan kontribusi sebesar 0,33 persen adalah sektor listrik, gas dan air bersih.

Tabel 1.28
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d. 2014* Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Kotawaringin Barat
(dalam jutaan rupiah)

NO	SEKTOR	2011		2012		2013		2014*	
		Rp	%	Rp	%	(RP)	%	(RP)	%
1	PERTANIAN	1.195.488,75	42,94	1.258.734,85	42,30	1.336.833,87	41,86	1.445.222,16	42,22
2	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	37.702,37	1,35	39.884,33	1,34	42.210,74	1,32	31.463,79	0,92
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	420.686,93	15,11	447.815,86	15,05	484.196,82	15,16	491.414,53	14,35
4	LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	9.949,11	0,36	10.783,14	0,36	10.912,82	0,34	8.969,59	0,26
5	BANGUNAN	103.135,81	3,70	111.523,67	3,75	122.773,57	3,84	131.885,72	3,85
6	PERDAG, HOTEL & RESTORAN	463.390,86	16,65	502.790,17	16,90	522.214,22	16,35	555.730,83	16,23
7	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	232.062,93	8,34	252.536,82	8,49	287.667,38	9,01	308.693,98	9,02
8	KEU, PERSEWAAN & JASA PERUSH.	104.408,68	3,75	118.643,57	3,99	136.946,05	4,29	174.817,14	5,11
9	JASA-JASA	217.104,46	7,80	233.203,99	7,84	249.857,41	7,82	275.173,03	8,04
	TOTAL PDRB	2.783.929,90	100,00	2.975.916,40	100,00	3.193.612,88	100	3.423.370,77	100

* Perhitungan Proyeksi

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat 2014

Tabel 1.29
Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2011 S.D 2014*
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotawaringin Barat
(dalam jutaan rupiah)

NO	SEKTOR	2011		2012		2013		2014*	
		(RP)	%	(RP)	%	(RP)	%	(RP)	%
1	PERTANIAN	2.188.125,90	42,58	2.464.350,70	42,03	2.766.013,39	40,88	3.350.910,65	42,42
2	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	83.329,50	1,62	95.115,69	1,62	107.498,80	1,59	82.804,54	1,05
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	725.446,04	14,12	813.316,98	13,87	945.348,33	13,87	1.042.355,12	13,20
4	LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	20.123,83	0,39	22.948,73	0,39	22.954,73	0,34	26.242,35	0,33
5	BANGUNAN	150.611,07	2,93	169.986,59	2,90	193.891,63	2,87	223.438,74	2,83
6	PERDAG, HOTEL & RESTORAN	833.405,04	16,22	967.646,05	16,50	1.110.593,45	16,41	1.232.701,51	15,61
7	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	452.059,37	8,80	524.414,26	8,94	645.243,53	9,54	759.461,91	9,61
8	KEU, PERSEWAAN & JASA PERUSH.	226.575,16	4,41	275.901,08	4,71	354.709,18	5,24	470.270,67	5,95
9	JASA-JASA	458.995,92	8,93	530.154,18	9,04	619.527,90	9,16	710.961,54	9,00
	TOTAL PDRB	5.138.671,83	100,00	5.863.834,26	100,00	6.765.780,93	100	7.899.147,04	100

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat 2014

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 sampai 2013 cenderung memperlihatkan trend positif. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 6,56 persen, tahun 2011 naik menjadi 6,93 persen, tahun 2012 sedikit melambat menjadi 6,89 persen, dan tahun 2013 naik signifikan menjadi 7,55 persen sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

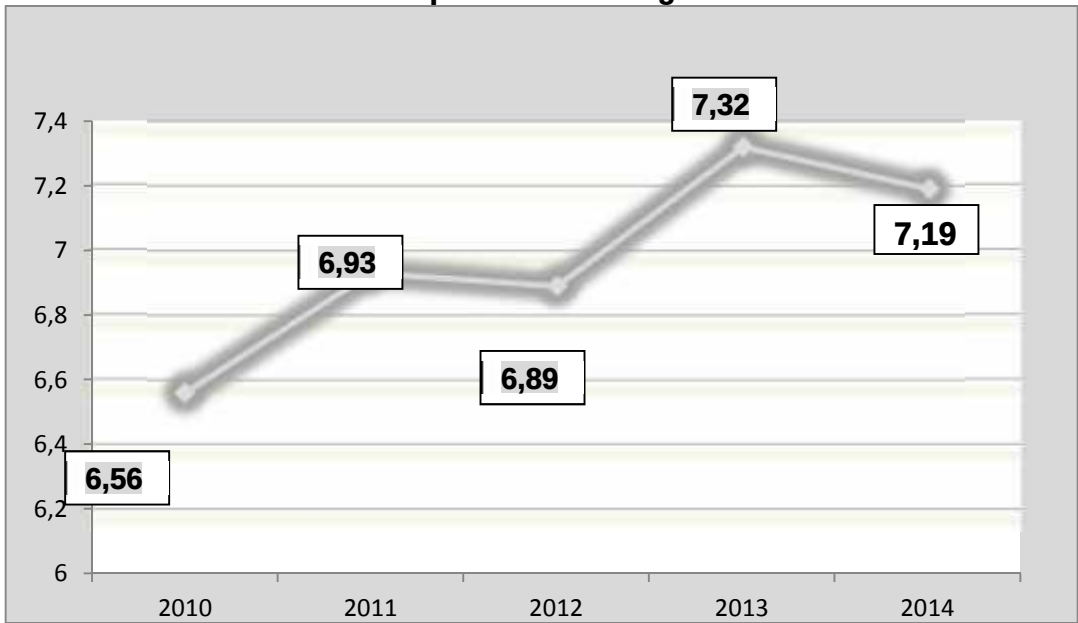
Tabel 1.30
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Sektor
Tahun 2010 - 2014 (Persen)

S e k t o r		2010	2011	2012*)	2013**)	2014***)
(1)		(2)	(3)	(4)		
1.	Pertanian	5,25	5,34	5,28	6,22	8,11
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,04	7,62	5,79	5,83	-25,46
3.	Industri Pengolahan	6,03	6,75	6,45	8,12	1,49
4.	Listrik dan Air Bersih	8,75	9,33	8,38	1,20	-17,81
5.	Bangunan	8,40	6,13	8,13	10,09	7,42
6.	Perdagangan, hotel dan Restoran	8,46	6,50	8,50	3,86	6,42
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5,21	13,97	8,78	13,95	7,31
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perush.	16,22	16,52	13,63	15,43	27,65
9.	Jasa-jasa	7,82	5,98	7,42	7,14	10,13
Pertumbuhan Ekonomi		6,56	6,93	6,89	7,32	7,19

Sumber : PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 (BPS)

Secara umum pertumbuhan tiap sektor pada tahun 2014 berada diatas 5 persen kecuali sektor pertambangan dan penggalian serta sektor listrik dan air bersih yang pertumbuhannya negatif . Sektor-sektor yang relatif tinggi pertumbuhannya dan berada diatas total pertumbuhan rata-rata adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 27,65 persen; sektor Jasa-jasa 10,13 persen, sektor pertanian 8,11 persen, sektor bangunan 7,41 persen dan sektor pengangkutan dan komunikasi 7,31 persen. Kelima sektor ini merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014. Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat selama empat tahun terakhir dapat terlihat pada grafik berikut :

Grafik 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 – 2014



Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat 2014

c. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB perkapita Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2010 PDRB perkapita sebesar 19,07 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 yang masing-masing sebesar 20,98 juta rupiah tahun 2011, 23,17 juta rupiah tahun 2012, kemudian pada tahun 2013 menjadi 25,94 juta serta pada tahun 2014 meningkat menjadi 29,29 juta rupiah. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Kotawaringin Barat seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.31
PDRB Perkapita Kotawaringin Barat Tahun 2010 - 2013 (Rp)

Tahun	2010	2011	2012*	2013**	2014**
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	
1. PDRB ADH Berlaku (Juta Rp.)	4.509.800	5.138.672	5.863.834	6.765.780	7.899.147
2. PDRB Perkapita (Rp.)	19.072.710	20.982.735	23.177.210	25.940.476	29.296.355
3. Produk Domestik Regional Netto Atas Biaya Faktor Produksi (Juta Rp.)	3.984.870	4.540.544	5.181.299	5.986.984	6.804.193

Sumber : PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 (BPS)

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan pendapatan setiap penduduk disuatu wilayah, namun belum dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan penyebaran pendapatan masyarakat di setiap strata ekonomi dalam wilayah tersebut.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 VISI DAN MISI

2.1.1 VISI

Setiap perencanaan strategis memerlukan fokus yaitu visi. Visi dapat dikatakan semacam “tujuan” yang dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholders* (pemerintah dan non pemerintah) berkontribusi pada pencapaian visi. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih ke depan. Visi merupakan keadaan “ideal”, sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (*setting*) daerah di masa depan.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2012-2016, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT YANG SEJAHTERA,
BERKEADILAN, DAN JAYA”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan :

1. **Kesejahteraan Rakyat**, terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. **Keadilan**, terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia
3. **Jaya**, terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

2.1.2 MISI

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 3 (tiga) poin sebagai berikut :

1. Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan

Visi Kabupaten Kotawaringin Barat 2006 – 2010 yaitu Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan dengan Masyarakatnya yang Maju, Aman, Damai, Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan, harus terus dilanjutkan. Hakekat visi tersebut adalah menuju

terwujudnya masyarakat Kotawaringin Barat yang sejahtera. Hal ini searah dengan tujuan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan akhir dari pembentukan Negara Indonesia adalah Kesejahteraan masyarakat.

Momentum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat yang sangat mengesankan tumbuh rata rata 6,56 persen periode tahun 2005 – 2009 harus tetap dipertahankan dan terus dipacu lebih tinggi lagi. Dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dimungkinkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat diwujudkan.

Kesejahteraan tidak hanya diukur secara material tetapi juga secara rohani yang memungkinkan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif. Tuntutan perbaikan kesejahteraan telah memasuki tahapan baru. Kita tidak bisa sekedar menciptakan lapangan kerja. Kita harus menciptakan lapangan kerja yang mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik secara ekonomi maupun harkat hidup manusia. Rakyat berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan ini hanya dapat diciptakan bila ekonomi tumbuh cukup tinggi, sehat, dan dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik, efisien, dan terus menjaga keadilan.

Kemajuan ekonomi, juga telah mendorong perubahan struktural, misalnya pembangunan yang mendorong terciptanya urbanisasi baik akibat kemajuan maupun akibat perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi disamping merefleksikan kemajuan, memberikan pula tugas tambahan bagi pemerintah dalam melayani rakyatnya. Pembangunan infrastruktur perkotaan jauh lebih mahal dan kompleks dibandingkan di daerah perdesaan. Karakteristik masyarakat perkotaan yang lebih heterogen, memerlukan fasilitas publik yang makin beragam pula.

Pembangunan infrastruktur perhubungan darat dan laut terus ditingkatkan, untuk menjawab tuntutan kemajuan ekonomi masyarakat dan mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian halnya perhubungan darat terutama untuk percepatan akses kecamatan dengan antar desa dan antar wilayah.

2. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Adil dan Jaya.

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, perlu didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama

antar sektor, antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.

Keberpihakan pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan Kecamatan Arut Utara dan Kotawaringin Lama.

Keadilan dalam pembangunan, juga perlu ditunjukkan dengan pembangunan yang merata di semua bidang, baik pembangunan antara wilayah pusat pemerintahan/ perkotaan dan desa yang diseimbangkan pertumbuhannya baik dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional, maupun pembangunan di berbagai bidang yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Di sisi lain, pembangunan perdesaan harus terus didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja. Pada kawasan yang berbasis pertanian dan kelautan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui : penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan. Selanjutnya peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja; serta intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.

Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan perundangan, pendanaan, serta sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal. Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.

Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, kita harus terus melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Kita juga harus terus meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

Untuk mewujudkan peningkatan peran kaum perempuan dalam pembangunan, maka peran kaum perempuan di sektor publik harus terus kita tingkatkan. Tentu saja, kita juga harus terus memperluas ruang untuk meningkatnya peran, keterlibatan aktif dan bahkan kepemimpinan kaum perempuan di luar pemerintahan, di dunia usaha dan organisasi sosial.

3. Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat

Kebijakan pemerintah memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan keunggulan spesifik daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Seluruh potensi Kabupaten Kotawaringin Barat baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, kekayaan budaya, nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat harus dapat menjadi sumber daya pembangunan untuk meningkatkan kemajuan dan kejayaan masyarakat.

Penguatan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan unsur penting proses demokrasi. Dalam lima tahun terakhir ini, proses demokrasi yang makin matang dan makin dewasa, ditandai dengan keberhasilan pemilihan Presiden, DPR, DPD, Bupati, DPRD, telah dipilih langsung oleh rakyat. Di era reformasi dan demokratisasi saat ini, penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/representasi kekuasaan diwujudkan dengan meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik.

Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis perlu terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.

Karena itulah, peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui penguatan desentralisasi dan otonomi daerah, meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan jaya.

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Persoalan dan dimensi pembangunan yang dihadapi akan selalu berubah dan makin kompleks. Permasalahan dan tuntutan pembangunan yang dihadapi pun, akan bertambah banyak, sementara kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas. Dalam menentukan pilihan tersebut, pemerintah harus realistis dan harus menghindari diri dari membuat janji-janji yang sejak semula disadari tidak bisa dipenuhi

Disadari bahwa banyak faktor yang bersifat eksogen (di luar kendali pemerintah) akan mempengaruhi capaian suatu rencana pembangunan. Faktor eksogen, bisa mempermudah pencapaian atau sebaliknya dapat pula menyebabkan sasaran yang ingin dicapai tidak terpenuhi atau hanya terpenuhi sebagian.

Tidak ada yang akan mampu memperkirakan kemungkinan terjadinya faktor eksogen tersebut. Walaupun demikian, beberapa perubahan eksogen ini dapat dikendalikan. Sebagian dapat dimitigasi dan diubah ke arah yang menguntungkan dengan kebijakan yang tepat. Upaya keras dan langkah antisipasi yang tepat akan menjadi tekad pemerintah yang akan datang untuk mencapai sasaran yang disebutkan di bawah ini.

1. Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan

Pemerintah daerah akan bertekad untuk melanjutkan proses percepatan pembangunan ekonomi selama lima tahun kedepan. Diharapkan dengan momentum pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir rata-rata 6,56 persen dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga di sekitar 2 persen pada akhir tahun 2016. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan absolut menjadi sekitar 2 persen pada akhir 2016.

Dalam bidang pendidikan, sasaran pembangunan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan, yang antara lain di tandai oleh : (a) menurunnya jumlah penduduk yang buta huruf; (b) meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun dan pemantapan rintisan program belajar pendidikan lanjutan 12 tahun ; dan (c) berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.

Sementara di bidang kesehatan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan. Dalam bidang pangan, terciptanya kemandirian dalam bidang pangan pada akhir tahun 2016 ditandai dengan meningkatnya ketahanan pangan rakyat, berupa : (a) perbaikan status gizi ibu dan anak pada golongan masyarakat yang rawan pangan; (b) membaiknya akses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan; (c) meningkatnya produksi beras dan komoditas pangan utama lainnya; (d) menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat kelompok pendapatan menengah bawah; (e) menjaga nilai tukar agar petani dapat menikmati kemakmuran.

Bidang energi, sasaran lebih ditujukan untuk pengembangan energi listrik di kecamatan dan pedesaan terpencil. Lingkungan hidup yang hendak dicapai adalah perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti penting lingkungan hidup. Bidang infrastruktur,

meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi dan air bersih.

Dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah, meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses terhadap modal termasuk perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), meningkatkan bantuan teknis di bidang pengembangan produk, pemasaran, pelaksanaan kebijakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, dan menjaga fungsi dan keberadaan serta efisiensi pasar tradisional.

2. Perkuatan Pembangunan Demokrasi

Penegakan pilar demokrasi memiliki sasaran agar dapat terbangun dan makin memantapkan sistem demokrasi yang dapat menghasilkan pemerintahan dan lembaga legislatif yang kredibel, bermutu, efektif, dan mampu menyelenggarakan amanah dan tugas serta tanggung jawabnya secara baik.

Dengan demikian, fungsi *checks and balances* dapat dilakukan secara santun, beretika, dan efektif, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak terhambat oleh mekanisme dan sistem demokrasi, namun justru akan makin meningkat kualitas hasil dan akuntabilitasnya. Sasaran di bidang ini juga untuk menjamin setiap lima tahun terselenggaranya proses pemilu yang memenuhi asas-asas demokrasi yang baik yaitu jujur, adil, dan menjamin seluruh warga negara pemilih dapat melaksanakan hak pilihannya secara bebas dan bertanggung jawab.

3. Program Penegakan Hukum.

Penegakan Hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi yang berkualitas, dan juga mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisien, sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (*rule of law*) dan terjaganya ketertiban umum.

2.1.4 AGENDA PEMBANGUNAN

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan 2012-2016, ditetapkan 4 (empat) agenda utama pembangunan tahun 2012-2016, yaitu :

1. Agenda pertama, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. Agenda kedua, perbaikan tata kelola pemerintahan;
3. Agenda ketiga, penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi;
4. Agenda empat, pembangunan yang inklusif dan berkeadilan;

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Kotawaringin Barat sebagai daerah pengembangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan di semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.
3. Arah kebijakan umum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengarah pada peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan sumber daya aparatur yang profesional memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa negara dan masyarakat. Percepatan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Barat 2012 – 2016, terdapat 4 (empat) agenda pembangunan. Selanjutnya dibawah ini diuraikan tujuan, sasaran, strategi, dan program dari masing-masing agenda pembangunan dimaksud.

AGENDA I

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan merupakan salah satu agenda terpenting dalam pemerintahan daerah Kotawaringin Barat periode Tahun 2012-2016. Hal ini mengingat bahwa sampai saat ini pencapaian kesejahteraan ekonomi belum sepenuhnya mampu mewujudkan hasil yang diinginkan. Penyebabnya antara lain proses pembangunan partisipatif belum banyak diterapkan sehingga keinginan meningkatkan perekonomian daerah yang dilandasi pada keunggulan potensi SDA dan SDM daerah belum teraktualisasi secara konkrit.

Dilandasi oleh pemikiran tersebut, agenda pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat meliputi upaya-upaya sebagai berikut : (1)

Menumbuhkembangkan pertanian, agribisnis, dan agroindustri yang berwawasan

lingkungan dengan keterkaitan yang kuat antara pertanian dan industri serta perdagangan; (2) Meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam pengembangan perekonomian; (3) Rehabilitasi dan peningkatan pembangunan infrastruktur pada jalur strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi; (4) Peningkatan investasi non-fisik melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia yang terlibat di setiap bidang perekonomian unggulan daerah.

Pembangunan ekonomi juga tidak bisa dilepaskan dari kesadaran global yang semakin meningkat terhadap integrasi antara roda pembangunan dengan preservasi dan peningkatan kualitas fungsi lingkungan hidup agar terwujud keseimbangan, keselarasan dan keberlanjutan sistem penyangga ekosistem kehidupan. Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan suatu kawasan lingkungan hidup dalam suatu sistem meliputi fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang secara otomatis dan alami merupakan subsistem lingkungan regional, nasional dan dunia.

Oleh karenanya adalah sangat krusial dalam pembangunan daerah periode 2012-2016 untuk senantiasa melakukan langkah-langkah yang diperlukan seperti : peningkatan kualitas fungsi kawasan lindung (Hutan Lindung, Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa); Konservasi kawasan budidaya; dan AMDAL untuk setiap pemanfaatan sumberdaya alam pada kawasan budidaya (Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, Kawasan pengembangan produksi, pemukiman dan penggunaan lainnya, areal transmigrasi, rencana areal transmigrasi, kawasan khusus, danau dan sungai).

Untuk melaksanakan Agenda I maka disusunlah serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang saling terkait satu sama lain, dirumuskan berdasarkan pendekatan *Specific, Measurable, Acceptable, Reasonable, Time Bounding* (SMART) dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan

-) Meningkatkan PDRB dan *income* perkapita;
-) Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi;
-) Meningkatkan daya saing ekonomi;
-) Mengembangkan infrastruktur perekonomian;

Sasaran

-) Meningkatnya sumbangan masing-masing sektor terhadap PDRB;
-) Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk;
-) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah;
-) Meningkatnya kemampuan teknis, manajerial dan permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
-) Meningkatnya kerjasama antar pelaku usaha;
-) Keberpihakan pada usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah;
-) Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk lokal;
-) Meningkatnya kemampuan daya saing produk lokal;

-) Penataan pedagang kaki lima (PKL);
-) Tercukupinya sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah;
-) Terwujudnya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Strategi

-) Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif;
-) Adanya komitmen untuk berpihak pada usaha ekonomi mikro kecil dan menengah;
-) Memfasilitasi promosi dan peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal;
-) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana ekonomi;
-) Meningkatkan pemberdayaan potensi SDA dan SDM lokal berorientasi pasar secara berkelanjutan.

Kebijakan

-) Peningkatan pelayanan perijinan usaha;
-) Pengembangan pertanian berwawasan agribis;
-) Menumbuhkembangkan koperasi dan asosiasi-asosiasi usaha;
-) Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha;
-) Penguatan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi;
-) Pendirian BUMD bidang perbankan/perkreditan;
-) Mendorong peningkatan mutu produk;
-) Mendorong legalitas lembaga dan sertifikasi produk lokal;
-) Peningkatan promosi produk unggulan daerah;
-) Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya;
-) Penataan PKL;
-) Peningkatan penguasaan dan apresiasi masyarakat terhadap IPTEK dan jiwa kewirausahaan;
-) Peningkatan kemampuan menghasilkan, mengolah dan memasarkan berbagai jenis produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang mampu berdaya saing nasional dan internasional;
-) Mempertahankan keseimbangan ekosistem sehingga mampu menjaga kelestarian alam sebagai sumber dari segala sumber daya kehidupan manusia yang berkelanjutan;
-) Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dengan memperhatikan dan tetap menjaga kelestariannya;
-) Pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara efisien, optimal, adil dan terjaganya keseimbangan ekosistem sehingga mampu menjaga kelestarian alam sebagai sumber dari segala sumber daya kehidupan manusia yang berkelanjutan;

-) Peningkatan kualitas fasilitas dan sarana fisik penunjang sektor-sektor perekonomian kerakyatan.

AGENDA II

PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Krisis ekonomi yang lalu tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu, reformasi birokrasi akan terus dilaksanakan di seluruh lembaga pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh.

Reformasi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah dan pemberantasan korupsi. Untuk melaksanakan Agenda II maka disusunlah serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang saling terkait satu sama lain, dirumuskan berdasarkan pendekatan SMART dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan

-) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan baik.

Sasaran:

-) Meningkatnya tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
-) Meningkatnya kedisiplinan, profesionalisme dan produktivitas aparatur;
-) Meningkatnya kualitas pelayanan public;
-) Meningkatnya kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Strategi:

-) Peningkatan kapasitas aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
-) Peningkatan pengawasan, monitoring dan evaluasi kinerja;
-) Terwujudnya pelayanan prima;
-) Pengembangan paradigma pembangunan dan partisipatif dan berkelanjutan.

Kebijakan:

-) Meningkatkan tertib administrasi dan kearsipan;
-) Meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme dan produktifitas aparatur;
-) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
-) Menata dan mengembangkan wilayah administratif melalui pemekaran wilayah;
-) Meningkatkan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;
-) Mengupayakan peningkatan anggaran pendapatan daerah;
-) Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas anggaran belanja daerah.

AGENDA III**PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN**

Pelaksanaan pembangunan pada periode 2006-2010 telah meletakkan fondasi keadilan. Hasil yang telah dicapai antara lain tercermin pada penurunan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran serta tercapainya berbagai sasaran lain dalam *Millenium Development Goals (MDG's)*. Penyelenggaraan program pembangunan yang inklusif dan berkeadilan akan dilaksanakan seiring dengan upaya pemerataan pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peningkatan pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang makin berkualitas, yaitu pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi. Peningkatan pendidikan ditujukan pada upaya perluasan cakupan partisipasi anak didik, perbaikan kualitas tenaga pendidik, perbaikan sarana prasarana penunjang pendidikan, kerjasama dengan pendidikan tinggi dan optimalisasi peran sekolah kejuruan sebagai basis pembentukan tenaga-tenaga terampil siap kerja yang dibekali dengan kemampuan mengoptimalkan potensi daerah Kotawaringin Barat.

Adapun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ditujukan untuk tercapainya peningkatan kapasitas dan kemampuan bangsa dalam memadukan sumber daya alam (*resource based*), sumber daya pengetahuan (*knowledge based*) dan sumber daya yang berasal dari warisan tradisi budaya bangsa (*culture based*).

Dalam bidang ekonomi, keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan, atau terjadinya proses afirmasi terhadap kelompok yang tertinggal, orang cacat, dan terpinggirkan. Dalam bidang sosial-politik, perwujudan keadilan keikutsertaan (inklusif) dapat berupa perbaikan akses semua kelompok terhadap kebebasan berpolitik, kesetaraan gender dalam politik dan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi.

Proses perencanaan yang bersifat *bottom-up* dan inklusif telah dipraktekkan dalam beberapa program, misalnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Masyarakat dilibatkan sejak proses perencanaan, pemilihan proyek hingga evaluasi. Di sini pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi komponen

yang amat penting. Dengan pola ini masyarakat akan merasa lebih memiliki dan secara sukarela akan menjalankannya dan sekaligus mendapatkan manfaat dari program tersebut. Perluasan cakupan program PNPM diharapkan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat perdesaaan dan kecamatan.

Dalam lima tahun ke depan, penguatan dimensi keadilan dan keikutsertaan akan dilakukan untuk setiap kegiatan atau program pembangunan. Diharapkan modal sosial masyarakat ini meningkatkan mutu proses perencanaan partisipatif di Kotawaringin Barat. Untuk melaksanakan Agenda III maka disusunlah serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang saling terkait satu sama lain, dirumuskan berdasarkan pendekatan SMART dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan

-) Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
-) Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumberdaya manusia;
-) Mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran;
-) Meningkatkan ketahanan pangan;
-) Mengendalikan pertumbuhan penduduk;
-) Meningkatkan moralitas dan kepedulian sosial;
-) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pengarusutamaan gender.

Sasaran

-) Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas, murah dan merata;
-) Meningkatnya kesehatan lingkungan;
-) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
-) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia;
-) Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, murah dan merata;
-) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan;
-) Menurunnya jumlah penduduk miskin;
-) Menurunnya jumlah pengangguran usia produktif;
-) Stabilitas ketersediaan pangan masyarakat;
-) Meningkatnya moralitas masyarakat;
-) Meningkatnya kepedulian sosial;
-) Terwujudnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

Strategi

-) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan pendidikan;
-) Meningkatkan minat dan budaya baca;
-) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan;
-) Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan;

- J Peningkatan akseptor KB;
- J Peningkatan keimanan, ketakwaan dan kesalehan sosial;
- J Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan;
- J Pengarusutamaan kesetaraan gender secara proporsional.

Kebijakan

- J Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan;
- J Meningkatkan penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat untuk keluarga miskin
- J Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan;
- J Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- J Meningkatkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah;
- J Meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam pembangunan pendidikan;
- J Memberdayakan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- J Mensinergikan berbagai program pengentasan kemiskinan;
- J Mengurangi kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar wilayah;
- J Menjaga kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat;
- J Meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kesalehan sosial;
- J Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial;
- J Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan;
- J Meningkatkan keterwakilan dan peran serta perempuan dalam sektor publik;
- J Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- J Mengembangkan seni budaya, olahraga, dan peranan pemuda dan wanita.

AGENDA IV

PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI DAN PENEGAKAN HUKUM

Wujud dari Kabupaten Kotawaringin Barat yang demokratis adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya *checks and balances*, jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan gender.

Selama ini, konsolidasi demokrasi telah dilakukan dengan menjamin kebebasan berpendapat, menghormati hak asasi manusia, serta terus menjaga berjalannya proses *checks and balances*. Lembaga-lembaga demokrasi terus diperkuat dengan cara memberikan contoh dan menegakkan nilai-nilai demokrasi, misalnya dengan menjaga kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mengutamakan supremasi hukum.

Demokrasi harus terus dijaga agar berada pada arah yang benar, yaitu demokrasi yang *egaliter*. Selain itu, di dalam konsolidasi demokrasi telah berhasil dilakukan pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun lokal. Pembangunan demokrasi diarahkan untuk mencapai tingkat demokrasi yang substansial. Namun, sebelum bisa beranjak kepada demokrasi substansial harus diselesaikan terlebih dahulu semua masalah prosedural misalnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang membawa persoalan, baik di dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala negara dan kepala daerah. Ke depan, berbagai usaha perbaikan harus dilakukan, sebelum melangkah menuju demokrasi substansial.

Sistem yang demokratis juga harus disertai tegaknya "*rule of law*." Kepastian hukum akan memberikan rasa aman, rasa adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat. Karenanya penegakan hukum akan membawa dampak yang positif bagi perbaikan iklim investasi yang pada gilirannya akan memberi dampak positif bagi perekonomian.

Selain itu, wujud dari agenda hukum adalah menjamin proses peradilan yang bebas. Hal ini semua akan membantu di dalam upaya konsolidasi demokrasi. Penegakan hukum merupakan elemen yang sangat penting di dalam pemberantasan korupsi. Untuk melaksanakan Agenda IV maka disusunlah serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang saling terkait satu sama lain, dirumuskan berdasarkan pendekatan SMART dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan

-) Menciptakan suasana yang kondusif bagi stabilitas keamanan, politik dan pemerintahan.

Sasaran:

-) Menurunnya kriminalitas dan konflik di masyarakat;
-) Terciptanya stabilitas politik dan pemerintahan;
-) Berjalannya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian daerah.

Strategi:

-) Penciptaan suasana kondusif;
-) Penegakan supremasi hukum dan HAM.

Kebijakan:

-) Penataan peraturan hukum ;
-) Perlindungan HAM;
-) Konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik;
-) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
-) Menekan angka kasus kriminalitas dan konflik di masyarakat

-) Menjaga angka kasus kriminalitas dan konflik di masyarakat;
-) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
-) Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai gangguan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat;
-) Meningkatkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan keamanan kepada masyarakat.

2.3 PRIORITAS DAERAH

Program pembangunan daerah disusun berdasarkan visi, misi, strategi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016, selanjutnya dirumuskan kedalam program prioritas yang merupakan langkah-langkah strategis paling penting dalam rangka mencapai visi misi Bupati Kotawaringin Barat terpilih. Program yang diprioritaskan adalah sebagai berikut :

PRIORITAS 1 : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT

Dalam jangka panjang, peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya akan dicapai jika kualitas dan akses pendidikan meningkat. Pengalaman sejarah menunjukkan peningkatan akses pendidikan seluas-luasnya merupakan cara yang efektif untuk memperkecil kesenjangan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Fokus Program aksi Pendidikan adalah :

1. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika;
2. Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBD, pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau sampai dengan pendidikan 12 tahun pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA;
3. Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras;
4. Meneruskan perbaikan kualitas guru, agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya. Diupayakan sebelum 2016 seluruh guru telah berpendidikan S1;
5. Memperluas penerapan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan;
6. Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan;

7. Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal;
8. Meningkatkan peran pendidikan kejuruan.

PRIORITAS 2 : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kesehatan merupakan komponen penting dalam investasi sumber daya manusia. Tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau akan mengubah perilaku manusia. Oleh karena itu, fokus utama program bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Menyempurnakan dan memantapkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, maupun penataan administrasi yang transparan dan bersih;
2. Peningkatan kebudayaan pola hidup sehat;
3. Menyediakan obat dalam kuantitas yang memadai;
4. Meneruskan dan meningkatkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Imanudin;
5. Meningkatkan kualitas ibu dan anak di bawah lima tahun dengan memperkuat program yang sudah berjalan seperti posyandu yang memungkinkan imunisasi dan vaksinasi masal seperti *Depteri Pertusis Tetanus (DPT)* dapat dilakukan secara efektif. Diharapkan dalam lima tahun mendatang, semua anak sudah mendapatkan vaksin DPT dan campak sehingga tingkat kematian bayi dan balita lebih cepat dari sasaran dalam MDG's;
6. Penurunan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan *Tuberculosis (TBC)*;
7. Mengurangi tingkat prevalensi gizi buruk balita menjadi di bawah 15 % pada tahun 2016;
8. Revitalisasi program keluarga berencana, pengendalian pertumbuhan penduduk ini diharapkan mengubah paradigma kuantitas menjadi kualitas dalam keluarga;
9. Pengembangan sistem insentif bagi tenaga medis dan paramedis yang bertugas di daerah terpencil;
10. Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika profesi dan perlindungan masyarakat;
11. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan cara pencegahannya untuk mencegah kepanikan dan jatuhnya banyak korban.

PRIORITAS 3: PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pertumbuhan ekonomi sesungguhnya tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. Oleh karena itu, di samping terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka sejumlah intervensi yang efektif dan terarah perlu terus dilakukan.

Kebijakan diarahkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang mencakup terpenuhinya **10 (sepuluh) hak dasar** bagi penduduk dalam menjalankan kehidupannya, meliputi : (1) kecukupan dan mutu pangan, (2) akses dan mutu layanan kesehatan, (3) akses dan mutu layanan pendidikan, (4) akses layanan air bersih, (5) kesempatan kerja dan pengembangan usaha, (6) akses layanan perumahan dan sanitasi, (7) kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, (8) kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, (9) jaminan rasa aman dan (10) partisipasi dalam kebijakan publik.

Dengan demikian, maka program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui beberapa program aksi sebagai berikut :

1. Meneruskan, meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sebagai inti dari program penanggulangan kemiskinan yang bercirikan program yang memberdayakan masyarakat, terdesentralisasi dan implementasi program disesuaikan dengan kebutuhan lokal dengan perencanaan yang bersifat *bottom-up* pada tingkat akar;
2. Mengembangkan program Desa Mandiri yang difokuskan pada desa-desa tertinggal agar tidak terjadi kesenjangan kemajuan yang semakin luas, melalui sektor-sektor pembangunan utama, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta menumbuhkan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal;
3. Penyempurnaan data keluarga miskin dan memutakhirkan data rumah tangga sasaran. Data rumah tangga sasaran akan diintegrasikan untuk semua program afirmasi dan subsidi sehingga berbagai duplikasi dapat dihindari;
4. Pemantapan dan penyempurnaan Program Jagung Hibrida yang difasilitasi pemerintah daerah meliputi penyediaan akses modal, bimbingan teknis pertanian, pengolahan hasil, sampai dengan pemasaran;
5. Penyediaan beras murah bagi keluarga miskin untuk menjamin ketahanan pangan;
6. Melaksanakan dan memperkuat program nasional seperti : Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM, Beras Miskin (Raskin) yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat;
7. Pemihakan kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, antara lain dengan penguatan peran dan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera untuk memberikan akses modal bagi masyarakat kecil.

PRIORITAS 4 : PROGRAM PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

Empat masalah utama dalam pasar yaitu: (1) persentase sektor informal yang relatif tinggi; (2) adanya kesenjangan upah sektor formal informal; (3) penurunan produktivitas tenaga kerja, terutama di sektor manufaktur; dan (4) kecenderungan peningkatan pengangguran terbuka pada kelompok umur muda.

Upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga 2 % pada akhir tahun 2016, maka program ketenagakerjaan akan menekankan pada :

1. Peningkatan kualitas pekerja baik dilihat dari upah yang diterima, produktivitas dan standar kualifikasinya untuk dapat memperluas peningkatan kesempatan di sektor formal, serta mengurangi jumlah pengangguran terbuka usia muda, dengan mengintegrasikan program prioritas ini dengan program prioritas bidang pendidikan;
2. Peningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta;
3. Perbaikan iklim usaha dan pemihakan kepada perbaikan kesempatan berusaha kepada sektor usaha kecil menengah sebagai tiang penyerap tenaga kerja;
4. Membangun infrastruktur fisik yang dapat memperlancar arus lalu-lintas barang dan informasi, serta mendorong program industrialisasi yang dapat menarik industri lanjutan (PMDN, PMA) untuk berinvestasi;
5. Memperluas dan meningkatkan industri kreatif dan pariwisata sebagai sumber potensi perekonomian rakyat.

PRIORITAS 5 : PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR

Infrastruktur mempunyai peran strategis baik dalam mewujudkan kesejahteraan maupun dalam memperkecil kesenjangan dan memperbaiki keadilan. Selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah telah berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar ke depan akan diarahkan pada :

1. Mempercepat pembangunan jalan darat untuk membuka keterisolasian;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan wilayah kecamatan;
3. Melanjutkan pengembangan pelabuhan *multipurposes*, pelabuhan *RoI On – RoI Off (ro-ro)*, dan serta pelabuhan samudera guna mendukung percepatan perekonomian daerah;
4. Pembangunan Bandara Internasional secara bertahap mengantisipasi kemajuan perekonomian daerah;
5. Peningkatan fasilitas Kabupaten dan Kecamatan;
6. Peningkatan dan Perluasan Pasar Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
7. Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

PRIORITAS 6 : PROGRAM KETAHANAN PANGAN

Pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar kepada upaya peningkatan produksi pangan beras dan bahan pangan lainnya, serta diversifikasi konsumsi pangan. Program aksi peningkatan pangan meliputi antara lain :

1. Memperbaiki infrastruktur pertanian meliputi pembangunan dan perbaikan irigasi, saluran air, dan pelabuhan yang menghubungkan produksi pangan dan tujuan pasar;
2. Meningkatkan kualitas input baik dengan dukungan penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat dijaga;
3. Menjamin pelaksanaan subsidi pupuk, agar tidak terjadi kelangkaan, dan penggunaan pupuk subsidi kepada yang tidak berhak;
4. Peningkatan dan penyempurnaan program Jagung Hibrida agar petani memperoleh peningkatan pendapatan dan kesejahteraan;
5. Penguatan dan pemberdayaan petani, nelayan, petambak dan menjaga daya beli dan nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani namun tidak memberatkan konsumen yang berpendapatan rendah;
6. Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian melalui Badan Usaha Milik Daerah Agrotama Mandiri yang telah dibentuk;
7. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan petani melalui program peningkatan penyuluh pertanian.

PRIORITAS 7 : PROGRAM ENERGI

Program dalam sektor energi diarahkan pada upaya peningkatan diversifikasi, distribusi serta akses energi sehingga masyarakat mampu memperoleh energi sesuai kebutuhan dan kemampuan daya belinya. Perhatian lebih besar ditujukan untuk menyediakan energi listrik bagi desa tertinggal.

PRIORITAS 8 : PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan, secara garis besar ditujukan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah dan pelayanan publik, serta penguatan aksi anti korupsi, dilakukan melalui antara lain :

1. Penguatan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas kinerja aparatur daerah;
2. Program perbaikan peraturan yang menyangkut rekrutmen, perkembangan karier secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (*merit based*), serta aturan disiplin dan pemberhentian pegawai negeri sispil;
3. Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja (*business process*), pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan dan

menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan;

4. Melakukan pengawasan kinerja dan termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan Standar Pelayanan Minimal;
6. Penyesuaian dan perbaikan kesejahteraan pegawai.

PRIORITAS 9 : PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Implementasi agenda reformasi penegakan hukum akan dilakukan ke dalam dua aksi yaitu reformasi penegakan hukum (*rule of law*) dan penegakan ketertiban umum.

PRIORITAS 10: PROGRAM PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan baik di antara kelompok masyarakat dan kelompok penghasilan, antar daerah, dan antar jender. Program aksi yang inklusif dan berkeadilan meliputi :

1. Penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dengan perluasan akses kredit untuk UMKM melalui fasilitasi pemerintah daerah dalam mengakses modal. Penguatan Bank Perkreditan Rakyat untuk membantu usaha mikro, penciptaan dan pendidikan bagi para pengusaha dan *entrepreneur* baru kecil dan menengah di daerah-daerah, mendukung inovasi dan kreativitas masyarakat dan pengusaha dalam menciptakan produk, mengemas, memasarkan dan memelihara kesinambungan dalam persaingan yang sehat. Menciptakan kebijakan yang berpihak pada usaha kecil menengah baik dalam kebijakan produksi, distribusi, dan penggunaan anggaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk aktivitas BUMD;
2. Mengurangi kesenjangan antar desa dengan melakukan terus menerus perbaikan kebijakan Alokasi Dana Desa;
3. Mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal dan daerah perbatasan terluar dan terpencil;
4. Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan. Meningkatkan partisipasi perempuan di segala bidang baik dalam proses pembuatan kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan;

PRIORITAS 11 : PROGRAM LINGKUNGAN HIDUP

Program di bidang lingkungan hidup bertujuan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan menjaga kesinambungan daya dukung

alam terhadap aktivitas ekonomi dan masyarakat. Program aksi lingkungan hidup meliputi :

1. Memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan dan mencegah bencana alam dengan melakukan reboisasi, penghutanan kembali, dan perbaikan daerah aliran sungai;
2. Mengembangkan strategi pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable*) sesuai dengan tujuan untuk mengurangi ancaman dan dampak perubahan iklim global khususnya melalui upaya pengurangan emisi karbon baik di sektor kehutanan, energi, transportasi, kelautan, dan pertanian;
3. Mengajak seluruh masyarakat luas, rumah tangga maupun dunia usaha untuk aktif menjaga lingkungan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

PRIORITAS 12: PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA

Pengembangan budaya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki budaya dan peradaban luhur dan mampu menjaga jati diri ditengah pergaulan global :

1. Menjaga suasana kebebasan kreatif dibidang seni dan keilmuan;
2. Menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan keilmuan yang bersifat non-komersial;
3. Memberikan insentif kepada kegiatan kesenian dan keilmuan untuk mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal dan nasional serta modern dan tradisional.

PRIORITAS 13: PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BERBASIS AGROPOLITAN

Latar belakang pelaksanaan program pengembangan agribisnis berbasis agropolitan adalah bersumber dari beberapa permasalahan sistem agribisnis, yakni: (1) belum terintegrasi dan berkembang optimalnya sistem agribisnis; (2) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem agribisnis; dan (3) kurang sesuai model agribisnis yang dikembangkan dengan karakter masing-masing daerah pertanian akibat keterbatasan partisipasi petani dalam perencanaan model agribisnis, sisa-sisa pola pengembangan yang bersifat *top-down* yang masih dipertahankan; serta generalisasi model yang kurang tepat.

Pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan sektor utama jika dilihat dari produktivitas pertaniannya yang cukup besar dan kontribusinya terhadap PDRB.

Langkah dari program pengembangan agribisnis berbasis agropolitan :

1. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan produksi komoditas pertanian yang dapat dipasarkan sebagai bahan baku industri pengolahan maupun untuk komoditas ekspor;
2. Mensinergikan potensi dari setiap sistem usaha agribisnis mulai dari sub-sistem hulu, *off-farm*, *on-farm*, hilir, pemasaran, dan usaha penunjangnya, secara maju,

- berkelanjutan, dan terdesentralisasi, melalui pengembangan agropolitan yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah;
3. Menetapkan pusat agribisnis dan unit-unit kawasan pengembangannya yang terintegrasi dalam bentuk keterkaitan antar wilayah (pergerakan barang, modal dan manusia);
 4. Menyediakan infrastruktur pendukung.

PRIORITAS 14 : PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI

Perkembangan investasi pada sektor industri di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan signifikan. Namun demikian masih banyak sektor lain yang masih potensial untuk dikembangkan, sehingga sangat membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan potensi daerah.

Salah satu kendala pelaksanaan investasi di daerah adalah adanya aturan dari pusat yang sampai saat ini masih dalam proses sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan regulasi yang tepat untuk lebih memberikan daya tarik bagi investor. Kondisi tersebut telah menyebabkan turunnya minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan investasi, baik untuk melakukan kegiatan ekspansi usaha yang telah ada maupun untuk merintis investasi baru. Kondisi ini perlu ditangani secara cepat agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas terutama dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini lebih banyak didominasi oleh konsumsi daripada investasi atau ekspor.

PRIORITAS 15 : PROGRAM PENATAAN RUANG WILAYAH

Penataan ruang adalah merupakan kerangka strategis dalam mengelola dan mengatur sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta sebagai upaya untuk mentransformasikan ruang yang ada serta tendensinya menuju ke arah suatu struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang kondusif guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Struktur dan pola penataan ruang wilayah pada dasarnya merupakan pedoman dalam merumuskan kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

Dari sisi pengembangan wilayah, perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat memperlihatkan beberapa fenomena antara lain: belum selarasnya hubungan perkotaan dan perdesaan, ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah/disparitas yang terjadi antar wilayah.

Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mengoptimalkan peran penataan ruang sebagai media koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

BAB III**KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH****3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH****3.1.1 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH.**

Masalah anggaran pendapatan daerah merupakan masalah yang kompleks, oleh karena itu besar kecilnya anggaran berdampak luas terhadap pembangunan ekonomi. Selain hal tersebut pemerintah daerah dihadapkan pada bagaimana mengoptimalkan penerimaannya, mengingat adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam mengelola penerimaannya. Sumber penerimaan daerah terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya;
2. Pendapatan Asli Daerah;
3. Dana Perimbangan;
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Memperhatikan beberapa komponen penerimaan daerah di atas, maka penting untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, mengingat PAD merupakan sumber pendapatan yang strategis bagi daerah apabila mampu digali dan dikelola secara optimal, tanpa mengabaikan sumber-sumber pendapatan yang lain. PAD terdiri dari beberapa pos penerimaan, seperti :

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; serta
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan mampu meningkatkan pendapatan baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun melalui Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah, maka pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah seperti :

- a. Melakukan Identifikasi penerimaan pajak daerah berdasarkan tingkat pertumbuhan sektor formal maupun informal;
- b. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu upaya peningkatan penerimaan daerah dari sisi pajak daerah dan retribusi Daerah di berbagai sektor formal maupun informal;
- c. Membangun dan mengembangkan perusahaan daerah yang bergerak di bidang perkebunan dan jasa;
- d. Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;

- f. Pengembangan kerjasama baik dalam hal upaya peningkatan pendapatan maupun pengelolaan asset daerah;
- g. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, peningkatan profesionalisme aparatur dan lain-lain.

Berdasarkan pasal 25 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah dikelompokkan atas 3 (tiga) kelompok :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Upaya-upaya peningkatan penerimaan daerah baik berupa Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah hendaknya tidak menambah beban masyarakat yang dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Maka pilihan yang terbaik adalah melakukan penyederhanaan pungutan, memperkecil jumlah tunggakan, dan menegakkan sanksi hukum bagi para penghindar pajak.

PAD merupakan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli dan hasil usaha daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok ini dirinci lagi berdasarkan sumbernya, yaitu :

- Pajak Daerah;
- Retribusi Daerah;
- Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dana Perimbangan dari Pusat dan Provinsi merupakan pendapatan yang berasal dari sumber pengalokasian dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Penganggaran dana perimbangan bertujuan untuk memberikan kepastian dalam penyusunan APBD, dan mengurangi/memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah, untuk mendanai pelaksanaan kegiatan yang merupakan kewenangan dan tanggungjawab pusat kepada daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
 - Bagi Hasil Pajak
 - Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- b. Dana Alokasi Umum.
- c. Dana Alokasi Khusus.

Lain-lain Pendapatan yang sah merupakan pendapatan yang berasal dari sumber selain dari PAD, Dana Perimbangan dari Pusat dan Dana Perimbangan dari Provinsi. Memperhatikan beberapa hal di atas intensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui intensifikasi pendataan dari subyek dan objek pendapatan yang potensial, namun belum tergarap dengan optimal serta memperbaiki kinerja pemungutan, penyempurnaan administrasi, peningkatan mutu atau SDM pegawai serta penyempurnaan peraturan yang menjadi dasar pemungutan.

Ekstensifikasi pendapatan dilakukan dengan memperluas subjek dan objek pendapatan daerah serta penyesuaian terhadap besaran pendapatan atau tarif yang telah ada.

3.1.2 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH.

Dari Target Anggaran yang telah direncanakan sebesar **Rp. 1.010.072.414.400,00** maka telah berhasil terealisasi sebesar **Rp. 1.012.105.155.890,39** atau **100,20%**. Secara umum pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar **112,10%** dan Dana Perimbangan terealisasi sebesar **98,65%**, sedangkan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terealisasi **124,60%** sebagaimana tergambar pada **tabel 3.1** berikut ini :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014
(Untuk Periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1.	PENDAPATAN	1.010.072.414.400,00	1.012.105.155.890,39	2.032.741.490,38	100,20
1.1	Pendapatan Asli Daerah	108.764.611.000,00	121.929.676.088,15	13.165.065.088,15	112,10
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	27.636.518.000,00	24.317.570.203,77	(3.318.947.796,23)	87,99
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	12.128.846.000,00	12.880.041.242,50	751.195.242,50	106,19
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.051.541.300,00	5.051.549.447,77	8.147,77	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	63.947.705.700,00	79.680.515.194,11	15.732.809.494,11	124,60
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	740.159.464.000,00	743.476.846.280,00	3.317.382.280,00	100,45
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN	740.159.464.000,00	743.476.846.280,00	3.317.382.280,00	100,45
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	91.725.000.000,00	95.042.382.280,00	3.317.382.280,00	103,62
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	33.400.000.000,00	31.342.100.818,00	(2.050.676.337,00)	93,86
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	58.325.000.000,00	63.693.058.617,00	5.368.058.617,00	109,20

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1.2.1.1.3	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	-	7.222.845,00	7.222.845,00	
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	597.665.464.000,00	597.665.464.000,00	-	100
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	50.769.000.000,00	50.769.000.000,00	-	100
1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	52.629.271.000,00	52.629.271.000,00	-	100
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus				
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	52.629.271.000,00	52.629.271.000,00	-	100
1.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	84.559.068.400,00	67.737.996.932,24	(16.821.071.467,76)	84,50
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	84.559.068.400,00	67.737.996.932,24	(16.821.071.467,76)	84,50
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	8.700.000.000,00	10.200.000.000,00	1.500.000.000,00	175
1.3.1	Hibah	2.000.000.000,00	3.500.000.000,00	1.500.000.000,00	175
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat				
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi	6.700.000.000,00	6.700.000.000,00	-	100
1.3.4	Pendapatan Lainnya				
JUMLAH		1.010.072.414.400,00	1.012.105.155.890,39	2.032.741.490,39	100,20

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kab. Ktw. Barat,
untuk periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014

Lebih lanjut dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar **Rp. 121.929.676.088,15** atau **112,10%** dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 108.764.611.000,00** Adapun Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut terbagi atas :

1) *Pajak Daerah.*

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari sumber Pajak Daerah adalah sebesar **Rp. 24.317.570.203,77** atau **87,99%** dari target sebesar **Rp. 27.636.518.000,00.**

2) *Retribusi Daerah.*

Realisasi Pendapatan dari yang berasal sektor Retribusi Daerah sebesar **Rp. 12.880.041.242,50** atau **106,19%** dari yang telah ditargetkan sebesar **Rp. 12.128.846.000,00.**

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan.

Realisasi Pendapatan dari Pos ini adalah sebesar **Rp. 5.051.549.447,77** atau **100,00%** dari target sebesar **Rp. 5.051.541.300,00**.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Realisasi penerimaan dari pos ini untuk periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 adalah sebesar **Rp. 79.680.515.194,11** atau **124,60%** dari target sebesar **Rp. 63.947.705.700,00**.

b. Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2014 untuk periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 adalah sebesar **Rp. 743.476.846.280,00** atau **100,45%** dari target sebesar **Rp. 740.159.464.000,00**.

Adapun realisasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

1.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Realisasi untuk pos ini adalah sebesar **Rp. 95.042.382.280,00** atau **103,62%** dari target sebesar **Rp. 740.159.464.000,00**.

1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar **Rp. 597.665.464.000,00** atau **100,00%** dari target sebesar **Rp. 597.665.464.000,00**.

1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar **Rp. 50.769.000.000,00** atau **100,00%** dari target sebesar **Rp. 50.769.000.000,00**.

1.4 Cukai Tembakau

Realisasi penerimaan sebesar **Rp. 7.222.845,00** dari target sebesar Rp 0 (tidak ditargetkan).

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Lain-lain yang Sah untuk periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 adalah sebesar **Rp. 146.698.633.522,24** atau **91,03%** dari target sebesar **Rp. 161.148.339.400,00** yang bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah.

Realisasi dari Pendapatan Hibah **Rp. 17.260.000.000,00** atau **113,73%** dari target sebesar **Rp. 19.631.365.590,00**.

b. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Realisasi dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya **Rp. 67.737.996.932,24** atau **80,10%** dari target sebesar **Rp. 84.559.068.400,00**.

c. Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Realisasi dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus **Rp. 52.629.271.000,00** atau **100,00%** dari target sebesar **Rp. 52.629.271.000,00**.

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Realisasi dari Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya adalah sebesar **Rp. 6.700.000.000,00** atau **100%** dari target sebesar **Rp. 6.700.000.000,00**.

3.1.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dari kondisi umum Pendapatan Daerah sebagaimana tergambar pada tabel 3.1 di atas secara keseluruhan mampu mencapai target yang direncanakan, namun terdapat sejumlah sumber penerimaan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan untuk periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 secara keseluruhan sebesar **112,10%**.

a.1. Pajak Daerah

Target penerimaan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2014 adalah **Rp. 27.636.518.000,00** dengan realisasi untuk periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar **87,99%** atau **Rp. 24.317.570.203,77**.

Komponen yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

a.1.1. Pajak Hotel.

Realisasi penerimaan Pajak Hotel untuk periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 hanya sebesar **Rp. 708.677.310,58** atau **59,30%** dari target sebesar **Rp. 1.195.000.000,00**

Tidak tercapainya target ini disebabkan adanya wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

a.1.2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya untuk periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar **Rp. 6.499.973.440,20** atau **103,17%** dari target sebesar **Rp. 6.300.000.000,00**.

a.1.3. Pajak Bumi dan Bangunan

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk periode

Rp. 3.244.376.063,00 atau **76,68%** dari target sebesar **Rp. 4.230.518.000,00**.

Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam pemenuhan kewajibannya.

a.1.4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Realisasi penerimaan Pajak BPHTB untuk periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 hanya sebesar **Rp. 1.436.164.461,00** atau **47,87%** dari target sebesar **Rp. 3.000.000.000,00**.

Hal ini disebabkan Nilai Jual Objek Pajak sangat jauh dengan harga pasar sebenarnya.

a.1.5. Pajak Air Tanah

Realisasi penerimaan Pajak Air Tanah untuk periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 hanya sebesar **Rp. 3.605.960,00** atau **9,01%** dari target sebesar **Rp. 40.000.000,00**.

Hal ini disebabkan potensi yang ada belum optimal terdata dan tergali.

a.2. Retribusi Daerah

a.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Tidak tercapainya target ini disebabkan terutama adanya larangan pemungutan obyek retribusi pada Taman Nasional Tanjung Puting.

Berdasarkan rincian uraian tersebut di atas masih perlu adanya penambahan aparatur yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengoptimalkan pemungutan agar target yang ditetapkan dapat tercapai, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pemungutan secara optimal.

3.2 Pengelolaan Belanja Daerah.

3.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Dengan memperhatikan berbagai kemajuan yang dicapai dan kendala yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2013 serta prakiraan dinamika kondisi Tahun 2014, masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2014 antara lain :

1. Belum optimalnya peningkatan mutu pendidikan;
2. Terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dibidang pendidikan dan kesehatan;
3. Masih rendahnya jaminan sosial bagi pendidikan dan kesehatan;
4. Belum optimalnya penyebaran bursa kerja;

5. Masih belum optimalnya dukungan infrastruktur dalam membuka isolasi daerah dan kantong – kantong produksi;
6. Belum optimalnya fungsi administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Masih lemahnya ketahanan pangan daerah dan belum optimalnya pembangunan pertanian dalam arti luas, yang ditandai dengan rendahnya produktivitas dan kurangnya diversifikasi komoditas;
8. Belum optimalnya upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
9. Belum maksimalnya upaya penegakan hukum terhadap kegiatan yang bersifat ilegal, seperti : kegiatan *illegal fishing* dan *illegal minning*;
10. Belum optimalnya upaya peningkatan pendapatan daerah yang tidak menimbulkan tambahan beban masyarakat dan terhambatnya kegiatan perekonomian daerah;
11. Belum optimalnya pembangunan sektor kepariwisataan sebagai andalan daerah.

Dari berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2014, maka prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diupayakan mengacu pada prioritas nasional dan Provinsi pada Tahun 2014 dengan harapan terciptanya pembangunan yang terintegrasi dengan capaian yang maksimal, Prioritas tersebut yaitu :

1. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan;
2. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan;
3. Program Penanggulangan Kemiskinan;
4. Program Penciptaan Lapangan Kerja;
5. Program Pembangunan Infrastruktur Dasar;
6. Program Ketahanan Pangan;
7. Program Energi;
8. Program Tata Kelola Pemerintahan.
9. Program Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi;
10. Program Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan;
11. Program Lingkungan Hidup;
12. Program Pengembangan Budaya;
13. Program Pengembangan Agribisnis Berbasis Agropolitan;
14. Program Peningkatan Iklim Investasi;
15. Program Penataan Ruang Wilayah.

Belanja Daerah Tahun anggaran 2014 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja tidak Langsung. Orientasi penyusunan APBD Tahun 2014 disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil). Hal

tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran.

Oleh karena itu orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah tanpa meninggalkan keseimbangan antara penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik. Dana yang disediakan dalam APBD 2014 dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

3.2.2. Target dan Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 adalah sebesar **Rp. 1.054.386.956.575,30** atau **94,62%** dari anggaran yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar **Rp. 1.113.961.783.800,00** Realisasi belanja daerah terdiri dari Belanja Langsung sebesar **Rp. 702.361.020.500,00** atau sebesar **93,98%** dan Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 411.600.763.300,00** atau sebesar **95,72%** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014
(Untuk periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
2	BELANJA DAERAH	1.113.961.783.800,00	1.054.041.112.594,30	(59.920.671.205,70)	94,62
2.1	Belanja Tidak Langsung	411.600.763.300,00	393.997.082.307,00	(17.603.680.993,00)	95,72
2.1.1	Belanja Pegawai	360.879.241.000,00	350.333.883.370,00	(10.545.357.630,00)	97,08
2.1.4	Belanja Hibah	5.419.631.000,00	5.167.862.437,00	(251.768.563,00)	95,35
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.108.700.000,00	2.934.400.000,00	(1.174.300.000,00)	71,42
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.866.132.000,00	2.576.672.200,00	(289.459.800,00)	89,90
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	34.924.068.300,00	32.890.044.300,00	(2.034.024.000,00)	94,18
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.402.991.000,00	94.220.000,00	(3.308.771.000,00)	2,77
2.2	Belanja Langsung	702.361.020.500,00	660.044.030.287,30	(42.316.990.212,70)	93,98
2.2.1	Belanja Pegawai	52.684.874.519,00	48.537.215.797,00	(4.147.658.722,00)	92,13
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	249.711.964.710,00	218.602.174.503,43	(31.109.790.206,57)	87,54
2.2.3	Belanja Modal	399.964.181.271,00	392.904.639.986,87	(7.059.541.284,13)	98,23
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.113.961.783.800,00	1.054.041.112.594,30	(59.920.671.205,70)	94,62

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kab. Ktw. Barat,
untuk periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014

1. Pengelolaan Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan untuk periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 adalah sebesar **Rp. 160.101.467.644,91** atau **100,27%** dari target yang dianggarkan yaitu sebesar **Rp. 159.677.576.906,91** yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SILPA) sebelumnya (Tahun Anggaran 2013) sebesar **Rp. 212.479.089.224,41** serta Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar **Rp. 209.243.285,00**.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2014 hanya dipergunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar **Rp. 6.500.000.000,00** terdiri dari penyertaan modal (investasi) ke Bank KAL-TENG, penyertaan modal ke PDAM, serta penyertaan modal ke Agrotama Mandiri.

c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto yaitu selisih dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto untuk periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 adalah sebesar **Rp. 153.601.909.876,91** atau **100,28%** dari target yang dianggarkan sebesar **Rp. 153.177.576.906,91**.

3.2.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pencapaian target realisasi belanja adalah kegiatan menumpuk diakhir tahun anggaran, sehingga mempengaruhi target serapan belanja yang telah ditetapkan, serta berpengaruh juga terhadap sektor riil.

Solusi permasalahan diatas perlu dilakukan langkah-langkah dalam percepatan penyerapan anggaran, agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Langkah yang dilakukan adalah dengan membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten dan SKPD serta melaksanakan rapat evaluasi bulanan dalam rangka percepatan pelaksanaan dan penyerapan anggaran.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

4.1.1. URUSAN PENDIDIKAN

a) Kondisi Umum

Masyarakat yang maju ditandai dengan tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya yang tinggi serta jumlah dan kualitas yang tinggi untuk tenaga ahli dan tenaga profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Untuk mewujudkan masyarakat Kotawaringin Barat yang maju perlu diwujudkan oleh segenap pemangku kepentingan dengan cara mengupayakan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel, yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang andal.

Mengingat bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan bagian integral dari pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum sekaligus sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, diperlukan pemahaman secara komprehensif terhadap visi pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Urusan wajib bidang pendidikan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat.

Tolok ukur pencapaian target kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dicermati dalam indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2016. Salah satu indikator kinerja pada upaya peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat dari besaran angka partisipasi. Angka partisipasi tersebut meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2014 sebesar 34,75 %, Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2014 sebesar 26,81%, kondisi ini menggambarkan 100 anak usia PAUD di Kotawaringin Barat 26-27 anak telah bersekolah PAUD.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI pada tahun 2013 sebesar 115,00%, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 117,35%. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2013 sebesar 97,85% dan pada tahun 2014 sebesar 98,60%. Jumlah Unit Sekolah Baru tingkat SD bertambah, jumlah ruang kelas baru bertambah akibat pemekaran desa, juga terjadinya murid yang sekolah SD belum mencapai usia 7 tahun sudah masuk sekolah.

Berdasarkan data, angka putus sekolah untuk tingkat SD/MI pada tahun 2014 sebesar 0,20%. Angka ini lebih kecil dibandingkan target yang ditetapkan, yaitu 0,21%. Pada umumnya yang melatarbelakangi alasan putus sekolah lebih pada kondisi sosial-ekonomi dan budaya, yaitu orang tua tidak mampu membiayai sekolah, sehingga orang tua dan anak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Disamping juga masih adanya pemahaman lama yang beranggapan bahwa anak bisa baca tulis sudah cukup dan faktor geografis jarak sekolah di beberapa wilayah yang relatif masih cukup jauh serta domisili orang tua yang tidak menetap karena faktor pekerjaan. Untuk menekan angka putus sekolah dilakukan dengan penambahan jumlah SD, jumlah ruang kelas bertambah, adanya Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat dan daerah.

Kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 95,89% dan di tahun 2014 97,56%, APM SMP/MTs di tahun 2013 sebesar 80,92% dan mengalami kenaikan di tahun 2014 menjadi 86,53%. Menurut catatan, angka putus sekolah SMP/MTs saat ini sebesar 0,12%. Angka ini lebih kecil dari target yang ditentukan, yaitu sebesar 1,89%.

Kondisi APK Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK) pada tahun 2013 menunjukkan angka sebesar 78,92%, sedangkan tahun 2014 menjadi 79,02%, APM SMA/MA/SMK tahun 2013 sebesar 74,03% dan mengalami kenaikan di tahun 2014 menjadi 75,05%, hal ini selaras dengan adanya peningkatan anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rasio Siswa SMA terhadap SMK adalah 1:0,97. Artinya, siswa SMA lebih besar jumlahnya dibanding siswa SMK. Hal ini menunjukkan keberadaan SMK di Kabupaten Kotawaringin Barat masih perlu ditingkatkan baik dari sisi kapasitas daya tampung maupun kualitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan minat yang tinggi atas SMK serta penyiapan tenaga kerja terampil yang siap pakai. Dengan melihat kebutuhan daerah, terutama dari sektor ekonomi, maka perlu dikembangkan SMK kelompok/bidang pariwisata, pertanian dan perkebunan, disamping SMK Teknik, SMK Akuntansi, SMK Kesehatan, SMK Perikanan, dan SMK Pertanian, selain itu perlu juga dikembangkan sekolah yang berbasis keagamaan.

Indikator kinerja lain dalam upaya peningkatan mutu pendidikan adalah rasio siswa per-guru. Rasio siswa per-guru adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru untuk jenjang pendidikan tertentu yang menunjukkan bahwa makin tinggi rasio berarti makin banyak

siswa yang harus dilayani oleh seorang guru atau makin kurang jumlah guru di jenjang pendidikan tersebut.

Rasio siswa per-guru untuk tahun 2014 pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2014 adalah 1:17, untuk jenjang SD/MI adalah 1:21, untuk jenjang pendidikan SMP/MTs adalah 1:17, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK adalah 1:20. Standar ideal dan norma nasional untuk mengukur rasio siswa/guru adalah : SD/MI sebesar 1:32 ; SMP/MTs sebesar 1:36; dan SMA/MA/SMK sebesar 1:36. Berdasarkan standar dan norma nasional tersebut dapat dikatakan bahwa rasio siswa per-guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Kotawaringin Barat telah sesuai dan berada pada standar nasional yang ditetapkan.

Pada jenjang pendidikan tinggi tercatat bahwa jumlah mahasiswa yang menimba ilmu di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 sejumlah 1.048 mahasiswa. Pada tahun 2013, angkanya meningkat menjadi 1.742 mahasiswa. Kenyataan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk dapat lebih meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang ada sehingga mampu bersaing dengan perguruan tinggi di luar daerah dalam hal meraih kepercayaan masyarakat.

Infrastruktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kotawaringin Barat pada tahun 2013 berjumlah 61 sekolah, tahun 2014 meningkat menjadi 128 sekolah dan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2013 berjumlah 184 sekolah dan tahun 2014 berjumlah 185 sekolah yang merata di seluruh desa. Untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tahun 2013 berjumlah 11 sekolah dan tahun 2014 berjumlah 14 sekolah hanya terdapat di beberapa desa. Sedangkan SDLB sampai saat ini hanya berjumlah 1 sekolah. Untuk jenjang pendidikan SMP tahun 2013 berjumlah 55 sekolah menjadi 57 sekolah di tahun 2013, MTs 13 sekolah di tahun 2014 sama seperti tahun 2013 dan SMPLB 1 sekolah. Pada jenjang pendidikan SMU tahun 2014 berjumlah 13 sekolah sama dengan jumlah pada tahun 2013, Madrasah Aliyah pada tahun 2014 berjumlah 5 sekolah bertambah dibanding dengan tahun 2013 yaitu 4 sekolah dan SMK pada tahun 2014 berjumlah 13 sekolah sama dengan jumlah pada tahun 2013. Sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi berjumlah 1 lembaga.

Apabila dicermati dari ketersediaan ruang belajar, dengan rata-rata kepadatan ruang belajar di SD/MI adalah 24 siswa/kelas, SMP/MTs adalah 28 siswa, dan SMA/SMK/MA sebesar 32 siswa/kelas, khususnya ketersediaan ruang belajar tingkat SMA/SMK/MA masih perlu adanya penambahan fasilitas ruang belajar, agar tercapai peningkatan kualitas SDM selaras dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun dan guna memenuhi SPM pendidikan serta memberikan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat.

Guna memberikan jaminan pendidikan yang mempunyai mutu standar nasional maupun internasional kepada masyarakat dan agar dapat menghasilkan lulusan pendidikan yang dapat mensejajarkan diri pada persaingan global, serta lebih khusus lagi untuk menuju masyarakat Kotawaringin Barat yang maju, maka telah ditingkatkan status sekolah dari Sekolah Potensial menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : SD SSN berjumlah 1; SMP SSN berjumlah 2 sekolah; SMA sekolah SSN berjumlah 1 sekolah dan SMK sekolah SSN berjumlah 1 sekolah.

Sampai dengan tahun 2014, program pemberantasan buta aksara sebagai salah satu program di *Millenium Development Goals (MDG's)* dapat menggarap sebanyak 4 per 1000 penduduk usia 15-24 tahun (166 orang) di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi melek aksara, selain itu sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pendidikan untuk semua dan dukungan atas program Provinsi Kalimantan Tengah di bidang pendidikan (Kalteng Harati), pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyediakan anggaran sebesar 10 % dari pagu anggaran APBD tahun 2014 untuk bidang pendidikan.

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2013-2014

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2013	2014	
				Target	Realisasi
1	Angka Melek Huruf	%	96,12	97,97	97,00
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,30	8,70	8,80
3	Angka Partisipasi Kasar				
	a. PAUD	%	25,37	23,31	34,75
	b. SD/MI	%	115,00	116,50	117,35
	c. SLTP/MTs	%	95,89	97,01	97,56
	d. SMU/MA/SMK	%	78,92	69,97	79,02
4	Angka Partisipasi Murni				
	a. PAUD	%	17,61	-	26,81
	b. SD/MI	%	97,85	97,89	98,60
	c. SLTP/MTs	%	80,92	81,72	86,53
	d. SMU/MA/SMK	%	74,03	65,24	75,05
5	Angka Kelulusan				
	a. SD/MI	%	98,92	96,32	100,00
	b. SLTP/MTs	%	99,58	69,22	99,71
	c. SMU/MA/SMK	%	99,09	73,71	98,73
6	Angka melanjutkan				
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	89,67	90,20	93,09
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	99,64	96,03	99,66
7	Angka Putus Sekolah				
	a. SD/MI	%	0,20	0,21	0,20
	b. SLTP/MTs	%	1,19	1,89	0,12
	c. SMU/MA/SMK	%	1,60	1,50	1,30

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2013	2014	
				Target	Realisasi
8	Jumlah Prestasi Siswa dalam Olimpiade/Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional				
	a. SD/MI	siswa	12	5	2
	b. SLTP/MTs	siswa	8	10	19
	c. SMU/MA/SMK	siswa		15	10
9	Jumlah sekolah standar nasional				
	a. SD/MI	sekolah	1	2	1
	b. SLTP/MTs	sekolah	2	8	5
	c. SMU/MA/SMK	sekolah	2	2	7
10	Prestasi Olah raga siswa Tingkat Nasional				
	a. PON	siswa		2	1
	b. POPNAS	siswa	9	9	6
	c. POSPENAS	siswa	5	5	6
11	Rasio ketersediaan sekolah dibandingkan penduduk usia sekolah				
	a. SD/MI		185,00	190,95	192,00
	b. SLTP/MTs		310,12	322,52	322,00
	c. SMU/MA/SMK		660,15	700,55	700,60
12	Rasio jumlah guru/murid				
	a. SD/MI		1:32	1:26	1:21
	b. SLTP/MTs		1:28	1:14	1:19
	c. SMU/MA/SMK		1:28	1:14	1:20
13	Persentase sekolah yang memiliki ruang kelas sesuai SPM				
	a. SD/MI		80,26	93,66	89,00
	b. SLTP/MTs		87,73	93,16	89,50
	c. SMU/MA/SMK		82,00	89,23	88,00
14	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV				
	a. Guru SD/SDLB		52,94	65,79	67,84
	b. Guru SMP/SMPLB		91,34	95,05	97,00
	c. Guru SMA/SMALB/SMK		77,16	85,46	98,80

Sumber : Disdikpora Kab. Kotawaringin Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 55.057.314.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.989.424.725,96,00 atau 81,71%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan urusan pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2.
Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.083.010.292	1.741.952.595,00	83,63	100,00	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	13	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.809.000	5.186.000	66,41	100,00	Terlaksananya penyediaan perangko untuk surat menyurat pada Dinas Dikpora dan jaringannya			lbr	Terwujudnya kelancaran pengiriman surat menyurat dilingkungan Dinas Dikpora, Cabang Dinas dan UPTD SKB	100	100	%	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	239.520.000	107.355.505	44,82	100,00	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Dinas Dikpora dan jaringannya	9 48	9 48	rek. eks.	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Dinas Dikpora untuk menunjang terlaksananya tupoksi dinas	100	100	%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	8.050.000	5.039.900	62,61	100,00	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional	45	45	unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa administrasi keuangan	278.459.500	256.353.500	92,06	100,00	Terlaksananya pembayaran honor jasa administrasi keuangan dan petugas keamanan di lingkungan Dinas Dikpora	12	12	OB	Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan	100 100	100 100	% %	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	64.448.000	61,108.000	94,82	100,00	Terlaksananya pembayaran honor petugas kebersihan dan belanja peralatan kebersihan kantor	2 8	2 8	orang paket	Terwujudnya kebersihan halaman dan ruang kantor dinas Dikpora dan jaringannya	100	100	%	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	44.570.000	38.340.000	86,02	100,00	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Dinas Dikpora dan jaringannya	68	68	unit	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Dinas Dikpora dan jaringannya	100	100	%	
Penyediaan alat tulis kantor	148.944.000	143.694.000	96,48	100,00	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	8	8	paket	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada Dinas Dikpora dan jaringannya	100	100	%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	118.012.000	112.562.750	95,38	100,00	Terlaksananya penyediaan barang cetakan, spanduk dan penggandaan untuk mendukung kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya	1	1	paket	Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada Dinas Dikpora dan jaringannya	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	24.065.000	22.962.500	95,42	100,00	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor Dinas Dikpora dan jaringannya	8	8	paket	Terpenuhinya penerangan untuk menunjang kelancaran kerja pada Dinas Dikpora dan jaringannya	100	100	%	
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	695.500.000	676.110.000	97,21	100,00	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa papan nama, mesin penghancur kertas, notebook, printer, proyektor dan sound system	59	59	unit	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	
penyediaan peralatan rumah tangga	13.500.000	13.275.000	98,33	100,00	Terlaksananya penyediaan buku peraturan perundang undangan	9	9	buah	Terwujudnya peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur	100	100	%	
penyediaan makanan dan minuman	218.419.000	78.520.000	35,95	100,00	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian pegawai di lingkungan Dinas Dikpora	2	2	paket	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pengawas, penilik dan pegawai tidak tetap untuk mendukung kelancaran kerja	100	100	%	
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	221.713.792	221.445.440	99,88	100,00	Terlaksananya perjalanan dinas rapat dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan tupoksi antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.679.735.000	1.381.226.478,96	82,23	100,00	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5	5	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	
Pembangunan gedung kantor	772.064.000	758.795.978,96	98,26	100,00	Terlaksananya pembangunan gedung kantor baru Dinas Dikpora	4	4	pek	Terwujudnya ketersediaan gedung kantor yang representatif untuk mendukung pelaksanaan tupoksi	1	1	unit	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	162.000.000	161.678.000	99,80	100,00	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor	2	2	paket	Tercapainya kebutuhan perlengkapan kantor yang memadai	100	100	%	
Pengadaan mebeleur	101.000.000	89.377.500	88,49	100,00	Terlaksananya pengadaan mebeleur	3	3	paket	Terpenuhinya kebutuhan sarana mebeleur dilingkungan dinas Dikpora	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	63.680.000	58.443.000	91,78	100,00	Terlaksananya pengecatan rutin gedung kantor pada kantor Dinas Dikpora dan jaringannya	10	10	pek	Terwujudnya keindahan dan kerapian gedung kantor Dinas Dikpora dan jaringannya	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	562.791.000	312.932.000	55,60	100,00	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional	45	45	unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan disiplin aparatur	93.700.000	85.277.000	91,01	100,00	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	93.700.000	85.277.000	91,01	100,00	Tersedianya kebutuhan pakaian batik tradisional Kalteng untuk pegawai di lingkungan Dinas Dikpora	185	185	stel	Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian pada hari tertentu	100	100	%	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	218.484.500	174.985.700	80,09	97,25	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	72.000.000	29.269.600	40,65	100,00	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	8	8	orang	Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang pengadaan barang dan jasa, administrasi keuangan, perencanaan dan penyusunan LAKIP	8	8	orang	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	62.380.000	19.655.000	18,87	100,00	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.240.000	1.085.000	95,18	100,00	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	keg.	Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	Lap.	
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	61.140.000	10.685.000	17,48	100,00	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	keg.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	1	100	%	
Program Pendidikan Anak Usia Dini	312.834.500	224.308.500	71,70	100,00	Terlaksananya kegiatan pada Program Pendidikan Anak Usia Dini	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pendidikan Anak Usia Dini	100	100	%	
pengembangan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	35.000.000	34.800.000	98,43	100,00	Terlaksananya pemagaran TK Pantai Permai	240	240	Mtr	Terwujudnya kenyamanan dan keamanan dalam kegiatan belajar mengajar bagi anak usia dini	100	100	%	
pengadaan Alat praktik dan Peraga siswa	136.996.000	86.800.000	63,36	98,00	Terlaksananya penyediaan alat praktik dan peraga TK	1	1	paket	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadahi untuk kegiatan pendidikan bagi anak usia dini	100	100	%	
rehabilitasi gedung/berat bangunan sekolah	79.200.000	78.806.000	99,50	100,00	Terlaksananya rehabilitasi gedung TK Pembina Arsel	1	1	unit	Terwujudnya peningkatan kualitas ruangan kelas yang memadahi untuk kegiatan pendidikan anak usia dini	1	1	unit	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
latihan kompetensi tenaga pendidik	50.000.000				Terlaksananya kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru PAUD	1	1	keg	Kompetensi guru PAUD meningkat	100	100	%	
ublikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	61.638.500	23.902.500	38,78	100,00	Terlaksanyan publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	1	1	keg	Terwujudnya sekolah PAUD yang terakreditasi	100	100	%	
rogram Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	29.390.076.582	23.165.149.794	78,82	86,25	Terlaksananya kegiatan pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	17	17	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	100	100	%	
pembangunan gedung sekolah	258.417.337	258.417.337	100,00	100,00	Terlaksananya pembangunan laboratorium IPA SMPN SATAP 1 Arut Utara	1	1	pek	Terpenuhinya ketersediaan gedung yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar	1	1	pek	
pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	529.200.000	525.448.000	99,29	100,00	Terlaksananya Pemb. Rumah dinas Guru SMPN Satap 1 Kumai, SDN 1 Pandau, SDN 1 Kinjil, SDN 1 Sakabulin	4	4	Unit	Tersediaannya Perumahan Guru yang layak Huni	1	100	%	
penambahan ruang kelas sekolah	2.495.379.124	2.495.379.124	100,00	100,00	Terlaksananya Pembangunan ruang kelas SMPN-LB Pangkalan Bun, SDN 1 Kondang, SDN 1 Penyombaan, SDN 8 Madurejo, SDN 1 Tanjung Putri, SMPN 11 Arut Selatan, SMPN 5 Pangkalan Lada	7	7	unit	Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	715.434.000	710.274.000	99,28	100,00	Terlaksananya pembangunan pagar SDN 7 Raja, SDN 1 Pangkut, SDN 2 Sei Tendang, SMPN 5 Ktw. Lama Pembuatan Papan Nama SMPN 11 Arsel	5	5	pek	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kenyamanan dan keamanan dalam kegiatan belajar mengajar	5	5	pek	
Pembangunan perpustakaan sekolah	171.500.000	157.106.500	91,81	100,00	Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah SMPN SATAP 2 Kumai	1	1	pek	Terwujudnya ketersediaan ruang perpustakaan yang representatif untuk meningkatkan minat baca siswa	1	1	pek	
Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	171.500.00	157.106.500	91,61	100	Terlaksananya pemb. jaringan instalasi listrik SMPN Satap 3 Kumai dan SMPN 5 Pangkalan Banteng	2	2	peek	Terpenuhinya kebutuhan listrik di sekolah	100	100	%	
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	146.640.000	145.433.000	99,18	100,00	Terlaksananya pemb. toilet dan sanitasi air bersih SDN 6 Baru, SDN Kunjung Sungai Bakau, SMPN 11 Arsel	3	3	pek	Terpenuhinya kebutuhan sanitasi air bersih bagi para siswa dan guru di sekolah	100	100	%	
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	2.719.332.130	2.418.656.050	88,94	100,00	Terlaksananya penyediaan alat praktek dan peraga siswa untuk sekolah negeri se kKotawaringin Barat	3	3	paket	Terpenuhinya kebutuhan alat praktek dan peraga siswa untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
pengadaan meubeluer sekolah	1.968.675.663	1.859.765.953	94,74	100,00	Terlaksananya pengadaan meubeleur sekolah SDN Sei Bakau, SDN 8 Mendawai, SDN 2 Purbasari, SDN 2 Mendawai, SDN 1 Kumai Hulu, SDN 1 Gandis, SDN 8 Madurejo, SDN 1 Sumber Agung, SDN 1 Pandau, SDN 1 Kondang, SDN 1 Riam Durian, SDN 1 Pasir Panjang, SDN 4 Baru, SDN 7 Baru, SDN 3 Kaarang Mulya, SDN 1 Lalang, SMPN Satap 2 Kumai, SMPN Satap 1 Arut Utara, SMPN Satap 1 Ktw. Lama, SMPN 1 Pangkalan Banteng, SMPN 11 Arsel, SMPN 4 Ktw. Lama, SMPN 6 Arsel, SMPN 7 Arsel SMPN 2 Arsel, SMPN 4 Pangkalan Lada, SMPN 5 Ktw.Lama	31	31	sklh	Terpenuhinya kebutuhan meubeleur yang layak pakai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar	100	100	%	
pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	320.000.000	310.600.000	97,06	100,00	Terlaksananya pemeliharaan dan pengelolaan taman sekolah dalam rangka mendukung kegiatan ADIPURA dan ADIWIYATA	2	2	keg	Terciptanya taman sekolah yang indah dan nyaman.				

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
rehabilitasi gedung/berat bangunan sekolah	3.886.634.128	1.859.765.953	94,74	100,00	Terlaksananya rehabilitasi gedung SMPN 1 Kumai, SMPN 1 Pangkalan Banteng, SMPN 1 Ktw. Lama, SMPN 2 Ktw. Lama, SMPN 3 Arsel, SMPN 3 Pangkalan Lada, SMPN 2 Pangkalan Lada, SMPN Satap 2 Kumai, SMP 3 Kumai, SMPN 1 Aruta, SMPN 1 Arsel, SMPN 2 Arsel, SDN 5 Madurejo, SDN 2 Arga Mulya, SDN 2 Ktw. Hilir, SDN 1 Sumber Agung, SDN 1 Bumi Harjo, SDN 1 Sambu, SDN 1 Pangkalan Durin, SDN 2 Amin Jaya, SDN 2 Raja Seberang, SDN 3 Sulung Kenambui, SDN 2 Pangkut	23	23	pek	Terwujudnya peningkatan kualitas gedung sekolah yang memadahi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar	100	100	%	
pelatihan kompetensi tenaga pendidik	125.000.000	125.000.000	100,00	100,00	Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum untuk SD/MI dan SMP/MTS se Kotawaringin Barat	2	2	keg	Terwujudnya peningkatan pengetahuan guru tentang kurikulum pendidikan	100	100	%	
penyediaan bantuan operasional Sekolah (BOS) jenjang D/MI/SDLB dan MP/MTS serta	10.723.825.200	9.368.057.601	87,36	99,75	Terlaksananya penyediaan bantuan operasional sekolah melalui program sekolah gratis	21.992	21.992	siswa	Tercapainya pelaksanaan program sekolah gratis dan terbantunya biaya sekolah siswa melalui	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Islam setara SD dan SMP									dana BOS sekolah.				
penyelenggaraan Paket A setara SD	40.150.000	3.000.000	7,47	100,00	Terlaksananya penyelenggaraan Paket A setara SD	10	10	klpk.	Terpenuhinya target kelulusan peserta yang mengikuti Paket A setara SD	100	100	%	
penyelenggaraan Paket B setara SMP	55.850.000	17.270.000	30,92	100,00	Terlaksananya penyelenggaraan Paket B setara SMP	10	10	klpk.	Terpenuhinya target kelulusan peserta yang mengikuti Paket B setara SMP	100	100	%	
pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	440.889.000	257.300.100	58,39	100,00	Terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa (FLS2N OSN) SD dan SMP	2	2	keg./siswa	Terwujudnya peningkatan prestasi, minat, bakat dan kreativitas siswa pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional	100	100	%	
penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	60.725.000	3.270.000	5,38	100,00	Terlaksananya penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	1	1	keg	Terwujudnya penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	100	100	%	
penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	43.495.000	25.100.000	67,71	100,00	Terlaksananya akreditasi sekolah SD/SMP se Kotawaringin Barat	1	1	keg.	Terwujudnya peningkatan status akreditasi SD/SMP se Kotawaringin Barat	100	100	%	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	120.625.000	63.825.000	52,91	100,00	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	12	12	bln	Adanya laporan monev dan tindak lanjut	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan beasiswa berprestasi	400.000.000	385.400,000	96,35	100,00	Terlaksananya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi	1	1	Keg	Terwujudnya peningkatan prestasi siswa penerima beasiswa	100	100	%	
Program Pendidikan Menengah	5.935.019.000	5.193.617.184	87,51	96,99	Terlaksananya kegiatan pada Program Pendidikan Menengah	15	15	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pendidikan Menengah	100	100	%	
Pembangunan gedung sekolah	280.800.000	239.907.000	85,44	100,00	Terlaksananya pembangunan kantor SMA 1 Pangkalan Lada	90	90	M2	Terpenuhinya ketersediaan gedung kantor yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar	1	1	unit	
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	349.440.000	297.954.000	85,27	100,00	Terlaksananya Pembangunan Rumah dinas Guru SMKN 2 Kumai	112	112	M2	Tersediaannya Perumahan Guru yang layak Huni	100	100	%	
Penambahan ruang kelas sekolah	2.531.082.040	2.459.406.600	97,17	100,00	Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah SMAN 3 Pangkalan Bun, SMKN 4 Pangkalan Bun, SMAN 2 Kumai, SMAN 1 Pangkalan Banteng, SMAN 1 Pangkalan Lada	5	5	unit	Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar	100	100	%	
Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	2.328.209.570	2.327.009.570	99,95	100,00	Terlaksananya pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah SMKN 3 Pangkalan Bun, SMKN 4 Pangkalan Bun,	6	6	unit		100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					SMKN 2 Pangkalan Bun, SMKN 1 Ktw. Lama, SMKN 1 Pangkalan Lada, SMKN 2 Kumai								
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	99.840.000	99.495.000	99,65	100,00	Terlaksananya pembangunan pagar SMKN 3 P.Bun	1	1	unit	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kenyamanan dan keamanan dalam kegiatan belajar mengajar	100	100	%	
Pembangunan perpustakaan sekolah	439.992.000	439.992.000	100,00	100,00	Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah SMKN 1 Pangkalan Banteng, SMAN 1 Kumai	2	2	unit	Terwujudnya ketersediaan ruang perpustakaan yang representatif untuk meningkatkan minat baca siswa	100	100	%	
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	375.700.000	375.000.000	99,81	100,00	Terlaksananya penyediaan alat praktek dan peraga siswa	1	1	paket	Terpenuhinya kebutuhan alat praktek dan peraga siswa untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah	100	100	%	
Pengadaan meubeluer sekolah	676.367.289	765.746.023	99,79	100,00	Terkaksananya penyediaan meubeluer sekolah SMKN 2 Pangkalan Bun, SMKN Pangkalan Bun, SMAN 3 Pangkalan Bun, SMK 1	5	5	sklh	Terpenuhinya kebutuhan meubeleur yang layak pakai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kumai, SMK 1 Pangkalan Banteng								
Pengadaan alat rumah tangga sekolah	398.026,000	384.793.138	96,68	100,00	Terlaksananya penyediaan ATK, alat listrik dan elektronik, telepon, listrik , penggunaan, pemeliharaan mesin tik dan pemeliharaan komputer/PC	12	12	bln	Terpenuhinya kebutuhan ATK, alat listrik dan elektronik, telepon, listrik , penggunaan, serta terwujudnya optimalisasi fungsi mesin tik dan komputer/ PC	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	170.000.000	170.000.000	100,00	100,00	SMAN 1 Pangkalan Bun, SMAN 2 Pangkalan Bun,SMAN 3 Pangkalan Bun, SMKN 1 Pangkalan Bun, SMKN 2 Pangkalan Bun, MAN Pangkalan Bun	6	6	sklh	Terciptanya taman sekolah yang indah dan nyaman.	100	100	%	
Rehabilitasi gedung/berat bangunan sekolah	1.295.179.227	1.295.179.227	100,00	100,00	Terlaksananya rehabilitasi gedung sekolah SMAN 1 Pangkalan lada, SMAN 1 Ktw. Lama, SMAN 2 Kumai, SMKN 1 Pangkalan Bun	4	4	unit	Terwujudnya peningkatan kualitas gedung sekolah yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar	100	100	%	
Rehabilitasi gedung/berat laboratorium dan praktikum sekolah	280.000.000	280.000.000	100,00	100,00	Terlaksananya rehabilitasi RPS Komputer SMKN 1 Pangkalan BUn	1	1	unit	Terwujudnya peningkatan kualitas laboratorium sekolah yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
pelatihan kompetensi tenaga pendidik	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00	Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum untuk SMA, SMK dan MA di Kab. Kotawaringin Barat	1	1	keg.	Terwujudnya pengembangan kurikulum MULOK jenjang pendidikan menengah	100	100	%	
penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)	146.500.000	142.438.002	97,23	100,00	Terlaksananya bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) sekolah model (SMAN 1 Pangkalan Bun)	1	1	keg	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sekolah model melalui bantuan operasional manajemen mutu	95	100	%	
penyelenggaraan paket C setara SMU	56.650.000	29.285.000	51,69	100,00	Terlaksananya penyelenggaraan Paket C setara SMU di Kabupaten Kotawaringin Barat	10	10	klpk.	Terpenuhinya target kelulusan peserta yang mengikuti Paket C setara SMU	100	100	%	
penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	37.000.000	19.375.000	52,36	100,00	Terlaksananya penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	1	1	keg	Terwujudnya penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	100	100	%	
penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah	8.650.000	1.170.000	13,53	100,00	Terlaksananya penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah se Kab. Kotawaringin Barat	1	1	keg.	Terwujudnya peningkatan status akreditasi sekolah menengah se Kotawaringin Barat	100	100	%	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	27.500.000	25.375.000	92,27	100,00	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	12	12	bln	Adanya laporan monev dan tindak lanjut	100	100	%	
pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	593.185.000	235.762.100	39,75	100,00	Terlaksananya pembinaan untuk siswa berprestasi pada pendidikan menengah	10	10	keg./siswa	Terwujudnya peningkatan prestasi minat, bakat dan kreativitas siswa pada	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									tingkat kabupaten, provinsi dan nasional				
Penyediaan beasiswa berprestasi	345.500.000	292.520.000	84,67	100,00	Terlaksananya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi sekolah menengah	1	1	tahun	Terwujudnya peningkatan prestasi siswa penerima beasiswa	100	100	%	
Program Pendidikan Non Formal	2.125.500.000	1.449.769.100	99,09	68,21	Terlaksananya kegiatan pada Program Pendidikan Non Formal	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pendidikan Non Formal	100	100	%	
Pengembangan pendidikan keaksaraan	19.300.000				Terlaksananya pendataan untuk semua PAUD di Kab. Kotawaringin Barat	2	2	keg.	Terpenuhinya ketersediaan data PAUD yang valid dan memadai	100	100	%	
Pengembangan pendidikan Kecakapan Hidup	2.106.200.000	1.449.769.100	68,83	100,00	Terlaksananya kegiatan Non Formal untuk meningkatkan kecakapan siswa siswi melalui Paskibra, O2SN dan LPI	4	4	keg.	Terwujudnya peningkatan kecakapan siswa siswi melalui berbagai program kegiatan non formal	100	100	%	
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.328.027.500	1.680.047.500	68,21	99,68	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4	4	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100	100	%	
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	282.445.000	197.870.000	70,06	100,00	Terlaksananya pembinaan kelompok kerja guru melalui kegiatan KKG SD, KKS SD, MGMP SMP, KTSP SMA, KTSP SMP, MGMP SMA, MKKS SMP, MKKS	10	10	keg.	Terwujudnya peningkatan mutu serta kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					SMA, MKKKS dan MKPS.								
engembangan mutu an kualitas program endidikan dan elatihan bagi endidik dan tenaga endidikan	443.295.000	313.900.000	70,81	93,96	Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik dan pengawas sekolah, serta kompetensi guru	3	3	keg.	Terwujudnya ketersediaan data guru yang valid dengan penyebaran nya yang merata	100	100	%	
engembangan sistem endataan dan emetaan pendidik an tenaga endidikan	790.800.000	709.650.000	89,74	100,00	Terlaksananya pendataan pendidik dan tenaga kependidikan	1	1	keg.	Terwujudnya ketersediaan data pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang valid melalui kegiatan redistribusi	100	100	%	
engembangan sistem enghargaan dan perlindungan erhadap profesi endidik	1.254.782.500	772.527.500	61,57	99,41	Terlaksananya pengembangan sistem penghargaan & perlindungan terhadap profesi pendidik (guru kontrak & guru TK Non PNS)	660	660	guru	Terwujudnya ketersediaan guru kunjung, guru kontrak, guru TK Non PNS, operasional penilik/ pengawas dan sertfikasi guru	100	100	%	
rogram Manajemen elayanan Pendidikan	553.465.000	391.776.000	70,79	97,91	Terlaksananya kegiatan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	4	4	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	100	100	%	
elaksanaan evaluasi asil kinerja bidang endidikan	227.054.000	136.520.000	60,13	98,07	Terlaksananya penyusunan dokumen data pokok pendidikan	4	4	dok.	) Terpenuhinya prosentase kenaikan kinerja bidang manajemen pelayanan pendidikan) Terwujudnya	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									ketersediaan data perencanaan kegiatan pendidikan secara berkelanjutan				
elaksanaan erjasama secara elembagaan dibidang endidikan	13.900.000	4.700.000	33,81	100,00	Terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler dan tes psikologi bagi siswa pada sekolah yang menerapkan muatan lokal lalu lintas	2	2	keg.	Tercapainya sasaran pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	100	100	%	
embinaan Dewan endidikan	66,811.000	29.786.000	44,58	100,00	Terlaksananya agenda kegiatan dewan pendidikan selama setahun	100	100	%	Terwujudnya kemitraan dalam kegiatan pengelolaan pendidikan	100	100	%	
enerapan sistem dan nformasi manajemen endidikan	245.700.000	220.770.000	89,85	97,07	Terlaksananya kegiatan penerapan sistem informasi manajemen pendidikan (NISN dan ICT Disdikpora)	1	1	keg.	Terwujudnya kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan Serta komunikasi dan informasi pendidikan yang memadai	100	100	%	
rogram Pendidikan tinggi	5.000.000.000	4.907.656.500	98,15	100,00	Terlaksananya pemberian bantuan sarana prasarana perguruan tinggi	1	1	pek	Bertambahnya ruang kelas yang memadai	100	100	%	
emberian bantuan sarana dan prasarana perguruan tinggi	5.000.000.000	4.907.656.500	98,15	100,00	Terlaksananya pemberian bantuan sarana prasarana perguruan tinggi	1	1	pek	Bertambahnya ruang kelas yang memadai	100	100	%	

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan program PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Pendidikan Non Formal dan Manajemen Pelayanan Pendidikan yang disebabkan :
 - a. Belum tersebar dan meratanya tenaga pendidik dan kependidikan, terutama di daerah terpencil;
 - b. Belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah sekolah sehingga menghambat pelaksanaan proses belajar mengajar;
 - c. Terbatasnya jumlah SDM/pegawai yang memiliki kompetensi di bidang tertentu yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantoran.
2. Belum optimalnya koordinasi dengan UPTD dikarenakan terlalu panjangnya rentang kendali.

Atas permasalahan tersebut, untuk meningkatkan pencapaian kinerja urusan pendidikan perlu diupayakan perbaikan sebagai berikut :

1. Melaksanakan redistribusi guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Mengoptimalkan pendayagunaan SDM yang ada, dengan pelatihan dan bimbingan teknis;
3. Mengefektifkan peran dan fungsi UPTD dan Pengawas.

4.1.2. URUSAN KESEHATAN

a) Kondisi Umum

Tujuan dari pembangunan kesehatan menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada : 1) perikemanusiaan; 2) pemberdayaan dan kemandirian; 3) adil dan merata; serta 4) pengutamaan dan manfaat. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan berkesinambungan telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin meningkatnya angka derajat kesehatan masyarakat secara umum. Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas fisik penduduk telah dilakukan yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dan mutu pelayanan kesehatan

bagi seluruh penduduk baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Penyediaan sarana kesehatan yang memadai merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam upaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, dan program ini terus ditingkatkan kualitas pelayanan serta keberadaannya. Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ternyata cukup memadai untuk jumlah penduduk yang harus dilayani.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah puskesmas, rumah sakit, dan jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2014 di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat satu unit rumah sakit pemerintah, 2 rumah bersalin swasta, 1 klinik pengobatan swasta, 2 klinik bersalin swasta, 15 unit puskesmas, 76 unit puskesmas pembantu dan didukung 653 orang tenaga kesehatan.

Beberapa hal yang menjadi isu mendasar pembangunan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah peningkatan jaminan pemeliharaan semesta, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan/pelatihan kesehatan. Perlu disadari bahwa kesehatan dan permasalahannya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi semua pihak di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti dunia usaha, LSM, dunia pendidikan, dan masyarakat sendiri. Hal ini karena permasalahan kesehatan terkait dengan faktor seperti keadaan geografis dan lingkungan, sosial budaya, IPTEK, dan lain sebagainya.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan serta memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat ke depan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui RSUD Sultan Imanuddin terus melakukan peningkatan kualitas manajemen dan pelayanan. Pada tahun 2009, RSUD Sultan Imanuddin memperoleh akreditasi 5 pelayanan. Lalu, pada bulan Desember tahun 2013, RSUD Sultan Imanuddin mendapatkan status PPK-BLUD penuh.

Indikator sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013-2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2013-2014

No.	Indikator	2013		2014 *)		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ket
1.	Angka Harapan Hidup	71,7	71,79	71,9	N/A	N/A
2.	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0.007	0,004	0,011	0,007	Belum Memenuhi Target
3.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,14	0,28	0,14	0,37	Memenuhi Target
4.	Rasio tenaga para medis per satuan penduduk	1,39	1,77	1,41	1,854	Memenuhi Target
5.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	75	77,3	80	89,36	Memenuhi Target

No.	Indikator	2013		2014 *)		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ket
6.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	90	118	90	98,12	Memenuhi Target
7.	Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i> (%)	100	87,2	100	89,36	Belum Memenuhi Target
8.	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,05	0,02	0,05	0,02	Memenuhi Target
9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan(%)	100	100	100	100	Memenuhi Target
10.	Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit TBC/BTA (%)	85	38,37	85	80,2	Belum Memenuhi Target
11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	Memenuhi Target
12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	Memenuhi Target
13.	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	92	76,52	94	96,5	Memenuhi Target
14.	Angka Kematian Bayi /1000 Kelahiran Hidup	19	17,88	18	14,99	Memenuhi Target/ Angka Kematian Bayi Menurun
15.	AKABA per 1000 Balita	9	19,26	8	0,99	Memenuhi Target/ Angka Kematian Balita Menurun
16.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)	107	86	105	199,9	Tidak Memenuhi Target/ Angka Kematian Ibu Meningkat
17.	Cakupan Rawat Jalan Puskesmas	36.771	196.041	37.500	120.126	Memenuhi Target
18.	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan saran kesehatan RS Kabupaten	100	100	100	100	Memenuhi Target

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Capaian derajat kesehatan (Umur Harapan Hidup, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Bayi) Kabupaten Kotawaringin Barat masih lebih baik dibandingkan capaian rata-rata secara nasional. Capaian usia harapan hidup di suatu wilayah menggambarkan keberhasilan program kesehatan dan program sosial ekonomi pada umumnya di wilayah tersebut.

Sebagaimana disajikan dalam tabel, untuk data angka harapan hidup yang tersedia dari Badan Pusat Statistik adalah data kondisi tahun 2013 dimana angka harapan hidup Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 71,79. Hal tersebut mengartikan bahwa secara rata-rata penduduk Kotawaringin Barat yang lahir pada tahun 2013 akan hidup hingga mencapai umur 71,79 tahun. Angka Harapan Hidup secara nasional menurut BPS sebesar 69 tahun.

Meningkatnya pelayanan kesehatan, dan naiknya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Kemampuan memenuhi kebutuhan gizi dan kalori dan tingkat pendidikan yang lebih baik yang memungkinkan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai pada gilirannya juga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Capaian Umur Harapan Hidup yang tinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat memberi konsekuensi dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat usia lanjut. Capaian Indikator kesehatan lainnya, seperti Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Bayi, menunjukkan tren positif. Akan tetapi untuk Angka Kematian Ibu menunjukan tren negatif, dimana Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kotawaringin Barat pada mengalami penurunan dari 218,2 per-100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2012, menjadi 86 per-100.000 Kelahiran hidup pada tahun 2013. Namun pada tahun 2014 mengalami kenaikan kembali menjadi 199,9 per-100.000 Kelahiran Hidup. Angka tersebut sudah mengkhawatirkan karena diatas target Angka Kematian Ibu nasional sebesar 102 per-100.000 Kelahiran Hidup.

Angka Kematian Ibu ini idealnya dihitung untuk skala Kabupaten, karena apabila berdasarkan skala Nasional Angka Kematian Ibu dihitung berdasarkan per-100.000 Kelahiran Hidup, sedangkan Angka Kelahiran Hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat hanya berkisar 5.000 – 6.000 Kelahiran Hidup. Standar Nasional untuk Angka Kematian Ibu tersebut hanya dapat digunakan hingga di tingkat Provinsi.

Angka Kematian Balita di Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana disajikan dalam tabel, saat ini sudah mencapai 19 per-1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2013 dan menurun menjadi 0,99 di tahun 2014. Angka tersebut jauh di bawah angka nasional sebesar 44 per-1000 Kelahiran Hidup (SDKI 2007). Sedangkan Angka Kematian Bayi, sebagaimana disajikan dalam tabel, saat ini mencapai 17,88 per-1000 kelahiran hidup pada tahun 2013 dan turun menjadi 14,99 pada tahun 2014. Angka tersebut di bawah angka nasional sebesar 34 per-1000 Kelahiran Hidup (SDKI 2007).

Pola penyakit menular yang selalu menjadi sepuluh besar penyakit (puskesmas) selama beberapa tahun terakhir adalah influenza, diare, pneumonia, typhus perut klinis, diare berdarah (disentri), tersangka TB paru, campak dan TBC dengan BTA (+). Sementara untuk balita, pola penyakit masih didominasi oleh penyakit-penyakit infeksi. Seiring dengan peningkatan status ekonomi, perubahan gaya hidup dan efek samping modernisasi, problem penyakit tidak menular pun cenderung meningkat. Beberapa penyakit tersebut di antaranya penyakit jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*), *hipertensi*, *stroke*, *diabetes mellitus*, *kanker*, hingga gangguan jiwa.

Prevalensi balita dengan gizi buruk dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Prevalensi gizi buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2012 sebesar 0,05%, dari target sebesar 0,07%. Angka ini menurun menjadi 0,02 % pada tahun 2013, dari target sebesar 0,05 % dan tetap sebesar 0,02 pada tahun 2014. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus-kasus gizi buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak terpantau.

Untuk itu, seluruh elemen masyarakat, birokrat dan swasta diharapkan tetap waspada serta dapat bersama sama meningkatkan komitmennya untuk menurunkan prevalensi gizi buruk, atau minimal mempertahankannya.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 117.913.451.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 112.067.739.717,00 atau 95,04%.

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas diantaranya adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Peningkatan kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut telah berhasil dipenuhinya target penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dasar.

Program prioritas lainnya adalah Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan Kegiatan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu yang tidak memiliki Jaminan Asuransi Kesehatan sebanyak 35.150 jiwa dengan premi sebesar Rp.19.225/jiwa/bulan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Entry poin program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan melalui desa siaga, dengan telah dimilikinya 39 ambulans desa yang bersumber dari masyarakat, stimulan pemerintah daerah dan bantuan lainnya (CSR) yang tidak mengikat.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan urusan kesehatan selengkapanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Program/ Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AS KESEHATAN	31.833.944.000	29.713.411.852	93,33	99,66									
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000	1.329.500	60,43	100	Pengiriman surat-menyurat Perangko	50 350	50 350	Paket Lbr	Terkirimnya surat-menyurat di Dinas Kesehatan dan jaringannya yang efektif dan efisien	100	100	%	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	317.942.000	231.147.866	72,70	100	- Tersedianya jasa domain+hosting (Dinas Kesehatan, 17 Puskesmas dan Lab. - Terbayarnya Jasa telepon dan faxcimile 6 line. - Terbayar internet speedy. - Terbayarnya rekening air. - Terbayarnya Jasa Listrik. - Tersedianya surat kabar 4 terbitan.	18 72 24 12 8 48	18 72 24 12 8 48	Dom/ thn Rek/ Bln Line/ bln rek/ ln rek SK/ Bln	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi dan internet, informasi berita, sumber daya air, dan listrik selama 12 Bulan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					- Tersedianya majalah makanan dan Kesehatan. - Berlangganan tambahan internet dedi cated Kantor Dinas Kesehatan (untuk kebutuhan sikda dan kekurangan akses rutin).	12 3	12 3	eks/ Bln line/ Bln					
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	17.150.000	9.911.500	57,79	100	-Terbayarnya pajak kendaraan R2 dan R4 -Terbayarnya jasa KIR	15 2	15 2	Unit/ Thn Unit/ thn	Terpenuhinya kebutuhan tertib administrasi perpajakan kendaraan dinas / operasional Dinas kesehatan dan jaringannya	100	100	%	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	427.044.000	388.402.500	90,95	95,40	- Buku Cek - Terbayarnya uang lembur dan Jasa Bank - Terbayarnya honorarium PNS dan Non PNS - Materai 3000 dan Materai 6000	5 12 12 12	5 12 12 12	Buah Bulan Bulan bulan	T erpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan yang efektif dan efisien selama 12 bulan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa kebersihan kantor	78.067.500	70.019.500	89,69	100	- Alat kebersihan dan bahan pembersih - Terbayarnya honor tenaga kebersihan - Terbayarnya Honor PPTK	38 5 1	38 5 1	Macam Org Org	Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor yang efektif dan efisien selama 12 bulan	100	100	%	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	28.700.000	28.650.000	99,83	100	- Komputer, Note Book dan Printer terpelihara - Baterai notebook - Jaringan Sikda Generik terpelihara	27 1 1	27 1 1	Unit Buah set	Terpenuhinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja yang efektif dan efisien 12 bulan	100	100	%	
Penyediaan alat tulis kantor	144.164.140	140.768.000	97,64	100	- Alat tulis kantor rutin dan program - Terbayarnya Honor KPA - Terbayarnya Honor PPTK	12 1 1	12 1 1	Bulan Org Org	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor secara efisien dan efektif selama 12 bulan	100	100	%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.025.000	40.025.000	100	100	- Cetak ID Card Pegawai, dan Map - Cetak NCR - Cetak Amplop - Penggandaan - Penjilidan - Cetak Kop Surat	130 12 40 110.00 0 140 25	130 12 40 110.0 00 140 25	Lbr Box Pack Lbr Pak Rim pak	T erpenuhinya barang cetakan dan penggandaan administrasi program kesehatan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					- Cetak Kartu Disposisi	32	32	buku					
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	8.086.000	7.800.000	96,46	100	Tersedianya Lampu, Stopkontak , jack Listrik, dan Battery Alkaline Tersedianya Kabel Listrik	151 200	151 200	Buah meter	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	233.790.000	230.863.000	98,75	100	- Tersedianya Lcd Proyektor dan Layar - Tersedianya GPS untuk pemetaan masalah kesehatan - Tersedianya Kalkulator - Tersedianya Kamera DSLR penunjang kumentasi TGC KLB - Tersedianya Komputer PC administrasi dan kelengkapan SIKDA GENERIK - Tersedianya Handy Talkie	2 1 5 1 2 1	2 1 5 1 2 1	Unit Unit Unit Unit Unit Unit	Terpenuhinya Standar administrasi melalui peralatan dan perlengkapan perkantoran	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					pendukung TGC								
					- Tersedianya Printer untuk kelengkapan SIKDA GENERIK dan Penunjang software survailans dan data Puskesmas	2	2	Unit					
					- Tersedianya Laptop kesekretariatan dan penunjang software laporan survailans dan data Puskesmas	2	2	Unit					
					- Tersedianya Microfon kabel, Microfon Wireless , Wireless dan Megaphone	5	5	Unit					
					- Tersedianya Accu pendukung TGC Flashdisk, White Board, Acces Point, Switch Hub,Router board ,dan Wifi Adapter (Usb)	42	42	Unit					

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					- Terbayarnya honor KPA Terbayarnya honor PPTK - Tersedianya mesin penghancur kertas - Tersedianya komputer laptop penunjang pengelolaan laporan dan data pelayanan kesehatan - Tersedianya Printer MultiFungsi inktank F4 - Tersedianya Printer Inktank - Tersedianya Handycam Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan - Tersedianya Lcd Proyektor tanpa layar promkes	1 1 1 3 1 1 1	1 1 1 3 1 1	Org Unit Unit Unit Unit Buah unit					

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan peralatan rumah tangga	2.500.000	2.480.000	99,20	100	- Tersedianya Bor Listrik - Tersedianya Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)	1 1	1 1	Buah unit	Terpenuhinya peralatan rumah tangga guna mendukung kelancaran operasional kantor	100	100	%	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2.000.000	2.000.000	100	100	Tersedianya Buku perundang-undangan	10	10	judul	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien guna taat perundangan	100	100	%	
Penyediaan makanan dan minuman	49.161.000	45.864.000	93,29	100	Tersedianya Uang Minum tenaga kontrak	29	29	orang	Peningkatan kinerja tenaga kontrak melalui tambahan uang minum 12 Bulan	100	100	%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	270.075.850	214.164.640	79,30	90	Rapat koordinasi, konsultasi, pertemuan ke Propinsi, Pusat, luar daerah lain	12	12	bulan	Meningkatnya koordinasi, bimbingan teknis dan konsultasi ke luar daerah dan perjalanan dinas lainnya	100	100	%	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur													

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pembangunan gedung kantor	497.682.753	494.643.252	99,39	100	- Pemasangan KWH meter Perumahan Puskesmas Kotawaringin Lama	1	1	Unit	Terpasangnya Instalasi Listrik dan tertatanya ruang kerja yang efektif dan efisien	100	100	%	
					- Pemasangan sekat / partisi ruang server	1	1	Paket					
					- Pemasangan / penataan jaringan listrik dan penambahan daya	1	1	Paket					
					- Pengadaan tanaman rumput	31	31	M2					
					- Rehab sedang pemagaran dan parit kantor Dinas Kesehatan Kab.Kotawaringin Barat	1	1	Unit					
					- Tersedianya Penataan jaringan dan Penambahan Daya Listrik Kantor Dinas Kesehatan	1	1	Paket					
					- Terpasangnya KWH Listrik 3 Pustu dan 2	5	5	Paket					

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Rumdin Puskesmas - Tersedianya Penambahan daya Listrik Gudang Instalasi Farmasi - Terpasangnya Trafo dan SUTR Puskesmas Runtu - Tersedianya ruang smooking area - Tersedianya lampu Tower Sikda	1 1 1 1	1 1 1 1	Paket Paket Paket Set					
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	332.440.000	302.040.000	90,86	100	- Tersedianya Filling Kabinet - Tersedianya Tenda regu pos kesehatan dan logistik - Tersedianya Umbul-umbul 3 meter - Tersedianya AC 2Pk dan 1Pk - Tersedianya	20 1 10 9 1	20 1 10 9 1	Buah Set Buah Unit Set	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor yang efektif dan efisien guna kelancaran operasional kantor	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Generator Genset untuk server dan vaksin - Tersedianya Gordyn untuk Puskesmas - Tersedianya Lemara arsip dan vaksin - Tersedianya Gordyn untuk puskesmas Sambu, Runtu, Ipuh bangun Jaya dan Kantor Farmasi Kabupaten - Tersedianya Papan Data / Informasi Pustu dan Poskesdes	4 26 4 20	4 26 4 20	Buah Buah Paket Paket					
Pengadaan Peralatan gedung kantor	1.800.000	1.800.000	100	100	Tersedianya Tabung pemadam kebakaran	1	1	Buah	Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang efektif dan efisien guna mendukung kelancaran operasional kantor	100	100	%	
Pengadaan Meubeleur	1.376.710.000	1.300.065.000	94,43	100	- Tersedianya kursi tunggu - Tersedianya kursi	130 4	130 4	Buah Unit	berfungsinya sarana penunjang di Dinas dan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					tamu				Puskesmas				
					- Tersedianya kursi lipat	280	280	Buah					
					- Tersedianya Kasur, Bantal, Sprei dan Sarung Bantal	134	134	Set					
					- Tersedianya meja rapat	30	30	Buah					
					- Tersedianya meja 1/2 biro	120	120	Buah					
					- Tersedianya meja partisi 1/2 biro	4	4	Buah					
					- Tersedianya meja resepsionis	1	1	Unit					
					- Tersedianya Meja Pendaftaran untuk Puskesmas (7 Puskesmas)	7	7	Buah					
					- Tersedianya Meja 1 Biro untuk Puskesmas dan Labkesda	18	18	Buah					
					- Tersedianya Kursi Kerja untuk Labkesda	15	15	Buah					
					- Tersedianya Kursi 1/2 biro untuk Pimpinan Puskesmas,	18	18	Buah					

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Labkesda - Tersedianya kursi tunggu pasien untuk labkesda - Tersedianya Kursi Stool - Tersedianya kursi tunggu untuk Pustu dan Polindes - Tersedianya Box bayi dari stainlees - Tersedianya rak admin untuk pustu	6 20 80 16 20	6 20 80 16 20	Buah Buah Buah Set Buah					
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.320.000	30.029.000	99,04	100	- Pengecatan gedung kantor Dinas Kesehatan/InstalasiFarmasi / Labkesda - Terpeliharanya atap gedung kantor Dinas Kesehatan/InstalasiFarmasi / Labkesda	826 100	826 100	M2 M2	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang efektif dan efisien guna kelancaran operasional kantor	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	144.248.000	142.696.500	98,92	100	- Bahan Bakar Mobil Operasional	7	7	Unit	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
dinas/operasional					- Suku cadang dan jasa service mobil operasional instalasi farmasi dan promosi kesehatan	2	2	Unit	kendaraa dinas/operasional yang efektif dan efisien guna kelancaran operasional program kesehatan				
					- Suku cadang dan service kendaraan roda 4	6	6	Unit					
					- Bahan bakar eselon II roda 4	1	1	Unit					
					- Bahan Bakar operasional ambulance pelayanan kesehatan lapangan	1	1	Unit					
					- Bahan Bakar kendaraan dinas roda 2	5	5	Unit					
					- Suku cadang dan perbaikan kendaraan roda 2	5	5	Unit					
					- Jasa service mobil operasional yankes	2	2	Unit					
					- Jasa service mobil operasional sekretariat	3	3	Unit					
					- Suku cadang	1	1	Unit					

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					mobil operasional Yankes - Suku cadang mobil operasional Sekretariat	3	3	Unit					
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.749.000	9.969.000	54,15	94,7	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa : JAC JBBM mesin potong rumput Jolie 2T mesin potong rumput	30 160 5	25 160 5	Unit Liter Liter	Terpenuhinya fungsi peralatan gedung kantor dengan baik	100	85	%	
Program peningkatan disiplin aparatur	51.000.000	50.592.000	99.20	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	51.000.000	50.592.000	99.20	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas pegawai di lingkungan Dinas Dikpora	102	103	stel	Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%	
Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	20.000.000	16.500.000	82,50	100	Terlaksananya kegiatan pada program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemulangan Pegawai yang pensiun	20.000.000	16.500.000	82,50	100	Terlaksananya pemulangan PNS yang pensiun ke daerah asalnya	2	2	orang	Terpenuhinya salah satu hak bagi PNS yang sudah pensiun	100	100	%	Dana tidak terserap karena penyesuaian tempat pemulangan PNS
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	112.000.000	98.629.498	88,06	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	90	%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	112.000.000	98.629.498	88,06	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	14	14	Keg	Terwujudnya peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur peserta diklat	80		%	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.440.200	2.408.200	98,68	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	992.000	988.000	99,59	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3	3	Lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3	3	Lap.	
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	456.200	456.200	100	100	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1	1	Lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran	1	1	Lap.	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	992.000	964.000	97,17	100	Terlaksananya penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	1	1	Lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	1	1	Lap.	
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.551.751.519	3.319.481.091	93,46	99,9	Terlaksananya kegiatan pada Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	100	100	%	
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.484.024.219	3.255.240.091	93,43	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan obat dan alat kesehatan /laboratorium serta bahan perbekalan	12	12	Bulan	Terpenuhinya kebutuhan obat dan alat kesehatan/ laboratorium Terpenuhinya bahan perbekalan penunjang pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	12	12	Bulan	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	66.327.300	62.841.000	94,74	96,4	Terlaksananya pendistribusian obat, perbekalan dan alat kesehatan secara merata dan tepat waktu	16	16	pusk.	Terwujudnya pelayanan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan sesuai dengan jumlah, sasaran dan tepat waktu	100	100	%	
Peningkatan Mutu Penggunaan obat dan perbekalan Kesehatan	1.400.000	1.400.000,000	100	100	Terlaksananya penyediaan pengukur suhu ruangan digital	1	1	unit	Tercapainya mutu obat dan pengelolaan obat/perbekalan kesehatan dengan baik	100	100	%	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4.334.724.650	3.800.429.858	87,67	100	Terlaksananya kegiatan pada program Upaya Kesehatan Masyarakat	4	4	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada program Upaya Kesehatan Masyarakat	100		%	
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya	216.468.900	206.846.550	95,55	100	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin	16	16	Pusk.	Terpenuhinya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin Terwujudnya peningkatan kesehatan bagi masyarakat miskin	100 95	100 95	% %	
Peningkatan Kesehatan	1.009.243.750	752.089.800	74,52	100	Terlaksananya program pelayanan	100	90	%	Terpenuhinya target indikator	80	100	%	) Dana tidak terserap karena

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Masyarakat					kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dikontrak				SPM pelayanan kesehatan dasar } Terpenuhinya target penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dasar } Terpenuhinya target pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan	100 80	100 100	% %	ada pengalihan embarkasi pengantar dan penjemput haji yang seharusnya solo menjadi banjarmasin. } Perubahan biaya Transport penginapan, dan n uang harian petugas pengantar haji } Tenaga kontrak (perpindahan tenaga kontrak) } Adanya perbup terkait masalah insentif paramedis } Peruntukan dana pada anggaran perubahan pada triwulan terakhir tidak dapat terlaksana

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													secara optimal) Alur kas tidak sesuai dengan kegiatan
Peningkatan Pelayanan dan Penggulangan Masalah Kesehatan	219.630.000	152.136.000	69,26	100	Terlaksananya penyusunan buku KIA dan audit maternal	2500 1	2500 1	Buku kali	) Tercapainya target cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan) Tercapainya target cakupan kunjungan ibu hamil K-4) Tercapainya target cakupan kompikasi kebidanan yang ditangani) Tercapainya target cakupan pelayanan bayi) Tercapainya target cakupan pelayanan anak balita) Tercapainya target cakupan pelayanan nifas) Tercapainya target cakupan komplikasi neonatus yang ditangani	87 90 100 90 85 90 100	100 100 100 100 72 100 100	% % % % % % %	) Dana terserap bila ada kasu kematian ibu dan bayi) Dana tidak terserap karena biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan) Tidak diambilnya honor PPTK (sudah diambil dari kegiatan lain yang sama PPTKnya)dan honor panitia

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	2.889.382.000	2.689.357.508	93,07	100	Terlaksananya pembiayaan operasional dan pemeliharaan pada puskesmas dan jaringannya	16 74 68	16 74 68	Pusk. pustu poskes.	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang memadahi	80	100	%	Perjalanan Dinas, Listrik, Air dan Telepon yang tidak bisa sepenuhnya diserap
Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.211.217.200	1.159.222.000	95,70	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengawasan Obat dan Makanan	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengawasan Obat dan Makanan	100	100	%	
Peningkatan kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	1.211.217.200	1.159.222.000	95,70	100	Terlaksananya penyediaan alat-alat laboratorium pengawasan pangan dan udara Terlaksananya audit dan pengawasan sarana IRTP, kosmetik, obat tradisional dll	2 1	2 1	unit thn.	Terwujudnya peningkatan keamanan pangan dan pengetahuan masyarakat dan IRTP terhadap standar keamanan pangan, kosmetik, obat dll	70	100	%	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	883.544.050	722.052.850	81,72	99,6	Terlaksananya kegiatan pada Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	100	98	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar Hidup Sehat	359.347.100	290.078.700	80,72	96	Terlaksananya kegiatan dalam rangka pembentukan lembaga desa siaga aktif baru	15	15	desa	Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat Terwujudnya desa siaga pratama dan madya	80 30	70 60	% desa	Program penyuluhan reproduksi dilaksanakan dengan narasumber lokal, tidak sesuai rencana awal untuk menggunakan narasumber nasional sehingga honor, transport, akomodasi tidak terbayarkan Tidak terbayarkan honor panitia kegiatan di 6 kecamatan 36 desa,karena perbup yang membatasi jumlah panitia kerja 20% dari jumlah peserta

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	215.991.400	147.023.400	68,06	98,5	Terlaksananya penyuluhan kesehatan secara langsung pada masyarakat Terlaksananya penyusunan akreditasi tenaga kesehatan yang komprehensif	6	6	kec.	Terwujudnya pengetahuan masyarakat mengenai penyakit menular berbasis PHBS dan kesling Terwujudnya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pola keluarga sadar gizi Terwujudnya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak serta remaja Terwujudnya peningkatan pengetahuan bagi perawat dan bidan dalam menunjang kinerja SPM	80	80	%	Pergantian PPTK Kegiatan yang dilaksanakan transport tidak dibayar sepenuhnya Konsumsi tidak bisa dipertanggungjawabkan
						210	210	Peserta					
						2	2	dok		80	80	%	
										80	80	%	
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	308.205.550	284.950.750	92,45	100	Terlaksananya pelatihan manajemen puskesmas/ pustu dan pengiriman	32	32	orang	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengembangan SDM	100	100	%	
						16	16	orang		85	85	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					peserta diklat teknis/fungsional				Terwujudnya peningkatan kualitas SDM peserta pelatihan sesuai standar dan kurikulum pelatihan				
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	365.706.600	260.625.100	71,26	97,5	Terlaksananya kegiatan pada Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Perbaikan Gizi Masyarakat	100		%	
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	229.021.600	170.201.600	74,31	97,1	Terlaksananya pendistribusian PMT pemulihan gizi buruk dan kurang gizi serta ibu hamil KEK	100	100	%	Terpenuhinya target persentase bayi dan anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin yang mendapat MP- ASI selama 90 hari Terpenuhinya target persentase balita gizi buruk yang yang mendapat penanganan	100 100	100 100	% %	Perjalanan Dinas tidak dapat sepenuhnya terserap karena menyesuaikan dengan kebutuhan
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) Anemia Gizi Besi	136.685.000	90.423.500	66,15	98,2	Terlaksananya penyediaan register posyandu, majalah makanan dan	100	100	%	Tercapainya target cakupan bayi yang mendapat ASI eksklusif	72 90	53,7 97,2	% %	Dana tidak terserap dana yang terjadi bila ada kasus BGM

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.					kesehatan serta perencanaan dan evaluasi program gizi				) Terpenuhinya target cakupan penggunaan garam beryodium di masyarakat) Tercapainya target cakupan bayi dan balita yang mendapat vitamin A) Tercapainya target cakupan ibu hamil yang mendapat tablet FE	90 90	90,9 91,9	% %	atau BGT dan perjalanan dinas,honor panita dan PPTK
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.155.698.900	980.605.800	84,85	94,4	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Lingkungan Sehat	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Lingkungan Sehat	100	90	%	
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	983.906.100	812.006.000	82,52	93,6	) Terlaksananya penyediaan peralatan analisa air portable dan alat ukur kebisingan) Terlaksananya penyusunan laporan hasil pemantauan jentik dan kesling	10 1	10 12	alat lap.	) Terwujudnya stimulan sanitasi dasar yang memenuhi syarat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat) Terwujudnya kondisi lingkungan masyarakat yang memenuhi standar	100 60	100 44,07	% %	Pembuatan dokumen UPL tidak dilaksanakan

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					) Terlaksananya pembinaan kesehatan lingkungan) Terlaksananya studi resiko kesehatan lingkungan) Terlaksananya stimulasi pengolahan air bersih	15 20 6	15 11 6	Pusk. Desa paket	sanitasi dasar) Terwujudnya kualitas air bersih yang terpantau dan memenuhi syarat) Terpenuhinya penyediaan data pemetaan resiko kesehatan lingkungan) Terpenuhinya laporan hasil pemantauan jentik dan kesehatan lingkungan	65 20 1	69,68 11 1	% desa lap.	
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	138.213.400	137.321.400	99,35	100	) Terlaksananya penyuluhan dan pembentukan kader kesling dan pokmair.) Terlaksananya pembangunan stimulasi sarana penyediaan air bersih dan sanitasi dasar) Terkoordinirnya kader kesling, pokmair serta kader jumantik	280 12 672	280 8 329	orang paket orang	) Terwujudnya pembentukan kader kesehatan lingkungan desa dan pokmair) Terwujudnya kepatuhan pengusaha DAM dalam menerapkan persyaratan kualitas air minum) Terwujudnya peningkatan kualitas sarana sanitasi dasar yang	100 75 60	90 100 44,07	% % %	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									memenuhi syarat Terpenuhinya stimulan sarana air bersih dan sarana sanitasi dasar memenuhi syarat yang dimanfaatkan oleh masyarakat	100	100	%	
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan sehat	33.579.400	31.278.400	93,14	95,8	Terlaksananya sosialisasi petugas sanitasi puskesmas dan sosialisasi guru UKS	65	95 (15 org PKM dan 75 Guru)	orang	Tercapainya target pengawasan depot air minum Terpenuhinya penerapan persyaratan kesehatan lingkungan sekolah	75 75		% %	Sewa Gedung dan perjalanan dinas
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.634.355.890	1.406.456.229	86,05	98,1	Terlaksananya kegiatan pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	5	5	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	100	90	%	
Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk	186.190.000	185.490.000	99,62	100	Terlaksananya penyemprotan rumah/ fogging di lokasi penularan	86	86	fokus	Tercapainya penurunan kasus DBD indikator IR DBD per 100.000 penduduk	100	100	%	
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan – bahan Fogging	150.925.740	132.190.000	87,58	100	Terlaksananya penyediaan insektisida DBD	150	150	liter	Tercapainya penurunan angka kejadian DBD untuk	90	90	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					untuk mencapai indikator IR DBD 55 per 100.000 penduduk				mencapai indikator IR DBD per 100.000 penduduk				
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	982.971.250	789.886.429	80,35	96,8	) Terlaksananya pertemuan evaluasi program PMK, strengthening eksternal linkage, lintas sektor program malaria dan HIV/IMS) Terlaksananya kegiatan KPA kabupaten) Terlaksananya penyediaan bahan dan perlengkapan kegiatan pencegahan penyakit menular	3 1 1	3 1 1	keg. Keg. Thn.	Tercapainya penurunan bermakna angka kesakitan dan kematian penyakit menular	60	60	%	
Peningkatan Imunisasi	217.343.000	212.182.000	97,62	100	) Terlaksananya pertemuan monev imunisasi puskesmas) Terlaksananya kegiatan sweeping pencapaian Universal Child	1 500	1 500	keg. Bayi	Terwujudnya target Universal Child Immunization di 89 desa	90	90	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Immunization (UCI) Terlaksananya penyediaan peralatan dan BHP kegiatan imunisasi	1		Tahun					
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	96.925.900	86.707.800	89,45	100	Terlaksananya pertemuan monev SKD KLB dan fogging massal penanggulangan KLB	1	1	keg.	Tercapainya sasaran penyelenggaraan penanggulangan KLB berdasarkan faktor resiko	100	100	%	Dana terserap berdasarkan kasus (per jalanan dinas)
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	238.273.200	149.016.650	62,54	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	100	100	%	
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	69.208.000	58.120.000	83,97	100	Terlaksananya penyusunan profil kesehatan kabupaten dan profil kesehatan per puskesmas	17	72	dok.	Tercapainya target pemutakhiran data sebagai pedoman standarisasi pelayanan kesehatan	100	100	%	
					Terlaksananya pertemuan pemutakhiran data	1	1	Keg.	Terpenuhinya ketersediaan dokumen standar kegiatan pelayanan kesehatan di 16 puskesmas	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	169.065.200	90.896.650	53,76	100	Terlaksananya rapat kerja teknis dan monitoring evaluasi	2	2	keg.	) Tercapainya fungsi dan operasional pelayanan kesehatan di 16 puskesmas dan jaringannya) Terpantaunya kinerja program di bidang kesehatan melalui laporan dari 16 puskesmas	100	100	%	Koordinasi jadi satu dengan kegiatan yang lain (kegiatan bidang lain dan dana APBN /BOK)
										100	100	%	
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	9.500.593.300	9.270.877.850	97,58	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	5		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	100	100	%	
Pembangunan Puskesmas	5.969.157.500	5.882.399.600	98,54	100	Terlaksananya pembangunan gedung kesehatan di puskesmas dan jaringannya	12	12	unit	Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan yang optimal dengan adanya bangunan kesehatan dan pendukungnya	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									yang memadahi				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	2.534.042.722	2.446.405.600	96,54	100	Terlaksananya sarana dan prasarana puskesmas: } Terpenuhinya Mobil Puskesmas Keliling } Terpenuhinya kendaraan operasional R2 } Terpenuhinya alkes polkesdes/ polindes } Terpenuhinya alat sentrifuge Laboratorium Puskesmas	1 17 61 15	1 17 61 15	Unit Unit Paket Unit	Terwujudnya kelancaran operasional pelayanan melalui alat-alat kesehatan yang memenuhi standar	100	100	%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	70.288.500	70.020.000	99,61	100	Terlaksananya stimulan pemberdayaan masyarakat melalui PM2L	3	3	desa	Tercapainya pemanfaatan stimulan peralatan operasional posyandu yang memenuhi standar secara optimal	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas	43.600.000	43.100.000	98,85	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kesehatan puskesmas	1	1	paket	Tercapainya optimalisasi fungsi peralatan kesehatan di puskesmas	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas/Pustu/P olindes	883.504.578	828.952.650	93,82	99,5	Terlaksananya rehab gedung bangunan puskesmas dan jaringannya	10	10	Paket	Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan fasilitas yang dibangun	90	100	%	
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	5.418.424.200	5.417.464.200	99,98	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	100	100	%	
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	5.418.424.200	5.417.464.200	99,98	100	Terlaksananya pelayanan kesehatan pada peserta asuransi kesehatan masyarakat	90	100	%	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat peserta asuransi kesehatan masyarakat	100	100	%	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	86.959.900	60.322.900	69,36	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	100	100	%	
Penyuluhan Kesehatan Anak Balita	86.959.900	60.322.900	69,36	100	Terlaksananya kegiatan LBI dan pertemuan evaluasi program KIA	3	3	keg.	Terpenuhinya target cakupan DDDTK anak balita 2 kali per tahun	86	100	%	Perjalanan dinas, honor pptk dan honor panitia tupoksi
										86	72	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Terpenuhinya target cakupan DDDTK bayi 4 kali per tahun				tidak bisa diserap
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	90.713.300	89.988.300	99,20	99,6	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	100	100	%	
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	90.713.300	89.988.300	99,20	99,6	Terlaksananya kegiatan peringatan hari lanjut usia nasional (HLUN) Terlaksananya penyediaan ATK untuk mendukung Posbindu Lansia	1 50	1 50	keg. paket	Terwujudnya peningkatan cakupan pelayanan usila dan pra usila	60	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D SULTAN NUDDIN													
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.000.700.000,-	922.018.350	92,14	100	Terlaksananya kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran	4	4	Keg..	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	
Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	97.700.000,-	88.020.000,-	90,09	100	- Tersedianya buku cek - Terpenuhinya jasa adm. Bank - Tersedianya Meterai - Terbayarnya honor pelaksana kegiatan	4 12 20 24	4 12 20 24	Buah Kali Lembar Orang	Pelaksana kegiatan mendapat honor, dan terpenuhinya kebutuhan administrasi untuk transaksi keuangan	1	1	Tahun	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.800.000,-	174.825.000,-	98,88	100	- Tersedianya hardisk external - Tersedianya printer ink jet dan dot matrix - Tersedianya UPS 1000-1500vA - Tersedianya komputer (PC) dan laptop	3 12 4 19	3 12 4 19	Unit	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran pelayanan RS	38	38	Unit	
Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai	676.200.000,-	609.252.000,-	90,10	100	Tersedianya makan dan minuman harian untuk pegawai RSUD,	322	322	Orang	Terpenuhinya makan dan minum harian bagi seluruh pegawai RSUD SI	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Dokter, Paramedis dan Non Paramedis								
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	50.000.000,-	49.921.350,-	99,84	100	Perjalanan Dinas Rapat Kordinasi	10	10	Orang	Pejabat struktural/fungsional (menerapkan hasil rapat	1	1	Tahun	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.195.545.000,-	1.179.981.000,-	98,70	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana	8	8	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	47.000.000	46.000.000	97,87	100	- Tersedianya Kursi Tamu - Tersedianya tempat tidur/spring bed - Tersedianya meja + kursi makan	4 4 4	4 4 4	Set	Terpenuhinya perlengkapan rumah dinas dokter spesialis yang memadai	100	100	%	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	171.345.000	167.110.000	99,22	100	- Tersedianya umbul-umbul dan tiang besi - Tersedianya kain dan rail gordyn	40 1	40 1	Buah paket	Terpasangnya umbul-umbul di lingkungan RS dan terpasangnya gorden di ruang ICU dan IGD	100	100	%	
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	43.400.000	42.000.000	96,77	100	- Tersedianya AC untuk rumah dinas dokter spesialis - Tersedianya kulkas untuk rumah dinas	5 5 5	5 5 5	Unit	Terpenuhinya peralatan rumah dinas dokter spesialis yang memadai	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					dokter spesialis - Tersedianya televisi 20 inch untuk rumah dinas dokter spesialis								
Pengadaan peralatan gedung kantor	299.800.000	297.700.000	99,30	100	Tersedianya peralatan gedung kantor (AC)	28	28	Unit	Terpenuhinya AC ruang perawatan, ruang kelas 3, dan ruang ICCU	100	100	%	
Pengadaan Meubeler	122.000.000	121.150.000	99,30	100	- Tersedianya almari loker - Tersedianya kursi lipat - Tersedianya meja ½ Biro	3 130 10	3 130 10	Unit	Terpenuhinya kebutuhan meubeler untuk Rumah Sakit	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8.200.000	8.100.000	98,78	100	Terpeliharanya pagar, taman dan tempat parkir	1	1	Paket	Pagar, taman dan tempat parkir diperbaharui	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	295.300.000	294.121.000	99,60	100	- Terpeliharanya AC - Terpeliharanya Genset - Terpeliharanya perangkat Audio - Tersedianya BBM (Solar) untuk bahan bakar genset	120 1 70 22000	120 1 70 22000	Unit Unit Unit Liter	Tersedianya BBM genset dan terpeliharanya peralatan AC, genset dan audio system	100	100	%	
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	208.500.000	203.800.000	97,75	100	Tersedianya rumah dinas dokter spesialis yang	1	1	Unit	Dokter spesialis dapat menempati rumah dinas yang	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					memadai				layak				
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	191.940.000	191.250.000	99,64	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur	2	2	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	7.000.000	7.000.000	100	100	Tersedianya mesin absensi untuk pegawai RSUD Sultan Imanuddin	1	1	Paket	Peningkatan kedisiplinan pegawai RSUD Sultan Imanuddin	100	100	%	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	184.940.000	184.250.000	99,63	100	Tersedianya pakaian dinas pegawai RSUD SI sebagai unsur kedisiplinan	443	443	Stel	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan perlengkapannya serta atributnya untuk seluruh pegawai RS sebagai unsur kedisiplinan	100	100	%	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	120.000.000	95.629.655	79,69	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	Keg	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	%	
Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	120.000.000	95.629.655	79,69	100	Terlatihnya pegawai RS tentang teknis implementasi PERPU	15	15	Orang	Pegawai RSUD SI yang melaksanakan Bimtek mendapatkan ilmu/ keterampilan hasil Bimtek	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.000.000	2.000.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	2	Lap.	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	%	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	100	100	Terlaksananya penyusunan LAKIP	6	6	Buku	Tersedianya laporan kinerja sebagai bahan perencanaan target kinerja dan pengambilan keputusan	100	100	%	
Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	1.000.000	1.000.000	100	100	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	6	6	Buku	Tersedianya laporan keuangan yang akurat dan efisien	100	100	%	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	100.000.000	95.000.000	95,00	100	Terlaksananya kegiatan pada program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1	1	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	100	100	%	
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	100.000.000	95.000.000	95,00	100	Terlaksananya kegiatan pengadaan monitor display (running text)	1	1	Paket	Tersedianya monitor display (running text) di RSUD Si	100	100	%	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	150.000.000	148,875.000	99,25	100	Terlaksananya kegiatan pada program	1	1	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada program promosi	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					standarisasi pelayanan kesehatan				standarisasi pelayanan kesehatan				
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Plyn. Kesehatan	150.000.000	148.875.000	99,25	100	Terlaksananya pengembangan dan pemutakhiran data dasar pelayanan kesehatan di RSUD	1	1	Paket	Akurasi data pelayanan di RSUD	100	100	%	
Program Pengadaan Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit	10.862.556.198	10.091.810.254	92,90	97,53	Terlaksananya kegiatan pada program standarisasi pelayanan kesehatan	4	4	Keg	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	100	100	%	
Pembangunan Rumah Sakit	3.341.723.198	3.321.37.235	99,39	100	Tersedianya penerangan jalan lingkungan rumah sakit Tersedianya pagar, pengaspalan, pemasangan paving, dan koridor Tersedianya perizinan IMB Terlaksananya pembangunan taman dan kolam	8 4 8 1	8 4 8 1	Tiang Paket Dok. Paket	Tersedianya lingkungan yang asri dan aman, serta terselesaikannya dokumen IMB gedung pelayanan RS	100	100	%	
Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit	6.765.336.000	6.048.636.019	89,41	96,11	Tersedianya alat-alat kesehatan/ alat-alat kedokteran di	6	6	Paket	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kesehatan/ alat alat	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					RSUD SI				kedokteran di RSUD Sultan Imanuddin				
Pengadaan Meubeler Rumah Sakit	107.500.000	105.600.000	98,23	100	- Tersedianya kursi tunggu pasien - Tersedianya lemari kaca, lemari obat narkotik dan rak obat	17 9	17 9	Set Buah	Terpenuhinya kebutuhan meubeler RSUD SI	100	100	%	
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	648.007.000	616.197.000	95,09	100	Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih habis pakai dan peralatan/perlengk apan dapur	1	1	Paket	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga RSUD SI	100	100	%	
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	72.460.000	72.314.180	99,80	100	Terlaksananya kegiatan pada program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	2	2	Keg	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit	26.100.000	26.000.000	99,62	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala koridor RS	1.305	1.305	M2	Terpeliharanya koridor RSUD	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik Rumah Sakit	46.360.000	46.314.000	99,90	100	Terlaksananya pemeliharaan ruang poliklinik RS	2.318	2.318	M2	Terpeliharanya ruang poliklinik	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.091.372.802	941.905.556	86,30	89,00	Terlaksananya kegiatan pada program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	4	4	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	100	100	%	
Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	131.620.000	127.259.800	96,69	98,77	Terlaksananya pelatihan bagi tenaga medis, paramedis dan non paramedis	50	50	Orang	Tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang mendapat pelatihan dapat menerapkan hasil pelatihan	100	100	%	
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	310.322.500	211.551.000	68,17	70,00	Terlaksananya kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan tenaga kesehatan (tenaga medis dan paramedis)	8	8	Keg.	Tenaga medis dan paramedis yang mendapat pelatihan dapat menerapkan ilmu hasil pelatihan	100	80	%	Dua keg. Pelatihan batal/tidak dapat terlaksana karena tidak mendapat tempat dalam quota penyelenggara (RSUD dr. Sardjito Yogya)
Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu	630.230.302	592.586.165	94,03	100	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan bagi GAKIN di RSUD SI	1	1	Tahun	Pasien GAKIN dan pengguna SKTM yang berobat ke RSUD SI dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	19.200.000	10.508.600	54,73	60,00	Terlaksananya perjalanan dinas koordinasi dengan perusahaan mitra kerja RSUD SI	1	1	Tahun	Perusahaan dapat melaksanakan kewajibannya sesuai komitmen dan puskesmas mendapatkan pembinaan dari tim Ponek RSUD SI	100	100	%	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	54.000.000.000	52.921.561.075	98,00	99,82	Terlaksananya kegiatan BLUD RSSI pada program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	1	1	Thn.	Tercapainya sasaran kegiatan pada program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	100	99,82	%	
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	54.000.000.000	52.921.561.075	98,00	99,82	Terlaksananya kegiatan untuk meningkatkan mutu pelayanan RSUD	100	100	%	Kepuasan pelanggan	80	80	%	

Capaian keberhasilan Urusan Kesehatan berdasarkan kinerja output dan outcome yang mendukung pencapaian keberhasilan di bidang kesehatan adalah :

1. Selama tahun 2014 kunjungan RSUD Sultan Imanuddin sebanyak **84.610** orang, meningkat 7% dibandingkan pada tahun 2012 sebanyak **79.407** orang;
2. Pendapatan RSUD Sultan Imanuddin melalui retribusi pelayanan kesehatan sebesar **Rp. 38.011.259.957,-** dari target yang telah ditetapkan Rp.40.262.373.000,- (94,41%);
3. Pada tahun 2013 dilaksanakan survey kepuasan masyarakat pelanggan RSUD Sultan Imanuddin terhadap 600 responden selama 3 bulan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Pangkalan Bun dengan hasil survey kepuasan masyarakat **86,7 % menyatakan puas** dan **13,3% menyatakan kurang puas**;
4. Ketersediaan tenaga dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin dari tahun ke tahun semakin meningkat, pada tahun 2012 jumlah dokter spesialis sebanyak 17 orang, di tahun 2013 meningkat menjadi 22 orang, yang terdiri dari 13 orang PNS dan 9 orang tenaga kontrak, sebagai berikut :
 - a. Dokter Spesialis Bedah : 3 orang (2 orang PNS 1 orang tenaga kontrak);
 - b. Dokter Spesialis Kandungan : 3 orang (2 orang PNS, 1 orang tenaga kontrak);
 - c. Dokter Spesialis Anak : 2 orang (tenaga kontrak);
 - d. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 3 orang (1 orang PNS, 2 orang tenaga kontrak);
 - e. Dokter Spesialis Syaraf : 1 orang (PNS);
 - f. Dokter Spesialis THT-KL : 1 orang (tenaga kontrak);
 - g. Dokter Spesialis Mata : 1 orang (PNS);
 - h. Dokter Spesialis Anastesi : 1 orang (PNS);
 - i. Dokter Spesialis Radiologi : 1 orang (PNS);
 - j. Dokter Spesialis Patologi Klinik : 2 orang (PNS);
 - k. Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa : 1 orang (tenaga kontrak);
 - l. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin : 1 orang (tenaga kontrak).
 - m. Dokter Spesialis Fisik dan Rehabilitasi : 1 orang (PNS);
 - n. Dokter Spesialis Orthodensia : 1 orang (PNS).
5. Tingkat mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Imanuddin sesuai dengan SPM, dari **123 indikator** yang mencapai target **sebanyak 105 indikator (85,37%)**;
6. Pencapaian Indikator tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit sebagai berikut :

- a. *Bed Occupancy Rate (BOR)* : 71,22% (ideal 60-85%);
- b. *Average Length of Stay (Av LOS)* : 3,10 hari (ideal 6-9 hari);
- c. *Bed Turn Over (BTO)* : 83,82 kali (ideal 40-50 kali);
- d. *Turn Over Interval (TOI)* : 1,25 hari (ideal 1-3 hari);
- e. *Net Death Rate (NDR)* : 10,47 perseribu (nilai yang masih ditolerir 25 perseribu);
- f. *Gross Death Rate (NDR)* : 25,04 perseribu (seyogyanya tidak lebih dari 45 perseribu).

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi terkait dengan Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya dokter spesialis lainnya seperti dokter spesialis paru-paru, gizi klinik, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah;
2. Masih Kurangnya tenaga paramedis (perawat dan bidan);
3. Tidak tersedianya anggaran pada awal tahun untuk obat-obatan, alat/bahan habis pakai, *reagen*, makan pasien, gas medis, dan lain-lain yang diperlukan untuk pelayanan pasien RSUD Sultan Imanuddin, sementara pelayanan kepada pasien harus tetap dilakukan sejak awal tahun anggaran, sehingga RSUD Sultan Imanuddin perlu dana pinjaman dari pihak ketiga;
4. Terbatasnya alokasi anggaran untuk meningkatkan dan melengkapi fasilitas dan sarana untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
5. Terbatasnya alokasi anggaran pembangunan dan perbaikan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan rumah sakit;
6. Pada akhir tahun 2013 RSUD Sultan Imanuddin baru mulai menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, namun pemahaman dan pengetahuan karyawan terhadap sistem kelola keuangan tersebut masih minim;
7. Meningkatnya jumlah pasien RSUD Sultan Imanuddin, belum disertai dengan peningkatan alokasi biaya operasional rumah sakit, sehingga biaya untuk obat-obatan, alat/bahan habis pakai setiap tahunnya tidak pernah mencukupi;
8. Terbatasnya alokasi biaya untuk meningkatkan kualitas dokter dan paramedis melalui bimbingan teknis maupun pelatihan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
9. Belum tercapainya beberapa indikator penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan target nasional;

10. Minimnya anggaran Kesehatan, Rendahnya Rasio obat perkapita, standar WHO 2 dolar perkapita, KONAS 1 dollar perkapita, Kotawaringin Barat hanya menyediakan anggaran Rp. 4000 perkapita;
11. Masih tingginya angka KLB penyakit menular di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
12. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan paramedis serta standar kualifikasi minimum tenaga kesehatan pada puskesmas dan jaringannya;
13. Belum terpenuhinya sarana prasarana RSUD Sultan Imanuddin sesuai dengan Master Plan menuju RS Kelas B Non Pendidikan.

Atas permasalahan tersebut maka solusi yang seharusnya diberikan adalah :

1. Perlunya perekrutan tenaga dokter spesialis lainnya dan tenaga paramedis (perawat dan bidan) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan fasilitas dan insentif bagi dokter spesialis;
2. Perubahan pengelolaan keuangan RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai amanat UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Perlunya penambahan anggaran peningkatan fasilitas dan sarana;
4. Perlunya pembiayaan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan rumah sakit yang bersumber dari anggaran selain APBD Kabupaten;
5. Perlunya diadakan pelatihan karyawan khususnya yang terkait pada bagian pengelolaan anggaran/keuangan untuk memahami sistem pengelolaan keuangan BLUD;
6. Perlu upaya peningkatan pendapatan RSUD dari sektor non layanan kesehatan untuk menambah biaya operasional;
7. Perlunya penambahan anggaran untuk peningkatan kualitas dokter dan paramedis melalui bimbingan teknis maupun pelatihan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Perlunya pembiayaan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan rumah sakit yang bersumber dari anggaran selain APBD Kabupaten;
9. Memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya serta melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala untuk mengetahui keluhan pelanggan dan pelayanan kesehatan yang sesuai bagi masyarakat;

10. Ketersediaan anggaran sudah disesuaikan dengan menyediakan alokasi anggaran minimal 10 % belanja langsung dari APBD di luar gaji sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009;
11. Meningkatkan kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas dan jaringannya;
12. Mengajukan usulan kebutuhan tenaga medis dan paramedis serta melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
13. Melengkapi sarana dan prasarana yang belum tersedia secara bertahap dan melakukan integrasi dan sinkronisasi program dengan lintas sektor terkait.

4.1.3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

a) Kondisi Umum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten harus dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Untuk mencegah hal tersebut, maka upaya peningkatan pengetahuan dan penyadaran para pemangku kepentingan, melalui berbagai metode dan media yang efektif, perlu terus dilaksanakan. Mengingat persoalan lingkungan merupakan persoalan yang bersifat lintas wilayah administrasi, lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan, maka tingkat capaian kondisi kualitas lingkungan pada dasarnya merupakan akumulasi dari tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan, baik oleh instansi sektor, kabupaten/kota, maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Konsistensi partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dari para pemangku kepentingan seperti pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat, merupakan kunci penting bagi keberhasilan penanganan urusan lingkungan hidup.

Adapun realisasi kinerja urusan lingkungan hidup atau pembangunan bidang lingkungan hidup tahun 2013 sebagai berikut :

1) Tingkat Penurunan Pencemaran Udara dan Air

a. Tingkat Penurunan Pencemaran Udara Ambient

1. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas udara pada tahun 2014 semester I lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi debu (TSP) sebesar 391,33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ pada lokasi Simpang Tiga

Terminal konsentrasi debu (TSP) sebesar 83,18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi TSP sebesar 171,176 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, dan realisasi semester II lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi debu (TSP) sebesar 3.99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi debu (TSP) sebesar 17.67 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi TSP sebesar 17.94 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, dari ketiga lokasi tersebut pada tahun 2014 semester I mengalami penurunan kualitas udara, target yang diharuskan sebesar 230 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. yaitu pada lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi debu (TSP) mengalami penurunan kualitas udara dengan hasil 391,33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, Hal ini disebabkan pada waktu pengujian udara dilakukan aktifitas transportasi ramai sehingga debu mengalami peningkatan, pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi debu (TSP) sebesar 83,18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi TSP sebesar 171,176 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, memenuhi target yang diharapkan sebesar 230 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Hasil pada semester II lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi debu (TSP) sebesar 3.99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi debu (TSP) sebesar 17.67 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi TSP sebesar 17.94 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, hasil semester I dibandingkan dengan semester II di ketiga lokasi tersebut pada 2014 mengalami penurunan pencemaran udara/kualitas udara, untuk konsentrasi debu (TSP) membaik sebesar 3.99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 65.51 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 153,23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, target yang diharuskan sebesar 230 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Hal ini disebabkan pada waktu pengujian udara waktu itu hari mendung.

2. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas udara pada tahun 2014 semester I lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi kebisingan sebesar 64,1dB(A), pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi kebisingan sebesar 65,5 dB(A), pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi kebisingan sebesar 64,8 dB(A) dan realisasi semester II lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi kebisingan sebesar 71.9 dB(A), pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi kebisingan sebesar 70.4 dB(A), pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi kebisingan sebesar 76.1 dB(A), realisasi pada tahun 2014 semester I pada lokasi simpang empat Pasar Indra Sari konsentrasi kebisingan sebesar 64,1dB(A), pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi kebisingan sebesar 65,5 dB(A), pada lokasi Bundaran pancasila konsentrasi kebisingan sebesar 64,8 dB(A), di ketiga lokasi tersebut pada tahun 2014 semester I mengalami penurunan kualitas udara, target yang diharuskan sebesar 55 dB(A). Realisasi semester II lokasi Simpang Empat

Pasar Indra Sari konsentrasi kebisingan sebesar 71.9 dB(A), pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi kebisingan sebesar 70.4 dB(A), pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi kebisingan sebesar 76.1 dB(A) di ketiga lokasi tersebut pada tahun 2014 semester II mengalami penurunan kualitas udara, target yang diharuskan sebesar 55 dB(A). Hal ini disebabkan pada waktu pengujian udara aktifitas transportasi ramai sehingga kebisingan meningkat, hasil semester I dibandingkan dengan semester II di ketiga lokasi tersebut pada 2014 mengalami peningkatan pencemaran udara/kualitas udara untuk konsentrasi kebisingan pada lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi kebisingan sebesar 7.8 dB(A), pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi kebisingan sebesar 4.9 dB(A), pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi kebisingan sebesar 11.3 dB(A)

b. Tingkat Penurunan Pencemaran Air Sungai Arut

Parameter utama yang digunakan untuk menilai kualitas air sungai adalah *Biological Oxygen Demand (BOD)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)*, *Total Suspended Solid (TSS)* dan *Demand Oxygen (DO)*.

Konsentrasi BOD

1. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2013 terjadi penurunan kualitas pada lokasi Kelurahan Pangkut untuk konsentrasi BOD semester I sebesar 8.6 mg/l dan konsentrasi BOD semester II sebesar 21.1 mg/l, target yang harus dicapai sebesar 3 mg/l, untuk kualitas air sungai tahun 2014 lokasi Kelurahan Pangkut Konsentrasi BOD semester I sebesar 0.9 mg/l dan konsentrasi BOD semester II sebesar 7.39 mg/l berdasarkan parameter BOD, kualitas air sungai mengalami peningkatan pencemaran dengan kata lain, terjadi penurunan kualitas air sungai pada lokasi Kelurahan Pangkut. Target konsentrasi tersebut belum tercapai untuk penurunan pencemaran BOD. Belum tercapainya target penurunan jumlah BOD disebabkan masih banyak aktifitas rumah tangga, industri, penambangan, transportasi dan lain-lain yang mengalirkan limbahnya ke sungai dengan pengolahan yang kurang optimal. Sumber-sumber pencemar lain yang illegal juga memberi andil. Untuk mempercepat tercapainya target maka akan terus diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dan dilakukan pengawasan serta pembinaan kepada para usaha dan/atau

kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan.

2. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai tahun 2013 pada lokasi Jembatan Desa Runtu (Jembatan Runtu) Konsentrasi BOD semester I sudah memenuhi target yakni sebesar 1.5 mg/l dan konsentrasi BOD semester II sudah memenuhi target yakni sebesar 0.3 mg/l dari target yang harus dicapai sebesar 3 mg/l, jadi kualitas air sungai mengalami peningkatan kualitas air sungai untuk beban parameter BOD, sedangkan untuk kualitas air sungai tahun 2014 lokasi Jembatan Desa Runtu (Jembatan Runtu) semester I Konsentrasi BOD sudah memenuhi target yaitu sebesar 0.7 mg/l namun semester II Konsentrasi BOD sebesar 4.66 mg/l belum memenuhi target, target yang harus dicapai sebesar 3 mg/l jadi kualitas air sungai mengalami peningkatan pencemaran dengan kata lain, terjadi penurunan kualitas air sungai pada lokasi Jembatan Desa Runtu (Jembatan Runtu). Konsentrasi tersebut belum tercapai untuk penurunan pencemaran BOD. Belum tercapainya target penurunan jumlah BOD disebabkan masih banyak aktifitas rumah tangga, industri, penambangan, transportasi dan lain-lain yang mengalirkan limbahnya ke sungai dengan pengolahan yang kurang optimal. Sumber-sumber pencemar lain yang ilegal juga memberi andil. Untuk mempercepat tercapainya target maka akan terus diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dan dilakukan pengawasan serta pembinaan kepada para usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan.
3. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2013 pada lokasi Jembatan Sungai Arut, Kelurahan Baru Konsentrasi BOD semester I sudah memenuhi target yakni sebesar 0.9 mg/l dan konsentrasi BOD semester II sudah memenuhi target yakni sebesar 1.1 mg/l dari target yang harus dicapai sebesar 3 mg/l, berdasarkan parameter BOD, kualitas air sungai semakin membaik dengan kata lain, terjadi penurunan pencemaran kualitas air sungai pada lokasi Jembatan Sungai Arut, Kelurahan Baru. Target parameter tersebut telah tercapai, sedangkan kualitas air sungai pada tahun 2014 pada lokasi Jembatan Sungai Arut, Kelurahan Baru Konsentrasi BOD semester I sudah memenuhi target yakni sebesar 1.3 mg/l dan semester II Konsentrasi BOD 5.12 mg/l belum mencapai target dari target yang harus dicapai sebesar 3 mg/l, jadi kualitas air

sungai mengalami peningkatan pencemaran dengan kata lain, terjadi penurunan kualitas air sungai pada lokasi Jembatan Sungai Arut, Kelurahan Baru konsentrasi tersebut belum tercapai untuk penurunan pencemaran BOD. Belum tercapainya target penurunan jumlah BOD disebabkan masih banyak aktifitas rumah tangga, industri, penambangan, transportasi dan lain-lain yang mengalirkan limbahnya ke sungai dengan pengolahan yang kurang optimal. Sumber-sumber pencemar lain yang illegal juga memberi andil. Untuk mempercepat tercapainya target maka akan terus diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dan dilakukan pengawasan serta pembinaan kepada para usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan.

4. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2013 pada lokasi Hilir PT. Korindo Konsentrasi BOD semester I sudah memenuhi target yakni sebesar 1.1 mg/l dan konsentrasi BOD semester II sudah memenuhi target yakni sebesar 0.2 mg/l dari target yang harus di capai sebesar 3 mg/l, berdasarkan parameter BOD, kualitas air sungai semakin membaik dengan kata lain, terjadi penurunan pencemaran kualitas air sungai pada lokasi Hilir PT. Korindo. Target parameter tersebut telah tercapai, kualitas air sungai pada tahun 2014 pada lokasi Hilir PT. Korindo Konsentrasi BOD semester I sudah memenuhi target yakni sebesar 0.8 mg/l dan konsentrasi BOD semester II belum memenuhi target yakni sebesar 4.86 mg/l dari target yang harus di capai sebesar 3 mg/l, jadi kualitas air sungai mengalami peningkatan pencemaran dengan kata lain, terjadi penurunan kualitas air sungai pada lokasi Hilir PT. Korindo konsentrasi tersebut belum tercapai untuk penurunan pencemaran BOD Belum tercapainya target penurunan jumlah BOD disebabkan masih banyak aktifitas rumah tangga, industri, penambangan, transportasi dan lain-lain yang mengalirkan limbahnya ke sungai dengan pengolahan yang kurang optimal. Sumber-sumber pencemar lain yang illegal juga memberi andil. Untuk mempercepat tercapainya target maka akan terus diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dan dilakukan pengawasan serta pembinaan kepada para usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan.

5. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2013 pada lokasi Sungai Lamandau (Hilir Muara Sungai

Arut) Konsentrasi BOD semester I sudah memenuhi target yakni sebesar 1.0 mg/l dan konsentrasi BOD semester II sudah memenuhi target yakni sebesar 0.1 mg/l dari target yang harus dicapai sebesar 3 mg/l, berdasarkan parameter BOD, kualitas air sungai semakin membaik dengan kata lain, terjadi penurunan pencemaran kualitas air sungai pada lokasi Sungai Lamandau (Hilir Muara Sungai Arut). Target parameter tersebut telah tercapai. Realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2014 pada lokasi Sungai Lamandau (Hilir Muara Sungai Arut) Konsentrasi BOD semester I sudah memenuhi target yakni sebesar 2.0 mg/l dan konsentrasi BOD semester II belum memenuhi target yakni sebesar 4.87 mg/l dari target yang harus dicapai sebesar 3 mg/l, jadi kualitas air sungai mengalami peningkatan pencemaran dengan kata lain, terjadi penurunan kualitas air sungai pada lokasi Sungai Lamandau (Hilir Muara Sungai Arut) konsentrasi tersebut belum tercapai untuk penurunan pencemaran BOD. Belum tercapainya target penurunan jumlah BOD disebabkan masih banyak aktifitas rumah tangga, industri, penambangan, transportasi dan lain-lain yang mengalirkan limbahnya ke sungai dengan pengolahan yang kurang optimal. Sumber-sumber pencemar lain yang illegal juga memberi andil. Untuk mempercepat tercapainya target maka akan terus diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dan dilakukan pengawasan serta pembinaan kepada para usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan.

Konsentrasi COD

1. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2013 pada lokasi Kelurahan Pangkut Konsentrasi COD semester I terjadi penurunan kualitas yakni sebesar 30.3 mg/l. Dengan demikian, target realisasi kinerja sebesar 25 mg/l belum tercapai. Angka tersebut menunjukkan telah terjadi penurunan kualitas air sungai atau peningkatan pencemaran air sungai oleh parameter COD pada lokasi Kelurahan Pangkut. Konsentrasi COD semester II pada lokasi Kelurahan Pangkut sudah memenuhi target yakni sebesar 15.4 mg/l target yang harus dicapai sebesar 25 mg/l sehingga pada semester II pada lokasi ini mengalami peningkatan kualitas air sungai. Sedangkan kinerja pada tahun 2014 pada lokasi Kelurahan Pangkut Konsentrasi COD semester I sebesar 38.7 mg/l dan pada semester II konsentrasi COD sebesar 60.00 mg/l. Dengan demikian target

realisasi kinerja sebesar 25 mg/l belum tercapai, jadi pada tahun 2014 Angka tersebut menunjukkan telah terjadi penurunan kualitas air sungai atau peningkatan pencemaran air sungai oleh parameter COD pada lokasi Kelurahan Pangkut. Belum tercapainya target penurunan jumlah COD disebabkan masih banyak aktifitas rumah tangga, industri, penambangan, transportasi dan lain-lain yang mengalirkan limbahnya ke sungai dengan pengolahan yang kurang optimal. Sumber-sumber pencemar lain yang illegal juga memberi andil. Untuk mempercepat tercapainya target maka akan terus diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dan dilakukan pengawasan serta pembinaan kepada para usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan.

2. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2013 pada lokasi Jembatan Desa Runtu (Jembatan Runtu) Konsentrasi COD semester I sudah memenuhi target yakni sebesar 18.2 mg/l dan konsentrasi COD semester II terjadi penurunan kualitas yakni sebesar 69.05 mg/l, target yang harus dicapai sebesar 25 mg/l. Dengan demikian, target realisasi kinerja sebesar 25 mg/l belum tercapai. Angka tersebut menunjukkan telah terjadi penurunan kualitas air sungai atau peningkatan pencemaran air sungai oleh parameter COD semester II tahun 2013 pada lokasi Jembatan Desa Runtu (Jembatan Runtu). sedangkan kinerja pada tahun 2014 pada lokasi Jembatan Desa Runtu (Jembatan Runtu) Konsentrasi COD semester I sebesar 20.9 mg/l dan semester II konsentrasi COD sebesar 24.6 mg/l target realisasi kinerja sebesar 25 mg/l tercapai, jadi pada tahun 2014 pada lokasi Desa runtu (jembatan runtu) mengalami peningkatan kualitas air sungai konsentrasi COD membaik.
3. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2013 pada lokasi Jembatan Sungai Arut, Kelurahan Baru Konsentrasi COD semester I sebesar 42.4 mg/l dan konsentrasi COD semester II 36.5 mg/l target yang harus dicapai sebesar 25 mg/l. Dengan demikian, target realisasi kinerja sebesar 25 mg/l belum tercapai. Sedangkan kualitas air sungai pada tahun 2014 pada lokasi Jembatan Sungai Arut, Kelurahan Baru Konsentrasi COD semester I sebesar 41.7 mg/l dan konsentrasi COD semester II 48.8 mg/l target yang harus dicapai sebesar 25 mg/l. Dengan demikian, target realisasi kinerja sebesar 25 mg/l belum

kualitas air sungai atau peningkatan pencemaran air sungai oleh parameter COD tahun 2014. Belum tercapainya target penurunan jumlah COD disebabkan masih banyak aktifitas rumah tangga, industri, penambangan, transportasi dan lain-lain yang mengalirkan limbahnya ke sungai dengan pengolahan yang kurang optimal. Sumber-sumber pencemar lain yang illegal juga memberi andil. Untuk mempercepat tercapainya target akan terus diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dan dilakukan pengawasan serta pembinaan kepada para usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan.

4. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2013 pada lokasi Hilir PT. Korindo Konsentrasi COD semester I sebesar 27.3 mg/l dan konsentrasi COD semester II 114.3 mg/l target yang harus dicapai sebesar 25 mg/l. Dengan demikian, target realisasi kinerja sebesar 25 mg/l belum tercapai. Sedangkan kualitas air sungai pada tahun 2014 pada lokasi Hilir PT. Korindo Konsentrasi COD semester I sebesar 101.3 mg/l dan konsentrasi COD semester II 53.2 mg/l target yang harus dicapai sebesar 25 mg/l. Dengan demikian, target realisasi kinerja sebesar 25 mg/l belum tercapai. Angka tersebut menunjukkan telah terjadi penurunan kualitas air sungai atau peningkatan pencemaran air sungai oleh parameter COD semester tahun 2014 pada lokasi Hilir PT. Korindo. Belum tercapainya target penurunan jumlah COD disebabkan masih banyak aktifitas rumah tangga, industri, penambangan, transportasi dan lain-lain yang mengalirkan limbahnya ke sungai dengan pengolahan yang kurang optimal. Sumber-sumber pencemar lain yang illegal juga memberi andil. Untuk mempercepat tercapainya target akan terus diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dan dilakukan pengawasan serta pembinaan kepada para usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan.
5. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2013 pada lokasi Sungai Lamandau (Hilir Muara Sungai Arut) Konsentrasi COD semester I sebesar 27.3 mg/l dan konsentrasi COD semester II sebesar 114.3 mg/l target yang harus dicapai sebesar 25 mg/l. Dengan demikian, target realisasi kinerja sebesar 25 mg/l belum tercapai. Angka tersebut menunjukkan telah terjadi penurunan kualitas air sungai atau

Sedangkan kualitas air sungai pada tahun 2014 pada lokasi Sungai Lamandau (Hilir Muara Sungai Arut) Konsentrasi COD semester I sebesar 83.4 mg/l dan konsentrasi COD semester II sebesar 46.8 mg/l, target yang harus dicapai sebesar 25 mg/l. Dengan demikian, target realisasi kinerja sebesar 25 mg/l belum tercapai. Angka tersebut menunjukkan telah terjadi penurunan kualitas air sungai atau peningkatan pencemaran air sungai oleh parameter COD pada tahun 2014 di lokasi Sungai Lamandau (Hilir Muara Sungai Arut). Belum tercapainya target penurunan jumlah COD disebabkan masih banyak aktifitas rumah tangga, industri, penambangan, transportasi dan lain-lain yang mengalirkan limbahnya ke sungai dengan pengolahan yang kurang optimal. Sumber-sumber pencemar lain yang illegal juga memberi andil. Untuk mempercepat tercapainya target akan terus diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dan dilakukan pengawasan serta pembinaan kepada para usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan.

Konsentrasi DO

1. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2013 pada lokasi Kelurahan Pangkut Konsentrasi DO semester I sebesar 7.1 mg/l dan konsentrasi DO semester II sebesar 7.9 mg/l dari target yang harus dicapai sebesar 4 mg/l. Dengan demikian target 4 mg/l belum tercapai pada tahun 2013, sedangkan kualitas air sungai pada tahun 2014 di lokasi Kelurahan Pangkut Konsentrasi DO semester I sebesar 10.0 mg/l dan konsentrasi DO semester II sebesar 2.89 mg/l dari target yang harus dicapai sebesar 4 mg/l. Dengan demikian, target 4 mg/l sudah tercapai pada semester II tahun 2014. Angka tersebut menunjukkan telah terjadi peningkatan Kualitas air sungai atau membaiknya kondisi kualitas air sungai pada konsentrasi COD.
2. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2013 pada lokasi Jembatan Desa Runtu (Jembatan runtun) Konsentrasi DO semester I sebesar 7.8 mg/l dan konsentrasi DO semester II sebesar 7.4 mg/l dari target yang harus dicapai sebesar 4 mg/l. Dengan demikian, target sebesar 4 mg/l belum tercapai. Sedangkan kualitas air sungai pada tahun 2014 di lokasi Jembatan Desa Runtu (Jembatan runtun) semester I konsentrasi

5.55 mg/l dari target yang harus dicapai sebesar 4 mg/l. Dengan demikian, target sebesar 4 mg/l belum tercapai. Angka tersebut menunjukkan telah terjadi penurunan kualitas air sungai atau peningkatan pencemaran air sungai oleh parameter DO. Penurunan DO disebabkan masih banyak aktifitas rumah tangga, industri, penambangan, transportasi dan lain-lain yang mengalirkan limbahnya ke sungai dengan pengolahan yang kurang optimal. Sumber-sumber pencemar lain yang illegal juga memberi andil. Untuk mempercepat tercapainya target akan terus diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dan dilakukan pengawasan serta pembinaan kepada para usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan pada lokasi Jembatan Desa Runtu (Jembatan Runtu).

3. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2013 pada lokasi Jembatan Sungai Arut, Kelurahan Baru Konsentrasi DO semester I sebesar 7 mg/l dan konsentrasi DO semester II sebesar 8 mg/l dari target yang harus dicapai sebesar 4 mg/l. Dengan demikian, target sebesar 4 mg/l belum tercapai. Realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2014 dilokasi Jembatan Sungai Arut, Kelurahan Baru Konsentrasi DO semester I sebesar 10 mg/l dan konsentrasi DO semester II sebesar 4.42 mg/l dari target yang harus dicapai sebesar 4 mg/l. Dengan demikian, target sebesar 4 mg/l belum tercapai. Angka tersebut menunjukkan telah terjadi penurunan kualitas air sungai atau peningkatan pencemaran air sungai oleh parameter DO. Penurunan jumlah DO disebabkan masih banyak aktifitas rumah tangga, industri, penambangan, transportasi dan lain-lain yang mengalirkan limbahnya ke sungai dengan pengolahan yang kurang optimal. Sumber-sumber pencemar lain yang illegal juga memberi andil. Untuk mempercepat tercapainya target akan terus diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dan dilakukan pengawasan serta pembinaan kepada para usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan pada lokasi Jembatan Sungai Arut, Kelurahan Baru.
4. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2013 pada lokasi Hilir PT. Korindo Konsentrasi DO semester I sebesar 6.8 mg/l dan konsentrasi DO semester II sebesar 6.9 mg/l dari target yang harus dicapai sebesar 4 mg/l. Dengan demikian, target sebesar 4 mg/l belum tercapai.

2014 dilokasi PT. Korindo Konsentrasi DO semester I sebesar 7.9 mg/l dan konsentrasi DO semester II sebesar 4.12 mg/l dari target yang harus dicapai sebesar 4 mg/l. Dengan demikian, target sebesar 4 mg/l belum tercapai. Angka tersebut menunjukkan telah terjadi penurunan kualitas air sungai atau peningkatan pencemaran air sungai oleh parameter DO. Penurunan jumlah DO disebabkan masih banyak aktifitas rumah tangga, industri, penambangan, transportasi dan lain-lain yang mengalirkan limbahnya ke sungai dengan pengolahan yang kurang optimal. Sumber-sumber pencemar lain yang illegal juga memberi andil. Untuk mempercepat tercapainya target akan terus diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dan dilakukan pengawasan serta pembinaan kepada para usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan pada lokasi Hilir PT. Korindo.

5. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2013 pada lokasi Sungai Lamandau (Hilir Muara Sungai Arut) Konsentrasi DO semester I sebesar 6.8 mg/l dan konsentrasi DO semester II sebesar 6.8 mg/l dari target yang harus dicapai sebesar 4 mg/l. Dengan demikian, target sebesar 4 mg/l belum tercapai, realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2014 dilokasi Sungai Lamandau (Hilir Muara Sungai Arut) Konsentrasi DO semester I sebesar 10.4 mg/l dan konsentrasi DO semester II sebesar 3.65 mg/l dari target yang harus dicapai sebesar 4 mg/l. Dengan demikian, target sebesar 4 mg/l pada semester II tahun 2014 tercapai. Angka tersebut menunjukkan telah terjadi peningkatan kualitas air sungai atau penurunan pencemaran air sungai oleh parameter DO.

Konsentrasi TSS

1. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2013 pada lokasi Kelurahan Pangkut Konsentrasi TSS semester I sebesar 113 mg/l dan konsentrasi TSS semester II sebesar 50 mg/l dari target yang harus dicapai sebesar 50 mg/l, berdasarkan parameter TSS terjadi penurunan kualitas air sungai, target yang diharapkan 50 mg/l. Dengan demikian target sebesar 50 mg/l belum tercapai. Realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2014 pada lokasi Kelurahan Pangkut Konsentrasi TSS semester I sebesar 363 mg/l dan konsentrasi TSS semester II sebesar 97mg/l dari target yang

terjadi penurunan kualitas air sungai, target yang diharapkan 50 mg/l. Dengan demikian target sebesar 50 mg/l belum tercapai. Angka tersebut menunjukkan telah terjadi penurunan kualitas air sungai atau peningkatan pencemaran air sungai oleh parameter TSS. Penurunan jumlah TSS disebabkan masih banyak aktifitas rumah tangga, industri, penambangan, transportasi dan lain-lain yang mengalirkan limbahnya ke sungai dengan pengolahan yang kurang optimal. Sumber-sumber pencemar lain yang illegal juga memberi andil. Untuk mempercepat tercapainya target akan terus diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dan dilakukan pengawasan serta pembinaan kepada para usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan pada lokasi Kelurahan Pangkut.

2. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2013 pada lokasi Jembatan Desa Runtu (Jembatan Runtu) Konsentrasi TSS semester I sebesar 136 mg/l terjadi penurunan kualitas air sungai sebesar 136 mg/l, target yang diharapkan 50 mg/l dan konsentrasi TSS semester II sebesar 28 mg/l sudah memenuhi target dari target yang harus dicapai sebesar 50 mg/l, berdasarkan parameter TSS terjadi penurunan kualitas air sungai, realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2014 dilokasi Jembatan Desa Runtu (Jembatan Runtu) Konsentrasi TSS semester I sebesar 114 mg/l terjadi penurunan kualitas air sungai sebesar 67 mg/l target yang diharapkan 50 mg/l dengan demikian target sebesar 50 mg/l belum tercapai pada semester II tahun 2014. Angka tersebut menunjukkan telah terjadi penurunan kualitas air sungai atau peningkatan pencemaran air sungai oleh parameter TSS 2014. Peningkatan konsentrasi TSS disebabkan masih banyak aktifitas rumah tangga, industri, penambangan, transportasi dan lain-lain yang mengalirkan limbahnya ke sungai dengan pengolahan yang kurang optimal. Sumber-sumber pencemar lain yang illegal juga memberi andil. Untuk mempercepat tercapainya target akan terus diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dan dilakukan pengawasan serta pembinaan kepada para usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan pada lokasi Jembatan Desa Runtu (Jembatan Runtu).
3. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2013 pada lokasi Jembatan Sungai Arut, Kelurahan Baru Konsentrasi TSS semester I sebesar 32 mg/l dan konsentrasi

Berdasarkan parameter TSS terjadi penurunan pencemaran/ kondisi kualitas air sungai membaik, target yang diharapkan 50 mg/l. Realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2014 dilokasi Jembatan Sungai Arut, Kelurahan Baru Konsentrasi TSS semester I sebesar 44 mg/l sudah memenuhi target, target yang diharapkan sebesar 50 mg/l dan konsentrasi TSS semester II sebesar 68 mg/l belum memenuhi target yang diharapkan 50 mg/l. Angka tersebut menunjukkan telah terjadi penurunan kualitas air sungai atau peningkatan pencemaran air sungai oleh parameter TSS semester II pada tahun 2014, terjadi peningkatan pencemaran disebabkan masih banyak aktifitas rumah tangga, industri, penambangan, transportasi dan lain-lain yang mengalirkan limbahnya ke sungai dengan pengolahan yang kurang optimal. Sumber-sumber pencemar lain yang illegal juga memberi andil. Untuk mempercepat tercapainya target akan terus diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dan dilakukan pengawasan serta pembinaan kepada para usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan pada lokasi Jembatan Sungai Arut, Kelurahan Baru.

4. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2013 pada lokasi Hilir PT. Korindo Konsentrasi TSS semester I sebesar (-) mg/l dan konsentrasi TSS semester II sebesar 37 mg/l sudah memenuhi target. Berdasarkan parameter TSS terjadi penurunan kualitas air sungai, target yang diharapkan 50 mg/l. Realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2014 pada lokasi Hilir PT. Korindo Konsentrasi TSS semester I sebesar 35 mg/l dan konsentrasi TSS semester II sebesar 44 mg/l sudah memenuhi target. Berdasarkan parameter TSS terjadi penurunan kualitas air sungai, target yang diharapkan 50 mg/l. Dengan demikian target realisasi kinerja tahun 2014 tercapai. Angka tersebut menunjukkan telah terjadi peningkatan kualitas air sungai.
5. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2013 pada lokasi lokasi Sungai Lamandau (Hilir Muara Sungai Arut) Konsentrasi TSS semester I sebesar 213 mg/l terjadi penurunan kualitas air sungai sebesar 213 mg/l, target yang diharapkan 50 mg/l dan konsentrasi TSS semester II sebesar 50 mg/l belum memenuhi target. Dengan demikian terjadi penurunan kualitas air dan belum mencapai target. Realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun

Konsentrasi TSS semester I sebesar 58 mg/l belum memenuhi target dan konsentrasi TSS semester II sebesar 10 mg/l sudah memenuhi target, dengan demikian terjadi penurunan kualitas air dan belum mencapai target. Angka tersebut menunjukkan telah terjadi peningkatan kualitas air sungai atau peningkatan pencemaran air sungai oleh parameter TSS tahun 2014.

2. Tingkat Penurunan Pencemaran Air Sungai Kumai

Konsentrasi BOD

1. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2013 semester I lokasi Kumai Hulu konsentrasi BOD sebesar 1.7 mg/l, pada lokasi sungai Sekonyer konsentrasi BOD sebesar 1.7 mg/l, pada lokasi Kumai Hilir konsentrasi BOD sebesar 1.8 mg/l pada ketiga lokasi tersebut target tercapai dari target yang diharapkan sebesar 3 mg/l, angka tersebut menunjukkan peningkatan kualitas air sungai, dan pada semester II dilokasi Kumai Hulu sebesar 0.90 mg/l, pada lokasi Sungai Sekonyer konsentrasi BOD sebesar 0.30 mg/l, pada Kumai Hilir konsentrasi BOD sebesar 0.60 mg/l, pada ketiga lokasi tersebut target tercapai dari target yang diharapkan sebesar 3 mg/l, angka tersebut menunjukkan peningkatan kualitas air sungai. Sedangkan kualitas air sungai pada tahun 2014 semester I lokasi Kumai Hulu konsentrasi BOD sebesar 0.9 mg/l, pada lokasi sungai Sekonyer konsentrasi BOD sebesar 0.7 mg/l, pada lokasi Kumai Hilir konsentrasi BOD sebesar 1.2 mg/l, pada ketiga lokasi tersebut target tercapai dari target yang diharapkan sebesar 3 mg/l, angka tersebut menunjukkan peningkatan kualitas air sungai, dan pada semester II dilokasi Kumai Hulu sebesar 4.40 mg/l, pada lokasi Sungai Sekonyer konsentrasi BOD sebesar 7.48 mg/l, pada Kumai Hilir konsentrasi BOD sebesar 5.48 mg/l, ketiga lokasi tersebut belum mencapai target, dari target yang diharapkan sebesar 3 mg/l, angka tersebut menunjukkan penurunan kualitas air sungai pada semester II tahun 2014.

Konsentrasi COD

1. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2013 semester I lokasi Kumai Hulu konsentrasi COD sebesar 33.3 mg/l, pada lokasi sungai Sekonyer konsentrasi COD sebesar 45.5 mg/l, pada lokasi Kumai Hilir konsentrasi COD sebesar 39.4 mg/l, ketiga lokasi tersebut belum mencapai target dari target yang diharapkan sebesar 25 mg/l, angka tersebut menunjukkan penurunan kualitas air sungai, dan pada

semester II pada lokasi Kumai Hulu sebesar 0.90 mg/l, pada lokasi Sungai Sekonyer konsentrasi COD sebesar 0.30 mg/l, pada Kumai Hilir konsentrasi COD sebesar 0.60 mg/l, ketiga lokasi tersebut target tercapai dari target yang diharapkan sebesar 25 mg/l, angka tersebut menunjukkan peningkatan kualitas air sungai. Sedangkan kualitas air sungai pada tahun 2014 semester I lokasi Kumai Hulu konsentrasi COD sebesar 304.0 mg/l, pada lokasi sungai Sekonyer konsentrasi COD sebesar 101.3 mg/l, pada lokasi Kumai Hilir konsentrasi COD sebesar 247.3 mg/l, ketiga lokasi tersebut target belum tercapai dari target yang diharapkan sebesar 25 mg/l, angka tersebut menunjukkan penurunan kualitas air sungai, dan pada semester II pada lokasi Kumai Hulu sebesar 34.6 mg/l, pada lokasi Sungai Sekonyer konsentrasi COD sebesar 76.9 mg/l, pada Kumai Hilir konsentrasi COD sebesar 47.5 mg/l, ketiga lokasi tersebut belum mencapai target, dari target yang diharapkan sebesar 3 mg/l, angka tersebut menunjukkan penurunan kualitas air sungai pada semester II tahun 2014.

2) Jumlah Sumber Pencemar Lingkungan yang Tertangani.

Jumlah sumber pencemar lingkungan yang tertangani tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan yang tertangani pada tahun 2013, bahkan telah melampaui target yang ditetapkan. Target yang harus dicapai pada tahun 2014 sebanyak 16 unit usaha, sementara realisasi atau capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 14 unit usaha dan pada tahun 2014 sebesar 16 unit usaha. Dengan demikian, persentase realisasi kinerjanya sebesar 114,29%.

Sumber pencemar yang tertangani tersebar di wilayah Pangkalan Bun. Umumnya merupakan kegiatan usaha seperti hotel, rumah sakit, industri yang potensial menimbulkan pencemaran air sungai akibat buangan limbah cair yang sebagian dari para pelaku usaha belum mengelola limbahnya dengan baik, begitu juga pencemaran udara akibat emisi dari cerobong asapnya .

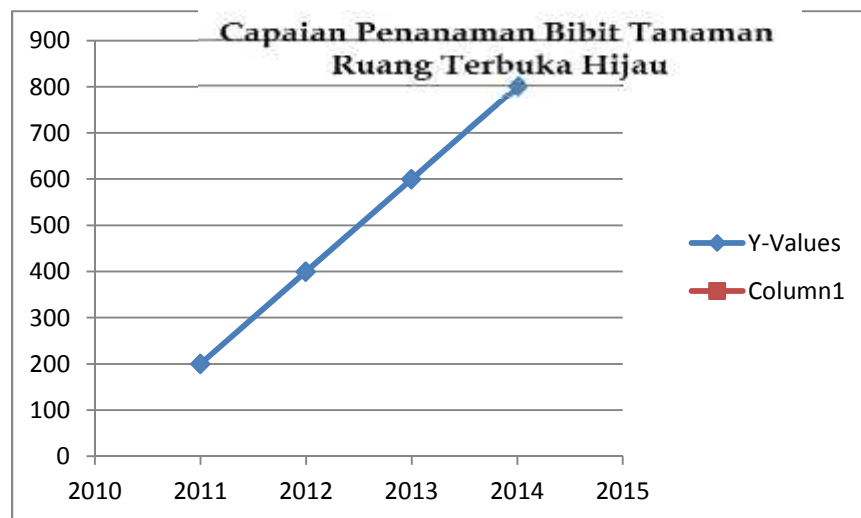
Pada Tahun 2014 Badan Lingkungan Hidup juga melaksanakan program/kegiatan yang terkait dengan **Ruang Terbuka Hijau (RTH)**.

Pengadaan bibit tanaman ruang terbuka hijau, dengan spesifikasi teknis: Pucuk Merah = 678 batang, dengan tinggi $\pm$ 45 cm s/d 60 cm beserta Pot Bunga. Sasaran kegiatan Pasar, Pelabuhan dan jalan protokol yaitu sebagian di jalan Iskandar sekitar jalur menuju Pintu gerbang masuk Bandara hingga jalur jalan H.M. Rafi'i Pangkalan Bun.

Adapun maksud dan tujuannya adalah :

1. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau di wilayah Fasilitas Umum sebagai Upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan terutama udara di Jalur Lalu lintas, pemukiman setempat serta Kota Pangkalan Bun dan sekitarnya,
2. Guna mendukung sosialisasi pola hidup bersih dan sehat serta mempertahankan kota Pangkalan Bun sebagai kota adipura.
3. Salah satu upaya pencegahan terjadinya pemanasan global, banjir dan longsor.

Grafik 4.1



Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kotawaringin Barat

4) Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah.

BLH Kabupaten Kotawaringin Barat belum melakukan pengukuran untuk penurunan fluktuasi muka air tanah. Saat ini kegiatan yang dilakukan terkait dengan hal tersebut diatas hanya berupa pembuatan/pengadaan :

a. Biopori

Pada tahun 2014 BLH Kabupaten Kotawaringin Barat pengadaan alat biopori sebanyak 50 Buah dan telah melakukan pembuatan biopori sebanyak 32000 lubang biopori dalam rangka HUT Kabupaten Kotawaringin Barat Ke-55 dan HUT TNI Ke-69 bekerjasama dengan Dandim 1014 Pangkalan Bun beserta jajarannya yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat 12.000 lubang biopori, Kabupaten Sukamara sebanyak 10.000 lubang biopori dan Kabupaten Lamandau 10.000 lubang biopori. Maksud dan tujuannya adalah :

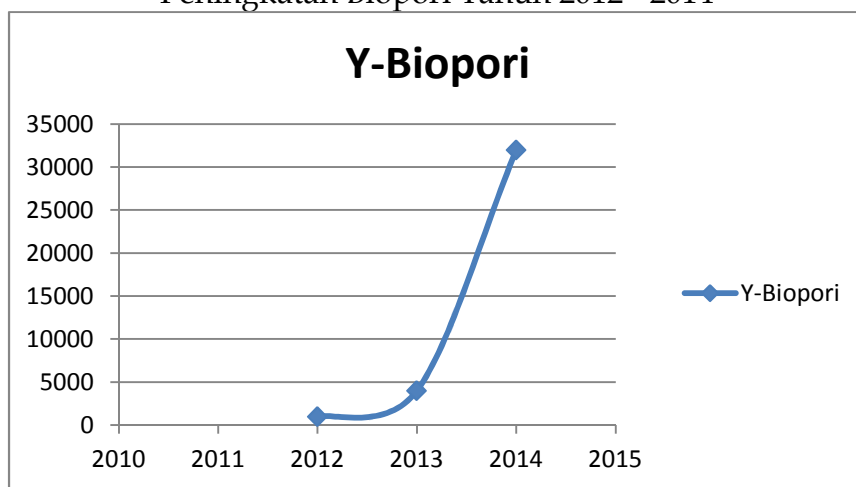
1. Tersedianya perlindungan sumber daya air melalui kegiatan pembuatan lubang biopori yang dapat memberikan tambahan cadangan air di musim kemarau dan mengurangi air limpasan run off di musim hujan.
2. Upaya untuk mengendalikan tata air tanah di tiga Kabupaten yaitu Kotawaringin Barat, Sukamara dan Lamandau.

3. Lubang biopori dapat meningkatkan kesuburan tanah karena terdapat cacing-cacing yang hidup pada lubang yang telah diberi kompos tersebut.

Harapannya :

1. Dalam pelaksanaan perlindungan sumber daya air adalah meningkatnya jumlah debit air yang tertampung di saat musim hujan dan tersedianya cadangan air di musim kemarau serta meningkatnya kesuburan tanah di wilayah yang terdapat biopori tersebut.

Grafik 4.2
Peningkatan Biopori Tahun 2012 - 2014



Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kotawaringin Barat

Capaian: Semakin banyak Biopori maka semakin tersedia sarana perlindungan sumber daya air/biopori di wilayah bangunan pemerintah seperti kantor, sekolah, rumah sakit dan pemukiman penduduk.

b. Persampahan

Dalam peningkatan pengelolaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan ada beberapa jenis kegiatan yang telah dilakukan :

1) Pengadaan Kotak Sampah

Guna mendukung terjalannya pengelolaan sampah yang baik dari sumber sampai dengan pemrosesan akhir, ketersediaan sarana dan prasarana dari pemerintah sangat diperlukan disamping swadaya dari masyarakat. Oleh karena itu Pengadaan kotak sampah akan dilakukan setiap tahun untuk mencukupi kebutuhan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pada fasilitas umum seperti Rukun Tetangga (RT), Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, Pasar dan Rumah Ibadah. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, jumlah timbulan sampah tahun 2013 adalah sebesar 427.17 m³/hari dan terangkut ke TPA dengan jumlah

Diharapkan dengan adanya ketersediaan kotak sampah dapat mencegah pencemaran sampah yang berserakan sebelum terangkut ke TPA dan pewadahan sampah yang baik dan tertutup dapat mengurangi vector penyakit yang di akibatkan dari sampah.

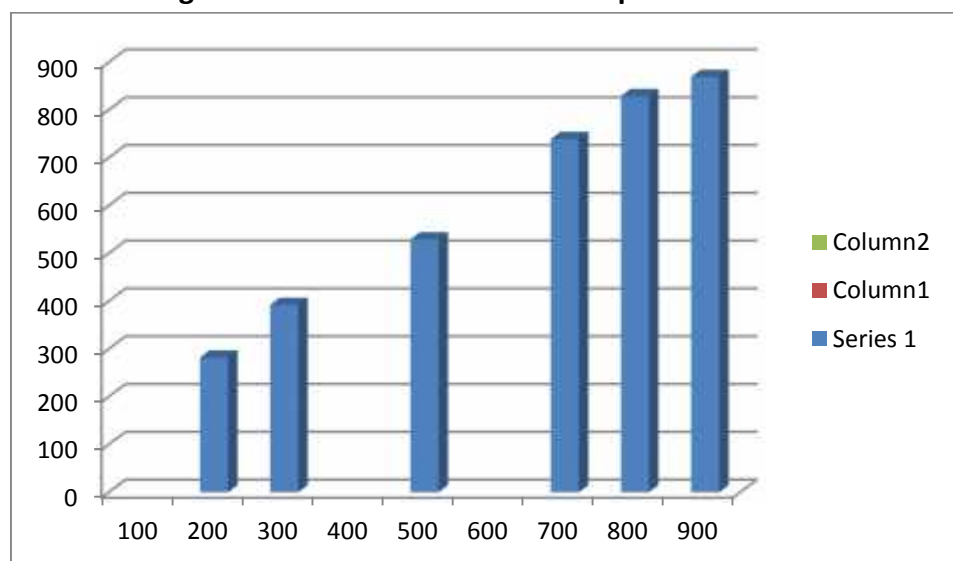
Tabel. 4.5
Jumlah kotak sampah dan volume sampah tertampung

No.	Tahun	Spesifikasi	Jumlah kotak sampah	Jumlah Total	Volume sampah tertampung
1.	2011	HDPE, 0.24 m3	282	282	67.68 m3
2.	2012	HDPE, 0.24 m3	110	392	94.08 m3
3.	2013	HDPE, 0.24 m3	137	529	126.96 m3
4.	2014	HDPE, 0.12 m3	210	739	88.68 m3
5.	2014	HDPE, 0.24 m3	90	829	198.96 m3
6.	2014	HDPE, 0.66 m3	40	869	573.54 m3

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kotawaringin Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah kapasitas timbunan sampah yang dapat tertampung dari total sarana kotak sampah sampai pada tahun 2014 adalah 573,54 m3. Jika diasumsikan selisih kebutuhan menggunakan sampah yang terangkut ke TPA, maka sampah yang bisa diasumsikan belum memiliki pewadahan yang baik sebesar 143.02 m3/hari.

Diagram 4.1
Peningkatan Jumlah Sarana Kotak Sampah Pertahun



Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kotawaringin Barat

Sampah terdiri dari berbagai komposisi didalamnya yaitu komposisi organik dan anorganik. Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, komposisi sampah organik adalah komposisi terbesar dari total timbulan sampah perhari di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Teknologi tepat guna yang bisa diterapkan untuk mengelola sampah organik adalah dengan dekomposisi secara berkelanjutan menggunakan komposter. Dekomposisi dengan komposter mengurangi jumlah leacet hasil penguraian dan pencampuran air hujan yang sangat mungkin keluar mencemari sumber - sumber air. Sarana pengkomposteran dibagikan kepada beberapa fasilitas umum seperti Sekolah, Puskesmas, Rumah Sakit dan beberapa Rukun Tetangga (RT) titik pantau adipura.

3) Pengadaan Gerobak Sampah

Tahun 2014 dilaksanakan pengadaan Gerobak Sampah sebanyak 47 buah untuk mobilisasi sampah dari rumah-rumah warga menuju TPS Perumahan.

4) Pengadaan Mesin Pencacah Plastik

Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai dilingkungan sehingga diperlukan tindakan lebih lanjut untuk pendaur ulangan sampah tersebut menjadi produk lain yang bermanfaat. Dari data Dinas Pekerjaan Umum timbulan sampah Plastik harian Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 48.81 m³ perhari. Pengadaan mesin pencacah plastik bertujuan menyediakan prasarana untuk mengelola sampah plastik (An-organik) harian. Tahun 2014 diadakan 3 unit sarana mesin pencacah plastik dengan kapasitas olah 50 kg/jam.

Pengadaan mesin pencacah rumput/kompos bertujuan menyediakan prasarana untuk mengelola sampah organik harian. Tahun 2014 diadakan 3 unit sarana mesin pencacah rumput dengan kapasitas olah 50 kg/jam.

Dalam peningkatan pengelolaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pada tahun 2014 ini ada beberapa jenis kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum antara lain:

1) Sosialisasi dan pendampingan pembentukan pengelola persampahan berbasis RT. Telah terbentuk satu unit pengelola sampah di RT 19 kelurahan Madurejo kecamatan Arut Selatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Akar Telu. Unit pengelola ini

juga berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan persampahan kota Pangkalan Bun pada skala terbatas.

- 2) Sosialisasi jam pembuangan sampah yang pada tahun sebelumnya dilakukan mulai pukul 07:00 WIB dimajukan pada pukul 05:00 WIB. Sedangkan untuk jadwal pembuangan sampah oleh masyarakat harus dilakukan pada pukul 22:00 WIB sampai dengan 05:00 WIB

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.545.291.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.876.697.716,00 atau 96,89 %. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.4.6
Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
an Lingkungan ip													
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	681.745.000				Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	325.000	114.000	35,08	35,08	Terlaksananya pengiriman paket untuk menunjang pelaksanaan tupoksi	13	5	Paket	Jumlah Pengiriman paket yang tersedia	90	35,08	%	
Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik	54.600.000	40.449.249	74,08	100	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, listrik, surat kabar, internet , hosting website di lingkungan BLH	5	5	Rek.	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik, surat kabar, internet , hosting website di lingkungan BLH untuk menunjang terlaksananya tupoksi	100	100	%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	8.000.000	3.027.800	37,85	37,85	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 3 ¼ Roda 4	6 2 2	5 - 2	Unit Unit Unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	80	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa administrasi keuangan	84.855.000	84.035.000	99,03	99,74	Terlaksananya pembayaran honor jasa administrasi keuangan dan petugas keamanan di lingkungan BLH	13	13	Orang	Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan. Terwujudnya keamanan dan kebersihan dilingkungan kantor	100	100	%	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.320.750	28.394.750	93,65	100	Terlaksananya jasa kebersihan kantor dan penyediaan peralatan kebersihan kantor	1 1	1 1	Tahun Paket	Terwujudnya kebersihan ruang kantor BLH	100	100	%	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.500.000	12.300.000	98,40	98,40	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan BLH berupa : ¼ Mesin tik ¼ PC Komputer ¼ Printer	1 10 10	1 10 10	Buah Unit Unit	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan BLH	100	98,40	%	
Penyediaan alat tulis kantor	34.697.000	34.684.600	99,96	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	Paket	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada BLH	100	100	%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.380.000	15.379.950	100	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa -Blanko disposisi -Amplop berkop BLH -Fotocopy	12 36 50000	12 36 50000	Buku Pak Lbr	Tercapainya ketersediaan bahan pendukung administrasi surat menyurat/administrasi perkantoran	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.350.000	2.350.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor BLH	6	6	jenis	Terpenuhinya penerangan untuk menunjang kelancaran kerja pada BLH	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	225.450.000	222.635.700	98,75	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : -Komputer/Desktop -Note Book -Printer -External Hardisk 1 TB -Kamera Digital SLR 18,7 -Sound System -CCTV 8 Camera -Kamera Digital TypeH300 -UPS -Jam Dinding	7 5 10 7 1 1 1 1 3 8	7 5 10 7 1 1 1 1 3 8	Buah Buah Buah Buah Unit Paket Paket Unit Buah Buah	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	
Penyediaan makanan dan minuman	8.764.000	8.420.000	96,07	100	- Biaya minum Petugas Jaga Malam 2 orang. - Biaya minum Petugas Kebersihan 2 orang	730 522	730 522	OH OH	Tersedianya minuman bagi Pegawai Honorer / Tenaga Kontrak BLH Kab. Kotawaringin Barat	100	100	%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	204.503.250	139.718.825	68,32	68,32	Terlaksananya perjalanan dinas rapat dan konsultasi ke luar daerah	1	1	Tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	68,32	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	350.137.000				Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	6	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	36.487.000	35.941.000	98,50	100	Terlaksananya pengadaan : -Gorden Kantor BLH -Kipas Angin Gantung -Umbul - Umbul	109,2 8 30	109,2 8 30	Meter Buah Buah	Tersedianya penutup jendela diruangan Kantor BLH, Kipas angin dan Umbul-umbul Kantor BLH Kab. Kotawaringin Barat	100	100	%	
Pengadaan peralatan gedung kantor	70.500.000	70.090.000	99,42	100	Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor berupa -Solar cell. -Mesin potong rumput	5 3	5 3	Unit Unit	Terwujudnya ketersediaan listrik tenaga surya yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik dan tersedianya mesin potong rumput	100	100	%	
Pengadaan Meubeleur	85.300.000	84.447.000	99,00	100	Terlaksananya penyediaan mebeleur untuk menunjang pelaksanaan kerja berupa : - Meja Biro Sedang - Kursi Kerja Eselon III - Kursi Kerja Eselon IV - Meja Biro Besar - Kursi Kerja Staf - Sofa (Kursi Tamu) - Rak Buku / TV	5 2 13 1 25 1 1	5 2 13 1 25 1 1	Buah Buah Buah Buah Buah Set Buah	Terpenuhinya fasilitas pendukung kantor dan kelancaran dalam pelaksanaan kerja	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	69.590.000	69.290.000	99,57	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung dan halaman kantor BLH	505 1000	505 1000	M2 M2	Terpenuhinya fungsi gedung kantor dan halaman kantor dengan baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja	90	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	79.700.000	79.661.140	99,95	100	Terlaksananya service, penyediaan BBM , pelumas kendaraan dinas operasional	10	10	Unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebthn. BBM, pelumas dan service kendaraan dinas operasional	90	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	8.560.000	8.475.000	99,01	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa ¼ AC ¼ Mesin potong rumput ¼ Alat pengolah sampah	2 1 1	2 1 1	Unit Unit Paket	Terpenuhinya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor dengan baik	100	100	%	
Program peningkatan disiplin aparatur	24.000.000				Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	24.000.000	23.760.000	99,00	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingk. BLH	42	42	Stel	Terwujudnya keseragaman pakaian kerja pegawai BLH	100	100	%	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	95.500.000				Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	95.500.000	64.938.600	68,00	68,00	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang -undangan dan yang terkait LH	9	8	Orang	Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku	90	68,00	%	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.500.000				Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	100	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	6	Eksplr	Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	%	
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	500.000	500.000	100	100	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	6	6	Eksplr	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran	100	100	%	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000	1.000.000	100	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6	6	Eksplr	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	2.024.052.000				Terlaksananya kegiatan pada Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	2	2	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.821.977.000	1.475.782.500	81	81	Terlaksananya penyediaan : -Rumah Kompos -Mesin Perajang Plastik -Mesin Perajang Rumput -Komposter -Timbangan Gantung Jarum Sampah 3R -Mesin Jahit Listrik -Gerobak Sampah (Besi) -Bak Sampah	1 6 6 127 35 30 47 340	1 6 6 127 35 30 47 340	Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	Terpenuhinya ketersediaan tempat penampungan sampah, pengangkutan dan pengolahan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman	100	81	%	
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	202.075.000	202.075.000	100	100	Terlaksananya -Bimbingan teknis pengelolaan persampahan di Kec. Arsel. -Pembayaran honor Petugas Bersih Ratik	100 24	100 24	Orang Orang	Terwujudnya peningkatan pemahaman peserta bimtek tentang pengelolaan persampahan	90	100	%	
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	870.328.000				Terlaksananya kegiatan pada Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	7	7	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	100	100	%	
Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura	231.669.000	221.863.400	95,77	96,11	Terlaksananya rapat koordinasi dan berbagai kegiatan lainnya untuk mendukung dipertahankannya Adipura	5 100 2	5 100 2	Kali Orang Paket	Terwujudnya kota Pangkalan Bun yang bersih, hijau dan teduh dengan predikat kota kecil terbersih tingkat nasional	100	96,11	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	32.600.000	28.292.000	86,79	100	Terlaksananya tindakan preventif dan kuratif terhadap obyek/ kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	14	14	Perush.	Terpenuhinya pemantauan kegiatan/ usaha dalam pengelolaan lingkungan	90	100	%	
Pengelolaan B3 dan limbah B3	104.500.000	99.268.000	94,99	97,85	Terlaksananya pengadaan kotak limbah B3	51	51	Kotak	Terkendalinya B3 dan Limbah B3	90	97,85	%	
Pengkajian dampak lingkungan	191.864.000	188.502.900	98,25	98,41	Terlaksananya pengadaan bahan dan peralatan laboratorium lingkungan	2	2	Paket	Terpenuhinya kebutuhan bahan dan peralatan laboratorium lingkungan	90	98,41	%	
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)	2.020.000	1.822.500	90,22	100	Terlaksananya penilaian terhadap perusahaan yang memenuhi standar administrasi dan teknis	4	4	Perush.	Terpenuhinya standar administrasi dan teknis bagi perusahaan/ pelaku usaha yang berpotensi mencemari lingkungan	90	90,22	%	
Koordinasi penyusunan AMDAL	67.650.000	50.364.000	74,45	90,39	Terlaksananya penyusunan dokumen kelayakan lingkungan yang bisa dipertanggung jawabkan	3	3	Dok.	Terpenuhinya kualitas dan bobot dokumen kelayakan lingkungan yang dapat dipertanggung jawabkan	90	90,39	%	
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	240.025.000	205.800.000	85,74	93,87	Terlaksananya peringatan hari-hari penting lingkungan hidup dan berbagai kegiatan dalam rangka untuk mendukung peran	4	4	Keg.	Terwujudnya peningkatan efisiensi penanganan masalah lingkungan hidup karena dukungan masyarakat	90	93,87	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup								
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	93.575.000				Terlaksananya kegiatan pada Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	3	3	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	100	100	%	
Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber	17.750.000	17.750.000	100	100	Terlaksananya pengadaan alat biopori/ lubang tanam	50	50	Buah	Tersedianya alat pembuatan biopori/ lubang tanam	100	100	%	
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	10.725.000	7.150.000	66,67	100	Terlaksananya Rapat Koordinasi REDD+	4	4	Kali	Terpenuhinya Koordinasi kegiatan adaptasi, mitigasi dan aspek kelompok masyarakat dan dukungan keberlanjutan	90	100	%	
Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	65.100.000	64.750.000	99,46	100	Terlaksananya upaya dalam rangka mensosialisasikan pengendalian kerusakan hutan dan lahan berupa penyediaan Baliho	7	7	Buah	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengendalian kerusakan hutan dan lahan	90	100	%	
Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	128.544.000				Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	3	3	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingk. Hidup	90	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	104.544.000	83.484.602	79,86	80,72	Terlaksananya kegiatan sosialisasi Adiwiyata, Kader lingkungan dan Duta Lingkungan	3	3	Keg.	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang berkualitas	90	80,72	%	
Pengembangan data dan informasi lingkungan	18.000.000	8.000.000	44,44	100	Terlaksananya penyusunan Laporan SLHD dan Buku Data SLHD Kab. Ktw. Barat Tahun 2014	14	14	Dok.	Terpenuhinya kebutuhan data lingkungan hidup	90	100	%	
Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	6.000.000	2.520.000	42,00	100	Terlaksananya penyediaan website informasi lingkungan beserta data-data pendukungnya	1	1	Paket	Terwujudnya kelancaran akses informasi lingkungan melalui website BLH Kab. Ktw. Barat	100	100	%	
Program peningkatan pengendalian polusi	58.000.000				Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengendalian polusi	2	2	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengendalian polusi	80	100	%	
Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	17.000.000	17.000.000	100	100	Terlaksananya pengujian kualitas udara oleh laboratorium udara	6	6	Titik	Diketuainya indeks standar pencemaran udara di Pangkalan Bun	80	100	%	
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	41.000.000	24,577.200	59,94	96,34	Terlaksananya pengujian kualitas dan mutu limbah cair dan padat	2	2	Kali	Terpenuhinya ketersediaan data kualitas dan mutu limbah cair dan limbah padat	80	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program pengendalian kebakaran hutan	69.314.000				Terlaksananya kegiatan pada Program pengendalian kebakaran hutan	2	2	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengendalian kebakaran hutan	90	100	%	
Koordinasi pengendalian kebakaran hutan	7.800.000	7.800.000	100	100	Terlaksananya rapat koordinasi kebakaran hutan	3	3	Kali	Terwujudnya upaya meminimalisir kasus kebakaran hutan akibat eksploitasi hutan dan lahan	90	100	%	
Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	61.514.000	55.418.000	90,09	90,09	Terlaksananya sosialisasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	6	6	Kec.	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	90	90,09	%	
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	101.700.000				Terlaksananya kegiatan pada Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1	1	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	100	100	%	
Penataan RTH	101.700.000	101.122.000	99,43	100	Terlaksananya pengadaan pohon peneduh sebagai sarana RTH (Tanaman pucuk merah)	678	678	Buah	Terwujudnya peningkatan kenyamanan dan keindahan kota melalui penanaman pohon peneduh	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AS PEKERJAAN UM													
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	10.100.205.750	10.058.256.750	99,58	100	Terlaksananya kegiatan pada program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	100	100	%	
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.279.143.750	1.274.440.000	99,63	100	Terlaksananya penyediaan TPS, pembuatan transfer depo dan pembangunan fasilitas infrastruktur TPA baru	3	3	paket	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	100	100	%	
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	8.821.062.000	8.783.816.750	99,57	100	Terlaksananya penyediaan sarana dan jasa pembersihan dan pengangkutan sampah kota	1	1	tahun	Terwujudnya kelancaran ops. keg. kebersihan dan pengangkutan sampah kota	100	100	%	
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	6.945.691.000	6.924.486.250	99,69	100	Terlaksananya kegiatan pada program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	2	2	keg.	Tercapainya sasaran keg. pada Prog. pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	100	100	%	
Penataan ruang terbuka hijau (RTH)	5.128.519.000	5.116.210.250	99,75	100	Terlaksananya pembangunan dan penataan kawasan taman kota, pintu gerbang/tugu masuk	3	3	paket	Tertatanya kawasan taman kota, bundaran dan pintu gerbang	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)	1.817.172.000	1.808.276.000	99,51	100	Terlaksananya pemeliharaan terhadap plankson/media jalan, lampu hias, taman dan penadaan bunga serta perawatanya	3	3	Paket	Terpeliharanya plankson median jalan, tanaman hias dan lampu hias	100	100	%	

Capaian keberhasilan urusan lingkungan hidup Tahun 2014 berdasarkan indikator output dan outcome adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan Adipura selama 8 tahun berturut-turut dengan kategori Kota kecil dengan nilai 75,75.
2. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian perusahaan terhadap kepatuhan hukum bidang lingkungan hidup dengan kelengkapan dokumen AMDAL sebanyak 53 perusahaan dan ada 33 perusahaan yang ikut Proper.
3. Tersedianya data tentang kualitas lingkungan, baik yang berada dilingkungan perusahaan maupun masyarakat.
4. Tersedianya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Buku Data SLHD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014.
Dalam Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah *SLHD* Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 (Penilaian di Tahun 2012), Badan Lingkungan Hidup mendapat peringkat I ditingkat Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dan peringkat 28 besar Kabupaten/Kota ditingkat Nasional.
5. Pembinaan terhadap sekolah-sekolah untuk menuju sekolah Adiwiyata.
 - Tahun 2014 : SMAN-3 Pangkalan Bun mendapat Peringkat Ketiga Penghargaan Sekolah Adiwiyata Terbaik Tingkat Nasional.
 - Tahun 2014 : SMAN-3 Pangkalan Bun mendapat Peringkat Pertama Sekolah Adiwiyata Terbaik Jenjang Sekolah Menengah Atas Tingkat Ekoregion Kalimantan dan Kalimantan Tengah.
 - Tahun 2014 : SMPN-1 Arut Selatan Pangkalan Bun mendapat Penghargaan Sekolah Adiwiyata Terbaik Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Terlaksananya kegiatan :
 - Sosialisasi Adiwiyata.
 - Seleksi Duta lingkungan dan terpilih 2 orang Duta Lingkungan.
 - Pelatihan Kader lingkungan.
 - Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di 6 Kecamatan.
 - Bimtek/Sosialisasi pengelolaan persampahan.
 - Bimtek Pengomposan Skala Rumah Tangga.
 - Pengomposan di titik pantau Adipura.
 - Peringatan hari-hari penting lingkungan hidup.
 - Rapat koordinasi terkait Adipura, kebakaran hutan, Amdal, dan masalah lingkungan hidup lainnya.
7. Tersedianya data dan terlaksananya uji kualitas air di Sungai Arut dan Sungai Kumai dengan 2 kali pengujian dalam setahun untuk masing-

8. Tersedianya data dan terlaksananya uji kualitas udara ambient di Kota Pangkalan Bun, ada 2 kali uji kualitas udara di 6 titik kota Pangkalan Bun, yaitu di Simpang Tiga Pasar Indra Sari, Simpang Tiga Terminal dan Bundaran Pancasila.
9. Upaya meningkatkan kualitas lingkungan juga dilakukan dengan meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pasar Indra sari dan Indra Kencana, Terminal Natai Suka, Pelabuhan Tanjung Putri serta Jalur Jalan Iskandar dan Jalan H. M. Rafi'i dengan melakukan penanaman pohon Pucuk Merah beserta pot sebagai upaya mempercantik dan memperindah kota serta menambah keasrian kota.
10. Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2014 melakukan kegiatan kampanye lingkungan melalui sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, 7 Baliho Kebakaran Hutan dan Lahan serta 6 Baliho Adipura sebagai media informasi perlindungan sumberdaya air untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar tidak membuang sampah disembarang tempat, utamanya ke badan sungai atau pantai/wilayah pesisir dan pembuatan papan informasi larangan membakar hutan dan lahan untuk penyelamatan lingkungan.
11. Pada tahun 2014 dilakukan Inventarisir Kegiatan Nonfisik Adipura sebagai upaya mendukung Program adipura kota Pangkalan Bun.
12. Upaya lain untuk melindungi sumber air minum, pada tahun 2014 telah dikembangkan sanitasi berbasis masyarakat dan edukasi yaitu pembuatan biopori yang berfungsi menampung air hujan atau meningkatkan daya serap air dan mengubah sampah organik menjadi kompos serta memanfaatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman, mengatasi masalah genangan air yang dapat menjadi sarang nyamuk DBD dan Malaria serta sebagai "Carbon Sink" untuk membantu mencegah terjadinya pemanasan global. Pembuatan biopori sebanyak 32000 lubang tanam yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau sebagai bentuk kepedulian BLH beserta Dandim 1014 Pangkalan Bun.
13. Salah satu upaya untuk mendukung pengelolaan kebersihan lingkungan, BLH Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 selain melakukan pengomposan, gotong royong kebersihan, lomba kebersihan, penghijauan lingkungan perkotaan, BLH juga ada pengadaan :
 - Kotak sampah kap. 120 liter sebanyak 210 buah.
 - Kotak sampah kap. 240 liter sebanyak 90 buah.
 - Kotak sampah kap. 660 liter sebanyak 40 buah.
 - Gerobak sampah besi sebanyak 47 buah.
 - Mesin pencacah / perajang plastik sebanyak 6 buah.
 - Mesin kompos pencacah / perajang rumput sebanyak 6 buah

- Mesin jahit untuk pemanfaatan 3R sebanyak 30 buah.
- Timbangan sampah 3R sebanyak 35 buah.
- Komposter 127 buah.
- Pengadaan Baliho Kebakaran Lahan dan hutan sebanyak 7 buah
- Pengadaan Baliho Adipura sebanyak 6 buah

yang didistribusikan kepada seluruh titik pantau dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

14. Selain itu Tahun 2014 ada pembangunan Rumah Kompos sebanyak 1 unit.
15. Di Kabupaten Kotawaringin Barat juga terdapat Bank Sampah sehingga penanganan dalam pemanfaatan sampah-sampah bisa lebih maksimal dilakukan. Daur ulang sampah menjadi produk yang bernilai ekonomis cukup tinggi.
16. Tahun 2014 pengadaan bahan-bahan dan alat-alat laboratorium guna mendukung pelaksanaan kerja di laboratorium lingkungan. Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat sudah meningkat statusnya menjadi UPT LH sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2013, tanggal 18 Nopember 2013 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan, dan telah dilantiknya Pejabat Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan pada tanggal 18 Desember 2013.

C) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terkait dengan urusan lingkungan hidup pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk;
2. Masih minimnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Masih rendahnya penegakan hukum lingkungan;
4. Terbatasnya kemampuan SDM dibidang Lingkungan;
5. Masih banyaknya aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha menyalahi fungsi rencana tata ruang wilayah;
6. Masih terjadi tingkat pelanggaran dan kerusakan lingkungan hidup;
7. Semakin berkurangnya areal konservasi hayati dan plasma nutfah.

Guna mengatasi permasalahan - permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana persampahan;
2. Meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat/dunia usaha

3. Meningkatkan komitmen dalam penegakan hukum lingkungan;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia dibidang lingkungan hidup;
5. Meningkatkan kesesuaian fungsi rencana tata ruang wilayah dalam pembangunan;
6. Pengawasan secara berjenjang sampai lini terbawah untuk menurunkan prosentase pelanggaran dan kerusakan lingkungan hidup;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelestarian daerah konservasi, keanekaragaman hayati dan pengembangan plasma nutfah;
8. Meningkatkan pengembangan kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup;
9. Pengendalian eksploitasi ekosistem dan sumber daya alam;
10. Meningkatkan data base informasi lingkungan hidup;
11. Meningkatkan kuantitas dan kualitas regulasi bidang lingkungan hidup.

4.1.4 URUSAN PEKERJAAN UMUM

a) Kondisi Umum

Infrastruktur mempunyai peran strategis baik dalam mewujudkan kesejahteraan maupun dalam memperkecil kesenjangan dan memperbaiki keadilan. Selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah telah berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan infrastruktur. Infrastruktur terutama jalan, merupakan salah satu sarana penunjang transportasi.

Dengan adanya jalan, maka akses terhadap suatu wilayah akan lebih mudah sehingga pembangunan terhadap segala aspek kehidupan, baik itu kesehatan, pendidikan, ekonomi dapat lebih mudah dilakukan. Pembangunan di bidang pengembangan fasilitas transportasi meliputi prasarana perhubungan yang menyangkut prasarana jalan dan jembatan lebih diarahkan untuk membuka keterisolasian dalam rangka mendorong pertumbuhan wilayah kecamatan.

BINA MARGA

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Adapun hasil yang dicapai diantaranya :

1. Terbukanya daerah terisolir, khususnya daerah pesisir Kubu-Teluk Bogam-Keraya-Sebui;
2. Terbukanya jalan lingkaran selatan meliputi Pangkalan Bun-Kumpai Batu-

3. Terbukanya jalan lingkar, dalam rangka mendukung MP3EI koridor Kalimantan yang menghubungkan daerah luar melalui pelabuhan Tanjung Kalap-Pelabuhan Ro-Ro Panglima Utar;
4. Terbukanya jalan menuju lokasi Bandara Baru di Sebuai;
5. Terbukanya jalan menuju *hinterland* Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Sukamara, Lamandau dan Manis Mata (Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat) melalui pembangunan jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin;
6. Peningkatan skala pelayanan kota dengan peningkatan jalan kota Pangkalan Bun seperti pelebaran jalan Iskandar dan peningkatan jalan lainnya di dalam kota;
7. Peningkatan skala pelayanan jalan dalam kota kecamatan.

Berdasarkan statusnya, jalan dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4.7.
Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Statusnya Tahun 2013 – 2014

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2013		Tahun 2014*)	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	2	3		4	
1	Jalan negara	160,32	6,31	151,32	6,09
2	Jalan provinsi	124,85	4,92	72,75	2,93
3	Jalan kabupaten	1.220,95	48,09	1.222,84	49,28
4	Jalan desa	1.033,02	40,68	1.034,55	41,70
Jumlah		2.539,14	100	2.481,46	100

Cat: *) angka sementara

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Tabel. 4.8
Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Jenis Permukaannya Tahun 2013 - 2014

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2013		Tahun 2014*)	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	2	3	4	5	6
1	Jalan Aspal	744,50	29,32	717,99	28,93
2	Jalan Batu/kerikil	117,63	4,63	115,37	4,65
3	Jalan Tanah	1.277,69	50,32	1.250,87	50,41
4	Tidak dirinci :				
	) Beton	130,23	5,13	135,80	5,47
	) Titian	30,11	1,19	30,09	1,21
	) Lainnya	238,98	9,41	231,33	9,32
Jumlah		2.539,14	100	2.481,46	100

Cat: *) angka sementara

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Panjang keseluruhan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2014 adalah 2.481,46 Km, berkurang dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2013. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan data pada ruas jalan negara dan provinsi, dimana pada tahun 2013 terdapat ruas jalan di daerah

terdata masuk dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga setelah dilakukan pemutakhiran dan penyesuaian data pada tahun 2014, menyebabkan panjang jalan keseluruhan menjadi berkurang.

Tabel. 4.9
Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan
Kondisi fisiknya Tahun 2013 - 2014

No	Uraian	Tahun 2013		Tahun 2014*)	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	2	3		4	
1	Jalan Baik	571,57	22,51	615,14	24,79
2	Jalan Sedang	1.017,71	40,08	981,39	39,55
3	Jalan Rusak ringan	714,64	28,14	657,38	26,49
4	Jalan Rusak Berat	235,22	9,26	227,56	9,17
Jumlah		2.539,14	100	2.481,46	100

Cat: *) angka sementara

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Tabel. 4.10
Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan
Kelas Jalan Tahun 2013 - 2014

No	Uraian	Tahun 2013		Tahun 2014*)	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	2	3		4	
1	Kelas I	-		-	
2	Kelas II	-		-	
3	Kelas III	-		-	
4	Kelas III A	-		-	
	Kelas III B	285,17	11,23	224,07	9,03
	Kelas III C	451,17	17,77	456,25	18,39
	Kelas Tidak dirinci	1.802,80	71,00	1.801,14	72,58
Jumlah		2.539,14	100	2.481,46	100

Cat: *) angka sementara

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Sedangkan kondisi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai akhir tahun 2014 dapat dilihat dari berikut ini :

Tabel. 4.11
Klasifikasi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat
berdasarkan Kondisi fisiknya Tahun 2013 - 2014

No	Uraian	Tahun 2013		Tahun 2014*)	
		Jumlah	%	Panjang (m)	%
1	2	3	4	5	6
1	Jembatan Baik	24	5,97	930	4,07
2	Jembatan Sedang	378	94,03	1.694	7,41
3	Jembatan Rusak	0	0	20.128	88,01
4	Jembatan Rusak Berat	0	0	118	0,52
Jumlah		402	100	22.870	100

Cat: *) angka sementara

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Sumber Daya Air :

Indeks kinerja sistem irigasi dengan rasio ketersediaan air irigasi 0,85 %

bahwa kinerja untuk pengairan persawahan sangat baik. Pencapaian tersebut didukung dengan langkah-langkah pengembangan sistem irigasi dengan kegiatan pembangunan dan peningkatan, pengelolaan sistem irigasi dengan kegiatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan. Hasil yang sudah dicapai pada bidang sumber daya air pada tahun 2014 adalah pembangunan pengaman tebing sungai dan peningkatan pengaman tebing sungai untuk mencegah erosi dan longsor berupa pasangan batu sepanjang 200 meter, beton sepanjang 300 meter dan bronjong sepanjang 90 meter pada 7 lokasi. Pembangunan pintu air bertujuan agar terpenuhinya fungsi bangunan air sebagai drainase, suplesi dan retensi air irigasi/rawa di lahan pertanian dengan Terlaksananya pembuatan 7 buah pintu air dan rehab bangunan air sebanyak 4 buah.

Normalisasi saluran sungai sepanjang 32.900 meter agar terbentuknya profil saluran sungai serta meningkatnya fungsi saluran sungai di 25 sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengembangan pertanian berkelanjutan didukung dengan jaringan pengelolaan sumber daya air untuk daerah irigasi dan daerah rawa agar terpenuhinya kebutuhan air pertanian, mengurangi kehilangan air, menambah debit air dan inspeksi saluran di kawasan daerah irigasi/rawa dengan terpeliharanya jaringan irigasi sepanjang 216.000 meter.

Pembangunan jaringan irigasi dengan peningkatan saluran sepanjang 7.400 meter. pembuatan saluran baru sepanjang 43.100 meter dan rehab saluran sepanjang 39.950 meter. Untuk kemudahan akses menuju lahan pertanian, pada tahun 2014 melalui kegiatan peningkatan jaringan irigasi dibangun peningkatan jalan inspeksi sepanjang 9.575 meter dan pembuatan jembatan layanan sebanyak 9 buah.

Meningkatnya aktifitas masyarakat, baik dari sektor ekonomi maupun pariwisata berpengaruh terhadap jumlah hutan mangrove di sepanjang pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat. Menurunnya populasi mangrove menyebabkan tingkat abrasi tinggi yang dapat mengancam permukiman dan sarana transportasi jalan sehingga pada tahun 2014 dibangun pengaman pantai berupa balok beton sepanjang 500 meter untuk mencegah abrasi pantai di desa Keraya, desa Sebuai dan desa Kubu.

Tabel. 4.12
Indikator Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2013 - 2014

No.	Indikator	2013		2014 *)		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Rasio jaringan irigasi	0,85	0,85	0,86	0,86	100

Cat: *) angka sementara

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Kebersihan :

Pengelolaan persampahan merupakan kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pemindahan,

pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah. Sistem pengelolaan sampah di TPA Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan luas area 30 Ha, pada saat ini menggunakan sistem *Sanitary Landfill*. TPA dilengkapi fasilitas fisik pendukung berupa kantor, garasi alat berat, tempat pencucian *dump truck* sampah, rumah timbang, pos jaga, garasi mobil, sumur pantau dan kolam lindi. Jarak TPA dengan permukiman terdekat adalah 2 Km, jarak TPA dengan sungai atau badan air terdekat 5,2 Km dan jarak TPA dengan pantai 40 Km.

Untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA digunakan alat angkut berupa *dump truck* dengan kapasitas 8 m³ dengan ritasi 2 kali/hari. Jumlah *dump truck* yang beroperasi per hari sebanyak 13 unit. Pengangkutan menggunakan *dump truck* melayani wilayah kota Pangkalan Bun dan Kumai. Khusus gerobak sampah dioperasikan pada masing-masing RT lingkungan permukiman, fasilitas perdagangan, fasilitas perkantoran dengan membentuk lembaga pengelola sampah dan menunjuk petugas untuk mengoperasikan pengambilan sampah dari setiap lingkungan.

Cakupan pelayanan di TPA Trans LIK Desa Pasir Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah sampah yang berasal dari seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sampah yang diperbolehkan dibuang di TPA Sampah adalah sampah rumah tangga (sampah padat yang berasal dari aktifitas rumah tangga) dan sampah sejenis rumah tangga (sampah padat yang berasal dari fasilitas umum dan fasilitas komersial). Tahun 2014 jumlah sampah yang masuk ke TPA Trans LIK Desa Pasir Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat sekitar 342,40 m³/hari dari total timbunan 515,20 m³/hari atau 66,46%.

Tabel. 4.13
Indikator Rasio TPS per satuan penduduk Tahun 2013 - 2014

No.	Indikator	2013		2014 *)		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	4,2	4,2	2,54	2,54	100

Cat: *) angka sementara

Sumber : Dinas PU Kab. Ktw. Barat

Bidang Cipta Karya

Air Limbah

Tersedianya sistem pengolahan air limbah permukiman secara umum di Kabupaten Kotawaringin Barat ditangani melalui sistem setempat (*on-site*) ataupun melalui sistem terpusat (*off-site*). Secara umum air limbah domestik diolah secara *on-site* dengan menggunakan tangki septik. Pada permukiman yang berada di tepian sungai, air limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke badan air / sungai. Dinas Pekerjaan Umum melalui Bidang Cipta Karya pada tahun 2014 sudah membangun instalasi jaringan air limbah kotor SPAL di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 3 paket terdiri dari Kecamatan Kumai

sebanyak 1 paket dan Kecamatan Arut Selatan sebanyak 2 paket dengan tujuan agar meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

Drainase

Jaringan drainase di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagian besar terdapat di pusat-pusat kegiatan dan di sepanjang jaringan jalan utama. Sedangkan di luar pusat kota sebagian besar menggunakan sistem jaringan drainase alami dimana kondisi fisiknya masih berupa tanah serta dalam keadaan dangkal (tertutup tanah). Sistem pengaliran umumnya masih mengandalkan sistem gravitasi.

Keadaan ini menyebabkan besarnya potensi gerusan atau erosi terutama di daerah yang mempunyai tingkat kemiringan lereng sedang sampai dengan tinggi. Banyaknya daerah cekungan dengan tidak dilengkapi saluran drainase yang memadai terhadap timbulnya genangan-genangan akibat arus pembuangan air hujan yang kurang lancar.

Curah hujan yang besar sementara saluran drainase yang tersedia relatif kecil rawan terjadi luapan akibat debit air hujan yang melebihi daya tampung saluran drainasenya. Dari masterplan drainase yang dimiliki oleh Kabupaten Kotawaringin Barat terlihat semua sistem saluran drainase di Kabupaten Kotawaringin Barat bermuara di Sungai Arut, Sungai Buun, Sungai Kumai dan Sungai Lamandau.

Jalan dan Jembatan Perdesaan

Kondisi jalan dan jembatan perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih banyak dalam kondisi jalan tanah sehingga di saat musim hujan jalan menjadi sulit untuk dilalui, pada musim kemarau jalan berdebu. Oleh karena itu di tahun 2014 dilakukan rehabilitasi dan peningkatan jalan sepanjang 46.740 meter berupa cor beton dan laston dengan harapan dapat terpenuhi ketersediaan jalan yang memadai untuk mendukung akses dan kelancaran lalu lintas perdesaan yang akan menunjang perekonomian dan lain-lain.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang terbagi dalam 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu UPTD Alat Berat dan UPTD Laboratorium Konstruksi dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 331.705.866.586,00 dan terealisasi sebesar Rp. 329.742.322.556,91,00 atau 99,40 %. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum berikut kinerja output dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.14
Program / Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
S PEKERJAAN UMUM													
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.884.900.900	1.561.780.793	82,85	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	10	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	%	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	167.400.000	142.704.049	85,24	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum	1	1	keg.	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Dinas PU untuk menunjang terlaksananya tupoksi dinas	100	100	%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	37.454.000	34.232.800	91,39	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional	61	61	unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	738.202.500	640.935.250	86,82	100	Terlaksananya pembayaran honor jasa administrasi keuangan dan petugas keamanan di	47	47	orang	) Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor) Terwujudnya	100 100	100 100	% %	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					lingkungan Dinas Pekerjaan Umum				kelancaran dalam pengadministrasian keuangan				
Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.190.000	8.024.000	97,97	100	Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan kantor	1	1	paket	Terwujudnya kebersihan halaman dan ruang kantor dinas Pekerjaan Umum	100	100	%	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	34.900.000	28.415.000	81,41	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum berupa : ¼ PC Komputer ¼ Notebook ¼ Printer ¼ Jaringan komputer	15 15 20 1	15 15 20 1	unit unit unit thn	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum	100	100	%	
Penyediaan alat tulis kantor	69.857.000	69.857.000	100	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	paket	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada Dinas Pekerjaan Umum	100	100	%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.595.000	32.658.700	64,54	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan, spanduk dan penggandaan untuk mendukung kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya	1	1	paket	Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.533.000	2.533.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor Dinas Pekerjaan Umum	1	1	paket	Terpenuhinya penerangan untuk menunjang kelancaran kerja pada Dinas Pekerjaan Umum	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	222.025.000	218.525.000	98,42	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ¼ Komputer PC ¼ Laptop ¼ Printer ¼ UPS ¼ Kamera digital ¼ LCD proyektor ¼ Telepon PABX ¼ GPS	2 3 14 3 4 2 1 4	2 3 14 3 4 2 1 4	unit unit unit unit unit unit unit unit	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	553.744.400	383.895.994	69,32	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.004.618.985	842.768.468	83,88	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5	5	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	345.652.300	340.500.000	98,50	100	Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas operasional: - Truck Tangki Tinja	1	1	unit	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja	100	100	%	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	83.402.000	83.402.000	100	100	Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa : ¼ Lemari besi pintu geser ¼ Lemari filling kabinet ¼ Kipas Angin	10 10 6	10 10 6	buah unit unit	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	378.235.000	376.435.000	99,52	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin: - gedung tidak bertingkat - gedung bertingkat - halaman kantor	1.690 900 1.000	1.690 900 1.000	m2 m2 m2	Terpenuhinya fungsi gedung kantor dan halaman kantor dengan baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	153.119.000	35.571.468	23,23	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional	19	19	unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	44.210.685	6.860.000	15,51	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa ¼ AC ¼ sound system ¼ instalasi listrik	15 1 1	15 1 1	unit unit paket	Terpenuhinya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor dengan baik	100	100	%	
Program peningkatan disiplin aparatur	162.987.000	162.987.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	81.493.500	81.493.500	100	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum	165	165	stel	Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	81.493.500	81.493.500	100	100	Tersedianya kebutuhan pakaian adat Kobar untuk pegawai di lingkungan Pekerjaan Umum	165	165	stel	Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian pada hari tertentu	100	100	%	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	200.000.000	197.002.110	98,50	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					kapasitas sumber daya aparatur				peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	200.000.000	197.002.110	98,50	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	1	1	tahun	Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku	100	100	%	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.112.500	3.112.500	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	587.500	587.500	100	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	%	
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1.200.000	1.200.000	100	100	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2	2	lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran	100	100	%	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.325.000	1.325.000	100	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	198.275.936.607	197.986.046.173,91	99,85	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	4	4	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	100	100	%	
Pembangunan jalan	111.224.087.637	111.146.781.273,91	99,93	100	Terlaksananya pembangunan jalan melalui konstruksi perkerasan jalan sebanyak 33 paket	33	33	paket	Terpenuhinya ketersediaan jalan yang memadai untuk mendukung akses dan kelancaran lalu lintas	100	100	%	Khusus pekerjaan jl. P.Bun-Kolam realisasi fisik s/d 2014 mencapai 58,68% (kontrak multi years 2013-2015)
Pembangunan jembatan	13.104.830.970	13.058.193.050	99,64	100	Terlaksananya pembangunan jembatan sebanyak 29 paket	29	29	paket	Terpenuhinya ketersediaan jembatan yang memadai untuk menghubungkan antar daerah/kawasan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas	100	100	%	
Peningkatan jalan	50.302.001.800	50.266.915.000	99,93	100	Terlaksananya peningkatan jalan sebanyak 27 paket	27	27	paket	Terpenuhinya ketersediaan jalan yang memadai untuk mendukung akses dan kelancaran lalu lintas	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peningkatan jalan lingkungan pemukiman	23.645.016.200	23.514.156.850	99,44	100	Terlaksananya peningkatan jalan lingkungan pemukiman sebanyak 75 paket	75	75	paket	Terpenuhinya ketersediaan jalan dan jembatan yang memadai untuk mendukung akses dan kelancaran lalu lintas dilingkungan pemukiman	100	100	%	
Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	14.555.394.300	14.521.822.700	99,76	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pembangunan saluran drainase/ gorong- gorong	100	100	%	
Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	14.555.394.300	14.521.822.700	99,76	100	Terlaksananya pembangunan drainase/ gorong-gorong sebanyak 92 paket	14.319	14.319	m	Terpenuhinya ketersediaan drainase/ gorong-gorong yang memadai	100	100	%	
Program Pembangunan turap/talud/bronjong	3.124.562.000	3.116.436.000	99,73	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pembangunan turap/talud/bronjong	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pembangunan turap/talud/bronjong	100	100	%	
Pembangunan turap/talud/bronjong	3.124.562.000	3.116.436.000	99,73	100	Terlaksananya pembangunan pengaman tebing sungai pada 7 lokasi	530	530	m	Terwujudnya peningkatan pengamanan jalan dan bantaran sungai untuk mencegah erosi dan longsor	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	23.958.286.580	23.707.951.800	98,95	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	100	100	%	
Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	21.093.907.800	20.860.520.800	98,89	100	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan meliputi pemeliharaan rutin di 6 kec. dan pemeliharaan berkala sebanyak 28 paket	6 28	6 28	Kec. paket	Terpeliharanya kondisi jalan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pada pengguna jalan	100	100	%	
Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan	2.864.378.780	2.847.431.000	99,40	100	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan sebanyak 22 paket	22	22	paket	Terpeliharanya kondisi jembatan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pada pengguna jalan	100	100	%	
Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	448.692.890	441.854.400	98,47	100	Terlaksananya kegiatan pada Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	100	100	%	
Penyusunan sistem informasi/data base jalan	399.060.400	393.173.400	98,52	100	Terlaksananya pembuatan patok RMJ dan survey kondisi jalan	1	1	paket	Terpenuhinya kebutuhan data base tentang kondisi jalan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan sistem informasi/data base jembatan	49.632.490	48.681.000	98,08	100	Terlaksananya penyusunan data base dan survay kondisi jembatan	1	1	paket	Terpenuhinya kebutuhan data base tentang kondisi jembatan	100	100	%	
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1.472.224.100	1.384.969.600	94,07	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	100	100	%	
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	421.478.000	372842.850	88,46	100	Terlaksananya penyediaan bahan dan alat laboratorium kebinamargaan	29	29	jenis	Terpenuhinya kebutuhan alat ukur dan bahan laboratorium untuk pengendalian konstruksi guna mendukung kegiatan di bidang kebinamargaan	100	100	%	
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	1.012.426.100	974.305.450	96,23	100	Terlaksananya penyediaan suku cadang alat berat berikut BBM dan pelumasnya	26	26	unit	Terpenuhinya optimalisasi fungsi alat berat untuk mendukung kegiatan kebinamargaan	100	100	%	
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	38.320.000	37.821.300	98,69	100	Terlaksananya penyediaan suku cadang alat peralatan laboratorium	23	23	unit	Terpenuhinya optimalisasi fungsi peralatan laboratorium untuk mendukung kegiatan kebinamargaan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	29.228.228.624	28.937.552.474	99,00	100	Terlaksananya kegiatan pada Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	8	8	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	100	100	%	
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	494.550.000	493.550.000	99,79	100	Terlaksananya inventarisasi jaringan irigasi dan reklamsi	5	5	Set-dok	Terpenuhinya kebutuhan data inventarisasi jaringan irigasi dan reklamsi yang memadahi untuk menunjang perencanaan pembangunan jaringan irigasi	100	100	%	
Pembangunan pinntu air	1.739.670.500	1.737.884.500	99,89	100	Terlaksananya pembuatan dan rehab bangunan air	7 4	7 4	buah buah	Terpenuhinya fungsi bangunan air sebagai drainase, suplesi dan retensi air irigasi/rawa di lahan pertanian	100	100	%	
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	4.811.331.000	4.790.186.000	99,56	100	Terlaksananya normalisasi saluran sungai sepanjang 32.450 meter	25	25	sungai	Terbentuknya profil saluran sungai serta meningkatnya fungsi saluran sungai	100	100	%	
Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi	3.735.211.000	3.728.854.750	99,82	100	Terlaksananya pemeliharaan saluran irigasi/rawa dan bangunan air sepanjang 216.000 meter	50	50	lokasi	Terwujudnya optimalisasi fungsi saluran irigasi/rawa dan bangunan air	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rehabilitasi/ pemeliharaan normalisasi saluran sungai	636.350.000	631.541.200	99,24	100	Terlaksananya Rehabilitasi/ pemeliharaan normalisasi saluran sungai sepanjang 33.000 meter				Terwujudnya optimalisasi fungsi saluran sungai	100	100	%	
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	409.191.000	216.166.100	52,82	100	Terlaksananya penyelenggaraan :				Terwujudnya peningkatan Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun melalui penyelenggaraan komisi irigasi, pendampingan SRI dan keikutsertaan Peda KTNA	100	100	%	
					¼ Komisi irigasi	1	1	paket					
					¼ System of rice intensification (SRI)	1	1	paket					
					¼ Penas KTNA	1	1	paket					
Pembangunan jaringan irigasi	5.406.426.200	5.362.642.000	99,19	100	Terlaksananya kegiatan pembangunan jaringan irigasi yang meliputi : ¼ Pembuatan saluran ¼ Pembangunan jembatan layanan	43.100 8	43.100 8	m bh	Terpenuhinya kebutuhan air pertanian dan jembatan layanan di kawasan daerah irigasi/rawa	100	100	%	
Peningkatan jaringan irigasi	11.995.498.924	11.976.727.924	99,84	100	Terlaksananya peningkatan jaringan irigasi yang meliputi:				Terpenuhinya kebutuhan air pertanian, mengurangi kehilangan air (lossing water),	100	100	%	
					- Jembatan	1	1	Bh					
					- Timbunan jalan	9.575	9.575	m					
					- Pasangan batu	7.400	7.400	m					

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					- Galian saluran	39.950	39.950	m	menambah debit air dan inspeksi saluran di kawasan daerah irigasi/rawa				
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah	7.591.966.900	7.522.197.088	99,08	100	Terlaksananya kegiatan pada Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah	100	100	%	
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	1.938.712.000	1.888.016.638	97,38	100	Terlaksananya pembangunan instalasi jaringan air limbah kotor (SPAL)	2	2	paket	Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	100	100	%	
Pengembangan distribusi air minum	5.653.254.900	5.634.180.450	99,66	100	Terlaksananya pembangunan dan rehab sistem distribusi air bersih/air minum bagi masyarakat	19.391	19.391	m	Terpenuhinya kebutuhan air bersih/ air minum bagi masyarakat	100	100	%	
Program Pengendalian Banjir	10.216.374.000	10.206.252.250	99,90	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengendalian Banjir	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengendalian Banjir	100	100	%	
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai	2.713.174.000	2.709.681.000	99,87	100	Terlaksananya peningkatan dan normalisasi saluran induk pengendali banjir sepanjang 34.900 meter	14	14	paket	Terwujudnya pengendalian kawasan banjir dan genangan air	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pembangunan prasarana pengaman pantai	7.503.200.000	7.496.571.250	99,91	100	Terlaksananya pembuatan bangunan pengaman pantai di 4 titik lokasi	500	500	m	Terwujudnya pengamanan kawasan pantai dari erosi dan abrasi	100	100	%	
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	7.260.341.600	7.183.928.400	98,94	100	Terlaksananya kegiatan pada Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	100	100	%	
Perencanaan pengembangan infrastruktur	689.071.600	613.816.400	89,07	100	Terlaksananya penyusunan data base bidang cipta karya	2	2	paket	Terwujudnya penataan kawasan peruntukan perumahan dan permukiman	100	100	%	
Pembangunan/ peningkatan infrastuktur	6.571.270.000	6.570.112.000	99,98	100	Terlaksananya rehabilitasi masjid agung kec. Arsel dan pembangunan pintu gerbang bandara Iskandar P. Bun serta peningkatan jalan lingkungan UNTAMA	3	3	paket	Terwujudnya peningkatan kualitas bangunan masjid agung tersedianya pintu gerbang bandara yang representatif	100	100	%	
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	32.318.239.600	31.980.331.800	98,95	100	Terlaksananya kegiatan pada Program pembangunan infrastruktur perdesaan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pembangunan infrastruktur perdesaan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	2.643.917.000	2.512.627.000	95,03	100	Terlaksananya pembangunan instalasi/ jaringan air bersih di perdesaan berupa pemasangan jaringan perpipaan di Desa Umpang dan Sekunyer	2	2	paket	Terpenuhinya kebutuhan air bersih/ air minum bagi masyarakat Desa Umpang dan Sekunyer	100	100	%	
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	2.883.368.100	2.871.565.100	99,59	100	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan lingkungan pedesaan	41.051	41.051	m	Terpeliharanya kondisi jalan lingkungan pedesaan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pada pengguna jalan	100	100	%	
Peningkatan jalan perdesaan	26.790.954.500	26.596.139.700	99,27	100	Terlaksananya peningkatan jalan lingkungan pedesaan	5.689	5.689	m	Terpenuhinya ketersediaan jalan yang memadai untuk mendukung akses dan kelancaran lalu lintas	100	100	%	

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang hadapi dalam pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Belum kuatnya sinergi antara pemanfaatan infrastruktur pengairan, kelompok tani dan pengelolaan lahan pertanian sehingga menyulitkan optimalisasi outcome pertanian;
2. Kerusakan jalan dan jembatan akibat beban berlebih dari angkutan baik angkutan barang, perkebunan, pertambangan, industri dan angkutan lainnya;
3. Tingginya abrasi pantai serta perlunya penanganan yang lebih sesuai dengan teknis;
4. Terbatasnya dana pemerintah khususnya dana APBD Kabupaten bila dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur yang harus dibangun sehingga kegiatan pembangunan belum dapat merata.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam upaya peningkatan kinerja di masa mendatang perlu diupayakan:

1. Mengoptimalkan sinergi antara pemanfaatan infrastruktur pengairan, kelompok tani dan pengelolaan lahan pertanian;
2. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam hal ini dengan Dinas Perhubungan yaitu dengan memperketat pengaturan penggunaan jalan sesuai dengan kemampuan dan daya dukung kelas jalan yang ada;
3. Mengidentifikasi dan menginventarisir lokasi-lokasi yang tingkat abrasinya cukup tinggi untuk dapat segera dilakukan upaya penanganan secara teknis sedangkan upaya preventifnya yaitu dengan melakukan koordinasi lintas sektor yaitu dengan Dinas Kehutanan melalui upaya penanaman tanaman mangrove penahan abrasi;
4. Mengajukan usulan kegiatan melalui sumber dana APBD Propinsi maupun APBN.

4.1.5. URUSAN PENATAAN RUANG**a) Kondisi Umum**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan agar setiap daerah menyusun atau menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah paling lambat dalam waktu 2 tahun, terhitung sejak undang-undang tersebut diberlakukan.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut merupakan konsekuensi logis, mengingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dijabarkan dalam PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, disebutkan bahwa tata ruang merupakan salah satu dari 31 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah memiliki peranan penting sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan yang merata dan berpengaruh terhadap terwujudnya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Melalui strategi pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, diharapkan pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan.

Kajian dan regulasi terkait penataan ruang perlu disusun sebagai tindak lanjut regulasi penataan ruang yang lebih atas, dengan kaidah berjenjang dan komplementer, sebagai pedoman operasional di tingkat pemberian perijinan pemanfaatan ruang. Hal ini berkaitan dengan masih lemahnya ketaatan terhadap tata ruang yang terkait dengan alih fungsi lahan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan perencanaan ruangnya.

Pemerintah mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan kepada *stakeholder* dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dalam perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Penataan ruang adalah merupakan kerangka strategis dalam mengelola dan mengatur sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta sebagai upaya untuk mentransformasikan ruang yang ada serta tendensinya menuju ke arah suatu struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang kondusif guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Struktur dan pola penataan ruang wilayah pada dasarnya merupakan pedoman dalam merumuskan kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor. Dari sisi pengembangan wilayah, perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat memperlihatkan beberapa fenomena antara lain : belum selarasnya hubungan perkotaan dan perdesaan, ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah/disparitas yang terjadi antar wilayah.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pada program urusan tata ruang adalah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mengoptimalkan peran penataan ruang sebagai media koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

Tabel 4.15
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang
Tahun 2013 – 2014

No.	Indikator	2013		2014 *)		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian Terhadap Target
1.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,08	0,08	0,1	0,1	100

Cat: *) angka sementara

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 117.112.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 112.509.500,00 atau 96,07 %. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Penataan Ruang berikut kinerja output dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.16
Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AS PEKERJAAN UMUM													
Program Perencanaan Tata Ruang	117.112.000	112.509.500	96,07	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Perencanaan Tata Ruang	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Perencanaan Tata Ruang	100	100	%	
Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	117.112.000	112.509.500	96,07	100	Terlaksananya penyusunan perencanaan tata ruang meliputi : ¼ Zoning regulation kelurahan Kumai Hilir	1	1	set dok.	Terpenuhinya kebutuhan rencana tata ruang suatu kawasan	100	100	%	

c) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan penataan ruang adalah :

- 1) Masih lemahnya peranan Tata Ruang dalam perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Masih banyaknya aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha menyalahi fungsi rencana tata ruang wilayah;
- 3) Personil yang menangani urusan penataan ruang daerah dirasa masih kurang memadai;
- 4) Masih belum disyahrkannya RTRW Provinsi yang berpengaruh terhadap RTRW Kabupaten.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut beberapa upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dalam penataan ruang daerah yang didukung anggaran yang memadai dengan melakukan rapat koordinasi teknis dan koordinasi lapangan;
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara lebih efektif disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai, dengan membuat instrumen sosialisasi seperti informasi dipapan pengumuman umum, leaflet, baliho dan website;
- 3) Penambahan personil dan mengirim personil untuk mengikuti pelatihan teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
- 4) Setiap kebijakan yang diambil di bidang penataan ruang agar selalu dikoordinasikan dengan pihak provinsi dan pusat sehingga tidak menimbulkan permasalahan dimasa mendatang.

4.1.6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

a) Kondisi Umum

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mempunyai dokumen perencanaan, yang terdiri atas perencanaan jangka panjang (RPJPD) untuk perencanaan 20 tahunan dan perencanaan jangka menengah (RPJMD) untuk perencanaan pembangunan 5 tahunan.

Masing-masing dokumen perencanaan tersebut telah berketetapan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006–2025 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012–2016.

RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah, sedangkan RPJMD pada hakekatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD selanjutnya dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD selama 5 tahun serta menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya.

Tabel 4.17
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perencanaan
Pembangunan Tahun 2014

No.	Indikator	2014	2014		
			Target	Realisasi	% Real. terhadap target
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	1	1	100 %
2.	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	1	1	- %
3.	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	1	1	100 %
4.	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	ada	397	276	73 %

Sumber : Bappeda Kab. Kotawaringin Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.658.225.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.714.261.166,00 atau 83,31 %. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.18.
Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2014

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BAPPEDA														
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	881.133.750	785.533.596	89,15	99,92	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	11	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240.000	0	0	50,00	Terlaksananya penyediaan perangko dan pengiriman paket	24	24	paket	Terwujudnya kelancaran pengiriman paket dan pelaksana an tugas	100	100	%	Pengiriman dokumen, surat dilakukan melalui email
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	174.360.000	155.435.345	89,15	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Bappeda	1	1	keg.	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Bappeda untuk menunjang terlaksananya tupoksi	100	100	%	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	4.900.000	1.801.000	36,76	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	17 1	17 1	unit unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	112.589.000	105.336.750	93,56	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan Bappeda	12	12	orang	Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan	100 100	100 100	% %	Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	63.070.000	56.337.700	89,33	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	2 1	2 1	orang paket	Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan Bappeda	100	100	%	Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	24.280.000	20.026.000	82,48	97,53	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan BAPPEDA berupa : ¼ Mesin tik ¼ PC Komputer ¼ Laptop/personal komputer ¼ UPS/stabilizer ¼ Infocus ¼ printer	3 16 11 6 5 12	0 16 11 2 1 12	bh unit unit unit unit unit	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Bappeda	100	100	%	Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan
	Penyediaan alat tulis kantor	67.823.700	65.825.900	97,05	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	paket	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada Bappeda	100	100	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.850.000	24.850.000	100	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa spanduk dan amplop surat berkop Bappeda	1	1	paket	Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada Bappeda	100	100	%	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	10.000.000	10.000.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor Bappeda	5	5	jenis	Terpenuhinya penerangan untuk menunjang kelancaran kerja pada Bappeda	100	100	%	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	104.941.500	97.010.000	92,44	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ¼ Flash disc ¼ Mesin hitung ¼ Mouse ¼ Keyboard ¼ Printer ¼ Modem ¼ Wireless ¼ Note book ¼ Camera ¼ Hardisk eksternal ¼ Recorder ¼ LCD proyektor ¼ Layar LCD proyektor	10 6 5 5 6 1 1 1 1 1 1 2 2	10 6 5 5 6 1 1 1 1 1 1 2 2	bh bh unit unit bh unit buah unit unit unit unit unit	Terpenuhinya barang operasional kantor Bappeda	100	100	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.881.550	3.881.550	100	100	Terpenuhiny peralatan rumah tangga kantor, berupa : - Kulkas - Kompor gas - Rak piring	1 1 1	1 1 1	Unit Unit unit	Terpenuhinya barang operasional kantor Bappeda	100	100	%	
	Penyediaan makanan dan minuman	22.198.000	19.986.764	90,04	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat	8 400	8 400	orang kotak	Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	268.000.000	225.042.587	83,97	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	100	%	Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	379.393.800	338.905.020	89,33	98,68	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5	5	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	90	%	
	Pembangunan gedung kantor	145.000.000	134.896.000	93,03	100	Tersusunya rancangan pembangunan kantor Bappeda	2	2	keg	Terwujudnya peningkatan peralatan gedung kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja	100	100	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengadaan Meubeleur	70.000.000	69.960.000	99,94	100	Terlaksananya penyediaan meubeleur untuk menunjang pelaksanaan kerja berupa : ¼ kursi rapat ¼ kursi staf	100 20	100 20	bh bh	Terpenuhinya kebutuhan meubeleur kantor untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	21.048.800	16.000.000	76,02	100	Terlaksananya pemeliharaan gedung gedung berupa : ¼ pengecatan pagar kantor ¼ rehab plafon gedung kantor ¼ jaringan air dan listrik	88 1 1	88 1 1	m2 thn. thn.	Terpenuhinya fungsi gedung kantor dengan baik utk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja	100	100	%	
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	129.729.000	105.355.720	81,22	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional	18	18	unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	100	%	Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	13.630.000	12.693.000	93,13	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa ¼ AC ¼ mesin potong rumput	21 2	21 2	unit unit	Terpenuhinya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor dengan baik	100	100	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program peningkatan disiplin aparatur	39.210.000	35.245.000	89,89	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	25.720.000	23.320.000	90,67	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Bappeda	50	44	stel	Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%	Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	13.490.000	11.925.000	88,40	100	Tersedianya kebutuhan pakaian olah raga di lingkungan Bappeda	50	44	stel	Terwujudnya keseragaman dalam penampilan pegawai	100	100	%	Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	116.000.000	94.254.000	81,25	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	%	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	116.000.000	94.254.000	81,25	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	12	12	orang	Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku	100	100	%	Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.230.000	1.658.500	69,62	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000	759.000.000	100	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	3	lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	%	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	251.000,	37.500	16,3	100	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	3	3	lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran	100	100	%	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000	621.000	62,1	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3	3	lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	
	Program pengembangan data informasi	174.407.500	80.158.900,	45,96	65,34	Terlaksananya kegiatan pada Program pengembangan data informasi	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan data informasi	100	100	%	
	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen	174.407.500	80.158.900,	45,96	65,34	Terlaksananya cetak penggandaan dokumen terbitan berkala hasil kerjasama dengan BPS Kab. Ktw.Barat berupa:				Terpenuhinya ketersediaan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen	100	100	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	perencanaan					¼ Kobar dalam angka ¼ Penduduk Ktw. Barat ¼ PDRB Ktw. Barat ¼ Distribusi pendapatan penduduk Ktw. Barat	100 100 100 100	1 1 1 1	buku buku buku buku	perencanaan hasil kerjasama dengan BPS Kab. Ktw Barat				
	Program Kerjasama Pembangunan	149.175.000	128.827.900	86,36	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Kerjasama Pembangunan	1	1	keg	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Kerjasama Pembangunan	100	100	%	
	Kon ordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	149.175.000	128.827.900	86,36	100	Terlaksananya kegiatan forum Bappeda se Kalimantan Tengah	1	1	keg	Terwujudnya peningkatan kerjasama antar Bappeda se-Kalteng	100	100	%	Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan
	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1.199.549.500	997.909.600	83,84	83,13	Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh persampahan	100	100	%	
	Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Kotawaringin Barat	1.199.549.500	997.909.600	83,84	83,13	Terlaksananya penyusunan dokumen rencana tata ruang kawasan berupa : ¼ Pendampingan dan fasilitasi persub RDTRK 6 kec ¼ Perda RPJPD	 6 1 1	 6 1 1	 pkt. pkt. Pkt	Terwujudnya peningkatan keselarasan dalam penataan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	100	100	%	¼ Percetakan Perda dan Peta RTRW tidak terlaksanan karena belum disahkan

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						¼ Pengadaan sistem informasi pemanfaatan ruang ¼ Percetakan Perda dan Peta RTRW ¼ Penyusunan pariwisata terpadu ¼ Buku RPJMD	1 1 200	0 1 200	Pkt Pkt buku					oleh DPRD
	Program perencanaan pembangunan daerah	707.137.300	633.836.200	89,63	92,93	Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan pembangunan daerah	6	6	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program perencanaan pembangunan daerah	100	95	%	
	Penyusunan rancangan RKPD	26.081.000	25.456.000	97,6	100	Terlaksananya penyusunan rancangan RKPD	1	2	dok.	Terwujudnya peningkatan akomodasi program RKPD dalam APBD	100	90	%	
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	179.003.500	175.148.500	97,85	100	Terselenggaranya fasilitasi musrenbangcam, Forum gabungan SKPD dan musrenbang RKPD	3	3	keg.	Terakomodirnya usulan pembangunan prioritas masyarakat hasil musrenbang dalam RKPD	100	88	%	
	Penetapan RKPD	29.000.000	26.750.000	92,24	100	Terlaksananya penetapan RKPD yang memuat hasil dari musrenbang	1	2	dok.	Terwujudnya acuan rencana kerja bagi SKPD dalam merealisasikan program kegiatan pembangunan	100	90	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	38.025.000	25.755.000	67,73	100	Terlaksananya penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah	1 100	1 100	dok. ekspl.	Terpenuhinya laporan pertanggungjawab an kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan dan terwujudnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan pembangunan	100	100	%	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	235.027.800	232.094.700	98,67	100	Terlaksananya pengendalian terhadap program dan kegiatan pembangunan	1	1	thn.	Terwujudnya keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	100	100	%	
	Pengembangan sistem informasi perencanaan daerah	200.000.000	148.632.000	74,32	75	Terlaksananya penyediaan infrastruktur pendukung dalam rangka menunjang pengembang an sistem informasi perencanaan daerah	3	2	paket	Terwujudnya peningkatan kualitas dan efektifitas dalam mekanisme perencanaan pembangunan yang berkelanjutan	100	90	%	Pemeliharaan jaringan komputer tidak terserap karena kesalahan penganggaran
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	251.000.000	232.307.800	93,54	100	Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan pembangunan ekonomi	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program perencanaan pembangunan ekonomi	100	100	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyusunan indikator ekonomi daerah	193.300.000	184.210.300	95,30	100	Tersusunnya dokumen Analisa Efisiensi Investasi ICOR di Kabupaten Kotawaringin Barat	15	15	buku	Terdapatnya panduan untuk peningkatan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	100	100	%	
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	57.700.000	48.097.500	83,36	83,36	Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan bidang ekonomi yang meliputi pertanian arti luas, perdagangan, koperasi, industri, pertambangan dan pengembangan dunia usaha	1	1	thn.	Terdapatnya panduan dalam perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100	100	%	Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan
	Program perencanaan sosial budaya	174.256.550	128.499.350	73,74	100	Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan sosial budaya	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program perencanaan sosial budaya	100	100	%	
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	127.596.750	92.764.550	72,7	100	Tersusunnya : ¼ RAD dalam penanggulangan kemiskinan ¼ RAD PM2L	1 1	1 1	dok. dok.	Tercapainya : ¼ Penurunan tingkat kemiskinan ¼ Berkurangnya desa tertinggal	3 3	5,64 3	% desa	Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	46.659.800	35.734.800	83,49	100	Tersedianya : ¼ Data/ laporan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan	1	1	dok.	Terpantaunya : ¼ Program pro rakyat ¼ Program PM2L di 3 desa	100 100	99,17 96,36	% %	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						¼ Data/ laporan hasil pelaksanaan PM2L	1	1	dok.					
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	145.443.400	91.519.400	62,92	58,27	Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	100	100	%	
	Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah	145.443.400	91.519.400	62,92	58,27	Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan pelabuhan dan percepatan pengembangan bandar udara serta pendampingan PPSP kabupaten Kotawaringin Barat	1	1	Keg.	Tercapainya keselarasan dan peningkatan koordinasi pembangunan di bidang perhubungan	100	100	%	Keterlambatan dalam penyampaian SPM sehingga dana tidak terserap
KRETARIAT DAERAH														
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	161.354.000	113.104.200	70,09	100	Terlaksananya kegiatan pada program pengembangan wilayah perbatasan	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	100	100	%	
	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	134.801.000	47.699.800	64,61	100	Terpenuhinya : ¼ Berita Acara Kesepakatan Tata Batas ¼ Sket Peta Batas dan Peta Dasar	2 26	2 26	dok. Lbr.	Tercapainya kesepakatan tata batas	100	100	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						¼ Patok Batas sebagai acuan pilar batas	30	30	Buah					
	Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	26.553.000	26.003.000	97,92	100	Terfasilitasinya penyelesaian konflik-konflik pertanahan	3	3	Fasili tasi	Tercapainya kesepakatan antara pihak yang bersengketa	100	100	%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	775.819.000	636.900.700	82,09	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	%	
	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	48.766.000	38.535.500	79,02	100	Terlaksananya penyusunan laporan LPPD Tahun 2012 dalam bentuk buku dan CD	30 100	30 100	Buku CD	Terpenuhinya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan pembangunan daerah	100	100	%	
	Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	105.441.500	83.674.900	79,35	100	Terlaksananya monitoring pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam : ¼ Dokumen perencanaan Setda ¼ Laporan RFK ¼ Laporan monev kegiatan ¼ Rapat evaluasi	 72 132 1 10	 72 132 1 10	Buku Buku Paket Kali	Termonitornya pelaksanaan pembangunan daerah	100	100	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						program kerja dan pembangunan ¼ Dokumen pengadaan barang/ jasa	1	1	paket					
	Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP)	695.139.000	565.867.900	81,40	100	¼ Terlaksananya proses pengadaan barang/ jasa melalui ULP ¼ Sosialisasi pengadaan barang dan jasa ¼ Sosialisasi peraturan, pedoman pengadaan barang dan jasa di desa	432 100 200	432 100 200	Paket Orang Orang	Tercapainya pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien serta terwujudnya peningkatan pemahaman aparaturnya tentang peraturan, pedoman pengadaan barang dan jasa di desa	100 100	90 90	% %	
	Program Pengembangan data/informasi	252.100.000	213.733.000	84,78	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan data/informasi	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan data/informasi	100	90	%	
	Pelaksanaan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE)	252.100.000	213.733.000	84,78	100	¼ Terlaksananya pengadaan/ pelelangan secara elektronik (LPSE) ¼ Terpenuhinya jasa berlangganan akses internet LPSE ¼ Terlaksananya	432 12 100	432 12 100	Paket Bulan Orang	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pengadaan/pelelangan secara elektronik (LPSE) dengan efektif dan efisien serta tercapainya peningkatan	100 100	90 90	% %	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						bimtek layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE)				pemahaman aparatur tentang layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik				
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	100.000.000	0	0	0	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	80	0	%	
	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	100.000.000	0	0	0	Terlaksananya penilaian aset Pangkalan Bun Park dan penyusunan Kajian Kelayakan Ekonomis Pangkalan Bun Park	2	2	Dok.	Terpenuhinya perencanaan pengembangan Pangkalan Bun Park	80	0	%	

Capaian keberhasilan urusan perencanaan pembangunan Tahun 2014 berdasarkan indikator output dan outcome adalah sebagai berikut :

- 1) Terselenggaranya Musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan Musrenbang tingkat Kabupaten dengan baik, yang merupakan suatu rangkaian implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- 2) Tersedianya pedoman untuk arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan daerah;
- 3) Terlaksananya penerapan Sisrenbangda (Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah) dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu suatu sistem aplikasi yang mengintegrasikan hasil dari tahapan perencanaan “bottom up” dan “partisipatif” yang dilaksanakan selama ini, dengan penganggaran dan evaluasi. Dengan diterapkannya sistem ini, diharapkan akan dapat lebih menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
- 4) Terwujudnya koordinasi dan sinergitas dalam perencanaan antar satker/ sektor bidang sarana prasarana, ekonomi dan sosial budaya;
- 5) Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2013;
- 6) Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2013;
- 7) Pada Tahun 2014 telah berhasil disusun dokumen-dokumen strategis dalam perencanaan dan penataan ruang Kabupaten Kotawaringin Barat berupa :
 1. Pendampingan dan Fasilitasi Persub RDTRK Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Utara;
 2. Penyusunan Masterplan Pariwisata Terpadu;
 3. Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang;
 4. Pencetakan Perda RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat;
 5. Penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi;
 6. Penyusunan dokumen ICOR.
- 8) Terfasilitasinya keikutsertaan aparat Bappeda dan BPS Kabupaten Kotawaringin Barat pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Regional (Rakonreg) PDRB se-Kalimantan Tengah Tahun 2014 yang diselenggarakan di Buntok Kabupaten Barito Selatan dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Regional (Rakonreg) PDRB se-Kalimantan Tahun 2014 yang diselenggarakan di Samarinda Kalimantan Timur.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terkait dengan urusan perencanaan pembangunan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya sistem pengelolaan data perencanaan yang akurat dan komprehensif;
2. Masih lemahnya koordinasi antar satuan kerja terkait;
3. Masih adanya Inkonsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
4. Masih rendahnya kepercayaan dan peran aktif para stakeholders terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
5. Belum optimalnya tindak lanjut dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai bagian dari manajemen pembangunan daerah;
6. Kurangnya produktivitas SDM dalam memahami pengelolaan data yang berwawasan teknologi informasi;
7. Masih belum optimalnya koordinasi penyelesaian perbatasan antar daerah dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
8. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dalam menganalisa dan mengembangkan data informasi khususnya terkait data kestatistikan;
9. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *uptodate* guna bahan penyusunan dokumen perencanaan daerah mengingat terdapat leg (kekosongan ketersediaan data terbaru) dalam buku publikasi Kotawaringin Barat;
10. Belum adanya persepsi yang sama di semua SKPD tentang arti pentingnya data yang valid guna bahan penyusunan rencana pembangunan daerah, perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan;
11. Lemahnya koordinasi dalam proses pengumpulan dan penyediaan serta pengelolaan data statistik daerah.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi upaya tindak lanjut yang harus dilakukan adalah :

1. Perlu penyempurnaan dan dioptimalkannya lagi pelaksanaan sistem pengelolaan data yang berbasis teknologi informasi dan keruangan;
2. Perlu dilakukan upaya peningkatan koordinasi antar satuan kerja terkait dengan dilakukannya berbagai rapat secara terprogram dan berkesinambungan;
3. Perlu dilakukan upaya penyamaan komitmen antar SKPD terkait dan para stakeholders terkait perlunya payung hukum berupa perda untuk mengawal berbagai usulan kegiatan pembangunan yang dihasilkan pada Musrenbang/ Forum SKPD;
4. Meningkatkan kepercayaan dan peran aktif stakeholder melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan daerah secara baik dan benar;

5. Meningkatkan Sinergitas Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan daerah;
6. Mengirim personil untuk mengikuti pelatihan teknis guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM;
7. Perlu dilakukan pemutakhiran data yang dievaluasi secara berkala di lingkup masing-masing SKPD;
8. Perlu dilakukan upaya-upaya terobosan dalam rangka peningkatan koordinasi penyelesaian perbatasan antar daerah dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
9. Mengikutsertakan aparatur dalam berbagai diklat dan bimtek terutama di bidang perencanaan pembangunan dan kestatistikan;
10. Melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data dengan melakukan rapat-rapat teknis dengan SKPD terkait;
11. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi secara lebih intensif dengan pihak-pihak penyedia data (BPS dan SKPD terkait) serta mengoptimalkan sistem data informasi yang berbasis *web-site*.

4.1.7. URUSAN PERUMAHAN

a) Kondisi Umum

Rumah (papan) merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, selain kebutuhan sandang (pakaian) dan pangan (makan). Berbagai kondisi fasilitas perumahan seperti fasilitas penerangan, air minum, jamban dan lain-lain merupakan aspek yang perlu untuk diperhatikan untuk mengamati tingkat kesejahteraan rakyat. Rumah yang baik serta lingkungan yang sehat diharapkan dapat memberikan rasa nyaman bagi anggota rumah tangga yang menghuninya. Tempat tinggal yang nyaman dan sehat sepatutnya memiliki tempat buang air besar. Di Kabupaten Kotawaringin Barat masih terdapat 3,01 persen rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar. Walaupun jumlahnya kecil namun hal tersebut masih harus menjadi perhatian pemerintah, karena fasilitas pembuangan air besar mempengaruhi kesehatan rumah tangga yang bersangkutan.

Fasilitas pembuangan air besar yang paling dominan di Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah fasilitas pembuangan air besar yang digunakan sendiri oleh tiap-tiap rumah tangga yaitu 78,34 persen. sementara untuk fasilitas yang digunakan bersama-sama dan umum cukup kecil yaitu 11,12 % dan 7,53%. Jika dibandingkan dengan terget RPJMD 2014 tentang persentase rumah tangga yang bersanitasi, maka kondisi Kotawaringin Barat untuk tahun 2014 ini telah mencapai target yang diinginkan. Dimana target yang dipatok adalah sebesar 100 persen dan kondisi Kotawaringin Barat saat ini adalah 100 persen.

Selain dari segi penggunaan fasilitas pembuangan air besar, sanitasi yang baik juga harus ditinjau dari indikator mengenai penggunaan tangki septik sebagai tempat pembuangan limbah. Penggunaan tangki septik sebagai tempat pembuangan limbah akan mencegah limbah yang dibuang oleh rumah tangga merusak lingkungan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan.

Kabupaten Kotawaringin Barat dilalui beberapa sungai besar, antara lain Sungai Arut, Sungai Lamandau, dan Sungai Kumai. Kondisi ini tentunya mempengaruhi kebiasaan masyarakat khususnya terhadap pemilikan septik tank. Pada 2014, baru 72,50 persen rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir limbah (tinja), sungai/danau/laut 10,25 persen, lubang tanah 20,44 persen dan pantai/tanah lapang/kebun 2,87 persen. Dari kondisi tersebut, masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat terutama yang tinggal di daerah sempadan sungai dan di pedesaan masih perlu diberikan penyuluhan tentang budaya pentingnya fasilitas tempat buang air besar, mengingat sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Air merupakan kebutuhan dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Didasari pentingnya fungsi air ini, maka salah satu perhatian pemerintah adalah penyediaan fasilitas air bersih. Sumber air bersih oleh rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari air leding (berlangganan PDAM), air sumur gali, air sumur bor, air sungai, mata air, mata air tak terlindung dan air hujan. Ketersediaan air dalam jumlah yang cukup merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Fasilitas air minum menjadi hal penting karena sangat menentukan kualitas air minum itu sendiri. Rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak memiliki fasilitas air minum yaitu sekitar 1,86 persen. sementara rumah tangga dengan fasilitas air minum sendiri memiliki persentase paling besar yaitu 51,91 persen. hal tersebut menggambarkan kondisi yang cukup baik dimana setiap rumah tangga, sekitar 98,14 persen sudah memiliki fasilitas air minum.

Sebagian besar sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah air isi ulang yaitu sebesar 34,5 persen dan sumur terlindung sebesar 24,5 persen. Sementara sumber air minum yang paling sedikit digunakan oleh rumah tangga di Kotawaringin Barat adalah air hujan yang hanya sebesar 0,74 persen.

Penduduk Kotawaringin Barat yang tinggal di daerah bantaran sungai sudah mulai meninggalkan penggunaan air sungai sebagai sumber air minum dan beralih ke penggunaan air isi ulang sebagai sumber air minum utama. Masih terbatasnya jangkauan pelayanan PDAM mengakibatkan masih ada rumah tangga yang mengkonsumsi air yang diduga kurang

bersih, seperti air sungai, air hujan, sumur gali (jika tercemar), dan mata air tak terlindung.

Begitu pula dengan air minum, sebagian warga memilih menggunakan air minum isi ulang yang mungkin kebersihannya kurang terjaga, dengan alasan harganya yang lebih ekonomis dibandingkan dengan air isi ulang bermerk. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 4.19
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perumahan
Tahun 2013-2014

No.	Indikator	2013		2014 *)		
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian terhadap target
1.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	24	24	32	32	100
2.	Rumah Tangga Bersanitasi	100	100	100	100	100
3.	Rumah Layak Huni	95	95	95	95,5	100,53
4.	Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk	771,8	771,8	771,8	771,8	100

Cat: *) angka sementara

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Perumahan dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dan Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.758.524.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.718.826.000,00 atau sebesar 97,74%.

Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Perumahan berikut kinerja output dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.20.
Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PEKERJAAN UMUM	771.361.000	765.703.500	99,26	100									
Program pengelolaan areal pemakaman	771.361.000	765.703.500	99,26	100	Terlaksananya kegiatan pada Program pengelolaan areal pemakaman	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengelolaan areal pemakaman	100	100	%	
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	771.361.000	765.703.500	99,26	100	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana taman pemakaman umum di 4 lokasi.	4	4	paket	Tertatanya taman pemakaman umum (TPU) dan kemudahan aksesibilitas menuju keluar maupun di dalam makam	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TARIAT DAERAH	3.622.565.050	3.224.684.808	89,01	100									
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	65.115.400	54.200.000	83,24	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	65.115.400	54.200.000	83,24	100	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran berupa : ¼ Asuransi ¼ Pembuatan tempat parkir kendaraan roda 2	300 1	300 1	OB Paket	Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas aparaturnya Damkar	100%	100%	Paket	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Program pengelolaan areal pemakaman	202.048.000	199.552.000	98,76	100	Terlaksananya kegiatan pada Program pengelolaan areal pemakaman	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengelolaan areal pemakaman	100		%	
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	153.948.000	153.762.000	99,88	100	✓ Terlaksananya penyediaan honor tenaga kebersihan makam ✓ Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana taman pemakaman umum meliputi : ¼ Pengecatan makam muslimin (Skip), makam kristen, makam raja,makam muslimin depan kompi	8 2.720	8 2.720	org. M2	Terpeliharanya sarana dan prasarana di Tempat Pemakaman Umum Terciptanya sarana pemakaman yang memadai	100 100	100 100	% %	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	48.100.000	45.790.000	95,19	100	✓ Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman meliputi: ¼ Pemasangan paving tempat parkir makam raja Kel. Raja ¼ Pemasangan keramik tempat tunggu makam raja kel. Raja	2	2	Paket	Terciptanya sarana pemakaman yang memadai	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N PENANGGULANGAN BAHAYA DAERAH (BPBD)													
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	720.000.000	705.420.500	97,97	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	720.000.000	705.420.500	97,97	100	Terlaksananya penyediaan : ¼ Mesin Pemadam Portable dan perlengkapannya ¼ Mesin Pemadam Portable dan perlengkapannya ¼ Pembuatan Pos Pemadam Kebakaran ¼ Perencanaan Pembangunan Pos Damkar 3% x Rp. 150.000.000,- ¼ Pengawasan Pembangunan Pos Damkar 2% x Rp. 150.000.000,-	12 1 3 3 3	12 1 3 3 3	paket paket unit unit paket	Terpenuhinya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai	100	100	%	

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terkait dengan urusan perumahan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan;
2. Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, yang mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung;
3. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
4. Masih belum idealnya lokasi areal pemakaman yang sesuai dengan master plan tata ruang daerah;
5. Masih terbatasnya tanah asset daerah yang dapat digunakan sebagai areal pemakaman umum;
6. Terbatasnya dana untuk Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman;
7. Masih adanya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pemakaman yang belum terpenuhi.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi upaya tindak lanjut yang harus dilakukan adalah :

1. Peningkatan peran kapasitas pemangku kepentingan termasuk komunitas masyarakat di bidang perumahan. Bersama-sama dengan pemerintah, para pemangku kepentingan akan mengatasi permasalahan penyediaan perumahan, terutama rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
2. Peningkatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan pengawasan terhadap alih fungsi lahan;
3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengatasi permasalahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
4. Lebih mengoptimalkan lagi program kegiatan bedah rumah yang selama ini telah dilaksanakan baik dari peningkatan jumlah anggarannya maupun jumlah sasaran pada tiap-tiap desa;
5. Perlu dipikirkan wacana untuk memindahkan areal pemakaman yang berada di lokasi tengah kota atau daerah pemukiman;
6. Perlu ketersediaan anggaran yang memadai untuk pembebasan tanah bagi areal pemakaman umum;
7. Mengusulkan penyediaan anggaran dana yang memadai untuk Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman;

8. Meningkatkan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pemakaman yang belum terpenuhi.

Sedangkan permasalahan yang terkait dengan Pemadam Kebakaran pada Tahun 2014 adalah masih kurangnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat akan arti penting pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi upaya tindak lanjut yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;

4.1.8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

a) Kondisi Umum

Penerapan kebijakan kepemudaan dilakukan dengan memberikan iklim yang kondusif bagi pemuda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minatnya melalui peningkatan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, serta mengembangkan sikap keteladanan, kemandirian, akhlak mulia, dan disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penciptaan iklim yang kondusif itu mencakup :

1. Pemberian kesempatan dan kebebasan kepada pemuda untuk mengorganisasikan dirinya secara merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, prioritas, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat;
2. Pengembangan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul, dan mandiri;
3. Perlindungan terhadap generasi muda dari hal-hal destruktif terutama penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, dan zat aditif lainnya (NAPZA) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba;
4. Pengembangan wawasan kebangsaan di kalangan pemuda guna memupuk jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, bangga dan rela berkorban demi mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
5. Kegiatan mempersiapkan pemuda dalam menghadapi persaingan global dan untuk pergaulannya dengan bangsa-bangsa lain melalui berbagai aktivitas yang mendukung, dengan mengedepankan semangat kemanusiaan yang berkeadilan, beradab, dan demokratis, dengan tidak meninggalkan jati dirinya sebagai suatu bangsa;

6. Pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemberdayaan pemuda dan olahraga.

Sedangkan pembangunan di bidang olahraga dilakukan dengan berbagai upaya, di antaranya adalah dengan :

1. Melaksanakan pengkajian dan perumusan kebijakan pemerintah di bidang keolahragaan;
2. Melaksanakan pembibitan dan pembinaan olahragawan usia dini;
3. Memetakan dan menganalisis pelaksanaan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal di bidang olahraga;
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan olahraga;
5. Membina dan meningkatkan kualitas manajemen organisasi olahraga;
6. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas manajemen organisasi olahraga prestasi prioritas di tingkat daerah.

Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian melalui sentra-sentra pemberdayaan pemuda. Pengembangan kepemudaan juga dilakukan di pedesaan untuk memberikan semangat agar para pemuda dapat menjadi penggerak roda pembangunan.

Dalam usaha memberikan bekal kewirausahaan, dilakukan pelatihan-pelatihan keterampilan serta upaya menumbuhkan semangat melakukan inovasi bisnis. Diharapkan para pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja/pegawai, namun sanggup mengembangkan usaha mandiri yang dapat bertahan terhadap goncangan dan persaingan.

Dalam bidang olahraga, pembinaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda. Selanjutnya, akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui kompetisi-kompetisi tingkat kabupaten. Bibit-bibit berprestasi akan terus dibina agar dapat meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi.

Pembinaan olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta teknologi. Melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung bidang kepemudaan dan olahraga diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 4.21
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2013 - 2014

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2013	2014		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Prestasi Olahraga Tingkat Nasional		12	18	14	78%
	a. POPNAS	Peringkat	6	9	6	67%
	b. POSPENAS	Peringkat	6	5	6	120%
2.	Jumlah organisasi pemuda	buah	61	93	105	112%
3.	Jumlah organisasi olah raga	buah	68	75	77	102%
4.	Gedung olah raga/balai remaja (selain milik swasta)	buah	8	8	8	100%
5.	Lapangan olahraga	buah	147	150	150	100 %

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kegiatan kepemudaan dan olah raga diukur dengan jumlah organisasi pemuda, jumlah grup olah raga, serta ketersediaan gedung dan lapangan olah raga sebagai wadah bagi warga untuk beraktifitas. Di Kabuapten Kotawaringin Barat terdapat 8 buah gedung olah raga, 150 buah lapangan olah raga, 77 klub olah raga dan 105 buah organisasi pemuda. Lapangan olah raga yang dimaksud disini adalah jumlah seluruh lapangan olah raga yang ada di suatu kecamatan, termasuk lapangan milik sekolah. Klub olah raga yang terdapat di tiap kecamatan umumnya adalah klub sepak bola, bola voli dan catur.

Sedangkan organisasi kepemudaan adalah organisasi Karang Taruna, yang diasumsikan terdapat di setiap desa dan kelurahan. Secara umum kegiatan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah cukup baik, namun perhatian pemerintah perlu ditingkatkan untuk perkembangan yang lebih baik.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.367.412.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.305.721.646,00 atau 80,21 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.22
Program / Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IKPORA	695.980.000	552.778.000	79,42	94,30									
Program peningkatan peran serta kepemudaan	695.980.000	552.778.000	79,42	94,30	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan peran serta kepemudaan	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan peran serta kepemudaan	100	100	%	
Pembinaan organisasi kepemudaan	70.000.000	67.760.000	96,80	99,90	Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan	1	1	keg	Terwujudnya peningkatan peran serta pemuda dan mahasiswa pembangunan kab. Kotawaringin Barat	1	1	keg	
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	84.650.000												
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	2.467.913.000	1.867.643.250	75,68	100,00	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1	1	keg		100	100	%	
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	2.467.913.000	1.867.643.250	75,68	100,00	Terlaksananya pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	1	1	keg	Terwujudnya peningkatan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ARIAT DAERAH	2.395.599.000	2.160.523.500	91,02	91,46									
Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	298.064.000	278.225.000	99,34	94,26	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olah raga	298.064.000	278.225.000	93,34	94,26	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga berupa : ¼ Pengecatan Stadion Sampuraga ¼ Pemeliharaan/peng ecatan tribun di kawasan Sport Center Pangkalan Bun ¼ Rehab Tribun Stadion Sanggora Kumai ¼ Rehab Tribun Stadion Karya Jaya Ktw. Lama	4	4	Paket	Terwujudnya optimalisasi fungsi stadion olah raga	100	100	%	
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	2.053.685.000	1.871.473.500	91,13	94,46	Terlaksananya program kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	2	2	Keg.	Meningkatnya prestasi olahraga dan kemampuan manajemen olahraga	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyelenggaraan kompetisi olahraga	2.037.435.000	1.855.573.500	91,07	91,07	Terlaksananya keikutsertaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada even PORPROV X	1	1	Keg.	Tercapainya prestasi olahraga daerah	100	100	%	
Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah	16.250.000	15.900.000	97,85	97,85	Terlaksananya rapat evaluasi pengurus cabang olahraga tingkat daerah	1	1	Keg.	Terciptanya pemahaman seluruh stakeholder dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga tingkat daerah	100	100	%	
Program Peningkatan peran serta kepemudaan	43.850.000	10.825.000	24,69	90	Terlaksananya program kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan	2	1	Keg.	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan	100	25	%	
Pembinaan organisasi kepemudaan	43.850.000	10.825.000	24,69	90	Terlaksananya rapat pembinaan organisasi kepemudaan dan kegiatan penilaian LSS tingkat Kab. Serta mengikuti LSS tingkat Prov.	2	1	Keg.	Meningkatnya pengetahuan dan motivasi para pemuda serta meningkatnya kesadaran mengenai pola hidup sehat di sekolah	100	25	%	Kegiatan LSS dilaksanakan tetapi ada beberapa item yang tidak dapat dicairkan

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga antara lain :

1. Kurangnya Pengetahuan Generasi Muda, Orang Tua, serta Masyarakat tentang Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS;
2. Terbatasnya Dana untuk Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat secara rutin setiap tahun;
3. Masih adanya Kasus Penyalahgunaan Narkoba yang tertangkap oleh aparat hukum setiap tahunnya;
4. Kurangnya pembinaan secara kontinyu serta terbatasnya sarana dan prasarana sebagai pendukung pengembangan kepemudaan dan kemajuan olah raga;
5. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kepemudaan dan olah raga;
6. Terbatasnya sarana prasarana untuk kegiatan kepemudaan, khususnya yang berkaitan dengan kewirausahaan;
7. Terbatasnya ketersediaan sarana latihan para atlet yang memadai;
8. Belum optimalnya pembibitan atlet;
9. Masih rendahnya sikap sportivitas, disiplin dan semangat juang atlet.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka upaya yang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Mengintensifkan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba untuk memberikan Pengetahuan kepada Generasi Muda, Orang Tua, dan Masyarakat tentang Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS;
2. Pengalokasian Dana yang cukup bagi instansi terkait untuk melakukan Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda di 6 (enam) Kecamatan tiap tahunnya;
3. Memperkuat peran dan koordinasi antar Pihak terkait terutama POLRI dan BNK Kotawaringin Barat dalam melakukan upaya Pencegahan, Pemberantasan dan penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba;
4. Mengoptimalkan pembinaan atlet usia dini serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengembangan kepemudaan dan kemajuan olah raga;
5. Meningkatkan dan pemberdayaan peran serta masyarakat untuk mendukung kemajuan kepemudaan dan olah raga;
6. Pemberian sarana dan prasarana yang memadai untuk pembinaan generasi muda, khususnya dalam hal kewirausahaan, semisal penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, pelatihan keterampilan berwirausaha, dan pembinaan bagi para pemuda yang memiliki inovasi-inovasi dalam pengembangan bisnis secara mandiri;
7. Pemberian penghargaan bagi para pemuda berprestasi dan penyelenggaraan pameran hasil karya pemuda;
8. Penambahan dan pemeliharaan fasilitas latihan bagi para atlet agar prestasi meningkat;
9. Pengelolaan pembibitan atlet yang berkelanjutan dan berkesinambungan;
10. Pencarian atlet olahraga berbakat;
11. Pemberian penghargaan berupa beasiswa bagi atlet berprestasi;
12. Pembinaan atlet-atlet berbakat dan klub-klub olahraga prestasi.

4.1.9. URUSAN PENANAMAN MODAL**a) Kondisi Umum**

Terbatasnya sumber daya modal adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh kebanyakan daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, sementara di sisi lain kebutuhan peningkatan pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan dalam upaya pemerintah daerah mendorong kegiatan ekonominya seoptimal mungkin untuk kemakmuran rakyat.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Kabupaten Kotawaringin Barat masih memerlukan sejumlah tambahan dana dalam bentuk investasi swasta, baik yang berasal dari investor dalam negeri maupun investor asing.

Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat menyimpan beberapa peluang seperti spesifikasi keunggulan lokal Kabupaten Kotawaringin Barat di bidang pariwisata dan budaya, komitmen pemerintah daerah yang terbuka untuk investor, serta ketersediaan sumberdaya manusia yang berdaya saing. Adapun isu strategis yang mengemuka dalam peningkatan investasi terkait pada persaingan global dengan negara lain serta investasi yang mengarah pada keunggulan lokal Kabupaten Kotawaringin Barat.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang menjadi fokus perhatian dalam pengembangan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, yakni realisasi investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/riil, investasi yang mengarah pada kelestarian lingkungan, perlunya peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lain (termasuk kesiapan lahan), regulasi yang mantap dalam fasilitasi investasi, serta upaya peningkatan kerjasama penanaman modal dengan daerah dan negara-negara maju.

Perkembangan investasi pada sektor industri di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan signifikan. Namun demikian masih banyak sektor lain yang masih potensial untuk dikembangkan, sehingga sangat membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan potensi daerah.

Salah satu kendala pelaksanaan investasi di daerah adalah adanya aturan dari pusat yang sampai saat ini masih dalam proses sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan regulasi yang tepat untuk lebih memberikan daya tarik bagi investor. Selain itu juga masih belum disyiahkannya RTRW Provinsi dan Kabupaten juga menjadi kendala utama dalam upaya menarik investor.

Kondisi tersebut telah menyebabkan turunnya minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan investasi baik untuk melakukan kegiatan

ekspansi usaha yang telah ada maupun untuk merintis investasi baru. Kondisi ini perlu ditangani secara cepat agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas utamanya dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini lebih banyak didominasi oleh konsumsi daripada investasi atau ekspor.

Tabel 4.23
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Tahun 2013-2014

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2013	2014		
				Target	Realisasi	Realisasi %
1	Pertumbuhan Investasi (PMDN/PMA)	%	15,51	0	1.753.810.411.957	12,56
a.	Pertumbuhan investasi PMDN	%	2,50	0	474.913.775.957	7,86
b.	Pertumbuhan investasi PMA (US \$)	%	27,89	0	127.889.664	16,14
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (unit)	%	62,69	67	29	-43,28
a.	- PMDN	%	72,69	6.000.000.000.000	6.518.940.123.391	108,65
b.	- PMA (US \$)	%	21,88	800.000.000	920.119.034	115,01

Sumber : Disperindag Kabupaten Kotawaringin Barat
Catatan : PMA dengan memakai kurs 1\$ = Rp. 11.818,-

Pertumbuhan investasi PMA/PMDN di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 sebesar 12,56 %, dengan nilai pertumbuhan dalam rupiah Rp. 1.753.810.411.957,- yang terdiri atas kenaikan investasi PMDN sebesar 7,86 % (senilai Rp. 474.913.775.957,-) dan pertumbuhan investasi PMA sebesar 16,14 % (senilai Rp. 1.278.896.636.000,- atau US \$ 127.889.664).

Rincian perusahaan yang merealisasikan investasinya di Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 29 Buah perusahaan (terdiri dari 12 PMA dan 17 PMDN) Nilai realisasi dan pertumbuhan investasi PMA/PMDN di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.24
Nilai Realisasi dan Pertumbuhan Investasi PMA/PMDN
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013-2014

Tahun	Investasi PMDN (Rp)	Investasi PMA (Rp)	PMA+PMDN (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Pertumbuhan (%)
2013	6.044.026.347.434	7.922.293.704.000	13.966.320.051.434	1.875.141.436.022	15,51
2014	6.518.940.123.391	9.201.190.340.000	15.720.130.463.391	1.753.810.411.957	12,56

Sumber : Disperindag Kabupaten Kotawaringin Barat

Pada tahun 2014, pertumbuhan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat terutama berasal dari sektor tersier, lebih khusus lagi bidang pertanian sub sektor perkebunan dan industri pengolahan, diikuti oleh perdagangan,

menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, yakni pada bidang perhotelan dan industri pengolahan. Sedangkan pada perusahaan PMA, sebagaimana tahun sebelumnya, bidang jasa perhotelan, restoran, industri pengolahan, perdagangan, dan pengangkutan masih memberikan nilai pertumbuhan yang signifikan.

Dapat diakui bahwa realisasi pertumbuhan investasi di tahun 2014 senilai 12,56 %, antara realisasi investasi PMA dengan PMDN. Ada beberapa perusahaan PMA maupun PMDN yang tidak atau belum merealisasikan investasinya dibanding perhitungan awal berdasar surat persetujuan investasi PMA atau PMDN yang diterbitkan sebelumnya.

Dikarenakan ada beberapa persoalan di lapangan terindikasi menjadi penyebab masih tidak terealisasinya surat persetujuan PMDN/PMA menjadi perusahaan operasional (aktif) di Kabupaten Kotawaringin Barat, yakni antara lain adanya PMA atau PMDN tidak ada kejelasan lanjutan dalam merealisasikan investasinya, kesulitan investor untuk memperoleh lahan usaha yang diinginkan dan jaminan kepastian hukum yang cenderung tidak kondusif bagi iklim investasi.

Upaya peningkatan iklim dan realisasi investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 dilakukan dengan 2 (dua) strategi utama. Pertama, perbaikan perangkat sistem serta prosedur pelayanan perijinan investasi yang lebih baik dan, kedua, peningkatan jalinan komunikasi berikut pelayanan prima kepada investor. Perbaikan perangkat sistem dan prosedur telah diupayakan dengan optimalisasi fungsi Gerai Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP).

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Bappeda dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 237.597.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 225.434.500,00 atau 94,88 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Penanaman Modal selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.25.
Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PEDA													
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	69.603.000	63.647.500	91,44	96,50	Tercapainya kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan modal	1	1	keg.	Terkoordinasinya kegiatan penanaman modal	100	100	%	
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	69.603.000	63.647.500	91,44	96,50	Tercapainya kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan modal	1	1	keg.	Terkoordinasinya kegiatan penanaman modal	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ERINDAG													
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	167.994.000	161.787.000	96,31	100	Terkendalinya Pelaksanaan Investasi PMA/PMDN di Daerah	3	3	keg.	Tercapainya Pelaksanaan Investasi PMA/PMDN di Daerah	100	100	%	
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi	43.395.000	42.475.000	97,88	100	Terlaksananya Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	36	36	perush.	Terdatanya perusahaan – perusahaan yang berinvestasi	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PMDN/ PMA					Daerah dan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	1	1	Keg.					
Penyelenggaraan pameran investasi	102.049.000	96.837.000	94,89	100	Terlaksananya keikutsertaan kabupaten Kotawaringin Barat dalam pameran Invesda di Jogyakarta	1	1	Pameran	Tercapainya Tersebar nya Potensi Peluang Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.	100	100	%	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	22.550.000	22.475.000	99,67	100	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Program Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30	30	Kali	Tercapainya Pelaporan Pengendalian Program kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.	100	100	%	

Capaian keberhasilan Urusan Penanaman Modal Tahun 2014 berdasarkan indikator output dan outcome adalah sebagai berikut :

- 1) Perusahaan yang sudah dimonitoring dan dievaluasi sebanyak 29 Perusahaan PMDN/PMA dalam tahun 2014 yang tersebar di 6 Kecamatan;
- 2) Terciptanya hubungan baik antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan perusahaan PMDN/PMA di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 3) Tersebar luasnya informasi potensi investasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada event pameran invesda di Jogjakarta.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terkait dengan Urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Belum padu serasinya kelembagaan yang menangani urusan penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi potensi daerah sebagai bahan promosi kepada investor;
3. Belum optimalnya jaringan kerja sama dalam pengembangan investasi;
4. Masih minimnya kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pengembangan dan kemajuan dibidang investasi;
5. Terbatasnya jumlah aparatur yang menangani urusan penanaman modal;
6. Lemahnya daya saing produk dan pelaku usaha lokal terhadap produk dan pelaku usaha dari luar daerah.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan Penanaman Modal adalah :

1. Pembenahan secara menyeluruh kelembagaan yang menangani urusan penanaman modal;
2. Optimalisasi pengelolaan sistem informasi potensi daerah yang berwawasan teknologi informasi;
3. Meningkatkan sinergi kerjasama dan keterpaduan antar stakeholder (pihak yang berkepentingan);
4. Memperbanyak kegiatan yang menunjang pengembangan dan kemajuan dibidang investasi;
5. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM aparatur yang menangani urusan penanaman modal;
6. Peningkatan pembinaan dan pemberian bantuan modal bagi pelaku usaha lokal yang mempunyai keunggulan kompetitif.

4.1.10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**a) Kondisi Umum**

Program pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Koperasi dan UMKM diarahkan untuk memantapkan perekonomian daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM. Kontribusi Koperasi dan UMKM sangat signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di kelompok akar rumput sehingga lebih merata dan berkeadilan. Dalam memberdayakan dan mengembangkan Koperasi dan UMKM disinergikan dengan kebijakan dan Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat, pemerintah daerah melakukan upaya pengembangan UMKM melalui Fasilitasi dalam mendapat akses dan bantuan permodalan ke lembaga-lembaga keuangan, sosialisasi program dan kegiatan yang langsung berhubungan dengan pelaku Koperasi dan UMKM baik dari pemerintah pusat maupun Provinsi, memfasilitasi pelaku koperasi dan UMKM dalam mengikuti Pameran baik tingkat daerah, Provinsi dan Nasional, melaksanakan pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan Wirausaha baru, peningkatan kelembagaan koperasi, meningkatkan sumber daya manusia para pelaku koperasi dengan mengadakan pelatihan, pengembangan lembaga penjaminan untuk usaha kecil dan menengah, pengembangan lembaga-lembaga ekonomi mikro di pedesaan, fasilitasi dan pembinaan manajemen usaha-usaha UMKM, dan mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33, Koperasi merupakan sokoguru perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengimplementasi kannya dengan memberikan porsi yang besar untuk Koperasi dan UMKM untuk maju dan berkembang.

Hal ini terlihat dengan antusiasnya permohonan pembuatan Badan Hukum Koperasi baru, Perkembangan usaha dan jumlah anggota Koperasi yang semakin meningkat, dan semakin besarnya SHU (siswa hasil usaha), serta terus bertambahnya jumlah UMKM. Pada tahun 2014 tercatat terdapat 198 buah koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang jenisnya meliputi koperasi unit desa (KUD), koperasi simpan pinjam (KSP), koperasi serba usaha (KSU), koperasi petani plasma, koperasi nelayan, koperasi pegawai, koperasi guru, dan lain sebagainya. Jumlah tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2014.

Tabel 4.26
Jumlah Koperasi dan Statusnya
di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2013 – 2014

Koperasi	Tahun 2013 (unit)	Tahun 2014 (unit)	+/(-)
Aktif	186	198	12
Tidak Aktif	50	48	-2
Primer	236	246	10
KUD	25	25	-
Non KUD	211	221	10

Sumber :Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, Kab. Ktw. Barat

Berangkat dari perkembangan Koperasi dan UMKM yang semakin baik dan pengaruh signifikannya pada roda perekonomian masyarakat, tentu menjadi hal yang membanggakan dan menjadikan motivasi segenap stakeholder untuk terus menciptakan iklim serta progres pencapaian maksimal. Sedangkan untuk jumlah UMKM mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.27
Perkembangan Jumlah dan Jenis UMKM
di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2013 – 2014

Jenis UMKM	Tahun 2013 (unit)	Tahun 2014 (unit)	+/(-)
Aneka Jasa	1695	1710	15
Perdagangan	4696	4986	290
Industri Pertanian	1569	1607	38
Industri Non Pertanian	1385	1386	1
Pertanian	1483	1556	73
Jumlah	10.828	11.245	417

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, Kab. Ktw. Barat

Sementara itu, pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja usaha kecil juga terus meningkat. Pengembangan kinerja usaha mikro masih membutuhkan kerja keras, hal ini penting karena pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja yang rendah. Padahal usaha mikro masih dominan dalam menampung bertambahnya penggunaan tenaga kerja.

Selanjutnya peningkatan secara umum penilaian KSP/USP di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 dibandingkan Tahun 2013 yang ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel 4.28
Penilaian Kondisi KSP/ USP
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 – 2014

Koperasi	Tahun 2013 (unit)	Tahun 2014 (unit)	+/(-)
Sehat	47	49	2
Cukup Sehat	30	37	7
Kurang Sehat	21	16	-5
Tidak Sehat	1	1	0
Jumlah	99	103	4

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, Kab. Ktw. Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 2.280.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.117.471.009,00 atau 92,84%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.29
Program/Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolak Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.234.936.310	1.180.540.841	95,56	100	Berjalan lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	14	14	keg.	Pelaksanaan Program pelayanan administrasi perkantoran mendukung Tugas pokok dan fungsi serta pelayanan kedinasan	100	100	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.325.000	862.000	65,06	100	Proses surat menyurat dan pengiriman paket berjalan dengan baik dan lancar	165	120	Lbr	Menciptakan proses koordinasi, konsultasi, konfirmasi kedinasan yang lebih baik	100	100	%	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	172.296.250	130.400.631	75.68	100	Berfungsinya komunikasi, sumberdaya air,listrik,internet dan surat khabar	20	15	paket	Menjadi pendukung pelaksanaan kegiatan	100	100	%	
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	142.710.560	138.210.560	100	100	Bangunan pasar dapat jaminan asuransi	12	12	bulan	Bangunan pasar mendapatkan klaim sewaktu terjadi kebakaran	100	100	%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	1.750.000	785.000	44.86	100	Kendaraan operasional dinas terpenuhinya kelengkapan surat menyuratnya	4	4	unit	Kendaraan operasional dinas mendukung pelaksanaan kegiatan	100	100	%	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	152.256.500	148.663.000	97.64	100	pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan	12	12	bulan	Meningkatnya kinerja aparatur	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolak Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa kebersihan kantor	19.884.400	18.760.900	94.35	100	Pembayaran honor petugas kebersihan dan penyediaan peralatan kebersihan kantor	1	1	tahun	Kantor bersih, rapi dan nyaman	100	100	%	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	21.638.800	20.996.300	97.03	100	pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar	1	1	tahun	Optimalisasi pemakaian peralatan kerja	100	100	%	
Penyediaan alat tulis kantor	49.618.600	49.618.600	100	100	penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	paket	Mendukung kelancaran administrasi perkantoran	100	100	%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38.548.500	38.548.500	100	100	Penyediaan barang cetak dan penggandaan untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	paket	Mendukung kelancaran administrasi perkantoran	100	100	%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	10.106.800	10.106.800	100	100	Penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor	1	1	tahun	Bangunan kantor mendapatkan penerangan yang cukup	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	126.790.400	126.239.400	99.57	100	Peralatan dan perlengkapan kantor mendukung kinerja SKPD	1	1	paket	Meningkatkan efektifitas kinerja	100	100	%	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	780.000	775.000	99.36	100	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	11	11	Jb	Menjadi Referensi dan bahan acuan dalam melaksanakan tugas	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolak Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan makanan dan minuman	207.321.000	205.830.000	99.28	100	penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat	1	1	tahun	Stamina kerja aparatur meningkat	100	100	%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	289.909.500	286.244.160	98.74	100	perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tahun	Sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	100	%	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	481.130.980	457.161.700	89.00	91.43	Sarana dan prasarana aparatur mendukung pelaksanaan kegiatan dinas	8	8	keg.	Menunjang pelaksanaan kegiatan	100	100	%	
Pembangunan gedung kantor	29.500.000	29.050.000	98.51	100	Pengadaan instalasi listrik	1	1	paket	Penambahan daya listrik	100	100	%	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	122.580.000	105.957.000	86.43	100	Pengadaan Sepeda Motor	6	6	Unit	Meningkatkan kinerja aparatur	100	100	%	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	92.299.000	90.800.000	98.38	100	Perlengkapan Gedung kantor mendukung pelaksanaan kegiatan	1	1	tahun	Menunjang pelaksanaan kegiatan	100	100	%	
Pengadaan peralatan gedung kantor	35.295.400	33.375.000	94.56	100	Peralatan Gedung kantor mendukung pelaksanaan kegiatan	1	1	tahun	peningkatan kenyamanan dan rasa aman dalam pelaksanaan kerja	100	100	%	
Pengadaan Mabeler	51.942.550	51.568.000	99.28	100	Penyimpan Dokumen kantor	7	7	Buah	Adanya ketertiban, kerapian dan keseragaman Kearsipan	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	70.328.000	70.053.000	99.61	100	Pengecatan gedung kantor	180	180	m2	Menjaga nilai dan menambah nilai manfaat gedung kantor	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolak Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	74.011.000	71.374.700	96.44	100	Service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional	9	9	Unit	optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	5.300.000	4.975.000	93.87	100	Terpeliharnya Peralatan gedung dan kantor	10	6	Buah	Mengurangi penyusutan pada perlatan	100	100	%	
Program peningkatan disiplin aparatur	98.680.000	98.219.000	99.63	100	Meningkatkan disiplin aparatur dalam berpakaian	2	2	keg.	Aparatur disiplin dalam berpakaian	100	100	%	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	64.800.000	64.508.400	99.55	100	pakaian dinas harian pegawai	1	1	paket	Aparatur tertib dan rapi dalam berpakaian dinas	100	100	%	
Pengadaan pakaian kerja lapangan	33.380.000	33.310.600	99.65	100	Tenaga kontrak berpakaian seragam	1	1	paket	Adanya ketertiban, kerapian dan keseragaman berpakaian bagi petugas di lapangan	100	100	%	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	60.819.040	59.545.200	97.90	100	Aparatur ikut serta dalam Bimbinga teknis, pendidikan dan latihan	1	1	keg.	Pengetahuan, wawasan, kompetensi dan kapasitas aparatur meningkat	100	100	%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	60.819.040	59.545.200	97.90	100	Aparatur ikut serta dalam Bimbingan teknis, pendidikan dan latihan	1	1	thn.	Pengetahuan, wawasan, kompetensi dan kapasitas aparatur meningkat	100	100	%	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.321.450	2.185.450	94.14	100	Uang lembur dan penjiilidan buku	2	2	keg.	Laporan semakin baik dan selesai tepat waktu	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolak Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.220.850	1.085.850	88.94	100	Uang lembur dan penjiilidan buku	1	1	tahun	Laporan semakin baik dan selesai tepat waktu	100	100	%	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.100.000	1.099.600	99.96	100	Uang lembur dan penjiilidan buku	1	1	tahun	Laporan semakin baik dan selesai tepat waktu tahun	100	100	%	
Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	58.545.000	55.347.200	94.54	100	Sosialisasi, pendataan, pembinaan dan bantuan hibah	2	2	keg.	Menumbuhkan Wirausaha baru	100	100	%	
Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah	31.189.000	28.999.800	92.98	100	Mensosialisasikan sertifikasi hak atas tanah, monitoring evaluasi BANKUAT	6	6	Kec.	Pelaku UMKM mendapatkan informasi, pengetahuan, dan wawasan mengenai program-program yang akan dilaksanakan	100	100	%	
Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah	27.356.000	26.347.400	96.31	100	Pendataan wirausaha baru dan perkembangan UMKM serta penyaluran bantuan hibah mesin perajang/pengiris singkong ke UMK di desa Kebun Agung Pangkalan Banteng.	1	1	tahun	Updating, pemeliharaan data, serta bantuan hibah kepada UMKM	100	100	%	
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	127.411.250	111.494.100	87.51	100	Menumbuhkan dan mengembangkan UMKM	2	2	keg.	Mendukung para pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output					Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolak Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan		
		Realisasi	(%)											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	82.209.250	67.708.500	82.36	100	Pasar ramadhan dan mengikuti UMKM pada pameran Kobar Expo, Kalteng Expo, dan pameran Smesco	1	1	tahun	Membantu Pelaku UMKM dalam mengkases pasar seluas-luasnya dalam rangka memasarkan produknya	100	100	%		
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	45.202.000	43.785.000	96.86	100	Pelatihan kewirausahaan dan pembinaan UMK di desa PM2L	1	1	tahun	Meningkatkan ketrampilan dan sumberdaya pelaku UMKM	100	100	%		
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	2.600.000	800.000	30.77	30.77	Melalui LKM UMKM dapat berkembang dan mudah memperoleh pinjaman permodalan(dapat mengatasi kurangnya permodalan bagi UMKM)	1	1	keg.	Semakin maju dan berkembangnya usaha UMKM	100	100	%		
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	2.600.000	800.000	30.77	30.77	Rapat pengelolaan dana bergulir dan pemantaun penggunaan dana pemerintah	1	1	tahun	Koperasi/LKM menggunakan dana pemerintah dengan tepat dan cermat	100	100	%		
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	214.306.000	152.177.518	71.01	74.35	Manajemen pembukuan dan usaha Koperasi semakin baik, tertib dan Meningkat	6	6	keg.	Nilai manfaat koperasi bertambah baik dan berdaya saing bagi anggota maupun masyarakat sekitar	100	100	%		

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output					Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolak Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan		
		Realisasi	(%)											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	14.280.000	13.080.000	91.60	91.60	Pengetahuan akan penyusunan Laporan Pertanggung jawaban pengurus dan pengawas Koperasi meningkat.	1	1	tahun	Ketrampilan, pengetahuan, wawasan serta sumberdaya manusia koperasi semakin kompeten menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang	100	100	%		
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	32.565.000	31.833.000	97.75	97.75	Sosialisasi perkoperasian di desa PM2L	3	3	desa	Masyarakat mendapatkan informasi, pengetahuan, dan wawasan mengenai perkoperasian beserta regulasinya	100	100	%		
Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	11.270.000	6.918.200	61.39	61.39	Penilaian koperasi berprestasi	10	10	kop	Semakin banyak koperasi berprestasi sehingga akan menjadi daya tarik bagi gerakan-gerakan koperasi untuk berprestasi	100	100	%		
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	126.266.000	75.241.918	59.65	59.65	Pelaku Koperasi Mengikuti ajang pameran hasil produk Koperasi, dan anggotanya baik tingkat kabupaten, propinsi dan Nasional	1	1	tahun	Terbukanya akses pasar bagi koperasi baik dikabupaten, provinsi dan nasional sehingga pemasaran dari produk yang dihasilkan semakin luas	80	75	%	Ada satu kegiatan pameran yang tidak diikuti	
Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	7.355.000	3.610.000	49.08	49.08	Memberikan pedoman ketentuan dan Penilaian Koperasi simpan pinjam supaya berjalan lebih baik dan sehat.	1	1	tahun	Kualitas koperasi semakin meningkat, sehat dan berprestasi	100	70	%		

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolak Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Monitoring evaluasi dan pelaporan	22.570.000	21.494.400	95.23	95.23	Pembinaan melalui monitoring dan evaluasi tentang kendala, hambatan perkembangan dan terobosan usaha serta menghadiriRAT koperasi.	70	70	Kop./LKM	Menemukan kekuatan dan kelemahan yang ada pada Koperasi/LKM sebagai bahan masukan dan perbaikan	85	85	%	

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan wawasan dan kemampuan kualitas SDM sebagai pemilik dan pelaku usaha;
2. Keterbatasan kemampuan akses pasar sehingga pemasarannya menjadi terbatas;
3. Kekurangan modal dan rendahnya kemampuan mengakses ke lembaga keuangan (bank) karena belum terpenuhinya persyaratan teknis usaha (SIUP, TDP, NPWP, Jaminan dan lainnya);
4. Terdapatnya permasalahan antara pengurus, pengawas, anggota dan pihak ketiga (mitra kerja).

Upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam hal keterbatasan kualitas SDM solusinya adalah melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat); praktek kerja lapangan (PKL), magang maupun studi banding;
2. Dalam hal keterbatasan akses pasar melalui temu usaha, kemitraan UMKM Perusahaan besar dengan pola inti-plasma, pameran dan pembukaan outlet (*show room*);
3. Dalam hal Permodalan melalui :
 - a. Fasilitasi dengan Lembaga Keuangan (bank) melalui Program KUR;
 - b. Fasilitasi Program LPBD dan Bansos Kementerian Koperasi dan UKM RI, Program Pemerintah Provinsi dan Lembaga Keuangan lainnya;
 - c. Fasilitasi ke BUMN atau perusahaan besar dengan Program Kemitraan.
4. Melakukan pertemuan dan memfasilitasi pengawas, pengurus, anggota, dan pihak mitra kerja untuk dapat menyelesaikan permasalahan secara musyawarah;
5. Mengusulkan program bantuan melalui Kemeterian Koperasi dan UMKM dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi;
6. Melakukan Pengembangan Usaha Koperasi melalui Promosi potensi yang dimiliki.

4.1.11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**a) Kondisi Umum**

Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan kependudukan atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan. Masalah kependudukan memiliki posisi yang sangat penting bagi pembangunan daerah, sehingga data kependudukan sangat diperlukan sebagai penentu kebijakan maupun perencanaan program.

Lebih luas lagi data kependudukan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang lalu dan yang sedang berjalan, bahkan dapat memperkirakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Urusan kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam rangka aktualisasi dan akurasi data serta kelengkapan kepemilikan dokumen kependudukan dan legalitas catatan sipil diperlukan pengelolaan administrasi kependudukan yang akurat, terkini dan dikelola secara komprehensif. Perencanaan diberbagai bidang pembangunan tentunya membutuhkan data kependudukan yang akurat dan valid.

Informasi administrasi kependudukan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengambilan kebijakan di sektor-sektor yang lain, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berkomitmen untuk senantiasa melakukan pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil. Untuk mensukseskan program elektronik KTP (KTP-el), Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan verifikasi data kependudukan yang berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Berikut ini dapat disampaikan mengenai perkembangan capaian indikator kinerja utama bidang kependudukan.

Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada akhir tahun 2014 berjumlah **84.663** Kepala Keluarga (**294.228**) jiwa.

Tabel 4.30
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catpil

Indikator	Realisasi Tahun 2013	s/d Tahun 2014		%
		Target	Realisasi	
Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	70	70	72	
Kepemilikan Kartu Keluarga Nasional	89.956	115.000	84.663	73,62
Kepemilikan KTP Nasional	155.918	191.776	187.519	97,78
Perekaman KTP-el	140.191	191.776	147.155	76,73
Kepemilikan KTP-el	126.267	147.155	126.267	73,10
Penduduk Pindah dari Kab.Kobar ke luar Daerah	4.476	-	5.965	-
Penduduk datang dari luar Daerah ke Kab.Kobar	4.443	-	6.132	-
Kepemilikan Akte Pencatatan Sipil :				
) Kepemilikan Akte Kelahiran	140.547	269.872	157.488	58,36
) Kepemilikan Akta Perkawinan	1.226	1.500	1.497	99,73
) Kepemilikan Akta Kematian	1.073	-	1.156	-
) Kepemilikan Akta Perceraian	29	-	39	-
) Kepemilikan Pencatatan Perubahan Nama	9	-	16	-
) Kepemilikan Pencatatan Pengesahan anak		-	8	-
) Kepemilikan Pencatatan Pengangkatan anak		-	2	-

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catpil Kab. Ktw. Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.694.047.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.606.749.733,00 atau 94,84 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.31
Program/Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	0	Terlaksananya penyediaan perangk dan benda pos lainnya	0	0	lbr	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat sehingga persentase penyampaian surat terpenuhi	100	100	%	
Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik	75.960.000	69.251.677	91,17	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	12	12	bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menunjang terlaksananya tupoksi	100	100	%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	2.338.000	1.761.300	75,33	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	11 1	11 1	unit unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan dengan kebt. kegiatan yang dilaksanakan

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa administrasi keuangan	89.125.000	86.279.000	96,81	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2	2	orang	) Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor) Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan	100	100	%	
						12	12	bulan		100	100	%	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.931.100	14.877.600	99,64	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	1	1	orang	Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100	100	%	
						1	1	paket					
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.930.000	9.875.000	99,45	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa : ¼ Personal komputer/ Notebook ¼ Printer	11	6	Unit	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100	100	%	
						5	4	unit					
Penyediaan alat tulis kantor	91.633.300	91.583.800	99,95	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	paket	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.550.000	6.550.000	100	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa foto copy dan penggandaan, spanduk dan banner SOP pelayanan KTP, KK dan akta-akta capil	1	1	paket	Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100	100	%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1.000.000	995.000	99,50	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik berupa lampu neon TL dan SL untuk penerangan ruang kantor	40	40	buah	Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	180.897.000	180.337.000	99,71	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ¼ Soun Sistem ¼ Printer KTP-el ¼ Server ¼ Sofa ¼ AC	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	bh bh bh bh bh	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	177.996.827	177.766.132	99,87	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100		%	
Pengadaan kendaraan dinas operasional	374.013.073	317.980.000	85,02	100	Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas roda 4 untuk operasional pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1	1	unit	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional untuk menunjang kelancaran pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	3.300.000	3.300.000	100	100	Terlaksananya pemeliharaan gedung gedung berupa : ¼ Pemeliharaan kunci gedunkantor	20	20	buah	Terwujudnya kenyamanan dan keindahan gedung kantor dengan baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	101.090.000	101.030.624	99,94	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas roda 4 dan 2	12	12	unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.830.000	5.800.000	99,49	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa AC split	11	11	unit	Terpenuhinya fungsi peralatan gedung kantor dengan baik	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan disiplin aparatur					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100		%	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	21.871.300	21.871.300	100	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	46	46	stel	Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100		%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	47.000.000	46.998.700	100	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	1	1	tahun	Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku	100	100	%	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%	
Penyusunan laporan keuangan semesteran	530.300	0	0	0	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	1	1	Lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	963.600 00	714.000	74,10	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	Lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan
Program penataan administrasi kependudukan					Terlaksananya kegiatan pada Program penataan administrasi kependudukan	4		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program penataan administrasi kependudukan	100		%	
Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	388.405.500	379.914.600	97,81	100	Terlaksananya belanja cetak blanko-blanko dalam rangka mendukung pengoperasian SIAK	1	1	paket	Terwujudnya kelancaran sistem pengentrian data administrasi kependudukan dengan baik dan tepat	100	100	%	
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	19.800.000	16.770.000	84,70	100	Terlaksananya pemeliharaan -komputer untuk menunjang pelaksanaan SIAK -Printer SIAK	20 12	14 7	Unit buah	Terciptanya kelancaran dalam pengoperasian Sistem Administrasi Kependudukan	100	100	%	Penyerapan tidak optimal karena menyesuaikan dengan kebt. perbaikan peralatan yang rusak

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	34.032.000	33.924.000	99,68	100	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta capil	500	8.775	orang	Terwujudnya target pelayanan akta capil pada masyarakat	100	100	%	
Sosialisasi kebijakan kependudukan	46.850.000	39.810.000	84,97	100	Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan	5	5	paket	Tercapainya peningkatan pemahaman masyarakat terkait dengan kebijakan kependudukan	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan

Capaian keberhasilan pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan tabel kinerja output dan outcome adalah :

- 1) Pembangunan dan Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, dilakukan pembersihan data ganda antara data SIAK kabupaten/kota dan perekaman biometrik KTP-elektronik untuk mendapatkan data akurat pemilih untuk Pemilu 2015;
- 2) Terlaksananya Sosialisasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan melalui :
 - a. Melalui media cetak dengan penyebaran leaflet dan poster;
 - b. Melalui media elektronik yaitu siaran radio yang disiarkan secara berkala;
 - c. Melalui penyuluhan/sosialisasi langsung ke masyarakat pada kecamatan kelurahan dan desa.
 - d. Melalui media elektronik yaitu rening tek SBTv
- 3) Penyusunan kebijakan kependudukan, dengan dilaksanakannya rapat koordinasi, dengan keputusan perlunya memperkuat mekanisme pencatatan peristiwa penting dan pencatatan sipil agar kualitas data base kependudukan (SIAK) semakin baik.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi terkait dengan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan Dinas Roda 2 untuk operasional belum mencukupi;
2. Belum ada gedung untuk pelayanan administrasi kependudukan, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal, selama ini masih menggunakan aula kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Jumlah pegawai yang terampil dalam mengelola keuangan belum memadai, dan pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan masih kurang;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya validitas data penduduk, sehingga dalam pengisian biodata penduduk tidak sesuai dengan data legal yang dimiliki;
5. Upgrade Program SIAK untuk kecamatan dan kabupaten memerlukan waktu, sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga pengelola SIAK;
6. Masih terdapat masyarakat yang enggan mengurus KTP, KK dan Akta Pencatatan Sipil terutama akta kelahiran sebelum benar-benar membutuhkan, terutama masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari tempat pelayanan kependudukan. Hal ini dapat terlihat pada saat mereka mengurus akta kelahiran masih banyak yang terlambat melaporkannya sehingga dikhawatirkan adanya manipulasi data;

7. Belum optimalnya kinerja aparat desa/kelurahan dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan;
8. Kelengkapan sarana dan prasarana (Perangkat KTP-el), dan Jaringan komunikasi data dari Kecamatan ke Kabupaten belum optimal, sehingga menghambat pencapaian perekaman KTP-el kepada masyarakat dan Jaringan komunikasi data dari kecamatan ke kabupaten;
9. Belum tersedianya petugas registrasi untuk administrasi kependudukan (akta capil) pada seluruh desa, karena keterbatasan pagu indikatif yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiap tahunnya.

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki strategi pemecahan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan kendaraan dinas yang ada untuk kegiatan operasional Dinas;
2. Mengalih fungsikan ruang aula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pelayanan Administrasi Kependudukan, sehingga bila ada rapat staf terpaksa menggunakan ruangan Kepala Dinas yang kondisinya tidak memadai untuk mengumpulkan seluruh staf sehingga pembinaan staf tidak bisa optimal;
3. Memanfaatkan tenaga yang ada secara maksimal, serta mengikut sertakan dalam bimbingan teknis keuangan dan Diklat/Pelatihan mengenai administrasi kependudukan;
4. Meningkatkan sosialisasi akan pelayanan dokumen kependudukan ke Kecamatan, Desa/ Kelurahan, agar cakupan layanan masyarakat meluas;
5. Berusaha mengusulkan penambahan personil melalui instansi yang berwenang serta terus berkoordinasi dengan kecamatan agar tidak memindahkan tenaga pengelola SIAK (operator kecamatan) yang sudah pernah mengikuti pelatihan SIAK;
6. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada aparat desa/kelurahan dan kecamatan yang menangani administrasi kependudukan dan pemutakhiran data base kependudukan untuk berbagai kepentingan;
7. Mempergunakan sarana dan prasarana pendukung SIAK yang ada semaksimal mungkin baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten;
8. Memanfaatkan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada.

4.1.12 URUSAN KETENAGAKERJAAN**a) Kondisi Umum**

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dengan banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja dan mencari pekerjaan). Dari total penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat, sekitar 69% berada dalam usia kerja (15 tahun ke atas). Rasio antara angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK mengalami penurunan dari 70,75 persen menjadi 67,13 persen.

Tabel. 4.32
Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2011 - 2013

No.	Uraian	2011	2012	2013
1.	Penduduk Usia Kerja (jiwa)	167.028	170.468	184.860
2.	Angkatan Kerja (jiwa)	123.671	120.613	124.101
3.	Bekerja (jiwa)	120.201	117.762	119.533
4.	Menganggur (jiwa)	3.470	2.851	4.568
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74,04	70,75 %	67,13 %
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,80	2,36	3,68
7.	Tingkat Kesempatan Kerja	97,19	97,64	96,32
8.	Bukan Angkatan Kerja	43.357	49.855	60.759
9.	Sekolah	14.061	11.158	15.141
10.	Mengurus Rumah Tangga	26.126	35.276	39.732
11.	Lainnya	3.150	3.421	5.886

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat

Tabel. 4.33
Kondisi Pasar Kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2011 - 2013

No.	Uraian	2011	2012	2013
1.	Upah Minimum Regional (UMK) /Rp.	1.239.912	1.401.101	1.538.244
Kondisi Pasar Kerja				
2.	Pendaftaran	706	909	2.063
3.	Permintaan	203	367	367
4.	Pengiriman	203	294	261
5.	Penempatan	203	294	207

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat

Pasar tenaga kerja juga ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Ini dapat dilihat dari tingginya persentase penduduk usia kerja yang bekerja, yang besarnya mencapai lebih dari 96 persen. Tingkat pengangguran mengalami kenaikan dari 2,36 menjadi 3,68. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk dapat lebih mengoptimalkan lagi berbagai upaya terkait dengan peningkatan penyediaan kesempatan kerja guna untuk mengimbangi peningkatan angkatan kerja yang cukup signifikan, agar target RPJMD untuk angka pengangguran sebesar 2% pada tahun 2016 dapat tercapai.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran Belanja Langsung yang sebesar Rp. 3.866.888.096,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.753.285.996,00 atau 97,06%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Ketenaga kerjaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.34
Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		712.173.285	95,56	99,83	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100		%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.050.000	1.773.000	86,49	100	Terlaksananya penyediaan perangko untuk surat menyurat dan pengiriman paket pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	310	310	Lbr	Terwujudnya kelancaran pengiriman paket dan surat menyurat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena sesuai dengan surat/paket yang dikirim
						50	35	paket	100	80	%		
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	85.900.000	71.436.970	83,16	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12	12	bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menunjang terlaksananya tupoksi dinas	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena penghematan daya air dan listrik
						60	60	terbitan	100	100	%		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	2.950.000	329.600	11,17	100	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas	14	14	unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi kendaraan dinas operasional dan Terpenuhinya surat kelengkapan	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena hanya 5 orang yang mengurus perijinan STKN
						14	5	lbr.	100	14	%		

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					operasional				kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas				
Penyediaan jasa administrasi keuangan	96.734.000	93.835.500	97,00	100	Terlaksananya pembayaran honor jasa administrasi keuangan dan petugas keamanan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12	12	bulan	Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan	100 100	100 100	% %	Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan
Penyediaan jasa kebersihan kantor	32.723.000	30.476.000	93,13	100	Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan kantor	12	12	bulan	Terwujudnya kebersihan halaman dan ruang kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	17.000.000	17.000.000	100	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31	31	unit	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan
Penyediaan alat tulis kantor	54.871.800	53.124.500	96,82	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	12	12	bulan	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada Dinas Tenaga Kerja dan	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan dengan

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Transmigrasi				kebutuhan kegiatan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.957.250	45.841.250	99,75	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan, spanduk dan penggandaan untuk mendukung kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya	12	12	bulan	Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3.800.000	3.800.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	1	paket	Terpenuhinya penerangan untuk menunjang kelancaran kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	195.100.000	192.743.000	98,79	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ¼ Komputer PC ¼ Komputer server dan komputer belajar LLK ¼ Komputer note book ¼ Printer ¼ Pengadaan /pengemb. website	3 9 5 5 1	3 9 5 5 1	unit unit unit unit paket	Terwujudnya peningkatan fasilitas kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan sisa kontrak

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan peralatan rumah tangga	8.750.000	8.745.000	99,94	100	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga kantor ¼ Pengadaan TV	2	2	unit	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kerja	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena sisa dari kontark
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1.200.000	0	0	0	Terlaksananya penyediaan buku peraturan perundang undangan	8	0	Buku	Terwujudnya peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur	100	0	%	Penyerapan dana tidak optimal karena buku peraturan perundang-undangan tidak tersedia di Pangkalan Bun
Penyediaan makanan dan minuman	10.314.000	8.480.000	82,22	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ¼ Makan minum tenaga kontrak ¼ Snack rapat	1152 150	1152 150	OH/ Kotak Kotak	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai untuk mendukung peningkatan kinerja	100 100	100 85	% %	Penyerapan dana tidak optimal karena rapat dilaksanakan 2 x sesuai dengan kebutuhan kegiatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	154.823.235	152.936.829	98,78	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan tupoksi antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	100	%	Penyerapan dana tidak optimal karena perjalanan dinas rapat dan konsultasi ke luar daerah maupun dalam

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													dareah menyesuaikan dengan kebutuhan keg.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.130.622.611	1.103.670.631	97,62	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8	8	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	
Pembangunan gedung kantor	56.000.000	54.890.000	98,02	100	Terlaksananya penambahan daya listrik kantor pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	1	Paket	Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan daya listrik yang cukup untuk operasional peraangkat kantor	100	100	%	Penyerapan dana tidak optimal karena sisa kontrak
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	476.981.811	467.923.000	98,10	100	Tersedianya kendaraan operasional dinas: ¼ Roda empat ¼ Roda dua	1 4	1 4	unit unit	Mendukung kegiatn operasional dinas	100	100	%	Penyerapan dana tidak optimal karena sisa kontrak
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	9.500.000	9.473.000	99,72	100	Tersedianya sapras gedung kantor: ¼ Umbul-umbul ¼ AC	70 1	70 1	m2 unit	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	100	100	%	Penyerapan dana tidak optimal karena sisa kontrak
Pengadaan meubeleur	92.300.000	90.838.000	98,42	100	Terlaksananya penyediaan meubeleur kantor	72	72	Buah	Terwujudnya peningkatan fasilitas kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena sisa kontrak

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	21.200.000	21.175.500	99,88	100	Terlaksananya pemeliharaan halaman kantor yang meliputi rehab kastin dan pemasangan paving	700 1	700 1	m2 paket	Terwujudnya keindahan dan kerapian gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena efesiensi anggaran /sisa dari kontrak
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	187.381.000	173.819.531	92,76	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional	14	14	unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya BBM kendaraan roda dua, roda empat dan jasa servis menyesuaikan dengan kebutuhan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.590.000	10.450.00	98,68	100	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa Air Conditioner (AC)	14	14	unit	Terpenuhinya fungsi perlengkapan gedung kantor dengan baik	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena sisa kontrak
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	276.669.8000	275.101.600	99,43	100	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3 62	3 62	Paket 'm2	Tersedianya gedung kantor yang layak dan representatif	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena sisa kontrak
Program peningkatan disiplin aparatur		46.581.700	84,69	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	55.000.000	46.581.700	84,69	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	110	104	stel	Terwujudnya ketertiban, keseragaman dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan dengan jumlah pegawai dan sisa dari nilai kontrak
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		48.896.720	72,44	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	76	%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	67.500.000	48.896.720	72,44	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	19	12	Keg.	Terwujudnya peningkatan kompetensi dan pemahaman aparatur tentang implementasi peraturan perundang undangan ketenagakerjaan	100	76	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena sesuai dengan surat panggilan bimtek dari kemendagri dan tidak ada nya kontribusi setoran
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1.820.000	74,40	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Prog. peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	85	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000	848.000	84,80	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	4	buku	Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena sisa dari penggandaan buku (tebal buku yg di copy)
Penyusunan laporan keuangan semesteran	64.000	0	0	0	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	1	-	buku	Terpenuhinya ketersediaan informasi laporan keuangan semesteran	100	-	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena tidak digunakan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000	972.000	97,20	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	buku	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan
Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		1.181.983.296	98,45	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	100	100	%	
Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	429.200.000	419.178.100	98,45	100	Terlaksananya penyediaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja berupa :				Terpenuhinya standar peralatan pelatihan kerja	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena sisa dari kontrak

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					¼ Spare part komputer ¼ Perlengkapan jaringan ¼ UPS ¼ Bantuan peralatan kerja	4 2 1 9	4 2 1 9	paket set unit paket					
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	765.476.200	756.905.196	98,88	100	Terlaksananya pendikan pelatihan : ¼ Menjahit ¼ Meubel rotan ¼ pakan ikan ¼ Tata rias ¼ Processing ¼ Salon ¼ Las ¼ Bengkel sepeda motor ¼ Bengkel mobil bensin ¼ Bengkel mobil diesel ¼ Teknologi apersusu ¼ Teknisi HP	16 16 20 16 20 16 16 16 16 16 16 16	16 16 20 16 20 16 16 16 16 16 16 16	orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang	Terwujudnya peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi pencari kerja sesuai dengan standar yang dibutuhkan	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena sisa dari kontrak
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana LLK	5.900.000	5.900.000	100	100	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana LLK	1	1	thn.	Terpenuhinya optimalisasi fungsi sarana dan prasarana LLK dengan baik	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena sisa dari kontrak
Program peningkatan kesempatan kerja		520.912.000	99,09	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kesempatan kerja	2	2	keg.	Tercapainya sasaran keg. pada Program peningkatan kesempatan kerja	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	76.392.000	75.392.000	95,60	100	Terlaksananya penyusunan data informasi bursa kerja dan data base ketenaga kerjaan	100	100	%	Terpenuhinya ketersediaan informasi bursa kerja dan data base ketenaga kerjaan	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena besarnya biaya untuk perjalanan dinas dalam daerah menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan menyesuaikan standar biaya perjalanan dinas dalam daerah
Penyiapan tenaga kerja siap pakai	449.330.000	445.520.000	99,15	100	Terlaksananya kegiatan padat karya produktif di pedesaan berupa pembuatan kolam ikan dan pelatihan tenaga kerja mandiri	2 20	2 20	TTG orang	Terwujudnya penyerapan tenaga kerja serta peningkatan usaha dan pendapatan masyarakat	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena sisa dari kontrak
Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan		168.900.000	97,50	100	Terlaksananya kegiatan pada Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	4	4	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Prog. perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenaga kerjaan	44.625.000	44.540.000	99,81	100	Terlaksananya penetapan upah minimum kabupaten	100	100	%	Terwujudnya penerapan peraturan gubernur tentang upah minimum kabupaten	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya untuk perjalanan dinas dalam daerah menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan besarnya menyesuaikan dengan Standar Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kobar.
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	81.378.500	78.093.000	95,96	100	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan di perusahaan	100		%	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan penerapan peraturan pelaksanaan ketenaga kerjaan bagi perusahaan dan tenaga kerja	100		%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya untuk perjalanan dinas dalam daerah menyesuaikan dengan kebutuhan

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													kegiatan dan besarnya menyesuaikan dengan Standar Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kobar.
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	31.021.500	30.087.000	96,99	100	Terlaksananya perlindungan dan penegakan hukum terhadap tenaga kerja dan perusahaan	100	100	%	Terwujudnya peningkatan perlindungan dan penegakan hukum terhadap tenaga kerja dan perusahaan	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	16.205.000	16.180.000	99,76	100	Terlaksananya penyusunan laporan data obyek pengawasan ketenagakerjaan	100	100	%	Terpenuhinya ketersediaan Buku laporan pengumpulan data obyek pengawasan ketenagakerjaan dan buku laporan klasifikasi dan karakteristik dari jenis informasi ketenagakerjaan.	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan

c) Permasalahan dan Solusi**Permasalahan**

1. Rendahnya keterampilan dan keahlian pencari kerja menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kualitas pencari kerja dengan kualifikasi kebutuhan di pasar kerja. Kesenjangan ini membuat pencari kerja sulit bersaing di pasar kerja, baik di tingkat lokal, daerah, maupun luar negeri, dan menyebabkan sulitnya penempatan. Kondisi ini diperparah dengan belum maksimalnya persiapan diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) pada tahun 2015;
2. Jumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja yang cukup signifikan tidak mampu diimbangi dengan kesempatan kerja yang tersedia;
3. Produktivitas tenaga kerja yang relatif masih rendah membuat banyak kesempatan kerja lokal justru diisi tenaga kerja luar daerah;
4. Masih adanya pengusaha dan pekerja yang kurang bisa memahami hak dan kewajibannya masing-masing sehingga masih sering terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak;
5. Kurangnya fungsi pemberdayaan masyarakat (*community development*) maupun tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dari perusahaan, sehingga penerimaan magang di perusahaan belum dapat maksimal.

Solusi

1. Mengupayakan peningkatan kualitas/kompetensi melalui pelatihan-pelatihan di lembaga pelatihan kerja Pemerintah (Loka Latihan Kerja/LLK) dan Swasta (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/LPKS), melalui perbaikan dan revitalisasi dengan sungguh sungguh kualitas LLK. Hal ini perlu dilakukan agar lulusan pelatihan LLK lebih berdaya saing. Selain itu, pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), termasuk akreditasi LPK, dilakukan secara berkelanjutan, agar terjadi sinergi antara pemerintah dan swasta dalam penanganan pengangguran khususnya dalam hal peningkatan kualitas ketrampilan pencari kerja. Dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan pasar kerja, telah ditempuh beberapa upaya, yaitu Pelatihan Berbasis Kompetensi, Sertifikasi Uji Kompetensi dan penyiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Untuk menghadapi MEA tahun 2015 perlu dilakukan Sosialisasi Sertifikasi Uji Kompetensi bagi asosiasi profesi dan perusahaan;
2. Secara berkelanjutan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membuka perluasan kesempatan kerja serta pelatihan kewirausahaan;
3. Memantau atau mengukur produktivitas kerja dan terus mengupayakan pelatihan peningkatan produktivitas;

4. Perlu sosialisasi, implementasi dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan;
5. Mengembangkan jejaring pemagangan agar semakin banyak perusahaan dapat menerima peserta magang yang nantinya dapat berlanjut pada ikatan kerja permanen, atau setidaknya para peserta magang dapat memperoleh pengalaman kerja yang sangat berharga yang dapat dipergunakan untuk memasuki pasar kerja.

4.1.13. URUSAN KETAHANAN PANGAN

a) Kondisi Umum

Ketahanan pangan merupakan sistem yang terdiri dari sub sistem ketersediaan pangan, distribusi pangan, keterjangkauan dan konsumsi pangan. Ketersediaan mengandung arti ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, berasal dari pangan lokal, impor dan stok masyarakat. Distribusi pangan mengandung arti pangan tersedia bagi setiap rumah tangga sepanjang waktu dan di mana saja.

Keterjangkauan mengandung arti kemampuan fisik akses terhadap sumber pangan secara sosial dan demografis. Sedangkan konsumsi pangan mengandung arti penganeekaragaman konsumsi pangan yang bergizi seimbang, sehat, aman. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode tahun 2012-2016, ketahanan pangan merupakan salah satu program yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Upaya peningkatan ketahanan pangan yang dibangun dari peningkatan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan sangatlah kompleks dan multi disiplin, sehingga menuntut peran serta pemerintah, masyarakat, dan segenap pemangku kepentingan.

Keberhasilan ketahanan pangan di suatu wilayah menjadi tolok ukur dan sumbangan bagi keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program dan kegiatan yang benar-benar mampu memperkokoh perwujudan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tentang pangan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat. Pemenuhan hak atas pangan dicerminkan pada definisi ketahanan pangan, yaitu "kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersediaanya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan”.

Produksi padi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 sebesar 29.482 ton. Produksi Padi tersebut bila dikonversi dalam bentuk beras dengan asumsi 1 kg padi menghasilkan 0,63 kg beras, maka produksi beras Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 sebesar 18.573,66 ton. Dibandingkan dengan kebutuhan, maka produksi padi belum mampu memenuhi kebutuhan beras seluruh penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang terus meningkat setiap tahunnya.

Dengan asumsi kebutuhan beras per kapita per tahun sebesar 121,76 kg dan perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 269.629 jiwa maka kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 32.830 ton, masih kekurangan sebesar 14.256 ton (43,42%). Upaya menekan defisit beras tersebut dengan peningkatan produksi tentunya menjadi pilihan utama.

Peningkatan produksi ini diupayakan melalui peningkatan luas areal tanam dan panen, peningkatan indeks pertanaman dan peningkatan produktivitas tanaman. Disamping itu juga perlu ada gerakan, kampanye maupun sosialisasi pentingnya diversifikasi pangan dan substitusi pangan beras menjadi pangan non-beras seperti jagung, ubi jalar dan ubi kayu.

Ketiga komoditi ini sangat sesuai dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Capaian luas panen dan produksi jagung Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 sebesar 616 ha dan 2.308 ton, luas panen dan produksi ubi jalar sebesar 127 ha dan 901 ton, sedangkan luas panen dan produksi ubi kayu mencapai 416 ha dan 4.934 ton.

Produksi daging di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 mencapai 1.988,04 ton, yang berasal dari daging sapi sebesar 552,96 ton, daging kambing/domba sebesar 49,62 ton, daging babi sebesar 93,44 ton dan daging unggas sebesar 1.292,21 ton. Berdasarkan angka produksi daging, apabila dikaitkan dengan kebutuhannya sebesar 5.529,68 Ton (kebutuhan daging per kapita per tahun sebesar 21,90 kg), maka produksi daerah belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat.

Apabila kebutuhan daging hanya dipenuhi dari daging sapi maka kekurangan daging tahun 2014 relatif besar yaitu sebesar 3.541,64 ton. Apabila kebutuhan daging tersebut disubstitusi dari ternak lainnya maka kekurangan dagingnya akan lebih kecil. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daging, salah satunya dengan penggalakan kegiatan pengembangan peternakan sapi yang diintegrasikan dengan kebun kelapa sawit.

Dari kebun kelapa sawit dapat diambil daun dan limbah solidnya sebagai pakan sapi, sedangkan dari sapi bisa dihasilkan tenaga untuk mengangkut hasil sawit serta kotoran sapi bisa digunakan sebagai pupuk tanaman kelapa sawit. Beberapa perusahaan perkebunan besar dan kelompok tani telah merintis program integrasi tanaman kelapa sawit dan ternak sapi.

Kebutuhan telur sebagai sumber protein bagi masyarakat dapat dipenuhi dari telur ayam buras, telur ayam ras dan telur itik. Pada 2014 di Kabupaten Kotawaringin Barat belum ada pengusaha atau investor yang mengembangkan peternakan ayam ras petelur, sehingga hampir semua kebutuhan telur ayam ras didatangkan dari luar daerah.

Untuk telur ayam bukan ras dan telur itik dalam skala kecil sudah diusahakan sendiri oleh peternak di daerah. Produksi telur ayam buras dan itik di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 mencapai 374,18 ton. Dengan asumsi kebutuhan telur per kapita per tahun sebesar 7,30 kg, maka produksi telur yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk memenuhi kebutuhan telur tersebut, perlu ada upaya untuk menarik investor agar menanamkan investasi dalam bidang peternakan baik dalam budidaya maupun penyediaan sarana dan prasarannya seperti pembibitan, penyediaan pakan maupun usaha pengolahan dan pemasarannya. Selain daging dan telur, ikan juga merupakan salah satu sumber pangan hewani yang kaya akan protein.

Ikan dapat diperoleh dari penangkapan maupun budidaya. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi panjang pantai sebesar 156 km sehingga potensi penangkapan ikan di perairan laut cukup besar. Di samping itu juga terdapat sungai besar dan kecil, danau dan rawa yang juga mempunyai potensi baik untuk penangkapan maupun budidaya.

Sumber air cukup melimpah di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, meliputi kolam, keramba, jaring apung maupun tambak, yang tersebar di semua Kecamatan. Produksi perikanan pada tahun 2014 di Kabupaten kotawaringin Barat sebesar 16.345,50 ton. Apabila kebutuhan ikan per kapita per tahun sebesar 40,58 kg (Susenas 2012), maka secara total kebutuhan ikan (sebesar 10.941,54 ton) di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 sudah terpenuhi, bahkan mengalami surplus sebesar 5.403,95 ton.

Berdasarkan sistem ketersediaan pangan, produksi pangan di daerah berupa beras, daging dan telur, masih terjadi defisit atau tergantung dari luar daerah. Ditinjau dari sistem distribusi pangan, Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan di Provinsi Kalimantan

Tengah, dimana terdapat pelabuhan dan bandara yang memperlancar arus keluar masuk barang dan penumpang.

Arus barang dari Pulau Jawa ke Kabupaten Kotawaringin Barat adalah melalui pelabuhan "Panglima Utar" di Kecamatan Kumai, yang selanjutnya didistribusikan secara lancar ke kecamatan sampai tingkat desa. Namun, faktor cuaca buruk seringkali menghambat distribusi pangan dari luar pulau. Arus bongkar muat dari Pelabuhan Pangkalan Bun dan Kumai tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan barang pangan Kabupaten Kotawaringin Barat melainkan juga untuk kabupaten tetangga seperti Lamandau, Sukamara dan sebagian Seruyan.

Harga barang ditingkat rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat relatif terjangkau sampai diseluruh pelosok wilayah kecamatan dan desa-desa. Terkait dengan stabilitas harga dan pasokan barang, harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal. Pasokan pangan di suatu wilayah masih dinyatakan dalam kondisi stabil jika terjadi penurunan pasokan pangan kurang dari 40%. Umumnya gejolak harga dan pasokan pangan biasa terjadi pada saat menjelang hari besar keagamaan dan cuaca ekstrim, dimana komoditi pangan yang harganya seringkali meningkat (mendorong inflasi) adalah daging ayam, cabe dan bawang merah.

Kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan dari bulan ke bulan pada tahun 2013 relatif tetap sesuai perkembangan jumlah penduduk. Hanya saja terjadi sedikit peningkatan pada kondisi tertentu yaitu pada saat memasuki bulan Ramadhan atau pada saat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Untuk mengatur pasokan bahan pangan ke dalam suatu daerah/wilayah dapat berjalan normal, fungsi distribusi, transportasi, dan efisiensi distribusi perlu dikendalikan, sehingga mobilitas pasokan, baik keluar maupun masuk ke suatu daerah/wilayah, dapat berjalan normal dan terjadi keseimbangan antara produksi setempat dan pasokan bahan pangan dari luar.

Kemudian terkait dengan kondisi rawan pangan berdasarkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak ada satupun dari desa di wilayah Kotawaringin Barat yang masuk dalam kategori desa rawan pangan. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya kita bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah, rumah tangga dan individu yang berbasiskan kemandirian pangan.

Penentuan desa rawan pangan mendasarkan pada tiga indikator, yaitu Kurang Energi dan Protein, Kemiskinan, dan Produksi Pertanian/Pangan. Pembangunan ketahanan pangan membutuhkan kelembagaan yang mantap, dengan didukung oleh sumber daya manusia

yang handal. Sumber daya manusia mempunyai peran penting dan menentukan dalam pengelolaan dan dukungan program/kegiatan kelembagaan ketahanan pangan.

Oleh karena itu, upaya pengembangan sumber daya manusia perlu lebih dioptimalkan. Keragaman sumber daya manusia dan aktivitas penyelenggaraan penyuluhan dapat dilihat dari jumlah Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berjumlah 106 orang.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh 4 (empat) SKPD yaitu Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KP2KP), Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan serta Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 11.640.292.514,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.915.678.596,00 atau 93,77 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Ketahanan Pangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.35
Program/Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OR PENYULUHAN ANIAN DAN HANAN PANGAN													
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	713.060.400	686.154.841	91,51	96,23	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	244.500	48,90	100	Terlaksananya penyediaan perangko dan pengiriman paket untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran	1	1	tahun	Terwujudnya kelancaran pengiriman paket dan pelaksana an tugas	100	100	%	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	34.200.000	24.865.468	72,71	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar	1	1	tahun	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar untuk menunjang terlaksananya tupoksi	100	100	%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	1.000.000	863.000	86,30	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 4	1	1	unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa administrasi keuangan	83.218.500	78.108.500	93,86	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta materai	1	1	tahun	) Terwujudnya administrasi keuangan secara tertib dan tepat waktu	100	100	%	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	17.443.000	16.226.000	93,25	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	1	1	tahun	Terwujudnya kebersihan ruang dan lingkungan kantor	100	100	%	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	30.490.000	26.310.000	86,29	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan KP2KP berupa : ¼ PC Komputer ¼ Laptop/personal komputer ¼ printer ¼ Jaringan internet ¼ website	15 8 10 2 1	15 8 10 2 1	unit unit unit jar web	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan kantor	100	100	%	
Penyediaan alat tulis kantor	50.916.000	49.240.000	96,71	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	tahun	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada Bappeda	100	100	%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	65.883.000	62.403.750	98,52	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan, spanduk, penggandaan, foto copy dan penjilidan	5075 2530 234.535 225	5075 2530 234.535 225	Buku Buah Lbr Buku	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.750.000	2.750.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor berupa : √ Lampu neon √ Stop kontak kabel sambung	40 7	40 7	buah buah	Terpenuhinya penerangan untuk menunjang kelancaran kerja	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	299.730.000	298.530.000	99,60	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ¼ Komputer PC ¼ Notebook ¼ Printer ¼ wireless ¼ sound system	7 14 14 7 7	7 14 14 7 7	unit unit unit unit unit	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	
Penyediaan makanan dan minuman	21.447.000	118.321.000	85,42	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat	5 512	5 512	Orang Kotak	Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	105.482.150	105.252.623	99,78	100	Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke pusat, provinsi dan kabupaten	1	1	tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan prop. maupun pusat	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.052.079.000	1.008.727.748	95,88	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7	7	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	
Pembangunan gedung kantor	487.432.120	487.349.000	99,98	100	Terlaksananya pembuatan pagar beton, pagar berduri dan penataan halaman kantor BPP Arsel dan Kumai	130 200	130 200	m2 m2	Terwujudnya peningkatan fasilitas dan keindahan kantor dan terjaganya keamanan asset kantor BPP	100	100	%	
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	345.823.863	344.854.863	99,72	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan kendaraan dinas operasional	20	20	unit	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja	100	100	%	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	21.850.000	20.490.000	96,42	100	Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa : ¼ tangga ¼ gorden ¼ taplak meja	2 45 40	2 45 40	Unit Meter meter	Terwujudnya peningkatan perlengkapan gedung kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja	100		%	
Pengadaan Meubeleur	62.666.017	62.300.000	99,42	100	Terlaksananya penyediaan meubeleur untuk menunjang				Terpenuhinya kebutuhan meubeleur kantor untuk mendukung	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					pelaksanaan kerja berupa : ¼ almari kaca ¼ almari ¼ kursi tunggu ¼ sofa ¼ kursi rapat	6 2 3 1 50	6 2 3 1 50	bh bh bh set bh	kelancaran dalam pelaksanaan tugas				
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	31.525.000	31.196.000	98,92	100	Terlaksananya pemeliharaan gedung gedung kantor BPP Kec. P. Lada dan Kec. Arsel	325	325	M2	Terpenuhinya fungsi gedung kantor dengan baik utk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	102.900.000	62.065.885	60,32	70	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 4 ¼ Roda 2	1 14	1 8	unit unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	482.000	482.000	100	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa ¼ AC	1	1	unit.	Terpenuhinya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor dengan baik	100	100	%	
Program peningkatan disiplin aparatur	81.600.000	80.613.000	98,79	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	66.000.000	65.208.000	98,80	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai dilingkungan kantor penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan	132	132	stel	Terwujudnya peningkatan ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	15.600.000	15.405.000	98,75	100	Tersedianya kebutuhan pakaian khusus di lingkungan kantor penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan	36	36	stel	Terwujudnya keseragaman dalam penampilan pegawai pada hari-hari tertentu	100	100	%	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	119.000.000	94.626.062	79,52	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	119.000.000	94.626.062	79,52	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	10	10	orang	Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku	100	100	%	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.000.000	1.000.000	50	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000	995.000	99,50	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	%	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000	930.000	93	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	
Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	775.846.600	670.321.246	86,39	90	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	90	90	%	
Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	121.370.000	80.874.250	66,63	70	Terlaksananya fasilitasi rapat dewan ketahanan pangan dan rapat kelompok kerja DKP untuk menyusun laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	2	0	kali	Terpenuhinya rumusan kebijakan dan ketersediaan data informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi ketahanan pangan daerah	100	100	%	
						1	1	buku					
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	51.190.000	50.279.800	98,22	100	Terlaksananya pembuatan demplot	4	4	unit	Terwujudnya penganekaragaman pangan melalui pemanfaatan pekarangan masyarakat	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengembangan cadangan pangan daerah	493.261.200	472.063.196	95,70	100	Terlaksananya penyediaan cadangan pangan setara beras digudang	57.792	57.792	ton	Terpenuhinya ketersediaan cadangan pangan pemerintah minimal 100 ton beras sesuai SPM	100	100	%	
Pengembangan diversifikasi pangan	23.700.000	3.910.000	16,46	20	Terfasilitasinya pelatihan pengolahan pangan berbasis lokal	4	0	klp	Terwujudnya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pengolahan pangan berbasis lokal	60	60	%	
Peningkatan mutu dan keamanan pangan	74.000.000	51.259.300	69,27	100	Tersusunnya laporan keamanan pangan dan juknis keamanan pangan dan terlaksananya sosialisasi keamanan pangan segar pada produsen/ pengusaha	40	40	buku	Terwujudnya pengawasan keamanan pangan segar dan tercapainya peningkatan pengetahuan produsen tentang keamanan pangan segar	80	80	%	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12.325.000	11.944.700	99,50	100	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	6	6	Kec.	Terpantaunya dan teridentifikasinya permasalahan dalam pelaksanaan Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TANAK (Urusan Ketahanan Pangan)													
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	4.910.142.514	4.654.253.760	94,79	96,13	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	4	4	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	100	100	%	
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan HasilPertanian	197.795.000	172.015.000	86,97	96,97	Terlaksananya : ¼ Terbinanya penanganan panen dan pasca panen Terlaksananya Lomba Cipta Menu Pangan berbahan baku MOCAF ¼ Tersedianya alat pengembangan pasca panen MOCAF ¼ Terlaksananya pameran produk pertanian dan peternakan (Kalteng EXPO dan HPS) ¼ Tersedianya leaflet resep aneka olahan hasil berbahan baku MOCAF ¼ Terbinanya kelompok pengolahan hasil pertanian dan	6 6	6 6	Kec. Klp Kali ekspl. Kec.	Tercapainya peningkatan kualitas hasil panen dan produk olahan hasil pertanian	10	10	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					peternakan ¼ Terlaksananya pelayanan informasi harga pasar ¼ Terlaksananya pameran produk pertanian dan peternakan (Kobar EXPO) ¼ Terlaksananya syukuran panen ¼ Terlaksananya lomba kuliner berbahan baku MOCAF ¼ Terlaksananya pertemuan pelaku usaha penggilingan padi ¼ Tersedianya mesin sablon untuk kemasan hasil pertanian	1 1 2 1 1 1	1 1 2 1 1 1	Thn Kali Lokasi Kali Kali Unit					
Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawwija	2.503.385.000	2.388.438.000	95,41	95,59	Terlaksananya : ¼ Tersosialisasinya pengembangan padi dan palawwija ¼ Tersedianya herbisida ¼ Tersedianya Software Data Base Sistem Informasi Pertanian ¼ Tersedianya Benih Padi VUP/VUTW ¼ Tersedianya sabit	6 1 1 10 1000	6 1 1 10 1000	Kec Paket Unit Ton Buah	Tercapainya peningkatan Intensifikasi TPH dan peningkatan produksi tanaman pangan	12	10	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					bergerigi ¼ Tersedianya sabit bergerigi ¼ Terlaksananya rakor dan sinkronisasi pengembangan padi ¼ Tersedianya Hand Sprayer ¼ Terlaksananya workshop penyusunan angka sasaran 2015 ¼ Terlaksananya pengembangan jagung ¼ Terlaksananya pengembangan padi sawah ¼ Terlaksananya pengembangan kacang tanah ¼ Terlaksananya dukungan pengembangan SRI ¼ Terlaksananya pengembangan kedelai ¼ Termonitoring dan terkumpulnya data TPH Tk. Kecamatan dan Tk. Kabupaten	500 2 200 1 150 1500 25 12 100 1	500 2 200 1 150 1500 25 12 100 1	Ha Kali Unit Kali Ha Ha Ha Ha Ha Ha Tahun					
Pengembangan perbenihan/ perbibitan	2.114.366.500	1.999.675.500	94,58	96,52	Terlaksananya : ¼ Sosialisasi penyebaran varietas padi unggul lokal	1	1	Kali	Terwujudnya Kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan benih unggul spesifik lokasi	80	80	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					¼ Terlaksananya pemurnian varietas padi unggul lokal	4	4	Unit					
					¼ Terlaksananya pengembangan buah-buahan	5	5	Desa					
					¼ Tereksplorasi/teridentifikasi padi varietas lokal	6	6	Kec					
					¼ Terlaksananya penangkaran benih unggul/lokal spesifik lokasi	25	25	Ha					
					¼ Terlaksananya pengujian sampel benih	12	12	Paket					
					¼ Terlaksananya penangkaran benih padi di BBTP	25	25	Ha					
					¼ Tersedianya bahan/peralatan pasca panen BBTP	7	7	Jenis					
					¼ Terlaksananya pembangunan JUT di BBTP	2250	2250	Meter					
					¼ Tersedianya peralatan BBTP	6	6	Jenis					
					¼ Terlaksananya pertemuan penangkar benih padi	1	1	Kali					
					¼ Terlaksananya studi banding pengelolaan balai benih di Yogya	1	1	Kali					

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	94.596.014	94.125.260	99,50	100	¼ Terlaksananya pelaporan program/kegiatan Distanak ¼ Termonitor dan terkendalinya	1 1	1 1	Tahun Tahun	Tercapainya efektivitas pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan	90	90	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BUN (Urutan Ketahanan Pangan)													
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan					Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	6		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	100		%	
Penyusunan Data Base Potensi produk pangan	155.815.000	155.318.399	99,68	100	Terlaksananya : ¼ Pengumpulan data statistik perkebunan ¼ Penyusunan buku perkebunan dalam angka ¼ Monev SAI dan SIMAK BMN dan pengumpulan target SPK sektor perkebunan	1 30 1	1 30 1	tahun ekmpl. tahun	Terpenuhinya ketersediaan data perkebunan yang memadai	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	53.329.500	49.374.500	92,58	100	Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu hasil perkebunan pasca panen sawit	75	75	orang	Tercapainya peningkatan SDM petani perkebunan	100	100	%	
Pengembangan Diversifikasi Tanaman	505.570.000	482.627.100	95,46	100	Terlaksananya :				Terwujudnya peningkatan luas areal komoditi perkebunan untuk pengembangan dan penganeka ragam usaha komoditi perkebunan	100	100	%	
					¼ Penanaman lada untuk pengembangan BPB	15	15	ha					
					¼ Penanaman kelapa dalam	26	26	ha					
					¼ Bantuan pupuk PMLT	7500	7500	kg					
Pengembangan Pertanian pada lahan kering	1.725.985.000	1.669.467.190	96,73	100	Terlaksananya :				Terpenuhinya kebutuhan sarana jalan petani kebun serta sarana dan prasarana kebun pembibitan yang memadai	100	100	%	
					¼ Pembangunan jalan usaha tani (JUT)	11,5	13,6	Km					
					¼ Pembangunan tempat pertemuan di kebun pembibitan dinas	72	72	M2					
Peningkatan mutu dan keamanan pangan	50.127.000	49.227.000	98,20	100	Terlaksananya sosialisasi Bahan Olah Karet yang ber SNI dalam rangka peningkatan mutu produk perkebunan	75	75	orang	Tercapainya peningkatan mutu komoditi karet dan perkebunan rakyat di 3 desa	100	100	%	
Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	1.365.460.000	1.205.778.250	88,31	100	Terlaksananya perluasan kebun kelapa sawit rakyat	140	140	ha	Tercapainya target pengembangan areal kebun sawit rakyat	100	100	%	Efisiensi anggaran dan penawaran nilai kontrak
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	16.957.500	16.407.500	96,76	100	Terlaksananya pelaporan dan monitoring Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	1	1	tahun	Termonitornya seluruh rangkaian kegiatan pada program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DA (Urusan Ketahanan Pangan)													
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan					Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	100	100	%	
Koordinasi pembangunan lingkup pertanian	113.320.000	90.857.000	80,17		Tersedianya data perizinan sektor pertanian dan peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan	6	6	Kec.	Terpenuhinya aturan perizinan sektor pertanian dan peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan	100	100	%	

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang perlu segera mendapat perhatian pada ketahanan pangan adalah :

1. Berkurangnya luas lahan untuk pengembangan pangan akibat alih fungsi lahan;
2. Pertumbuhan produksi pangan jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk menjadi tidak sebanding sehingga mengakibatkan sulit tercapainya swasembada pangan;
3. Keterbatasan SDM yang menangani bidang Ketahanan Pangan akibat status kelembagaan yang tidak sesuai dengan undang-undang;
4. Masih sulitnya mengubah kebiasaan pola tanam dan ketergantungan pola konsumsi pangan yang bertumpu pada pangan beras saja;
5. Untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat masih sangat tergantung dari luar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah :

1. Menetapkan regulasi di bidang alih fungsi lahan sehingga terlindungi lahan produktif (khususnya lahan pangan);
2. Meningkatkan status kelembagaan Ketahanan Pangan daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
3. Melanjutkan usaha diversifikasi dengan menyediakan alokasi dana APBD;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan diversifikasi tanaman pangan dengan pemanfaatan pekarangan untuk dijadikan sumber pangan (*buffer stock*) di musim paceklik.

4.1.14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**ANAK****a) Kondisi Umum**

Pembangunan pemberdayaan gender merupakan bagian integral dari pembangunan daerah. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat masih jauh dari ideal. Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) diperlukan dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) tersebut. Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan dan persentase angkatan kerja laki-laki dan perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi aktif dalam

berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. IDG disusun dari tiga komponen, yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan.

Tanggung jawab sosial masyarakat terhadap permasalahan perlindungan perempuan dan anak semakin meningkat. Namun demikian, masih perlu ditingkatkan baik akses maupun layanan terhadap Kesejahteraan Anak, Perlindungan Anak, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Saksi dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Meningkatnya partisipasi perempuan dapat dilihat dari peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan, jumlah pejabat struktural perempuan, jumlah pengusaha perempuan, pengusaha mikro dan kecil, jumlah pejabat publik dan profesi perempuan di segala bidang. Namun demikian, masih perlu ditingkatkan baik jumlah dan kompetensinya. Berikut ini adalah tabel capaian indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 4.36
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2014

No	Indikator	Capaian 2013	2014		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	-	-	-
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (GEM)	-	-	-	-
3.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	17,89	13.275	2.399	18,07
4.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	25,01	77.680	19.470	25,06
5.	Rasio KDRT	58	62	36	58,86
6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	74,13	71	53	74,64

Sumber : BPPKB Kabupaten Kotawaringin Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.211.962.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.865.618.425,00 atau 89,21 %.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selengkapnya dapat dilihat pada tabel

Tabel 4.37
Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KB													
Program pelayanan administrasi perkantoran	419.405.100	389.052.231	92,76	97,68	Terlaksananya kegiatanpada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	10	Pkt	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	10	Pkt	Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan kebutuhan kegiatan/operasi onal
Penyediaan jasa surat menyurar	1.250.000	71.000	5,68	5,68	Terlaksananya penyediaan : - perangko dan - pengiriman paket	250 10	250 10	Lbr Pkt	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	250 10	25 10	Lbr Pkt	Penyerapan anggaran tidak optimal karena untuk penyediaan jasa perangko tidak digunakan dan biaya pengiriman paket menyesuaikan kebutuhan kegiatan kantor
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	34.800.000	17.629.138	50,66	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar	12	12	Bln	Terwujudnya komunikasi, air dan penerangan kantor yang memadai	12	12	Bln	Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya pembayaran listrik,air dan telepon ,surat surat kabar menyesuaikan dgn kebutuhan/pemaka ian kantor

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	4.920.000	1.092.000	22,20	22,20	Terlaksananya Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional -Roda 2 -Roda 4	13 2	13 2	Unit Unit	Terpenuhinya Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	13 2	13 2	Unit Unit	Penyerapan anggaran tidak optimal karena pemeliharaan dan perizinan kendaraan /operasional roda 2 dan roda 4 menyesuaikan kebutuhan/pemakaian kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan	76.336.500	74.575.000	97,69	97,69	Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan - materai - buku cek	450 2	450 2	Buah Buah	Tercapainya jasa administrasi keuangan	450 2	450 2	Buah Buah	Penyerapan anggaran tidak optimal karena materai dan buku cetak menyesuaikan kebutuhan / pemakaian kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.138.000	15.267.500	94,61	100	Terjaminnya kebersihan dan keindahan kantor - pegawai clening servis dan - bahan pembersih	1 12	1 12	Orang Bln	Terwujudnya kenyamanan, keindahan dan kebersihan kantor	1 12	1 12	Orang Bln	Penyerapan anggran tidak optimal karena pembayaran honor petugas jasa kebersihan dan pembelian bahan pembersih sesuai kebutuhan yang digunakan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	16.140.000	15.550.000	96,34	96,34	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja dilingkungan BPPKB berupa :				Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan				Penyerapan anggaran tidak optimal disesuaikan

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					√ Jaringan Komputer √ Printer √ Note Book √ Komputer	9 9 8 12	9 9 8 12	Unit Unit Unit Bulan	kantor	9 9 8 12	9 9 8 12	Unit Unit Unit Bulan	dengan keadaan peralatan kantor yang memerlukan perbaikan
Penyediaan alat tulis kantor	21.998.900	21.998.900	100	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	12	12	Bulan	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi	12	12	Bulan	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.892.600	20.832.200	99,71	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penjilidan - Foto Copy - Cetak Blangko Pendataan dan Laporan KB - Cetak Amplop - Cetak Blangko Pajak	25 77.913 8000 30 10	25 77.91 8000 30 10	Exemp. lembar Lmbr Pak Buku	Tercapainya kelancaran dalam pelaksanaan kerja	25 77.91 3 8000 30 10	25 77.91 8000 30 10	Exemp. lembar Lmbr Pak Buku	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.785.000	1.780.000	99,72	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan Kantor -Stop Kontak -Kabel Rol 6 m -Piting Lampu -Lampu Pijar -Lampu Neon 10 Watt -Lampu Hias/Taman -L. Neon 40 Watt	8 6 5 15 12 3 15	8 6 5 15 12 3 15	Buah Rol Buah Biji Buah Buah Buah	Terpenuhinya penerangan untuk menunjang kelancaran kerja	8 6 5 15 12 3 15	8 6 5 15 12 3 15	Buah Rol Buah Biji Buah Buah Buah	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	52.437.500	52.119.000	99,39	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa : √ Sond System √ Kamera Digital √ Printer √ Notebook √ Komputer PC	2 2 4 1 1	2 2 4 1 1	Unit Unit Unit Unit Unit	Terpenuhinya kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor	2 2 4 1 1	2 2 4 1 1	Unit Unit Unit Unit Unit	
Penyediaan makanan dan minuman	10.001.000	6.465.000	64,64	76,34	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat -Mkn, mnum Cleaning Servis -Mkn dan Mnum Jg Malam -Kudapan (Snack) -Mkn dan Minum Sopir	264 365 250 264	2624 365 250 254	OH OH Org/kali OH	Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	264 365 250 264	2624 365 250 254	OH OH Org/kali OH	Penyerapan anggaran tidak optimal karena pembayaran makan minum untuk snack rapat disesuaikan dengan kebutuhan kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	162.705.600	161.672.493	99,37	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	Bulan	Terpenuhinya keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antar kabupaten dan propinsi maupun pusat	12	12	Bulan	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	997.052.800	888.841.621	89,15	96,59	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12	12	Bualn	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12	12	Bulan	Penyerapan anggran tidak optimal karena Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor tidak digunakan
Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	852.000.000	777.793.272	91,29	100	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional -Roda 4 -Roda 2	1 8	1 8	Unit Unit	Terwujudnya kelancaran dalam /Operasional Roda 4 dan Roda 2	1 8	1 8	Unit Unit	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	40.912.800	40.912.800	100	100	Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa : √ Mesin potong rumput √ Meja staf √ Kursi kerja √ AC √ Papan pengumuman √ Papan nama bidang2 √ Tempat Koran √ Lemari Arsip	1 7 10 1 1 6 1 2	1 7 10 1 1 6 1 2	Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	Terwujudnya kelengkapan gedung kantor untuk menunjang pelaksanaan kerja	1 7 10 1 1 6 1 2	1 7 10 1 1 6 1 2	Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.680.000	30.680.000	100	100	Terlaksananya pemeliharaan Gedung dan Pagar Kantor serta kenyamanan suasana kerja	260	260	M ²	Terwujudnya kenyamanan, keindahan dan kebersihan halaman kantor BPPKB	260	260	M ²	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	72.400.000	39.455.549	54,50	54,50	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional - Pemliharaan dan BBM R.4 - Pemliharaan dan BBM R.2	2 12	1 12	Unit Unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	2 22	1 12	Unit Unit	Penyerapan anggaran tidak optimal karena uang pemelihara an dan pembelian BBM hanya digunakan 1 Unit kendaraan operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program peningkatan disiplin aparatur	29.425.000	28.475.000	96,77	100	Tersedianya kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur	1	1	Keg	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur	1	1	Keg	Penyerapan anggaran tdk optimal karena menyesuaikan keperluan / pemakaian
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	29.425.000	28.475.000	96.77	100	Terlaksananya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan kantor BPPKB	60	60	Orang	Terwujudnya Aparatur yang berwibawa	60	60	Orang	Penyerapan anggaran tdk optimal karena menyesuaikan keperluan / pemakaian
Program fasilitas pindah/ purna tugas PNS	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	43.650.000	37.092.200	84,98	84,98	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan Sumber Daya Aparatur	1	1	Keg	Tercapainya Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan Sumber Daya Aparatur	1	1	Keg	Penyerapan anggaran tidak optimal karena bintek implementasi peraturan perundand-undangan terealisasi 4 orang rencananya 5 orang
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	43.650.000	37.092.200	84,98	84,98	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan Sumber Daya Aparatur	5	5	Orang	Tercapainya Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan Sumber Daya Aparatur	5	5	Orang	Penyerapan anggaran tidak optimal karena bintek implementasi peraturan perundand-undangan terealisasi 4 orang rencananya 5 orang
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	40.910.000	39.860.000	97,43	100	Terlaksananya pelatihan masyarakat di kecamatan tentang pembentukan lembaga P2TP2A	120	120	Orang	Terwujudnya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang arti penting lembaga P2TP2	120	120	Orang	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	292.700.000	272.317.799	93,04	100	Terlaksananya sosialisasi djejaring antar lembaga masyarakat, sosialisasi tingkat kabupaten, sosialisasi tingkat kecamatan bintek konvensi anak, pembentukan forum anak, launching KLA	180	180	Orang	Tercapainya Pemahaman dan Kemampuan Kelembagaan untuk berperan Aktif dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	180	180	Orang	Penyerapan anggaran tidak optimal karena belanja honor/narasumber/tenaga disesuaikan dg kebutuhan kegiatan
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	97.850.000	83.002.120	84,83	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	2	2	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	2	2	Keg	
Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	54.950.000	45.177.120	82,21	100	Terlaksananya Pelatihan Bagi Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT Perwakilan Kec. Arsel. Kec. Kumai. Kec. P.Lada. Kec. P. Banteng	60	60	Orang	Terwujudnya peningkatan SDM bagi calon pelatih dan pendampingan korban KDRT	60	60	Orang	
Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	42.900.000	37.825.000	88,17	100	Terlaksananya sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	120	120	Orang	Tertibnya administrasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	120	120	Orang	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	654.049.500	556.617.073	85,10	86,14	Terlaksananya Pelatihan Bagi Organisasi Perempuan dan PKK	3	3	Keg	Meningkatnya SDM Anggota Organisasi Perempuan dan PKK	3	3	Keg	
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	476.499.500	385.298.272	80,86	80,98	Terlaksananya pelatihan bagi organisasi perempuan	27 180	27 180	Org Orang	Terwujudnya peningkatan SDM anggota organisasi wanita	27 180	27 180	Orgs Orang	
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	118.700.000	112.618.801	94,88	100	Terlaksananya kegiatan: √ sosialisasi PUG dan ARG √ pelatihan ketram. wanita di 2 desa kec.kumai, kec. P.lada √ pelatihan keteram pilan wanita	60 120 50	60 120 50	Orang Orang Orang	Terwujudnya peningkatan keterampilan dan pemahaman tentang PUG, ARG	60 120 50	60 120 50	Orang Orang Orang	
Kegiatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	58.850.000	58.700.000	99,75	100	Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga	623 180	623 180	Ang.U PPKS Orang	Terciptanya keluarga yang sejahtera	623 180	623 180	Ang.U PPKS Orang	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D													
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	486.989.000	479.850.509,60	98,53	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Prog. Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	100	100	%	
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	634.700.500	568.285.381	89,53	100	Terlaksananya pelatihan bagi organisasi perempuan	150	150	orang	Terwujudnya peningkatan SDM organisasi wanita	150	150	orang	

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan berkaitan dengan pengarusutamaan gender masih pada tahap sosialisasi guna meningkatkan pemahaman bagi *stakeholder* terkait khususnya bagi aparat perencanaan pada tingkat SKPD.

Selanjutnya guna memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak khususnya terhadap kasus KDRT dan *trafficking* telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Jumlah kasus KDRT yang tertangani baik yang berkaitan dengan perempuan maupun anak sampai saat ini mencapai 53 kasus yang tersebar pada 6 Kecamatan.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang perlu mendapat penanganan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang pengertian Gender, Keadilan dan Keadilan Gender
2. Kurangnya pemahaman dan komitmen Pejabat Daerah mengenai PUG dan PPRG sehingga kelembagaan yang menangani PUG lebih bersifat formalitas dan tidak dapat berfungsi secara optimal.
3. Masih lemahnya perlindungan perempuan dan anak terkait dengan masih adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan dan anak;
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia pelaksanaan PPRG sebagian SKPD masih kurang memadai.
5. Implementasi PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam rangka menuju keadilan dan kesetaraan gender masih belum optimal.
6. Belum semua SKPD mempunyai data terpilah sebagai data pendukung penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG).
7. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, dengan jenis kekerasan yang semakin beragam serta bersifat lintas daerah.
8. Tidak maksimalnya pembinaan organisasi-organisasi perempuan
9. Kabupaten Kotawaringin Barat belum maksimal mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kotawaringin Barat menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA).
10. Belum Optimalnya dan Fungsi Peran Lembaga P2TP2A.
11. Belum tersusun Profil Perempuan, Data gender dan data terpilah Kabupaten Kotawaringin Barat.

12. Diperlukan peran perempuan untuk mengangkat ciri khas design kain batik dengan motif khas Kabupaten Kotawaringin Barat.
13. Diperlukan Penyusunan Kerja study Banding untuk Persiapan Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak ke Kabupaten/Kota yang sudah pencaangan.
14. Perlu penyusunan grand design Peran Perempuan Kabupaten Kotawaringin Barat.
15. Belum Optimalnya sosialisasi dan penyuluhan tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang perlu dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesejahteraan gender, menggiatkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi tentang keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat;
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen Pejabat Daerah mengenai PUG dan PPRG.
3. Sosialisasi yang berkelanjutan tentang undang-undang KDRT dan undang-undang perlindungan anak dan perempuan, kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak dan perempuan serta mengintensifkan kampanye anti kekerasan terhadap anak dan perempuan;
4. Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana PPRG diseluruh SKPD dengan mengikuti antara lain BinteK, Diklat dan sebagainya mengingat PUG harus di Implementasikan disetiap sektor pembangunan Daerah
5. Perlu dilakukan sosialisasi dan advokasi tentang secara terus menerus tentang implementasi PUG kepada semua pihak dan perlu disusun peraturan bupati tentang pedoman PPRG
6. Penyusunan data terpilah dan mengintegrasikan penyusunan data terpilah dalam pendataan semua sektor pembangunan Daerah sehingga dapat dilakukan analisis Gender secara memadai sebelum menyusun Program dan kegiatan diseluruh sektor .
7. Perlu dilakukan koordinasi lintas sektor untuk menangani korban kekerasan dan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka mencegah KDRT
8. Dilakukan pembinaan organisasi dalam bentuk kegiatan binteK kepemimpinan perempuan, diklat kader perempuan, binteK berorganisasi perempuan, binteK peran perempuan dalam pembangunan dan kegiatan Dharma Wanita

9. Pencanaan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA), di dukung dengan peraturan daerah serta koordinasi dengan SKPD/Pihak terkait dan sosialisasi
10. Optimalisasi peran lembaga didukung dengan tim terpadu, adanya Mou dengan lembaga terkait, disediakan biaya operasional P2TP2A dan dana untuk tenaga pendamping korban KDRT
11. Pembuatan Buku Profil Perempuan, Buku Data gender dan Buku Data terpilah Kab Kobar
12. Penyelenggaraan lomba mendesign kain motif khas Kotawaringin Barat bagi kaum perempuan di Kabupaten Kotawaringin Barat, mempatenkan hasil lomba motif kain batik khas Kotawaringin Barat dengan Perda, bekerjasama dengan pabrik dan pemasaran kain batik khas Kotawaringin Barat
13. Bersama Tim /Gugus Tugas melaksanakan Study Banding dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Pencanaan Kabupaten Layak Anak di Kab Kobar Tahun 2015
14. Kajian Grand Design Peran Perempuan Kab Kobar
15. Melaksanakan Sosialisasi dan Penyuluhan penanganan KDRT dan Perlindungan di semua wilayah Kab Kobar

4.1.15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

a) Kondisi Umum

Jumlah penduduk yang besar merupakan suatu keuntungan bagi pembangunan, dimana tersedianya sumberdaya manusia yang dapat digunakan untuk menjalankan roda pembangunan. Namun jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak terkontrol serta tidak disertai dengan kualitas SDM yang baik hanya akan menambah beban bagi pemerintah. Oleh karena itu diperlukannya tindakan pencegahan dan pengontrolan terhadap jumlah penduduk.

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh tiga hal, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi atau perpindahan penduduk. Untuk mengontrol pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang tepat dilakukan adalah dengan mengontrol jumlah kelahiran penduduk dan jumlah migrasi. Pengontrolan terhadap jumlah kelahiran dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan program keluarga berencana (KB). Dengan program ini diharapkan tercipta penduduk dengan jumlah dan kualitas yang ideal bagi pembangunan.

Program KB yang dulu pernah dinyatakan berhasil kini digalakkan kembali dengan mengusung slogan lama, yakni dua anak cukup. Program KB adalah salah satu program penting dalam upaya mencapai keluarga

penduduk dengan cara mengendalikan angka kelahiran. Tujuan akhirnya bermuara pada mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Lahirnya program KB terutama dilatarbelakangi tingginya angka kelahiran. Program KB sangat diperlukan karena jika jumlah penduduk tidak dapat dikendalikan, maka upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat tidak akan efektif dan berhasil maksimal, karena setiap peningkatan hasil pembangunan akan terserap oleh pertumbuhan penduduk.

Aspek yang harus dipantau dalam proses pengontrolan terhadap jumlah kelahiran adalah aspek usia perkawinan dan aspek penggunaan alat kontrasepsi. Pada aspek usia perkawinan, yang perlu diperhatikan adalah usia perkawinan dari perempuan. Semakin muda seorang perempuan kawin maka semakin besar pula peluang mereka untuk menghasilkan lebih banyak anak.

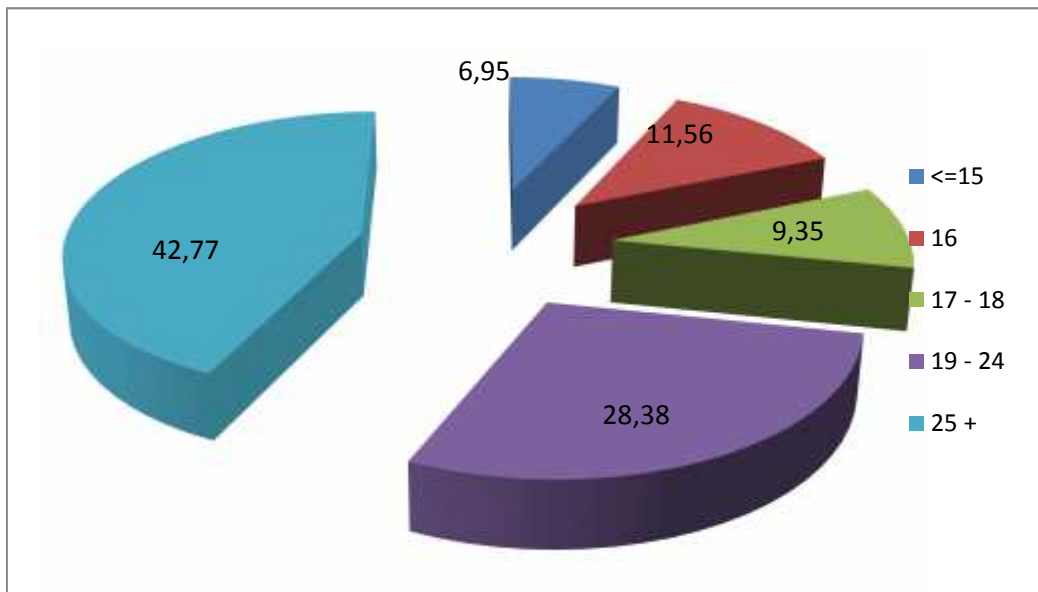
Akseptor KB Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar 33.375 artinya 67,77 % dari jumlah PUS yang ada menggunakan alat kontrasepsi sebesar 49.238. Angka ini berada diatas target RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat yakni sebesar 65 % tapi perlu kita bina secara kontinyu dan yang memakai alat kontrasepsi jangka pendek agar berganti kontrasepsi jangka panjang sehingga angka drop out dapat ditekan seminimal mungkin.

Sementara itu, jika dititik dari usia perkawinan pertama untuk wanita umur 10 tahun keatas menunjukkan kondisi yang cukup baik, ternyata perempuan di Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung untuk menikah pada umur 19-24 tahun, yakni sebesar 42,77 %. Akan tetapi perlu diperhatikan juga bahwa masih terdapat 6,95 % wanita usia kurang dari 15 tahun yang menikah untuk pertama kali. Padahal semakin muda umur saat perkawinan, maka peluang untuk terjadinya kematian ibu dan bayi juga semakin besar disebabkan masih belum siap dan matangnya si ibu untuk melahirkan anak.

Terkait usia sekolah, proporsi wanita usia umur 10 tahun keatas yang menikah pada usia 16 dan 17-18 tahun cukup besar. Padahal pada umur tersebut selayaknya mereka sedang mengenyam pendidikan di jenjang menengah keatas. Jika banyak wanita yang kawin pada umur tersebut, maka secara tidak langsung hal tersebut menggambarkan cukup banyak wanita yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang menengah atas karena menikah. Slengkapnya tertuang pada diagram berikut.

Diagram 4.2

Persentase wanita umur 10 tahun keatas yang pernah kawin menurut umur perkawinan pertama, Kabupaten Kotawaringin Barat. Tahun 2014

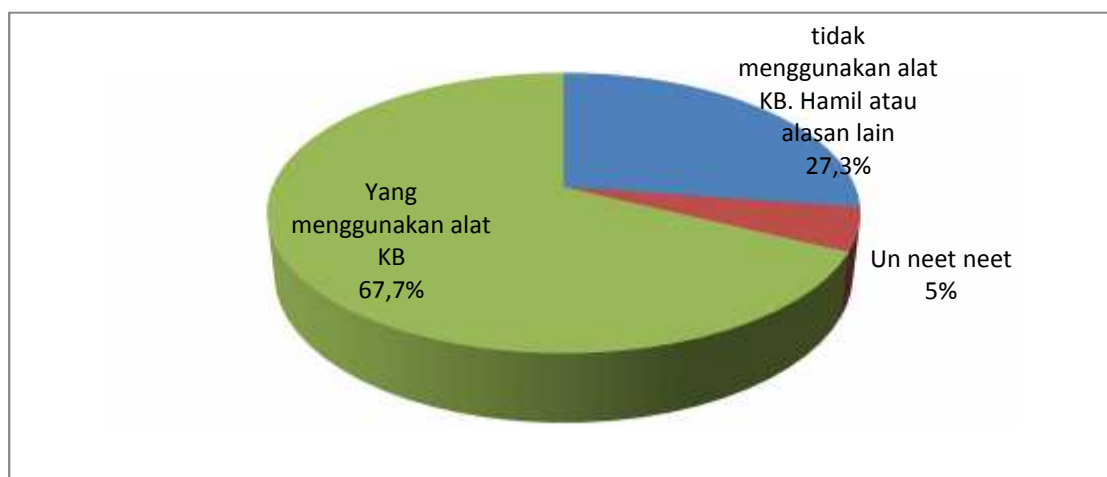


Sumber : Hasil Analisis BPPKB Kab. Kotawaringin Barat

Sementara jika ditinjau dari segi penggunaan alat kontrasepsi masih ada total 21,6% wanita yang sangat beresiko untuk hamil, yaitu masih dalam masa reproduksi dan berstatus kawin, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi.

Diagram 4.3

Persentase wanita umur 15-49 tahun yang berstatus kawin menurut penggunaan alat KB, Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014



Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis BPPKB Kab. Kotawaringin Barat

Sebanyak 27,3 % merupakan wanita 15-49 tahun yang berstatus kawin dalam kondisi hamil dan ingin anak segera. Sementara 5 % merupakan wanita 15-49 tahun yang berstatus kawin ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tapi tidak. Semakin besar presentase wanita beresiko hamil yang tidak menggunakan alat KB, semakin besar pula kemungkinan untuk melahirkan lebih banyak anak.

Angka TFR di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat cukup bervariasi. Rata-rata jumlah anak dalam keluarga tahun 2014 adalah sebesar 3,8 orang. Angka ini belum sejalan dengan target RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 yang menyebutkan angka TFR sebesar 2,1. Target ini juga terus dipertahankan hingga akhir periode RPJMD yakni 2,1 orang anak dalam satu keluarga pada tahun 2016.

Meski demikian, untuk menyukseskan program KB perlu dilakukan sedikit upaya evaluasi untuk dapat menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) jumlah satu keluarga dari 3,8 anak menjadi 2,1 sesuai dengan slogan program KB.pada tahun 2016 2 (dua) Anak Cukup.

Tabel 4.38
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera Tahun 2013-2014

No	Indikator	Capaian 2013	2014		
			Target	Realisasi	Realisasi (%)
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	2,1	3,8	3,8
2.	Rasio akseptor KB	87,9	8.106	6.075	74,94
3.	Cakupan peserta KB aktif (orang)	24.759	25.580	33.375	130,47
4.	Keluarga Pra Sejahtera	1.474		2.701	
5.	Keluarga Sejahtera I	4.197		9.545	

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kobar

Berdasarkan pendataan sampai dengan bulan Desember 2014, jumlah peserta KB aktif sebanyak **33.375 atau 67,7 %** dari Pasangan Usia Subur (PUS) yang berjumlah **49.238**.

Tabel 4.39
Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2013-2014

No	Peserta KB Aktif	Tahun 2013			Tahun 2014			+ / (-) Real.
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	IUD	813	783	96	686	943	137,46	+37,46
2	MOP	102	115	112	105	119	113,33	+13,33
3	MOW	586	697	119	501	736	146,906	+46,906
4	IMPLANT	2.286	2.436	107	3.486	3.162	90,70	-9,3
5	SUNTIK	25.731	13.482	52	8.135	19.324	237,541	+137,541
6	PIL	13.679	6.519	48	11.923	8.190	68,691	-31,4
7	KONDOM	700	727	104	744	736	121,102	+21,102
	Jumlah PA	23.145	24.759	107	25.580	33.375	130,47	+30,47
	Jumlah PUS	48.061	24.759	52	49.238	49.238	67,78	-33
	% PA/PUS			100	65	33.375	67,78	-33

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Kotawaringin Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 569.446.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 498.511.601,00 atau 87,54%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.40
Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program pelayanan kontrasepsi	187.846.000	177.020.300	94,24	100	Terlaksananya kegiatan pada program pelayanan kontrasepsi	1	1	Keg	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan kontrasepsi	1	1	Keg	Penyerapan anggaran tidak optimal karena pelayanan kontrasepsi menyesuaikan kebutuhan
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	187.846.000	177.020.300	94,24	100	Terlaksananya penyediaan sarana pelayanan KB	6	6	Kec	Tercapainya target peserta KB baru dan aktif	6	6	Kec	Penyerapan anggaran tidak optimal karena pelayanan kontrasepsi menyesuaikan kebutuhan kegiatan
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	75. 675.000	51.387.500	67,91	100	Terlaksananya kegiatan pada program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kegiatan di masyarakat	1	1	Keg	Meningkatnya Pengetahan Masyarakat Tentang Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak	1	1	Keg	Penyerapan anggaran tidak optimal karena promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masy. menyesuaikan kegiatan
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	75.675.000	51.387.500	67,91	100	Terlaksananya penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak	120	120	Orang	Terwujudnya pening -katan pengetahuan kesehatan ibu, bayi dan anak	120	120	Orang	Penyerapan anggaran tdk optimal karena promosi kesehatan ibu, bayi dan anak

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													melalui kelompok kegiatan di masyarakat
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	75.475.000	68.225.000	90,39	100	Terlaksananya kegiatan pada program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	3430	3430	SLTP SLTA	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	3430	3430	SLTP SLTA	Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan kegiatan yang diperlukan
Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	27.975.000	21.475.000	76,76	100	Terlaksananya pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (PIK Remaja/Mahasiswa	440	440	Kelompok p. Orang	Terbentuknya PIK tumbuh kembang dan tegak	440	440	Kelompok Orang	Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan kegiatan yang diperlukan
Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	47.500.000	46.750.000	98,42	100	Terlaksananya kegiatan sosialisasi Fasilitasi bagi kelompok remaja dan Kelompok sebaya diluar sekolah	180	180	Orang	Meningkatnya Pengetahuan Remaja terhadap TRIAD KRR	180	180	Orang	Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan kegiatan yang diperlukan
Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	60.500.000	55.325.000	91,45	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	1	1	Keg	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	1	1	keg	Penyerapan anggaran tdk optimal karena peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS menyesuaikan kebutuhan keg.

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS	60.500.000	55.325.000	91,45	100	Terlaksananya kegiatan penyuluhan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS	180	180	Orang	Tercapainya pemahaman masyarakat terhadap narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	180	180	Orang	Penyerapan anggaran tdk optimal karena peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS menyesuaikan kebutuhan kegiatan
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	89.625.000	77.206.000	86,14	96,50	Terlaksananya kegiatan pada program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1	1	Keg	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	1	1	Keg	Penyerapan anggaran tidak optimal karena pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak menyesuaikan kebutuhan kegiatan
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	89.625.000	77.206.000	86,14	96,50	Terlaksananya penyediaan informasi tumbuh kembang anak	60	60	Orang	Terwujudnya pembentukan BKB priputna	60	60	Orang	Penyerapan anggaran tdk optimal karena Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													kembang anak menyesuaikan keperluan kegiatan
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga	47.300.000	45.342.801	95,86	100	Terlaksananya kegiatan pada program penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga	1	1	Keg	Tercapainya sasaran kegiatan pada program penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina keluarga	1	1	Keg	Penyerapan anggaran tdk optimal karena penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga menyesuaikan keperluan kegiatan
Pelatihan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	47.300.000	45.342.801	95,86	100	Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping bina keluarga	120	120	Orang	Terpenuhinya Tenaga Pendamping Bina Keluarga	120	120	Orang	Penyerapan anggaran tdk optimal karena penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga menyesuaikan keperluan kegiatan
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu PADU	33.025.000	24.005.000	72,69	100	Terlaksananya pengembangan model operasional BKB-Posyandu PADU	1	1	Keg	Tercapainya pengembangan model operasional BKB-Posyandu PADU	1	1	Keg	Penyerapan anggaran tdk optimal pengembangan model operasional BKB-Posyandu PADU menyesuaikan keperluan kegiatan

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengkajian pengembangan model operasional BKB- Posyandu-PADU	33.025.000	24.005.000	72,69	100	Terlaksananya pembentukan model operasional BKB- Posyandu-PADU	50	50	Orang	Setiap Kecamatan terdepan 2 Kelompok Percontohan	50	50	Orang	Penyerapan anggaran tdk optimal pengembangan model operasional BKB-Posyandu PADU menyesuaikan keperluan kegiatan

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah :

1. Terbatasnya tenaga PKB dan keluarga Sejahtera dibandingkan dengan Wilayah Desa/Kelurahan Binaan.
2. Menurunnya komitmen dan dukungan berbagai pihak dalam mensukseskan pelaksanaan program KKB PK.
3. Peran serta dari kader dalam pengelolaan KB masih sebatas tingkat kelurahan/desa, sesuai dengan dukungan dana dari APBD yang masih sangat terbatas, sedangkan dana dari pusat sudah dihentikan sehingga menghambat program KKB PK.
4. Masih rendahnya pengetahuan remaja akan pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja.
5. Kurangnya advokasi dan promosi program KKB PK di Wilayah Desa / Kelurahan.
6. Meningkatnya kasus HIV dan AIDS di kalangan remaja dan ibu rumah tangga.
7. Meningkatnya kasus remaja (Kehamilan yang tidak diinginkan, HIV, dan AIDS, kekerasan dalam pacaran, Napza, Gizi remaja, Traficking, Aborsi tidak aman, Pernikahan dibawah umur dan remaja korban KDRT).
8. Jabatan fungsional teknis PKB/PLKB tidak memenuhi SPM 1 desa 2 PKB/PLKB untuk Kabupaten Kotawaringin Barat baru ada 27 orang PKB/PLKB untuk menangani 97 desa, sehingga kekurangan PKB/PLKB minimal 21 orang
9. Jangkauan pembinaan KB sangat luas sedangkan untuk kegiatan pelayanan tidak tersedia kendaraan khusus KB
10. Setiap tahun BPPKB selalu menerima dropping alat kesehatan, obat dan kontrasepsi dari APBN melalui BKKBN Propinsi, sedangkan tempat penyimpanan khusus tidak ada
11. PKB/PLKB tidak maksimal melaksanakan tugas pembinaan di wilayah desa binaan karena jangkauan desa yang jauh dan terpencar
12. PKBLKB, PPKBD, Klinik KB memerlukan pemantauan dan pembinaan berkala dari BPPKB
13. Kurangnya pembinaan terhadap PIK Remaja/Mahasiswa (PIK R/M)
14. Kurangnya promosi dan pembinaan BKB, BKR, BKL, BLK
15. Tidak terpantaunya dengan baik kegiatan UPPKS
16. Kobar belum melaksanakan Pencanangan Gerakan Sayang Ibu Nasional
17. Kurangnya Tenaga PKB di desa / kelurahan 1 (satu) PKB membawa 3 s/d 4 Desa/kelurahan.
18. Tenaga PPKBD sering berganti ganti

19. Register PUS di Desa/Kelurahan tidak terdata secara Optimal

Atas permasalahan tersebut solusi yang seharusnya dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menambah jumlah tenaga pelayanan KB agar dapat melayani seluruh desa yang ada di Kotawaringin Barat.
2. Membangun dan menguatkan kembali komitmen bersama dalam rangka untuk mensukseskan pelaksanaan program KKB PK melalui kegiatan yang bersifat konkrit seperti penguatan Kelompok Masyarakat Peduli KB.
3. Menambah anggaran APBD untuk Program KKB PK Wilayah Desa/Kelurahan.
4. Memberikan sosialisasi dan pemahaman berkelanjutan kepada remaja akan arti pentingnya Kesehatan Reproduksi
5. Publikasi program keluarga berencana melalui media cetak dan elektronik di Wilayah Desa/Kelurahan
6. Sosialisasi HIV dan AIDS lebih ditingkatkan
7. Peningkatan advokasi dan KIE KRR, pelatihan peer Group PIK KRR serta fasilitasi FKPKRR dan KDRT.
8. Pemberdayaan bidan desa sebagai tenaga lapangan program KB dengan menyediakan anggaran operasional
9. Pengadaan Mobil Pelayanan (MUYAN) mobil pengangkutan akseptor KB
10. Pembangunan gedung penyimpanan obat (ALOKON) KB
11. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional Roda 2 untuk PKB/PLKB
12. Pembinaan berkala terhadap PKB/PLB, PPKBD dan klinik KB, penilaian /lomba prestasi PKB/PLB, PPKBD dan klinik KB tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
13. Evaluasi PIK R/M yang sudah ada, pembentukan PIK R/M Baru, mengadakan lomba-lomba PIK R/M Unggulan tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional, Pemilihan Duta Mahasiswa Genre tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional , Sosialisasi Pendewaan Usia perkawinan
14. Pembinaan berkala dan evaluasi pengelola/pengurus BKB, BKR, BKL, BLK, kegiatan lomba bagi anggota-anggota dan lembaga BKB, BKR, BKL, dan BLK
15. Pembinaan berkala terhadap kelompok anggota UPPKS melalui pemantau keberlangsungan usaha, pembinaan pada pengelolaan keuangan usaha UPPKS pembentukan UPPKS baru dan penyediaan dana bergulir, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk keberlangsungan/pemasaran hasil usaha

16. Sosialisasi HIV/AIDS kepada remaja reproduksi dilingkungan sekolah tingkat SLTA dan Perguruan Tinggi
17. Berdasarkan SPM 1 (satu) Orang PKB membina 1 s/d 2 Desa /Kelurahan
18. Diharapkan tenaga BPKBD Desa/Kelurahan tidak sering berganti - ganti SDM nya dengan komitmen Lurah / Kepala Desa.
19. Data base Register PUS di Desa/Kelurahan harus tersedia secara lengkap.

4.1.16. URUSAN PERHUBUNGAN

a) Kondisi Umum

Sektor perhubungan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan, karena sektor perhubungan merupakan mata rantai tatanan transportasi nasional, regional dan lokal yang merupakan pendukung dan penggerak mobilitas orang, barang dan jasa dalam menunjang dinamika pembangunan perekonomian.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat serius dalam membangun sektor perhubungan. Pembangunan sektor perhubungan bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah, membuka keterisolan suatu wilayah dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan karakteristik wilayah yang dikelilingi oleh sungai, moda transportasi yang digunakan oleh masyarakat adalah transportasi angkutan darat dan angkutan sungai.

Sedangkan untuk menghubungkan antar pulau dilayani dengan transportasi laut dan udara. Mengingat Kotawaringin Barat merupakan daerah yang sedang berkembang maka semua moda transportasi tersebut sangat memungkinkan untuk dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Adapun beberapa indikator pembangunan dibidang perhubungan sampai tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.41
Jumlah Sistem JaringanTransportasi Tahun 2013 - 2014

No	Uraian	Capaian 2013	T a h u n 2014 (akumulasi)		
			Target	Realisasi	%
1	Jumlah Bandara (Buah)	1	1	1	100
2	Jumlah Pelabuhan Laut (Buah)	3	3	3	100
3	Terminal	4	4	4	100
4	Halte	11	12	12	100
5	Jaringan Trayek AKDP	3	3	3	100
6	Jaringan Trayek Perdesaaan	5	5	5	100
7	Dermaga LLASDP	16	17	17	100
8	Trayek LLASDP	3	4	4	100

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2014

Tabel 4.42
Jumlah sarana pendukung keselamatan lalu lintas

No	Uraian	Capaian 2013	Tahun 2014 (akumulasi)		
			Target	Realisasi	%
1	Rambu Lalu lintas darat	409	699	699	100
2	APILL	5	0	5	0
3	RPPJ	11	13	13	100
4	Traffic Cone	58	0	58	0
5	Paku Jalan	520	0	520	0
6	Tenda Portable	0	4	4	100
7	Rambu lalu lintas sungai	59	74	74	100
8	Baju Pelampung	0	166	166	100
9	Delinator	0	45	45	100
10	Warning Light	4	4	4	100

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Tabel 4.43
Jumlah Kendaraan Yang di Uji

No	Jenis Kendaraan	Capaian 2013	Tahun 2014		
			Target	Realisasi	%
1	Mobil Penumpang	114	90	90	100
2	Mobil Bus	225	212	212	100
3	Mobil Barang	6.009	5948	5948	100
4	Speed boat	34	34	34	100
5	Kelotok	61	61	61	100

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pergerakan pesawat mengalami kenaikan dari 6.518 pada tahun 2013 menjadi 6.922 pada tahun 2014. Artinya, pergerakan pesawat di Bandara Iskandar mengalami kenaikan sebesar 6,2% dari tahun 2013 ke tahun 2014, atau telah melebihi target yang ditentukan sebesar 5%. Untuk mengantisipasi peningkatan tersebut kedepan diperlukan upaya pengembangan bandara yang ada maupun upaya pembangunan bandara baru karena bandara yang ada dirasa tidak mampu untuk mengakomodir kebutuhan perkembangan angkutan penerbangan di masa mendatang.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung upaya tersebut adalah Program peningkatan pelayanan angkutan dan Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan melalui perpanjangan landasan pacu bandara Iskandar serta studi kelayakan bandara baru.

Jalan Khusus Industri

Sebagai salah satu daerah yang mempunyai hasil tambang yang melimpah serta hasil perusahaan perkebunan, harus mempunyai sarana transportasi yang representatif untuk mendukung distribusi hasil pertambangan dan perkebunan besar tersebut. Dilain pihak, kelancaran arus lalu lintas masyarakat lainnya dalam menggunakan jalan umum aktivitas sehari-hari juga tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertambangan dan perkebunan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan. Perda ini mengatur Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perkebunan di ruas jalan umum.

1. Kendaraan angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan dilarang melewati jalan umum dalam hal:

- a. Memiliki muatan sumbu terberat (MST) diatas 8 (delapan) ton;
 - b. Memiliki panjang lebih dari 9 (sembilan) meter, lebar 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi 3,5 (tiga koma lima) meter;
 - c. Konvoi kendaraan/angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan.
2. Hasil produksi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batu bara, bijih besi dan zirkon;
 3. Hasil produksi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, *Crude Palm Oil (CPO)*, *Palm Kernel Oil (PKO)*, *Slab* dan *Lumb*;
 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk kendaraan angkutan :
 - a. Hasil hutan;
 - b. Material bangunan;
 - c. Sembilan bahan pokok.

Panjang Jalan Khusus adalah 197,34 Km, yang terdiri dari :

1. Main Road Timur (Nanga Mua–Semanggang) dengan panjang 53,41 Km;
2. Main Road Barat (Rangda–Sei Rangit Jaya) dengan panjang 51,80 Km;
3. Ruas Semanggang–Pabrik Pulp dengan panjang ruas 18,80 Km;
4. Jalan penghubung main road timur dan barat yakni :
 - a. Ruas Semanggang – Sei rangit Jaya dengan panjang 25,90 Km;
 - b. Ruas Sei Rangit Jaya – Bumi Harjo dengan panjang 8,43 Km;
 - c. Ruas Jalan masuk dari Seruyan dengan panjang 39 Km.

Pembangunan Jalan Khusus yang telah dikerjakan oleh PT. Korintiga Hutani dengan rincian sebagai berikut :

1. Main Road Timur (Nanga Mua–Semanggang) sepanjang 28,44 Km;
2. Jalan di Area Konsesi HTI PT. Korintiga Hutani sepanjang 24,97 Km;
3. Ruas Semanggang – Pabrik Pulp sepanjang 18,80 Km;
4. Pembangunan 3 buah jembatan pada main road timur (Nanga Mua–Semanggang) dan Ruas Semanggang – Pabrik Pulp, yakni :
 - a. Jembatan Sungai Arut 40 meter;
 - b. Jembatan Sungai Jampau 15 meter;
 - c. Jembatan Sungai Hijau 15 meter.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.229.288.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.896.260.323,00 atau 94,65%. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan

Tabel 4.44
Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja		Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja		Target	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.055.536.400	982.650.221	93,09	91.24	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000	209.470	27,92	27,92	Terlaksananya penyediaan perangko, materai untuk mendukung pendistribusian surat menyurat dan pengiriman paket	925 30	925 30	Lbr paket	Terwujudnya kelancaran kegiatan surat menyurat dan pelayanan masyarakat yang optimal	100	100	%	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	56.700.000	33.469.557	59,02	82	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Dishub, Komunikasi dan Informatika	1	1	tahun	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Dishub, Komunikasi dan Informatika untuk menunjang terlaksananya tupoksi	100	100	%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	15.125.000	5.867.000	38,79	82	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2	7	7	unitu	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas operasional untuk mendukung	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					¼ Roda 4 ¼ Roda 6	4 1	4 1	nit unit	kelancaran dalam pelaksanaan tugas				
Penyediaan jasa administrasi keuangan	88.680.000	76.401.250	86,15	90	Terlaksananya pembayaran honor jasa administrasi keuangan di lingkungan Dishub, Komunikasi dan Informatika	1	1	tahun	Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan	100	100	%	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	99.152.350	89.257.850	90,02	100	Terlaksananya penyediaan tenaga jaga malam, petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	5 1	5 1	orang paket	Terwujudnya keamanan lingkungan kantor dan kebersihan ruang kantor yang memadai	100	100	%	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	26.500.000	12.313.045	46,46	82	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja yang memudahiberupa : ¼ PC Komputer ¼ Komputer Notebook ¼ Printer ¼ Pengadaan pesawat Telepon ¼ Pengadaan mesin Faximili ¼ Pengadaan SIM PKB	5 4 4 1 1 1	5 4 4 1 1 1	unit unit unit Unit unit Set	Tercapainya ketahanan dan optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Dishub, Komunikasi dan Informatika	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan alat tulis kantor	53.110.900	53.109.400	99,99	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	paket	Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran pelayanan masyarakat yang optimal	100	100	%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	173.810.250	173.492.750	99,81	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa blanko-blanko untuk keperluan kantor dan pelayanan masyarakat	1	1	paket	Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan pelayanan masyarakat yang optimal pada Dishub, Komunikasi dan Informatika	100	100	%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	9.688.000	9.267.000	95,65	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk mendukung aktivitas pelayanan dan penerangan gedung kantor	1	1	paket	Tercapainya kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok kantor pada Dishub, Komunikasi dan Informatika	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	247.199.900	244.900.000	99,06	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas	1	1	Paket	Terwujudnya peningkatanpelayan an administrasi perkantoran dan hasil kerja yang maksimal	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan peralatan rumah tangga	19.820.000	19.820.000	100	100	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga yang memadai	1	1	tahun	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas dan aktivitas kerja	90	90	%	
Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000	9.955.000	99,55	100	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat yang memadai	1	1	tahun	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas dan aktivitas kerja	90	90	%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	255.000.000	254.587.899	99,83	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	100	%	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	692.966.000	490.302.132	70,75	95	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	6	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	111.020.000	110.270.000	99,32	100	Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa : ¼ Bendera Merah putih ¼ Umbul-umbul ¼ Pengadaan Air Conditioner (AC) ¼ Pengadaan Kipas Angin	2 5 30 3 8	2 5 30 3 8	keg. buah buah Unit Unit	Terwujudnya peningkatan perlengkapan gedung kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					¼ Pengadaan mesin Generator Set kantor Dishubkominfo Kab. Ktw. Barat	1	1	Unit					
					¼ Pengadaan Gorden	1	1	Set					
Pengadaan Meubeleur	92.800.000	91.500.000	98,59	100	Terlaksananya penyediaan meubeleur untuk menunjang pelaksanaan kerja berupa : ¼ lemari arsip tiga pintu ¼ filling kabinet 4 laci ¼ Meja Kerja ¼ kursi Kerja ¼ Kursi Tamu/Sofa				Terpenuhinya fasilitas pendukung kantor dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	
						4	4	Bh					
						4	4	bh					
						15	15	bh					
						41	41	bh					
						1	1	Set					
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	87.176.000	86.876.000	99,65	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin : ¼ gedung kantor dinas ¼ gedung kantor terminal natai suka ¼ gedung kantor LLASDP ¼ gedung pengujian kendaraan bermotor				Terpenuhinya fungsi gedung kantor dengan baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja	100	100	%	
						200	200	m2					
						260	260	m2					
						113	113	m2					
						135	135	m2					
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	361.228.000	179.607.936	49,72	85	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi:				Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					¼ kendaraan dinas es II	1	1	Unit	kendaraan dinas operasional				
					¼ Kendaraan roda 6 (bus)	1	1	Unit					
					¼ Kendaraan operasional double gardan	1	1	Unit					
					¼ Kendaraan dinas operasional roda 4	2	2	Unit					
					¼ Kendaraan dinas roda 2	10	10	Unit					
					¼ Speed boat	2	2	Unit					
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	40.742.000	22.048.196	54,11	80	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa				Terpenuhinya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor dengan baik	100	80	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena Genset balai pengujian kendaraan bermotor dan Genset pelabuhan roro belum operasional.
					¼ Genset balai pengujian kendaraan bermotor	1	0	unit					
					¼ Genset pelabuhan roro	1	0	unit					
					¼ AC	6	6	unit					
					¼ Mesin potong rumput	4	4	unit					
Program peningkatan disiplin aparatur	62.000.000	57.000.000	91,93	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	31.000.000	28.500.000	91,93	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai yang memadahi	62	62	stel	Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	100	100
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	31.000.000	28.500.000	91,93	100	Tersedianya kebutuhan pakaian adat daerah	62	62	stel	Terwujudnya keseragaman dalam pelaksanaan tugas	100	100	100	100
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	60.000.000	53.281.000	88.80	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	60.000.000	53.281.000	88,80	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	1	1	tahun	Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku	100	100	%	
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	945.438.100	944.238.100	99,87	100	Terlaksananya kegiatan pada Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	100	50	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena Studi Master plan bandara baru ditunda pelaksanaannya pada th 2014
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	945.438.100	944.238.100	99,87	100	Terlaksananya Master Plan / Rencana Induk Bandar Udara Baru	1	1	paket	Terpenuhinya ketersediaan dokumen Master Plan / Rencana Induk	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Bandar Udara Baru				
Program peningkatan pelayanan angkutan	324.920.000	316.182.750	97,31	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pelayanan angkutan	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pelayanan angkutan	100	100	%	
Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	324.920.000	316.182.750	97,31	100	Terlaksananya sosialisasi dan penertiban lalu lintas jalan darat dan sungai	1	1	tahun	Terciptanya disiplin masyarakat dalam berlalulintas	100	100	%	
Program Pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan dan fasilitas LLAJ	81.205.000	80.650.500	99.31	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pelayanan angkutan	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pelayanan angkutan	100	100	%	
Pembangunan halte bus, Taxi, gedung terminal	81.205.000	80.650.500	99,31	100	Terlaksananya pembuatan halte	1	1	tahun	Terciptanya kenyamanan, keamanan dan ketertiban pengguna jasa angkutan umum	100	100	%	
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	2.055.897.500	2.032.046.120	98,83	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	100	100	%	
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	929.960.000	917.435.290	98,65	100	Terlaksanya pemasangan rambu-rambu jalan darat dan				Terciptanya keselamatan, keamanan dan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					sungai meliputi : ¼ Rambu LLAJ ¼ Pengadaan papan PERDA Perparkiran ¼ Pengadaan Tenda Portable ¼ Rambu LLASDP Terlaksananya pemeliharaan rambu jalan darat dan sungai	290 40 4 15 1	290 40 4 15 1	buah buah Buah buah Tahun	ketertiban serta kesadaran masyarakat pengguna jalan				
Pengadaan marka jalan	1.125.937.500	1.114.610.830	98,99	100	Terlaksananya - pengecatan marka jalan kabupaten (lebar 12 cm, ketebalan 2-3 mm). - Pengecatan Zebra Cross. - Pengecatan Marka Jalan Ruas Pasir Panjang - Kumpai Batu Atas - Pengecatan Marka Jalan Ruas Bundaran Pancasila - Pinang Merah - Pengecatan Marka Jalan Ruas Bundaran Pancasila - Simpang Palingkau - Pengecatan Marka Jalan Ruas Bundaran Pancasila - Pengecatan Zebra Cross.	5.700 215 1 1 1 1 1	5.700 215 1 1 1 1 1	m m2 Keg. Keg. Keg. Keg. Keg.	Terciptanya keselamatan, keamanan dan ketertiban pengguna jalan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	196.950.000	194.172.000	98,58	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	100	100	%	
Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	196.950.000	194.172.000	98,58	100	Terlaksananya peningkatan halaman dan landasan balai PKB	1	1	Keg.	Tercapainya optimalisasi pengujian kelaikan kendaraan bermotor	100	100	%	
Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLASDP	754.375.000	748.095.000	99,16	100	Terwujudnya penyediaan dermaga LLASDP yang lebih memadai	7	7	keg.	Terciptanya kenyamanan, keamanan dan ketertiban bagi pengguna jasa Dermaga LLASDP	100	100	%	
Pembangunan dermaga/ gedung kantor LLASDP	754.375.000	748.095.000	99,16	100	Belanja perencanaan penimbunan lahan terminal bongkar muat di pelabuhan RoRo	1	1	Keg	Terwujudnya kenyamanan bagi penyedia dan pengguna jasa angkutan	100	100	%	
					Belanja perencanaan pembangunan dermaga phonton di kecamatan Kumai	1	1	Keg					
					Belanja perencanaan penimbunan lokasi penyeberangan dalam	1	1	Keg					

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					kabupaten di sei Kapitan								
					Belanja baju pelampung untuk keselamatan penumpang lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan (LLASDP)	1	1	Keg					
					Pagar Dermaga LLASDP Kumai	1	1	Keg					
					Pemeliharaan Dermaga Induk Sei Sekonyer	1	1	Keg					
					Rehabilitasi Dermaga LLASDP Inderasari	1	1	Keg					

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan urusan perhubungan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana lalu lintas untuk mendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas;
- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya keselamatan, kelancaran, keamanan dan ketertiban berlalu lintas;
- 3) Terealisasinya pendapatan retribusi di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2014 sebesar Rp. 1.601.269.890.- atau 115,18 % dari target sebesar Rp. 1.390.116.000.-
- 4) Secara umum meningkatnya pelayanan kepada masyarakat pada sektor perhubungan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan pada urusan perhubungan yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Belum tersedianya Rencana Induk Pengembangan Perhubungan (RIPP) dan Rencana Detail Pengembangan Perhubungan (RDPP) sebagai dasar acuan pembangunan dan pengembangan bidang perhubungan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;
2. Terbatasnya infrastruktur pelayanan umum sektor perhubungan;
3. Setelah dilaksanakannya Study Kelayakan yang dilaksanakan tahun 2013 maka pada tahun 2014 percepatan pembangunan bandara baru terus dilaksanakan dengan Study Master plan / Rencana Induk sesuai peraturan perundangan yang mendasari pembangunan bandara baru, antara lain :
 - a. UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - b. PP Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
 - c. Permenhub Nomor KM.11 Tahun 2010 tentang Tata n Kebandarudaraan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
 - e. Keputusan Dirjen Perhubungan Nomor SKEP.120/VI/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Rencana Induk Bandar Udara;
 - f. SE Dirjen Perhubungan Udara Nomor SE.09/XI/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Bandar Udara.

Sehingga dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas ada beberapa tahapan yang wajib dilalui dalam pembangunan Bandar Udara Baru, yaitu :

- a. Studi Kelayakan : untuk memperoleh tingkat kelayakan;
- b. Studi Master Plan (Rencana Induk) Bandar Udara : sebagai dasar penetapan lokasi oleh Menteri Perhubungan;

- c. Studi Rencana Teknik Terinci (RTT) : sebagai rancangan teknik terinci fasilitas pokok bandara;
- d. Studi AMDAL : kelestarian lingkungan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah :

1. Mengusulkan pembuatan/penyusunan Rencana Induk Pengembangan Perhubungan (RIPP) dan Rencana Detail Pengembangan Perhubungan (RDPP) sebagai dasar acuan pembangunan dan pengembangan bidang perhubungan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;
2. Mengajukan usulan-usulan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan skala prioritas;
3. Tahapan pembangunan bandara baru akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.1.17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a) Kondisi Umum

Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, telah dituangkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (*e-government*). Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Selanjutnya, dengan konsep *e-gov* tersebut, peran dan keterlibatan masyarakat dalam berinteraksi melalui jaringan elektronik akan lebih terberdayakan. Masyarakat dapat ikut terlibat dan berperan aktif mendukung dan memberikan partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, informasi dan layanan kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan. Kepemilikan dan akses terhadap media informasi dapat menjadi indikator tingkat kesejahteraan seseorang.

Dalam era globalisasi saat ini, berbagai informasi dapat diakses melalui semua media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Namun perangkat komputer dan situs internet masih belum populer di kalangan masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan masih kecilnya persentase rumah tangga yang menguasai komputer dan penduduk yang mengakses internet. Di Kabupaten Kotawaringin Barat, persentase penduduk yang mengakses internet masih

sangat rendah yaitu hanya 11,23 persen, sementara yang tidak mengakses internet sebesar 88,77 persen.

Tabel 4.45
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2013-2014

No	Indikator	satuan	2013	2014		
				Target	Realisasi	Real. (%)
1.	Ketersediaan web site pemerintah daerah					
2.	Ketersediaan informasi daerah dalam bentuk digital	Keping CD,	) 100 cd kegiatan) 350 CD kilas kobar) 350 cd majalah digital	) 100 CD Kegiatan) 350 CD Kilas Kobar) 350 CD majalah digital	) 82 CD Kegiatan) 350 CD Kilas Kobar) 350 CD majalah digital	98%
3.	Ketersediaan bulletin, buku dan poster pemerintah daerah, foto, span duk, baliho	Eksemplar, buku, lembar	) 50 album foto kegiatan) 150 Buku Himpunan Pidato Bupati) 400 Kalender Meja) 350 buletin) 350 warta bergambar) 350 photo bupati/wakil) 10 photo mantann bupati) 100 lembar spanduk) 240 m2 baleho) 13 media langganan koran	) 50 album foto kegiatan) 100 Buku Himpunan Pidato Bupati) 400 Buletin) 400 Buku sejarah Kerajaan dan kab. Ktw.barat) 400 Buku Profil Kota P.bun) 400 Kalender Meja) 400 Kalender dinding) 280 m2 baleho kegiatan) 140 lembar spanduk kegiatan) 830 Photo Bupati/wakil) 3 edisi (6000 expl) warta ktw. Barat) 100 buah baleho desa	) 15 album foto kegiatan) 100 Buku Himpunan Pidato Bupati) 400 buletin) 400 Buku sejarah Kerajaan dan kab. Ktw.barat) 400 Buku Profil Kota P.bun) 400 Kalender Meja) 400 Kalender dinding) 276 m2 baleho kegiatan) 125 lembar spanduk kegiatan) 830 Photo Bupati/Wakil) -) -	80%
4.	Terselenggaranya pameran/ekspo	kali	-	1 kali	1 kali	100%
5.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	media	6 Media	6 media	6 media	100%
6.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Media	5 Media (2 Radio lokal, radio RRI, SBTN dan TVRI)	5 media	5 media	100%
7.	Jumlah Pemberitaan melalui media cetak	media	5 media	5 media	5 media	100%

Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Kotawaringin Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang dalam hal ini ditangani oleh Bagian Humas dan Bagian Komunikasi dan PDE dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.140.957.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.702.575.375,00 atau 86,04 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.46
Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RETARIAT DAERAH													
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	207.667.500	163.193.799	79	79	Terlaksananya kegiatan pada Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	100	100	%	
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	207.667.500	163.193.799	79	79	Terlaksananya penyediaan tenaga dan sarana komunikasi informasi yang handal untuk keperluan Pemerintah daerah	1	1	tahun	Terwujudnya peningkatan kualitas SDM dan sumber daya komunikasi data dan informasi	100	75	%	Perjalanan dinas dalam daerah tidak digunakan, belanja makanan dan minuman (ekstrafooding) pada bulan puasa tidak digunakan, Honnor pembuatan website tidak dicairkan, Dana Pemeliharaan LPSE hanya digunakan sebagian

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program kerjasama informasi dan media massa	2.933.290.000	2.533.403.800	86	89	Terlaksananya kegiatan pada Program kerjasama informasi dan media massa	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program kerjasama informasi dan media massa	95	95	%	
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	781.080.000	548.019.800	70%	76%	Tersedianya dokumentasi kegiatan Pemkab. Kotawaringin Barat dalam bentuk : √ Foto √ Bulletin marunting batu aji √ Kalender duduk √ Kalender Dinding √ Himpunan pidato bupati √ Buku Profil Kota P.Bun √ Buku Sejarah Kerajaan dan Kab. Ktw. Barat √ VCD kilas kobar 2014 √ VCD kegiatan pemkab. √ Majalah Digital √ Spanduk	50 400 400 400 400 100 400 350 100 350 120	50 400 400 400 400 100 400 350 100 350 120	album Eksp. Eksp. Eksp. Eksp. Buku Eksp. CD CD CD Lbr	Terlaksananya publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	100	86	%	Jumlah Dokumentasi Foto mengikuti jumlah kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Perjalanan Dinas Dalam Daerah digunakan 70% , penambahan anggaran untuk distribusi barang tidak digunakan . Pengadaan Baleho desa dan Warta Ktw.barat tidak dapat

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					√ Baliho √ Photo pigura bupati dan wakil √ Pameran Photo √ Baleho desa √ Warta Kotawaringin Barat	280 830 1 100 6000	280 830 1 - -	buah buah kali buah Eksp.					dilaksanakan diakhir tahun anggaran
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	2.152.210.000	1.985.384.000	92,25	98	Terselenggaranya penyebaran informasi melalui : √ Langganan koran dan majalah √ Publikasi keliling √ Talk show di radio √ Talk Show di TV √ Kontrak Media cetak dan elektronik	6 50 68 17 10	6 47 124 17 10	media kali kali kali media	Terwujudnya penyebaran informasi tentang pembangunan daerah kepada masyarakat luas	100	98	%	

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut di atas dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Komunikasi Dan Informatika sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya peliputan & dokumentasi dalam bentuk DVD Video kegiatan, Majalah Digital, Buletin Marunting Batu Aji, Kalender Dinding, Profil Kota Pangkalan Bun, Buku Sekilas Kerajaan Kotawaringin Barat dan Spanduk serta Baleho sehingga pemerintah daerah memiliki arsip & data tentang kegiatan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 2) Tersedianya sarana penyebaran informasi melalui media elektronik (siaran di radio dan televisi) dan media cetak sehingga informasi tentang pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat sampai ke semua lapisan masyarakat;
- 3) Tersedianya sistem informasi berbasis *website*, dengan adanya sistem informasi berbasis *website* ini maka informasi tentang Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diakses melalui internet secara *on-line*;
- 4) Pengembangan Web Kabupaten Kotawaringin Barat disesuaikan dengan kondisi kebutuhan pemerintah daerah seperti :
 -) Tersedianya Konten ULP untuk mengumumkan Pelelangan dan Pemenangnya;
 -) Tersedianya Konten Arsip PERDA/Peraturan Daerah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi peraturan daerah;
 -) Tersedianya Konten Artikel, Berita dan Forum Komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terkait dengan urusan Komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung *E-government*;
2. Kurangnya koordinasi antara unit penyedia data fungsional dengan pusat data;
3. Belum terbangunnya aplikasi program yang strategis dan terintegrasi;
4. Belum tersedia Master Plan Sistem Teknologi Informasi untuk Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk merencanakan, membangun, dan mengembangkan teknologi informasi kedepan;
5. Kurangnya dukungan unit penyedia data dari masing-masing satker dengan pusat data;
6. Terbatasnya SDM IT yang tersedia.
7. Terbatasnya sumber daya aparatur teknis dibidang kehumasan.

8. Belum maksimalnya peran aktif dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyampaikan data dan informasi kegiatan untuk disebarluaskan.

Atas dasar permasalahan tersebut maka solusi yang seharusnya dilakukan adalah :

1. Membangun sarana dan prasarana dalam upaya mendukung *E-government*;
2. Meningkatkan koordinasi antara unit penyedia data dengan pengelola pusat data atau server;
3. Membangun aplikasi program yang strategis dan terintegrasi dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Menyiapkan Master Plan Sistem Teknologi Informasi;
5. Membangun aplikasi program yang strategis dan terintegrasi dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Penambahan serta peningkatan kemampuan dan keahlian SDM yang menguasai IT.
7. Penambahan dan peningkatan keahlian SDM di bidang Kehumasan.
8. Peningkatan koordinasi dan hubungan antar lembaga /instansi/unit satuan kerja dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

4.118. URUSAN PERTANAHAN

a) Kondisi Umum

Urusan pertanahan di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi salah satu pelaksanaan urusan yang penting, mengingat urusan pertanahan merupakan urusan yang sangat sensitif yang apabila tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya akan menimbulkan gejolak ditengah masyarakat. Pelaksanaan urusan pertanahan bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan dan meningkatkan penataan pertanahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak memiliki kewenangan dibidang pertanahan karena semua kewenangan di bidang pertanahan menjadi urusan Badan Pertanahan Nasional yang merupakan instansi vertikal yang menjalankan tugas pemerintah di bidang pertanahan baik di pusat maupun di daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah adalah melakukan fasilitasi terhadap permasalahan-permasalahan pertanahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya melakukan koordinasi dengan badan Pertanahan Nasional guna untuk kepentingan pembangunan daerah.

Tabel 4.47
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2013-2014

No.	Indikator	satuan	2013	2014		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Luas tanah bersertifikat	Ha	-	1.075.900	278.432	25,89 %
2.	Luas tanah yang belum bersertifikat	Ha	-	797.468	797.468	-
3.	Jumlah bidang tanah bersertifikat	bidang	404	60	25	42 %
4.	Jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat	bidang	365	0	0	0
5.	Jumlah aset tanah dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten	bidang	769	-	-	-
6.	Jumlah asset tanah dalam penguasaan Pemkab yang sudah bersertifikat	bidang	429	-	-	-
7.	Jumlah asset tanah Pemerintah Kabupaten dengan status hak pakai/ hak guna bangunan kepada pihak ke tiga	bidang	0	-	-	-
8.	Jumlah Ijin lokasi yang telah dikeluarkan untuk pengelolaan tanah kas desa	Ijin	-	-	-	-
9.	Konflik pertanahan yang terjadi	kasus	4	3	3	100
10.	Konflik pertanahan yang terselesaikan	kasus	4	3	3	100

Sumber : Bagian Adm. Pemerintahan dan Perlengkapan Setda

Pelaksanaan urusan pertanahan tahun 2014 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu kenaikan luas lahan bersertifikat.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang dalam hal ini ditangani oleh Bagian Perlengkapan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.899.817.532,00 dengan realisasi sebesar Rp. 95.960.007,00 atau 3,30%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pertanahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.48
Program/Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2014

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Penataan Penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.899.817.532	87.560.007,-	3,02	3,02	Terlaksananya kegiatan pada Program Penataan Penguasaan. pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Penataan Penguasaan. pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah	100		%	
	Penataan Penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.899.817.532	87.560.007,-	3,02	3,02	Terlaksananya penyediaan : J Tanah untuk keperluan pemkab. Kobar J Sertifikat	1 60	 25	Lokasi Persil	Terpenuhinya sarana pertanahan untuk menunjang pembangunan daerah	80		%	Meningkatnya pengamanan aset tanah pemda dengan telah selesainya Sertifikat Hak Pakai Tanah atas nama Pemerintah Daerah

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan urusan pertanahan yang perlu mendapat penanganan segera adalah :

1. Sistem administrasi pertanahan yang belum efektif dan efisien;
2. Belum seluruh tanah asset pemda memiliki sertifikat;
3. Belum lengkapnya data-data asset pertanahan pemerintah daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan;
2. Meningkatkan pengamanan aset tanah pemda dengan sertifikasi dan pemasangan plang kepemilikan;
3. Menginventarisir kembali data-data aset tanah pemda yang ada dalam penguasaan masing-masing SKPD;
4. Meningkatkan pemahaman tentang peraturan sistem pelaksanaan pengadaan tanah.

4.1.19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**a) Kondisi Umum**

Kesatuan bangsa memiliki arti adanya rasa kebersamaan di dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kondisi politik dalam negeri dipengaruhi oleh adanya kemajemukan masyarakat, mulai dari suku bangsa, agama, bahasa daerah, dan juga golongan. Kemajemukan masyarakat merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa, tetapi dapat juga menjadi ancaman atau potensi penyebab konflik apabila tidak dikelola dengan baik.

Begitu juga dengan Kabupaten Kotawaringin Barat yang notabene memiliki heteroginitas masyarakat yang tinggi, apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi potensi konflik yang berbasis SARA. Pada tahun 2014, di Kabupaten Kotawaringin Barat masih terjadi unjuk rasa di beberapa tempat. Unjuk rasa yang terjadi terdiri atas permasalahan sosial ekonomi dan konflik pertanahan.

Meskipun demikian, unjuk rasa berjalan dengan relatif tertib dan damai. Aksi unjuk rasa biasanya dilakukan terjadi di depan kantor Bupati dan kantor DPRD. Penanganan unjuk rasa dilakukan secara persuasif dan sinergis antara Satpol PP, Polri, TNI dan Satuan Keamanan Masyarakat. Dengan demikian, potensi gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum tersebut dapat diminimalisir.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kerukunan masyarakat dan menjalin komunikasi antar elemen masyarakat di Kotawaringin Barat. Usaha itu di antaranya adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Dialog Antar-Umat Beragama/ Forum Umat Beriman, serta Dialog Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga melakukan program pendidikan politik masyarakat, yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas/Orpol dan pemerintah di daerah, Pembinaan dan Optimalisasi Fungsi dan Peran Ormas dan LSM, Forum Diskusi Politik dalam Pengembangan Pendidikan Perempuan, serta Sosialisasi Undang-Undang Parpol bagi Partai Politik peserta Pemilu 2014.

Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik dilakukan agar terwujudnya kerjasama yang baik dan persatuan antar Parpol, LSM dan Ormas. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara rutin dan penyampaian sosialisai peraturan yang baru terkait Parpol, LSM dan Ormas seperti penyaluran Bantuan Keuangan untuk Parpol, Pemberian Dana Hibah untuk LSM dan Ormas.

Tabel 4.49
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri Tahun 2013 – 2014

No.	Uraian	satuan	Capaian 2013	2014		%
				Target	Realisasi	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
1.	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	kegiatan	4	4	4	100
2.	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	kegiatan	7	7	7	100
3.	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM,ORMAS dan OKP	kegiatan	2	2	1	50
4.	Jumlah kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian potensi linmas dan hak-hak sipil	kegiatan	-	3	3	100

Sumber : Badan Kesbangpolinmas & Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat

Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dengan pendekatan preventif, persuasif dan represif. Proses penegakan peraturan daerah dilakukan melalui sosialisasi peraturan kepada masyarakat, pemantauan apakah masyarakat sudah memahami peraturan yang disosialisasikan.

Kemudian, untuk masyarakat yang melanggar, dilakukan operasi non-yustisi dengan pembinaan dan teguran disertai berita acara dan pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran. Selanjutnya, perlakuan terhadap pelanggar ditingkatkan menjadi operasi yustisi, yaitu pelanggar diproses secara hukum.

Tabel 4.50
Pelanggaran Perda di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2013 – 2014

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran (kali)		+ / (-)	Keterangan
		Tahun 2013	Tahun 2014		
1.	2.	4.			6.
1.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	1	3	2	
2.	Minuman Keras (Miras)	20	50	30	
3.	WTS liar/prostitusi	57	20	-37	
4.	Gelandangan dan Pengemis (GEPENG)	4	6	2	
5.	Premanisme	2	0	- 2	
	Jumlah	88	79	-9	BAP : 20 Perkara, SP : 50 Perkara, Sidang : 1 Perkara

Sumber : PPNS Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) , Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretariat Daerah dengan Pagu Anggaran anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7.846.303.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.287.306.471,00 atau 92,87%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.51
Program/ Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kesbangpolinmas													
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	13	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	93,96	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	100	100	Terlaksananya pengiriman paket kedinasan	12	12	bulan	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	
Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik	72.600.000	58.638.138	80,77	80,77	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar	12	12	bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar	100	80,77	%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	3.450.000	1.658.200	48,06	48,06	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	11 1	7 1	unit unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas	100	48,06	%	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	97.249.000	92.761.000	95,39	95,39	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan dan sopir	12	12	bulan	Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan dan keamanan di lingkungan kantor	100	95,39	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
penyediaan jasa kebersihan kantor	37.393.000	34.985.500	93,56	93,56	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	2 1	2 1	orang paket	Terwujudnya kebersihan ruangan dan lingkungan kantor	100	93,56	%	
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.990.000	12.990.000	100	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa : ¼ Printer ¼ Komputer notebook ¼ Komputer PC	8 4 9	8 4 9	unit unit unit	Tercapainya kelancaran dan optimalisasi pemakaian peralatan kerja	100	100	%	
penyediaan alat tulis kantor	50.429.400	50.248.600	99,64	99,64	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	Tahun	Tercapainya kelancaran dalam pelaksanaan tupoksi	100	99,64	%	
penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.827.300	17.827.300	100	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang kegiatan rutin kantor	1	1	Tahun	Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya	100	100	%	
penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3.367.500	3.367.500	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik	5	5	jenis	Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	76.275.000	74.451.875	97,61	97,61	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ¼ flashdisk ¼ senter ¼ mesin tik ¼ komputer/PC ¼ notebook/laptop ¼ printer ¼ UPS/stabilizer ¼ Hardisk eksternal ¼ Mikotik/router fullset	3 1 2 3 2 5 4 2 1	3 1 2 3 2 5 4 2 1	bh bh unit unit unit unit unit bh bh	Terwujudnya peningkatan fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok	100	97,61	%	
penyediaan peralatan rumah tangga	5.462.000	5.462.000	100	100	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga untuk menunjang kelancaran kerja	1	1	Tahun	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	100	100	%	
penyediaan makanan dan minuman	7.392.000	6.482.000	87,69	87,69	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL	4	4	orang	Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas kantor	100	87,69	%	
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	174.368.450	166.166.491	95,30	95,30	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	95,30	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7	7	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	85,67	%	
Pembangunan gedung kantor	5.000.000	4.495.875	89,92	89,92	Terlaksananya penambahan sekat ruangan dan pengurusan ijin mendirikan bangunan	2	2	paket	Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana gedung kantor	100	89,92	%	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12.260.000	9.900.000	80,75	80,75	Terlaksananya pembelian umbul-umbul	20	20	buah	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	100	80,75	%	
Pengadaan peralatan gedung kantor	12.000.000	11.205.750	93,38	93,38	Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor berupa AC	3	3	unit	Terwujudnya peningkatan fasilitas gedung kantor	100	93,38	%	
Pengadaan mebeleuer	47.900.000	38.720.000	80,84	80,84	Terlaksananya penyediaan mebeleuer berupa : - Pengadaan almari - Kursi kerja	6 3	6 3	buah buah	Terpenuhinya peralatan geudng kantor	100	80,84	%	
Peremeliharaan rutin/ perbaikan gedung kantor	2.500.000	2.500.000	100	100	Terlaksananya pembelian gedung kantor berupa kunci tanam pintu kuningan	10	10	buah	Terwujudnya kenyamanan dan keindahan gedung kantor dengan baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	164.707.000	141.738.700	86,06	86,06	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	11 1	11 1	unit unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	86,06	%	
pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.550.000	5.550.000	100	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa: ¼ AC split ¼ Mesin potong rumput	10 1	10 1	unit unit	Terpenuhinya fungsi peralatan gedung kantor dengan baik	100	100	%	
Program peningkatan disiplin aparatur					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	99,86	%	
pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	20.000.000	19.998.000	99,86	99,86	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai	40	40	stel	Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	99,86	%	
pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	16.000.000	15.950.000	99,69	99,69	Tersedianya kebutuhan pakaian hari-hari tertentu	40	40	stel	Terwujudnya disiplin aparatur	100	99,69	%	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	75,67	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	64.000.000	48.429.960	75,67	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	8	8	orang	Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku	100	75,67	%	Tidak semua kegiatan Bimtek menggunakan anggaran kontribusi
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	96,56	%	
penyusunan laporan keuangan semesteran	1.000.000	957.000	95,70	95,70	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	5	5	buku	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran	100	95,70	%	
penyusunan Laporan keuangan Semesteran	500.000	500.000	100	100	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	10	10	buku	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran	100	100	%	
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000	957.000	95,70	95,70	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10	10	buku	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	95,70	%	
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100	98,25	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.229.698.000	1.205.815.400	98,06	98,06	Terlaksananya pendataan satuan anggota linmas dan penyediaan pakaian linmas beserta perlengkapannya	1.226	1.226	org	Terwujudnya ketersediaan data anggota linmas yang memadahi dan terpenuhinya kebutuhan pakaian anggota linmas se-Kotawaringin Barat	100	98,06	%	
pembangunan pos jaga ronda	444.620.500	439.233.000	98,79	98,79	Terlaksananya pembangunan pos jaga hansip dengan lokasi: ¼ Desa sungai kapitan ¼ Desa kumai hilir ¼ Desa sungai Dau ¼ Kelurahan baru ¼ Desa pasir panjang ¼ Kel. Mendawai Seberang ¼ Desa sumber agung	16 16 32 16 16 16 16	16 16 32 16 16 16 16	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	Terpeliharanya keamanan lingkungan melalui penyediaan pos jaga ronda yang memadahi dan representatif	100	98,79	%	
Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					Terlaksananya kegiatan pada Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100	98,34	%	
peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	1.702.198.100	1.673.965.000	98,34	98,34	Terlaksananya kerjasama operasional dibidang pemeliharaan keamanan	1	1	tahun	Terciptanya kondisi daerah yang aman dan kondusif	100	98,34	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program pengembangan wawasan kebangsaan					Terlaksananya kegiatan pada Program pengembangan wawasan kebangsaan	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan wawasan kebangsaan	100	54,50	%	
meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	325.000.000	134.460.900	41,37	41,37	Terlaksananya pertemuan forum pembauran kebangsaan	220	220	orang	Terbinanya keharmonisan antar etnis	100	41,37	%	Untuk kegiatan pertemuan antar Dewan Adat Dayak (DAD) Tidak sepenuhnya terealisasi karena situasi & kondisi di Kab.Ktw.barat dianggap kondusif
meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	98.150.000	96.150.000	97,96	97,96	Terlaksananya kegiatan ikrar bersama anak bangsa	80	80	orang	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	100	97,96	%	
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan					Terlaksananya kegiatan pada Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	100	95,93	%	
fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya	189.200.000	188.449.900	99,60	99,60	Terlaksananya kegiatan forum-forum keagamaan	180	180	org	Terwujudnya rasa saling menjaga satu sama lain, menjaga hubungan persamaan	100	99,60	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
peningkatan wawasan kebangsaan									hak, serta menjaga kerukunan umat beragama				
Seminar, Talk Show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	104.460.000	93.260.000	89,28	89,28	Terlaksananya desiminasi surat bersama tiga menteri No. 3 tahun 2008, No. Kep – 033/A/JA/6/2008 dan No. 199 tahun 2008	200	200	Org.	Terwujudnya peningkatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	100	89,28	%	
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)					Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	100	67,28	%	
penyuluhan pencegahan peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	313.484.000	223.490.600	71,29	71,29	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba serta terlaksananya kegiatan penyuluhan penyelidikan/penyidikan dan razia oleh BNNK Kobar	400	400	orang	Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan P4GN dalam rangka mewujudkan Ktw.Barat bebas dari narkoba	100	71,29	%	
penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	46.988.000	19.030.000	40,50	40,50	Terlaksananya pengawasan dan penertiban penyakit masyarakat	100	100	orang	Tercapainya penurunan tingkat praktek prostitusi di wilayah Kab. Ktw. Barat	100	40.50	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pendidikan Politik Masyarakat					Terlaksananya kegiatan pada Program Pendidikan Politik Masya rakat	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pendidikan Politik Masya rakat	100	99,78	%	
Penyuluhan kepada masyarakat	76.250.000	76.185.000	99,91	99,91	Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat tentang pendidikan politik	70	70	orang	Terwujudnya peningkatan pengetahuan politik masyarakat	100	99,91	%	
Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	22.153.750	22.003.750	99,32	99,32	Terwujudnya persatuan antar parpol ormas/LSM dan Generasi muda	12 70	12 70	Parpol Ormas/LSM	Terjalinya kerjasama yang baik antar Parpol Ormas dan LSM	100	99,32	%	
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam					Terlaksananya kegiatan pada Pencegahan Dini dan Penanggula ngan Korban Bencana Alam	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Pencegahan Dini dan Penanggula ngan Korban Bencana Alam	100	48,15	%	
Pemantauan & Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	71.324.000	62.310.000	87,36	87,36	Terlaksananya upaya penyampaian informasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan pedoman dan pengarah an terhadap usaha penanggulangan bencana	100	100	orang	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana secara terpadu terutama dalam upaya pencegahannya	100	87,36	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
POL PAMONG AJA	2.258.221.000	2.178.379.532	96,46	98,50									
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	488.463.500	460.669.336	91,77	93,40	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	13	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	91,77	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0,00	0,00	0,00	Terlaksananya pengiriman paket kedinasan	40	0	paket	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100	0,00	%	tidak dapat terealisasi karena menyesuaikan dengan kebutuhan jasa pengiriman surat/berkas
Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik	31.260.000	17.984.736	57,53	57,53	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar	12	11	bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar untuk kelancaran operasional kantor	100	63,09	%	Karena pembayaran belanja air ub. Desember 2014 di bayarkan pada bulan januari 2015
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.710.000	4.289.700	63,93	64,49	Terbayarnya belanja STNK kendaraan dinas dan opsional kntor meliputi : - STNK Mobi Dinas - STNK sepeda motor patroli	3 3	3 3	Unit Unit	Tersediannya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kantor Satpol PP	100	100	%	pagu anggaran dinaikan karena diperkirakan naiknya tarif pembayaran pajak STNK

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					- STNK motor dinas	2	2	unit					
Penyediaan jasa administrasi keuangan	62.686.000	59.703.000	94,97	95,00	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta uang lembur	12	12	bulan	Terlaksananya administrasi keuangan	100	94,97	%	Secara fisik kegiatan ini sudah terlaksana
Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.209.500	18.903.000	93,54	98,34	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	1	1	orang	Terwujudnya kebersihan ruangan dan lingkungan kantor	90	93,54	%	Menyesuaiakan dengan kebutuhan yang ada
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.500.000	9.500.000	100	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa : ¼ Jasa perbaikan note book ¼ Jas perbaikan printer ¼ Jasa perbaikan komputer	6 7 8	6 7 8	Unit Unit unit	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja	100	100	%	
Penyediaan alat tulis kantor	31.320.100	31.212.000	99,65	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	paket	Tersedianya Alat Tulis Kantor	95	99,65	%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.190.000	12.190.000	100	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan	12	12	bulan	Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					penggandaan untuk menunjang kegiatan rutin kantor				tugas lainnya				
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	10.040.000	10.040.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik berupa : ¼ Senter charger ¼ Lampu LED ¼ Battery ¼ Lampu bolam	30 24 20 30	30 24 20 30	pcs pcs pcs buah	Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	124.044.600	122.655.900	98,88	100	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kntor berupa : ¼ umbul – umbul ¼ belanja spray gas air mata ¼ flash disk ¼ kalkulator ¼ lemari arsip ¼ komputer PC ¼ laptop ¼ printer ¼ printer scan ¼ UPS ¼ Kursi kerja eselon IV	10 100 6 7 2 3 1 6 1 6 6	10 100 6 7 2 3 1 6 1 6 6	Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok	100	98,88	%	Secara fisik kegiatan ini sudah terlaksana
Penyedian Peralatan Rumah Tangga	6.968.000	6.900.000	99,02	100	Tersedianya audiovisual sebagai sarana untuk	1	1	Unit	Tersedianya peralatan rumah tangga	100	99,02	%	Pada waktu pembelian ternyata harga

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					menambah wawasan serta informasi bagi anggota Satpol PP								yang dimaksud lebih murah dari harga penawaran awal.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1.000.000	1.000.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	5	5	buku	Terwujudnya peningkatan informasi dan etos kerja pegawai di lingkungan Satpol PP	100	100	%	
Penyediaan makanan dan minuman	113.163.000	110.641.000	97,77	99,59	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian anggota BANPOL dan snack rapat	42	42	orang	Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	99,59	%	Menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan dikarenakan ada 1 anggota BANPOL di pecat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	58.189.900	55.650.000	74,33	80,77	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	99,76	%	Menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	292.509.000	272.040.000	93,00	94,54	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	94,54	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan peralatan gedung kantor	13.195.000	13.050.000	98,90	100	Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor berupa : - Kipas angin - Air Conditioner (AC)	2 3	2 3	Unit Unit	Terciptanya suasana kantor yang nyaman	100	98,90	%	Terjadi penghematan biaya
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	279.314.000	258.990.000	92,72	94,54	Terlaksananya service ,penyediaan BBM kendaraan dinas operasional dan penggantian suku cadang	10	10	unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	85	92,72	%	Penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan yang digunakan oleh Satpol PP
Program peningkatan disiplin aparatur	246.794.000	258.990.000	92,72	94,28	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	92,72	%	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	246.794.000	258.990.000	92,72	94,28	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai : - PDL beserta atributnya - PDH beserta atributnya - PATAKA beserta atributnya	99 99 12	99 99 12	Org Org Org	Terwujudnya keseragaman, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	92,72	%	Penyerapan anggaran menyesuaikan dengan harga penawaran. Realisasi tersebut sudah termasuk biaya tender
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	103.450.000	96.849.150	93,62	93,62	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	81,62	95,32	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	103.450.000	96.849.150	93,62	93,62	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	11	11	orang	Terwujudnya peningkatan kemampuan dan pemahaman aparatur terhadap tupoksi	85	93,62	%	Menyesuaikan dengan kebutuhan Bimtek yang memang diperlukan oleh Satpol PP
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.077.000	861.000	79,94	79,94	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	79,94	%	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja SKPD	395.000	287.000	72,66	72,66	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	1	1	Lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran	100	72,66	%	Hal ini dikarenakan uang lembur gol III sebanyak 1 org tidak bisa direalisasikan, sebab uang lembur yg dimaksud sudah masuk dalam uang lembur administrasi keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	287.000	287.000	100	100	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2	2	lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	395.000	287.000	72,66	72,66	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2	2	Lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	72,66	%	Hal ini dikarenakan pada uang lembur gol III sebanyak 1 (satu) org tidak bisa direalisasikan, sebab uang lembur yg dimaksud sudah masuk dalam uang lembur administrasi keuangan.
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.058.000	6.300.000	89,26	98,00	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100	89,26	%	
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	44.270.000	40.210.000	90,83	90,83	Terlaksananya pembentukan Kelompok Masyarakat sadar lingkungan di wilayah Kab. Ktw. Barat	6	6	Kec.	Terwujudnya kondusifitas masyarakat dari gangguan kebisingan	100	90,83	%	Karena dalam belanja BBM/Gas menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	957.378.500	945.828.746	98,79	99,68	Terlaksananya kegiatan pada Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100	91,80	%	
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP	865.937.500	854.828.746	98,77	99,73	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	43	42	Org	Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	100	98,77	%	honorarium non PNS dibayarkan sesuai dengan jumlah kehadiran dan ada pengurangan 1 anggota sehingga tidak habis terserap
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan	72.600.000	72.600.000	100	100	Terlaksananya pelatihan anggota Satpol PP	100	100	orang	Tercapainya penguasaan teknik-teknik pencegahan kejahatan oleh anggota Satpol PP	100	100	%	
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Pol PP dengan TNI/ Polri dan Kejaksaan	19.340.000	18.400.000	95,14	96,38	Terlaksananya kerjasama antara anggota Satpol PP bersama instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tupoksi	101	101	org	Tercapainya peningkatan disiplin dan kelancaran pelaksanaan tupoksi bagi anggota satpol PP	100	95,14	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	124.279.000	116.541.000	93,77	94,75	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	100	93,77	%	
Penyuluhan pencegahan peredaran Minuman Keras dan Narkoba	117.604.000	113.454.000	96,47	97,52	Terlaksananya Operasi rutin anggota Pol PP dan terlaksananya sosialisai pencegahan Miras dan Narkoba	60 2	60 2	Kali kali	Terciptanya Kondis Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban yang semakin Kondusif di wilayah Kobar	70	96,47	%	kegiatan menyesuaikan kebutuhan yang di perlukan
Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	3.337.500	3.087.500	92,51	92,51	Terlaksananya Operasi Penertiban Praktek Prostitusi	1	1	kali	Tercapainya penurunan pengguna dan penyedia jasa prostitusi di wilayah Kab. Ktw. Barat	50	92,51	%	
Penyuluhan pencegahan penertiban aksi premanisme	3.337.500	0,00	0,00	0,00	Terlaksananya Operasi Penertiban Tindak Premanisme	1	1	kali	Tidak tercapainya kegiatan tersebut	50	0,00	%	Kegiatan ini tidak terlaksanakan karena terjadi kesalahan pada anggaran kas.

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan	
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan		
		Realisasi	(%)											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
KRETARIAT ERAH														
Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	52.735.000	48.032.500	91,08											
Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	20.000.000	18.002.500	90,01		Terlaksananya konsultasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan silaturahmi ulama dan kesultanan se – Asia Tenggara	2	2	kali	Tercapainya persiapan dalam rangka penyelenggaraan silaturahmi ulama dan kesultanan se – Asia Tenggara	100	100	%		
Program pendidikan politik masyarakat														
Monitoring dan pelaporan pemilu	32.735.000	30.030.000	91,73		Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pemilu 2014	100	100	%	Tersedianya laporan hasil pemantauan pelaksanaan pemilu 2014	100	100	%		

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah dan ketentuan daerah atau nasional yang mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan, maupun toleransi bermasyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi dan berbagai penyuluhan;
2. Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan lain di daerah yang dilakukan melalui kegiatan pengawasan umum pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, serta operasi yustisi. Melalui kegiatan tersebut berdampak kondusifnya ketertiban umum di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2014.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Badan Kesbangpolinmas
 - a. Tidak adanya satuan kerja ditingkat Kecamatan / Desa / Kelurahan yang menangani khusus tugas / fungsi Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga pelaksanaannya belum memadai;
 - b. Terbatasnya kemampuan SDM yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada sehingga dalam pelaksanaan tugas belum maksimal;
 - d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan;
 - e. Keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sehingga terjadi penumpukan tugas.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Pembinaan dan pengawasan perda masih belum optimal. hal ini dikarenakan :

- a. Jumlah maupun kualitas SDM personil Satpol PP masih sangat terbatas dibandingkan dengan luas cakupan wilayah operasi;
- b. Sarana dan prasarana Satpol PP juga masih kurang memadai;
- c. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;

- d. Keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sehingga terjadi penumpukan tugas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah :

1. Badan Kesbangpolinmas

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Instansi / Kecamatan / Desa / Kelurahan dalam menangani bidang tugas Badan Kesbang. Politik dan Linmas Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Memberikan petunjuk / pengarahan kepada staf yang menangani tugas – tugas Badan Kesbang. Politik dan Linmas Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi;
- c. Mengadakan bimbingan teknis maupun Diklat kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing guna meningkatkan SDM;
- d. Memanfaatkan secara optimal fasilitas yang ada baik sarana maupun prasarana yang ada untuk melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat;
- e. Dilaksanakannya sosialisasi tentang pamswakarsa dengan melibatkan aparat keamanan secara intensif.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Mengusulkan penambahan jumlah personil Satpol PP;
- b. Penambahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Satpol PP dan melakukan koordinasi dengan Pemda / Pemprov Kalimantan Tengah guna melaksanakan peningkatan kantor dari eselon III.a menjadi eselon II.b (PP No. 06 Tahun 2010 dan PERMENDAGRI No. 40 Tahun 2011);
- c. Optimalisasi personil maupun sarana dan prasarana yang sudah ada dengan peningkatan pembinaan dan pelatihan secara berlanjut dengan melaksanakan DIKLATSAR SATPOL PP;
- d. Diperlukannya dukungan dari semua pihak (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Aparat-aparat terkait) untuk memberikan informasi yang benar tentang pelaksanaan Peraturan Daerah. Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. Penyesuaian tingkat pendapatan bagi semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

4.1.20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN**a) Kondisi Umum**

Kebijakan otonomi daerah pada hakekatnya adalah memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif, meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah, serta meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik.

Otonomi daerah dapat juga diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan. Pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya.

Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan yang pengelolaannya masuk dalam urusan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

1. SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah pemerintahan di daerah yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi.

Sekretariat Daerah sebagai salah satu SKPD yang juga berperan sebagai koordinator bagi SKPD lainnya mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut melalui berbagai program kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2014 dengan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 17.353.690.168,00 dan terealisasi Rp. 15.048.852.369,00 atau 86,71% seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.52

Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.611.219.868	7.532.776.770	87,48	87,48	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100		%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.700.000	4.950.000	56,90	56,90	Terlaksananya penyediaan perangk dan pengiriman paket untuk menunjang pelaksanaan tupoksi	1.100	1.100	lbr	Terwujudnya kelancaran jasa surat menyurat dan pengiriman paket kedinasan	100	100	%	Tidak ada paket yang dikirim
							15	0	paket			0		
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	2.505.728.000	2.373.844.194	94,74	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Sekretariat Daerah dan jaringannya	1	1	Tahun	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Setda dan jaringannya untuk menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tupoksi	100	100	%	-
	Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor	316.800.000	225.850.000	71,29	100	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor	1	1	tahun	Terpenuhinya ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang pelaksanaan keg.	100	100	%	Disesuaikan dengan kegiatan yang terlaksana

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	173.000.000	31.419.202	18,16	30,69	Terlaksananya penyediaan dana perjalanan berobat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	11	6	orang	Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	55	%	Yang Terealisasi hanya Eselon II
2.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	225.523.000	196.614.095	87,18	100	Terlaksananya pembayaran premi asuransi barang milik daerah dan sewa mess mahasiswa di Semarang, Jogyaarta, Malang, Surabaya dan Banjarmasin	1		tahun	Terwujudnya ketertiban administrasi dan terjaminnya barang milik daerah	100		%	
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	87.200.000	46.717.300	53,57	99,32	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ KIR Kendaraan ¼ STNK/Plat/Pajak Kendaraan	4 70	- 49	unit unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	66,22	%	Kurangnya kesadaran pemegang kendaraan dalam mengurus perizinan kendaraan
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	779.046.000	753.024.250	96,66	100 %	Terlaksananya pembayaran honor jasa: ¼ administrasi keuangan ¼ petugas jaga malam ¼ petugas rujab ¼ sopir ¼ petugas jaga kantor ¼ honorer damkar	8 16 5 7 2 2	8 16 5 7 2 2	orang orang orang orang orang	) Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor) Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasia n keuangan	100 100	100 100	% %	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						di lingkungan Setda dan jaringannya ~ Upah kerja damkar ~ Uang lembur ¼ Tersedianya materai	5	5	orang					
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	364.110.000	358.506.660	98,46	100	Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan kantor: ~ Laundry	4 1.500	4 1.500	Paket kg	Terwujudnya kebersihan ruang dan lingkungan kantor Setda serta rumah jabatan bupati	100	100	%	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	97.250.000	96.050.000	98,77	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Setda berupa : ¼ PC Komputer ¼ Komputer notebook ¼ Printer ¼ Kamera digital ¼ Handycam ¼ Sound system ¼ Radio SSB	45 35 20 2 1 2 12	45 35 22 2 1 2 12	unit unit unit unit unit unit unit	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Setda	100	100	%	
	Penyediaan alat tulis kantor	146.911.100	141.818.600	96,53	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	paket	Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tupoksi	100	100	%	-

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	192.072.500	182.317.500	94,92	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kedinasan	1	1	tahun	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat	100	100	%	Belanja foto copy sifatnya kondisional
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	25.194.500	25.190.800	99,99	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang Sekretariat Daerah	1	1	paket	Terpenuhinya penerangan untuk menunjang kelancaran kerja	100	100	%	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	651.857.300	645.423.000	99,01	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ¼ Kalkulator ¼ Monitor LCD ¼ Komputer ¼ Printer ¼ Notebook ¼ UPS server ¼ Kamera ¼ Handycam	15 1 2 25 11 3 7 2 1	15 1 2 25 11 3 7 2 1		Terwujudnya peningkatan fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran	80	100	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan		
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja		Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja		Target		Real.	Satuan
			Realisasi	(%)												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
						¼ LCD Proyektor ¼ Radio HT ¼ Keyboard/Organ ¼ Stand Mic + Microphone Kabel ¼ Wireless Microphone ¼ Server ¼ Harddisk Eksternal ¼ Scanner	15 1 1 1 1 2 3 1	15 1 1 1 1 2 3 1								
	Penyediaan makanan dan minuman	2.090.730.000	1.504.095.000	71,94	100	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	1	1	Tahun	Terwujudnya peningkatan kinerja dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu sifatnya kondisional		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	947.097.468	946.956.169	99,99	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	100	%			
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4.790.928.700	4.501.545.716	93,96	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	11		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100		%			

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan		
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja		Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja		Target		Real.	Satuan
			Realisasi	(%)												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Pembangunan rumah jabatan	300.000.000	297.451.000	99,15	100	Terlaksananya pembuatan Masterplan Rumah Jabatan Kab. Kobar	1	1	keg	Terwujudnya peningkatan kualitas rumah jabatan untuk menunjang kenyamanan aparatur	70	100	%			
	Pembangunan gedung kantor	1.762.600.000	1.710.563.500	99,30	90	Terlaksananya pembangunan gedung kantor berupa : ¼ Gedung kantor jl. P. Antasari ¼ Pembuatan Sumur bor keperluan Setda Kab. Kobar	245 1	245 1	m2 paket	Terwujudnya peningkatan fasilitas gedung kantor untuk menunjang aktifitas PNS dalam rangka pelayanan masyarakat	70	100	%			
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan	211.414.000	208.230.000	98,49	100	Terlaksananya penyediaan perlengkapan rumah jabatan berupa : ~Meja Kerja ~ Meja Makan ~ Kursi Kerja ~ Ranjang + Springbed ~ Sofa ~ Rak/lemari buku ~ Bufet ~ Ambal/karpet ~ Televisi	1 2 1 3 3 1 2 6 2	1 2 1 3 3 1 2 6 2		Terwujudnya peningkatan fasilitas rumah jabatan	100	100	%			

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	355.408.700	353.292.500	99,40	100	Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa : ~ Papan Nama ~ Tabung pemadam portable ~ Lemari Arsip ~ Filling Kabinet ~ AC ~ Meja kerja ~ Sofa ~ Tangga ~ Televisi ~ CCTV	25 10 4 8 6 10 1 1 2 8	25 10 4 8 6 10 1 1 2 8		Terwujudnya peningkatan fasilitas perlengkapan gedung kantor untuk menunjang aktifitas PNS dalam rangka pelayanan masyarakat	100	100	%	
2.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	32.050.000	32.050.000	100	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga rujab wabup	3	3	Paket	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah jabatan wakil bupati yang representatif	100	100	%	
3.	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	188.616.000	187.351.000	99,33	100	Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan meliputi : ¼ Pengecatan rujab wakil bupati ¼ Pengecatan rujab sekda	265 159	265 159	m2 m2	Terpenuhinya kondisi rumah jabatan yang layak, memadahi dan representatif	90	100	%	Pemeliharaa n rutin/ berkala rumah jabatan

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	210.000.000	186.167.500	88,65	100	Terlaksananya pengecatan gedung kantor bupati dan pemeliharaan Gedung VIP Bandara	1	1	paket	Terwujudnya keindahan dan optimalisasi fungsi gedung kantor bupati dan Gedung VIP Bandara	100	100	%	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
							1	1	paket					
	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	218.800.000	161.930.905	74,01	100	Terlaksananya penyediaan BBM dan suku cadang kendaraan dinas bupati dan wakil bupati	3	3	unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi kendaraan dinas dan kelancaran aktivitas KDH dan wakil KDH	100	100	%	Sifatnya kondisional apabila mobil jabatan mengalami kerusakan
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1.155.476.000	1.015.809.311	87,91	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional	1	1	tahun	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional serta kelancaran aktivitas aparatur setda	100	100	%	Sifatnya kondisional apabila ada kerusakan mobil, motor, genset, speed boat setda
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	56.564.000	48.700.000	86,10	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor setda dan rumah jabatan berupa ¼ AC ¼ Suku Cadang Genset	86 1	86 1	unit tahun	Terpenuhinya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor dengan baik dan peningkatan kenyamanan kantor dan rumah jabatan	100	100	%	Sifatnya kondisional apabila terdapat kerusakan pada AC
	Penyediaan jasa sewa rumah jabatan	300.000.000	300.000.000	100	100	Terlaksananya sewa rumah jabatan bupati	1	1	tahun	Terpenuhinya ketersediaan rumah jabatan bupati yang memadai dan	100	100	%	-

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan		
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja		Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja		Target		Real.	Satuan
			Realisasi	(%)												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
										representatif serta terwujudnya kenyamanan KDH						
	Program peningkatan disiplin aparatur	316.375.000	315.096.000	99,60	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%			
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	290.375.000	289.096.000	99,56	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan pakaian dinas pegawai di lingkungan Setda Kab. Kotawaringin Barat meliputi : ¼ Pakaian sipil harian (PSH) KDH dan wakil KDH ¼ Pakaian sipil lengkap (PSL) KDH dan wakil KDH ¼ Pakaian sipil resmi (PSR) KDH dan wakil KDH ¼ Pakaian dinas harian lengan pendek KDH dan wakil KDH ¼ Pakaian dinas harian lengan panjang KDH dan wakil KDH ¼ Pakaian dinas Pegawai Setda	4 2 4 2 2 225	4 2 4 2 2 225	stel stel stel stel stel stel	Terwujudnya keseragaman, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%			

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						¼ Pakaian dinas upacara (PDU) KDH dan WKDH ¼ Pakaian KORPRI Pegawai Setda	2 225	2 225	stel stel					
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	26.000.000	26.000.000	100	100	Terlaksananya penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu berupa : ¼ Pakaian adat daerah bupati dan wabup ¼ Pakaian adat tamu	2 20	2 20	pasang stel	Terwujudnya peningkatan disiplin, tanggung jawab dan kinerja aparatur Setda	100	100	%	
	Program fasilitas pindah/ purna tugas PNS	25.000.000	12.883.700	51,53	100	Terlaksananya kegiatan pada Program fasilitas pindah/ purna tugas PNS	1		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program fasilitas pindah/ purna tugas PNS	100	100	%	
	Pemulangan pegawai yang pensiun	25.000.000	12.883.700	51,53	100	Terlaksananya pemulangan PNS yang pensiun ke daerah asalnya	1	1	orang	Terpenuhinya salah satu hak bagi PNS yang sudah pensiun	100	100	%	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	501.444.000	312.767.435	62,37	62,37	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1		tahun	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan		
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja		Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja		Target		Real.	Satuan
			Realisasi	(%)												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	501.444.000	312.767.435	62,37	62,37	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	1	1	tahun	Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku	100	100	%			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.515.000	2.452.000	97,50	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%			
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	620.000	620.000	100	100	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2	2	lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran	100	100	%			
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.895.000	1.832.000	96,68	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2	2	lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	100	%			
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	1.644.945.600	1.341.863.586	81,57	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	4		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	100	100	%			

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dialog / Audensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat. Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	125.000.000	124.000.000	99,20	100	Terlaksananya fasilitasi dialog dengan tokoh masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan	1	1	tahun	Terwujudnya jalinan komunikasi antara KDH dengan tokoh masyarakat. Pimpinan dan anggota organisasi sosial kemasyarakatan	100	100	%	Disesuaikan dengan agenda dialog yang diadakan
	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	746.945.600	598.504.637	80,13	92,86	Terlaksananya pelayanan tamu dari Kunjungan Kerja pejabat negara / departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	1	1	tahun	Terwujudnya koordinasi dan kerja sama pemerintah daerah	100	100	%	
	Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	230.000.000	142.474.250	61,95	100	Terlaksananya kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah ke daerah kecamatan	1	1	tahun	Terwujudnya peningkatan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100	100	%	
	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	543.000.000	476.884.699	87,82	100	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1	1	tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan kepala daerah antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	100	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	384.570.000	192.606.250	50,08	50,08	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	2	keg	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100		%	
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	241.620.000	137.850.000	57,05	71,80	Terlaksananya Administrasi Kepemilikan Barang Daerah	1	1	tahun	Terpenuhinya penatausahaan barang milik daerah dengan baik	100	71.80	%	
	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	142.950.000	54.756.250	38,30	74,80	Terlaksananya data inventaris dan penilaian barang milik daerah kabupaten Kotawaringin Barat	1	1	tahun	Terpenuhinya ketersediaan data inventaris dan penilaian barang milik daerah kab. Kotawaringin Barat	90	74.80	%	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	258.821.000	232.053.870	89,66	95,41	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100	100	%	
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	258.821.000	232.053.870	89,66	95,41	Terlaksananya : ¼ Pengelolaan kelembagaan ¼ Pengelolaan GG dan LHKPN ¼ Penyusunan RKT, TAPKIN, LAKIP	29 2 3	29 2 3	SKPD dok. dok.	Terwujudnya manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang baik	100	100	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan		
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja		Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja		Target		Real.	Satuan
			Realisasi	(%)												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
						¼ Asistensi Kualitas Pelayanan Publik dan Asistensi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2	2	keg.							
1.	Program Penataan Peraturan Perundang - undangan	552.435.000	447.107.800	80,93		Terlaksananya kegiatan pada Program Penataan Peraturan Perundang - undangan				Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Penataan Peraturan Perundang - undangan						
2.	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	265.915.000	197.326.840	100	74.21	Terlaksananya kegiatan pembinaan kadarkum terhadap masyarakat	6	4	kec.	Terwujudnya masyarakat sadar hukum di 6 wilayah kecamatan	100	74.21	%	Tidak terpenuhi target karena 2 kecamatan belum membentuk kadarkum		
3.						Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	6	6	Keg.	Terwujudnya peningkatan wawasan dan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	100	%			
4.	Publikasi peraturan perundang undangan	78.270.000	74.620.680	100	95.34	Terlaksananya penyediaan buku peraturan perundang undangan	40	40	buku	Terwujudnya pengadaan buku Lemda Tahun 2012 dan tahun 2013 serta buku himbauan pajak dan retribusi pajak	100	95.34	%			

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang - undangan yang Baru. Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang - undangan Daerah	208.250.000	175.160.280	100	84.11	Terlaksananya : ¼ Penyusunan Perda ¼ Penyusunan Perbup	30	16 47	buah buah	Tercapainya jumlah peraturan perundang undangan daerah yang dapat menciptakan rasa keadilan	100	84.11	%	Adanya Perubahan Peraturan Per-UU yg Baru. Ada Perubahan Anggaran Belanja Langsung
	Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum	229.595.000	165.674.140	100	72.16	Terlaksananya kegiatan pada Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum	80	72.16	%	
	Pemberian bantuan hukum	229.595.000	165.674.140	100	72.16	Terlaksananya bantuan hukum kepada aparaturn dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	1	1	keg	Tercapainya penyelesaian permasalahan hukum yang menyangkut aparaturn dan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	80	72.16	%	Terlambat diterimanya DPA Perubahan
	Program peningkatan kesadaran dan pemahaman hak asasi manusia	41.807.000	4.120.000	50	9.85	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kesadaran dan pemahaman hak asasi manusia	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kesadaran dan pemahaman HAM	100	50	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM)	41.807.000	4.120.000	50	9.85	Terlaksananya penetapan keputusan bupati tentang panitia RANHAM dan pelaksanaan kegiatan RANHAM	1	1	keg.	Tercapainya pembentukan panitia RANHAM untuk mendukung pelaksanaan RANHAM di Kab. Kotawaringin Barat	100	50	%	

Pencapaian kinerja output dan outcome kegiatan pada Sekretariat Daerah, mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagai berikut :

Tersusunnya Perda Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi:

- a) Perda dan Perbub APBD sebanyak 3 buah;
- b) Perda dan Perbub Perubahan APBD sebanyak 1 buah;
- c) Perda Pertanggungjawaban APBD yang meliputi :
 - Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Arus Kas;
 - Neraca;
 - Catatan L/K.

Permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah :

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan;
2. Terbatasnya jumlah SDM pegawai yang memiliki kompetensi di bidang tertentu yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantoran;
3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik lanjutan dalam rangka perwujudan *Good Governance* berupa implementasi UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri PAN No. SE/20/M PAN/6/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Partisipasi Masyarakat menuju Pemerintahan Yang Baik, belum bisa terlaksana (Bagian Organisasi);
4. Kegiatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik lanjutan dalam rangka perwujudan *Good Governance* berupa implementasi PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, belum bisa terlaksana (Bagian Organisasi);
5. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
6. Peraturan perundang-undangan dari pusat seringkali tumpang tindih antar kementerian sehingga berpotensi menimbulkan multi tafsir dalam tataran pelaksanaannya.

Upaya Pemecahan masalah Sekretariat Daerah :

1. Mengoptimalkan pendayagunaan SDM dan Fasilitas yang ada serta mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan;
2. Peningkatan kinerja aparatur dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi SDM pegawai;

3. Meningkatkan koordinasi di tingkat bagian maupun lintas instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Diperlukan tambahan anggaran sebagai pelaksanaan Tugas Pokok & Fungsi Bagian Organisasi Setda, dan atau tambahan anggaran dialokasikan pada SKPD Teknis diluar Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi);
5. Mengupayakan peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam pelayanan masyarakat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
6. Mengintensifkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait seperti BPK dan kementerian di tingkat pusat.

2. SEKRETARIAT DPRD

Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah menyelenggarakan pelayanan umum dan administrasi DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tertib, efisien, transparan, akuntabel dan bebas dari unsur KKN dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mendukung pencapaian misi tersebut, Sekretariat DPRD mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7.006.390.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.299.241.099,00 atau 75,63 % yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 4.53

**Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD**

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.425.808.900,00	2.173.707.221,00	88,82		Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16	15	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	89,61	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	0	0	0	Terlaksananya pengiriman surat, dokumen, paket untuk menunjang pelaksanaan tupoksi	30	0	bh	Terwujudnya kelancaran jasa surat menyurat dan pengiriman paket kedinasan	100	0	%	Tidak dilaksanakan
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	191.946.000,00	177.992.702,00	92,73	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Sekretariat Dewan	1	1	tahun	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Setwan untuk menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tupoksi	100	100	%	
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD	958.500.000,00	798.427.788,00	83,30	100	Terlaksananya penyediaan dana premi asuransi dan perjalanan untuk check up dan berobat lanjutan bagi pimpinan dan anggota DPRD	30	30	OK	Terpenuhinya kebutuhan jaminan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	15.000.000,00	5.993.378,00	39,96	40	Terlaksananya pembayaran premi asuransi barang milik daerah	5	2	tahun	Terwujudnya ketertiban administrasi dan terjaminnya barang milik daerah	100	40	%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	16.060.000,00	11.105.000,00	69,15	96,30	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	16 11	16 10	unit unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	96,30	%	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	145.036.500,00	138.803.500,00	95,70	100	Terlaksananya pembayaran honor jasa: ¼ Panitia Pelaksana Kegiatan ¼ Tim Pemeriksa Barang ¼ Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ¼ Satpam ¼ Sopir	8 3 1 1 5	8 3 1 1 5	orang orang orang orang orang	) Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan) Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasia n keuangan) Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor	100 100	100 100	% %	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	108.000.000,00	107.622.400,00	99,65	100	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	1	1	tahun	Terwujudnya kebersihan ruang dan lingkungan kantor Sekretariat Dewan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	30.380.000,00	5.750.000,00	18,93	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Setwan berupa : ¼ Mesin foto copi ¼ PC Komputer ¼ Komputer notebook ¼ Printer ¼ Handycam ¼ proyektor ¼ Sound system ¼ Jaringan internet	1 9 11 9 1 3 2 1	- 9 3 9 - - - -	unit unit unit unit unit unit unit tahun	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Setwan	100	100	%	
Penyediaan alat tulis kantor	75.728.600,00	75.715.000,00	99,98	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	paket	Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tupoksi	100	100	%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	90.521.700,00	88.265.000,00	97,51	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kedinasan	1	1	tahun	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	18.884.500,00	18.702.500,00	99,04	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor	1	1	paket	Terpenuhinya penerangan untuk menunjang kelancaran kerja	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	372.320.190,00	367.915.000,00	98,82	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ¼ Belanja kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard) ¼ Pengadaan kalkulator ¼ Pengadaan komputer desktop/PC ¼ Pengadaan Laptop ¼ Pengadaan printer ¼ Pengadaan Monitor (LCD ¼ Pengadaan kursi kerja ruang fraksi ¼ Pengadaan Peralatan Dapur ¼ Pengadaan Penghias Ruangan Rumah	1 							

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Tangga ¼ Pengadaan sound system untuk ruang rapat	1	1	unit					
Penyediaan peralatan rumah tangga	108.068.410,00	103.542.500,00	95,81	100	¼ Tersedianya peralatan kebersihan ¼ Tersedianya piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/ pisau ¼ Tersedianya penghias ruangan rumah tangga ¼ Tersedianya perlengkapan tempat tidur (springbed, bantal, guling) ¼ Tersedianya almari ¼ Tersedianya gorden dan kelengkapannya ¼ Tersedianya meja kerja ¼ Tersedianya meja makan ¼ Tersedianya kursi kerja ¼ Tersedianya kursi makan ¼ Tersedianya sofa ¼ Tersedianya	6 15 6 5 1 1 1 1 1 6 2	6 15 6 5 1 1 1 1 1 6 2	Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis paket buah buah buah buah buah set	Terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tupoksi Setwan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					peralatan dapur (tabung dan kompor gas, kulkas)	3	3	jenis					
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	4.400.000,00	4.317.500,00	98,13	100	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1	1	paket	Terwujudnya peningkatan wawasan pengetahuan aparatur tentang peraturan dan perundang undangan yang berlaku	100	100	%	
Penyediaan makanan dan minuman	70.063.000,00	64.981.000,00	92,75	100	Tersedianya makanan dan minuman harian anggota dewan dan tenaga kontrak	1	1	tahun	Terwujudnya peningkatan kinerja dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	220.000.000,00	204.573.953,00	92,99	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	100	%	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.018.640.750,00	770.574.294,00	75,65		Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	6	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pembangunan gedung kantor	22.500.000,00	22.000.000,00	97,78	100	Terlaksananya : ¼ Tempat umbul - umbul dan tempat bendera (beton)	5	5	buah		100	100	%	
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor					¼ Meteran listrik rumah dinas	0	0	buah					
Perlengkapan Pengadaan Gedung Kantor :													
- Belanja Barang dan Jasa	78.906.250,00	75.550.000,00	95,75	100	Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa : ¼ Papan nama ruangan (gantungan) ¼ umbul - umbul ¼ bendera merah putih (180 cm x 270 cm) ¼ bendera merah putih (80 cm x 120 cm) ¼ bendera merah putih panjang ¼ tabung pemadam kebakaran ¼ almari/estalase untuk tempat foto mantan Ketua DPRD	20 20 1 30 300 11 1	20 20 1 30 300 11 1	Keping Lembar Lembar lembar lembar buah buah	Terwujudnya peningkatan fasilitas perlengkapan gedung kantor untuk menunjang aktifitas PNS dalam rangka pelayanan masyarakat	100	100	%	
- Belanja Modal	175.312.500,00	165.900.000,00	94,63	100									

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kobar Ukuran 600 cm x 120 cm								
					¼ lemari/estalase untuk ruangan kerja Ketua	1	1	buah					
					¼ lemari kaca untuk arsip	6	6	buah					
					¼ Pengadaan AC 1 PK	10	10	buah					
					¼ mesin pompa air	3	3	unit					
					¼ tiang umbul - umbul	20	20	buah					
					¼ tiang bendera	30	30	buah					
					¼ papan struktur organisasi Set. DPRD	1	1	buah					
					¼ Papan Nama Anggota DPRD dll untuk di meja	45	45	buah					
					¼ sofa untuk ruangan kerja Pimpinan DPRD	7	7	set					
					¼ kursi panjang stanless isi 4 untuk ruang lobi Kantor DPRD	10	10	set					
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	30.100.000,00	29.408.500,00	97,70	100	Terlaksananya pemeliharaan : ¼ Rumah Jabatan Ketua DPRD ¼ Halaman Rumah Jabatan Ketua DPRD	250 60	250 60	M2 M2	Terpenuhinya kondisi rumah jabatan ketua DPRD yang layak, memadai dan representatif	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	81.700.000,00	81.361.500,00	99,59	100	Terlaksananya pemeliharaan : ¼ Gedung/ Bangunan Kantor Tidak Bertingkat ¼ Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	650 500	650 500	m2 m2	Terwujudnya keindahan dan optimalisasi fungsi gedung kantor	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	120.000.000,00	79.922.510,00	66,60	100	Terlaksananya penyediaan BBM dan suku cadang mobil jabatan unsur pimpinan DPRD	3	3	unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi kendaraan dinas dan kelancaran aktivitas DPRD	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	491.392.000,00	299.006.784,00	60,85	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	16 8	16 8	unit unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional serta kelancaran aktivitas aparatur setwan	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	18.730.000,00	17.425.000,00	93,03	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa ¼ AC split ¼ Genset	16 1	12 1	unit unit	Terpenuhinya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor dengan baik dan peningkatan kenyamanan kantor	100	100	%	
Program peningkatan disiplin aparatur	254.560.000,00	206.300.000,00	81,04		Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	254.560.000,00	206.300.000,00	81,04	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan pakaian dinas pegawai dan anggota DPRD di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi : ¼ Pakaian Sipil Harian (PSH) pimpinan dan anggota DPRD ¼ Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pimpinan dan anggota DPRD ¼ Pakaian Dinas Harian (PDH) pimpinan dan anggota DPRD ¼ Pakaian Dinas Upacara (PDU) ¼ Pakaian Dinas Harian (PDH) PNS ¼ Pakaian Kerja Satpam ¼ Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh ¼ Papan Nama PNS dan anggota DPRD	60 30 30 30 39 5 1 64	60 30 30 30 39 5 1 64	stel stel stel stel stel stel stel keping	Terwujudnya keseragaman, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas dan pakaian adat	100	100	%	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	175.000.000,00	161.812.804,00	92,46		Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Prog. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	175.000.000,00	161.812.804,00	92,46	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	18	21	orang	Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku	100	100	%	
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3.132.380.350,00	1.986.846.780,00	63,43		Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	7	6	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100	85,71	%	
Pembahasan rancangan peraturan daerah	165.055.350,00	128.512.500,00	77,86	100	Terlaksananya penyusunan Ranperda hasil pengambilan keputusan dan pembuatan naskah kajian akademik ranperda inisiatif DPRD	30 1	18 1	buah paket	Tercapainya peningkatan produk hukum daerah	100	61,30	%	
Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	27.000.000,00	9.690.000,00	35,89	100	Terlaksananya Hearing /Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	27	3	kali	Terakomodirnya masukan dari Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan	100	11,11	%	Hanya ada 3 kali dialog
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	60.425.000,00	45.176.000,00	74,76	100	Terlaksananya dan terfasilitasinya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	55	45	kali	Tercapainya peningkatan kinerja DPRD	100	81,81	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rapat-Rapat Paripurna	167.250.000,00	105.410.000,00	63,03	100	Terlaksananya dan terfasilitasinya rapat-rapat paripurna	25	29	kali	Terpenuhinya risalah rapat-rapat paripurna, peraturan daerah dan keputusan DPRD	100	100	%	
Kegiatan Reses	156.000.000,00	0,0	0,00	0	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah anggota dewan dalam rangka reses	78	0	ok	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik	100	0	%	Tidak dilaksanakan
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	97.350.000,00	40.814.250,00	41,93	100	Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (monitoring/undangan dll) dan personil Setwan dalam rangka mendam pingi anggota DPRD	61	32	OK	Terumuskannya permasalahan yang timbul di masyarakat dan rekomendasi penyelesaian masalah	100	52,46	%	
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2.459.300.000,00	1.657.244.030,00	67,39	86,59	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kunker/ konsultasi/ koordinasi/ undangan/ bimtek/ diklat/ sosialisasi dll.	164	142	OK	Meningkatnya kemampuan anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan wewenang	100	86,59	%	

Permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten jumlahnya terbatas, sehingga mengakibatkan beberapa pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan kurang optimal dan hanya staf tertentu saja yang diberdayakan;
2. Sarana dan Prasarana pendukung kinerja banyak yang sudah tidak bisa digunakan secara optimal, sehingga pekerjaan sering tertunda akibat perbaikan.

Upaya Pemecahan masalah Sekretariat DPRD :

1. Permasalahan yang menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM) diselesaikan secara interen dengan melakukan pembinaan bagi pegawai agar meningkatkan kinerjanya;
2. Permasalahan yang menyangkut sarana dan prasana dapat diselesaikan dengan cara melakukan inventarisasi sarana dan prasarana yang sudah rusak untuk dimintakan penghapusan dan akan diusulkan pengadaan di tahun anggaran berikutnya.

3. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPKD)

Pengelolaan keuangan daerah wajib dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik tidak dapat dipisahkan dari fungsi pembinaan administrasi keuangan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan peraturan perundangan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Untuk tahun 2014 ditargetkan 2 (dua) Peraturan Daerah yaitu Perda Nomor 01 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014 dan Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBD-Perubahan TA 2014 serta 2 (dua) Peraturan Bupati yaitu Perbup Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD TA 2014 dan Perbup Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD-P TA 2014 dapat direalisasikan semua.

Kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan di tahun anggaran 2014 adalah :

- a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Laporan Realisasi Anggaran;
- Laporan Arus Kas;
- Neraca;
- Catatan L/K;

Dalam melaksanakan urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 5.608.965.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 4.943.325.065,00** atau **88,13%**. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.54

Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh DPKD

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.448.562.000	2.210.255.818	90,26	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	14	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	644.500	64,45	100	Terlaksananya pengiriman surat dinas	50	50	lbr	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat	100	100	%	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	343.600.000	323.179.889	94,05	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan DPKD	12	12	bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan DPKD untuk menunjang terlaksananya tupoksi	100	100	%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	5.350.000	3.299.000	61,66	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	29 2	29 2	unit unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa administrasi keuangan	317.656.000	235.101.500	74,01	100	Terlaksananya penyediaan keperluan pengelolaan keuangan dinas	1	1	tahun	Terwujudnya kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan keuangan	100	100	%	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	110.000.000	108.394.000	98,54	100	Terlaksananya jasa kebersihan lingkungan kantor	1	1	tahun	Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan kenyamanan lingkungan kerja	100	100	%	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	103.250.000	91.775.000	88,88	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan DPKD berupa : ¼ Telepon dan jaringan PABX ¼ Jaringan komputer ¼ UPS/stabilizer ¼ Komputer Server ¼ Printer ¼ Printer Printonic ¼ Notebook/laptop ¼ PC Komputer ¼ Server PBB ¼ Server ¼ proyektor	1 1 20 1 30 2 20 20 2 1 1	1 1 20 1 30 2 20 20 2 1 1	tahun tahun unit unit unit unit unit unit unit unit tahun	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan DPKD	100	100	%	
Penyediaan alat tulis kantor	239.551.000	239.243.000	99,87	100	Terlaksananya penyediaan ATK untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	tahun	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada DPKD	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	206.500.000	196.787.700	95,29	100	Terlaksananya cetak sarana administrasi perkantoran dan keuangan, spanduk serta penggandaan	1	1	tahun	Tercapainya kelancaran kerja administrasi perkantoran dan tugas lainnya pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	17.500.000	17.258.000	98,61	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor	1	1	tahun	Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	518.270.000	484.880.000	93,55	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ¼ harddisk DDR laptop ¼ harddisk eksternal ¼ UPS ¼ Printer dotmatrik ¼ Printer tinta ¼ Printer infus ¼ Notebook ¼ Komputer PC ¼ Mesin Penghancur Kertas ¼ Kalkulator	1 2 6 1 5 3 5 5 6 10	1 2 6 1 5 3 5 5 6 10	unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					¼ Flashdisk	25	25	unit					
					¼ Hardisk sever IBM	1	1	unit					
					¼ Hubport	1	1	unit					
					¼ Stavolt	2	2	unit					
					¼ VGA splitter	1	1	unit					
					¼ Modem	1	1	unit					
					¼ Kabel UTP	1	1	unit					
					¼ Conector RJ45	1	1	unit					
					¼ License Microsoft	1	1	paket					
					¼ Printer dotmatrik mini	1	1	buah					
					¼ Router internet	1	1	unit					
					¼ Router mikrotik	1	1	unit					
					¼ Mouse	20	20	buah					
					¼ LCSS PBB	5	5	user					
					¼ LCTS PBB	5	5	user					
					¼ Keyboard	4	4	buah					
Penyediaan peralatan rumah tangga	50.000.000	49.863.000	99,72	100	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	1	1	paket	Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	
Penyediaan makanan dan minuman	76.640.000	54.655.000	71,31	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat	1	1	tahun	Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	325.000.000	309.998.229,00	95,38	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									propinsi maupun pusat				
Peningkatan mutu pelayanan publik	134.245.000	95.177.000	70,89	100	Terlaksananya Kegiatan Motivasi Pegawai	13	13	tupoksi	Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan	100	100	%	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	786.741.000	701.063.321	89,10	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	6	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Prog. peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	
Pembangunan gedung kantor	38.100.000	37.994.000	99,72	100	Terlaksananya pembuatan sekat ruangan dan lemari dokumen	1	1	keg	Terwujudnya peningkatan kualitas fasilitas gedung kantor dalam rangka mendukung kelancaran kerja				
Pengadaan kendaraan dinas operasional	193.741.000	193.630.000	99,72	100	Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas roda 4 dan Accessories mobil	1	1	unit	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional untuk menunjang kelancaran kerja	100	100	%	
Pengadaan peralatan gedung kantor	55.500.000	55.385.000	99,79	100	Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor berupa AC split, Mesin pompa air, kipas angin besar dan AC standing	2 1 3 1	2 1 3 1	Unit Unit Unit Unit	Terwujudnya peningkatan kenyamanan dalam lingkungan kerja	100	100	%	C
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	142.000.000	141.257.000	99,47	100	Terlaksananya pemeliharaan gedung gedung berupa :				Terpenuhinya fungsi gedung kantor dengan baik untuk	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					¼ Perbaikan toilet dan instalasi lantai II ¼ Perbaikan pintu pagar kantor dan engsel pintu masuk kantor ¼ pengecatan gedung kantor	1 1 400	1 1 400	paket paket m2	mendukung kelancaran pelaksanaan kerja				
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	335.700.000	251.197.321	74,82	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional yang meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	 29 2	 29 2	 unit unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	21.700.000	21.600.000	99,53	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa ¼ AC standing ¼ AC split	 13 10	 13 10	 unit unit	Terpenuhinya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor dengan baik dan peningkatan kenyamanan kantor	100	100	%	
Program peningkatan disiplin aparatur	112.000.000	103.991.800	92,84	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	
Pengadaan mesin / kartu absensi	43.000.000	42.790.000	99,51	100	Tersedianya kebutuhan mesin absensi dan perlengkapannya	1	1	paket	Terwujudnya ketertiban dan kedisiplinan pegawai	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output					Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan		
		Realisasi	(%)											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	35.000.000	30.855.000	88,15	100	Tersedianya kebutuhan pakaian Dinas Harian (PDH) dan Satpam	85	85	stel	Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	34.000.000	30.346.800	89,25	100	Tersedianya kebutuhan pakaian Batik tradisional	85	85	stel	Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian pada hari tertentu	100	100	%	c	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	136.500.000	117.887.121	86,36	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	%		
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	136.500.000	117.887.121	86,36	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	18	18	orang	Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku	100	100	%		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35.000.000	32.137.352	91,82	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%		

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan laporan keuangan semesteran	35.000.000	32.137.352	91,82	100	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	1	1	Lap.	Terpenuhinya ketersediaan dokumen laporan pengelolaan keuangan SKPD dan Pemda	100	100	%	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.090.162.000	1.777.989.653	85,06	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	10	10	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100	100	%	
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	198.345.000	175.561.371	88,51	100	Terlaksananya penyusunan dan penggandaan dokumen KUA PPAS, dan Perda tentang APBD	285	285	Buku	Tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah	100	100	%	
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	53.125.000	46.814.250	88,12	100	Terlaksananya penyusunan dan penggandaan : Buku penjabaran APBD, Nota keuangan, RKPD, Renstra, buku risalah sidang Perbup. APBD	500	500	Buku	Tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output					Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan		
		Realisasi	(%)											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	122.175.000	106.566.536	87,22	100	Terlaksananya penyusunan dan penggandaan dokumen perda perubahan APBD, KUA PPAS	150	150	buku	Tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah	100	100	%		
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	50.000.000	47.993.000	95,98	100	Terlaksananya penyusunan dan penggandaan : Buku peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	200.000	200.000	lmbr	Tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah	100	100	%		
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	115.600.000	113.420.321	98,11	100	Terlaksananya penyusunan dan penggandaan dokumen perda tentang pertanggung jawaban APBD	334	334	buku	Tercapainya penilaian terhadap kinerja SKPD	100	100	%		
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	18.750.000	18.562.500	99,00	100	Terlaksananya penyusunan dan penggandaan perbup tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	300	300	Buku	Tercapainya penilaian terhadap kinerja SKPD	100	100	%		
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	78.475.000	10.550.000	13,44	100	Terlaksananya Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	125	125	orang	Tercapainya Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	100	100	%		

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	97.025.000	55.163.150	56,85	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti diklat pengelolaan keuangan daerah	200	200	orang	Terwujudnya implementasi peraturan perundang undangan keuangan daerah pada seluruh SKPD	100	100	%	
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	795.367.000	646.861.625	81,32	100	Terlaksananya peningkatan penerimaan daerah	30	30	%	Tercapainya peningkatan penerimaan asli daerah dan PBB	30	30	%	
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	561.300.000	556.496.900	99,14	100	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	5	5	Sistem informasi	Tercapainya Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	100	100	%	

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi DPKD

Permasalahan

1. Adanya usaha meringankan beban pajak daerah oleh wajib pajak sesuai ketentuan maupun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan;
2. Pendapatan Asli Daerah dari Pajak belum optimal;
3. Penegakan hukum terhadap wajib Pajak Daerah masih lemah terhadap kepatuhan membayar Pajak Daerah;
4. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi;
5. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat;
6. SKPD yang mempunyai pendapatan belum semua memahami mekanisme penyetoran pendapatan;
7. Belum semua SKPD dalam penyusunan aliran kas berdasarkan anggaran yang dibutuhkan berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga kesulitan dalam merealisasikan sehingga perlu merevisi anggaran kas dan DPA yang telah ditetapkan;
8. Belum semua SKPD mengetahui sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pencatatan akuntansi untuk pelaporan;
9. Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset daerah masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan;
10. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten di bidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Terdapat kesulitan dalam inventarisasi Barang Milik Daerah yang ada di SKPD.

Solusi

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, dan memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Meningkatkan pengawasan yaitu dengan cara :
 - Melakukan pemeriksaan secara mendadak dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah;

- Meningkatkan efesiensi administrasi serta memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkan efesiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
 - Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
3. Optimalisasi/pemanfaatan aset Pemerintah Daerah sebagai sumber PAD;
 4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan pemerintah pusat;
 5. Peningkatan kemampuan aparatur pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan bimbingan teknis pajak dan retribusi daerah;
 6. Koordinasi dengan SKPD secara lebih insentif dalam rangka optimalisasi pengelolaan APBD di masing-masing SKPD;
 7. Sosialisasi sistem dan prosedur tentang pengelolaan keuangan daerah dan pendampingan dalam pelaksanaannya;
 8. Dalam rangka meraih WTP maka diperlukan langkah yang lebih baik dalam pengelolaan barang milik daerah mulai dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi penggunaan barang di SKPD;
 9. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan di bidangnya dan dengan koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam membuat neraca untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan;
 10. Menyediakan sarana prasana dan meningkatkan kompetensi SDM untuk pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan penerapan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bimtek dan pendampingan;
 11. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

4. BADAN KEPEGAWAIAN

Pegawai merupakan unsur utama dalam organisasi memegang peranan strategis dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang menjadi penggerak jalannya organisasi. Tanpa didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional, suatu organisasi akan kesulitan dalam mencapai tujuannya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu peningkatan profesionalisme secara berkesinambungan. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten di bidang tugasnya. Pegawai dengan kompetensi tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Profesionalisme PNS dibentuk sejak

perekrutan pegawai, penempatan hingga tataran selanjutnya dalam jenjang karir.

Perekrutan PNS diawali dengan penyusunan formasi sesuai persyaratan jabatan dan seleksi sesuai kriteria yang dipersyaratkan. Penyelenggaraan penerimaan pegawai didukung adanya formasi pegawai, kebutuhan pegawai serta adanya pedoman pengadaan pegawai yang menganut prinsip-prinsip transparan, obyektif, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, tidak diskriminatif serta tidak dipungut biaya. Penempatan pegawai dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Penempatan yang tepat akan menempatkan seseorang pada jabatan yang tepat. Pola karir PNS akan memandu karir PNS sejak CPNS hingga pensiun. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilaksanakan dengan mengirim PNS dalam tugas belajar, pendidikan formal secara mandiri serta pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional maupun kepemimpinan.

Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikembangkan sistem *reward and punishment*. Kedisiplinan PNS digunakan sebagai salah satu indikator kinerja PNS. Selanjutnya diberikan *reward* bagi PNS sesuai dengan kinerjanya. *Reward* diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan Kinerja yang diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai dan instansi. *Reward* juga diberikan dalam bentuk pemberian tali asih bagi PNS yang memasuki masa purna tugas. *Punishment* diterapkan kepada PNS berupa penegakan peraturan perundangan sesuai peraturan yang berlaku.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan pegawai selama ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

1) Seleksi Penerimaan CPNS.

Dalam rangka mengisi formasi tambahan PNS pada SKPD/Satuan Unit Kerja, dilaksanakan melalui pengadaan CPNSD Kabupaten Kotawaringin Barat usul dan alokasi formasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.55
Usul dan alokasi formasi PNS Tahun 2010 – 2014

TH	USUL TAMBAHAN PEGAWAI BARU PER JENIS TENAGA				ALOKASI FORMASI YG DITERIMA PER JENIS TENAGA				KETERANGAN
	GURU	KES	TEKNIS	JML	GURU	KES	TEKNIS	JML	
2010	619	50	613	1.282	117	50	93	260	
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	
2012	2	-	13	15	2	-	13	15	
2013	50	4	18	72	50	4	18	72	Dari hasil tes tenaga honorer K.2 sebanyak 71 orang + 1 orang dari formasi khusus dokter
2014	632	206	320	1158	42	36	17	101	Formasi jalur khusus dokter 6 + formasi umum 95

Melalui penempatan PNS diharapkan dapat mengisi jumlah, kualitas, komposisi, distribusi pegawai sesuai dengan kebutuhan SKPD/Satuan Unit Kerja dilaksanakan melalui penempatan PNS dengan mengangkat CPNS Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.56
Komposisi Penerimaan PNS menurut Golongan Tahun 2010-2014

TAHUN	JUMLAH	GOLONGAN RUANG								KETERANGAN
		I.a	I.b	I.c	II.a	II.b	II.c	III.a	III.b	
2010	229	0	0	0	0	8	57	161	3	
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2012	15	1	-	3	6	-	2	3	-	
2013	72	2	-	2	49	2	4	12	1	Dari formasi khusus dokter
2014	74	2		2	17	5	4	35	9	Formasi jalur khusus dokter 6 + formasi jalur umum 95

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyelenggaraan administrasi kepegawaian.

Tabel 4.57
Penyelenggaraan Administrasi Kependidikan PNS Tahun 2010-2014

NO	KEGIATAN	Tahun					Keterangan
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Kenaikan Pangkat	988	792	1111	814	1012	
2	Peninjauan Masa Kerja	4	7	7	1	12	Sesuai usulan dari SKPD
3	Pengangkatan Cpnns Menjadi Pns	171	317	234	4	12	CPNS formasi tahun 2010. Tahun 2011 tidak ada penerimaan CPNS. Tahun 2014 dari honorer K.2
4	Pencantuman Gelar	19	13	8	16	28	Sesuai usulan dari SKPD

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Ktw. Barat

Informasi Kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat yang dapat mendukung pengambilan keputusan dalam rangka pembinaan pegawai, melalui peningkatan dalam pengelolaan database. Jumlah PNS yang masuk data base mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.58
Data Base Kepegawaian Tahun 2010 – 2014

NO	TAHUN	GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV					JUMLAH
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	
1	2010	4	9	28	15	159	426	553	259	885	572	583	498	882	51	16	1	0	4941
2	2011	2	7	13	16	105	474	580	252	1011	536	495	563	911	85	19	0	0	5069
3	2012	2	6	12	16	97	367	589	230	830	643	456	610	1008	78	22	0	0	4966
4	2013	2	6	10	34	153	498	421	474	715	576	544	822	561	62	19	0	0	4897
5	2014	4	4	11	9	100	131	392	487	598	918	480	668	1021	74	24	1		4922

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

Penyelesaian Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Tabel 4.59
Penanganan Kasus-kasus PNS Tahun 2010– 2014

NO.	Kegiatan	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah	Keterangan
1	Pelanggaran Disiplin	18	0	0	-	8	42	Tingkat capaian kegiatan tersebut pada tahun 2013 sebesar 0 % karena dari karena 25 kasus yang masuk masih diproses LHP nya. Untuk tahun 2014 ditargetkan menyelesaikan 10 kasus. Yang telah selesai LHPnya oleh Tim Pemeriksa sebanyak 8 kasus, sedangkan 2 kasus menunggu kelengkapan bukti pendukung. Pada tahun 2014 juga, telah dijatuhkan hukuman disiplin kepada 4 orang PNS, berupa Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS sebanyak 3 PNS dan Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun sebanyak 1 PNS.
2	Dugaan Pelanggaran Disiplin	-	-	-	12	10	22	
3	PNS melakukan Tindak Pidana	6	5	3	2		24	
4	Pemberhentian PNS	2	0	2	1	4	19	
5	Pemberian Izin Cerai	6	7	1	8	13	46	Usulan Izin Perceraian PNS diselesaikan sebanyak 13 usul. 13 SK.

NO.	Kegiatan	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah	Keterangan
6	Bimbingan Teknis Disiplin	0	1	6	6	29	42	Tahun 2011 bimtek disiplin diikuti 73 orang. Tahun 2012 bimtek disiplin dilaksanakan di 6 kecamatan diikuti 300 orang. Tahun 2013 bimtek disiplin dan SKP diikuti 100 orang. Tahun 2014 bimtek SKP diikuti 100 orang. Bimtek Disiplin dilaksanakan di 29 SKPD.
7	Siraman Rohani	-	-	-	1	1	2	Siraman Rohani tahun 2013 diikuti 840 orang. Siraman tahun 2014 diikuti 840 orang.
8	Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010					1	1	Sosialisasi diikuti 1.160 orang.

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

Terlaksananya pemberian penghargaan kepada PNS yang berprestasi melalui pemberian piagam Satyalencana Karya Satya. Penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Taspen dan Pensiun PNS.

Tabel 4.60
Penghargaan PNS berprestasi Tahun 2010 – 2014

NO	Kegiatan	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	KARPEG	186	111	538	195	13	1479
2	KARIS / KARSU	201	232	529	261	251	1772
3	PENSIUN	74	78	74	74	50	515
4	SATYA LENCANA	93	62	27	74	194	830
5	TASPEN	141	85	20	20	5	271

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

- 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan diklat kepemimpinan, diklat prajabatan dan pengiriman mengikuti seleksi tugas belajar serta pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas serta pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN.

Tabel 4.61
Realisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Th. 2010-2013

NO	KEGIATAN						JUMLAH
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	DIKLAT KEPEMIMPINAN	46	91	54	22	19	360
2	DIKLAT PRA JABATAN	294	679	226	16	1	1898
3	TUGAS BELAJAR	33	10	18	22	23	153
4	IJIN BELAJAR	21	360	234	75	95	946
5	UJIAN DINAS	35	33	12	34	40	325
6	UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH	60	10	11	18	20	156
7	IPDN	3	1	2	1	4	19

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kotawaringin Barat

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 Badan Kepegawaian mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.741.356.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.832.944.555,00 atau 84,17 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.62

**Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah**

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	14	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	99,97	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	0	0	0	Terlaksananya pengiriman surat dinas ke luar daerah	10	0	paket	Terpenuhinya jasa surat menyurat	100	0	%	Surat dikirim lewat email
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	151.920.000	121.415.856	79,92	100	Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor	12	12	bulan	Tersedianya listrik, air bersih, komunikasi/telpon, koneksi internet, langganan koran	100	100	%	Penyerapan anggaran menyesuaikan dengan tagihan dari PLN, PDAM, Telkom, Koran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	4.600.000	2.351.600	51,12	100	Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	13 1	13 1	unit	Terpenuhinya perpanjangan perijinan kendaraan dinas	100	100	%	Penyerapan anggaran menyesuaikan dengan biaya pengurusan perijinan kendaraan dinas operasional

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa administrasi keuangan	127.012.500	66.232.500	52,15	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan BKD	12	12	bulan	) Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor) Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan	100 100	100 100	% %	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.771.800	36.475.500	81,47	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	3 1	3 1	orang paket	Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan BK	100	100	%	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.800.000	8.655.000	33,55	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan berupa : ¼ PC Komputer ¼ Laptop/notebook ¼ Printer ¼ Jaringan komputer	 12 12 12 12	 12 12 12 12	 Bulan Bulan Bulan Bulan	Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor	100	100	%	Penyerapan anggaran menyesuaikan dengan tagihan biaya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor	86.576.850	70.228.000	81,12	100	Terpenuhinya alat tulis kantor	12	12	Bulan	Lancarnya administrasi kantor	100	100	%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41.212.400	29.736.650	72,16	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa : ¼ Amplop ukuran A ¼ Buku NCR ¼ ID Card	 128 63 45	 87 42 45	 Pak Buku Buah	Terlaksananya keperluan barang cetak kantor	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					¼ Fotocopy rutin ¼ Penjilidan ¼ Amplop ukuran E ¼ Amplop ukuran C	66000 85 85 56	66000 85 51 34	Lembar Eks Pak Pak					
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5.613.000	4.142.500	73,80	100	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	12	bulan	Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	838.730.396	783.955.700	93,47	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa : ¼ Server ¼ Printer multi fungsi ink jet ¼ Printer dotmatrik double folio ¼ Sound system instruktur ¼ Proyektor komputer 3000ansi + layar 150 ¼ LED televisi 42” ¼ LED televisi 32” ¼ PC All in one ¼ PC All in one ¼ Notebook	 2 16 2 1 1 1 1 57 4 8	 2 16 2 1 1 1 1 57 4 8	Unit Unit Unit Set Unit Buah Buah Unit Unit Unit	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran kerja	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					¼ Scanner ¼ UPS server 3000 VA ¼ Swicth hub 48 port ¼ Swicth hub 8 port ¼ Kabel UTP C. A.T ¼ Konektor LAN RG 45 ¼ CCTV	3 1 2 2 1 2 2	3 1 2 2 1 2 2	Unit Unit Buah Buah Rol Kotak Unit					
Penyediaan peralatan rumah tangga	7.654.300	7.551.000	98,65	100	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	12	12	bulan	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor untuk menunjang kelancaran kerja	100	100	%	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	4.500.000	2.575.500	57,23	100	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	5	0	buku	Bertambahnya wawasan aparatur	100	100	%	Peraturan perundang-undangan di download dari internet.
Penyediaan makanan dan minuman	4.850.000	3.990.000	82,27	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL	893	893	hari	Meningkatnya kinerja pegawai	100	100	%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	208.635.500	188.476.938	90,34	100	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	bulan	Tercapainya keputusan masalah kepegawaian	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7	7	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	72,19	%	
Pengadaan peralatan gedung kantor	215.000.000	213.070.000	99,10	100	Tersedianya : ¼ Genset beserta perlengkapannya ¼ Air Conditioner	1 6	1 6	Set unit	Meningkatnya kinerja	100	100	%	
Pengadaan meubeleur	174.550.000	167.029.000	95,69	100	Terlaksananya penyediaan meubeleur kantor berupa : ¼ Kursi C.A.T ¼ Lemari arsip kepegawaian ¼ Rak server ¼ Meja kerja front office ¼ Meja C.A.T ¼ Sofa ¼ Rak TV	52 2 1 1 57 2 1	52 2 1 1 57 2 1	Buah Buah Unit Buah Unit Buah Buah	Terpenuhinya kebutuhan meubeleur kantor untuk menunjang kelancaran kerja	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	26.260.000	22.730.000	86,56	100	Terlaksananya ¼ Pemeliharaan gedung kantor ¼ Kunci pintu + WC ¼ Kunci Jendela	145 35 80	145 35 80	m2 buah buah	Terwujudnya lingkungan kerja yang asri	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	115.800.000	71.411.400	61,67	100	Tersedianya BBM : ¼ BBM Roda 2 ¼ BBM Roda 4 Pemeliharaan kendaraan dinas ¼ Pemeliharaan R2 ¼ Pemeliharaan R4	13 1 13 1	13 1 13 1	Unit Unit Unit unit	Lancarnya transportasi darat	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.990.000	5.498.000	55,04	100	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor ¼ Pemeliharaan AC ¼ BBM mesin potong rumput	12 2	12 2	Bulan unit	Terwujudnya peningkatan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.000.000	0	0	0	Terlaksananya perbaikan lemari inventaris kantor	5	0	buah	Tercapainya optimalisasi fungsi meubeleur kantor	100	0	%	Tidak ada lemari kantor yang diperbaiki
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	233.500.000	231.039.000	98,95	100	Terlaksananya rehab ¼ Aula, pantry aula dan gedung arsip ¼ Tambah daya listrik ¼ Rehab pagar ¼ Rehab papan nama kantor	1 1 5 1	1 1 5 1	Paket Paket M Paket	Meningkatnya fasilitas aula, gedung arsip, terlaksananaya rehab pagar dan papan nama kantor	100	100	%	
Program peningkatan disiplin aparatur					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	45.560.000	43.208.000	94,84	100	Tersedianya pakaian dinas : ¼ Pakaian kerja satpam ¼ PSH ¼ PDH ¼ Pakaian sopir/ pesuruh	2 42 42 4	2 39 39 4	Stel Stel Stel Stel	Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	180.600.000	67.137.320	37,17	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis	17	17	orang	Meningkatnya kapasitas SDM	100	100	%	Target 17 orang PNS yang diberangkatkan mengikuti bimtek terpenuhi, sisa anggaran karena efisiensi pendanaan bimtek seperti tidak adanya kontribusi dan akomodasi peserta.

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	806.250	0	0	100	Tersedianya dokumen pelaporan kinerja	15	15	eksp.	Tersusunnya laporan kinerja	100	100	%	
Penyusunan laporan keuangan semesteran	806.250	784.750	97,33	100	Tersedianya dokumen laporan semesteran	20	20	eksp.	Tersusunnya laporan keuangan semester	100	100	%	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	806.250	805.000	99,84	100	Tersedianya dokumen akhir tahun	20	20	eksp.	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	21.145.000	20.030.000	94,73	100	Terlaksananya CPNS Daerah yang mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III	1	1	orang	Terwujudnya peningkatan kompetensi CPNS daerah melalui diklat prajabatan	100	100	%	Sebelum perubahan pagu anggaran Rp. 171.931.000 setelah perubahan menjadi Rp 21.145.000. Pada tahun

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													2014 terkendala karena SK tenaga honorer K2 yang telah dinyatakan lulus sampai saat ini belum diterbitkan, sehingga dana untuk prajabatan tidak dapat direalisasikan. Namun dana tersebut telah dialihkan dalam DPA perubahan untuk menunjang pengadaan CAT dalam rangka seleksi penerimaan CPNS sebesar Rp 150.786.000
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	926.460.014	897.371.301	96,86	95,14	Terlaksananya pengiriman pesertai ¼ Diklatpim Tingkat II ¼ Diklatpim Tingkat III	5 14	5 14	Orang Orang	Terpenuhinya ketersediaan PNS yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan eselon II, III dan IV	100	95,14	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	135.667.640	126.838.980	93,14	95,73	Terlaksananya ¼ Siraman Rohani ¼ Bimbingan teknis kepegawaian	875 100	840 100	Orang orang	Meningkatnya kemampuan, wawasan serta ketaqwaan aparatur	100	95,73	%	
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	58.236.200	37.498.200	64,39	95,28	Terlaksananya bimbingan teknis jabatan fungsional	30	30	orang	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan wawasan tentang angka kredit	100	95,28	%	.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur													
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	313.199.750	57.418.350	18,33	48,48	Terlaksananya : ¼ Asessmen eselon IV ¼ Pelantikan pejabat struktural	20 2	0 0	orang Keg.	Tercapainya pemetaan kepegawaian	100	0	%	Rencana tertimbang dan realisasi belum seimbang dikarenakan belum adanya pelantikan pejabat struktural di lingkungan pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat, dan asesmen belum bisa dilaksanakan dikarenakan

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													jadwal asesor/tenaga ahli untuk Kabupaten Kotawaringin Barat sudah penuh dan jadwal banyak dilaksanakan di daerah lain, sehingga dana kegiatan belum terserap.
Seleksi penerimaan calon PNS	281.947.000	267.941.704	95,03	95,03	Terlaksananya pengadaan CPNS tahun 2014 dan penetapan NIP tahun 2014	1500 300	2500 95	Orang pelamar formasi	Surat Keputusan pengangkatan CPNS Daerah formasi tahun 2014	100	95,03	%	Belanja makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi belum terserap karena masih dalam tahap penerimaan (tes penerimaan CPNS tahun 2014)
Penempatan PNS	68.964.400	59.006.000	85,56	85,56	Terlaksananya : ¼ Keputusan Pengangkatan CPNS Formasi Th 2013 ¼ Pembekalan CPNS formasi tahun	112 112	74 74	Tenaga Honorer K2 Tenaga Honorer	Penambahan PNS untuk mengisi kebutuhan SKPD	100	85,56	%	Yang diusulkan penetapan NIP disetujui dan diangkat pada tahun 2014 sebanyak 74 orang terdiri dari honorer K.2

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					2013 ¼ Usulan Formasi tahun 2014 ¼ Keputusan perpindahan PNS	1 50	1 41	K2 Eks PNS					sebanyak 65 orang + 9 orang dari formasi khusus dokter. DD = Dalam Daerah DL = Luar Daerah
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	146.137.400	143.035.939	97,88	98,56	Terlaksananya : ¼ Proses pengusulan penghapusan CPNS menjadi PNS dan terinputnya data pengusulan penghapusan CPNS menjadi PNS melalui SAPK ¼ Proses pengusulan peninjauan masa kerja dan terinputnya data pengusulan peninjauan masa kerja melalui SAPK ¼ Proses usul kenaikan pangkat dan terinputnya data kenaikan pangkat melalui SAPK ¼ Kenaikan pangkat ¼ Peninjauan Masa Kerja	2 1 2 1000 10	1 1 2 1012 12	keg. Keg. Keg. PNS PNS	Terpenuhinya penetapan keputusan kenaikan pangkat PNS, Keputusan Peninjauan Masa Kerja,Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS, keputusan pencantuman gelar	100	98,56	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					¼ Pengangkatan CPNS menjadi PNS ¼ Pencantuman gelar	12 10	12 28						
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	56.300.200	54.397.221	96.62	100	Terselenggaranya pengelolaan data dan layanan inforamsi kepegawaian	12	12	bulan	Akuratnya data kepegawaian	100	100	%	
Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	57.700.000	31.538.800	54,66	92,85	Terfasilitasinya PNS Daerah yang memenuhi syarat untuk mengikuti ¼ Seleksi tugas belajar ¼ Ijin belajar ¼ Ujian Dinas ¼ Ujian penyesuaian ijasah	 50 20 20	 95 40 20	 PNS PNS PNS PNS	Terselenggara nya PNS Daerah yang memenuhi syarat tugas belajar,Ijin Belajar	100	92,85	%	
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	156.057.400	146.137.686	93,64	87,79	Terlaksananya : ¼ Usul Satyalancana ¼ Usul Sumpah/janji PNS ¼ Usul kartu TASPEN ¼ Usul KARPEG ¼ Usul KARIS/KARSU ¼ UKP Pengabdian dan Pensiun ¼ Piagam Satyalancana	 1 1 12 12 12 12 75	 1 1 12 12 12 12 194	keg. keg. bulan bulan bulan bulan piagam	Tercapainya target PNS penerima Piagam Satyalancana, kartu TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU	100	87,79	%	Tahun 2014 kartu pegawai telah diganti menjadi kartu pegawai elektronik.

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					¼ Karpeg ¼ Karis ¼ Karsu ¼ Pensiun ¼ Taspen ¼ Sumpah/Janji PNS	500 150 150 70 10 350	13 111 140 50 5 270	kartu kartu kartu SK Kartu PNS					
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	114.260.700	81.183.300	71,05	71,06	Terlaksananya pemrosesan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	20	10	kasus	Penjatuhan hukuman disiplin	100	71,06	%	Tidak terserapnya dana secara maksimal karena kurangnya komitmen atasan langsung PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS untuk menyelesaikan kasus dimaksud sehingga dana Rapat Tim Majelis Pertimbangan PNS tidak adapat dilaksanakan sesuai rencana karena kurang lengkapnya bukti-bukti pendukung dari

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													SKPD dimaksud. Selain itu dana pada Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak dapat diserap semua dikarenakan hanya dapat digunakan jika ada kasus yang perlu ditindaklanjuti (kasuistis). LHP yang selesai 8.
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	683.012.300	591.983.400	86,67	92,25	Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar bagi PNS meliputi : ¼ Jenjang S1/D4 ¼ Jenjang S2	10 13	10 13	orang orang	Tercapainya kelancaran dalam pelaksanaan tugas belajar	100	100	%	
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	74.987.732	51.596.300	68,81		Terlaksananya penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Jumlah Capra IPDN	1 2	1 4	Keg orang	Tercapainya kelancaran dalam pelaksanaan seleksi calon Praja IPDN	100	100	%	

Permasalahan Badan Kepegawaian :

1. Adanya penjadwalan kegiatan yang menyesuaikan jadwal dari Pusat.
2. Asesmen Managerial belum bisa dilaksanakan dikarenakan hasil koordinasi pihak kami dengan BKN Pusat maupun pihak UGM Yogyakarta jadwal Asesor/Tenaga Ahli untuk Kabupaten Kotawaringin Barat sudah penuh dan jadwal banyak dilaksanakan di daerah lain.

Upaya Pemecahan masalah Badan Kepegawaian :

1. Perlu adanya koordinasi kegiatan yang intensif.
2. Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Nomor 910/1035/V/DPKD/2014 Hal Uji Kompetensi Pejabat Eselon II dan Eselon III Tanggal 2 Oktober 2014, pada 2015 Asesmen Managerial diganti Uji Kompetensi.

Pada 2014 Penerimaan CPNS Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan tes penerimaan CPNS dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) secara mandiri pada tanggal 17 – 26 Desember 2014 selama 10 hari. Jumlah peserta 2.115 orang, sedangkan yang hadir 2.015 orang. Dalam rangka menjamin pelaksanaan seleksi CPNS yang kompetitif, obyektif, transparan dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini merupakan tindak lanjut surat Menpan & RB Nomor :

B-2432/M.PAN.RB/7/2013 Hal : Penerapan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) dalam seleksi CPNS Tahun 2013 dan 2014 tanggal 29 Juli 2014.

5. INSPEKTORAT KABUPATEN

Dalam rangka mewujudkan *clean government* di jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, diperlukan dukungan aparatur pengawasan yang kompeten. Upaya untuk membentuk aparatur pengawasan yang kompeten tersebut senantiasa dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur pengawasan sehingga akan diperoleh pengawasan yang profesional.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain dimaksudkan bahwa :

1. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah;
2. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, dan pencegahan terhadap peluang praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi.

Pengawasan intern salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, selama Tahun 2014 dilakukan beberapa hal yaitu :

1. Pemeriksaan reguler sebanyak 74 obyek pemeriksaan dari jumlah potensi pemeriksaan 261 obyek (28,35%). Hasil dari pemeriksaan tahun 2014 terdapat 334 temuan dengan 659 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sejumlah 334 (50,68%);
2. Melakukan pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2014 terhadap 36 SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selanjutnya fungsi pengawasan juga dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari SKPD;
2. Pemeriksaan Khusus;
3. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi KKN;
4. Review atas laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran 2013;
5. Pencermatan DPA SKPD Tahun Anggaran 2014;
6. Kas Opname dan Stok Opname Tahun Anggaran 2013;
7. Monitoring inventarisasi aset tetap 2014;

8. Asistensi penyelenggaraan pemerintah baik tingkatan desa maupun SKPD;
9. Audit pengadaan barang jasa tahun 2014;
10. Inspeksi Mendadak.

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.1.796.882.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.648.822.972,00 atau 91,76%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.63

Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	382.466.500	355.416.168,00	92,92	99,74	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	14	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.878.000,00	95,93	100,00	Terlaksananya penyediaan perangko dan pengiriman paket surat dinas ke luar daerah	500	685	lbr	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat	100	137	%	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	64.800.000	45.651.821,00	70,45	100,00	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Inspektorat	12	12	bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Inspektorat untuk menunjang terlaksananya tupoksi	100	100	%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	3.800.000	2.965.400,00	78,04	100,00	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	12 2	12 2	Unit unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa administrasi keuangan	45.620.000	43.347.000,00	95,02	100,00	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan di lingkungan Inspektorat	12	12	bulan	Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan	100	100	%	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	18.166.000	16.391.000,00	90,23	100,00	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12	12	bulan	Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan Inspektorat	100	100	%	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.800.000	14.800.000,00	93,67	93,67	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja di lingkungan Inspektorat berupa : ¼ Printer ¼ Proyektor ¼ Mesin Tik Elektronik ¼ Laptop	10 1 2 10	10 1 2 10	unit unit unit unit	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Inspektorat	100	100	%	
Penyediaan alat tulis kantor	23.898.500	23.887.500,00	99,95	100,00	Terlaksananya penyediaan ATK untuk mendukung kelancaran kerja	12	12	bulan	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada Inspektorat	100	100	%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29.850.000	29.754.750,00	99,68	100,00	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa: ¼ Kartu Ucapan ¼ Amplop ¼ ID Card ¼ Disposisi	50 20 50 20	50 20 50 20	lbr pak buah buku	Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada Inspektorat	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3.750.000,00	3.747.000,00	99,92	100,00	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor	12	12	bulan	Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	75.500.000,00	75.218.400,00	99,63	100,00	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ¼ Laptop ¼ Printer ¼ Genset	7 5 2	7 5 2	unit unit unit	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran kerja	100	100	%	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2.000.000,00	1.899.000,00	94,95	100,00	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	10	10	buku	Terwujudnya peningkatan SDM pegawai di lingkungan Inspektorat	100	100	%	
Penyediaan makanan dan minuman	6.282.000,00	5.901.000,00	93,94	100,00	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat	1 50	1 50	orang OK	Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90.000.000,00	89.498.897,00	99.44	100.00	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10	29	Keg.	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	290	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	508.890.000,00	471.566.504,00	92,67	99,85	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	6	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	
Pembangunan gedung kantor	49.500.000,00	49.038.000,00	99,07	100,00	Terlaksananya perencanaan teknis pembangunan aula tahap 1	1	1	paket	Tercapainya pembuatan perencanaan teknis pembangunan aula tahap 1	100	100	%	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	36.000.000,00	32.800.000,00	91,11	100,00	Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas/operasional berupa : ¼ Roda 2	2	2	Unit	Terwujudnya peningkatan yang menunjang aktifitas PNS dalam rangka pelayanan masyarakat	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	28.710.000,00	27.887.195,00	99,91	97,39	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan halaman kantor beserta taman kantor	150 100 1	150 100 1	m2 m2 paket	Terwujudnya lingkungan kerja yang asri	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	125.000.000,00	99.370.609,00	79,50	100,00	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	12 2	12 2	Unit unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.080.000,00	7.039.500,00	99,43	100,00	Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor berupa: ¼ Air Conditioner (AC)	12	12	Unit	Terwujudnya peningkatan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					¼ Mesin Potong Rumput ¼ instalasi listrik	2 12	2 12	Unit bulan					
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	262.600.000,00	255.431.200,00	79,50	100,00	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor berupa: ¼ Toilet & Dapur ¼ Atap & Plafond	36 300	27,94 700,8	M2 M2	Terwujudnya peningkatan lingkungan kerja yang terpelihara guna menunjang aktifitas PNS dalam rangka pelayanan masyarakat	100	155,6	%	
Program peningkatan disiplin aparatur	42.900.000,00	42.097.000,00	98,18	100,00	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	42.900.000,00	42.097.000,00	98,13	100,00	Tersedianya kebutuhan pakaian dinasharian pegawai di lingkungan Inspektorat	44	44	stel	Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	66.150.000,00	54.690.900,00	82,26	100,00	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	66.150.000,00	54.690.900,00	82,26	100,00	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	7	12	orang	Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku	100	171	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.000.000,00	2.327.500,00	77,58	100,00	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000,00	373.000,00	37,30	100,00	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	Lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	%	
Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.000.000,00	967.500,00	96,75	100,00	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	1	1	Lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran	100	100	%	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000,00	987.000,00	98,70	100,00	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	Lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	689.561.700,00	631.059.200,00	91,53	98,08	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100	100	%	
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	475.129.200,00	461.918.850,00	97,22	97,22	Terlaksananaya pemeriksaan reguler	60	74	Obrik	Terwujudnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	100	123	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	22.200.000,00	17.937.000,00	80,80	100,00	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) non reguler	8	3	Lap.	Terwujudnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	100	37,50	%	
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawas	192.232.500,00	177.453.350,00	92,31	100,00	Terlaksananya penyusunan laporan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	60	71	Obrik	Terpenuhinya tindak lanjut hasil pemeriksaan	100	183	%	
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	102.016.000,00	89.967.800,00	88,19	88,19	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1	1	keg.	Tercapainya sasaran keg. pada Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100	100	%	
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	102.016.000,00	89.967.800,00	88,19	88,19	Terlaksananya pelatihan terhadap tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	10	12	orang	Peningkatan wawasan pengetahuan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	100	120	%	
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1.897.800,00	1.647.800,00	86,83	100,00	Terlaksananya kegiatan pada Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1	1	Keg.	Tercapainya sasaran keg. pada Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100	100	%	
Penyusunan kebijakan dan prosedur pengawasan	1.897.800,00	1.647.800,00	86,83	100,00	Terlaksananya penyusunan program kegiatan tahunan	2	2	buku	Terwujudnya program kegiatan tahunan Inspektorat	100	100	%	

Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten :

1. Masih terbatasnya anggaran dana pengawasan;
2. Masih terjadinya tumpang tindih dalam pengawasan terhadap obyek pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal;
3. Masih terbatasnya sarana prasarana dan jumlah aparatur pengawasan;
4. Masih terbatasnya dana untuk mengikuti Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas pengawasan;
5. Masih rendahnya komitmen entitas terperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan;
6. Motivasi, komitmen dan integritas aparatur pengawasan masih belum merata;

Upaya Pemecahan masalah Inspektorat Kabupaten :

1. Meningkatkan koordinasi dengan aparat pengawasan ditingkat internal maupun eksternal;
2. Mengirimkan aparatur pengawasan untuk mengikuti Diklat Teknis dan Diklat Sertifikasi auditor khususnya auditor ahli;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada entitas terperiksa yang tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang masih rendah;
4. Mengusulkan program peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk tahun anggaran yang akan datang;
5. Meningkatkan koordinasi dan informasi melalui pertemuan berkala dan gelar pengawasan sebagai pengendalian dan evaluasi.

6. KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN (KPTP)

Lahirnya Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadikan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah yang telah menerapkan prinsip pelayanan satu pintu kepada masyarakat. Langkah tersebut dikatakan strategis karena akan membawa dampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan investasi.

Terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan investasi, maka dampak langsung maupun tidak langsung yang akan terjadi adalah dengan meningkatnya investasi daerah mampu menciptakan peluang kerja serta mengurangi tingkat pengangguran yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Langkah strategis yang diambil berupa kemudahan dan kecepatan memperoleh layanan memperoleh perizinan melalui KPTP seyogyanya harus diikuti dengan stabilitas iklim investasi daerah seperti : konsistensi regulasi (kepastian hukum), stabilitas keamanan dan dukungan pemerintah daerah.

Selain itu kejelasan regulasi tentang apa dan bagaimana pelayanan prima pada KPTP dilaksanakan harus jelas dan tegas, sehingga prinsip cepat dan mudah yang diharapkan masyarakat akan dapat terwujud, karena sebuah lembaga pelayanan publik yang tidak memiliki kewenangan yang jelas berupa regulasi pelimpahan wewenang, maka kepastian waktu, prosedur yang sederhana, kemudahan serta biaya yang murah sebagaimana prinsip pelayanan prima tidak akan tercapai.

Salah satu tujuan pembentukan KPTP adalah agar masyarakat dapat menerima proses pelayanan yang lebih sederhana dan terkoordinasi dalam satu tempat (*one stop service*), dimana penyelenggaraan perizinan dari mulai pendaftaran, penerbitan sampai dengan penandatanganan izin dilakukan pada satu tempat. Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut adalah mengembangkan sistem pelayanan perizinan yang Cepat, Tepat, Sederhana, Transparan dan Murah sehingga terjamin kondisi yang kondusif dan kesempatan yang sama dalam bekerja / berusaha.

Tabel 4.64
Jenis dan Realisasi Perizinan di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2013 - 2014

No.	Jenis Izin Usaha	Ralisasi 2013	2014		
			Target	Realisasi	% Realisasi dari target
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	IMB	1.168	1.168	1.229	105 %
2.	SITU	660	660	700	106 %
3.	HO				
4.	Reklame	13	13	13	100 %
5.	TDP	467	467	462	99 %
6.	IUI	2	1	1	100 %
7.	TDI				
8.	SIUP	461	461	466	101 %
9.	TDG/R	3	3	3	100 %
10.	IUA	2	1	1	100 %
11.	IT				
12.	IUA - PP	46	46	41	89 %
13.	IT - PP	0	0	0	0
14.	IBA dan Log Pond	111	111	107	96 %
15.	IUJK	94	94	112	119 %
Jumlah		3.027	3.025	3.134	-

Sumber : KPTP Kab. Kotawaringin Barat

Selama Tahun 2014 KPTP telah mengeluarkan berbagai izin usaha sebanyak 3.134 Buah, yang meliputi : IMB Rumah sebanyak 1.229 buah, SITU / HO sebanyak 700 buah, Reklame 13 buah, TDP sebanyak 462 buah, IUI dan TDI sebanyak 1 buah, SIUP sebanyak 466 buah, TDG/R sebanyak 3 buah, IUA dan IT sebanyak 1 buah, IUA-PP sebanyak 41 buah, IT – PP sebanyak 0

buah, Izin Bangunan Air/Log Pond dan Dokumen Kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebanyak 107 buah, IUJK sebanyak 112 buah, dengan kontribusi penyumbang PAD sebesar Rp. 5.620.382.053 dari penarikan retribusi jasa administrasi perizinan.

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar 2.428.340.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.207.789.778,- atau 90,92 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.65

**Program / Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Perijinan (KPTP)**

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	933.428.450	836.952.591	89,66	98,52	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	11	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	98,52	%	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	138.590.600	95.852.591	69,16	92,78	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan KPTP	12	12	bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Inspektorat untuk menunjang terlaksananya tupoksi	100	100	%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	1.800.000	1.092.200	60,68	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	4 1	3 1	unit unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas	100	75	%	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	97.437.500	96.842.500	99,39	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan di lingkungan KPTP	12	12	bulan	Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan	100	100	% %	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa kebersihan kantor	19.114.000	17.990.500	94.12	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	1 1	1 1	orang paket	Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan KPTP	100	100	%	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	14.900.000	14.460.000	97.05	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan KPTP berupa : ¼ Mesin tik ¼ Komputer PC ¼ Laptop/notebook ¼ Printer	1 10 6 8	- 10 6 8	unit unit unit unit	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan KPTP	100	98,66	%	
Penyediaan alat tulis kantor	31.747.900	31.747.900	100	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	12	12	bulan	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada KPTP	100	100	%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72.810.000	72.610.000	99.73	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa amplop surat berkop dinas, blanko, spanduk	1	1	paket	Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada KPTP	100	100	%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4.280.500	4.280.500	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor	12	12	bulan	Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	470.823.000	449.993.000	95.58	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ¼ Mesin hitung ¼ Rak server ¼ Komputer mainframe/ server ¼ Komputer dekstop ¼ komputer note book ¼ printer ¼ Peralatan jaringan computer ¼ GPS ¼ Sistim Informasi Perizinan	1 1 2 2 1 3 1 1 1 1	1 1 2 2 1 3 1 1 1 1	unit unit unit unit unit unit unit unit unit Paket	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran kerja	100	100	%	
Penyediaan makanan dan minuman	9.510.000	5.858.000	61,60	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat	2 120	2	orang OK	Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72.414.950	46.225.400	63,83	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.384.103.300	1.275.935.285	92,18	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	4	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	
Pembangunan gedung kantor	1,268.333.500	1.169.034.000	92,14	100	Terlaksananya Pembangunan gedung kantor KPTP Tahap II	1	1	paket	Terwujudnya ketrersediaan gedung kantor yang representatif dan memadai	100	100	%	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	60.855.800	56.500.000	92,84	100	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor berupa : ¼ Lemari arsip ¼ AC Split dan AC Blower ¼ Meja kerja ¼ Kursi kerja ¼ Kulkas/ lemari es	2 3 4 1 1	2 3 4 1 1	Buah Unit Buah Buah buah	Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.486.000	47.938.000	94,95	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	4 1	3 1	unit unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	75	%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.428.000	2.463.285	55.63	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa Air	4	4	unit	Terwujudnya peningkatan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Conditioner (AC) dan mesin potong rumput	1	1	unit					
Program peningkatan disiplin aparatur	25.760.000	25.213.000	97,88	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	25.760.000	25.213.000	97,88	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian (PDH) pegawai di lingkungan KPTP	52	49	stel	Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	82.410.000	67.418.902	81,81	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	%	
Pendidikan dan pelatihan formal	82.410.000	67.418.902	81,81	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti : ¼ Diklat pemantapan aparatur ¼ Pendidikan dan pelatihan SDM	1 6	1 6	tahun orang	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM pegawai sesuai dengan bidang tugas masing- masing	100	100	%	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.638.250	2.270.000	86,04	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3.	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.182.000	967.000	81.81	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	10	buku	Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	%	
Penyusunan laporan keuangan semesteran	274.250	225.000	82,04	100	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	10	10	buku	Terpenuhinya ketersediaan aporan keuangan semesteran	100	100	%	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.182.000	1.078.000	91,20	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10	10	buku	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	

Permasalahan Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan :

1. Belum optimalnya pelayanan Perizinan/Non Perizinan sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Kurangnya tenaga terampil yang memiliki keahlian khusus terhadap kinerja bidang perizinan, misalnya ahli program komputer, ahli dalam pengolahan data base, dan lain-lain;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah :

1. Perlunya dukungan tenaga teknis yang profesional untuk meningkatkan pelayanan perizinan sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Menambah/ mengadakan sarana pendukung yang masih dirasa perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
3. Mengirimkan/mengikutsertakan staf Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pendidikan dan pelatihan teknis yang dapat meningkatkan kompetensi kinerja pegawai;

7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warganegaraanya, seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Maka tanggung jawab tersebut dipegang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Di tingkat daerah, Dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, internasional, maupun

pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Oleh karena itu, landasan nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial. Pertama, Bencana Alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena factor alam, hama penyakit tanaman, epidemic, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Kedua, Bencana Non Alam antara lain kebakaran hutan/lahan/permukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Ketiga, Bencana Sosial antara lain berupa kerusuhan social politik dan konflik social dalam masyarakat yang sering terjadi.

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kesehatan PU, dll. Begitu pula pada Tingkat Kabupaten, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Sesuai dengan amanat undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 25, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun Pengisian dan Pelantikan pejabat eselon II, III dan IV dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2013.

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.322.770.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.261.807.129,00 atau 95,39 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.66

Program / Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program pelayanan administrasi perkantoran	571.624.100	555.126.028	97,11		Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Adm. Perkantoran	100	99,97	%	
Penyediaan jasa surat menyurat	350.000	215.000	61,42	100	Terlaksananya pengiriman surat dinas ke luar daerah Perangko Biaya Pengiriman Surat	50 10	50 10	lembar Paket	Terpenuhinya jasa surat menyurat	100	0	%	Surat dikirim lewat email
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	26.400.000	19.774.346	74,9	100	Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor Air PDAM Listrik Kantor Listrik Damkar Pembayaran Langganan Surat Kabar ((3 terbitan)) Belanja Jasa Speedy	12 12 12 12 12	12 12 12 12	bulan bulan bulan Bulan bulan	Tersedianya listrik, air bersih, komunikasi/telpon , koneksi internet, langganan koran	100	100	%	Penyerapan anggaran menyesuaikan dengan tagihan dari PLN, PDAM, Telkom, Koran
Penyediaan jasa administrasi keuangan	62.715.000	60.680.000	96,75	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan BKD	11	11	orang	Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa kebersihan kantor	19.219.000	18.202.500	94,71	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Belanja peralatan kebersihan & bahan pembersih sapu Ijuk Tangkai Panjang Sapu Bulu Ayam Sapu Debu Plastik Sapu Lidi Ember Plastik Pembersih Kaca Pembersih WC Pengharum Kloset Pengharum Ruangan Kain Pel Serbet Tangkai Pel Pembasmi Nyamuk Gayung Mandi Cangkul Lokal Parang Tebas Sabit / Lokal Sabun Wing Sabun Cuci Tangan Keranjang Sampah Keseset Kaki Kaca Cermin Kapur Barus Baskom Besar	2 1 2 5 2 3 11 11 11 1 1 2 2 4 2 3 2 22 22 12 4 1 5 3	2 1 2 5 2 3 11 11 11 1 1 2 2 4 2 3 2 22 22 12 4 1 5 3	Buah Buah B u a h Buah Buah Kaleng Btl Kaleng Kaleng Kodi Kodi Buah Kaleng Buah Buah Buah Tube Botol buah buah buah pack buah	Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan BK	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan alat tulis kantor	26.005.000	26.005.000	100	100	Terpenuhinya alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor : HVS Continus Form Stopmap Bantek Stopmap folio Stopmap schnelechter Map Ordner Map Plastik Mikapilo Pulpen Pilot Tinta Printer hitam Tinta Printer Warna Tinta Cap Bantalan cap Staples Anak Staples Pembuka Staples Buku Agenda Surat Buku Tamu Penggaris besi Buku Ekspedisi Buku Tulis Amplop Dinas Pelobang Kertas Ballpoint Spidol Tip Ex Fluid Pensil Standler Paper Klip	152 1 11 11 11 50 20 5 44 36 4 2 4 20 1 2 2 4 2 10 12 4 10 20 5 12 13	152 1 11 11 11 50 20 5 44 36 4 2 4 20 1 2 2 4 2 10 12 4 10 20 5 12 13	Rim Box Lusin Lusin Lusin buah B u a h Lusin botol Botol Botol Buah Buah Kotak B u a h B u a h Buah Set B u a h B u a h Pack Buah Buah Buah S e t Batang Kotak	Lancarnya administrasi kantor	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Binder klip	12	12	kotak					
					Staples Besar	1	1	buah					
					Catride Printer Hitam	10	10	buah					
					Catride Printer Warna	10	10	buah					
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.285.000	33.610.000	92,62	100	Belanja cetak cetak amplop kop dinas ukuran A 11 x 12	12	12	Pack	Terlaksananya keperluan barang cetak kantor	100	100	%	
					cetak amplop kop dinas ukuran C 12 x 17	12	12	Pack					
					Cetak amplop kop Bupati	12	12	Pack					
					Cetak amplop kop Setda	12	12	Pack					
					Cetak lembar disposisi 100 lembar	15	15	Buku					
					Cetak Peta Bencana	6	6	kecama tan lembar					
					Spanduk	10	10						
					Belanja Penggandaan								
					Foto copy	70000	70000	lembar					
					Penjilidan	150	150	Buku					
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.250.000	5.250.000	100	100	Tersedianya komponen instalasi listrik				Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor	100	100	%	
					Lampul SL	35	35	Buah					
					Terminal listrik	10	10	Buah					
					Kabel listrik	100	100	meter					

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Fitting listrik	10	10	Buah					
					Baterai kering	10	10	Kotak					
					Lampu Emergency	5	5	unit					
					Kabel Rool	2	2	pcs					
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	165.810.000	163.310.000	98,49	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa : Jasa Pembuatan Software Informasi Bencana Brankas Komputer PC Komputer All in One Digunakan untuk Papan Informasi Bencana Notebook Printer Printer Dot Metrik Printer + Infus UPS 1200 Va Kamera Kamera digital pocket Handy Cam Belanja Modal LCD Proyektor Belanja Modal Layar LCD Proyektor Wireless Amplifier	1 <							

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Horn Speaker	2	2	Buah					
					Belanja Modal	1	1	Buah					
					Pengadaan Mesin Faximile								
					Handy talky	8	8	Buah					
Penyediaan peralatan rumah tangga	14.485.000	13.215.000	91,23	100	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga				Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor untuk menunjang kelancaran kerja	100	100	%	
					Bendera/Umbul-umbul	1	1	paket					
					Piring kecil	20	20	Buah					
					Sendok makan	2	2	Lusin					
					Gelas	2	2	Lusin					
					Pisau Dapur Baik	1	1	Buah					
					Cangkir Porselin	1	1	lusin					
					Ceret	1	1	buah					
					Kompor Minyak	1	1	buah					
					Nampan	2	2	buah					
					Panci Sedang	1	1	buah					
					Serok Wajan	1	1	buah					
					Susuk Wajan	1	1	buah					
					Rak Piring	1	1	buah					
					Teko	2	2	buah					
					Tutup Gelas	1	1	lusin					
					Wajan	1	1	buah					
					Dispenser Panas Dingin	1	1	buah					
					Kulkas 1 pintu	1	1	buah					
Penyediaan makanan dan minuman	10.039.000	9.886.500	98,48	100	Terlaksananya penyediaan makan minum harian PHL	2	2	orang	Meningkatnya kinerja pegawai	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	205.066.100	204.977.682	99,95	100	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	Tahun	Tercapainya keputusan masalah kepegawaian	100	100	%	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	485.671.900	478.381.900	98,49	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	72,19	%	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	270.000.000	269.760.000	99,91	100	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	1	1	Unit	Meningkatnya kinerja	100	100	%	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	33.400.000	31.000.000	92,81	100	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor Air Conditioner Kipas Angin Televisi	5 4 2	5 4 2	Buah buah Buah	Meningkatnya kinerja	100	100	%	
Pengadaan mebeleur	139.671.900	135.171.900	96,77	100	Terlaksananya penyediaan meubeleur kantor berupa : Lemari arsip biasa Lemari filling kabinet Meja Eselon II Meja Eselon III Meja Biro Kecil (Eselon IV). Meja Staf Meja Rapat	6 6 1 4 9 7 8	6 6 1 4 9 7 8	Buah Buah buah buah Buah buah buah	Terpenuhinya kebutuhan meubeleur kantor untuk menunjang kelancaran kerja	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kursi Eselon II Kursi Eselon III Kursi Eselon IV Kursi Staf Belanja Modal Kursi Rapat Belanja Modal Sofa	1 4 9 7 30 1	1 4 9 7 30 1	buah buah buah buah buah buah					
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000	29.850.000	99,5	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	1	tahun	Terwujudnya lingkungan kerja yang asri	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12.600.000	12.600.000	100	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	2	2	Unit					
Program peningkatan disiplin aparatur	32.025.000	32.025.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	42	42	stel	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	32.025.000	32.025.000	100	100	Tersedianya pakaian dinas :	42	42	stel	Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	923.000	923.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan laporan keuangan semesteran	353.000	353.000	100	100	Tersedianya dokumen laporan semesteran	5	5	dok	Tersusunnya laporan keuangan semester	100	100	%	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	570.000	570.000	100	100	Tersedianya dokumen akhir tahun	5	5	dok	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	

Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat:

1. Dikarena BPBD Kabupaten Kotawaringin barat merupakan instansi yang baru didirikan pada tahun 2014, masih kurangnya staf pelaksana.

Upaya Pemecahan masalah Badan Penanggulangan bencana Daerah kabupaten Kotawaringin Barat:

1. Usulan penambahan tenaga pelaksana baik dari CPNS maupun tenaga honorer untuk tahun 2015 mendatang

8. KANTOR KECAMATAN

Pemerintahan Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis dan vital karena merupakan ujung tombak dan berada pada garda terdepan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat, disamping pemerintahan desa dan kelurahan.

Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat menjelaskan bahwa tugas kecamatan adalah “Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”.

Tugas umum pemerintahan yang dimaksud meliputi:

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

a) KECAMATAN ARUT SELATAN

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 Kantor Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.517.142.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.222.757.210,- atau 88,30 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.67

**Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arut Selatan**

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	121.800.000	99.471.733	81,67	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya	12	12	Bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya untuk menunjang terlaksananya tupoksi	100	100	%	Penyerapan dana kurang optimal tetapi semua kebutuhan listrik, telp, air dan surat kabar terpenuhi.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	3.750.000	2.175.000	58,00	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4 ¼ Roda 3	15 1 1	15 1 1	Unit unit nit unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	Penyerapan dana kurang optimal karena jumlah pajak sepeda motor operasional masih kecil.
Penyediaan jasa administrasi keuangan	183.470.000	176.725.000	96,32	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta honor	12 140	12 140	Bulan RT	Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan dan terpeliharanya	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					petugas jaga malam				keamanan kantor				
Penyediaan jasa kebersihan kantor	60.236.000	56.077.500	93,10	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan serta peralatan kebersihan kantor	3	3	Orang	Terpeliharanya kebersihan kantorkecamatan dan kelurahan	100	100	%	
						1	1	paket					
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	45.390.000	12.185.000	26,85	93,39	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa : ¼ Faximile ¼ Printer ¼ Laptop ¼ Komputer PC ¼ LCD Proyektor	1			Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja	100	100	%	Adanya temuan inspektorat telah terjadi ketidaksesuaian jumlah unit yg dipelihara dengan yg ada dalam aset, sehingga penyerapan dana kecil, khusus untuk perawatan LCD Proyektor masih dalam proses kirim ke pabrikan sehingga blm bisa dilakukan pembayaran
						26	26	unit					
						4	4	unit					
						25	25	unit					
						1	1	Unit					
Penyediaan alat tulis kantor	68.945.500	68.539.000	99,41	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaranpelayanan dan pekerjaan rutin	1	1	Kec.	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada kantor kecamatan dan kelurahan diwilayah nya	100	100	%	
						7	7	Kel.					

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.050.000	19.671.000	75,51	84,88	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa spanduk dan foto copy penggandaan	1 7	1 7	Kec. Kel.	Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada kantor kecamatan dan kelurahan.	100	100	%	Serapan dana kecil karena adanya pembatasan jenis spanduk yang boleh dicetak
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	16.900.000	16.350.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan penerangan ruang kantor berupa : ¼ Lampu hemat energi ¼ Kabel rol	275 4	275 4	Buah buah	Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	73.132.500	72.750.000	99,48	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk berupa : ¼ CPU komputer ¼ Printer ¼ Laptop ¼ LCD Proyektor ¼ Televisi ¼ Wireles Portable	2 2 2 1 1 1	2 2 2 1 1 1	unit unit unit unit unit unit	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran kerja	100	100	%	
Penyediaan makanan dan minuman	50.484.000	44.742.000	88,63	95,15	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL kecamatan dan kelurahan serta makan minum rapat	11 16	11 16	Orang Rapat	Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	Selama tahun 2014 permasalahan yang muncul sebagian besar dapat diselesaikan

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	138.000.000	134.101.427	90,99	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan pembinaan desa	1	1	tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat dan desa	100	100	%	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
Pembangunan gedung kantor	83.850.000	81.191.500	96,83	100	Terlaksananya pembangunan pemasangan keramik dan plafond teras dan pengecatan balai pertemuan kel. Sidorejo, Pemasangan Teralis jendela Ktr. Kel. Madurejo serta tambah daya listrik kantor kelurahan	4	4	Paket	Terwujudnya peningkatan kualitas gedung kantor dan fasilitas pendukungnya sehingga dapat menunjang aktifitas perkantoran dengan baik	100	100	%	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	250.000.000	226.930.000	90,77	100	Terlaksananya pengadaan kendaraan R-4 operasional Camat	1	1	Unit	Pelaksanaan tugas camat berjalan sesuai rencana	100	100	%	
Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	28.400.000	21.899.250	77,11	100	Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa :				Terwujudnya peningkatan fasilitas perlengkapan gedung kantor untuk	100	100	%	Serapan dana kecil karena harga gorden yang diinginkan terlalu tinggi

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					¼ bendera Merah Putih ¼ gorden Aula ¼ umbul-umbul	3 1 1	3 1 1	Lbr Paket Paket	menunjang aktifitas PNS dalam rangka pelayanan masyarakat				sehingga spek pengadaan diturunkan
Pengadaan peralatan gedung kantor	16.500.000	16.500.000	100	100	Terlaksananya penyediaan: - AC - Mesin potong rumput	2 2	2 2	Unit Unit	Terciptanya kenyamanan dalam lingkungan kerja	100	100	%	
Pengadaan meubeleur	102.150.000	101.775.000	99,63	100	Terlaksananya penyediaan - kursi rapat dan - kursi kerja	150 28	150 28	Unit Unit	Terwujudnya kenyamanan dan kelancaran dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	69.620.000	69.000.000	99,11	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor kecamatan dan kelurahan	8	8	Kantor	Tercapainya kualitas gedung kantor yang memadai	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	172.392.000	147.413.000	85,51	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 3 ¼ Roda 4	16 1 1	16 1 1	unit unit unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.220.000	5.790.000	70,44	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa : ¼ Mesin potong	2	2	unit	Terwujudnya peningkatan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja	100	100	%	Biaya Pemeliharaan AC hanya pembersihan sehingga serapan dana tidak optimal.

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					rumput ¼ Air Conditioner (AC)	14	14	unit					
Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor	567.560.000	511.196.200	90,05	100	Terlaksananya rehab: ¼ Atap kantor kecamatan ¼ Gedung PKK kel. Baru (tahap I)	1 1	1 1	kantor gedung	Terwujudnya peningkatan kualitas gedung kantor dan fasilitas pendukungnya sehingga dapat menunjang aktifitas perkantoran dengan baik	100	100	%	
Program peningkatan disiplin aparatur					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur				Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur				
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	62.500.000	60.000.000	96,00	100	Tersedianya kebutuhan pakaian Linmas pegawai di lingkungan Kecamatan Arut Selatan	125	125	Stel	Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	62.500.000	60.000.000	96,00	100	Tersedianya kebutuhan pakaian adat di lingkungan Kecamatan Arut Selatan	125	125	Stel	Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian.	100	100	%	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	201.071.000	164.400.000	81,76	95	Terlaksananya : ¼ Pembayaran Insentif RT ¼ Sosialisasi peraturan pengelolaan keuangan desa ¼ Sosialisasi peraturan pengelolaan administrasi desa	12 40 40	12 40 40	Bulan peserta peserta	Terwujudnya pengetahuan aparatur desa pada peraturan pengelolaan keuangan desa	100	95	%	Kegiatan sosialisasi tidak terlaksana
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	98.250.000	48.153.600	49,01	71,11	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	15	11	Orang	Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku	100	73	%	Pelatihan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena ketergantungan dengan jadwal dari panitia. Beberapa pelatihan tanpa Kontribusi sehingga serapan dana kontribusi sangat minim
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	328.000	328.000	100	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	Doku men	Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	%	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	643.000	643.000	100	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	Doku men	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	

b) KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Dalam melaksanakan urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.225.274.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.165.721.389,00 atau 95,13 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.68

Program / Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kotawaringin Lama

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	556.528.600	528.982.929	95,1	89	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	12	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	90	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.981.000	1.240.000	62,6	50	Terlaksananya penyediaan perangko dan pengiriman paket surat dinas	178	0	lbr.	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat	100	75	%	Anggaran pembelian perangko tidak terealisasi karena menyesuaikan dengan kebutuhan
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	53.160.000	41.425.240	77,9	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya	12	12	bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya untuk menunjang terlaksananya tupoksi	100	100	%	Anggaran tidak terealisasi karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan tagihan yang diterima

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.700.000	2.700.000	100	100	Terlaksananya penyediaan jasa sewa generator untuk kebutuhan listrik pada kantor kecamatan dan kelurahan	12	12	bulan	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	4.380.500	3.821.600	87,2	0	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : √ Roda 2 √ Roda 4	5 1	5 1	Unit Unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	139.301.000	137.026.500	98,4	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan di lingkungan Kec. Kotawaringin Lama	12	12	bulan	Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan	100	100	%	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	102.890.600	99.092.600	96,3	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	6 1	6 1	orang paket	Terciptanya kebersihan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya	100	100	%	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.540.000	8.960.000	93,9	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa : √ Komputer √ Printer √ Mesin faximile	11 8 1	11 8 1	Unit Unit Unit	Tercapainya optimalisas pemakaian peralatan kerja dilingkungan kecamatan dan kelurahan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan alat tulis kantor	28.508.500	28.419.500	99,7	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	kec.	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya	100	100	%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.526.000	11.511.000	99,9	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa amplop dinas dan spanduk serta foto copy penggandaan	12	12	bulan	Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya	100	100	%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6.455.000	5.436.000	84,2	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan lingkungan kantor	12	12	bulan	Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	43.430.000	42.630.000	98,2	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : - laptop - printer - microphone - pemasangan jaringan internet	3 3 2 1	3 3 2 1	Unit Unit Buah Paket	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran kerja	100	100	%	
Penyediaan makanan dan minuman	37.656.000	35.245.000	93,6	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL kecamatan dan snack rapat	220	220	orang	Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	115.000.000	111.475.489	96,9	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	bulan	Terwujudnya sinkronisasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	100	%	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	575.734.900	550.636.500	95,6	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	6	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	
Pembangunan gedung kantor	188.000.000	186.728.000	99,3	100	Terlaksananya pembangunan aula kantor camat tahap IV dan pemasangan PDAM	1	1	paket	Terwujudnya peningkatan kualitas gedung kantor dan fasilitas pendukungnya sehingga dapat menunjang aktifitas perkantoran dengan baik	100	100	%	
Pengadaan kendaraan dinas operasional	240.000.000	226.930.000	94,6	100	Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas roda 4 untuk operasional camat	1	1	unit	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional untuk menunjang kelancaran kerja	100	100	%	
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	12.000.000	12.000.000	100	100	Terlaksananya penyediaan perlengkapan rumah jabatan berupa :				Tersedianya perlengkapan rumah jabatan camat	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					- Sofa - Rak Piring - Spring Bed - Kulkas	1 1 1 1	1 1 1 1	unit unit unit unit					
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15.825.000	14.275.000	90,2	100	Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa : - Umbul-umbul - Tangga - Sound System Aula	15 1 1	15 1 1	Buah Unit Paket	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor dan kenyamanan dalam lingkungan kerja	100	100	%	
Pengadaan Mebeleur	16.850.000	16.716.000	99,2	100	Terlaksananya penyediaan mebeleur kantor kecamatan	1	1	paket	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor kecamatan	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	7.329.900	7.195.000	98,2	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatan camat	1	1	unit/th	Terpeliharanya rumah jabatan camat	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	8.700.000	8.615.000	99,02	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor meliputi :	1	1	unit/th	Terpeliharanya rumah dinas kecamatan	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	17.000.000	17.000.000	100	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor meliputi : ~ Gedung kantor kelurahan ktw. Hulu ~ Gedung kantor kelurahan ktw. Hilir ~ Gedung kantor camat	200 200 300	200 200 300	m2 m2 m2	Tercapainya kualitas gedung kantor beserta fasilitas pendukung nya yang memadahi	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	20.000.000	13.104.000	65,52	100	Terlaksananya service dan penyediaan suku cadang mobil jabatan camat	1	1	unit/th	Terwujudnya optimalisasi fungsi mobil dinas camat	100	100	%	Anggaran yang terserap disesuaikan dengan tagihan dan jenis kerusakan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45.500.000	44.333.500	97,4	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda 4 ~ Roda 3	 5 1 1	 5 1 1	 unit unit unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	100	%	
Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung kantor	530.000	0	0	0	Terlaksananya pemeliharaan AC	1	0	unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi perlengkapan gedung kantor	100	0	%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.000.000	3.740.000	93,5	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa Mesin potong rumput	5	5	unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor	100	100	%	
Program peningkatan disiplin aparatur	35.540.000	34.440.000	96,9	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	35.540.000	34.440.000	96,9	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian (PDH) pegawai di lingkungan Kecamatan Kotawaringin Lama	58	58	stel	Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50.000.000	46.415.960	92,8	70	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	%	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	10.000.000	9.535.000	95,4	100	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan bagi aparatur perangkat desa	12	12	bulan	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur desa pada peraturan perundang undangan	100	100	%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	40.000.000	36.880.960	92,2	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	5	5	orang	Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.208.000	861.000	71,3	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	276.000	276.000	100	0	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	5	eksp.	Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	%	
Penyusunan laporan keuangan semesteran	346.000	-	0	0	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	5	5	eksp.	Terpenuhinya ketersediaan aporan keuangan semesteran	100	100	%	Pelaporan Keuangan Semesteran sudah dalam format online dan tinggal dicetak
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	586.000	585.000	99,8	0	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	Lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	6.262.500	4.645.000	74,2	100	Terlaksananya kegiatan pada Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Evaluasi rancangan paeraturan desa tentang APB Desa	6.262.500	4.645.000	74,2	100	Terlaksananya evaluasi penyusunan APB Desa	1	1	Keg.	Tercapainya adm. keuangan desa yang tertib dan baik	100	100	%	Anggaran ATK tidak digunakan karena sudah cukup melalui anggaran yang di rutin kantor

c) KECAMATAN KUMAI

Dalam melaksanakan urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 Kantor Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.303.365.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.231.135.210,00 atau 94,45 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.69

Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kumai

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	536.226.000	506.918.970	94,53	94,53	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	94,53	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.000	0	0	0	Terlaksananya penyediaan pengiriman paket surat	2	0	paket	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat	100	0	%	Surat diantar langsung ke Dinas/Instansi
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	58.500.000	46.539.520	79,55	79,55	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya	12	12	bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya untuk menunjang terlaksananya tupoksi	100	79,55	%	Belanja disesuaikan dengan tagihan dari pihak ke-3

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	2.150.000	2.029.700	94,40	94,40	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	10 1	10 1	Unit unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas	100	94,40	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan
Penyediaan jasa administrasi keuangan	107.907.500	105.177.000	97,47	97,47	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan di lingkungan Kec. Kumai	12	12	bulan	Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan	100	97,47	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan
Penyediaan jasa kebersihan kantor	50.938.000	47.334.000	92,92	92,92	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	3 1	3 1	orang paket	Terciptanya kebersihan kantorkecamatan dan kelurahan diwilayahnya	100	92,92	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.060.000	6.545.000	43,46	43,46	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa : ¼ Mesin tik ¼ Komputer ¼ notebook ¼ Printer	6 12 5 12	6 12 5 12	unit unit unit unit	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja dilingkungan kecamatan dan kelurahan	100	43,46	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan alat tulis kantor	54.836.600	54.836.600	100	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1 3	1 3	kec. kel.	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada kantor kecamatan dan kelurahan diwilayah nya	100	100	%	target terpenuhi
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.732.900	45.732.900	100	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa amplop dinas dan blanko serta foto copy penggandaan	1 3	1 3	kec. kel.	Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya	100	100	%	target terpenuhi
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5.755.000	5.755.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan lingkungan kantor	12	12	bulan	Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor	100	100	%	target terpenuhi
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6.000.000	6.000.000	100	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ¼ faxmile ¼ lemari kayu	1 2	1 2	unit unit	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran kerja	100	100	%	target terpenuhi

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan makanan dan minuman	57.530.000	56.800.750	98,73	98,73	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL kecamatan dan kelurahan serta snack rapat	12	12	bulan	Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	98,73	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	131.756.000	130.168.500	98,80	98,80	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	bulan	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	98,80	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	620.688.000	584.424.240	94,16	94,16	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	6	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	94,16	%	
Pembangunan gedung kantor	231.728.000	227.938.440	98,36	98,36	Terlaksananya pembangunan gedung kantor berupa : - Pembangunan garasi kec. - Lanjutan pembangunan aula kel. kumai hulu	1 1	Paket paket		Terpenuhi kebutuhan aula kel. kumai hulu dan garasi kecamatan	100	98,36	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan kendaraan dinas operasional	250.000.000	226.938.440	90,77	90,77	Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas roda 4 untuk operasional camat	1	1	unit	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional untuk menunjang kelancaran kerja	100	90,77	%	Belanja disesuaikan dengan harga barang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	34.560.000	34.234.300	99,06	99,06	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor meliputi : ¼ Kantor kecamatan ¼ Halaman kantor kec. ¼ Halaman 3 kelurahan ¼ Kantor 3 kelurahan	120 120 150 150	120 120 150 150	m2 m2 m2 m2	Tercapainya kualitas gedung kantor beserta fasilitas pendukung nya yang memadai	100	99,06	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	98.000.000	91.796.500	93,67	93,67	Terlaksananya service, suku cadang dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4 ¼ Mobil pemadam	10 1 1	10 1 1	unit unit unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	93,67	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.300.000	2.425.000	45,75	45,75	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa Air Conditioner (AC)	10	10	unit	Terwujudnya peningkatan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja	100	45,75	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan rutin/ berkala meubeleur	1.100.000	1.100.000	100	100	Terlaksananya pemeliharaan meubeleur kantor berupa : ¼ Almari kantor kec. ¼ Almari kantor kel.	8 3	8 3	Unit Kel.	Terpenuhinya fungsi dan ketersediaan meubeleur yang layak pakai	100	100	%	Target terpenuhi
Program peningkatan disiplin aparatur	32.500.000	32.000.000	98,64	98,64	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	98,46	%	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	32.500.000	32.000.000	98,64	98,64	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian (PDH) pegawai di lingkungan Kecamatan Kumai	65	65	stel	Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	98,64	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	32.500.000	28.150.000	86,62	86,62	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	86,62	%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	32.500.000	28.150.000	86,62	86,62	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	5	5	orang	Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku	100	86,62	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.551.000	3.542.000	99,75	99,75	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	99,75	%	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.242.000	1.239.000	99,76	99,76	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	Lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	99,76	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1.067.000	1.064.000	99,72	99,72	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	1	1	Lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran	100	99,72	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.242.000	1.239.000	99,76	99,76	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	Lap.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	99,76	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	77.900.000	76.100.000	97,69	97,69	Terlaksananya evaluasi penyusunan APB Desa	1	1	Keg.	Tercapainya administrasi keuangan desa yang tertib dan baik	100	97,69	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Evaluasi rancangan paeraturan desa tentang APB Desa	77.900.000	76.100.000	97,69	97,69	Terlaksananya evaluasi penyusunan APB Desa	1	1	Keg.	Tercapainya administrasi keuangan desa yang tertib dan baik	100	97,69	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan

d) KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

Dalam melaksanakan urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 851.826.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 745.351.729,00 atau 87,50 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

:

Tabel 4.70

Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkalan Banteng

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	431.078.000	385.768.949	89,49	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100		%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100	100	Terlaksananya penyediaan perangkat untuk kebutuhan pengiriman paket surat dinas	250	250	lbr.	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat	100	100	%	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	39.854.000	31.068.199	77,96	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan kantor kecamatan	12	12	bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan kantor kecamatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi	100	100	%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	4.300.000	1.957.800	45,53	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	11 10 1	8 7 1	unit unit unit	Terpenuhinya surat kelengk. kendaraan dinas utk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa administrasi keuangan	84.157.800	81.109.300	97,23	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan di lingkungan Kec. Pangkalan Banteng	12	12	bulan	Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan	100	100	%	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	31.545.600	29.236.600	91,83	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	1	1	orang	Terciptanya kebersihan dan kerapian kantor kecamatan	100	100	%	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	8.120.000	3.375.000	41,56	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa : ¼ Mesin tik ¼ Komputer ¼ Notebook ¼ Printer ¼ Mesin faximili	2 6 3 3 1	- 3 - 2 -	unit unit unit unit unit	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja dilingkungan kecamatan	100	100	%	Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan
Penyediaan alat tulis kantor	23.930.750	22.861.550	95,53	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	paket	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada kantor kecamatan	100	100	%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.065.750	22.861.550	95,53	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa spanduk, bulletin, amplop berkop dinas	12	12	bulan	Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada kantor kecamatan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					serta foto copy penggandaan								
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3.816.000	1.908.000	50,00	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan lingkungan kantor	4	4	jenis	Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	27.500.000	27.400.000	99,64	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ¼ Komputer PC ¼ Komputer Notebook ¼ Printer	 2 1 2	 2 1 2	 unit unit unit	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran kerja	100	100	%	
Penyediaan makanan dan minuman	26.251.000	24.97.000	91,79	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL kecamatan dan snack rapat	 3 1	 3 1	 orang tahun	Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	156.037.100	139.352.500	89,31	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	bulan	Terwujudnya sinkronisasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	367.720.000	324.763.580	88,32	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8	8	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	
Pengadaan kendaraan dinas operasional	250.000.000	226.930.000	90,77	100	Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas roda 4 untuk operasional Camat	1	1	unit	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional untuk menunjang kelancaran kerja	100	100	%	
Pengadaan peralatan gedung kantor	12.010.000	12.000.000	99,92	100	Terlaksananya penyediaan AC untuk kebutuhan gedung kantor	2	2	unit	Terciptanya kenyamanan dalam lingkungan kerja	100	100	%	
Pengadaan meubeleur	21.500.000	21.100.000	98,14	100	Terlaksananya penyediaan : ¼ Almari Besi ¼ Meja ½ biro	3 4	3 4	Buah Buah	Terpenuhinya kebutuhan meubeleur kantor untuk menunjang kelancaran kerja	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	2.360.000	2.360.000	100.00	100	Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan kecamatan	20	20	m2	Terwujudnya kondisi rumah jabatan yang memadai dan layak huni	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	3.540.000	3.444.000	97,29	100	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas kecamatan	30	30	m2	Terwujudnya kondisi rumah dinas yang memadai dan layak huni	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.580.000	9.576.000	99,96	100	Terlaksananya pemeliharaan : ¼ Gedung Kantor ¼ Aula Kantor ¼ Mushola ¼ Pagar Kantor ¼ Kantor PKK	20 20 10 250 10	20 20 10 250 10	m2 m2 m2 m m2	Terwujudnya kondisi lingkungan kantor yang nyaman , asri dan representatif	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	62.780.000	49.093.580	77,77	100	Terlaksananya service dan penggantian suku cadang serta penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	10 1	7 1	unit unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.950.000	260.000	4,37	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa : ¼ BBM mesin ptg rumput ¼ mesin potong rumput , ¼ AC, dan ¼ Generator Set	2 2 3	1 - -	unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor	100	100	%	Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan
Program peningkatan disiplin aparatur	14.190.000	14.190.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	15.820.000	14.820.000	93,68	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian (PDH) pegawai di lingkungan kantor Kecamatan Pangkalan Banteng	32	32	stel	Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	22.000.000	6.920.000	31,45	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	22.000.000	6.920.000	31,45	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	2	1	kali	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya	100		%	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.988.000	000	00.0	00.0	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	996.000	000	00	00	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	0	eksp.	Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	%	Kegiatan sdh terlaksana namun anggaran tdk terealisasi

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan laporan keuangan semesteran	996.000	000	00	00	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	12	0	eksp.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran	100	100	%	Kegiatan sdh terlaksana namun anggaran tdk terealisasi
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	996.000	000	00	00	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	12	0	eksp.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	Kegiatan sdh terlaksana namun anggaran tdk terealisasi
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	12.220.000	12.220.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100	100	%	
Evaluasi rancangan paeraturan desa tentang APB Desa	12.220.000	12.220.000	100	100	Terlaksananya pendampingan penyusunan APBDes oleh Tim	17	17	desa	Tercapainya administrasi keuangan desa yang tertib dan baik	100	100	%	

e) KECAMATAN PANGKALAN LADA

Dalam melaksanakan urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 Kantor Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.132.514.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 980.602.629,00 atau 86,58 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.71

Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkalan Lada

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	402.928.270	358.569.229	88,99	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100		%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	301.000	0	0	0	Terlaksananya 1.penyediaan perangko : 2.pengiriman paket surat dinas :	36	0	Lbr	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat	100	100	%	
						25	25	Exp					
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	53.400.000	27.514.059	51,52	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan listrik di lingkungan kantor kecamatan	12	12	bulan	Terpenuhinya kebutuhan listrik di lingkungan kantor kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan kerja	100	100	%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	3.000.000	1.544.800	51,49	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda	8 1	8 1	unit unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa administrasi keuangan	106.514.100	102.072.200	95,82	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan di lingkungan Kec. Pangkalan Lada	12	12	bulan	Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan	100	100	%	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	33.781.500	31.534.500	93,34	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	2 15	2 15	orang jenis	Terciptanya kebersihan dan kerapian kantor kecamatan	100	100	%	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.860.000	4.800.000	98,76	78,26	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa ~ Komputer PC ¼ Komputer Note Book ¼ printer	 3 3 4	 3 3 4	 unit unit unit	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja dilingkungan kecamatan	100	100	%	
Penyediaan alat tulis kantor	24.047.000	24.047.000	100	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	paket	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada kantor kecamatan	100	100	%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.450.000	19.500.000	95,35	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa spanduk, bulletin, amplop berkop dinas serta foto copy penggandaan	12	12	bulan	Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada kantor kecamatan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.017.900	2.017.900	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan lingkungan kantor	12	12	bulan	Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	51.500.000	45.078.000	87,53	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ~Komputer Desktop ¼ printer	2 2	2 2	Unit Unit	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran kerja	100		%	
Penyediaan peralatan rumah tangga	5.547.200	5.172.200	93,23	100	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga kantor	1	1	paket	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor untuk mendukung peningkatan kinerja	100	100	%	
Penyediaan makanan dan minuman	15.751.000	13.530.000	85,89	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL kecamatan dan snack rapat	3 1	3 1	orang tahun	Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	81.758.570	81.758.570	100	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	bulan	Terwujudnya sinkronisasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	100	%	Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	658.342.600	595.891.400	86,93	89,26	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7	7	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	
Pembangunan gedung kantor	185.000.000	181.036.700	97,85	100	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	1	1	paket	Terwujudnya ketersediaan tempat kerja yang memadai dan representatif	100	100	%	
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	250.000.000	226.930.000	90,77	100	Terlaksananya pengadaan kendaraan	1	1	unit	Terwujudnya kendaraan operasional yang layak.	100	100	%	
Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	7.000.000	6.820.000	97,42	100	Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa : ¼ Lemari arsip	2	2	buah	Terwujudnya peningkatan fasilitas perlengkapan gedung kantor untuk menunjang aktifitas PNS dalam rangka pelayanan masyarakat	100	100	%	
Pengadaan peralatan gedung kantor	23.600.000	17.600.000	74,57	100	Terlaksananya penyediaan AC untuk kebutuhan gedung kantor	4	4	unit	Terciptanya kenyamanan dalam lingkungan kerja	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	4.720.000	4.326.300	91,65	100	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas pejabat kecamatan	40	40	M2	Terwujudnya kondisi rumah dinas yang memadai dan layak huni	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	11.580.000	11.504.300	99,34	100	Terlaksananya pemeliharaan GPU dan pagar serta penataan lingkungan kantor	2	2	Keg.	Terwujudnya kondisi lingkungan kantor indah, asri dan nyaman	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	69.000.000	46.109.100	66,82	70	Terlaksananya service dan penggantian suku cadang serta penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	8 1	8 1	unit unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.090.000	3.090.000	100	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa : ¼ AC split ¼ Mesin potong rumput	3 5	3 5	unit unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor	100	100	%	
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas	104.352.600	98.475.000	94,36	100	Terlaksananya rehab rumah dinas camat	1	1	Unit	Terwujudnya rumah layak huni	100	100	%	
Program peningkatan disiplin aparatur	12.000.000	11.880.000	98,57	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12.000.000	11.880.000	99,00	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	24	24	stel	Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	43.750.000	0	97,25	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	5	0	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	43.750.000	0	0	0	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	5	0	kali	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya	100	0	%	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.270.000	2.162.000	95,24	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	950.000	872.000	100	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	10	eksp.	Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	%	
Penyusunan laporan keuangan semesteran	320.000	320.000	100	100	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	10	10	eksp.	Terpenuhinya ketersediaan aporan keuangan semesteran	100	100	%	Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000	970.000	97,00	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10	10	eksp.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	12.400.000	12.100.000	97,58	100	Terlaksananya kegiatan pada Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100	100	%	
Evaluasi rancangan paeraturan desa tentang APB Desa	12.400.000	12.100.000	97,58	100	Terlaksananya pendampingan penyusunan APBDes oleh Tim	11	11	desa	Tercapainya administrasi keuangan desa yang tertib dan baik	100	100	%	

f) KECAMATAN ARUT UTARA

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014, Kantor Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 846.087.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 755.180.429,00 atau 89,26 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.72

Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arut Utara

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	344.069.000	321.959.529	93,57	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	11	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	%	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12.000.000	9.602.444	87,29	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan listrik di lingkungan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya	12	12	bulan	Terpenuhinya kebutuhan listrik di lingkungan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya untuk kelancaran pelaksanaan kerja	100	100	%	Adanya efisiensi/penghematan dalam penggunaan sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	2.400.000	1.344.800	48,22	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	8 1	8 1	unit unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan
Penyediaan jasa administrasi keuangan	85.455.000	84.260.000	98,60	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan di lingkungan Kec. Arut Utara	12	12	bulan	Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.693.700	28.094.700	91,53	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	2 7	2 7	orang jenis	Terciptanya kebersihan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya	100	100	%	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.500.000	3.500.000	100	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa : ¼ Komputer	7	7	unit	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja dilingkungan kecamatan dan kelurahan	100	100	%	
Penyediaan alat tulis kantor	9.570.000	9.570.000	100	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	paket	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada kantor kecamatan dan kelurahan diwilayah nya	100	100	%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.380.000	4.380.000	100	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa spanduk serta foto copy penggandaan	12	12	bulan	Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada kantor kecamatan dan kelurahan diwilayah nya	100	100	%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1.000.000	1.000.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan lingkungan kantor	12	12	bulan	Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	29.620.000	29.620.000	100	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ¼ Printer ¼ Notebook ¼ Umbul-umul ¼ Kipas Angin Tornado	2 1 100 8	2 1 100 8	unit unit lembar unit	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran kerja	100	100	%	
Penyediaan makanan dan minuman	21.450.000	17.312.000	80,71	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL kecamatan dan snack rapat	3 300	3 300	orang orang	Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	145.000.300	133.463.085	92,04	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	bulan	Terwujudnya sinkronisasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	100	%	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	416.833.000	391.780.000	93,99	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	4	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan kendaraan dinas operasional	250.000.000	226.930.000	90,77	100	Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas roda 4 untuk operasional Camat	1	1	unit	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional untuk menunjang kelancaran kerja	100	100	%	
Pengadaan meubeleur	33.600.000	33.600.000	100	100	Terlaksananya penyediaan : ¼ Kursi rapat ¼ Meja rapat kantor ¼ Meja rapat Gedung Aula	12 4 12	12 4 12	unit unit unit	Terpenuhinya kebutuhan meubeleur kantor untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	127.233.000	125.250.000	98,44	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	8 1	8 1	unit unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.000.000	6.000.000	100	100	Terlaksananya penyediaan BBM dan pemeliharaan Generator set	3	3	unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor	100	100	%	
Program peningkatan disiplin aparatur	16.000.000	16.000.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	16.000.000	16.000.000	100	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian (PDH) pegawai di lingkungan Kecamatan Arut Utara	32	32	stel	Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	12.000.000	3.300.000	27,50	100	Terlaksananya kegiatan pada program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	100	100	%	
Pemindahan tugas PNS	12.000.000	12.000.000	27,50	100	Terlaksananya perjalanan dinas pindah tugas	3	1	orang	Terpenuhinya fasilitas pegawai yang melaksanakan pindah tugas	100	100	%	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	46.000.000	12.455.900	27,08	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	%	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	6.000.000	5.250.000	87,50	100	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan bagi aparatur perangkat desa	12	12	bulan	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur desa pada peraturan perundang undangan	100	100	%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	40.000.000	7.205.900	18,01	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	4	1	orang	Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku	100	100	%	Keuangan tidak terealisasi karena undangan bimtek banyak dari penyelenggara pihak swasta, kedepan undangan bimtek agar dari Dep.Dalam Negeri,sehingga

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													penggunaan anggaran dpt terlaksana sesuai dengan peraturan.
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.000.000	500.000	25	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000	250.000	25	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	10	eksp.	Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	%	Kuangan tidak terealisasi karena terlambat dalam mengajukan SPM
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000	250.000	25	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10	10	eksp.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	Kuangan tidak terealisasi karena terlambat dalam mengajukan SPM
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	9.185.000	9.185.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100	100	%	
Evaluasi rancangan paeraturan desa tentang APB Desa	9.185.000	9.185.000	100	100	Terlaksananya pembayaran honorarium : ¼ Tim pendamping ADD	4	4	orang	Tercapainya administrasi keuangan desa yang tertib dan baik	100	100	%	

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan :

1. Pelimpahan wewenang tugas-tugas yang diberikan kepada Camat dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kotawaringin Barat kepada Camat, dirasa masih belum bisa mengakomodasi kebutuhan dalam penerapan dan pelaksanaannya sebagai Perangkat Daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga pendelegasian tersebut tidak bisa berjalan maksimal sesuai harapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Terbatasnya jumlah SDM pegawai yang memiliki kompetensi yang diperlukan yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantoran;
3. Belum dipisahkannya kelurahan dari SKPD Kecamatan membuat perbandingan pagu anggaran antara Belanja Pegawai (Belanja tidak langsung) dengan belanja Kegiatan (Belanja langsung) tidak proporsional;
4. Pemahaman yang kurang tepat oleh SKPD lain maupun masyarakat dan swasta tentang SKPD Kecamatan khususnya berkaitan dengan fungsi kewilayahan menyebabkan meluasnya cakupan tugas yang harus dilaksanakan;
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan kantor kecamatan;

Upaya Pemecahan Masalah yang dilakukan Kecamatan :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 5 tahun 2005 dengan tidak meninggalkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai salah satu acuan operasionalisasi di lapangan;
2. Peningkatan kinerja aparatur dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi SDM pegawai;
3. Meningkatkan koordinasi di tingkat bagian maupun lintas instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran belanja langsung;
5. Mengoptimalkan koordinasi dan pelayanan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kepentingan masyarakat dan pemerintah;
6. Melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran yang terbatas.

4.1.21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**a) Kondisi Umum**

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses membangun masyarakat melalui pengembangan kemampuan, perubahan perilaku dan pengorganisasian masyarakat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berdaya. Untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya diperlukan pendekatan yang tepat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di desa.

Terbatasnya akses dan belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat (termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan) dapat berpengaruh pada pemberdayaan ekonomis produktif masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat untuk mandiri.

Upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dilakukan serta dititikberatkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan kelembagaan dalam masyarakat serta pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, selain itu pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui pemantapan nilai sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna. Berikut adalah indikator dan capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa th. 2013-2014 :

Tabel 4.73
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun 2013-2014

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2013	2014		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Jumlah desa yang terbaharui profil desanya	desa	0	94	75	80
2.	Jumlah musyawarah pembangunan desa/ kelurahan yang dapat difasilitasi	desa/kel.	94	94	94	100
3.	Terlaksananya bulan bakti gotong royong masyarakat	desa	1	1	1	100
4.	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang terlatih	orang	0	188	188	100
5.	Jumlah desa/ kelurahan yang mendapat akses TTG	desa/kel.	2	1	0	0
6.	Jumlah usaha ekonomi masyarakat perdesaan	Klpk.	-	6	6	100
7.	Peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	persen	-	100	99,22	99,22
8.	Peningkatan kualitas lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan	persen	-	100	92,14	92,14

Sumber : BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014

Dalam upaya pengentasan dan percepatan desa tertinggal pemerintah daerah akan selalu meningkatkan peranan dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.229.780.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.889.890.919,00 atau 89,47%. Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.74
Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ID	2.313.120.000	1.960.076.992	84,73	86,57									
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	461.255.361	421.996.992	89,64	91,49	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	13	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	95	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.285.000	13.285.000	100	100	Terlaksananya pembelian perangko dan materai	3.005 50	3.005 50	lembar lemba r	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat sehingga persentase penyampaian surat terpenuhi	100	10	%	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	84.240.000	54.904.601	65,17	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar	12	12	bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar untuk menunjang terlaksananya tupoksi	100	100	%	Realisasi sesuai kebutuhan dan penggunaan jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	1.160.000	1.032.300	88,99	98	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :				Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung	100	98	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					¼ Roda 2 ¼ Roda 4	3 1	3 1	unit unit	kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas				
Penyediaan jasa administrasi keuangan	61.332.500	58.142.500	94,79	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan BPMD	12	12	bulan	Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan	100 100	100 100	% %	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	27.769.200	26.752.700	96,33	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	1 1	1 1	orang paket	Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan kantor BPMD	100	100	%	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.940.000	20.740.000	99,04	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan BPMD berupa : ¼ Mesin tik ¼ Komputer PC ¼ Komputer notebook ¼ Printer ¼ Proyektor ¼ Mesin faximili	 1 14 12 10 1 1	 1 14 12 10 1 1	 unit unit unit unit unit unit	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan BPMD	100	100	%	Realisasi sesuai kebutuhan
Penyediaan alat tulis kantor	58.118.800	58.105.800	99,97	100	Terlaksananya penyediaan ATK untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	paket	Tercapainya kelancaran pelaksana an tupoksi pada BPMD	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.250.000	16.250.000	100	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa spanduk foto copy dan penjilidan	65.000		lbr	Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada BPMD	100	100	%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1.200.000	1.200.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor berupa : ¼ Bolamp SL ¼ Bolamp SL glass ¼ Kabel box	20 10 4	20 10 4	buah buah buah	Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor BPMD	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	30.193.300	30.050.000	99,52	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ¼ komputer notebook ¼ Printer ¼ Mesin Tik	2 1 1	2 1 1	unit unit unit	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	
Penyediaan makanan dan minuman	6.032.000	3.892.000	64,52	80	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat	2 1	2 1	Kali Tahun	Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	80	%	Realisasi sesuai kebutuhan

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	140.734.561	137.642.091	97,80	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	100	%	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	315.672.775	292.195.395	92,56	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	6	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	
Pembangunan gedung kantor	80.000.000	74.809.000	93,51	100	Terlaksananya penambahan daya listrik kantor dan rehabilitasi lantai kantor	2	2	paket	Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas kantor	100	100	%	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	40.860.000	36.800.000	90,06	100	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	2	2	Unit	Terpenuhinya kendaraan dinas roda dua	100	100	%	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	75.600.000	68.728.000	90,91	100	Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa : J Flitsir J Lemari J Meja J Kursi Eselon IV J Sofa	120 2 1 11 2	120 2 1 11 2	Meter Buah Buah Buah Set	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	35.251.775	33.725.000	95,66	100	Terlaksananya pemeliharaan gedung gedung berupa : ¼ pengecatan dinding kantor dan plafon ¼ pengecatan halaman kantor ¼ pengecatan pagar kantor ¼ kilap kusen, jendela, pintu ¼ perbaikan plafon ¼ paving garasi ¼ pemasangan teralis	2.150 380 100 600 25 45 1	2.150 380 100 600 25 45 1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 paket	Terpenuhinya fungsi gedung kantor dengan baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	76.011.000	70.183.395	92,33	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	3 1	3 1	unit unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.950.000	7.950.000	100	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa Air Conditioner (AC)	15	15	unit	Terwujudnya peningkatan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja	100	100	%	Realisasi sesuai kebutuhan
Program peningkatan disiplin aparatur	27.500.000	27.215.000	98,96	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	17.500.000	17.465.000	99,80	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan BPMD	37	37	stel	Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%	
Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari Tertentu	10.000.000	9.750.000	97,50	100	Tersedianya kebutuhan pakaian olahraga pegawai BPMD	39	39	Stel	Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian	39	39	Stel	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	45.617.600	31.519.068	69,09	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	%	Dipergunakan sesuai kebutuhan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	45.617.600	31.519.068	69,09	80	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	1	1	thn.	Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku	80	80	%	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.482.500	2.482.500	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	100	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	5	buku	Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	%	
Penyusunan laporan keuangan semesteran	459.500	459.500	100	100	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	1	1	buku	Terpenuhinya ketersediaan aporan keuangan semesteran	100	100	%	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.023.000	1.023.000	100	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	buku	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	547.697.400	418.294.402	76,37	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100	100	%	
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	300.359.000	276.780.402	92,14	100	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM)	1	1	kali	Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat desa/ kelurahan dalam pembangunan	100	100	%	
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Tehnis dan Masyarakat	33.255.000	28.855.000	86,76	100	Terlaksananya sosialisasi cara pengolahan dan penggunaan air bersih serta pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati dan ekosistem	80	80	orang	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat akan lingkungan hidup di sekitarnya	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	214.083.400	112.659.000	52,62	100	Terlaksananya survey pembangkit listrik tenaga air dan peran serta gelar TTG	1 1	- 1	Kali paket	Terwujudnya peran serta aktif masyarakat dalam membangun desa	100	50	%	
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	536.579.100	522.989.300	97,46	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	4		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	100		%	
Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	266.579.100	259.360.100	97,29	100	Terlaksananya : ¼ Monitoring Pasar Desa ¼ Pelatihan pengelolaan pasar desa ¼ Pembinaan pengelolaan pasar desa ¼ Lomba pasar desa ¼ Pembinaan pedagang pasar ¼ Monev Raskin ¼ Pelatihan Kewirausahaan	6 6 2 6 6 6 6	6 6 2 6 6 6 6	Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.	Terwujudnya persiapan pengembangan pasar desa menjadi BUMDes pada 6 kecamatan	100	100	%	
Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan	270.000.000	263.629.200	97,64	100	Terlaksananya penyediaan dana pembinaan administrasi proyek (PAP) untuk	6	6	Kec.	Terpenuhinya pendampingan pengelolaan dana bantuan langsung masyarakat (BLM)	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2014				dan dana operasional kegiatan (DOK) PNPM MPd dari APBN maupun APBD untuk kegiatan fisik, pelatihan, peningkatan kapasitas maupun simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) untuk 10.527 RTM pada 6 kec.				
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	624.945.422	587.718.262	94,04	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100	100	%	
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	168.006.000	166.701.000	99,22	100	Terlaksananya : ¼ sosialisasi dana bantuan keuangan provinsi untuk desa dan kelurahan tahun 2014 ¼ pemilihan juara desa PM2L tahun 2014 ¼ Sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi desa lokasi	6 3 6	6 3 6	kec. Desa desa	Terwujudnya peningkatan pemahaman, kesadaran dan gerakan pembangunan partisipatif oleh masyarakat desa dan meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan dan pembangunan desa	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					PM2L ¼ Pembekalan bagi aparaturnya desa, anggota BPD, kelembagaan desa dan PM2L tahun 2014	3	3	desa					
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	45.043.960	44.310.000	98,37	100	Terlaksananya pendampingan musyawarah rencana pembangunan desa	6	6	Kec.	Terpenuhinya ketersediaan rencana pembangunan desa dalam RPJMD Desa dan RKP Desa tahun 2015	100	100	%	
Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	254.895.462	221.737.262	86,99	100	Terlaksananya penyaluran program PMT-AS dan lomba desa/ kelurahan	325 3	325 3	Siswa Desa/ kel.	Terwujudnya peningkatan Ketahanan fisik dan daya Tahan tubuh siswa dan meningkatnya motivasi masyarakat desa	100	100	%	
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	157.000.000	154.970.000	98,70	100	Terlaksananya monitoring penyaluran dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan	6	6	Kec.	Terpantaunya penyaluran dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan	100	100	%	
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	83.109.220	69.345.000	83,43	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif (P2W - KSS)	83.109.220	69.345.000	83,43	100	Terlaksananya pelatihan perempuan di pedesaan	60	60	orang	Terwujudnya peningkatan ekonomi keluarga	100	100	%	
Program penguatan penyusunan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan	289.871.122	236.530.400	81,59	100	Terlaksananya kegiatan pada Program penguatan penyusunan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan	1		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program penguatan penyusunan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan	100	100	%	
Penyusunan pendataan profil desa dan kelurahan	289.871.122	236.530.400	81,59	100	Terlaksananya sosialisasi dan penyusunan profil desa	94	75	Desa	Terpenuhinya target ketersediaan profil desa di wilayah kabupaten Kotawaringin Barat	100	80	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan	
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan		
		Realisasi	(%)											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
DA														
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	295.050.000	278.209.600	94,2	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100		%		
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	161.850.000	161.400.000	99,7	100	Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan pengelolaan keuangan desa	282		orang	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman perangkat desa tentang pengelolaan keuangan desa	100		%		
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	68.200.000	67.900.000	99.6	100	Terlaksananya penyelenggaraan rapat kerja camat, kepala desa/kelurahan, BPD dan DKA se kabupaten Kotawaringin Barat	183		orang	Terwujudnya manajemen pemerintahan desa yang baik	100		%		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	65.000.000	48.909.600	75.2	100	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	81		desa	Terwujudnya manajemen pemerintahan desa yang baik	100		%		

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk peduli lingkungan melalui sosialisasi penggunaan air bersih dan pelestarian Sumber Daya Alam sebanyak 80 orang kader dengan tingkat capaian 86,76 %;
- 2) Meningkatnya kemampuan pengelola PNPM-MPd dalam rangka meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan melalui monitoring evaluasi kegiatan PNPM-MPd yang berkelanjutan dengan tingkat capaian 97,64 %;
- 3) Terlaksananya monitoring pengelolaan pasar desa dan Pelatihan Pasar Desa sebagai bahan pengembangan pasar desa dalam rangka meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan di desa dan kelurahan di 6 kecamatan yang ada di Kotawaringin Barat dengan tingkat capaian sebesar 97,29 %;
- 4) Terlaksananya pembinaan pembangunan desa tertinggal dalam program PM2L dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan desa / kelurahan di Desa Sei. Cabang Kecamatan Kumai, Desa Kerabu Kecamatan Arut Utara dan Desa Riam Kecamatan Arut Utara.
- 5) Meningkatnya ketahanan fisik dan daya tahan tubuh siswa anak sekolah (SD/MI/Ponpes Negeri dan Swasta di 6 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat) melalui program PMT - AS berupa pemberian kudapan yang dibagikan secara reguler;
- 6) Terlaksananya lomba desa / kelurahan tingkat kabupaten dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan desa/kelurahan. Pada tahun 2014 didapatkan Desa Teluk Bogam Kecamatan Kumai sebagai juara I tingkat Kabupaten dan Juara Harapan I Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) Terlaksananya sosialisasi PNPM-Integrasi di 6 kecamatan sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- 8) Terlaksananya pelatihan keterampilan perempuan di perdesaan sebanyak 60 orang dalam rangka memberi nilai tambah untuk kemajuan ekonomi keluarganya;
- 9) Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pedesaan dengan dilakukannya fasilitasi program PNPM Mandiri Pedesaan dan disalurkan bantuan hibah PNPM Mandiri Pedesaan sebesar Rp. 4.542.300.000,- dengan rincian :

a. Kecamatan Kumai sebesar	Rp.	1.093.680.000,-
b. Kecamatan Arsel sebesar	Rp.	758.520.000,-

c. Kecamatan Aruta sebesar	Rp.	674.730.000,-
d. Kecamatan Ktw Lama sebesar	Rp.	674.730.000,-
e. Kecamatan P. Lada sebesar	Rp.	670.730.000,-
f. Kecamatan P. Banteng sebesar	Rp.	670.730.000,-

Telah tercapai penyalurannya sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.

10) Hasil pencapaian pada desa dengan adanya program PM2L adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya prasarana dasar (Jalan, Jembatan, gorong-gorong, drainase, listrik, air bersih);
- Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan;
- Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan;
- Meningkatnya ekonomi rakyat (pertanian dalam arti luas, industri rumah tangga, perdagangan, pariwisata dan lain-lain);
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Aparatur Desa dan masyarakat.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah :

- Kurangnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam menentukan arah perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan desa;
- Keterbatasan kemampuan SDM aparat desa dalam pengelolaan manajemen pemerintahan desa;
- Masih rendahnya tingkat pendapatan keluarga terutama di desa-desa terpencil;
- Keterbatasan kemampuan desa dalam hal penyediaan energi listrik sebagai penopang kelangsungan kehidupan perekonomian dan sehari-hari.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang perlu dilakukan adalah :

- Meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam menentukan arah perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan desa dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan secara lebih intensif;
- Pendidikan dan Pelatihan aparatur desa dibidang manajemen pemerintahan desa;
- Meningkatkan Pendapatan keluarga melalui Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif (P2W - KSS);

4.1.22. URUSAN SOSIAL**a) Kondisi Umum**

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial

Hal ini sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan berbagai kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui beberapa program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada.

Beragam permasalahan sosial membutuhkan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah, Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Orsos), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun unsur masyarakat secara keseluruhan. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat berkomitmen untuk menjadi *leading sector* bagi penanganan berbagai masalah sosial di tingkat kabupaten.

Sasaran dari bidang sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, atau tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterbatasan, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung. Dalam upaya pemberdayaan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama keluarga miskin, pada tahun 2014 telah dilakukan upaya pemberdayaan melalui kegiatan fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin yang diikuti 50 peserta dan diberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 160 KK.

Selain itu juga dilakukan pelatihan Manajemen Pembangunan Kesejahteraan Sosial kepada aparatur desa/kelurahan bekerja sama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial RI. Dalam pemberdayaan ini juga dilaksanakan pemberdayaan kelembagaan sosial melalui pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 3 Karang Taruna. Tidak kalah penting adalah pemberdayaan organisasi sosial

(orsos) berupa yayasan atau organisasi dalam bentuk lain milik masyarakat yang melaksanakan penanganan PMKS, seperti Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik dalam atau luar panti yang jumlahnya telah mencapai 15 orsos.

Dalam hal ini peran pemerintah daerah masih sebatas memberikan bantuan dalam bentuk per makanan sebagai upaya tetap *eksis dan establish* melalui kegiatan pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. Melalui Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, telah dilaksanakan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Komda Lansia. Pada Program Pembinaan Anak Terlantar atau Putus Sekolah melalui pelatihan keterampilan dan praktek kerja terhadap anak terlantar atau putus sekolah sebanyak 20 orang. Sebanyak 15 orang dilaksanakan di Loka Bina Karya (LBK) Pangkalan Bun dan sebanyak 2 orang dikirim di Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita (PSBRKW) Palangkaraya. Selain itu sebagai tindak lanjut dari pelatihan di Loka Bina Karya (LBK) telah dibentuk 3 KUBE anak terlantar.

Terkait bantuan dan jaminan sosial kepada PMKS telah dilakukan pemberian bantuan pemulangan karena keterlantaran dan eks napi. terdiri pekerja antar pulau terlantar sebanyak 56 orang, dan psikotik 2 orang.

Tabel 4.75
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Sosial
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2013	2014		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Keberadaan Sarana sosial:					
	) Panti asuhan	Unit	15	15	15	100
	) Panti jompo	Unit	-	1	-	0
	) Panti rehabilitasi	Unit	-	1	-	0
2.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	orang	68,75	72,00	68,75	95,49
3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	kasus	68,42	68,42	63,64	93,01

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat 2014

Dalam hal kesiapsiagaan penanganan masalah-masalah yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa telah dikirimkan untuk mengikuti gelar kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Bhakti Sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Tingkat Nasional Tahun 2014 di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Kegiatan Kemah Bhakti dan Apel Siaga Bencana Provinsi Kalimantan Tengah di Desa Kujan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, Pemantapan Kemampuan Petugas Pendamping Sosial dan Pemantapan Shelter Korban Bencana Alam di di Palangka Raya, Kegiatan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana (KSB) dan

Penguksuhan Tim Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Pelatihan Potensi SAR Water Rescue dan Medical First Responder (MFR) di Kota Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, Kegiatan Pemantapan Petugas Psikososial Korban Bencana Alam di Palangka Raya, Kegiatan Pemantapan Kemampuan Pengelolaan Logistik Korban Bencana Alam di Palangka Raya, baik kesiapsiagaan yang sifatnya pra bencana, tanggap darurat (saat terjadi bencana) maupun pasca bencana.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.201.989.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.702.983.746,00 atau 84,43 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Sosial selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.76
Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	497.512.300	474.700.131	95,41	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	14	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.125.000	1.125.000	100	100	Terlaksananya penyediaan perangko untuk kebutuhan pengiriman paket surat dinas	750	750	lembar	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat sehingga persentase penyampaian surat terpenuhi	100	100	%	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	53.750.000	37.310.429	69,41	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar	12	12	bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar untuk menunjang terlaksananya tupoksi	100	100	%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	1.550.000	1.413.000	91,16	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	7 1	7 1	Unit unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa administrasi keuangan	83.635.000	83.490.000	99,83	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan Dinsos	12	12	bulan	Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan	100 100	100 100	% %	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	29.079.000	27.509.000	94,60	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	1 3	1 3	orang paket	Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungankantor Dinas Sosial	100	100	%	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.800.000	9.075.000	92,60	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Dinas Sosial berupa : ¼ Mesin tik ¼ Komputer PC ¼ Komputer notebook ¼ Printer ¼ Audio Visual Wireless ¼ Faximili	2 6 6 6 1 1	2 6 6 6 1 1	unit unit unit unit buah buah	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Dinas Sosial	100	100	%	
Penyediaan alat tulis kantor	30.420.000	29.784.800	97,91	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	paket	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada Dinas Sosial	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.086.250	24.586.000	94,25	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kedinasan	1	1	tahun	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat	100	100	%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	7.553.000	7.518.000	99,54	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor berupa : ¼ kabel ¼ lampu ¼ piting ¼ Saklar ¼ stop kontak ¼ Klem Kabel ¼ Battery Kering ¼ Solder Kayu ¼ Timah Solder ¼ Taspen/Obeng	150 5 15 10 10 5 6 1 3 2	150 5 15 10 10 5 6 1 3 2	meter buah buah buah buah bks psg buah buah buah	Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor Dinsos	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	56.175.000	55.167.600	98,21	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ¼ flash disk ¼ mouse	5 5	5 5	buah buah	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					¼ komputer notebook ¼ Komputer desktop ¼ Printer ¼ Audio Visual	4 1 5 1	4 1 5 1	unit unit buah unit					
Penyediaan peralatan rumah tangga	-	-	-	-	Terlaksananya penyediaan :				Terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tupoksi	100	100	%	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	-	-	-	-	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan				Terwujudnya peningkatan wawasan pengetahuan aparatur tentang peraturan dan perundang undangan yang berlaku	80		%	
Penyediaan makanan dan minuman	9.456.000	9.225.000	97,56	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat serta minuman harian PHL	160 3	160 3	kotak orang	Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	188.883.050	188.496.302	99,80	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	100	%	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	647.359.000	575.218.950	88,86	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	6	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan Meubeleur	118.250.000	111.010.000	93,88	100	Terlaksananya penyediaan Meubelair Kantor berupa : - Almari - Meja Kerja - Kursi Kerja - Sofa - Fodium	4 40 27 1 1	4 40 27 1 1	Buah Buah Buah Set Buah	Terpenuhinya kebutuhan meubelair kantor untuk menunjang kelancaran kerja	100	100	%	
Pengadaan peralatan gedung kantor	100.600.000	97.420.000	96,84	100	Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor berupa : - Umbul-umbul - Bendera Telisir - Bendera Merah Putih - Gerobak Angkong - AC - Tiang Umbul-umbul	1 72 4 2 8 1	1 72 4 2 8 1	Pkt Meter Buah Buah Unit Pkt	Terwujudnya peningkatan fasilitas gedung kantor	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	47.200.000	46.825.000	99,21	100	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Loka Bina Karya (LBK) dan Panti Persinggahan yang rapi dan terawat	1	1	paket	Terpenuhinya fungsi dan kondisi gedung kantor dengan baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	157.559.000	112.122.450	71,16	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	7 2	7 2	unit unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	4.250.000	4.245.000	99,88	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa: ¼ Air Conditioner (AC) ¼ Mesin potong rumput	5 3	5 3	Unit unit	Terwujudnya peningkatan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja	100	100	%	
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	219.500.000	203.596.500	92,75	100	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1	1	paket	Terpenuhinya peningkatan kualitas bangunan gedung kantor	100	100	%	
Program peningkatan disiplin aparatur	45.000.000	41.580.000	92,40	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	22.500.000	20.790.000	92,40	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Dinsos	45	45	stel	Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	22.500.000	20.790.000	92,40	100	Tersedianya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu berupa Pakaian Adat daerah	45	45		Terpenuhinya penyediaan pakaian adat daerah	100	100	%	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	60.000.000	42.824.600	71,37	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	60.000.000	30.695.600	71,37	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	6	6	orang	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kompetensi SDM aparatur sesuai dengan bidang tugasnya	80	80	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.000.000	2.000.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	100	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	5	buku	Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	%	
Penyusunan laporan keuangan semesteran	-	-	-	-	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	4	4	eksp.	Terpenuhinya ketersediaan aporan keuangan semesteran	100	100	%	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000	1.000.000	100	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4	4	eksp.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	486.649.600	362.607.000	74,51	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	100	100	%	
Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	94.557.000	37.434.000	39,59	100	Terlaksananya : ¼ Fasilitasi manajemen usaha bagi pengurus/ anggota KUBE	2 kali	2	Keg	Tercapainya peningkatan pengetahuan dan wawasan berpikir	100	100	kk	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					keluarga miskin ¼ Evaluasi dan pembinaan kegiatan KUBE keluarga miskin	30	30	KUBE - KM	tentang cara pengelola kegiatan usaha KUBE keluarga miskin				
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	392.092.600	325.173.000	82,93	100	Terlaksananya :				Terpenuhinya ketersediaan data dan terbentuknya KUBE-KM/ WBS calon penerima bantuan barang pendukung usaha KUBE-KM/WBS	16	16	KUBE-KM	
					¼ Sosialisasi pemberdayaan sosial	1	1	keg.					
					¼ Penyediaan barang bantuan pendukung bagi kelompok usaha bersama keluarga miskin (KUBE-KM) dan warga miskin binaan sosial (WBS)	4	4	Paket					
					¼ Identifikasi dan assesment calon penerima bantuan barang pendukung KUBE keluarga miskin dan warga binaan sosial	3	3	desa					
Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	-	-	-	-	Terlaksananya :	20 kk	15 kk	WRSE/ WBS	Tercapainya peningkatan motivasi, disiplin dan etika kerja para wanita rawan sosial ekonomi dan warga binaan sosial	100	100	%	WRSE = Wanita rawan sosial ekonomi WBS = warga binaan sosial
					¼ Ketersediaan barang bantuan bagi peserta pelatihan keterampilan	20 kk	15 kk	WRSE/ WBS					

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	592.051.900	519.503.570	87,75	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100	100	%	
Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	272.980.400	223.772.500	81,96	100	Terlaksananya :				Terwujudnya peningkatan peran serta pelaku usaha kesejahteraan anak dan lansia	100	100	%	
					¼ Pelibatan warga masyarakat sebagai pendamping program ASLUT di tingkat desa/kelurahan	9	9	orang					
					¼ Pelibatan warga masyarakat sebagai pendamping program jaminan sosial ODK berat di tingkat desa/kelurahan	2	2	orang					
					¼ Koordinasi peningkatan pelayanan kessos. lansia dan ODK dengan aparatur tingkat kecamatan	12	12	keg.					
					¼ Koordinasi peningkatan pelayanan kessos. lansia dan ODK dengan aparatur tingkat provinsi dan pusat	12	12	keg.					

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peningkatan kualitas pelayanan. sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	150.000.500	148.843.500	99,23	100	Terlaksananya rehab berat bangunan Loka Bina Karya (LBK) Pangkalan Bun	1	1	paket	Terwujudnya peningkatan kualitas gedung LBK	100	100	%	
Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	169.071.000	146.937.570	86,91	100	Terlaksananya pemberian jaminan sosial bagi korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi	1	1	keg.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial serta bantuan jaminan sosial bagi korban bencana, diskriminasi dan eksploitasi	100	100	%	
Monitoring evaluasi dan pelaporan	-	-	-	-	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	1	tahun	Terpenuhinya pemutakhiran data PMKS dan PSKS	100	100	%	
Program Pembinaan Anak Terlantar	242.145.000	235.219.600	97,14	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pembinaan Anak Terlantar	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pembinaan Anak Terlantar	100	100	%	
Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	194.125.000	189.799.500	97,77	100	Terlaksananya : ¼ bimbingan sosial dan keterampilan bagi remaja serta praktek belajar kerja	1	1	keg.	Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia anak yang mengalami masalah keterlantaran	20	20	anak	
					¼ Penyaluran bantuan stimulasi UEP bagi anak	1	1	keg.					

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	48.020.000	45.420.100	94,59	100	Terlaksananya bantuan stimulasi ekonomi produktif dan bimbingan sosial kewirausahaan bagi anak	20	20	anak	Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia anak yang mengalami masalah keterlantaran	100	100	%	
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	119.597.500	103.604.800	86,99	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	100		%	
Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan	119.097.500	103.604.800	86,99	100	Terlaksananya : ¼ Penyaluran bantuan stimulasi bagi ODK ¼ Sosialisasi tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi ODK ¼ Pendataan awal ODK dan penyandang penyakit kejiwaan ¼ Pelayanan tim unit pelayanan sosial keliling (UPSK) bagi ODK	4 17 100 5	4 - 100 5	ODK Orang % hari	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi orang dengan kecacatan (ODK) dan trauma	100		%	Tidak terlaksananya kegiatan unit pelayanan sosial keliling (UPSK) bagi ODK sebagai rangkaian kegiatan lanjutan untuk pemberian bantuan kepada ODK dan dikarenakan kesulitan dalam penentuan tim dari kegiatan UPSK tersebut

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	-	-	-	-	Terlaksananya rujukan orang dengan kecacatan (ODK) ke tempat rehabilitasi sosial dan keterampilan bagi ODK	8	6	ODK	Terwujudnya peningkatan kemampuan keterampilan ODK dalam rangka perlindungan kesejahteraan sosial	100	75	%	Salah dalam penganggaran karena
Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik	-	-	-	-	Terlaksananya kegiatan magang bagi aparatur dinas sosial dalam rangka identifikasi dan assesment terhadap ODK	3	3	orang	Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dinas sosial dalam proses identifikasi dan assesment guna pelayanan rehabilitasi sosial dan vokasional bagi ODK	100	100	%	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	509.673.700	345.725.095	67,83	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	4	4	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100	75	%	
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	-	-	-	-	Terlaksananya peran aktif dunia usaha dalam pembangunan di bidang usaha kesejahteraan sosial	4	0	paket	Tercapainya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, pemda dan masyarakat/dunia usaha	100	0	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku- Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	90.997.500	69.393.750	76,26	100	Terlaksananya : ¼ Penyediaan bantuan usaha ekonomi produktif bagi karang taruna dan LKS ¼ Penyediaan insentif bagi TKSK sebagai petugas pendamping tingkat kec.	3 6	3 6	Klpk. orang	Terwujudnya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial kepada generasi muda	100	100	%	
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	176.285.300	119.858.445	67,99	100	Terlaksananya : ¼ Pelatihan pekerja sosial bagi pengurus ORSOS/LKS, KT & PSM ¼ Diklat TKSM bagi aparatur desa	1 1	1 1	keg. Keg.	Terpenuhinya ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM) di wilayah perdesaan	30	30	orang	
Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan. Keperintisan. Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	99.180.900	96.737.900	97,54	100	Terlaksananya : ¼ Pelestarian dan pendayagunaan nilai-nilai kepahlawanan melalui kegiatan sarasehan ¼ Pemeliharaan TMP Indra Pura	1 1	1 1	Keg. paket	Tumbuhnya semangat dan jiwa patriotisme kepahlawanan bagi masyarakat dan generasi muda	100	100	%	
Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Program Keluarga Harapan	143.210.000	59.735.000	41,71	100	Terlaksananya pendampingan Program Keluarga Harapan	1	1	Keg	Terwujudnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan dengan baik	100	100	%	

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Urusan Sosial yang perlu perhatian adalah :

1. Belum dimilikinya panti-panti sosial oleh pemerintah daerah serta belum memadainya sarana dan prasarana Panti Sosial milik masyarakat;
2. Belum optimalnya pendayagunaan potensi kesejahteraan sosial yaitu SDM kesejahteraan sosial dan Pilar Partisipasi Masyarakat dalam penanganan PMKS;
3. Penanganan bencana baik bencana alam maupun non alam yang bersifat pra bencana, saat bencana/tanggap darurat dan pasca bencana/rehabilitatif masih belum optimal diantaranya peralatan evakuasi dan distribusi saat tanggap darurat baik di darat maupun perairan;
4. Minimnya data PMKS dari masing-masing Desa/Kelurahan;
5. Belum komprehensifnya LBK dan Panti Persinggahan Pangkalan Bun sebagai pusat layanan PMKS;
6. Keterbatasan SDM ahli dan alokasi anggaran sehingga dalam penanganan PMKS belum optimal terutama dari aspek perlindungan dan jaminan sosial bagi orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia tidak potensial terlantar.

Mencermati hal-hal tersebut di atas Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial senantiasa berbuat dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui program dan kegiatan yang mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Daerah serta membangun sinergisitas dan jejaring dengan Dinas Sosial Provinsi maupun Kementerian Sosial RI dan PSKS serta Dunia Usaha.

Upaya mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan antara lain :

1. Mengusulkan pembangunan panti sosial termasuk Tempat Penitipan Anak beserta sarana dan prasarana pendukungnya milik pemerintah daerah serta memberikan bantuan operasional, sarana dan prasarana bagi panti milik masyarakat pada setiap forum pertemuan koordinasi antar instansi terkait di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat maupun dengan pihak legislatif;
2. Mengoptimalkan potensi kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial dan pendayagunaan Pilar Partisipasi Masyarakat dalam penanganan PMKS;

SDM Kesejahteraan Sosial memegang peran penting dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial. Integritas dan kompetensi SDM kesejahteraan sosial merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan kesejahteraan sosial. SDM ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mencakup tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial.

Pendayagunaan Pilar Partisipasi Usaha Kesejahteraan Sosial seperti keberadaan PSKS (karang taruna, orsos, PSM, WKSMB, Kerjasama Kelembagaan Dunia Usaha, TAGANA dan TKSK) diharapkan mampu dan berada pada barisan terdepan di tengah masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosialnya, masalah sosial keluarga dan masalah sosial lingkungannya.

3. Mengoptimalkan penanganan bencana baik bencana alam maupun non alam yang bersifat pra bencana, saat bencana/tanggap darurat dan pasca bencana/rehabilitatif terutama kesiapsiagaan personil dan peralatan evakuasi serta data korban dan distribusi bantuan saat tanggap darurat baik di darat maupun perairan;
4. Mengupayakan tersedianya data base PMKS dari masing-masing Desa/Kelurahan;
5. Mengupayakan memadainya sarana dan prasarana LBK dan Panti Persinggahan Pangkalan Bun sebagai pusat layanan PMKS;
6. Mengoptimalkan ketersediaan SDM ahli dan alokasi anggaran sehingga dalam penanganan PMKS berjalan optimal terutama dari aspek perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan secara khusus yaitu penduduk rentan dan penduduk yang memiliki risiko sosial yaitu penduduk miskin kluster I dan II serta penduduk lainnya yang karena faktor tertentu tidak memiliki kepastian masa depan seperti orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia tidak potensial terlantar.

4.1.23. URUSAN KEBUDAYAAN

a) Kondisi Umum

Awalnya Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah tujuan transmigrasi yang digalakkan pemerintah pada tahun 1980an. Dari program transmigrasi ini, warga pendatang dari berbagai daerah mulai masuk ke wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan menetap hingga saat ini. Saat ini penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari berbagai suku bangsa dan ras, yang telah berasimilasi dengan sangat baik.

Keberagaman suku dan ras penduduk ini tentunya juga menyebabkan keberagaman seni dan budaya yang berkembang. Masing-masing budaya terpetakan dengan sangat baik. Kesenian yang berkembang di suatu kecamatan biasanya juga merefleksikan dominasi kesukuan yang mendiami wilayah tersebut.

Di Kecamatan Arut Selatan sebagai ibukota Kabupaten, kesenian yang berkembang didominasi oleh budaya dengan ciri khas Melayu, yang merupakan asal usul Kesultanan Kotawaringin. Terdapat 37 grup kesenian, terdiri dari kesenian badrah, rebana, dan tari tradisional dayak pedalaman

dan seni tradisional daerah lain di nusantara seperti Kesenian Sunda, Padang dan Jawa. Sedangkan di Kecamatan Arut Utara, budaya dan adat Dayak dominan dalam kehidupan sehari-hari terdapat 6 sanggar, adapun untuk desa tertentu terdapat kesenian pesisir dan Jawa. Di Kecamatan Kotawaringin Lama kebudayaan yang berkembang juga diwarnai ciri Melayu. Kecamatan Kotawaringin Lama merupakan pusat Kesultanan Kotawaringin. Sementara itu, di Kecamatan Pangkalan Lada budaya yang berkembang didominasi budaya Jawa.

Di Kecamatan Pangkalan Lada terdapat 13 grup kesenian yang terdiri dari grup reog, kuda lumping, wayang dan tari tradisional, bahkan juga barongsai serta Sanggar Tari Dayak. Pangkalan Lada tercatat paling aktif menyelenggarakan pementasan kesenian, dimana tahun 2014 terjadi 7 kali penyelenggaraan kesenian. Pergelaran tersebut merupakan bagian dari kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang melekat dalam kehidupan. Misalnya untuk memperingati tahun baru Hijriyah diadakan bersih desa dan pertunjukan wayang. Kegiatan berkesenian biasanya ditampung di gedung serbaguna milik desa ataupun di lapangan. Dengan demikian dapat diasumsikan masing-masing desa di Pangkalan Lada memiliki 1 buah gedung kesenian, dengan total 11 buah.

Senada dengan Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Pangkalan Banteng juga didominasi kebudayaan Jawa. Terdapat 15 grup kesenian di kecamatan ini, dengan 3 kali penyelenggaraan kesenian dan budaya selama tahun 2014. Sedangkan di Kecamatan Kumai, budaya yang berkembang dominan budaya pesisir lokal. Terdapat 23 grup kesenian dan satu kali penyelenggaraan kegiatan seni budaya pada 2014.

Tabel 4.77
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2014

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2013	2014		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4 kali	100	4	4	100
2.	Sarana Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	-	-	-	-
3.	Jumlah group kesenian	43 group	-	50	43	86
4.	Jumlah gedung kesenian	-	-	-	-	-
5.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	33 buah	33	36	33	91,66

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat

Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkebh, ilmu, perasetua, dan keastuan bangsa

melestarikan dan mengembangkan budaya lokal maupun nusantara. Pengembangan budaya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki budaya dan peradaban luhur dan mampu menjaga jati diri ditengah pergaulan global. Langkah yang bisa ditempuh adalah :

1. Menjaga suasana kebebasan kreatif dibidang seni dan keilmuan;
2. Menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan keilmuan yang bersifat non-komersial;
3. Memberikan dukungan dan insentif kepada kegiatan kesenian dan keilmuan untuk mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal dan nasional, modern dan tradisional.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp 6.510.455.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.041.957.743,00 atau 92,80 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kebudayaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.78
Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
UDPAR													
Program Pengembangan Nilai Budaya	10.000.000,00	9.700.000,00	97,00	1	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengem- bangan Nilai Budaya	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengem- bangan Nilai Budaya	1	1	keg	
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	10.000.000,00	9.700.000,00	97,00	100	Terlaksananya : ¼ Audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara ¼ Pengiriman peserta audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara	1 4	1 4	keg. orang	Terwujudnya peningkatan semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	990.450.000,00	932.564.083	94,00	3	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	3	3	keg	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	3	3	keg	
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	90.000.000,00	76.382.800,00	84,86	100	Terlaksananya penelitian keberadaan bangunan dan benda bersejarah	2	2	buah	Tercapainya penemuan bangunan dan benda bersejarah	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena Belanja perjalanan dinas dalam daerah & belanja transportasi pihak ketiga disesuaikan dengan Kebutuhan

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pelestarian Fisik dan Kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	750.450.000,00	706.801.283,00	94,18	100	Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan dan benda bersejarah	8	8	paket	Tercapainya peningkatan kunjungan wisatawan	50	50	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dan belanja pemeliharaan konstruksi disesuaikan dengan kebutuhan
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	150.000.000,00	149.380.000	99,58	100	Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan dan benda bersejarah	3	3	paket	Tercapainya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan dan benda bersejarah	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena rehab bangunan disesuaikan dengan kebutuhan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	3.135.928.400,00	2.881.926.500	92,00	2	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2	2	keg	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2	2	keg	
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	1.819.180.000,00	1.597.020.000	87,78	100	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah				Terwujudnya peningkatan apresiasi terhadap seni dan budaya	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena belanja perjalanan dinas dalam daerah dan kegiatan festival

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													disesuaikan dengan kebutuhan
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	1.316.748.400,00	1.284.906.500	97,58	100	Terlaksananya penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam festival budaya	4	4	kali	Terwujudnya pembinaan dan penyaluran seni budaya kobar melalui festival tingkat daerah, propinsi maupun nasional	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena belanja perjalanan dinas dalam daerah dan kegiatan festival disesuaikan dengan kebutuhan
DA													
Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	660.287.000	604.993.950	91,63	96,09	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Ibadah Haji dan Rapat kerja sekaligus pemberian insentif penghulu	2	2	Keg	Terciptanya Pelayanan Ibadah Haji yang prima dan meningkatnya pelayanan pernikahan oleh para penghulu				
Pelayanan ibadah haji	535.287.000	480.243.950	89,72	96,17	Terlaksananya berbagai kegiatan untuk mendukung pelayanan pelaksanaan ibadah haji asal Kabupaten Kotawaringin Barat	1	1	Keg.	Terwujudnya kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah haji asal Kabupaten Kotawaringin Barat				

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemberdayaan lembaga penghulu	125.000.000	124.750.000	99,80	100	Terlaksananya rapat kerja dan pemberian insentif penghulu se-Kabupaten Kotawaringin Barat	1	1	Keg.	Meningkatnya pengetahuan dan motivasi pelayanan pernikahan oleh Penghulu				
Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan	1.713.790.000	1.533.716.000	89,49	90,59	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan	4	4	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan				
Peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan	1.713.790.000	1.533.716.000	89,49	90,59	Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten, terlaksananya kegiatan safari ramadhan, terlaksananya MTQ Tingkat Provinsi, serta terlaksananya kegiatan pemilihan keluarga sakinah	4	4	keg	Terwujudnya peningkatan tali silaturahmi antar masyarakat dengan aparaturnya pemerintah serta kepala daerah, tercapainya prestasi di bidang keagamaan tingkat daerah dan tingkat provinsi, terciptanya keluarga sakinah yang dapat menjadi teladan				

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Kebudayaan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya motivasi masyarakat untuk melestarikan upacara adat hal ini terlihat dengan banyaknya kegiatan upacara adat yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun 2014;
- 2) Terinventarisasinya benda cagar budaya yang bergerak maupun tidak bergerak sehingga memudahkan dalam upaya pelestariannya.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Urusan Kebudayaan yang perlu mendapat penanganan adalah :

1. Masih belum optimalnya upaya pengembangan dan perlindungan kebudayaan daerah;
2. Masih belum dimilikinya Museum Budaya Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Terbatasnya kualitas SDM aparatur dalam pengelolaan urusan kebudayaan;
4. Materi budaya dalam pendidikan sekolah dirasa masih kurang mendapat porsi yang memadai.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Peningkatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan kebudayaan sebagai upaya melestarikan kebudayaan daerah;
2. Memberikan dukungan yang memadai dalam pengelolaan urusan kebudayaan baik dari segi pendanaan, peningkatan kualitas SDM aparatur, maupun koordinasi dengan instansi terkait;
3. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dengan mengikutsertakan pelatihan, bimtek maupun studi banding;
4. Meningkatkan peran pendidik untuk transformasi nilai-nilai budaya dalam pendidikan.

4.1.24. URUSAN STATISTIK

a) Kondisi Umum

Keberhasilan perencanaan pembangunan dimulai dari penggunaan data dan informasi yang benar dan akurat. Untuk mendapatkan data dan informasi yang benar dan akurat antara lain ditentukan oleh kualitas SDM pengelola data dan tingkat kepedulian baik pemerintah maupun masyarakat sebagai sumber data dengan didasari kesadaran akan pentingnya data statistik.

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus mampu menerjemahkan berbagai kepentingan statistik yang implementatif, efektif, dan akuntabel. Untuk memenuhi kebutuhan terhadap data statistik daerah diperlukan koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi yang sinergis antara stakeholders penyedia data (Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, instansi vertikal, unsur perguruan tinggi, masyarakat dan penyedia data lainnya).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, statistik sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar-unsur dalam penyelenggaraan manajemen baik pemerintahan maupun swasta, merupakan bentuk data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis. Statistik mempunyai peranan yang penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan. Dengan memperhatikan pentingnya peranan statistik, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik baik skala nasional maupun daerah yang terpadu, andal, efektif dan efisien. Secara terinci, sesuai dengan pemanfaatannya statistik dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Statistik Dasar, yakni statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik;
2. Statistik Sektoral, yakni statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan;
3. Statistik khusus, yakni statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Urusan statistik di Kabupaten Kotawaringin Barat terkait dengan penyediaan data statistik dasar ditangani oleh instansi vertikal di daerah yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memfasilitasinya melalui kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dengan menyediakan anggaran untuk penggandaannya dan membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung proses penyusunan buku statistik dasar tersebut yang meliputi Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka, Buku PDRB Kotawaringin Barat, Buku Penduduk Kotawaringin Barat dan Buku Distribusi Pendapatan.

Sedangkan untuk penyediaan data statistik sektoral dan statistik khusus seperti Buku Profil Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Buku Profil Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat, Buku Statistik Perkebunan, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat, Tabel Input Output Daerah dan yang lainnya ditangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi pemerintah di daerah.

Namun demikian di dalam penganggarannya, kegiatan-kegiatan dalam rangka menyediakan data statistik untuk keperluan perencanaan daerah tersebut, tidak diklasifikasikan kedalam Urusan Statistik melainkan diklasifikasikan menjadi urusan lain seperti Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pertanian dan lain sebagainya, sehingga terkesan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mengalokasikan dana untuk melaksanakan urusan statistik.

Berikut dapat dilihat mengenai Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik selama tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2014 sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD 2012-2016 Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 4.79
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik
Tahun 2013 - 2014

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2013	2014		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Ketersediaan Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka	buku	0	50	0	0
2.	Ketersediaan buku PDRB Kotawaringin Barat	buku	0	50	0	0
3.	Tingkat keterisian data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	elemen data	Dari 2.538 isian elemen data yang tersedia, berhasil terisi sebanyak 441 atau (17,38%)	1.304 elemen data	977 elemen data	74.92 %

Sumber : Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

Bila dilihat dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa ketersediaan Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014 dan Buku PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 tidak terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan, dikarenakan pihak BPS selaku lembaga yang berwenang dalam menyediakan data statistik dasar tidak memberikan rekomendasi dalam hal penggandaan buku-buku dimaksud.

Namun demikian meskipun buku-buku tersebut tidak tersedia, kebutuhan akan data-data terbaru untuk kepentingan penyusunan perencanaan tetap dapat terpenuhi karena fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui SKPD terkait, dengan pihak BPS tetap dapat berjalan dengan baik.

Kemudian bila dilihat dari indikator tingkat capaian keterisian data statistik pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terjadi peningkatan yang cukup significant yaitu dari 17,38 % pada tahun 2013 menjadi 74,92 % pada akhir tahun 2014.

b) Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Dalam pengklasifikasian penganggaran di Kabupaten Kotawaringin Barat, program kegiatan yang berkenaan dengan penyediaan data statistik dasar dikelompokkan dalam urusan perencanaan pembangunan sehingga untuk rincian program kegiatan dan realisasinya dapat dilihat pada urusan Perencanaan Pembangunan.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Dalam urusan statistik, data statistik diperoleh dari berbagai penyedia data, seperti BPS, SKPD serta lembaga terkait lainnya sehingga dalam rangka pertanggungjawaban produk data sering terjadi perbedaan angka atau data;
2. Sifat data statistik yang dinamis, berakibat pada sulitnya penentuan data akhir secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan yang diharapkan;
3. Dalam hal ketersediaan data statistik untuk kebutuhan bahan perencanaan daerah, khususnya untuk penyediaan data statistik dasar terjadi lag satu tahun dimana data yang tersedia merupakan data kondisi tahun sebelumnya sehingga data-data yang diperlukan masih merupakan data proyeksi yang mana dari tingkat keakuratannya masih diragukan karena dimungkinkan masih terjadi bias data;
4. Beberapa data statistik dalam pengadaannya sangat komprehensif, sehingga dalam rangka pengumpulan dan analisis data untuk mendapatkan angka akhir dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini berakibat pada beberapa data penting belum dapat diwujudkan;
5. Tuntutan pemenuhan kebutuhan data dari peraturan perundang undangan, pusat (K/L/D/I), dan kebutuhan data untuk perencanaan intern instansi sangat beragam sehingga berakibat munculnya ragam data yang sangat banyak. Hal ini seringkali menyulitkan dinas, instansi, lembaga penanggung jawab data dalam penyediaannya;
6. Selama ini belum ada regulasi maupun payung hukum yang tepat yang mengatur mengenai kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan BPS sebagai instansi vertikal dalam rangka fasilitasi penyusunan dan penggandaan buku Kotawaringin Barat Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat.

Solusi

1. Proporsi tanggung jawab terhadap data oleh para pemangku penyedia data harus lebih ditegaskan, sehingga tidak terjadi duplikasi data, atau bahkan kelangkaan data akibat dari tidak ada yang bertanggungjawab terhadap data-data tertentu;
2. Perlu dilaksanakan koordinasi yang intensif dan berkesinambungan antar berbagai pemangku TUPOKSI penyedia data, agar terjadi komunikasi yang jelas dalam rangka peningkatan ketepatan, kecepatan dan keakuratan penyediaan data statistik;
3. Perlunya dilakukan peningkatan koordinasi yang lebih intensif lagi dengan pihak BPS terkait dengan pemenuhan data statistik dasar pada tahun berjalan meskipun data dimaksud masih berupa angka sementara (masih bertanda *). Selain itu perlu juga dilakukan pengiriman aparatur untuk mengikuti pelatihan maupun bimtek berkenaan dengan penyediaan data statistik misal : bimtek penghitungan PDRB;
4. Peningkatan anggaran bagi penyediaan data oleh semua penanggungjawab data yang didahului dengan komitmen semua stakeholders terhadap arti penting data dan statistik;
5. Perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang data dan statistik bagi berbagai kepentingan baik peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat maupun daerah, sehingga memudahkan pemahaman, pembangunan dan penyediaan data oleh para pemangku penyediaan data dan statistik;
6. Perlu adanya penyamaan pemahaman dan persepsi antara pihak BPS dan Bappeda mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten terkait dengan kewenangan dan mekanisme prosedur penyediaan data statistik, sehingga tercipta keseragaman mengenai mekanisme prosedur dalam proses penyediaan data statistik pada kabupaten/kota seluruh Indonesia yaitu dengan menerbitkan regulasi yang dapat dijadikan landasan dalam hal prosedur penyusunan, penyediaan dan penggandaan dokumen publikasi data statistik.

4.1.25. URUSAN KEARSIPAN**a) Kondisi Umum**

Arsip berguna sebagai sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan, menunjang proses perencanaan, mendukung pengawasan, menjadi alat pembuktian, alat untuk kepentingan politik dan ekonomi. Banyak proses pembangunan yang terhambat karena hilangnya salah satu arsip sebagai alat pembuktian. Belajar dari berbagai pengalaman yang terjadi beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa kearsipan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Arsip merupakan bukti-bukti konkrit yang akan menjelaskan kebenaran suatu peristiwa.

Perlakuan terhadap arsip di masa sekarang sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pengelolaan arsip yang sistematis akan mengendalikan pertumbuhan arsip yang semakin hari semakin menumpuk dengan semakin kompleksnya kegiatan yang dilakukan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu mengembangkan sistem kearsipan dalam kaitannya dengan penerapan teknologi informasi dan otomatisasi kearsipan. Tindak lanjut dari penerapan teknologi informasi adalah dengan penyediaan khasanah arsip dalam bentuk digital yang dapat diakses masyarakat secara online. Pengelolaan arsip secara elektronik ini perlu mendapat dukungan dana yang memadai.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk :

- a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
- b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertanahan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Tabel 4.80
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 – 2014

No.	Indikator	Capaian 2013	2014		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Pengelolaan arsip secara baku (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	100 %
2.	Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan Kearsipan	2	-	-	-
3.	Jumlah SKPD yang mempunyai arsiparis	3	-	-	-
4.	Ratio Jumlah SKPD terhadap Arsiparis (%)	4:36	-	4:36	-
5.	Arsip audio visual	265	-	265	-
6.	Arsip Foto/Album	269	10	279	-
7.	Pembinaan kearsipan ke pemerintah desa	-	-	-	-
8.	Sosialisasi kearsipan	-	-	-	-

Sumber : KPAD Kab. Kotawaringin Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 1.042.200.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 997.007.930,00 atau 95,66 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kearsipan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.81
Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja		Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja		Target	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	511.999.850	489.675.265	95,63	100%	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	13	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	227.000	227.000	100,00	100%	Terlaksananya pengiriman paket surat dinas	1	1	tahun	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya untuk pengiriman surat menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.
Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik	71.616.000	66.924.765	93,44	100%	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk menunjang terlaksananya tupoksi	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya untuk pembayaran telepon, air, faximili dan listrik menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	1.950.000	1.469.000	75,33	100%	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :				Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya untuk pembayaran STNK menyesuaikan

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					¼ Roda 2 ¼ Roda 4	1 1	1 1	Unit unit	pelaksanaan tugas				dengan kebutuhan kegiatan
Penyediaan jasa administrasi keuangan	66.422.000	65.125.000	98,04	100%	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan	12	12	bulan	J Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor J Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya untuk pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan dan belanja jasa transaksi keuangan menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.
Penyediaan jasa kebersihan kantor	17.374.500	15.772.500	90,77	100%	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	1	1	orang	Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan kantor	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya untuk pembayaran honorarium pegawai honorer/tidak tetap (petugas kebersihan kantor) menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.608.000	8.855.000	92.16	100%	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa : √ Komputer PC √ Komputer notebook √ printer √ jaringan aplikasi	8 4 8 1	8 4 8 1	unit unit unit unit	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya untuk pembayaran pemeliharaan komputer, notebook dan printer menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.
Penyediaan alat tulis kantor	31.549.000	31.521.600	99,91	100%	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	12	12	bulan	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi	100	100	%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.022.500	6.022.500	100,00	100%	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kedinasan	12	12	bulan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya untuk pembayaran belanja cetak dan penggandaan menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3.250.000	3.250.000	100,00	100%	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor berupa lampu XL	31	31	buah	Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	214.990.500	213.600.000	99,35	100%	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas	37	37	unit	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan masyarakat	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena ada negosiasi harga didalam paket pengadaan barang.
Penyediaan peralatan rumah tangga	4.000.000	4.000.000	100,00	100 %	Tersedianya peralatan rumah tangga	2	2	paket					
Penyediaan makanan dan minuman	22.784.000	20.072.000	88,09	100%	Terlaksananya penyediaan minuman harian dan makanan penambah daya tahan tubuh PHL	8	8	orang	Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya makanan dan minuman pegawai menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	62.206.350	52.835.900	84.93	100%	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	1	1	tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					daerah				antara kabupaten dan propinsi maupun pusat				biaya transpotasi pegawai ke luar daerah menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	425.894.000	414.851.345	97,40	100%	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	6	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	
Pembangunan gedung kantor	249.773.000	249.723.000	99,97	100%	Terlaksananya : √ Perencanaan teknis √ Pembangunan Depo arsip tahap III √ Penataan halaman dan pembuatan taman √ Rehab. Ruang ktr √ Pengawasan Teknis	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	paket paket paket paket paket	Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai	100	100	%	
Pengadaan peralatan gedung kantor	9.000.000	9.000.000	100,00	100%	Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor berupa AC	2	2	unit	Terwujudnya peningkatan fasilitas gedung kantor	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan meubeleur	103.100.000	103.000.000	99,90	100%	Terlaksanya penyediaan meubeleur berupa : ¼ Almari display ¼ Locker ¼ Lemari ¼ Lemari kaca ¼ Lemari arsip ¼ etalase ¼ meja sirkulasi ¼ meja sirkulasi anak ¼ meja kerja ¼ kursi staf ¼ kursi lipat ¼ kursi diklat ¼ Rak Buku	2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 14 15 30 4	2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 14 15 30 4	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	Terpenuhinya kebutuhan meubeleur untuk mendukung kelancaran kerja dan peningkatan pelayanan masyarakat	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	9.500.000	9.500.000	100,00	100%	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah	275	275	m2	Terpenuhinya fungsi dan kondisi gedung kantor dengan baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	48.737.000	37.844.345	77,65	100%	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	1 1	1 1	unit unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya untuk pembayaran bahan bakar

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													minyak kendaraan dinas/operasional menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.784.000	5.784.000	100,00	100%	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa: ¼ AC	12	12	unit	Terwujudnya peningkatan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja	100	100	%	
Program peningkatan disiplin aparatur	11.000.000	11.000.000	100,00	100%	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	11.000.000	11.000.000	100,00	100%	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah	22	22	stel	Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	25.650.250	18.943.920	73,85	100%	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	25.650.250	18.943.920	73,85	100%	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	6	6	orang	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kompetensi SDM aparatur sesuai dengan bidang tugasnya	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.365.500	2.268.500	95,89	100%	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	773.500	698.500	90,30	100%	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7	7	Buku	Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100		%	
Penyusunan laporan keuangan semesteran	758.500	757.500	99,86	100%	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	7	7	Buku	Terpenuhinya ketersediaan aporan keuangan semesteran	100		%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	833.500	812.500	97,48	100%	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7	7	Buku	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100		%	
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	16.836.400	16.836.400	100,00	100%	Terlaksananya kegiatan pada Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	100		%	
Pengklasifikasian Data	2.786..400	2.786..400	100,00	100%	Terlaksananya kegiatan pengklasifikasian data melalui kartu deskripsi, buku induk dan label klasifikasi	1.000	1.001	berkas	Terwujudnya ketertiban dan efisiensi dalam penyusunan klasifikasi arsip	100	100	%	
Pengadaan sarana penyimpanan	14.050.000	14.050.000	100,00	100%	Terlaksananya penyediaan album fotograpi dan rak penyimpanan arsip	5	5	buah	Terpenuhinya sarana penyimpanan arsip dan dokumentasi yang memadai	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena ada negosiasi harga barang.
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	43.914.000	39.100.000	89,03	100%									
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	42.414.000	37.600.000	88,64	100%	Tersedianya sarana penyimpanan arsip dan dokumentasi	1004	1004	buah	Terpenuhinya sarana penyimpanan arsip dan dokumentasi	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	1.500.000	1.500.000	100,00	100%	Terciptanya duplikat dokumentasi/ arsip daerah	10	10	buah	Terpenuhinya penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika				
Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	2.840.500	2.657.500	93,55	100%									
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	2.840.500	2.657.500	93,55	100%	Terciptanya tata kelola arsip desa/ kelurahan yang baik	8	8	desa	Tertibnya tata kelola arsip desa/kelurahan	100	100	%	
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	1.700.000	1.700.000	98,52	100%	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	100	100	%	
Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta	1.700.000	1.700.000	98,52	100%	Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan kearsipan	6	6	Kecamatan	Tercapainya peningkatan kesadaran terhadap penyelamatan arsip	100	100	%	Capaian kinerja outcome lebih rendah karena jumlah peserta sosialisasi yang hadir tidak sesuai dengan undangan yang dikirimkan.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kearsipan, antara lain:

1. Kurangnya tingkat pemahaman *stakeholder* terhadap arsip statis dan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun. Hal ini terlihat dari arsip yang diserahkan masih dalam bentuk arsip mentah dan harus dipilah-pilah lagi oleh petugas kearsipan KPAD. Kondisi ini tidak sesuai dengan kewajiban dan tugas KPAD sebagai lembaga kearsipan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Belum terbentuknya unit pengolah dan unit kearsipan pada semua SKPD;
3. Kompetensi petugas kearsipan belum memadai;
4. Pembinaan kearsipan belum menjangkau seluruh *stakeholder*;
5. Arsiparis masih dipandang sebagai profesi yang kurang menarik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, upaya yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi kearsipan kepada seluruh *stakeholder*;
2. Membentuk unit pengolah dan unit kearsipan pada setiap SKPD;
3. Meningkatkan kompetensi petugas kearsipan melalui diklat;
4. Secara bertahap melakukan pembinaan kearsipan ke seluruh *stakeholder*;
5. Mensosialisasikan tentang jabatan fungsional Arsiparis.

4.1.26. URUSAN PERPUSTAKAAN

a) Kondisi Umum

Perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, menunjukkan semakin pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IIPTEK) secara demokratis menuju masyarakat cerdas, kreatif, kritis dan inovatif.

Di samping itu, Perpustakaan memiliki peran sebagai pelestari nilai budaya (*culture building*) di masyarakat dan memajukan peradaban bangsa, bahkan peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari tata kelola, arsitektur bangunan dan koleksi dari perpustakaan. Perpustakaan hanya akan berarti bila koleksi yang dimilikinya dapat dimanfaatkan dengan baik, untuk itu penyelenggaraan perpustakaan harus diupayakan agar masyarakat tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah untuk meningkatkan pengunjung Perpustakaan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan Jumlah koleksi bahan pustaka, baik melalui pengadaan langsung ataupun gerakan hibah buku;
2. Menyediakan Layanan Ruang Baca Anak;
3. Menyediakan Internet / *WiFi* gratis;
4. Menyediakan Layanan Audio Visual;
5. Menyediakan Layanan Ruang Baca di tempat;
6. Menyediakan Layanan Referensi;
7. Kelas Berbagi (workshop fotografi, kelas kecantikan, belajar bersama);
8. Layanan Wisata Pustaka;
9. Layanan Mendongeng/ *Story Telling* untuk anak usia TK;
10. Layanan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK);
11. Layanan Pinjam Pakai Buku.
12. Layanan Taman Baca Baruna
13. Layanan Bimbingan Pemakai/ pemustaka

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memajukan urusan perpustakaan pada tahun 2014 meliputi :

- 1) Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, yaitu dengan mengadakan lomba bercerita tingkat SD se-Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 2) Pengembangan minat dan budaya baca, yaitu dengan membuka layanan pada hari sabtu dan minggu, mengadakan lomba cipta dan baca puisi untuk anak SD dan Lomba musikalisasi puisi untuk siswa SMA/SMK dan senam bersama.
- 3) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat, yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap perpustakaan kelurahan/desa yang diharapkan akan meningkatkan pengelolaan perpustakaan kelurahan/desa menjadi lebih baik dan juga mengadakan Lomba perpustakaan desa/kelurahan se Kab. Kotawaringin Barat.
- 4) Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan yaitu KPAD Kab. Kotawaringin Barat pada tahun 2014 menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Daerah Se Kalimantan Tengah.
- 5) Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca, yaitu dengan kegiatan MPK ke sekolah/desa/kelurahan yang jauh dari Perpustakaan Umum Daerah.

- 6) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, yaitu dengan memberikan layanan mendongeng/*Story Telling*, promosi layanan perpustakaan daerah melalui media elektronik/ siaran radio dan televisi lokal, mengikuti acara Kobar expo dan mengadakan acara peluncuran koleksi buku baru tahun 2014.
- 7) Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, yaitu pengadaan langsung buku-buku perpustakaan, yang diharapkan dengan bertambahnya bahan pustaka akan dapat memenuhi kebutuhan pemustaka dan juga akan meningkatkan jumlah pemustaka (anggota baru, pengunjung dan peminjam buku).
- 8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi kepada perpustakaan desa/kelurahan yang telah mengikuti Bimtek Pengeolaan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh KPAD Kab. Kotawaringin Barat.
- 9) Penyusunan Sistem Katalogisasi, yaitu membuat katalog dan profil induk perpustakaan daerah Kab. Kotawaringin Barat.
- 10) Perawatan Bahan Pustaka, yaitu kegiatan untuk memelihara dan merawat koleksi bahan pustaka agar tidak rusak.

Tabel 4.82
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014

No.	Indikator	Capaian 2013	2014		
			Target	Realisasi	% Realisasi thd target
1.	Jumlah Perpustakaan	232	184	60	32,61
2.	Jumlah anggota perpustakaan	4.711	500	910	182,00
3.	Jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	23.469	10.000	28.450	285,50
4.	Jumlah peminjam/tahun	6.965	3500	4.052	696,5
5.	Jumlah koleksi bahan pustaka	15.095	16.595	16.645	100,30
6.	Ratio Jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	232 : 261.200	416 : 269.629	292 : 269.629	70,19
7.	Ratio jumlah pustakawan terhadap jumlah penduduk	2 : 261.200	3 : 269.629	3 : 269.629	100

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 456.729.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 432.310.000,00 atau 94,65 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Perpustakaan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.83
Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	456.729.500	432.310.000	94,65	100%	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	6	6	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	100	100	%	
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	16.221.000	16.221.000	100,00	100%	Terlaksananya lomba bercerita tingkat SD se kabupaten dan kegiatan peluncuran koleksi buku baru	1	1	kali	Tercapainya peningkatan minat baca masyarakat	100	100	%	
Pengembangan minat dan budaya baca	72.998.000	58.234.500	79,77	100%	Terlaksananya lomba untuk meningkatkan minat dan budaya baca	1	1	tahun	Terpenuhinya peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke KPAD	100	100	%	
Supervisi. pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	14.675.000	14.675.000	100,00	100%	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan perpustakaan desa/ kelurahan dan sekolah serta supervisi ke desa program PM2L	1	1	tahun	Terwujudnya perbaikan pengelolaan perpustakaan desa/ kelurahan dan sekolah	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya untuk pembayaran perjalanan dinas menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	90.515.000	90.515.000	100,00	100%									
Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca	10.613.000	7.775.000	73,25	100%	Terlaksananya kegiatan MPK ke sekolah sekolah dan desa	6	6	kec.	Tercapainya layanan MPK ke sekolah sekolah dan desa	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya untuk pembayaran perjalanan dinas menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	60.811.000	59.723.000	98,21	100%	Terlaksananya publikasi pemanfaatan perpustakaan	1	1	tahun	Tercapainya peningkatan jumlah kunjungan ke perpustakaan	100	100	%	
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	182.824.500	177.177.500	96,91	100%	Terlaksananya penyediaan : ¼ Buku bahan pustaka ¼ Surat kabar dan majalah	2 1	2 1	paket tahun	Tercapainya peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke KPAD kabupaten Kotawaringin Barat	100	100	%	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5.065.000	4.982.000	98,36	100%									

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan Sistem Katalogisasi	1.302.000	1.302.000	100,00	100%									
Perawatan Bahan Pustaka	1.705.000	1.705.000	100,00	100%									

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi urusan perpustakaan, antara lain :

1. Layanan perpustakaan belum sepenuhnya ditunjang sarana, prasarana dan fasilitas yang memadai;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan layanan perpustakaan;
3. Terbatasnya jenis layanan perpustakaan. Koleksi bahan pustaka masih terbatas, baik dari segi jumlah koleksi maupun klasifikasi bukunya, sehingga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat;
4. Jumlah dan kompetensi tenaga pengelola perpustakaan belum memadai;
5. Layanan perpustakaan keliling belum dapat menjangkau ke seluruh elosoak desa;
6. Lambannya pertumbuhan perpustakaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, upaya yang akan dilakukan, yaitu mengusulkan tambahan pagu anggaran yang memadai, sehingga secara bertahap akan dapat mengupayakan :

1. Secara bertahap meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan serta melakukan perubahan *lay out* ruangan, mengganti warna cat pagar, bangunan dan perabotan perpustakaan ;
2. Melakukan sosialisasi dan promosi-promosi melalui penyelenggaraan even-even dengan cara kemitraan seperti lomba-lomba, mini bazar, pasar murah, parade band dan dance, pentas teater, ikut pameran dan peluncuran koleksi buku baru;
3. Meningkatkan jenis layanan perpustakaan yang semula hanya 6 layanan (sirkulasi, ruang baca, ruang anak, referensi, perpustakaan keliling dan mendongeng) ditambah 7 layanan (wisata pustaka, internet, *wifi*, pinjam pakai buku, audio visual, bimbingan pemakai dan kelas berbagi) sehingga saat ini menjadi 13 layanan;
4. Secara bertahap memperbanyak koleksi bahan pustaka serta menggalakkan gerakan hibah buku;
5. Meningkatkan kapasitas SDM melalui diklat yang dibiayai sendiri juga dengan kemitraan;
6. Meningkatkan layanan perpustakaan keliling ke pelosok desa disertai dengan kegiatan pendukung, seperti kelas berbagi dan mendongeng;
7. Mendorong pertumbuhan perpustakaan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

4.2. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

4.2.1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

a) Kondisi Umum

Pembangunan subsektor kelautan dan perikanan selain ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan juga terus didorong dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subsektor kelautan dan perikanan adalah salah satu pendukung usaha ekonomi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam usaha menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

Pembangunan kelautan dan perikanan juga harus secara berkelanjutan. Oleh karena itu, selain tetap menggiatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, juga perlu didukung upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem kelautan dan perikanan.

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi panjang pantai sebesar 178 km sehingga potensi dari penangkapan di perairan laut cukup besar. Di samping itu juga ada sungai besar dan kecil, danau dan rawa yang juga mempunyai potensi baik untuk penangkapan maupun budidaya. Sumber air cukup melimpah di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, meliputi kolam, keramba, jaring apung maupun tambak, yang tersebar di semua Kecamatan. Usaha untuk meningkatkan perikanan budidaya perlu terus digalakan untuk mengurangi ketergantungan dari perikanan tangkap. Produksi perikanan secara keseluruhan pada tahun 2014 di Kabupaten kotawaringin Barat sebesar 16.345,53 ton.

Pada tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan telah mendorong pembukaan lapangan kerja baru bagi sekitar 4.616 orang dengan perincian adalah sebagai berikut :

- Bidang perikanan tangkap : 2.081 orang
- Bidang perikanan budidaya : 1.553 orang
- Bidang pengolahan dan pemasaran : 928 orang

Pengukuran capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.84
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014

No.	Indikator	2013	2014		
			Target	Realisasi	% Realisasi thd target
1.	Produksi perikanan (ton)	13.506,66	14.460,8	16.345,53	113,03
2.	Produksi Perikanan tangkap (ton)	10.684,10	10.472,8	12.165,80	116,17
3.	Produksi Perikanan Budi daya (ton)	2.822,56	3.988	4.179,73	104,81
4.	Rata-rata Konsumsi ikan per orang/tahun (kg)	37,00	37,80	38,00	97,00
5.	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	1.357,17	1.365,44	1.357,17	99,39
6.	Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)	166,70	1.500	1.481,70	98,00
7.	Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg/kapita/tahun)	0,50	0,50	0,50	100
8.	Peningkatan produksi benih ikan (juta ekor)	0,10	0.35	0,35	100

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kobar

Bila dilihat dari Indikator Capaian Kinerja sebagaimana yang telah ditampilkan diatas, dimana dari semua indikator yang ada mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Urusan Pilihan dibidang Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 cukup berhasil meskipun terdapat beberapa indikator yang masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 15.458.898.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.625.277.492,00 atau 94,60 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pertanian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.85

Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2014

Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.001.331.900	849.323.091	94,55	98,26	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	0	0	0	Tersedianya jasa surat menyurat	12	0	Bulan	Meningkatnya koordinasi dan korespondensi melalui PT.Pos dan Giro	100	0	%	Penyerapan anggaran tdk optimal karena dilakukan via telepon,faksimi le,dan email
Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik	147.000.000	129.096.651	87,82	100	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran air, telepon, listrik, media massa dan internet	12	12	bulan	Meningkatnya kinerja dinas secara keseluruhan	100	100	%	Penyerapan anggaran tdk optimal karena disesuaikan dg kebutuhan selama 12 bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	52.150.000	19.685.000	37,75	100	Tersedianya Mobil operasional dinas dan motor dinas	28	28	unit	Meningkatnya kinerja aparaturnya dinas	100	100	%	Penyerapan anggaran tdk optimal karena disesuaikan dg kebutuhan selama 12 bulan
Penyediaan jasa administrasi keuangan	113.406.500	90.562.500	79,86	100	Tersedianya : - buku cek, Materai Rp.6.000 , Materai Rp.3.000,	4 600 500	4 600 500	Buku Buah Buah	Meningkatnya kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100	100	%	

Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa kebersihan kantor	35.088.000	32.658.500	93,08	100	Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan	1	1	paket	Terciptanya lingkungan kebersihan dan kenyamanan tempat kerja	100	100	%	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11.600.000	10.765.000	92,80	90,10	Tersedianya perlatan kerja berupa : ¼ Note Book/Laptop ¼ Komputer /PC ¼ Printer ¼ Mesin Tik	4 10 8 2	4 10 8 2	unit unit unit buah	Berfungsinya peralatan kerja secara optimal	100	100	%	
Penyediaan alat tulis kantor	40.167.400	40.167.000	99,9	100	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1	1	paket	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	46.535.000	45.358.400	97,47	100	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	12	Bulan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	9.500.000	7.745.000	81,53	100	Tersedianya peralatan listrik untuk penerangan kantor	12	12	Bulan	Meningkatnya kinerja dinas	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	187.500.000	186.701.500	99,57	100	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa : - infocus - Camera digital - Ipad - Note Book	1 1 2 7	1 1 2 7	Unit Unit Unit Unit	Meningkatnya kinerja dinas	100	100	%	

Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					- Komputer/PC - Struktur Organisasi, Papan nama,papan kehadiran - Gantungan Koran - Audio visual - Mesin tik - Printer - Megaphone	2 1 3 2 2 7 2	2 1 3 2 2 7 2	Unit Paket Unit Buah Unit Unit Unit					
Penyediaan makanan dan minuman	98.085.000	73.105.000	74,53	97	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	12	12	Bulan	Meningkanya kinerja dinas	100	100	%	Penyerapan anggaran tdk optimal karena disesuaikan dgn jumlah PHL di dinas
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	260.000.000	213.478.540	82,11	95	Terfasilitasinya aparatur dinas mengikuti rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi luar daerah	12	12	Bulan	Meningkatnya koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi	100	100	%	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	809.540.300	766.155.295	94,64	99,60	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8	8	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	
Pembangunan Gedung Kantor	30.000.000	24.691.150	82,30	100	Terlaksananya penambahan daya listrik kantor dinas	2	2	kantor	Meningkatnya kinerja dinas secara keseluruhan	100	100	%	
Pengadaan kendaraan dinas operasional	450.000.000	444.934.000	98,87	100	Tersedianya kendaraan dinas operasional pengawasan SKPD	1	1	unit	Meningkatnya kinerja dinas	100	100	%	

Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	30.000.000	29.700.000	99,00	100	Tersedianya Gorden	300	300	M	Meningkatnya kenyamanan kerja aparatur	100	100	%	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12.000.000	12.000.000	100	100	Tersedianya peralatan berupa : Kipas Angin AC	4 2	4 2	Unit Unit	Meningkatnya kinerja dinas	100	100	%	
Pengadaan meubeleur	96.000.000	95.920.000	99,92	100	Tersedianya penyediaan meubeleur kantor : ¼ Kursi rapat ¼ Kursi kerja ¼ Meja rapat ¼ Meja kerja ¼ Filling kabinet ¼ Lemari arsip	30 16 1 2 2 4	30 16 1 2 2 4	Buah Buah Set Buah Buah Buah	Meningkatnya kinerja dinas	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	84.840.300	84.089.000	99,11	100	Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan kantor pada : ¼ PPI Kumai ¼ BBI Pinang Merah ¼ BBAP Sei Bakau ¼ Kantor Dinas	1 1 1 2	1 1 1 2	Gedung Gedung Gedung Gedung	Terpeliharnya gedung kantor Dinas, PPI Kumai, BBI Pinang Merah dan BBAP Sei Bakau	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	98.700.000	70.321.145	71,25	100	Tersedianya bahan bakar minyak/gas dan pelumas pada ¼ Mobil operasional ¼ Motor Dinas ¼ Kapal Pokmaswas 5,5 GT	3 25 1	3 25 1	unit unit unit	Meningkatnya kinerja dinas	100	100	%	Penyerapan anggaran tdk optimal karena disesuaikan dg kebutuhan selama 12 bulan

Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.000.000	4.500.000	56,25	60	Terlaksananya pemeliharaan AC, jaringan listrik dan jaringan air	12	12	Bulan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100	60	%	Penyerapan anggaran tdk optimal karena disesuaikan dg kebutuhan selama 12 bulan
Program peningkatan disiplin aparatur	85.000.000	79.736.800	93,81	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	42.500.000	39.872.800	93,82	100	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk pegawai	85	85	Stel	Terciptanya keseragaman pakaian dinas pegawai	100	100	%	
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	42.500.000	39.864.000	93,80	100	Tersedianya pakaian batik untuk pegawai	85	85	Stel	Terciptanya keseragaman pakaian dinas pegawai	100	100	%	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	80.000.000	8.312.000	10,39	20	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	20	%	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	80.000.000	8.312.000	10,39	20	Terlaksananya pegawai mengikuti diklat teknis	10	2	orang	Meningkatnya kompetensi dan kapasitas aparatur	10	2	orang	Masih kurangnya minat para pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis

Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.000.000	1.642.000	82,10	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000	821.000	82,10	100	Tersedianya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	Dok	Terlaksananya pelaporan kinerja dinas	100	100	%	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000	821.000	82,10	100	Tersedianya bahan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	Dok	Terlaksananya pelaporan keuangan dinas	100	100	%	
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	138.348.000	108.477.800	78,41	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1	1	Keg	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	100	100	%	
Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	138.348.000	108.477.800	78,41	100	¼ Tersedianya data dan informasi wilayah pesisir	11	11	Desa	Tersedianya hasil pengujian kualitas air dan ikan	50	50	%	
					¼ Tersedianya alat penguji kualitas ikan	4	4	Set					
					¼ Terlaksananya pengujian/pemeriksaan kualitas air dan bio indikator perairan di DAS Arut	30	30	Sampel					

Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					¼ Terlaksananya pengujian/pemeriksaan kualitas ikan	100	100	Sampel					
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	1.376.077.000	1.273.058.150	92,51	96,36	Terlaksananya kegiatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	100	100	%	
Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan	747.752.000	723.584.150	96,77	99,35	¼ Tersedianya beje ikan	3	3	Buah	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengamanan dan penagwasan sumberdaya kelautan dan perikanan	20	20	%	
					¼ Terlaksananya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	1	1	Tahun					
					¼ Tersedianya prasarana usaha penangkapan ikan untuk eks illegal fishing	5	5	Buah					
					¼ Tersedianya prasarana usaha budidaya ikan untuk eks.illegal fishing	1	1	Paket					
					¼ Terlaksananya sosialisasi pengguna alat tangkap yang dilarang dan sitem	100	100	Orang					

Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					pengawasan masyarakat ¼ Terbentuknya pokmaswas yang baru	5	5	Klpk.					
Pengelolaan dan Pengembangan sumberdaya Kelautan dan Perikanan	628.325.000	549.474.000	87,45	92,80	¼ Tersosialisasinya kawasan konservasi ¼ Termonitornya lokasi cadangan kawasan konservasi laut dan perairan umum ¼ Tersedianya dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan laut ¼ Terlaksananya pembuatan dan pemasangan terumbu buatan ¼ Terlaksananya identifikasi kawasan konservasi perairan DAS Arut ¼ Terlaksananya restocking ikan	1 4 1 20 1 2	1 4 1 20 1 2	Kali Lokasi Dok Buah Paket Lokasi	Tersedianya data identifikasi dan kawasan konservasi perairan DAS Arut	1	1	dok	
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	3.487.725.000	3.395.680.086	97,36	99,93	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Budidaya Perikanan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Budidaya Perikanan	100	100	%	

Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengembangan Bibit Ikan Unggul	605.425.000	576.754.100	95,26	99,59	¼ Terbinanya masyarakat pembudidaya penyedia bibit (UPR) ¼ Terlaksananya pembibitan ikan di Instalasi BBI ¼ Terlaksananya pembibitan ikan di BBI Pinang Merah ¼ Terlaksananya pembibitak ikan di BBAP Sei Bakau	6 2 1 1	6 2 1 1	Unit Unit Unit Unit	Meningkatnya penyediaan bibit ikan unggul untuk pembudidaya ikan di Kab.Ktw.Barat	25	25	%	
Pendampingan pada Kelompok Tani Budidaya Ikan	498.850.000	473.860.601	94,99	100	¼ Terlaksananya lanjutan pembangunan gedung laboratorium HPI ¼ Terlaksananya pelatihan budidaya ikan di kolam dan keramba ¼ Terlaksananya pengadaan bibit rumput laut ¼ Terlaksananya studi banding ke pembudidaya ikan diluar daerah ¼ Terlaksananya	1 60 1 5 4	1 60 1 5 4	paket Orang Paket Orang Klpk	Berproduksinya kawasan budidaya ikan di kolam	4	4	Desa	

Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					pengadaan bibit dan pakan ikan untuk kelompok pembudidaya ¼ Terlaksananya monitoring hama penyakit ikan ¼ Tersedianya saprokan (obat-obatan) untuk pembudidaya ikan	20 1	20 1	Kali Paket					
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	2.383.450.000	2.345.065.385	98,39	100	¼ Tersedianya bibit ikan ¼ Tersedianya sarana dan prasarana panen tambak ¼ Tersedianya saluran pemasukan tambak rakyat ¼ Tersedianya pakan ikan ¼ Tersedianya hatchery indoor BBI P.Merah ¼ Tersedianya kolam pendederan BBI P.Merah ¼ Tersedianya KJA percontohan ¼ Tersedianya kolam untuk POKDAKAN	1 1 1 1 1 1 36 2	1 1 1 1 1 1 36 2	paket paket paket paket paket paket unit paket	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	15	15	%	

Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					¼ Tersedianya mesin pompa air ¼ Tersedianya bangsal perbenihan BBAP S.Bakau	3 1	3 1	unit paket					
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	6.808.034.000	6.514.223.650	95,68	98,60	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap	100	100	%	
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	1.414.322.000	1.267.422.850	89,61	93,33	Terlaksananya : ¼ pertemuan kelompok nelayan ¼ Tersedianya petugas pengelola PPI Kumai ¼ Terbentuknya tim pelelangan ikan ¼ Terbentuknya tenaga/petugas pelelangan ikan ¼ Tersedianya Kapal Nelayan	10 7 10 5 9	10 7 10 5 9	kali orang orang orang unit	Berfungsinya PPI dan TPI Kumai sebagai pusat pelelangan ikan	60	60	%	
Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap	1.513.000.000	1.499.583.200	99,11	99,93	¼ Terbinanya lembaga usaha perikanan tangkap ¼ Tersedianya kapal perikanan tangkap ¼ Tersedianya alat tangkap ikan ¼ Tersedianya cold box	11 8 240 20	11 8 240 20	Desa Unit Pcs buah	Meningkatnya kelembagaan usaha perdagangan perikanan tangkap	25	25	%	

Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peningkatan Perikanan Tangkap	3.880.712.000	3.747.217.600	96,56	100	¼ Tersedianya sarana dan prasarana PPI Kumai ¼ Pengadaan kelotok dan kapal nelayan ¼ Tersedianya alat tangkap ikan ¼ Tersedianya mesin 23 PK ¼ Terlaksananya jalan lingkungan PPI Kumai ¼ Pengadaan kelotok dan kapal nelayan	5 24 6 20 200 6	5 24 6 20 200 6	unit unit paket unit M unit	Terlaksananya Prasarana PPI Kumai yang representatif	75	75	%	
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	121.550.000	114.499.600	94,20	99,83	Terlaksananya kegiatan pada Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	100	100	%	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Perikanan	121.550.000	114.499.600	94,20	99,83	¼ Terlaksananya rapat koordinasi penyuluhan kelautan dan perikanan ¼ Terlaksananya lomba UKM ¼ Terfasilitasinya pengumpulan dan pengolahan data kelautan dan perikanan ¼ Terlaksananya keikutsertaan dalam PENAS	4 1 12 6	4 1 12 6	Kali Kali Bulan Orang	Meningkatnya kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan	25	25	%	

Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1.448.892.000	1.407.582.320	97,15	98,65	Terlaksananya kegiatan pada Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	4	4	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	100	100	%	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rantai Dingin Produk Perikanan	288.048.000	276.039.050	95,83	97,95	¼ Tersedianya unit peralatan pendukung pabrik es TPI Kumai ¼ Tersedianya peralatan pendukung pabrik es sungai bakau ¼ Tersedianya cold box ¼ Tersedianya alat penghancur es	2 1 5 3	2 1 5 3	Paket Unit Unit unit	Meningkatnya mutu hasil perikanan	20	20	%	
Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan tradisional	410.300.000	396.689.920	96,68	98,50	¼ Terlaksananya pelatihan pembuatan pakan ikan ¼ Tersedianya alat mesin penepung ikan ¼ Tersedianya alat mesin pakan ikan ¼ Terlaksananya pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan	30 1 20 1	30 1 20 1	orang unit unit tahun	Meningkatnya sarana dan prasarana pengolahan	20	20	%	

Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	54.800.000	52.668.000	96,11	98,36	¼ Tersusunnya laporan akhir tahun ¼ Termonitornya dan terkendalinya kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan	1 80	1 80	Tahun %	Tercapainya sasaran/tujuan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan	90	90	%	
Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan	695.744.000	682.185.350	97,0	99,05	¼ Terlaksananya rangka bawah pasar ikan tradisional ¼ Terlaksananya pembangunan gedungoutlet pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ¼ Tersedianya bahan rumah kemasan ¼ Terlaksananya pameran perikanan	1 1 1 2	1 1 1 2	Unit Unit Tahun kali	Meningkatnya promosi dan pemasaran hasil perikanan	20	20	%	
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	100.400.000	98.410.000	98,02	100	Terlaksananya kegiatan pada program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	1	1	Keg	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	100	100	%	
Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	100.400.000	98.410.000	98,02	100	Terlaksananya demplot budidaya ikan lokal di kolam	1	1	lokasi	Berfungsinya kolam budidaya ikan lokal di kumpai batu bawah	25	25	%	

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terkait dengan urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Sumberdaya manusia dan kelembagaan nelayan pembudidaya ikan serta pengolahan hasil perikanan masih rendah;
2. Sarana dan teknologi penangkapan ikan yang di miliki nelayan masih belum memadai;
3. Sarana, prasarana dan teknologi dalam budidaya ikan masih sederhana;
4. Sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih terbatas;
5. Akses terhadap informasi teknologi, permodalan dan pemasaran masih terbatas;
6. Sarana produksi perikanan sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah;
7. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan masih kurang;
8. Penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang (*Illegal Fishing*) oleh masyarakat masih cukup tinggi;
9. Pencemaran dan penurunan kualitas sumberdaya kelautan dan perikanan akibat aktifitas manusia yang tidak bertanggung jawab dan faktor alam.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas beberapa solusi yang seharusnya dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kegiatan pembinaan, pengawasan, pendampingan dan penyuluhan serta pelatihan untuk peningkatan sumberdaya dan penguatan kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha perikanan;
2. Fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan;
3. Meningkatkan dan mempermudah akses nelayan pembudidaya dan pelaku usaha terhadap informasi, teknologi, permodalan dan pemasaran yang dibutuhkan;
4. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan budidaya;
5. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hasil perikanan;
6. Meningkatkan peran Balai Benih dan Usaha Pembibitan Rakyat (UPR) dalam menyediakan bibit ikan dan mengurangi ketergantungan dari luar daerah;
7. Mengoptimalkan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pelayanan kapal perikanan;
8. Pengembangan, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara lestari, berkelanjutan dan bertanggung jawab;

9. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

4.2.2 URUSAN PERTANIAN

4.2.2.1 Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

a) Kondisi Umum

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain sebagai penyedia bahan pangan baik nabati maupun hewani, sektor ini berperan dalam rangka penyediaan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan sumber pendapatan masyarakat di perdesaan, disekaligus pemenuhan input bagi sektor industri pengolahan. Kontribusinya terhadap pembentukan PDRB terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Pembangunan pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan sub-sektor pendukungnya, menjadi tanggung jawab tiga pilar, yakni pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pembangunan sektor ini diarahkan pada terwujudnya pertanian yang bersifat komersial dan efisien, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengetahuan dan teknologi tepat guna, yang berimplikasi pada peningkatan daya saing, pendapatan dan nilai tambah produk pertanian.

Keberhasilan pembangunan pertanian di daerah salah satunya tercermin dari peningkatan produksi komoditas subsektoral (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan), peningkatan kesejahteraan petani yang diukur dari besaran nilai tukar petani yang meningkat dari tahun ketahun.

Capaian ini sejalan dengan target capaian indikator kinerja pembangunan sektor pertanian dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2016 yang meliputi peningkatan pengembangan aktivitas kelembagaan petani, nilai tukar petani, peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, serta perkembangan luas lahan produktif sehubungan dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan.

Tabel. 4.86
Indikator dan Capaian kinerja Urusan Pertanian di Kab. Kotawaringin Barat
Tahun 2013-2014

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2013	2014		
			Target	Capaian	%
II	Pelayanan Urusan Pilihan				
1.	Pertanian dan Peternakan				
1.1.	Luas tanam tanaman pangan				
1.1.1.	Padi sawah (Ha)	7.200	7.848	6.866	87,49
1.1.2.	Padi ladang (Ha)	3.104	3.781	2.862	75,69
1.1.3	Jagung (Ha)	503	1.402	638	45,51
1.2.	Luas Panen Tanaman Pangan				
1.2.1	Padi sawah (Ha)	6.823	7.456	6.914	92,73
1.2.2	Padi ladang (Ha)	2.814	3.592	2.674	74,44
1.2.3	Jagung (Ha)	488	1.332	616	46,25
1.3	Produktivitas tanaman pangan				
1.3.1	Padi sawah (Ton/Ha)	3,39	3,55	3,42	96,34
1.3.2	Padi ladang (Ton/Ha)	2,18	2,11	2,18	103,32
1.3.3	Jagung (Ton/Ha)	3.69	3.20	3,75	117,19
1.4	Produksi tanaman pangan				
1.4.1	Padi sawah (Ton)	23.130	26.467	23.646	89,34
1.4.2	Padi ladang (Ton)	6.148	7.579	5.837	77,01
1.4.3	Jagung (Ton)	1.799	4.262	2.308	54,15
1.5	Populasi Ternak				
1.5.1	Sapi (ekor)	11.148	16.777	13.155	78,41
1.5.2	Kerbau (ekor)	-	-	-	
1.5.3	Kambing /Domba (ekor)	2.118	2.373	2.398	101,05
1.5.4	Babi (ekor)	5.327	5.761	5.498	95,43
1.5.5	Ayam buras (ekor)	342.230	399.856	343.941	86,02
1.5.6	Ayam ras petelur (ekor)	-	-	-	
1.5.7	Ayam ras pedaging (ekor)	163.699	203.164	166.973	82,19
1.5.8	Itik (ekor)	39.708	42.901	40.317	93,98
1.6	Produksi Ternak				
1.6.1	Sapi (Ton)	551,99	623,29	552,96	88,72
1.6.2	Kerbau (Ton)	-	-	-	
1.6.3	Kambing / Domba(Ton)	49,43	54,61	49,62	90,87
1.6.4	Babi (Ton)	94,00	108,52	93,25	85,93
1.6.5	Ayam buras (Ton)	317,36	393,64	388,09	98,59
1.6.6	Ayam Ras Petelur (Ton)	-	-	-	
1.6.7	Ayam Ras Pedaging (Ton)	885,56	839,86	886,34	105,53
1.6.8	Itik (Ton)	15,77	14,41	17,78	123,36
1.7	Produksi Telur				
1.7.1	Ayam buras (Ton)	207,98	251,31	208,76	83,07
1.7.2	Ayam Ras Petelur (Ton)	-	-	-	
1.7.3	Itik (Ton)	133	149,20	133,42	89,42
1.8	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	1,50			
1.9	Kontribusi Sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	1,76			
1.10	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kobar (%)				

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan, Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KP2KP), dan Dinas Perkebunan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 19.768.585.950,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.464.078.113,43 atau 78,22%.

Untuk Dinas Pertanian dan Peternakan mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 15.997.721.950,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.172.715.957,43 atau 76,09

Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPPKP) mendapatkan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 406.450.000,00 terealisasi sebesar Rp. 375.690.325,00 atau 92,43 % .

Sedangkan Dinas Perkebunan mendapatkan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.364.414.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.915.671.831,00,00 atau 86,66 % .

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pertanian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.87

Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2014 Yang dilaksanakan oleh Distanak dan KP2KP

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ANAK	20.907.864.464	16.826.969.717	80,48	86,50									
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.175.197.600	1.050.088.816	89,35	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	1.600.000	64,00	100	Terlaksananya penyediaan perangko untuk kebutuhan pengiriman paket surat dinas	12	12	bulan	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat	100	100	%	Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	112.440.000	95.562.604	84,99	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air, listrik serta surat kabar	12	12	bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air, listrik serta surat kabar untuk menunjang terlaksananya tupoksi	100	100	%	Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	12.250.000	4.317.900	35,25	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	40 5	40 5	unit unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa administrasi keuangan	170.861.500	134.421.500	78,67	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan	12	12	bulan	Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor Terwujudnya peningkatan kinerja dan kelancaran dalam pengadminis trasian keuangan	100 100	100 100	% %	Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan
Penyediaan jasa kebersihan kantor	63.974.000	55.110.000	86,14	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	4 1	4 1	orang paket	Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan	100	100	%	Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	18.600.000	17.200.000	92,47	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Dinas Pertanian dan Peternak an berupa : ¼ Jaringan komputer dan internet ¼ Mesin tik ¼ Printer ¼ PC/Laptop ¼ LCD proyektor	1 7 12 15 4	1 7 12 15 4	tahun unit unit unit unit	Tercapainya optimalisasi fungsi peralatan kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan alat tulis kantor	35.000.000	35.000.000	100,00	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	paket	Tercapainya kelancaran pelaksana an tupoksi Dinas	100	100	%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.000.000	33.100.000	91,94	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan & penggandaan kebutuhan administrasi perkantoran	12	12	bulan	Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada Dinas Pertanian dan Peternakan	100	100	%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	11.190.000	11.190.000	100,00	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor	1	1	tahun	Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	295.949.100	284.782.000	96,23	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ¼ Mesin Tik Manual ¼ Komputer PC ¼ Notebook ¼ PC Tablet ¼ Printer ¼ Plotter	4 1 8 1 10	4 1 8 1 10	unit unit unit unit unit	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran kerja	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					¼ TV 32” ¼ Kamera Digital ¼ LCD Proyektor ¼ Alat Pengeras Suara ¼ Telpon PABX ¼ GPS ¼ pengembangan web	1 2 1 2 2 1 7 1	1 2 1 2 2 1 7 1	unit unit unit unit Paket Unit Paket					
Penyediaan makanan dan minuman	88.433.000	62.053.000	70,17	100	Tersedianya minum harian bagi Pegawai THL, dan makan-minum kegiatan rapat dinas	1	1	tahun	Terwujudnya kelancaran kerja dan peningkatan kinerja tenaga kontrak	100	100	%	Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	328.000.000	315.751.812	96,27	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	100	%	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	678.025.500	610.765.037	90,08	100	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur bagi pelayanan publik	7	7	Keg.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur bagi pelayanan publik	10	10	%	
Pembangunan gedung kantor	246.000.000	239.383.050	97,31	100	Terlaksananya : ¼ Pemasangan keramik rumah kepala dan rumah jaga BB TP ¼ Pembuatan Papan Nama Puskesmas	1 3	1 3	Paket Unit	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasana kantor	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kumai, Puskesmas Kotawaringin Lama, Breeding Farm Purbasari ¼ Pemasangan Listrik Mushola Kantor 900 Wat ¼ Pemasangan Listrik Rumah Jaga Breeding Farm 900 Watt ¼ Pemasangan Listrik Rumah Kepala BB TP 900 Watt ¼ Penambahan Daya Listrik Gedung Kantor II 5.000 Watt ¼ Pembangunan Gudang Aset	1 1 1 48	1 1 1 48	paket paket Paket Paket m2					
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	86.195.000	85.650.000	99,37	100	Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa : ¼ Umbul-Umbul Atap Bendera Trisir ¼ Umbul-Umbul Halaman ¼ Umbu-Umbul Atap Bendera Terisir (Hut Kobar) ¼ Gorden Kantor BBTP ¼ Air Conditioner (AC) ¼ Teralis Kantor BBTP	200 20 75 150 7 15	200 20 75 150 7 15	m Buah Meter lari Meter Unit meter	Terciptanya keamanan gedung kantor dan kenyamanan kerja aparatur	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan peralatan gedung kantor	12.000.000	11.900.000	99,17	100	Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor berupa: ¼ Pengadaan Tangga	4	4	unit	Terwujudnya peningkatan kinerja dan pelayanan kepada publik	100	100	%	
Pengadaan meubeleur	40.000.000	39.820.000	99,55	100	Terlaksananya penyediaan : ¼ Almari Arsip ¼ Almari Kaca obat-obatan ¼ Kursi kerja ¼ Kursi kerja Eselon II ¼ Kursi kerja Eselon III	5 2 10	5 2 10 1 5	unit unit unit buah buah	Terpenuhinya kebutuhan meubeleur kantor untuk mendukung kenyamanan kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	73.930.500	68.653.767	92,86	100	Terlaksananya pemeliharaan : ¼ Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Tidak Bertingkat Rumah Jabatan Kadis ¼ Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Tidak Bertingkat Gudang Alsintan ¼ Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Tidak Bertingkat Puskesmas Kumai ¼ Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Tidak	72 120 165 60	72 120 165 60	m2/thn m2/thn m2/thn m2/thn	Tercapainya optimalisasi fungsi dan kondisi bangunan gedung kantor	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Bertingkat Kantor BBTP ¼ Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Tidak Bertingkat Rumah Kepala BBTP ¼ Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Tidak Bertingkat Check Point Pangkalan Banteng ¼ Pemeliharaan Halaman Gedung/ Bangunan Kantor Distanak ¼ Pemeliharaan Jaringan air dan Pemeliharaan Jaringan Listrik	42 1	42 1	m2/thn Tahun					
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	209.000.000	154.555.320	73,95	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	40 5	40 5	unit unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan kondisi serta terpenuhi nya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	100	%	Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.900.000	10.802.900	99,11	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1	1	paket					

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan disiplin aparatur	90.000.000	89.640.000	99,60	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	45.000.000	44.730.000	99,40	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Dinas	90	90	stel	Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	45.000.000	44.910.000	99,80	100	Tersedianya kebutuhan pakaian adat daerah bagi pegawai di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan	90	90	stel	Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian hari-hari tertentu	100	100	%	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	200.000.000	131.747.600	65,87	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	200.000.000	131.747.600	65,87	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	1	1	Tahun	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparatur sesuai dengan bidang tugasnya	100	100	%	Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.500.000	780.000	31,20	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					pelaporan capaian kinerja dan keuangan				pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000	-	0,00	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	lap	Terpenuhinya ketersediaan bahan perencanaan dan evaluasi program kegiatan untuk tahun berikutnya	100	100	%	Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan
Penyusunan laporan keuangan semesteran	500.000	500.000	100,00	100	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	2	2	lap	Terpantaunya dan termonitornya penyerapan keuangan	100	100	%	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000	280.000	28,00	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	lap	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	709.225.000	661.251.304	93,24	98,98	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	100	100	%	
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	272.570.000	243.937.800	89,50	97,80	Terlaksananya : ¼ Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil berbahan baku MOCAF ¼ Terlaksananya Pelatihan Budidaya	40 40	40 40	orang Orang	Terwujudnya peningkatan kemampuan petani pelaku agribisnis dan kelembagaannya	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Sayuran ¼ Terlaksananya Pelatihan Budidaya Padi Sistem SRI ¼ Tersedianya pengembangan sayuran	30 1	30 1	Orang Lokasi					
Peningkatan kemampuan lembaga petani	436.655.000	417.313.504	95,57	99,73	Terlaksananya : ¼ Terbina dan termonitoringnya GAPOKTAN penerima PUAP, LM3 dan PM2L ¼ Terlaksananya Lomba GAPOKTAN PUAP berprestasi ¼ Terfasilitasinya Tim PUAP Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan ¼ Tersedianya alat peraga untuk mendukung pembelajaran metode SRI ¼ Terbangunnya pondok pertemuan mandukung pengembangan SRI ¼ Terlaksananya keikutsertaan dalam PENAS	94 1 1 23 3 3	94 1 1 3 3 23	Gapokta n kali Tahun Paket . unit. orang	Tercapainya peningkatan kemampuan lembaga petani dan pelaku agribisnis	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	4.108.418.200	3.540.619.950	86,18	95,45	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	100	100	%	
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	3.601.630.000	3.240.118.000	89,96	97,95	¼ Terbangunnya Jalan Usaha Tani (JUT) ¼ Terlaksananya Pengadaan Sarana/Peralatan Pertanian ¼ Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida ¼ Tersusunnya RDK-RDCK Pupuk Bersubsidi ¼ Terlaksananya Pengadaan Herbisida Sistemik	8 1 1 1 1	8 1 1 1 1	Paket Paket Tahun Tahun Paket	Terwujudnya peningkatan akses petani dalam rangka penyediaan input/pemasaran hasil ke lahan pertaniannya	575	575	Ha	
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna	109.638.200	97.766.950	89,17	100	Terlaksananya : ¼ Terlaksananya Demplot padi sawah sistem SRI ¼ Terlaksananya Demplot Kedelai	2 1	2 1	ha ha	Tercapainya penerapan teknologi spesifik lokasi pengembangan padi dan ubi kayu dalam rangka peningkatan produksi pertanian	2	3	komo diti	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengembangan dan Pendayagunaan Alat Mesin Pertanian	397.150.000	202.735.000	51,05	71,57	Terlaksananya : ¼ Terlaksananya rapat/pertemuan UPJA ¼ Terbinanya pengelola alsintan/UPJA ¼ Terlaksananya pengadaan alat dan mesin pertanian	2 1 37	2 1 37	kali tahun unit	Tercapainya peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian	1	1	paket	Pengadaan alsintan tidak dapat terlaksana karena keterbatasan waktu
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	1.306.779.000	1.184.238.100	90,62	98,39	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	100	100	%	
Perlindungan dan Pengamanan Produksi Pertanian	159.441.500	91.480.100	57,38	86,85	Terlaksananya : ¼ Terfasilitasinya pengembangan agen hayati ¼ Terlaksananya gerakan masal pengendalian HPT ¼ Terlaksananya perlindungan tanaman dari serangan OPT/HPT ¼ Tersedianya bahan laboratorium untuk pengendalian OPT ¼ Terlaksananya rakor perlindungan tanaman ¼ Terlaksananya pelatihan pengendalian OPT	6 20 1 1 2 25	6 20 1 1 2 25	Kel Kali Tahun Paket Kali orang	Terpenuhinya perlindungan dan pengamanan tanaman pertanian terhadap gangguan OPT dan dampak perubahan iklim	95	96	%	Kegiatan rakor perlindungan tanaman tidak terlaksana

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air Pertanian	1.147.337.500	1.092.758.000	95,24	100	Terlaksananya : ¼ Tersosialisasinya kegiatan PLA ¼ Terlaksananya pendampingan kegiatan PLA ¼ Terlaksananya pengujian sampel tanah di lokasi SRI ¼ Terlaksananya rehab/optimasi lahan Pembangunan JIUT	8 1 1 100	8 1 1 100	Kali Tahun Paket Ha	Tercapainya peningkatan luas tanam dan optimalisasi pemanfaatan lahan sawah	5	5	%	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1.163.401.650	561.446.750	48,26	53,49	Terlaksananya kegiatan pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	100	100	%	
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	390.383.000	329.195.600	84,33	98,49	Terlaksananya : ¼ Terlaksananya pelatihan petugas keswan dan vaksinator ¼ Terlaksananya sosialisasi keswan ¼ Terlaksananya pemeriksaan specimen hewan/ternak ¼ Terlaksananya rakor PHM ¼ Tersedianya sarana pemeliharaan kesehatan hewan	30 3 600 1 1	30 3 600 1 1	Orang lokasi sampe l kali tahun	Tercapainya penurunan angka kematian ternak sapi dalam rangka pencapaian Kobar berkecukupan daging 2014	3	3	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					¼ Terfasilitasinya kegiatan pelayanan kesehatan hewan	6	6	Kec					
Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	773.018.650	232.251.150	30,04	30,76	Terlaksananya : ¼ Terwasinya perdagangan dan pemotongan ternak unggas dan ruminansia di RPH dan luar RPH ¼ Tersedianya buku pedoman penyembelihan hewan kurban ¼ Terlaksananya pembangunan RPU ¼ Terlaksananya pemeriksaan specimen ternak dan residu antibiotika, cemaran mikroba dan toksisitas pada PAH (daging dan telur) ¼ Terlaksananya rakor pengawasan lalu lintas ternak ¼ Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan kurban ¼ Terfasilitasinya pengawasan lalu lintas perdagangan ternak	1 100 1 75 1 6 1	1 100 - 75 1 6 1	Tahun Buku Paket Sampel Kali Kec tahun	Terpenuhinya pengawasan perdagangan produk pangan asal hewan untuk menjamin kesehatan masyarakat veteriner	80	80	%	Kegiatan pembangunan RPU tidak dapat terlaksana karena terjadi klaim atas lahan lokasi rencana pembangunan RPU (sengketa lahan)

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					dan peredaran bahan pangan asal ternak								
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	6.564.175.000	4.342.138.400	66,15	66,15	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	100	100	%	
Pembibitan dan Perawatan Ternak	1.103.030.000	1.087.750.800	98,61	100	Terlaksananya : ¼ Terlaksananya Pengembangan Ayam Kampung ¼ Tersedianya Peralatan dan bahan Embrio Transfer ¼ Terlaksananya pelatihan petugas IB swakarsa ¼ Terlaksananya operasional Breeding Farm ¼ Terlaksananya Rakor. IB dan Perbibitan Ternak ¼ Tersedianya hand traktor dan genset untuk Breeding Farm ¼ Terlaksananya pembangunan gudang di Breeding Farm ¼ Tersedianya dukungan operasional unit layanan IB	2 2 2 1 2 2 30 17 65	2 2 2 1 2 2 30 17 65	Desa Paket Orang Tahun Kali Unit m2 unit m2	Tercapainya optimalisasi fungsi breeding farm	80	80	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					¼ Terlaksananya rehab berat /total Pos IB Kumpai Batu Atas ¼ Terlaksananya pembangunan kandang unggas di Breeding Farm	60	60	m2					
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	3.978.397.500	1.918.360.700	48,22	53,39	Terlaksananya : ¼ Tersedianya Kajian Pengembangan Kawasan Peternakan dan Integrasi Sapi-Sawit di Kobar (Kec. Arsel dan Kumai) ¼ Tersedianya bibit sapi bibit betina ras bali ¼ Terlaksananya refresing data statistik peternakan ¼ Tersedianya sapi jantan muda ras bali ¼ Terlaksananya sosialisasi pengembangan ternak di 6 kecamatan ¼ Fasilitasi penyebaran dan pengembangan ternak ¼ Terlaksananya pembangunan kandang sapi komunal ¼ Terlaksananya	1 385 2 26 180 1 2 12	1 195 2 10 180 1 2 12	Pake T Ekor Kali Ekor Orang Tahun Paket ha	Tercapainya peningkatan populasi ternak sapi pengembangan	13	18	%	Pihak rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					pembangunan padang penggembalaan/ HPT								
Pengembangan Agribisnis Peternakan	1.482.747.500	1.336.026.900	90,10	98,55	Terlaksananya : ¼ Terlaksananya pelatihan penggaduh ternak sapi ¼ Terlaksananya pelatihan pengembangan unggas ¼ Terlaksananya pengawasan dan pengendalian lokasi sarang burung walet ¼ Terlaksananya lomba ternak ¼ Terlaksananya pengembangan ternak ayam buras ¼ Terlaksananya pengembangan ternak itik	30 30 1 1 12 3	30 30 1 1 12 3	Orang Orang Tahun Kali Paket paket	Tercapainya pengembangan usaha agribisnis peternakan rakyat	15	15	KUB	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program													
Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	406.450.000	375.690.325	92,43		Terlaksananya kegiatan pada Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	100	100	%	
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan	319.710.000	294.195.325	92,02		Terlaksananya penyusunan program penyuluhan tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten	7	7	unit	Terpenuhinya ketersediaan program penyuluhan tingkat kecamatan dan kabupaten	100	100	%	
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan	86.740.000	81.495.000	93,95		Terlaksananya keikutsertaan perwakilan kelompok tani dan petugas penyuluh pada kegiatan PEDTA	25	25	orang	Terpenuhinya peningkatan pengetahuan dan kemampuan petani dan penyuluh melalui PEDTA	100	100	%	

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Pertanian sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktifitas komoditi pertanian tanaman pangan tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.88
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Komoditi Pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 – 2014

No	Jenis Komoditi	2013			2014			+ / (-) Produkti vitas
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produkti vitas (Ton/Ha)	
1	Padi Sawah	6.823	23.129,97	3,39	6.914	23.645,88	3,42	0,88
2	Padi Ladang	2.814	6.148,30	2,18	2.674	5.836,50	2,18	0,00
3	Jagung	488	1.799,08	3,69	616	2.308,04	3,75	1,63
4	Kedelai	12	14,01	1,17	2	2,36	1,18	1,07
5	Kacang Tanah	105	116,29	1,11	95	105,79	1,11	0,55
6	Kacang Hijau	15	11,79	0,79	3	2,37	0,79	0,51
7	Ubi Kayu	526	6.232,09	11,85	416	4.933,69	11,86	0,10
8	Ubi Jalar	175	1.249,74	7,14	127	900,51	7,09	-0,71

Sumber data : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Ktw. Barat

2. Meningkatnya produktivitas tanaman sayuran untuk mendorong peningkatan produksi dibandingkan tahun sebelumnya seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.89
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Tanaman Sayur-Sayuran di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 – 2014

No.	Jenis Komoditi	2013			2014			+ / (-) Produkti vitas
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produkti vitas (Ku/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produkti vitas (Ku/Ha)	
1	Bayam	115	163,0	1,42	92	136,2	1,48	0,04
2	Cabe Rawit	195	389,9	2,00	186	459,7	2,47	0,24
3	Cabe Besar	59	84,3	1,42	60	155,8	2,60	0,83
4	Kacang Panjang	262	688,5	2,62	270	552,8	2,05	-0,22
5	Kangkung	164	259,3	1,61	139	205,4	1,48	-0,08
6	Ketimun	116	148,8	1,32	106	152,2	1,44	0,09
7	Sawi	173	608,1	3,51	188	290,1	1,54	-0,56
8	Terung	192	971,6	5,10	217	587,7	2,71	-0,47
9	Tomat	84	182,9	2,27	90	187,4	2,08	-0,08
10	Buncis	57	89,8	1,65	77	108,2	1,41	-0,15
11	Bawang Daun	80	129,9	1,62	94	159,8	1,70	0,05

Sumber data : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Ktw. Barat

3. Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging ternak dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya :

Tabel 4.90
Populasi Ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013– 2014

No.	Jenis Ternak	Satuan	Populasi Ternak		
			2013	2014	Δ (%)
1	Sapi	Ekor	11.148	13.155	18,00
2	Kambing/Domba	Ekor	2.118	2.398	13,22
3	Babi	Ekor	5.327	5.498	3,21
4	Ayam Buras	Ekor	342.230	343.941	0,50
5	Ayam Ras Pedaging	Ekor	163.699	166.973	2,00
6	Ayam Ras Petelur	Ekor	10.000	10.000	0,00
7	Itik	Ekor	39.708	40.317	1,53

Sumber data : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Ktw. Barat

Tabel 4.91
Produksi Daging di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013– 2014

No.	Jenis Ternak	Satuan	Produksi Daging		
			2013	2014	Δ (%)
1	Sapi	Ton	551,99	552,96	0,17
2	Kambing/Domba	Ton	49,43	49,62	0,38
3	Babi	Ton	94,00	93,25	(0,80)
4	Ayam Buras	Ton	317,37	388,09	22,28
5	Ayam Ras	Ton	885,57	886,34	0,09
6	Itik	Ton	15,77	17,78	12,75

Sumber data : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Ktw. Barat

4. Terdorongnya perkembangan sentra-sentra produksi yang berskala ekonomi dan berbasis agribisnis melalui kegiatan :

❖ Sentra Produksi Tanaman Pangan

- Z Pengembangan Padi Sawah 1.500 ha;
- Z Pengembangan Padi Ladang 500 ha;
- Z Pengembangan Jagung 150 ha;
- Z Pengembangan Kacang Tanah 25 ha;
- Z Pengembangan Kedelai 100 ha;
- Z Optimasi lahan sawah 100 ha;
- Z Pengembangan SRI 12 ha;
- Z Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) 14.133 meter;
- Z Penangkaran benih padi ditingkat penangkar 25 ha;
- Z Pengembangan sentra hortikultura buah-buahan 5 desa;
- Z Demplot padi sawah sistem SRI 2 ha;
- Z Demplot kedelai 1 ha;

- Z Pengamanan produksi TPH 1 tahun.
- ❖ Sentra Produksi Peternakan
 - Z Pengembangan sapi 210 ekor;
 - Z Pengembangan padang penggembalaan 12 ha;
 - Z Pengembangan ayam buras 12 paket (7.200 ekor);
 - Z Pengembangan itik alabio 3 paket (1.800 ekor);
 - Z Bantuan Bibit Ayam Buras 1.200 ekor;
 - Z Peningkatan hasil IB 1.539 ekor;
 - Z Pembinaan dan Pelayanan di Sentra IB 17 ULIB;
 - Z Pengamanan kesehatan ternak 1 tahun.
- 5. Meningkatnya sikap pengetahuan dan ketrampilan petani, petugas lapangan dan berkembangnya kelembagaan, melalui:
 - ❖ Peningkatan kapasitas petugas teknis peternakan, mantri tani dan pengamat hama melalui : optimalisasi RPH, Pelayanan IB, Pelayanan Keswan, Brigade Pengendali HPT dan Unit-Unit pelayanan lainnya;
 - ❖ Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani melalui pelatihan-pelatihan pengolahan hasil berbahan baku MOCAF, pelatihan budidaya padi sistem SRI, pelatihan budidaya sayur-sayuran, pelatihan pengendalian OPT utama, dan pelatihan petugas keswan dan vaksinator serta pelatihan peternak penggaduh.
- 6. Terlaksananya pengobatan ternak sehingga kualitas kesehatan ternak dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Pengobatan ternak meliputi kegiatan pemeriksaan kesehatan ternak untuk mendiagnosa penyakit secara klinis, patologis maupun epidimiologis. Kegiatan pengobatan ternak dilakukan secara massal dengan berkoordinasi dengan PPL/petugas teknis di lapangan melalui kegiatan Posyandunak;
- 7. Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan rabies sehingga dapat mencegah dan menekan penyakit menular hewan. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan pemberian vaksinas anti rabies terhadap anjing berpemilik dan eliminasi/pemusnahan terhadap anjing liar. Selain itu, kegiatan ini dibarengi juga dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit rabies pada anjing, potensi penularan rabies dari anjing kepada manusia, tindakan pencegahan serta tindakan penanganan apabila terjadi kasus gigitan. Dalam kegiatan vaksinasi anti rabies, jumlah anjing yang divaksin sebanyak 1.500 ekor anjing dengan eliminasi anjing liar sebanyak 80 ekor;
- 8. Terlaksananya vaksinasi IBR/BVD/PI-3 sebanyak 350 dosis terhadap ternak sapi sebanyak 350 ekor, sehingga dapat mencegah dan menekan kasus penyakit menular ternak;

9. Terlaksananya surveilans penyakit ternak dan pengiriman spesimen ke laboratorium rujukan sehingga dapat diketahui jenis-jenis penyakit dan sebaran penyakit. Surveilans merupakan kegiatan pengamatan terhadap pola penyakit ternak dengan mengambil sampel serum kemudian dilakukan pemeriksaan/pengujian di laboratorium rujukan. Pada tahun 2014 dilaksanakan pengambilan 325 sampel serum darah untuk identifikasi penyakit jembrana, *brucellosis* dan penyakit lainnya pada ternak sapi. Sedangkan untuk unggas dilakukan pengambilan sebanyak 375 sampel serum ayam untuk pengujian terhadap penyakit flu burung. Dari hasil uji laboratorium pada sampel ternak ruminansia dapat diketahui ternak yang terjangkit penyakit *brucellosis* sebanyak 7 ekor, *BVD* 18 ekor, *Fasciolosis* 17 ekor, dan *Surra* 19 ekor. Begitu juga dengan hasil laboratorium pada sampel darah ayam dihasilkan seropositif rendah artinya masih terdapat kekebalan/antibodi terhadap virus AI walaupun virus sudah tidak ditemukan di dalam tubuh unggas tersebut. Dengan demikian, wilayah Kotawaringin Barat masih dalam status bebas flu burung;
10. Terlaksananya pelatihan petugas kesehatan hewan dan vaksinator. Peserta dalam pelatihan ini adalah perwakilan masyarakat peternak dari beberapa wilayah desa. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan masyarakat peternak dapat menguasai teknik-teknik dasar pencegahan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan. Tujuan dari pelatihan adalah membentuk kader-kader kesehatan hewan di masyarakat sehingga masyarakat dapat secara aktif berperan serta dalam melakukan pelayanan kesehatan hewan di lingkungan masing-masing di wilayah supervisi dokter hewan pemerintah;
11. Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah dilaksanakan meliputi pengawasan lalu lintas ternak oleh 4 orang petugas di 2 (dua) lokasi cek point ternak (Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng dan Desa Sei. Kapitan Kecamatan Kumai) sehingga termonitornya ternak yang keluar/masuk daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, pengendalian pemasukan dan pemotongan ternak, pengawasan produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan, pengawasan ternak kurban dan pengawasan perdagangan dan pemotongan ternak unggas. Berdasarkan laporan dari pos pemeriksaan ternak Kumai selama tahun 2014 terdapat data pemasukan ternak dan produk asal ternak sebagai berikut :

Z Telur Ayam Ras	:	360,5 ton
Z Sapi	:	3.686 ekor
Z Kambing	:	2.334 ekor
Z DOC ayam ras	:	44.348 box
Z Ayam broiler	:	230.454 ekor (pengeluaran 205.190 ekor)

12. Sedangkan untuk pemotongan ternak sapi yang tercatat di RPH dan luar RPH Pangkalan Bun pada tahun 2014 sebanyak 2.430 ekor dan pada Hari Raya Idul Qurban dilaksanakan pemeriksaan hewan kurban dengan jumlah ternak kurban seluruhnya 1.085 ekor terdiri dari sapi 770 ekor, kerbau 3 ekor dan kambing 312 ekor;
13. Lomba ternak tingkat Kabupaten dilaksanakan sebagai wujud apresiasi dan motivasi terhadap peternak. Tujuan pelaksanaan lomba ternak adalah meningkatkan kualitas ternak yang dipelihara para peternakan. Dilakukan penilaian terhadap teknis budidaya dan *performace* yang baik, penilaian pedet/bakalan yang berkualitas, penilaian bibit jantan dan betina yang baik dengan harapan dapat memberikan kualitas dan kuantitas keturunan yang baik;
14. Selama kurun waktu 2014 Dinas Pertanian dan Peternakan ikut memberikan kontribusi dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.92
Pendapatan Asli Daerah dari Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014

Kode Rekening	Uraian	Target 2014	Realisasi	
			Rp.	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	628.500.000	334.350.000	53,20
4.1.2	Retribusi Daerah	628.500.000	124.000.000	19,73
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	628.500.000	124.000.000	19,73
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	140.000.000	121.500.000	86,79
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	488.500.000	2.500.000	0,51
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0	210.350.000	100,00
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0	210.350.000	100,00
4.1.4.01.13	Penjualan hasil pertanian	0	60.350.000	100,00
4.1.4.01.16	Penjualan hasil peternakan	0	150.000.000	100,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	32.000.000	25.597.000	79,99
4.3.1	Pendapatan Hibah	32.000.000	25.597.000	79,99
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	32.000.000	25.597.000	79,99
4.3.1.04.01	Kelompok masyarakat / perorangan	32.000.000	25.597.000	79,99
Jumlah		660.500.000	359.947.000	54,49

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Ktw. Barat

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam Urusan Pertanian adalah :

Dinas Pertanian dan Peternakan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Peternakan dalam melaksanakan urusan pertanian adalah sebagai berikut :

1. Produktivitas tanaman pangan belum optimal dalam mendorong peningkatan produksi padi dan palawija, serta tingginya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke perkebunan;
2. Beberapa wilayah sentra Tanaman Pangan masih rawan terhadap serangan OPT;
3. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani akibat biaya produksi yang tinggi, harga jual belum kompetitif;
4. Populasi dan Produksi ternak khususnya sapi potong belum mampu memenuhi kebutuhan daerah;
5. Kebutuhan ternak untuk konsumsi masyarakat masih tergantung dari luar daerah terutama Kalimantan Selatan dan pulau Jawa. Tingkat kelahiran/produktivitas ternak masih rendah dengan skala usaha ditingkat peternak masih belum memenuhi skala ekonomis.

Solusi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya perbaikan yang perlu dilakukan :

1. ***Peningkatan Produksi***, dilakukan dengan peningkatan luas tanam, rehabilitasi dan optimalisasi atau peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 100-200 pada kawasan sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana irigasi, melakukan gerakan aksi membuka lahan tidur dan pemanfaatan tanaman sela pada areal perkebunan;
2. ***Peningkatan Produktivitas***, dilakukan dengan mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani melalui meningkatkan mutu intensifikasi, penggunaan benih/bibit unggul bermutu, pemanfaatan alsintan, dan pemanfaatan paket teknologi mulai pra produksi, proses produksi, panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
3. ***Pengamanan Produksi***, dilakukan dengan antisipasi gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan Pengendalian Hama Terpadu (HPT) dan menggerakkan peran serta aktif masyarakat dalam pengendalian OPT melalui pembentukan regu pengendali hama ditingkat kelompok tani. Memanfaatkan musuh alami dalam pengendalian hama dan mengurangi penggunaan bahan kimia yang

- dapat mengganggu kesehatan. Antisipasi terhadap perubahan iklim dengan memperkuat antisipasi agar kerusakan tanaman dapat dihindari.
4. **Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pemasaran**, dilakukan melalui peningkatan ketrampilan kelompok tani dalam penanganan panen dan pasca panen, pengolahan hasil melalui pelatihan dan demonstrasi. Memfasilitasi terlaksananya kemitraan antara petani selaku produsen dengan mitra usaha/swasta dalam menangani pemasaran;
 5. **Pembinaan Kelembagaan**, dilakukan dengan mendorong peningkatan peranan BPP, Penyuluh dan Kelompok Tani secara optimal dalam pembinaan usahatani. Optimalisasi kelembagaan terkait seperti UPJA, P3A maupun penangkar benih;
 6. **Peningkatan populasi ternak**, dilakukan dengan peningkatan kelahiran melalui IB, peningkatan produksi dan produktivitas, pengendalian pemotongan ternak betina produktif, pengendalian reproduksi dan penyediaan bibit ternak, serta pengembangan integrasi sawit-sapi;
 7. **Pengembangan sumberdaya pakan**, melalui pembinaan mutu pakan, pemanfaatan pakan lokal dan pemanfaatan teknologi pakan;
 8. **Melakukan penyebaran ternak**, dalam rangka pengembangan ternak dan mendorong berkembangnya integrasi sapi dan tanaman. Pemasyarakatan teknologi tepat guna berbasis sumberdaya lokal, spesifik lokal dan berhasil guna;
 9. **Pembinaan kelembagaan dan permodalan**, meliputi pemberdayaan kelembagaan kelompok tani, asosiasi peternak dan penyediaan modal usaha melalui perbankan maupun lembaga permodalan lainnya;
 10. **Pelayanan kesehatan hewan**, untuk menekan tingkat kematian melalui pengobatan masal dan vaksinasi;
 11. **Pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak dan hewan**, menular melalui pengambilan spesimen, vaksinasi anti rabies, eliminasi anjing liar dan depopulasi ternak unggas serta pengawasan lalu lintas ternak.

4.2.2.2 Sub Sektor Perkebunan

a) Kondisi Umum

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang menjadi andalan Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan oleh masyarakat dan juga ada investasi dari beberapa perusahaan besar. Beberapa komoditi perkebunan yang dikembangkan oleh masyarakat antara lain : karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, lada, mente dan aren. Kebun rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat didominasi oleh kelapa sawit, dengan luasan mencapai 42.280,70 ha.

Kebun kelapa sawit rakyat terbesar terdapat di Kecamatan Kotawaringin Lama dengan luas mencapai 18.141,38 ha, diikuti Pangkalan Lada sebesar 13.146,78 ha, Kumai sebesar 5.795,13 ha, Arut Selatan sebesar 4.137,81 ha, Pangkalan Banteng sebesar 1.315,00 dan Arut Utara sebesar 633,69 ha. Sedangkan dari sisi produksi, produksi kelapa sawit terbesar ada di Kecamatan Pangkalan Lada dengan produksi sebesar 30.545,00 ton. Ini lebih besar dibandingkan produksi di Kecamatan Kotawaringin lama yang hanya sebesar 27.256,50 ton, hal ini karena di Kecamatan Pangkalan Lada umur tanaman lebih tua sehingga produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan di Kecamatan Kotawaringin Lama. Produksi selanjutnya yang tinggi adalah Kecamatan Kumai dengan produksi sebesar 11.127,50 ton, diikuti Kecamatan Arut Selatan dengan produksi sebesar 10.241,55 ton, Kecamatan Arut Utara dengan produksi sebesar 755,00 ton dan terakhir Kecamatan Pangkalan Banteng dengan produksi sebesar 1.440,00 ton. Sedangkan yang dikembangkan oleh investor adalah kelapa sawit dan karet. Luas areal dan produksi beberapa komoditi perkebunan rakyat dapat dilihat pada tabel :

Tabel. 4.93
Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Karet, Kelapa dan Kelapa Sawit per Kecamatan Tahun 2014.

No	Kecamatan	Karet		Kelapa		Kelapa Sawit	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Kotawaringin Lama	1.766,00	513,48	18,00	8,40	18.141,38	27.256,50
2	Arut Selatan	2.516,00	547,52	92,77	33,95	4.137,81	10.241,55
3	Kumai	2.059,00	378,06	579,00	158,80	5.795,13	11.127,50
4	Pangkalan Banteng	6.339,01	2.982,00	136,00	64,80	1.315,00	1.440,00
5	Pangkalan Lada	1.890,99	891,90	229,00	72,08	13.257,78	30.545,00
6	Arut Utara	1.056,00	131,60	14,75	5,80	633,69	755,00
	Jumlah	15.687,00	5.444,46	1.069,52	343,83	43.280,79	81.365,55

Sumber : Statistik Dinas Perkebunan

Produksi kelapa sawit rakyat yang ada selama ini masih mampu ditampung oleh pabrik pengolahan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pabrik-pabrik tersebut disamping menampung hasil perkebunan rakyat juga menampung hasil produksi kebun mereka sendiri. Komoditi perkebunan rakyat yang dominan setelah kelapa sawit adalah karet. Luas areal tanaman karet Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 sebesar 15.687,00 ha. Luas areal tersebut tersebar di enam kecamatan. Di Kecamatan Pangkalan Banteng kebun karet rakyat menempati luas tertinggi sebesar 6.399,01 ha.

Hal ini karena awalnya di Kecamatan Pangkalan banteng terdapat lokasi eks transmigrasi Perkebunan Inti Rakyat (PIR-Trans) yang komoditinya adalah karet. Berikutnya terdapat di Kecamatan Arut Selatan

seluas 1.890,99 ha, Kotawaringin Lama seluas 1.766,00 ha dan terakhir adalah Arut Utara seluas 1.056,00 ha. Sedangkan dari sisi produksi, produksi terbesar di Kecamatan Pangkalan Banteng yaitu mencapai 2.982,00 ton, selanjutnya adalah Pangkalan Lada sebesar 891,90 ton, diikuti Arut Selatan sebesar 547,52 ton, Kotawaringin Lama sebesar 513,48 ton, Kumai sebesar 378,06 ton dan terakhir Arut Utara dengan produksi sebesar 131,60 ton.

Luas areal dan produksi kelapa di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 masing-masing sebesar 1.069,52 ha dan 343,83 ton. Tanaman kelapa tersebar di enam kecamatan. Luas areal dan produksi kelapa terbesar terdapat di Kecamatan Kumai dengan luasan sebesar 579,00 ha dan produksi sebesar 158,80 ton. Diikuti Pangkalan Lada dengan luasan 229,00 ha dan produksi sebesar 72,08 ton, Pangkalan Banteng luas areal 136,00 ha dan produksi sebesar 64,80 ton, Arut Selatan luas areal sebesar 92,77 ha dan produksi sebesar 33,95 ton, Kotawaringin Lama luas areal 18 ha dan produksi sebesar 8,4 ton dan terakhir Arut Utara dengan luasan 14,75 ha dan produksi 5,80 ton.

Komoditi lain yang dibudidayakan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah kopi dan lada. Data luas areal dan produksi kopi dan lada per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.94
Luas Areal dan Produksi Kopi dan Lada Per Kecamatan
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014.

No	Kecamatan	Kopi		Lada	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Kotawaringin Lama	7,50	0,66	120,00	88,20
2	Arut Selatan	24,00	2,55	0,00	0,00
3	Kumai	24,00	2,87	20,00	10,50
4	Pangkalan Banteng	48,00	4,79	127,00	56,94
5	Pangkalan Lada	70,00	3,50	306,00	110,00
6	Arut Utara	0,00	0,00	5,20	3,32
	Jumlah	173,50	14,37	578,20	268,95

Sumber : Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

Dari tabel diatas, dapat dilihat luas areal dan produksi Kopi Kabupaten Kotawaringin Barat masing-masing sebesar 173,50 ha dan 14,37 ton. Tanaman kopi tersebar di lima kecamatan, luas areal terbesar terdapat di Kecamatan Pangkalan Lada sebesar 70,00 ha, disusul Pangkalan Banteng dengan luas sebesar 48,00 ha, diikuti Kumai sebesar 24 ha, Arut Selatan sebesar 24 ha dan terakhir Kotawaringin Lama sebesar 7,50 ha untuk Arut Utara tidak ada luasan komoditi kopi. Sedangkan produksi kopi yang terbesar ada di Kecamatan Pangkalan Lada yaitu sebesar 3,50 ton, diikuti Pangkalan Banteng dengan produksi sebesar 4,79 ton, Kumai dengan

produksi 2,87 ton, Arut Selatan dengan produksi sebesar 2,55 ton dan terakhir di Kotawaringin Lama sebesar 0,66 ton.

Sementara untuk komoditas Lada di Kabupaten Kotawaringin Barat luas areal total sebesar 578,20 ha dengan jumlah produksi 268,95 ton. Luasan terbesar terdapat di Kecamatan Pangkalan Lada sebesar 306,00 ha, disusul Pangkalan Banteng dengan luas sebesar 127,00 ha, diikuti Kotawaringin Lama sebesar 120,00 ha, Kumai sebesar 20,00 ha dan Arut Utara sebesar 5,20 ha. Sedangkan produksi lada yang terbesar di Kecamatan Pangkalan Lada yaitu mencapai 110,00 ton, diikuti Pangkalan Banteng sebanyak 56,94 ton, Kotawaringin Lama sebesar 88,20 ton, Kumai sebesar 10,50 ton dan Arut Utara dengan produksi sebesar 3,32 ton. Komoditi lain yang dibudidayakan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah jambu mete dan aren.

Tabel. 4.95
Luas Areal dan Produksi Mente dan Aren Per Kecamatan
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014

No	Kecamatan	Jambu Mete		Aren	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Kotawaringin Lama	0,00	0,00	49,00	2,88
2	Arut Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kumai	21,00	2,99	0,00	0,00
4	Pangkalan Banteng	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pangkalan Lada	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Arut Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	21,00	2,99	49,00	2,88

Sumber : Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

Luas areal dan produksi Jambu Mete Kabupaten Kotawaringin Barat masing-masing sebesar 21,00 ha dan 2,99 ton. Jambu Mete hanya dibudidayakan di Kecamatan Kumai. Demikian juga dengan tanaman Aren, tanaman Aren hanya terdapat di Kecamatan Kotawaringin Lama dengan luas areal sebesar 49,00 ha dan produksi 2,88 ton.

Sebagai salah satu sub sektor andalan, perkebunan perlu lebih didorong dalam upaya peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil. Mengingat produktivitas tanaman perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih dibawah rata-rata produktivitas perkebunan nasional. Disamping itu perlu ada upaya untuk menarik investasi di sektor perkebunan. Investasi di sektor perkebunan memiliki potensi sangat luas, yakni dalam bidang pengembangan industri hilir pengolahan produk turunan dari kelapa sawit dan karet.

Saat ini industri pengolahan produk kelapa sawit baru sebatas *crude palm oil (CPO)* dan *Palm Kernel Oil (PKO)*. Produk turunan sawit masih sangat banyak untuk dikembangkan, seperti *palm stearin, olein*, minyak

goreng, *palmitat*, sabun, kosmetik dan bahan kimia lain. Secara umum perlu perhatian serius terhadap kondisi Kecamatan Arut Utara, di mana hampir seluruh *komoditi* pertanian memiliki luasan dan produktivitas yang paling rendah.

Tabel. 4.96
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pertanian subsektor Perkebunan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 – 2014

No.	Indikator	Capaian 2013	2014		
			Target	Realisasi	% Realisasi dari target
a.	Perkebunan				
1.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	35,25	35,5	35,25*	99,30
2.	Kontribusi PDRB sub-sektor perkebunan terhadap sektor pertanian (%)	83,73	78,50	83,73*	106,66
3.	Eksport per tahun dari komoditas perkebunan (US\$)	263.608.993,65	161.306.735,49	31.074.462,39*	19,26
4.	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)	50.545*	67.820,00	48.018,00*	70,80
5.	Jumlah Industri pengolahan turunan CPO	1	1	0	0
6.	Sumbangan sektor perkebunan terhadap PAD (Milyar Rupiah)	14.152.000.000	12.000.000.000	14.670.000.000	122,25
7.	Kemitraan/Plasma	28,785,91	25.957,91	32.634.59	241,40
b.	Pengembangan/perluasan areal perkebunan	204.868,62	219.753,29	192.846,56	93,23
1.	Karet	17.451,50	17.434,00	17.907	100,10
2.	Kelapa sawit	184.695,33	199.909,00	173048,34	92,39
3.	Kelapa	1.176,51	1.176,51	1.069,52	100,04
4.	Lada	875,20	875,20	578,20	85,64
5.	Lainnya	313,50	358,58	243,50	87,43
c.	Produksi komoditi perkebunan				
1.	Karet (lump)	8.012,06	6.805,19	7.619,19	117,73
2.	Kelapa (kopra)	358,57	374,04	343,83	95,86
3.	Kelapa Sawit (Tbs)	3.020.668,88	4.096.334,35	3.585.307,15	73,74
4.	Lada (putih/hitam)	316,81	448,33	268,95	70,66
5.	Lainnya	21,50	23,4	20,24	91,88

Catatan : * = Data diolah dari Kobar Dalam Angka 2014

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Dinas Perkebunan sebagai salah satu SKPD pelaksana Urusan Pertanian mendapatkan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.364.414.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.915.671.831,00 atau 86,66 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.97
Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2014
yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan

Program/Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100		%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.359.800	1.295.050	24,16	100	Terlaksananya penyediaan keperluan pendistribusian surat dinas dalam daerah maupun luar daerah	270 48	270 48	surat paket	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat	100	100	%	Tidak ada pengiriman paket ke dalam dan keluar daerah
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	83.092.000	49.110.612	59,10	100	Terbayarnya listrik, telepon, Koran, internet, dan faximili kantor	12	12	bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar untuk menunjang terlaksananya tupoksi	100	100	%	Efisiensi penggunaan sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	5.560.310	5.560.200	100	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	13 2	13 2	unit unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas	100	100	%	Efisiensi pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Program/Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa administrasi keuangan	136.285.500	107.118.500	78,60	100	Terbayarnya honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta honor supir, jaga malam dan tukang kebun di lingkungan Dinas Perkebunan	12	12	bulan	) Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor) Terwujudnya peningkatan kinerja dan kelancaran dalam pengadminis trasian keuangan	100	100	%	Efisiensi anggaran
Penyediaan jasa kebersihan kantor	54.090.180	42.053.000	77,75	100	Tersedianya peralatan kebersihan dan terbayarnya honor petugas kebersihan.	1 3	1 3	paket orang	Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan Dinas Perkebunan	100	100	%	Efisiensi anggaran
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	33.230.000	31.800.000	95,70	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Dinas Perkebunan berupa : ¼ Komputer ¼ Laptop/ notebook ¼ printer ¼ Jaringan komputer	21 15 17 1	21 15 17 1	unit unit unit tahun	Tercapainya optimalisasi fungsi peralatan kerja di lingkungan Dinas Perkebunan	100	100	%	
Penyediaan alat tulis kantor	62.595.580	52.223.050	83,43	100	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1	1	paket	Tercapainya kelancaran pelaksana an tupoksi pada Dinas Perkebunan	100	100	%	Efisiensi anggaran

Program/Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.160.000	18.200.000	94,99	100	Terpenuhinya barang cetakan & penggandaan kebutuhan administrasi perkantoran	12	12	bulan	Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada Dinas Perkebunan	100	100	%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4.517.500	4.514.500	99,93	100	Penyediaan keperluan alat listrik dan elektronik kantor	12	12	bulan	Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan Dinas Perkebunan	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	81.708.130	76.334.000	93,42	100	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ¼ Mesin tik manual ¼ Mesin Fotocopy ¼ Mesin Jilid spirial ¼ Komputer PC ¼ Printer dor matrik ¼ Printer laser ¼ Peralatan jaringan internet	1 1 1 2 1 2 1	1 1 1 2 1 2 1	unit unit unit unit unit unit unit	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran kerja	100	100	%	
Penyediaan makanan dan minuman	14.572.000	12.053.000	82,71	100	Tersedianya makanan dan minuman rapat serta minum harian PHL	40 6	40 6	orang orang	Terwujudnya kelancaran kerja dan peningkatan kinerja tenaga kontrak	100	100	%	Efisiensi anggaran

Program/Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	174.275.000	174.188.921	99,95	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	Tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan provinsi maupun pusat	100	100	%	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100		%	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	56.496.500	48.930.200	86,61	100	Terlaksananya penyediaan : ¼ Bendera lingkaran teras dan Umbul-umbul	1	1	paket	Tersedianya umbul-umbul dan bendera hias kantor	100	100	%	Efisiensi anggaran
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	19.806.500	18.676.350	94,29	100	Tersedianya ¼ Angkong ¼ Hand sprayer ¼ Mesin pompa air ¼ Generator set	3 1 1 1	3 1 1 1	Buah Unit Unit unit	Terwujudnya suasana kerja yang memadai dan lingkungan kantor yg bersih	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	102.102.000	99.450.000	97,40	100	Terlaksananya pemeliharaan: ¼ Air conditioner ¼ Mesin potong rumput ¼ pengecatan	11 2 1	11 2 1	unit unit paket	Tercapainya optimalisasi fungsi dan kondisi bangunan gedung kantor	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	227.481.000	155.269.000	68,26	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4 ¼ Mesin potong rumput	13 2 2	13 2 2	unit unit unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan kondisi serta terpenuhi nya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	100	%	Efisiensi anggaran
Program peningkatan disiplin aparatur					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100		%	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	22.640.000	21.994.500	97,15	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Dinas Perkebunan	46	46	stel	Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas	100	100	%	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100		%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	208.500.000	167.912.440	80,53	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	1	1	tahun	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparatur sesuai dengan bidang tugasnya	50	100	%	Efisiensi di kontribusi

Program/Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	756.000	324.000	42,86	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	lap	Terpenuhinya ketersediaan bahan perencanaan dan evaluasi program kegiatan untuk tahun berikutnya	100	100	%	Tidak terserap nya uang lembur
Penyusunan laporan keuangan semesteran	361.500	211.000	58,37	100	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	1	1	lap	Terpantaunya dan termonitornya penyerapan keuangan	100	100	%	Efisiensi Belanja penggandaan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.323.000	567.000	42,86	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	lap	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	Tidak terserap nya uang lembur
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					Terlaksananya kegiatan pada Program Peningka tan Kesejahteraan Petani	3		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	100		%	
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	127.805.000	127.055.000	97,34	100	Terlaksananya magang bagi petani perkebunan	60	60	orang	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan petani perkebunan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis	100.100.000	86.654.900	86,57	100	Terbinanya petani peserta perkebunan Rakyat 15 Kelompok tani	15	15	Kelo mpok	Tercapainya target peningkatan luas areal revitalisasi perkebunan	100	100	%	Efisiensi anggaran perjalanan
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	281.000.000	280.672.500	99,67	100	Terlaksananya : ¼ Keikutsertaan petani dan kelompok tani perkebunan pada Pekan Nasional ke XIV di kab. Malang Jawa Timur	20	20	orang	Tercapainya peningkatan wawasan petani dan kelompok tani peserta PENAS	100	100	%	
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/ perkebunan					Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/ perkebunan	2		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/ perkebunan	100		%	
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah	88.770.000	57.331.200	64,58	100	Terlaksananya keikutsertaan pada pameran EXPO Kalteng dan pameran lainnya	1	1	tahun	Terciptanya Jaringan Pemasaran Tingkat Nasional Untuk Produk-Produk Perkebunan Kobar serta terjualnya TBS Kelapa Sawit hasil kebun rakyat	75	75	%	Efisienai Anggaran dan Menyesuaikan undangan pameran

Program/Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/ perkebunan masyarakat	69.360.000	64.288.100	92,69	100	Terlaksananya pengelolaan informasi pasar produk-produk perkebunan melalui PIP dan sosialisasi SNI Bokar (bahan olah karet)	12	12	Pertemuan TBS	Terpenuhinya ketersediaan informasi permintaan pasar atas hasil produksi perkebunan masyarakat.	100	100	%	
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan	1		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan	100		%	
Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna	71.675.000	63.245.000	88,24	100	Terlaksananya sosialisasi cara-cara pengendalian OPT, pembukaan lahan tanpa bakar dan pengendalian kebakaran lahan	90	90	orang	Berkurangnya serangan OPT tanaman perkebunan dan kasus kebakaran lahan	100	100	%	Efisiensi perjalanan dinas & belanja cetak
Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan					Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	1		keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	100		%	
Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan	1.064.860.000	1.009.287.900	87,60	100	Terlaksananya perluasan areal kebun karet rakyat dan pemeliharaan kebun dinas	135 2	135 2	Ha ha	Tercapainya target pengembangan areal kebun karet rakyat	80	100	%	Efisiensi perjalanan & penawaran Barjas di bawah pagu

Program/Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output				Outcome				Ket.
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan	90.416.250	78.927.108	87,29	100	Terlaksananya sosialisasi perbenihan serta pemeliharaan kebun entrys	120	120	orang	Bertambahnya peningkatan pengetahuan petani dan terpilihnya kebun entrys	100	100	%	Efisiensi perjalanan dinas
Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	61.875.000	52.874.800	85,45	100	Terlaksananya penyusunan peta kebun desa perkebunan rakyat, PBS/N				Terpenuhinya ketersediaan data peta kebun desa perkebunan rakyat, PBS/N untuk bahan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	100	100	%	Efisiensi anggaran
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	7.775.000	7.550.000	97,11	100	Terlaksananya pelaporan dan monitoring Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	1	1	tahun	Termonitornya seluruh keg. pada Prog. Pening. prod. pertanian/perkebunan	100	100	%	
Muyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian	86.265.250	-	-	-	Tersedianya bahan perlengkapan Musrenbangtan Wilayah Barat 2015	250	250	Orang	Suksesnya penyelenggaraan Musrenbangtan Wilayah Barat Th. 2015	100	100	%	Atas konsultasi ke DPKD tidak dapat dilaksanakan.

c) Permasalahan dan Solusi

Di Bidang Perkebunan permasalahan yang sering timbul antara lain :

1. Tidak stabilnya harga komoditas karet di dunia, berimbas kepada petani karet di Kotawaringin Barat
2. Perkebunan rakyat (petani) sering tidak menggunakan bahan tanam yang bermutu (misalnya kelapa sawit, karet dan lada);
3. Tidak mengikuti kultur teknis yang memadai sehingga produktivitasnya masih rendah;
4. Masyarakat (petani) belum memahami pola usaha tani yang benar;
5. Kelembagaan petani masih lemah, sehingga pola usahanya masih individualistis tidak terorganisir sehingga posisi tawar (*bergaining power*) masih rendah;
6. Luas areal perkebunan rakyat kurang dari 30 % dari luas perkebunan yang dikembangkan oleh perkebunan besar. perbandingan 30 : 70 % semacam ini kurang baik untuk stabilitas ekonomi dan sosial daerah;
7. Masih banyak persengketaan lahan antara perkebunan besar dengan masyarakat baik dengan penduduk lokal maupun dengan warga transmigrasi di sekitarnya
8. Usaha perkebunan rakyat yang dapat disentuh langsung oleh proyek pembangunan perkebunan dengan biaya pemerintah. baik dari dana APBN. APBD (provinsi dan kabupaten) dan sumber dana lainnya masih kurang dari 20 %. sehingga sisanya berkembang dengan dana masyarakat (swadaya);
9. Masih sulitnya akses permodalan (pengucuran kredit usaha perkebunan) untuk pengembangan perkebunan rakyat dari pihak perbankan;
10. Fenomena alam (iklim) yang tidak dapat diprediksi. menyebabkan persiapan dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Solusi Sub Sektor Perkebunan

1. Memberikan penyuluhan agar meningkatkan mutu karet dengan menggunakan pembeku yang direkomendasikan
2. Memacu dan mengarahkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perluasan areal kebun rakyat yaitu pada : a) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu perkebunan b) Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan;
3. Mengarahkan masyarakat dengan melakukan pembinaan-pembinaan yang terkait dengan budidaya kelapa sawit yang benar dan sesuai kaidah-kaidah agrobisnis melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan dan penyebarluasan informasi perkebunan melalui leaflet dan brosur;

4. Sebagian usaha telah dilakukan baik koordinasi dengan instansi Provinsi maupun Daerah stakeholder di Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun sampai saat ini Program Revitalisasi tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan. Sambil menunggu RTRWP dipadu serasikan tetap dilakukan langkah-langkah koordinasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat serta pihak-pihak terkait;
5. Langkah yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Kementerian Kehutanan untuk memperoleh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perluasan areal perkebunan.

4.2.3. URUSAN KEHUTANAN

a) Kondisi Umum

Ruang lingkup pembangunan kehutanan meliputi kegiatan-kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, sumber daya hutan, produksi, pengolahan dan pemasaran, peningkatan peran serta dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan kehutanan, pengembangan kelembagaan, optimalisasi dan pemanfaatan fungsi hutan, peningkatan konservasi sumber daya alam dalam rangka peningkatan pendapatan petani sekitar hutan, kelestarian hutan dan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kehutanan diselenggarakan berlandaskan pada mandat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu pengurusan sumber daya alam sebagai satu kesatuan ekosistem. Terdapat tiga dimensi utama dalam penyelenggaraan pengurusan sumber daya hutan, yaitu: (1) Keberadaan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dalam luasan yang cukup dan sebaran spasial yang proporsional; (2) Keberadaan wujud biofisik hutan berupa tumbuhan dan satwa serta wujud abiotik yang berada pada lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi; (3) Tata kelola sumber daya hutan baik menyangkut aspek kelola ekonomi, ekologi/lingkungan maupun sosial, yang menjadi ciri dan fungsi sumber daya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan secara utuh.

Posisi strategis sumber daya hutan dalam konteks pembangunan memiliki dua fungsi utama, yaitu: (1) Peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian dan masyarakat; (2) Peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan.

Sampai dengan tahun 2014 luas kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat menurut fungsinya berdasarkan SK Menhut No. 529 Tahun

Tabel 4.98
Luas Potensi Hutan Kab. Kotawaringin Barat
Berdasarkan (SK MENHUT NO: SK.529/Menhut-II/2012 Tgl 25 September 2012)

No.	Fungsi	Luas (Ha)	%
1	Arel Penggunaan Lainnya (APL)	235.731	23,90
2	Hutan Lindung (HL)	9.698	1,00
3	Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	156.003	15,8
4	Hutan Produksi (HP)	257.045	26,10
5	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	49.314	5,00
6	Kawasan Konservasi Perairan (KKP)	16.482	1,70
7	Kawasan Suaka Alam /Pelestarian Alam (KSA/PA)	239.091	24,30
8	Sungai	22.073	2,20
	Jumlah	985.437	100,00

Sumber data : Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Barat

Pengukuran capaian kinerja Urusan Kehutanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4.99
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 – 2014

No.	Indikator	2013	2014		
			Target	Realisasi	% Realisasi dari target
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	0	156	0	0
2.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	2,1	1,8	2	111,11
3.	Penataan kawasan KPHP (peruntukan kawasan KPHP)(Ha)	1	-	-	-
4.	Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	34	100	100	100
5.	Penanganan Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan (Ha)	292	170	75	44,12

Sumber data : Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh dua SKPD yaitu Dinas Kehutanan dan Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KP2KP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.560.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.266.196.730,00 atau 69,65 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kehutanan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.100
Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AS KEHUTANAN													
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	984.313.000,00	812.631.119,00	82,56	94,27	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	11	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	94,27	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000,00	1.750.000,00	83,33	83,33	Terlaksananya penyediaan perangko untuk kebutuhan pengiriman paket surat dinas	350 14	350 0	lembar paket	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat	100	83,33	%	
Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik	105.975.000,00	60.287.269,00	56,89	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar	12	12	bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi	100	100	%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	15.550.000,00	11.805.500,00	75,92	75,92	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4 & 6 ¼ Speed boat	21 4 2	21 3 2	unit unit unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional	100	75,92	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan jasa administrasi keuangan	118.720.000,00	105.314.500,00	88,71	95,06	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan Dinas Kehutanan	12	12	bulan	Terwujudnya peningkatan kinerja dan kelancaran dalam pengadminis trasian keuangan	100	95,06	%	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	74.490.000,00	70.155.000,00	94,18	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	4	4	orang	Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan sekitar Dinas Kehutanan	100	100	%	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	58.500.000,00	56.025.000,00	95,77	96,19	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Dinas Kehutanan berupa : ¼ Jaringan dan peralatan SIKD ¼ Mesin tik ¼ Flooter ¼ Printer ¼ Laptop/ notebook ¼ Komputer PC	1 2 1 30 15 15	1 2 1 30 15 15	unit unit unit unit unit unit	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Dinas Kehutanan	100	100	%	
Penyediaan alat tulis kantor	69.970.200,00	69.787.700,00	99,74	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	paket	Tercapainya kelancaran pelaksana an tupoksi pada Dinas Kehutanan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	56.070.000,00	55.380.000,00	98,77	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk kedinasan	1	1	tahun	Tercapainya kelancaran kerja administrasi perkantoran dan tugas pokok lainnya pada Dinas Kehutanan	100	100	%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	7.895.000,00	7.895.000,00	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor	1	-	tahun	Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan Dinas Kehutanan	100	100	%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	323.748.000,00	241.410.000,00	74,57	89,96	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : Komputer/PC Kalkulator Notebook Printer inkjet+infus LCD Projector Flash Disk 16 GB Kompas Kamera Digital Hardisk Eksternal notebook	1	1	paket	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan peralatan rumah tangga	15.233.000,00	3.520.000,00	23,11	23,24	Gelas bertangkai Piring Mangkok Televisi Dispenser	24 36 60 1 1	24 36 60 - -	Bh Bh Bh Unit Unit	Terpenuhinmya kebutuhan rumah tangga kantor	100		%	
Penyediaan makanan dan minuman	12.502.000,00	5.832.000,00	46,65	100	Terlaksananya penyediaan: ¼ makan dan minum harian tenaga honorer	1	1	tahun	Terwujudnya peningkatan kinerja tenaga kontrak dan kelancaran dalam pelaksanaan kerja	100	100	%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	123.559.800,00	123.469.150,00	99,93	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	100	%	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.348.830.000,00	1.096.283.618,00	81,28	87,03	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	10	10	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	87,03	%	
Pembangunan gedung kantor	396.000.000,00	338.461.725,00	85,47	88,77	Terlaksananya pemasangan jaringan instalasi listrik	1	1	paket	Terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai	100	88,77	%	
Pengadaan kendaraan dinas operasional	194.700.000,00	177.259.000,00	91,04	100	Terlaksananya penyediaan motor operasional	7	7	unit	Terpenuhinya kebutuhan mobil pemadam untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	136.350.000,00	130.349.500,00	95,60	98,90	Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa : - Teralis aula - Teralis kantor KPHP - Gorden aula - Gorden KPHP - AC	1 1 1 1 3	1 1 1 1 3	Paket Paket Paket Paket Unit	Terwujudnya peningkatan fasilitas perlengkapan gedung kantor untuk menunjang pelaksanaan kerja	100	98,90	%	
Pengadaan peralatan gedung kantor	3.380.000,00	2.380.000,00	70,41	100	Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor berupa : - Jam dinding - Angkong - Instalasi telepon	8 2 1	8 2 1	Bh Bh paket	Terciptanya peningkatan kelancaran dan kenyamanan kerja	100	100	%	
Pengadaan meubeleur	184.985.000,00	126.741.235,00	68,51	85,34	Terlaksananya penyediaan meubeleur kantor berupa : ¼ Lemari Kaca	1	1	unit	Terpenuhinya kebutuhan meubeleur kantor untuk mendukung kenyamanan kerja	100	100	%	
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	72.820.000,00	71.800.000,00	98,60	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor berupa : ¼ Pemeliharaan gedung/bangunan kantor ¼ Pemeliharaan gedung/bangunan kantor	1 1	1 1	paket paket	Terwujudnya peningkatan keindahan kantor untuk menciptakan kenyamanan kerja pegawai	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	316.600.000,00	154.085.893,00	48,67	61,09	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4 ¼ Roda 6 ¼ Speed boat	25 4 2 2	25 4 2 2	unit unit unit unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan kondisi serta terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	61,09	%	Efisiensi/sesuai penggunaan bahan bakar
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	14.480.000,00	8.700.000,00	60,08	60,43	Terlaksananya : ¼ Penyediaan bahan bakar genset ¼ Penyediaan bahan bakar mesin potong rumput ¼ sevice AC ¼ service mesin potong rumput	1 24 10 2	1 24 10 2	Unit kali Unit unit	Tercapainya optimalisasi fungsi dan kondisi peralatan kantor untuk mendukung kelancaran kerja	100	60,43	%	Efisiensi/sesuai penggunaan bahan bakar
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	211.500.000,00	210.247.500,00	99,41	100	Rehab atap dan plafon gedung kantor	1	1	paket	Terlaksananya Rehab atap dan plafon gedung kantor	100	100	%	
Program peningkatan disiplin aparatur	171.475.000,00	157.675.000,00	91,95	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	Seluruh pegawai dapat baju dinas
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	94.475.000,00	91.525.000,00	96,88	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Dinas Kehutanan berupa: ¼ PDH pegawai ¼ PDH polhut	85 35	Stell Stell		Terwujudnya kerapian, ketertiban dan keseragaman dalam berpakaian dinas	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan pakaian kerja lapangan	77.000.000,00	66.150.000,00	85,91	100	Tersedianya kebutuhan pakaian lapangan polhut	35	35	stell	Terwujudnya kerapian, ketertiban dan keseragaman dalam menunjang kegiatan polhut	100	100	%	
Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	60.000.000,00	37.531.000,00	62,55	66,67	Terlaksananya kegiatan pada program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	100	100	%	
Pemulangan Pegawai yang pensiun	60.000.000,00	37.531.000,00	62,55	66,67	Terlaksananya pemulangan PNS yang pensiun ke daerah asalnya	3	2	orang	Terpenuhinya salah satu hak bagi PNS yang sudah pensiun	100	100	%	1 orang tidak jadi pensiun karena aturan terbaru.
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	162.300.000,00	137.594.850,00	84,78	85,26	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	85,26	%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	162.300.000,00	137.594.850,00	84,78	85,26	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	13	13	orang	Terwujudnya peningkatan, pengetahuan pemahaman dan keterampilan aparatur sesuai dengan bidang tugasnya	100	85,26	%	Keg. bimtek lancar. Spj sesuai penggunaan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.285.000,00	735.000,00	22,37	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.095.000,00	735.000,00	67,12	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	10	buku	Terpenuhinya ketersediaan bahan perencanaan dan evaluasi program kegiatan untuk tahun berikutnya	100	100	%	
Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.095.000,00	0,00	0,00	100	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	10	10	buku	Terpantaunya dan termonitornya penyerapan keuangan	100	100	%	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.095.000,00	0,00	0,00	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10	10	buku	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	1.764.396.750,00	1.517.419.208,00	86,00	93,72	Terlaksananya kegiatan pada Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	6	6	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	100	100	%	
Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi	17.050.000,00	14.700.000,00	86,22	86,80	Terlaksananya koordinasi KPHP	1	1	paket	Terwujudnya peningkatan penataan penggunaan kawasan hutan	100	86,80	%	
Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan	635.997.750,00	540.068.635,00	84,92	96,13	Terlaksananya : ¼ pembuatan hutan rakyat (HR)	100	18	Ha	Tercapainya perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan	100	96,13	%	
					¼ penanaman serentak dalam rangka HMI	1	1	kali					
					¼ Pemeliharaan Hutan rakyat (HR)	34	34	Ha					
Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	299.620.000,00	226.501.500,00	75,60	84,96	Terlaksananya : ¼ Pelatihan SKAU ¼ Pelatihan sosialisasi dan pembinaan HTR	1 1	1 1	kali kali	Tercapainya peningkatan ketertiban penatausahaan kayu rakyat (SKAU) dan	100	84,96	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									pemanfaatan kawasan hutan				
Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	401.526.000,00	367.353.273,00	91,49	92,53	Terlaksananya :				Tercapainya penatausahaan hasil hutan yang tertib administrasi dan lapangan	100	92,53	%	
					¼ Pemeriksaan dan pengawasan kegiatan penebangan oleh HPH dan HTI	6	6	Perusahaan					
					¼ Pembinaan dan pengawasan pemungutan hasil hutan	6	6	Perusahaan					
					¼ Penyediaan blanko SKSKB	100	100	Set					
					¼ Penyediaan data PSDH/DR	1	1	Tahun					
					¼ Pembinaan, pengawasan dan pengujian hasil hutan	80	80	Orang					
					¼ Keikutsertaan pada Pekan promosi dan pameran industri di Palangka Raya dan Jakarta	1	1	kali					
Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	367.038.000,00	326.320.800,00	88,91	97,56	Terlaksananya :				Tercapainya penurunan pelanggaran di bidang kehutanan dan dipatuhinya penata usahaan hasil hutan	100	97,56	%	
					¼ pengawasan peredaran hasil hutan pada DAS Arut dan DAS Kumai	30	30	kali					
					¼ Patroli perambahan kawasa hutan	10	10	kali					
					¼ perpanjangan kartu								

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					tanda anggota polhut ¼ perpanjangan kartu tanda anggota PPNS ¼ Pengadaan dan pemasangan papan informasi dan papan larangan	35 2 125	35 2 125	orang orang Bh					
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	43.165.000,00	42.475.000,00	98,40	100	Terlaksananya monitoring dan penyusunan laporan monev : ¼ HTI ¼ HTR ¼ Penggunaan koridor jalan	 4 3 6	 4 3 6	 lap. lap. lap.	Terlaksananya monitoring dan penyusunan laporan monev : ¼ HTI ¼ HTR ¼ Penggunaan koridor jalan	100	100	%	
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2.448.837.750,00	1.022.054.335,00	41,74	49,39	Terlaksananya kegiatan pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	4	4	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	100	49,39	%	Keg. Reboisasi tidak terlaksana terkendala lahan
Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	184.985.000,00	126.741.235,00	68,51	85,34	Terlaksananya : ¼ Partisipasi dalam kegiatan PENAS ¼ Konsultasi publik kegiatan RHL	1 3	1 3	kali kali	Tercapainya koordinasi dalam rangka menunjang program reboisasi dan penghijauan lahan	100	85,34	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	642.200.750,00	367.129.900,00	57,17	79,14	Terlaksananya penyediaan bibit untuk penghijauan lingkungan Kehutanan(73.530) Mpts (25.200)	122.550	98.730	btg	bibit untuk penghijauan lingkungan terdistribusikan ke masyarakat	100	57,17	%	
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	1.575.652.000,00	511.300.000,00	32,45	32,57	Terlaksananya : ¼ Penyusunan rencana RHL ¼ Tersedianya bibit tanaman penunjang OBIT ¼ Reboisasi Hutan produksi	5 3 120	0 3 0	dok. paket Ha	Tercapainya target perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan	100	32,57	%	Keg. Reboisasi tidak terlaksana terkendala lahan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	46.000.000,00	16.883.200,00	36,70	65,57	Terlaksananya : ¼ Monev kegiatan penghijauan ¼ Monev TPTI & PMDH ¼ Evaluasi keg. pembuatan kebun bibit/benih	9 3 5	4 3 5		Terpantaunya pelaksanaan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	100	51,28	%	Keg. Reboisasi tidak terlaksana terkendala lahan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	473.840.000,00	413.656.600,00	87,30	98,95	Terlaksananya kegiatan pada Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	100	98,95	%	
Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	107.590.000,00	106.675.000,00	99,15	100	Terlaksananya : ¼ sosialisasi/ penyuluhan bahaya kebakaran hutan dan lahan ¼ pemantauan titik api	6 30	6 30	kali kali	Tercapainya penurunan angka kejadian kebakaran hutan dan lahan	100	99,15	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	366.250.000,00	306.981.600,00	83,82	98,64	Terlaksananya : ¼ Tersedianya pakaian kerja lapangan regu damkar ¼ Inventarisasi lahan konservasi dalam kawasan hutan ¼ Operasional posko pengendalian kebakaran hutan	35 10 1	35 10 1	unit kali tahun	Tercapainya optimalisasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	100	98,64	%	
Program perencanaan dan pengembangan hutan	101.850.500,00	36.154.000,00	35,50	53,90	Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan dan pengembangan hutan	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program perencanaan dan pengembangan hutan	100	54,26	%	Keg. Reboisasi tidak terlaksana terkendala lahan
Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat	101.850.500,00	36.154.000,00	35,50	54,26	Terlaksananya pelatihan kelompok masyarakat pengelola HKM dan sosialisasi kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam RHL	1	1	kali	Tercapainya peningkatan kemampuan kapasitas kelompok masyarakat pengelola HKM	100	54,26	%	
KP													
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	41.772.000	34.462.000	82,50	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	41.772.000	34.462.000	82,50	100	Terfasilitasi kegiatan penyuluhan kehutanan	25	25	Orang	Menyadarkan masyarakat akan pentingnya hutan	100	100	%	

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam Urusan Kehutanan adalah :

1. Kegiatan RHL dengan nilai pagu besar yang bersumber dari DBH SDA Kehutanan DR tidak dapat terlaksana karena sulitnya menemukan rencana lokasi kegiatan Reboisasi yang *clear and clean*;
2. Personil kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan masih perlu ditambah, seiring dengan makin maraknya pembakaran hutan dan lahan terutama pada saat musim kemarau;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut. upaya perbaikan yang perlu dilakukan :

1. Kegiatan reboisasi tidak dianggarkan lagi karena permasalahan terkait lahan yang sangat kompleks dan tidak ada titik temu penyelesaian.
2. Perlu penambahan tenaga kontrak personil penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
3. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui penyuluhan dan sosialisasi melalui media (baik elektronik, media cetak dan selebaran);

4.2.4 URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

a) Kondisi Umum

Secara umum sektor energi di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan perkembangan yang positif jika dilihat dari beberapa indikator seperti produksi listrik dan distribusi listrik. Sebagai sumber penerangan dan energi lain baik di sektor rumah tangga maupun industri, listrik memegang peranan yang sangat vital.

Subsektor ketenagalistrikan diprogramkan dapat mendorong kegiatan ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah. Di sisi lain, ketenagalistrikan berperan sebagai infrastruktur yang harus ada untuk mendukung kegiatan pembangunan masyarakat. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diprioritaskan baik untuk meningkatkan keandalan penyediaan tenaga listrik maupun memberikan akses penyediaan tenaga listrik.

Penyediaan tenaga listrik yang memadai dan berkualitas merupakan parameter penting untuk mendukung kemajuan sektor lainnya, antara lain sektor industri, perdagangan, telekomunikasi dan sektor-sektor penggerak ekonomi lainnya. Sehingga ketersediaan energi listrik yang cukup akan menentukan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan produksi listrik di Kotawaringin Barat cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi produksi maupun dari jumlah

pelanggan. Peningkatan ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan terjadinya perkembangan pada pusat-pusat pertumbuhan sehingga kebutuhan listrik sebagai sumber penerangan maupun energi juga semakin meningkat.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 66,05 persen rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan 18,60 persen menggunakan listrik non PLN. Selain dua sumber penerangan tersebut, terdapat sumber penerangan lain yaitu petromak 0,26 persen dan pelita 4,01 persen, maka kondisi untuk tahun 2014 ini dengan pertumbuhan penduduk semakin meningkat maka target yang diinginkan secara keseluruhan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, baik listrik PLN maupun non PLN sebagai sumber penerangan utama tahun 2014 mencapai 84,65 persen. Dalam upaya pemenuhan Peningkatan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui APBD Tahun Anggaran 2015 diarahkan pada peningkatan pembangunan penyediaan jaringan distribusi listrik melalui kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur ketenagalistrikan.

Kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Barat dikelompokkan dalam 2 jenis komoditas tambang, yaitu mineral logam, mineral non logam dan batuan. Mineral logam meliputi emas dan biji besi, sementara mineral non logam dan batuan meliputi pasir zirkon, kecubung, kaolin, tanah urug, pasir, sirtu, batu belah dan lainnya.

Dari beberapa potensi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah dimanfaatkan adalah dari mineral logam seperti emas terdapat di Kecamatan Arut Utara Desa Sambu dan mineral non logam dan batuan seperti potensi bahan galian Kecubung di Kecamatan Arut Utara Desa Pangkut dan Gandis, Kaolin di Kecamatan Kumai Desa Keraya dan Kubu, pasir kwarsa, tanah liat dan batu belah yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan. Selain pemanfaatan hasil galian yang ada, perlu juga dilakukan penelitian dan eksplorasi potensi sumber daya tambang untuk mengetahui kandungan mineral dan jenis tambang yang ada di daerah.

Pada perdagangan ekspor, sektor ini telah menyumbangkan komoditas *zircon sand* (pasir zirkon) dengan nilai ekspor tahun 2012 mencapai Rp. 4.270.600.000,- sedangkan tahun 2013 dengan capaian Rp. 2.328.400.000,- dan tahun 2014 menurun dengan capaian Rp. 2.069.200.000,- maka total ekspor bahan galian zircon dari tahun 2012, sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 8.668.200.000,- dengan volume ekspor 40.611 ton dan nilai ekspor komoditas bahan galian Ilminit yang merupakan hasil produk sampingan dari proses pemurnian zircon tahun 2012 sebesar Rp.174.060.000,- sedangkan di tahun 2013 sebesar

Rp. 123.075.000,- dengan volume ekspor 7.579 ton, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.101
Volume dan Nilai Ekspor Sektor Pertambangan

Uraian	Produksi (Ton)			Volume Ekspor (MT)			Nilai Ekspor (dalam Ribuan Rp)		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
) Zircon Sand	18.623	11.642	10.346	18.623	11.642	10.346	4.270.600	2.328.400	2.069.200
) Lump Ore Zink	-	-	-	-	-	-	-	-	-
) Iron Ore	5.505	4.923	-	5.505	4.923	-	174.060	123.075	-
) Ilmenite									
	24.343	24.128	16.565	24.343	24.128	16.565	1.324.150	4.444.660	2.451.475

Sumber Data : Bagian Perekonomian dan SDA SETDA Kobar

Kegiatan pertambangan tersebut dalam skala besar diusahakan oleh perusahaan swasta sedangkan dalam skala kecil merupakan kegiatan pertambangan rakyat. Kegiatan tersebut diatas sangat berpotensi merusak lingkungan apabila pengusahaannya dilakukan secara sembarangan. Untuk itu diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan melalui kegiatan Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat.

Pada tahun 2013 sektor pertambangan memberikan kontribusi sebesar 1,59 % terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan untuk tahun 2014 diproyeksikan Volume dan Nilai Ekspor Sektor Pertambangan menurun.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan Sekretariat Daerah yang dalam hal ini ditangani oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan anggaran sebesar Rp. 3.724.515.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.615.486.166,00 atau 97,07 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.102
Program/Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ETARIAT DAERAH													
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	19.125.000	13.940.000	72,89	66,67	Terbinanya Pengelolaan Air tanah dan air permukaan	1	1	keg.	Terwujudnya Pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku	100	100	%	
Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	19.125.000	13.940.000	72,89	66,67	Terbinanya Pengelolaan Air tanah dan air permukaan	1	1	keg.	Terwujudnya Pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku	100	100	%	
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	35.100.000	11.075.000	31,55	88,33	Pertambangan Yang Ramah lingkungan	1	1	Keg	Masyarakat dapat mematuhi peraturan pertambangan dan mutu lingkungan	100	100	%	
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Galian C	35.100.000	11.075.000	31,55	88,33	Pertambangan Yang Ramah lingkungan	1	1	Keg	Masyarakat dapat mematuhi peraturan pertambangan dan mutu lingkungan	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	132.500.000	118.319.815	89,30	100	Pertambangan Yang Ramah Lingkungan	100	100	%	Masyarakat dapat mematuhi Peraturan Pertambangan dan mutu lingkungan	100	100	%	
Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat	132.500.000	118.319.815	89,30	100	Pertambangan Yang Ramah Lingkungan	100	100	%	Masyarakat dapat mematuhi Peraturan Pertambangan dan mutu lingkungan	100	100	%	
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga listrikan	3.137.790.400	3.104.086.101	98,93	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga listrikan	1	100	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga listrikan	100	100	%	
Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan	3.137.790.400	3.104.086.101	98,93	100	Terlaksananya penyediaan: √ Lampu PJU Kota Pangkalan Bun √ Pengecetan Tiang Ornamen PJU Jl. A. Yani, Jl. P. Diponegoro, Jl. Sutan Syahrir, Jl. Hasanudin, Jl. Pralusmayudha, dan Jl. Udan Said √ Pemeliharaan Lampu PJU di 5	1 1 1	1 1 1	Paket Paket Paket	Terwujudnya kersediaan energi listrik/penerangan yang memadahi untuk menunjang kelancaran aktivitas masyarakat	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
		Realisasi	(%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kecamatan								
					√ Jarlis SUTM dan Trafo Jl. Samari menuju sport center	1	1	Paket					
					√ PJU Kec. Arut Utara, Arsel, Kumai, P.Banteng, P. Lada & Kotawaringin lama	1	1	Paket					
					√ Line PJU mulai dari tiang terakhir PJU jl. A.Yani menuju gerbang selamat datang	1	1	Paket					
					√ PJU Poros Desa Pangkalan Satu	1	1	Paket					
					√ PJU Menuju Desa Pasir Panjang	1	1	Paket					
					√ PJU Desa Pangkalan Tiga	1	1	Paket					

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah :

1. Masih terdapat sambungan listrik rumah tangga di 25 desa yang belum berlistrik, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang belum berkembang terutama minimnya akses jalan darat sehingga pembangunan distribusi jaringan listrik terhambat dan pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut memerlukan investasi yang cukup besar;
2. Terbatasnya sumber daya aparatur teknis dibidang pertambangan;
3. Belum tersedianya fasilitas penunjang kelancaran kerja bidang pertambangan (peralatan survey);
4. IUP Pertambangan masih banyak yang belum mengurus IPKH.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut. upaya perbaikan yang perlu dilakukan :

1. Dalam rangka pemenuhan listrik perdesaan, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu antara pemerintah daerah dengan PT. PLN (Persero) khususnya pada wilayah-wilayah yang secara teknis dan ekonomis tidak layak dibangun jaringan;
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk pembinaan teknis dibidang pertambangan;
3. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat membuat surat kepada pengusaha pertambangan untuk tidak melakukan kegiatan dilapangan sebelum ada IPKH;
4. Menunggu pengesahan RTRWP.

4.2.5. URUSAN PARIWISATA

a) Kondisi Umum

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.

Dalam rangka pembangunan daerah, sektor pariwisata memegang peranan yang menentukan dan dapat sebagai katalisator untuk meningkatkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap. Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utama. Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik.

Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang

dan jasa. Selama berwisata, wisatawan akan melakukan pengeluaran belanja baik konsumsi dan akomodasi maupun souvenir, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (*Tourism Final Demand*) pasar barang dan jasa. Selanjutnya *Final Demand* wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan baku (*Investment Derived Demand*) untuk memproduksi memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut.

Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain. Sehingga sektor pariwisata memberikan peluang bergeraknya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian sektor pariwisata juga dapat memberikan kontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu dengan melibatkan rakyat miskin dalam berbagai kegiatan integratif dengan bisnis pariwisata.

Secara umum Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup beraneka ragam jenisnya. Secara garis besar, jenis wisata yang ditawarkan terbagi atas beberapa, yaitu:

1. Wisata alam, antara lain Taman Nasional Tanjung Puting, Air Terjun Patih Mambang, Arung Jeram, Danau Gatal dan Danau Masorayan;
2. Wisata sejarah/budaya/religi, antara lain Istana Kuning, Astana Al-Nursari, Istana Mangkubumi, Palagan Sambi, Masjid Kyai Gede, Makam Kyai Gede, Makam Kuta Tanah, Batu Petahan dan Tiang Pantar;
3. Wisata bahari antara lain Pantai Kubu, Tanjung Keluang, Pantai Teluk Bogam, dan Tanjung Penghujan;

Obyek wisata Taman Nasional Tanjung Puting Pangkalan Bun adalah salah satu obyek wisata Taman Nasional yang sudah menjadi icon dunia, dimana jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun meningkat. Untuk kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2013 sebanyak 8.439 orang dan tahun 2014 meningkat menjadi 11.000 (30,34%) orang sedangkan untuk wisatawan nusantara tahun 2013 sebanyak 4.916 orang dan tahun 2014 meningkat menjadi 5.035 (2,42%) orang sedangkan untuk lama kunjungan wisatawan dari 1 hari menjadi 2 - 3 hari.

Obyek wisata sejarah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Istana Kuning, Istana Mangkubumi, Kolam Pemandian Putri Raja dan Makam Raja-raja Kutaringin yang terletak di tengah kota Pangkalan Bun sedangkan Astana Al Nursari, Masjid Kyai Gede dan Makam Kyai Gede terletak di Kecamatan Kotawaringin Lama.

Obyek wisata alam dan pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di tepi Pantai yaitu di obyek wisata Bugamraya yang terdiri dari Taman Wisata Alam Tanjung Penghujan, Pantai Kubu, Pantai Tanjung Keluang, Gosong Senggora dan Air Terjun Patih Mambang dengan alamnya yang asli. Kunjungan wisatawan ke obyek wisata Bugamraya pada tahun 2013 sebanyak 48.366 orang dan pada tahun 2014 naik menjadi 57.031 orang.

Tabel 4.103
Potensi Objek Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Objek Yang Dinikmati	Ciri Khas Yang Ditonjolkan
1	Pantai Kubu dan Tanjung Keluang	Kec. Kumai	Bahari	Keindahan alam
2	Pantai Teluk Bogam	Kec. Kumai	Bahari	Keindahan Alam
3	Tanjung Penghujan	Kec. Kumai	Bahari	Keindahan Alam
4	Istana Kotawaringin	Kec. Ktw. Lama	Sejarah	Barang Kuno/Antik peninggalan Kerajaan Islam Pertama di Kalteng
5	Istana Kuning	Kec. Arut Selatan	Sejarah	Kerajaan yang dipindahkan dari Kotawaringin
6	Mesjid Kyai Gede	Kec. Ktw. Lama	Religi	Mesjid Kuno Peninggalan Kerajaan Islam Pertama di Kalteng
7	Tudung Saji dan Batu Kecubung	Kec. Arut Selatan	Budaya/Seni	Nilai Seni
8	Taman Nasional Tanjung Puting	Kec. Kumai	Alam	Keindahan alam, serta Pusat Rehabilitasi Orang Utan dan Satwa Langka lainnya
9	Pantai Sei Uambang	Kec. Kumai	Bahari	Keindahan Alam
10	Danau Burung	Kec. Kumai	Alam	Keindahan Alam
11	Danau Gatal	Kec. Ktw. Lama	Alam	Keindahan Alam
12	Upacara Tiwah	Kec. Arut Utara	Budaya	Upacara Tradisional Suku Dayak
13	Riam Senamang	Kec. Arut Utara	Alam	Keindahan Alam
14	Palagan Sambu	Kec. Arut Utara	Sejarah	Nilai Sejarah

Sumber : Laporan Penyusunan Data Base Spasial Potensi Pariwisata Kalimantan Tengah

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 3.482.848.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.102.111.012.00 atau 89,06 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pariwisata selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.104
Program/Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2014

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	596.983.193,00	492.150.417,00	82,43		Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	13	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00	300.000,00	100	100	Terlaksananya penyediaan perangko	120	120	lembar	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat	100	100	%	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	117.000.000,00	58.431.366,00	49,94	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar	12	12	bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena belanja listrik, surat kabar telpon, internet dan langganan surat kabar disesuaikan dengan kebutuhan

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	1.200.000	1.200.000	100	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	1 1	- 1	unit unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional	100	100	%	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	88.660.000,00	87.298.000,00	98,46	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan Disbudpar	12	12	bulan	Terwujudnya peningkatan kinerja dan kelancaran dalam pengadminis trasian keuangan Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan aman sehingga tercapainya keasrian lingkungan dan kenyamanan dalam beraktifitas menjalankan tugas perkantoran	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena honorarium PPK, pegawai honorer dan belanja bahan pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21.191.300,00	19.906.600,00	93,93	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	1 1	1 1	orang paket	Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan sekitar Disbudpar	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena honor pegawai kebersihan dan belanja pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	19.000.000,00	17.739.000,00	93,36	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Disbudpar berupa : ¼ Mesin tik ¼ Komputer PC ¼ Printer ¼ Jaringan komputer ¼ Kamera	2 16 15 1 1	2 16 15 1 1	unit unit unit tahun tahun	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Disbudpar	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena pemeliharaan mesin tik, jaringan computer dan jaringan telepon disesuaikan dengan kebutuhan
	Penyediaan alat tulis kantor	27.000.000,00	26.501.750,00	98,15	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	tahun	Tercapainya kelancaran an tupoksi pada Disbudpar	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena penyediaan ATK disesuaikan dengan kebutuhan

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.250.000,00	16.655.800,00	71,63	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk kedinasan	1	1	tahun	Tercapainya kelancaran kerja administrasi perkantoran dan tugas pokok lainnya pada Disbudpar	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena belanja penggandaan disesuaikan dengan kebutuhan
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	7.993.500,00	7.993.500,00	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor	1	1	tahun	Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan Disbudpar	100	100	%	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	73.131.000,00	71.371.000,00	97,59	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas	3	3	paket	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena belanja laptop, printer dan handycam disesuaikan dengan kebutuhan
	Penyediaan peralatan rumah tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	100	100	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga untuk mendukung tupoksi	1	1	tahun	Tercapainya peningkatan kebersihan ruang kantor untuk menciptakan kenyamanan kerja	100	100	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan makanan dan minuman	12.697.500,00	12.297.500,00	96,84	100	Terlaksananya penyediaan: ¼ Snack untuk rapat ¼ Makan untuk rapat ¼ makan dan minum harian tenaga honorer	60 204 3	60 204 3	orang orang orang	Terwujudnya peningkatan kinerja tenaga kontrak dan kelancaran dalam pelaksanaan kerja	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena belanja makanan dan minuman harian pegawai untuk pegawai honorer dan rapat disesuaikan dengan kebutuhan
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	204.559.893,00	171.455.901,00	83,81	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tahun	Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena belanja perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	161.389.600,00	154.137.200,00	96,00	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	6	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	
	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	26.900.000,00	24.395.000,00	90,68	100	Terlaksananya : ¼ Pembuatan umbul-umbul dan pengadaan gorden, AC, dan TV LCD	20 1 1	20 1 1	m2 paket paket	Terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena pembuatan umbul – umbul

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														dan pengadaan gorden, AC dan TV LCD disesuaikan dengan kebutuhan
	Pengadaan Mebeuler	15.000.000,00	13.925.000,00	92,83	100	Terlaksananya penyediaan mebeler kantor berupa : ¼ Lemari arsip, ¼ Sofa	1 1	1 1	buah unit	Terwujudnya peningkatan fasilitas perlengkapan gedung kantor untuk menunjang pelaksanaan kerja	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena belanja lemari arsip dan sofa disesuaikan dengan kebutuhan
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	11.000.000,00	10.850.000,00	98,63	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor berupa : ¼ Perawatan taman halaman kantor dan pengecatan gedung kantor	100 m 125 m	100 m 125 m		Terpenuhinya kebutuhan meubeleuor kantor untuk mendukung kenyamanan kerja	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena perawatan taman halaman kantor dan pengecatan gedung kantor disesuaikan dengan kebutuhan
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45.989.600,00	42.719.700,00	92,88	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional berupa :				Terwujudnya optimalisasi fungsi dan kondisi serta terpenuhi nya kebutuhan BBM kendaraan dinas	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena pemeliharaan kendaraan dinas disesuaikan

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						¼ Jasa service ¼ Suku cadang ¼ BBM	1 1 1	1 1 1	Tahun Tahun tahun	operasional				dengan kebutuhan
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	12.500.000,00	12.397.500,00	99,18	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor meliputi : ¼ Bahan bakar bbm ¼ Pemeliharaan AC ¼ Pemeliharaan mesin potong rumput (kantor dan PP)	1 5 5	1 5 5	tahun unit unit	Terwujudnya optimalisasi fungsi dan kondisi serta terpenuhi nya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena belanja service, dam belanja bahan bakar disesuaikan dengan kebutuhan
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	50.000.000,00	49.850.000	99,7	100	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor yang representatif meliputi: ¼ Rehab wc ¼ Ruang arsip ¼ Ruang kadis	1	1	paket	Tercapainya optimalisasi fungsi dan kondisi perlengkapan kantor untuk mendu-kung kelancaran kerja	100	100	%	Penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
	Program peningkatan disiplin aparatur	38.400.000,00	38.350.000,00	99,86	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	78	78	stel	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	38.400.000,00	38.350.000,00	99,86	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Disbudpar	78	78	stel	Terwujudnya kerapian, ketertiban dan keseragaman dalam berpakaian dinas	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal Karena belanja pakaian dinas disesuaikan dengan kebutuhan
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	40.000.000,00	28.718.960,00	71,79	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	40.000.000,00	28.718.960,00	71,79	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	tahun	Terwujudnya peningkatan, pengetahuan pemahaman dan keterampilan aparatur sesuai dengan bidang tugasnya	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena belanja perjalanan dinas mengikuti bimtek dan kontribusi disesuaikan dengan kebutuhan
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.190.000,00	1.464.000,00	67,00	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000,00	732.000,00	73,20	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	eksp.	Terpenuhinya ketersediaan bahan perencanaan dan evaluasi program kegiatan untuk tahun berikutnya	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena proses pencairan terlambat
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	190.000	-	-	-	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	10	100	eksp.	Terpantaunya dan termonitornya penyerapan keuangan	10	100	eks	Penyerapan anggaran tidak optimal karena proses pencairan terlambat
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000	732.000	73,20	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10		eksp.	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	878.318.740,00	698.250.175,00	79,00	3	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4	3	keg	
	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	13.450.000,00	12.250.000,00	91,07	100	Terpeliharanya website	1	1	keg	Terpenuhinya pemeliharaan website	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	110.045.000,00	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	Masyarakat di lokasi belum bisa melaksanakan pesta adat
	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	38.933.330,00	25.934.350,00	66,61	100	Terlaksananya kegiatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)	1	1	kali	Tercapainya peningkatan kemitraan dan kerjasama dalam pemasaran pariwisata	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	715.890.000,00	660.065.825,00	92,20	99,19	Tersedianya bahan-bahan promosi pariwisata dan terlaksananya promosi pariwisata kepada wisman dan wisnus.	1	1	tahun	Tercapainya peningkatan efektivitas dan frekuensi promosi pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat	100	99,19	%	Penyerapan anggaran tidak optimal Karen kegiatan disesuaikan dengna kebutuhan
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.696.885.807	1.634.509.000	96,00	2	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2	2	keg	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2	2	keg	
	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	243.918.000,00	189.174.000,00	77,55	100	Terlaksananya pengembangan obyek pariwisata unggulan di Kabupaten Kotawaringin Barat	1	1	tahun	Terpeliharanya dan terjaganya obyek wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat serta tercapainya target PAD	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1.452.967.807,00	1.445.335.000,00	99,47	100	Terlaksananya pembangunan fasilitas umum obyek wisata yang lebih lengkap dan representatif berupa : ¼ Cetak foto obyek wisata untuk TIC ¼ Pengecatan pesawat dan pagar di monumen palagan sambi ¼ Pigura foto untuk TIC ¼ Pengadaan AC untuk TIC ¼ Pengadaan meja reception untuk TIC ¼ Pengadaan meja rapat untuk TIC ¼ Pengadaan kursi reception untuk TIC ¼ Pengadaan kursi rapat untuk TIC ¼ Pengadaan rak buku dan pajangan ¼ Pengadaan rak pajangan foto ¼ Pengadaan bunga pengias ruangan untuk TIC	10 							

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						¼ Pengadaan sound system untuk TIC ¼ Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bukan gedung	1 30	1 30	paket paket					
	Program Pengembangan Kemitraan	68.681.260,00	68.681.260,00	79,39	1	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Kemitraan	1	1	keg	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Kemitraan	1	1	keg	
	Pengembangan SDM dibidang Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	68.681.260,00	54.531.260,00	79,39	100	Terlaksananya bimbingan teknis dan pelatihan juru masak kelotok	60	60	orang	Tercapainya peningkatan standar dan kualifikasi jur di wilayah Kab masak kelotok Kabupaten Kotawaringin Barat	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Pariwisata yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya obyek wisata Taman Nasional Tanjung Puting. Pada Tahun 2014 jumlah wisatawan 16.035 orang (terdiri atas 11.000 wisatawan mancanegara dan 5.035 wisatawan nusantara) naik sebesar 83,28 % dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 13.355 orang (terdiri atas 8.439 wisman dan 4.916 wisnus). Dimana terdapat pula kunjungan dari kapal pesiar pada bulan Oktober yang terdiri dari Kapal Orion II sebanyak ± 302 orang bersama crew.

Hal – hal lain yang perlu dilaporkan :

1. Kunjungan wisatawan dari Kapal Orion II pada Bulan Oktober dengan wisatawan sebanyak 302 orang berasal dari Australia dan Amerika, Canada, Swiss, Inggris dan Filipina;
2. Kegiatan Sail Indonesia merupakan Program Pemerintah Pusat. pada Bulan Oktober tahun 2014 kunjungan kapal asing dalam kegiatan Sail Indonesia sebanyak 43 kapal dengan peserta sebanyak 122 orang;
3. Jasa transportasi udara untuk tahun 2014 sebanyak 3 armada dengan rute Pangkalan Bun – Jakarta – Semarang – Surabaya – Ketapang dan Pontianak, Palangka Raya, Sampit dan Banjarmasin;
4. Penginapan yang ada di Kotawaringin Barat sebanyak 30 hotel dengan rincian klasifikasi antara lain :
 - 1) Bintang 3 sebanyak 2 hotel;
 - 2) Bintang 1 sebanyak 1 hotel;
 - 3) Melati 1 sebanyak 12 hotel;
 - 4) Melati 2 sebanyak 7 hotel;
 - 5) Melati 3 sebanyak 9 hotel;
5. Biro perjalanan maupun Agen Perjalanan dalam kurun waktu tahun 2014 sangat maju pesat perkembangannya dimana untuk biro sebanyak 44 biro dan agen sebanyak 27 agen.

c) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan program dan kegiatan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Belum terintegrasi secara optimal komponen penunjang kepariwisataan dalam hal infrastruktur, sarana transportasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan keramahtamahan dalam hal mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai kota tujuan wisata;
2. Belum optimalnya peran dan komitmen seluruh stakeholders untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai kota tujuan wisata;

3. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur dan pengelola kepariwisataan;
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung berkembangnya obyek wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya pemecahan yang perlu dilakukan :

1. Perlu adanya upaya peningkatan perencanaan pembangunan kepariwisataan secara integral dan terkoordinasi lintas instansi terkait serta evaluasi yang bersifat berkala maupun tahunan;
2. Meningkatkan komitmen seluruh stakeholders untuk mewujudkan Kotawaringin Barat sebagai kota tujuan wisata dan dapat menjadi andalan PAD, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja;
3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui bimtek, diklat maupun pelatihan teknis;
4. Memfasilitasi sarana dan prasarana obyek pariwisata terutama dukungan akses infrastruktur jalan yang memadahi;
5. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan obyek pariwisata.

4.2.6. URUSAN INDUSTRI

a) Kondisi Umum

Sektor Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki peran yang sangat strategis. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor Industri pada perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat yang mencapai 13,95% pada tahun 2014. Dengan kontribusi sebesar itu, sektor Industri menempati urutan ke tiga setelah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Pertanian.

Hal yang perlu dilakukan untuk mendorong kemajuan sektor perindustrian adalah dengan pengembangan dan revitalisasi industri kecil, rumah tangga, menengah dan besar. Usaha-usaha yang perlu dilakukan tidak hanya sampai disitu saja tetapi juga penyiapan sumber daya manusia, untuk kebutuhan industri termasuk keterampilan pelaku industri tersebut dalam pengelolaan dan aspek teknis industri yang ditekuni.

Adanya alih fungsi sebagian besar lahan hutan yang tidak produktif menjadi lahan perkebunan sawit baik yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun perusahaan mendorong terbukanya industri pengolahan hasil sawit, untuk itu perlu diupayakan industri yang dapat

menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan PAD serta kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dilihat dari potensi sumber daya alam yang dimiliki, secara umum kondisi industri di Kabupaten Kotawaringin Barat belum berkembang secara optimal. Kecilnya peranan sektor industri ini dimungkinkan oleh sedikitnya jumlah usaha industri di Kabupaten Kotawaringin Barat. Di samping itu, industri yang ada pada umumnya merupakan industri dengan skala kecil. Hanya beberapa industri yang berskala menengah ke atas seperti industri kayu lapis dan kelapa sawit.

Sektor industri komoditas kayu pada tahun 2014, dimana pemasukan yang diterima dari hasil ekspor kayu lapis berupa *plywood* yang nilainya pada tahun 2013 mencapai 154.310.965,28 USD, sedangkan pada tahun 2014 dengan nilai ekspor sebesar 79.458.726,93 USD, dimana jumlah produksi pada tahun 2013 sebesar 146.247,3055 m³ dan pada tahun 2014 sebesar 157.281.0200 m³. Sedangkan pada produk moulding nilai ekspor tahun 2013 mencapai 431.721,99 USD, kemudian terjadi Peningkatan di tahun 2014 menjadi sebesar 926.006,45 USD dengan jumlah produksi untuk tahun 2013 sebesar 1.166,0261 m³ dan tahun 2014 jumlah produksi sebesar 1.904,0799 m³.

Masalah lain yang dihadapi dalam pengembangan industri berskala kecil di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah kurangnya bantuan modal kerja dan peralatan yang dimiliki, disamping kurangnya sarana dan prasarana perhubungan sehingga mempersulit pemasaran produk industri.

Jumlah produk kayu olahan sektor perindustrian yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 4.105
Jumlah Produksi Komoditas Kayu Sektor Perindustrian

Produk	Jumlah Produksi (dalam m ³)	
	2013	2014
Plywood	146.247,3055	157.218,0200
Moulding	1.166,0261	1.904,0799
Jumlah	147.413,3316	159.122,0999

Sumber : Disperindag. Kab.Kotawaringin Barat

Tabel 4.106
Nilai Ekspor Komoditas Kayu Sektor Perindustrian

Produk	Nilai Ekspor (dalam USD)	
	2013	2014
Plywood	154.310.965,28	79.458,726,93
Moulding	431.721,99	926.006,45
Jumlah	154.742.687,27	80.384.733,38

Sumber : Disperindag. Kab.Kotawaringin Barat

Sektor Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat masih di dominasi oleh usaha kecil dan menengah, dimana jenis usaha seperti ini sangat berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah unit usaha pada tahun 2014 sebanyak 536 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,643 orang. Kondisi tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.107
Perkembangan Potensi IKM Tahun 2013 – 2014

No.	Potensi IKM	Satuan	Tahun	
			2013	2014
1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	13,87	13,20
2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	%	6,52	5,22
3.	Jumlah Unit Usaha	unit	509	536
4.	Penyerapan Tenaga Kerja	orang	1,549	1.643
5.	Nilai Investasi	Rp.	67,704,825,000	74,591,109,000
6.	Nilai Produksi	Rp.	118,444,438,000	112,119,149,000
7.	Cakupan bina kelompok pengrajin	Klpg	20	16

Sumber : Disperindag. Kab.Kotawaringin Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Industri dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan nilai anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.241.566.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.183.173.559,00 atau 95,37 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Industri seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.108
Program/Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2014

No.	Program/Kegiatan	Input		Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan	
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan		
			Realisasi											(%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	509.195.000	493.022.259	96,82	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.766.000	4.765.000	99,97	100	Terlaksananya Paket Surat Menyurat Perangko	100	100	paket	Tercapainya Persentase surat menyurat yang disampaikan	100	100	%	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	31.500.000	28.672.509	91,02	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar	12	12	bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi	100	100	%	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	3.050.000	1.256.500	41,19	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	9 1	9 1	Unit Unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional	100	100	%	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	74.591.500	70.017.500	93,86	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi	12	12	bulan	Terwujudnya peningkatan kinerja dan kelancaran dalam	100	100	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						keuangan serta petugas keamanan di lingkungan Disperindag				pengadministrasian keuangan) Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan aman sehingga tercapainya keasrian lingkungan dan kenyamanan dalam beraktifitas menjalankan tugas perkantoran	100	100	%	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21.286.400	20.157.700	94,69	100	Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan dan honor petugas kebersihan kantor	1 264	1 264	Tahun Hari	Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan sekitar Disperindag	100	100	%	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.690.000	20.545.000	99,30	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Disperindag berupa : ¼ Mesin tik ¼ Komputer PC ¼ Printer ¼ Notebook ¼ faximile ¼ Jaringan komputer	 4 12 15 1 1 1	 4 12 15 1 1 1	 unit unit unit unit unit tahun	Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Disperindag	100	100	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan alat tulis kantor	35.491.300	35.485.700	99,98	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	Tahun	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada Disperindag	100	100	%	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.050.000	16.992.500	99,66	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk kedinasan	1	1	tahun	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	100	100	%	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1.604.800	1.600.000	99,70	100	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor : - Bola lampu neon - Kabel rol - Lampu hias	24 4 2	24 4 2	Buah Rol buah	Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan Disperindag	100	100	%	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	119.536.000	117.561.850	98,35	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ¼ Kamera SLR + Lensa ¼ Bendera Hias ¼ Bendera Merah Putih ¼ Kelengkapan	1 41 3 3	1 41 3 3	Unit meter buah buah	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Komputer (mouse,keyboard,flash disk) ¼ Umbul - umbul ¼ Taplak meja ¼ Notebook ¼ UPS ¼ Air Conditioner ¼ Kipas Angin ¼ Printer	10 2 6 6 4 4 2	10 2 6 6 4 4 2	 buah buah buah unit unit unit buah					
	Penyediaan makanan dan minuman	10.403.000	6.786.000	65,23	83,33	Terlaksananya penyediaan: ¼ Makan dan minum rapat ¼ makan dan minum harian tenaga honorer	3 2	3 2	Kali/rapat orang	Terwujudnya peningkatan kinerja tenaga kontrak dan kelancaran dalam pelaksanaan kerja	100	100	%	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	169.226.000	169.182.000	99,97	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40	40	Laporan	Tercapainya koordinasi yang baik antara daerah dengan propinsi dan antara daerah dengan pusat	100	100	%	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	179.573.000	167.738.600	93,41	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	3	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	34.900.000	34.616.600	99,19	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor dan gudang	200 1	200 1	m2 paket	Terpenuhinya optimalisasi fungsi dan kondisi gedung kantor untuk menunjang kenyamanan kerja pegawai	100	100	%	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	142.033.000	130.492.000	91,87	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2 ¼ Roda 4	9 1	9 1	unit unit	Terpenuhinya kebutuhan BBM dan pelumas untuk kendaraan roda dua dan roda empat	100	100	%	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.640.000	2.630.000	99,62	100	Terlaksananya pemeliharaan : ¼ AC ¼ Mesin potong rumput	3 1	3 1	unit unit	Tercapainya optimalisasi fungsi dan kondisi peralatan kantor untuk mendukung kelancaran kerja	100	100	%	
	Program peningkatan disiplin aparatur	40.000.000	38.610.000	96,53	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	%	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	20.000.000	19.305.000	96,53	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Disperindag	39	39	stel	Terwujudnya kerapian, ketertiban dan keseragaman dalam berpakaian dinas	100	100	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	20.000.000	19.305.000	96,53	100	Tersedianya kebutuhan pakaian Olahraga di lingkungan Disperindag	39	39	stel	Terwujudnya keseragaman dalam penampilan pegawai pada peringatan hari-hari tertentu	100	100	%	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	31.090.000	20.138.600	64,78	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	%	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	31.090.000	20.138.600	64,78	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	5	5	orang	Terwujudnya peningkatan, pengetahuan pemahaman dan keterampilan aparatur sesuai dengan bidang tugasnya			%	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.098.000	2.092.000	99,71	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	2	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000	994.000	99,40	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7	7	Buku	Terpenuhinya ketersediaan bahan perencanaan dan evaluasi program kegiatan untuk tahun berikutnya	100	100	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.098.000	1.098.000	100	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7	7	Buku	Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	100	100	%	
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	139.144.500	132.950.700	95,55	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1	1	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	100	100	%	
	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro Kecil dan Menengah dan Swasta	139.144.500	132.950.700	95,55	100	Terlaksananya : ¼ Kegiatan gugus kendali mutu industri kecil dan menengah ¼ Keikutsertaan produk Industri Kecil dan menengah Kab. Kobar pada Pameran Inacraf 2014. ¼ Pendataan di 6 kecamatan. ¼ Temu usaha IKM	1 2 6 1	1 2 6 1	Unit GKM Kali Kec. Keg.	Tercapainya peningkatan kualitas produk IKM di Kab. Kotawaringin Barat	100	100	%	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	340.466.000	328.621.400	96,52	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1	1	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	100	100	%	

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	340.466.000	328.621.400	96,52	100	Terlaksannya - Diklat teknis bagi pengusaha/ pengerajin IKM - Pengadaan : ¼ Mesin Cetak Batako ¼ Mesin Tempa	120 1 1	120 1 1	Orang Pkt. Unit		100	100	%	

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Industri adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya jumlah industri di Kabupaten Kotawaringin Barat. seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4.109
Perkembangan Jumlah Industri di Kab. Ktw. Barat
Tahun 2013 – 2014

No.	Klasifikasi Industri	Jumlah		+ / (-)
		Th. 2013	Th. 2014	
1	Industri Kecil	524	536	12
2	Industri Menengah	-	-	-
3	Industri Besar	72	29	43

Sumber : Disperindag Kab. Kotawaringin Barat

Untuk industri menengah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 di Kabupaten Kotawaringin Barat belum ada, karena kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta – Rp. 10 Milyar diluar tanah dan bangunan

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terkait dengan urusan perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas SDM pengerajin sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi untuk menciptakan produk kerajinan yang mempunyai keunggulan kompetitif;
2. Sulitnya memperoleh bahan baku kerajinan yang berkualitas (contoh getah pantung);
3. Kurangnya modal bagi Usaha Industri Kecil;
4. Rendahnya modal usaha dan tingkat kreativeitas sehingga produk industri kecil kurang bisa bersaing dengan industri besar;
5. Masih minimnya peralatan/mesin yang memadai untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas;
6. Rendahnya tingkat pendidikan pengrajin sehingga berpengaruh pada manajemen pengelolaan usaha;
7. Rendahnya dan terbatasnya jaringan pemasaran produk kerajinan;
8. Rendahnya motivasi pengerajin untuk mengembangkan usahanya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya pemecahan yang perlu dilakukan :

1. Meningkatkan pembinaan dengan cara lebih mengintensifkan pelatihan-pelatihan untuk pengerajin;
2. Memberikan referensi produk dari daerah lain untuk meningkatkan kreatifitas pengerajin;
3. Memfasilitasi atau membantu memberikan kemudahan permodalan bagi industri kecil diantaranya dengan mencari bakap angkat;
4. Melakukan pendampingan untuk lebih memotivasi pengerajin dalam mengembangkan usahanya;
5. Memberikan bantuan pinjam pakai mesin/peralatan percontohan kepada pengerajin atau dengan penerapan teknologi/rekayasa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksinya;
6. Penambahan aparat pembina untuk mengoptimalkan pembinaan monitoring dan evaluasi usaha industri;
7. Perlu adanya jaringan informasi pemasaran antar lembaga pemerintah (SKPD) antara lain : Disperindang, Diskop UKM dan Pasar, Disbudpar serta Bagian Perekonomian Setda.
8. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi serta memberikan kemudahan ijin usaha industri.

4.2.7. URUSAN PERDAGANGAN

a) Kondisi Umum

Sektor perdagangan merupakan sektor strategis bagi Kabupaten Kotawaringin Barat. Sektor ini merupakan penyumbang terbesar kedua pada pembentukan PDRB setelah sektor pertanian. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat karena sangat terkait dengan sektor-sektor lain seperti sektor Pertanian, Industri, Pariwisata dan lainnya. Sektor Perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

Pembangunan sektor perdagangan difokuskan pada perlindungan konsumen dan upaya peningkatan ekspor yang dilaksanakan melalui pengamanan produk-produk melalui monitoring harga bahan pokok 10 komoditas, monitoring distribusi barang dalam pengawasan, pembinaan perlindungan konsumen dan pemantauan barang kadaluarsa. Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediannya dilakukan dengan mengintensifkan koordinasi dengan Bulog dan lembaga terkait.

Sebagaimana arah kebijakan nasional bahwa untuk meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Perdagangan khususnya Perdagangan Luar Negeri diarahkan untuk peningkatan ekspor.

Tabel 4.110
Nilai dan Realisasi Volume Ekspor Perdagangan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014

Uraian	Tahun	
	2013	2014
Nilai (US\$)	215.253.097,17	183.735.699,94
Volume (m ³)	147.413,3316	157.437,0798
Volume (MT)	851.858,935	622.696,302

Sumber : Disperindag. Kab.Kotawaringin Barat

Realisasi volume ekspor pada tahun 2014 sebesar 157.437,0798 m³ dan 622.696,302 MT dengan nilai sebesar 183.735.699,94 US\$. Jika dibandingkan dengan realisasi volume ekspor pada tahun 2013 sebesar 147.413,3316 m³ mengalami kenaikan sebesar 10.023,7482 m³ (6,79 %) dan 851.858,935 MT mengalami penurunan sebesar 229.253,097 MT (- 26,90 %) dan nilai sebesar 215.253.097,17 US\$ mengalami penurunan sebesar 31.517.397,23 US.\$ (- 14,64 %). Hal ini disebabkan harga komoditi ekspor di pasaran dunia internasional mengalami fluktuasi harga, sehingga meskipun volumenya meningkat apabila nilai harganya menurun melebihi dari margin peningkatan volumenya maka nilai ekspornya otomatis juga mengalami penurunan.

Komoditas yang diekspor mencakup 12 jenis komoditi terdiri dari *Plywood, Zircon Sand, Moulding, Wood Chip, Palm Kernel Shell, RBD Palm Stearin, Water Treatment System CPO, Palm Kernel Expeller Faq, Palm Acid Oil, Konsentrat Timbal, RBD Palm Oil, Iron Ore*, dengan tujuan ekspor antara lain ke negara Asean, Eropa, Timur Tengah, China, Jepang dan Pakistan.

Untuk meningkatkan dinamika perdagangan telah dilakukan perlindungan keberadaan pasar tradisional sebagai tempat transaksi masyarakat. Hal ini menjadi konsentrasi Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar yang mana perdagangan adalah merupakan urusan pilihan. Program yang dilaksanakan yaitu Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Pada program ini Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Menjadi *leading sector* pada Penanganan Pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan terbitnya Perbup Nomor 24 tahun 2012 tanggal 31 agustus 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan / Non Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan dapat meningkatkan

dinamika perdagangan telah dilakukan perlindungan keberadaan pasar tradisional sebagai tempat transaksi masyarakat. Dimana pembangunan pusat-pusat perbelanjaan modern yang semakin menjamur di Kabupaten Kotawaringin Barat, akan berdampak pada keberlangsungan pasar-pasar tradisional yang punya stigma negatif bahwa pasar tradisional tersebut becek, kumuh, jorok dan timbangan kurang akurat.

Pada dasarnya minat konsumen untuk berbelanja ke pasar tradisional pada dasarnya masih sangat tinggi. Hal ini karena pasar tradisional menawarkan mekanisme transaksi yang tidak dimiliki oleh ritel modern pada umumnya, yaitu berbelanja dengan sistem tawar-menawar. Akan tetapi hanya segelintir pasar tradisional yang dapat menawarkan kebersihan dan kenyamanan berbelanja yang merupakan faktor penting dalam menentukan preferensi konsumen. Pasar mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai salah satu penggerak roda perekonomian di daerah khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pasar menjadi tempat berinteraksi antara produsen dan konsumen; pemasaran hasil pertanian, industri rumah tangga; menampung pedagang, tenaga kerja lokal; perputaran uang, barang, dan jasa; serta tempat paling mudah bagi masyarakat untuk berbaur. Pasar tradisional merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil serta mikro. Mereka adalah para petani, nelayan, pengrajin, dan industri rumah tangga. Jumlah mereka puluhan juta dan mereka sangat menyandarkan hidupnya kepada pasar tradisional.

Selama ini pasar tradisional selalu menjadi indikator dalam kaitannya dengan pergerakan tingkat kestabilan harga atau inflasi. Dalam menghitung inflasi, harga kebutuhan pokok penduduk yang dijual di pasar tradisional seperti beras, gula, dan sembilan kebutuhan pokok lainnya menjadi objek monitoring para ahli statistik setiap bulannya.

Namun adanya modernisasi dan globalisasi dengan berkembangnya pasar modern (hipermarket, supermarket, minimarket) telah berdampak pada keberadaan pasar tradisional yang lambat laun akan terpinggirkan. Untuk itu pengelolaan pasar tradisional perlu dibenahi baik secara fisik maupun non-fisik sehingga peran pasar tradisional tetap dapat dipertahankan dan bersinergi dengan pasar modern.

Untuk saat ini, yang perlu menjadi perhatian semua pihak adalah bagaimana agar pasar tradisional bisa dibuat menjadi lebih layak sebagai tempat transaksi tanpa harus secara drastis mengubah citranya atau khasnya sebagai pasar tradisional. Jika pasar tradisional bisa dikelola dan diberdayakan dengan baik dan menarik, maka tidak perlu ada pertentangan antara pasar modern dan pasar tradisional. Keduanya berkembang dengan

nuansa serta daya tariknya sendiri-sendiri. Tidak menutup kemungkinan bahwa golongan yang berpendapatan tinggi dan menengah atas akan juga tertarik untuk sesekali mengunjungi pasar tradisional untuk menikmati berbagai hal yang tidak tersedia di pasar modern.

Dari kondisi dan analisa diatas Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar menggandeng dan mengajak para pihak yang berkompeten untuk lebih memperhatikan Pasar Tradisional baik dari sisi kebijakan, regulasi, dan anggaran. Kegiatan Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar tahun 2014 pada urusan Perdagangan meliputi : kegiatan penyuluhan, penataan dan penempatan pedagang pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat, melaksanakan peningkatan jalan cor beton kompleks pertokoan pasar lama, pemasangan paving pasar Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada, dan Penyusunan Masterplan Pasar Indra Sari, Pasar Indra Kencana, Pasar Saik, Pasar Palagan Sari, serta Pasar Cempaka Kumai yang mana diharapkan Masterplan ini merupakan embrio hadirnya pasar tradisional modern yang kita dambakan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Koperasi UMKM dan Pasar , Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.4.293.487.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.139.831.979,00 atau 96,42 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Perdagangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.111
Program/Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2014

	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
			Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ERINDAG														
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	260.415.000	184.243.500	70,75	72,36	Terlaksananya kegiatan pada program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	4	4	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	100	70	%	
	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan – permasalahan Pengaduan Konsumen	49.124.000	25.936.000	52,80	52,80	- Terlaksananya sidang penyelesaian sengketa konsumen - Telaksananya Sosialisasi tentang BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)	2 1	0 1	Keg. Keg.	- Tercapainya penyelesaian sengketa konsumen atas adanya pengaduan dan meningkatnya pengetahuan Pelaku Usaha dan Konsumen tentang BPSK. - Kegiatan Sosialisasi tentang BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)	100	50	%	Output pada kegiatan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) berdasarkan jumlah kasus yang ditangani, jadi anggaran terserap bergantung pada ada atau tidaknya pengaduan konsumen. Pada tahun 2014 hanya ada 1 pengaduan yang diterima dan masih tahap penyelidikan sehingga honor anggota BPSK tidak bisa

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													dibayarkan hingga kasus itu selesai. Telah terlaksanakannya Sosialisasi tentang BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	133.286.000	84.502.000	72,34	72,34	- Telaksananya kegiatan pengawasan barang dan/ atau jasa beredar. - Telaksananya pengawasan pita cukai rokok	6 8	6 6	Kec. keg.	) Tercapainya kegiatan pada program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan berkurangnya barang beredar yang tidak sesuai ketentuan.) Tercapainya program pemberantasan pita cukai ilegal dengan terminimalisirnya peredaran pita cukai ilegal.	100	72,34	%	Dana kegiatan pita cukai rokok ini tidak dapat terserap secara keseluruhan yang dikarenakan tahun anggaran tahun 2014 kab. Kotawaringin barat tidak mendapatkan alokasi Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT), sehingga ada perubahan sumber dana yang digunakan untuk SILPA DBH-CHT yang masuk ke anggaran perubahan. Sehubungan hal tersebut maka

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													kegiatan hanya dapat 1 (satu) kali kegiatan untuk masing-masing kecamatan.
operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah	43.005.000	38.805.000	100	90,23	Terlaksananya kegiatan pendataan alat UTTP dan sidang tera ulang UTTP	6	6	Kec.	Terciptanya kesadaran pemilik alat UTTP terhadap kewajibannya	100	90,23	%	
Operasi Pasar	35.000.000	35.000.000	100	100	Terlaksananya pasar murah	400	400	paket	Terpenuhinya upaya untuk meringankan beban masyarakat dengan pemberian subsidi harga kebutuhan bahan pokok makanan	100	100	%	
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	132.480.000	121.992.000	92.08	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan dan pengembangan ekspor	1	1	Keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan dan pengembangan ekspor	100	100	%	
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk	132.480.000	121.992.000	92.08	100	Terwujudnya Informasi peluang Perdagangan Luar Negeri.	1	1	Unit	- Keikutsertaan Kotawaringin Barat pada Kalteng Expo tahun 2014 - Meningkatkan pemasaran produk di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	100	100	%	

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.792.265.500	1.748.953.279	97,58	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.	1	1	Keg.	- Tercapainya Kegiatan pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.	100	100	%	
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk	1.577.000.000	1.535.549.779	97,37	100	Terwujudnya Kemudahan Transaksi Jual Beli Masyarakat	1	1	Unit	- Terlaksananya Pembangunan Pasar dan Bangunan Penunjang	100	100	%	
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	215.265.500	213.403.500	99,14	100	Tercapainya Penyebaran Informasi kebutuhan pokok dan strategis pada masyarakat	104	102	Kali	- Informasi harga pasar di media cetak. - Data perizinan SIUP dan TDP di Kabupaten Kotawaringin Barat. - Terlaksananya KOBAR EXPO 2014 di Kabupaten Kotawaringin Barat.	100	100	%	

	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OP UKM DAN PASAR														
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.726.116.000	1.714.543.500	99.33	100	Pengembangan dan pembangunan pasar serta sarana dan prasarananya	1	1	tahun	Pasar sebagai pusat perdagangan meningkatkan perekonomian masyarakat dan memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha	100	100	%	
	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	1.726.116.000	1.714.543.500	99.33	100	Honorarium satpam pasar,upah kerja petugas kebersihan pasar, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, pemeliharaan gerobak, Honoratium tenaga ahli/narasumber/praktisi, rehap pasar cempaka kumai, pembangunan kios pasar dan wc didesa sumber agung kec. Pangkalan Lada. Pemeliharaan pasar daerah(pasar indra sari , indra kencana, saik kumai, tuah	1	1	tahun	Pasar sebagai pusat perdagangan meningkatkan perekonomian masyarakat dan memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha	100	100	%	

	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						berinjam, kolam pelanggan sari), studi kajian kelayakan pasar indra sari.								
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	212.236.000	210.649.700	99.25	100	Pedagang mendapatkan pengetahuan dan wasawan	1	1	tahun	Pedagang tertib, rapid an teratur	100	80	%	
	Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan	199.331.000	197.841.500	93.22	100	Penyuluhan pedagang pasar	3	3	Kec.	Pedagang paham dan mengetahui akan hak dan kewajibannya	100	85	%	
	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	12.905.000	12.808.200	6.03	100	Pendataan, penataan dan penempatan pedagang	13	13	pasar	Pedagang berperan aktif dalam menciptakan pasar yang tertib, rapi, dan teratur sebagai tempat berusaha	100	95	%	

	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
			Realisasi	(%)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A														
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	169.975.000	159.450.000	93,80	100									
	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	109.305.000	105.130.000	96,18	100	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengendalian pendistribusian BBM	6	6	Kec.	Terwujudnya ketertiban dalam pendistribusian BBM kepada masyarakat	50	50	%	
	Monitoring dan evaluasi pengendalian penyaluran raskin	40.230.000	38.875.000	96,63	100	Terlaksananya pengawasan distribusi Raskin	6	6	Kec.	Tersalurkannya Raskin secara tepat sasaran dari segi jumlah, harga, waktu dan kualitas	50	50	%	
	Koordinasi lingkup investasi perdagangan dan industri	20.440.000	15.445.000	75,56	100	Terlaksananya koordinasi lingkup investasi perdagangan dan industri	6	6	Kec.	Terpenuhinya ketersediaan data investasi perdagangan dan industri	50	50	%	

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Terjaminnya kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen yang merasa dirugikan atas penggunaan barang dan/atau jasa, yaitu dengan dengan memfasilitasi pengaduan konsumen, memediasi dan mencari solusi penyelesaian sengketa yang terjadi;
2. Meminimalkan peredaran barang yang tidak sesuai standar dan parameter yang ditentukan, dengan melaksanakan pengawasan barang beredar dan/atau jasa pada tahun 2014 sebanyak 17 kali terhadap 149 toko secara acak yang berada di 6 Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Terwujudnya tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dengan dilaksanakannya kegiatan pendataan UTTP di 6 Kecamatan (Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Kumai, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng dan Arut Utara) dan dilaksanakan *siding tera* ulang terhadap alat UTTP di 6 Kecamatan (Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Kumai, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng dan Arut Utara) selama 6 hari bekerjasama dengan Balai Kemetrollogian Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Penyediaan kebutuhan pokok masyarakat pada saat harga kebutuhan melonjak terutama pada hari-hari besar keagamaan, selain itu untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dengan melaksanakan kegiatan operasi pasar murah yang disalurkan kepada masyarakat prasejahtera Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 400 paket sembako;
5. Sektor Perdagangan memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu berada pada peringkat ke dua dibawah sektor pertanian dengan andil sebesar 16,54 %. Sektor ini berperan sebagai sektor jasa penghubung antara produk-produk industri dan pertanian dengan konsumen. PDRB dalam sektor perdagangan merupakan pendapatan masyarakat yang bersumber pada kegiatan perdagangan baik yang berada di kawasan perdagangan tradisional (pasar tradisional, PKL) maupun toko retail kebutuhan pokok dan sebagainya;
6. Usaha perdagangan di pasar-pasar tradisional juga menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang signifikan, sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dari sektor informal karena banyak pihak yang terlibat langsung mulai dari pemasok barang, kuli angkut/panggul hingga penyedia jasa transportasi seperti tukang ojek;
7. Kondisi Pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat yang relatif bersih, tertata dan rapi turut memberikan andil dalam diraihnya kembali piala adipura yang ke-7 kali nya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam urusan perdagangan meliputi :

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha perdagangan untuk melengkapi diri dengan perizinan usaha maupun legalitas lainnya;
2. Adanya persaingan yang tidak seimbang antara peretail besar/modern dengan pelaku pasar tradisional karena belum ada ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut diatas;
3. Belum terbentuknya UPTD Kemetrolagian di Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga pelaksanaan kegiatan *siding tera* alat UTTP memiliki ketergantungan dengan kegiatan dari Balai Kemetrolagian Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Rendahnya kemampuan berpromosi bagi UKM untuk memperluas jaringan pasar;
5. Rendahnya pemahaman terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen oleh pelaku usaha perdagangan maupun konsumen sendiri atas hak dan kewajibannya;
6. Kurangnya frekuensi kegiatan sosialisasi tentang keberadaan BPSK dengan didukung dana yang memadai;
7. Kurang optimalnya penanganan pasar Indra Sari pasca terjadinya musibah kebakaran;
8. Tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
9. Masih adanya tempat-tempat yang kotor dilingkungan Pasar Daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah :

1. Mengajukan usulan setiap tahunnya kepada kementrian terkait ditingkat pusat, agar dapat dialokasikan anggaran APBN guna pembangunan dan merevitalisasi kawasan-kawasan perdagangan tradisional;
2. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi pentingnya perijinan terhadap pedagang atau pelaku usaha kecil menengah;
3. Membuat ketentuan yang mengatur persaingan usaha yang tercakup pula didalamnya penataan lokasi sehingga ada perlindungan terhadap keberadaan usaha kecil dan pasar tradisional, selain itu dengan mengarahkan pembangunan pasar dalam masterplannya diarahkan pada pasar tradisional modern begitu juga para pedagang dibekali pengetahuan mengenai pola-pola, peraturan, dan tata niaga modern;
4. Melakukan koordinasi dengan Balai Kemetrolagian Provinsi agar dapat lebih intensif melakukan kegiatan *siding tera* ulang alat UTTP atau segera mewujudkan terbentuknya UPTD Kemetrolagian di Kabupaten Kotawaringin Barat;

5. Meningkatkan monitoring terhadap aspek harga maupun non harga bagi barang pokok/strategis;
6. Melakukan fasilitasi promosi produk usaha industri kecil dan menengah;
7. Meningkatkan pengawasan peredaran barang beredar dipasar sebagai upaya perlindungan konsumen;
8. Perlunya diadakan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen sehingga masyarakat mengetahui akan keberadaan BPSK serta fungsi dan peran dari BPSK;
9. Membangun kembali pasar Indra Sari yang terbakar, yang rencananya akan ditawarkan kepada pihak swasta;
10. Untuk tahun 2014 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapainya dikarenakan adanya kebakaran Pasar Indra Sari, sehingga akan diupayakan untuk memaksimalkan sumber retribusi pasar yang lain;
11. Menjadi langganan mendapat piala Adipura 7 kali berturut-turut menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar untuk mendukung diraihnya Penghargaan Adipura Kencana. Kawasan pasar menjadi salah satu titik pantau Tim Adipura Kencana, sehingga terciptanya lingkungan pasar yang tetap bersih, rapi, dan nyaman akan terus diupayakan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada seperti petugas kebersihan pasar, penyediaan peralatan kebersihan, penyediaan tanaman-tanaman hijau baik pohon maupun berupa pot, serta himbauan persuasif kepada para pedagang pasar mengenai pentingnya kawasan pasar yang tertib, rapi, bersih, dan asri.

4.2.8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN

a) Kondisi Umum

Transmigrasi merupakan salah satu cara atau metode untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan daerah. Sejalan dengan berlakunya otonomi daerah, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, telah diamanatkan kepada semua penyelenggara pembangunan untuk merubah tata cara pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan transmigrasi agar lebih mengedepankan peran daerah untuk lebih berdayaguna dalam setiap kegiatannya.

Untuk itu penyelenggaraan program transmigrasi saat ini dalam pelaksanaannya dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif daerah dan dilaksanakan daerah serta difasilitasi oleh pusat yang

bermanfaat bagi daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, berkaitan dengan peran pemerintah daerah sebagai pelaksana (*rowing*) sedangkan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering*), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *demand side*.

Artinya, pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai daerah penerima calon transmigran, telah bekerjasama dengan daerah pengirim dalam penyelenggaraan transmigrasi. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin.

Tabel 4.112
Data Transmigran dan Penempatannya

No.	Daerah Asal	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Waktu Penempatan	Lokasi Penempatan
I	Transmigrasi Penduduk Asal				
1.	Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	10	49	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
2.	Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat	10	37	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
3.	Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat	5	28	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
4.	Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah	10	38	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
5.	Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah	15	58	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
6.	Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung	25	103	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
7.	Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah	25	74	02-12-2009	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
8.	Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung	15	60	03-12-2010	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
9.	Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah	10	34	27-11-2010	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
10.	Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah	15	54	27-11-2010	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
II	Transmigrasi Penduduk Setempat				
1.	Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah	75	322	16-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
2.	Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah	25	100	09-12-2009	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
3.	Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah	35	138	27-11-2010	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
Jumlah		275	1.095		

Sumber : Disnakertrans Kab. Kotawaringin Barat

Secara teknis Pelaksanaan Urusan ketransmigrasian selama ini dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya transmigran yang menolak atau pulang kembali kedaerah asal pasca penempatan. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah, daerah asal dan lokasi penempatan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut Ini :

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Urusan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 514.414.904,00 dengan realisasi sebesar Rp. 504.406.601,00 atau 98,05 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Ketransmigrasian seperti yang diuraikan diatas selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.113
Program/Kegiatan Urusan Transmigrasi Tahun Anggaran 2014

Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output				Outcome				Keterangan
	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan											
		Realisasi	(%)		Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real.	Satuan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	514.414.904	504.406.601	98,05	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1	1	keg.	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	100	100	%	
Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	514.414.904	504.406.601	98,05	100	Terlaksananya : ¼ Pembangunan tambatan klotok dan shelter ¼ Sarana TPQ ¼ Badan jalan ¼ Tambahan gizi minum dan makan posyandu	1 1 280 1	1 1 280 1	paket paket meter paket	Terpenuhinya sarana dan prasarana transmigrasi yang memadahi	100	100	%	Penyerapan anggaran tidak optimal karena sisa dari kontrak. Dan sisa dari anggaran perjalanan

c) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi selama dilaksanakannya Program dan Kegiatan kerjasama di bidang transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan kualitas SDM warga transmigrasi khususnya pengetahuan dalam hal managerial usaha tani sehingga berpengaruh terhadap perkembangan usaha taninya;
2. Kelembagaan teknis belum berfungsi secara optimal dengan metode yang dikuasai dengan tahapan kehidupan petani;
3. Adanya klaim lahan usaha transmigrasi oleh masyarakat lokal setempat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi yang ditempuh sebagai berikut :

1. Diprogramkan pelatihan di tahun anggaran 2015 untuk memenuhi pengetahuan para petani untuk dapat mengembangkan usaha taninya sehingga taraf hidup transmigrasi dapat meningkat;
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan transmigran dan masyarakat sekitarnya telah dilaksanakan program pelatihan ketransmigrasian agar para transmigran mampu mengembangkan serta mengelola sumber daya alam yang tersedia antara lain : pelatihan budidaya tanaman hortikultura, Kewirausahaan, pengolahan usaha pertanian, budidaya ternak besar, kader kesehatan, KUB, ketrampilan jahit menjahit, pengolahan air bersih dan kesling perbengkelan, budidaya air tawar, pembuatan pupuk organik, manajemen pemerintahan desa, budidaya jamur tiram, dan pemberdayaan perempuan;
3. Telah dibentuk tim teknis untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan yang terjadi.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN/ KANTOR PUSAT/ URUSAN BERSAMA

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Selain itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan, memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasi dan diotonomkan, sekalipun kepada daerah.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah meliputi sebagian di antara tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif.

Pengaturan pendanaan kewenangan pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintahan daerah, yang sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek

pengelolaan dan pertanggungjawaban. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa, sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai oleh APBD.

5.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Pada Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Kotawaringin Barat menerima alokasi anggaran Tugas Pembantuan yang berasal dari dana APBN dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 32.908.415.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.957.045.513,00 atau 97,11 %, sedangkan untuk realisasi fisiknya sebesar 96,91 %. Anggaran tersebut dikelola oleh 6 SKPD yang meliputi : 1) Dinas Perkebunan; 2) Dinas Kelautan dan Perikanan; 3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 4) Dinas Kesehatan; 5) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; serta 6) RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Terkait dengan pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Kotawaringin Barat selengkapnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

5.1.1 DINAS PERKEBUNAN

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor DIPA-018.05.4.149081/2014;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Dana Tugas Pembantuan Provinsi Ditjen PPHP (07) Tahun Anggaran 2013, Nomor : DIPA-018.07.4.149119/2014, tanggal 5 Desember 2014;
11. Rencana Operasional Kerja (ROK) Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Kotawaringin Barat;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.43/925/PPHP/Disbun, Tanggal 4 Maret 2014 tentang Penetapan Penanggung jawab kegiatan, PUM dan Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Sumber Dana Ditjen PPHP pada SKPD yang Membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia :

- a. Direktorat Perkebunan;
- b. Direktorat Jenderal Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

c. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tugas pembantuan pada tahun anggaran 2014 adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;

d. Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan

❖ Ditjen Perkebunan

Tugas Pembantuan dari Ditjen Perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dituangkan

melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.

Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan diwujudkan melalui kegiatan :

- (1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim;
- (2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan;
- (3) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Perkebunan;

Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2014

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REAL. FISIK (%)	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
			(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	1.697.950.000	1.671.250.000	98,43	100	Tercapainya Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan	Keluaran tidak mencapai 100 % dikarenakan adanya efisiensi nilai kontrak pihak ketiga
	1) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	1.630.000.000	1.606.000.000	98,53	100	) Terlaksananya replanting tanaman karet seluas 200 Ha	Keluaran tidak mencapai 100 % dikarenakan adanya efisiensi nilai kontrak pihak ketiga
	2) Pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman tahunan	67.950.000	65.250.000	96,03	100	) Terlaksananya pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman tahunan	Keluaran tidak mencapai 100 % dikarenakan adanya efisiensi nilai kontrak pihak ketiga
	3) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Perkebunan	70.000.000	68.160.000	97,37	100	) Terlaksananya administrasi kegiatan dana tugas pembantuan selama 1 tahun	Keluaran tidak mencapai 100 % persen hal ini dikarenakan adanya efisiensi belanja administrai kegiatan

Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

Tabel 5.2.
Daftar Nama Penerima Bantuan Replanting

No	Nama Kelompok Tani	Lokasi	Luas Lahan (Ha)	Bantuan	Volume	Nilai (Rp.)
1.	Rukun Makmur	Ds. Sungai Kuning Kec. P. Banteng	22	Bibit Karet Pupuk NPK	12.100 Btg 2.750 Kg	172.810.000
2.	Makarti Mulya	Ds. Sungai Kuning Kec. P. Banteng	15	Bibit Karet Pupuk NPK	8.250 Btg 1.875 Kg	117.825.000
3.	Budi Karya	Ds. Marga Mulya Kec. P. Banteng	25	Bibit Karet Pupuk NPK	13.750 Btg 3.125 Kg	196.375.000
4.	Gapoktan Mitra Sejahtera	Ds. Kebun Agung Kec. P. Banteng	58	Bibit Karet Pupuk NPK	31.900 Btg 7.250 Kg	455.590.000
5.	Sumber Harapan	Ds. Sido Mulyo Kec. P. Banteng	25	Bibit Karet Pupuk NPK	13.750 Btg 3.125 Kg	196.375.000
6.	Tani Mulya	Ds. Sido Mulyo Kec. P. Banteng	25	Bibit Karet Pupuk NPK	13.750 Btg 3.125 Kg	196.375.000
7.	Hijau Makmur	Ds. Sungai Hijau Kec. P. Banteng	30	Bibit Karet Pupuk NPK	16.500 Btg 3.750 Kg	235.650.000
Jumlah			200	Bibit Karet Pupuk NPK	110.000 Btg 25.000 Kg	1.571.000.000

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kotawaringin Barat

❖ **Ditjen Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.**

Tugas Pembantuan dari Ditjen Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dituangkan melalui Program Pengembangan Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian.

Pelaksanaan Program Pengembangan Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian diwujudkan melalui Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian dengan sub Kegiatan Pengembangan Bokar Bersih di Kabupaten Kotawaringin Barat berupa Pertemuan Bimbingan Teknis. Adapun realisasi program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.3
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan PPHP pada Dinas Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2014

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REAL. FISIK (%)	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
			(Rp)	%			
1.	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Keg. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	221.400.000	218.725.000	98,79	100		
	1) Kegiatan Pengembangan Bokar Bersih di Kab. Ktw. Barat	221.400.000	218.725.000	98,79	100	Terlatihnya petani perkebunan tentang teknik penyadapan dan Pengembangan Bahan Olah Karet yang sesuai SNI	Keuangan tidak mencapai 100 persen hal ini dikarenakan adanya efisiensi belanja perjalanan dinas ke provinsi.

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat

Tabel 5.4
Daftar Penerima Bantuan Alat Sadap Karet

No	Nama Kelompok Tani/Desa	Luas Areal (Ha)	Pisau Sadap (Bh)	Batu Asah (Bh)	Talang Sadap (Bh)	Mang kok Sadap (Bh)	Cincin Mangk ok (bh)	Ember Latek (Bh)	Bak Pembeku Latek (Bh)	Pembeku Latek (Ltr)	Saringan Latek (bh)
1	Mutiara Ds. Sungai Kapitan Kec. Kumai	25	50	25	12.500	12.500	12.500	25	50	875	50
2	Sumber Rejeki Ds. Palih Baru Ktw. Lama	25	50	25	12.500	12.500	12.500	25	50	875	50
	JUMLAH	50	100	50	25.000	25.000	25.000	50	100	1.750	100

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.919.350.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

f. Permasalahan dan Solusi

Dalam Pelaksanaannya Tugas Pembantuan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terjadi permasalahan dari segi teknis di lapangan maupun administrasi.

5.1.2 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 dari Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (KP3K) Nomor : 032-07.4.149044/2014 tanggal 05 Desember 2013
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perikanan (P2HP) Nomor : 032.06.4.149082/2014 tanggal 5 Desember 2013

11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 032.03.4.140559/2014 tanggal 5 Desember 2013.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan adalah :

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K).
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP);
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Ditjen Perikanan Tangkap.

c. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tugas pembantuan pada tahun anggaran 2014 adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat.

d. Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan

Pada tahun 2014, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp. 2.750.954.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar Rp. 904.280.000,- (Sembilan Ratus Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan sebesar Rp. 1.096.674.000,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) serta Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- ❖ Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diwujudkan melalui kegiatan:
 1. Pendayagunaan Pesisir dan Lautan
- ❖ Pelaksanaan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan diwujudkan melalui kegiatan:
 1. Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan;
 2. Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan;

3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP
- ❖ Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap diwujudkan melalui kegiatan:
 1. Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan;

Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.7
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2014

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REAL. FISIK (%)	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
		(Rp)	%			
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	1.096.674.000	1.040.621.100	96,89	96,89	Meningkatnya produk perikanan prima tang berdaya saing di pasar domestik dan internasional	
1) Kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan	500.000.000	471.054.100	94,20	100	Tersedianya lokasi pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan dalam negeri	
2) Kegiatan Fasilitas Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	500.000.000	484.054.500	96,80	100	Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina	
3) Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen P2HP	96.674.000	85.512.500	88,5	90,7	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan	
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	904.280.000	897.828.600	99,29	100	Meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat	
1) Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	904.280.000	897.828.600	99,29	100	Terwujudnya kawasan pesisir dan laut tahan bencana dan perubahan iklim serta bebas pencemaran	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	750.000.000	707.535.860	94,34	100	Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan	
1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750.000.000	707.535.860	94,34	100	Tersedianya Pembangunan Kapal Perikanan 10 – 30 GT	

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kotawaringin Barat

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.750.954.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) dan Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) serta Ditjen Perikanan Tangkap.

f. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan tidak ditemui permasalahan dan kendala yang cukup berarti. Kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target capaian yang telah direncanakan.

5.1.3. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor DIPA-026.07.4.149045/2014;

10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor DIPA-026.04.4.149083/2014.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan adalah :

1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
2. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;

c. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tugas pembantuan pada tahun anggaran 2014 adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat.

d. Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan

Pada tahun 2014, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan tugas pembantuan melalui :

1. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja yang dijabarkan dengan kegiatan Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja;
2. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi yang dijabarkan dengan kegiatan :
 - (a) Pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi;
 - (b) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat di kawasan transmigrasi;
 - (c) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen P2MKT.Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.8
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2014

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REAL. FISIK (%)	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
		(Rp)	%			
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	530.520.000	523.941.100	98,76	100	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja	
1) Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	530.520.000	523.941.100	98,76	100	) Terlaksananya padat karya infrastruktur melibatkan 176 orang anggota masyarakat) Terlaksananya layanan perkantoran dalam rangka mendukung Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	Penyerapan anggaran tidak optimal karena sisa anggaran yang ada merupakan biaya kegiatan lelang dengan metode pengadaan langsung/ sisa kontrak
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	2.357.001.000	2.326.958.000	98,73	100	Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing	
1) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	1.943.000.000	1.924.290.000	99,82	100	) Terlaksananya pengembangan jalan sepanjang 3.537 meter	Penyerapan anggaran tidak optimal karena sisa anggaran yang ada merupakan biaya kegiatan lelang dengan metode pengadaan langsung baik fisik maupun konsultasi dilakukan oleh pejabat pengadaan sedangkan lelang umum dan seleksi sederhana di lakukan oleh LPSE.
2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	147.700.000	138.955.200	94,08	100	) Tersalurkannya bantuan pendidikan, pelayanan sosial budaya dan mental	Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REAL. FISIK (%)	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
		(Rp)	%			
Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi					spiritual untuk 1 SP) Terbentuknya 2 kelembagaan kimtrans/ KTM dan masyarakat yang mandiri) Tersalurkannya dan terfasilitasinya bantuan kesehatan untuk 275 KK	Dengan adanya program jamkesmas, jamkesda dan jampersal biaya dukungan operasional rujukan pasien bagi warga trans bisa lebih efisien sehingga pemerintah dalam hal ini Kemenakertrans bisa lebih hemat.
3) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT)	266.301.000	263.712.800	99,03	100	) Terlaksananya layanan perkantoran selama 12 bulan) Tersusunnya 3 dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran) Tersusunnya 17 laporan kegiatan dan pembinaan	Penyerapan anggaran perjalanan dinas luar daerah tidak optimal karena menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan daerah yang dituju dan lamanya perjalanan sehingga ada sisa anggaran Sisa Anggaran untuk honor panitia pengadaan barang tidak terserap semua karena sekarang di pemkab kobar sudah ada LPSE jadi untuk honor tidak perlu lagi yang telah terealisasi hanya untuk pejabat pengadaan.

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat,

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.887.521.000,00 (Dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

f. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan tidak ditemui permasalahan dan kendala yang cukup berarti. Kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target capaian yang telah direncanakan.

5.1.4 DINAS KESEHATAN**1. Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Kementerian Kesehatan****a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor DIPA-024.03.4.149254/2014.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

c. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tugas pembantuan pada tahun anggaran 2014 adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

d. Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan

Pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan tugas pembantuan melalui Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak yang dijabarkan dengan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.9
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2014

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REAL. FISIK (%)	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
			(Rp)	%			
1.	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	1.814.090.000	1.752.775.300	96,78		Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.	Terealisasi dengan baik
	1) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	1.814.090.000	1.752.775.300	96,78		) Tersalurkannya bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk 16 Puskesmas di wilayah Kobar) Terlaksanannya penyusunan perencanaan kegiatan BOK) Terlaksanannya monitoring dan evaluasi kegiatan BOK	Terealisasi dengan baik

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Capaian Pelaksanaan Kegiatan :

1. BOK Puskesmas
Capaian: Tersalurkanannya dana BOK ke 16 Puskesmas
Realisasi Keuangan: 99,81%
2. Pembayaran honorarium
) Capaian : telah dibayarkan honor untuk 10 bulan kepada seluruh petugas sebagaimana SK Bupati dan SK Kepala Dinas;
) Realisasi keuangan 100%.
3. Koordinasi Perencanaan dan Penggerakan Manajemen BOK tahun 2014
 - a. Pertemuan Koordinasi Perencanaan dan Penggerakan Manajemen BOK, telah dilaksanakan 1 kali (100), realisasi keuangan 96,7%
 - b. BIMTEK Program BOK ke Puskesmas, telah dilaksanakan 2 kali ke setiap puskesmas secara terintegrasi dengan kegiatan bersumber dana APBD (100%), realisasi keuangan 0%
 - c. Konsultasi ke Provinsi, telah dilaksanakan 2 kali melalui kunjungan ke DINKES Provinsi selebihnya melalui komunikasi telepon, realisasi keuangan 20%
 - d. Rekonsiliasi SAK ke Pusat, telah dilaksanakan 1 kali ke Bandung (100%), realisasi keuangan 68%.
4. Monev BOK
 - a. Monev BOK, telah dilaksanakan 1 kali ke setiap Puskesmas (100%), realisasi keuangan 88%.
 - b. Koordinasi dengan Kanwil DJPBN dan KPPN
) Koordinasi ke DJPBN Palangka Raya dilakukan melalui komunikasi telepon dan email, tidak berupa perjalanan dinas.
) Koordinasi ke KPPN Pangkalan Bun 1 bulan 2 kali (100%).
) Realisasi keuangan 18%.
 - c. Bimbingan Teknis Puskesmas Poned, telah dilaksanakan 1 kali ke setiap puskesmas poned (100%), Realisasi keuangan 0%.
 - d. Pertemuan/ rapat evaluasi program, pertemuan evaluasi telah dilaksanakan 1 kali (100%), realisasi keuangan 49%.
5. Laporan Kegiatan/Sosialisasi
 - a. Sosialisasi program BOK
) Telah dilaksanakan 1 kali (100%);
) Realisasi keuangan 95,2%.Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan :
 1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 98 %;

2. Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 103 %;
 3. Persentase balita ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang/balita seluruhnya D/S) 52,25%.
- b. Pencatatan dan penyusunan laporan
-) Laporan tahunan BOK dan laporan keuangan tahunan BOK telah selesai disusun;
 -) Laporan pertemuan sosialisasi telah selesai disusun
 -) 16 Puskesmas telah mencatat neraca keuangan dalam buku kas tunai;
 -) 16 Puskesmas telah menyampaikan laporan realisasi keuangan;
 -) 16 Puskesmas telah menyampaikan surat pernyataan tanggungjawab belanja;
 -) SPJ BOK 16 Puskesmas telah di verifikasi;
 -) Realisasi keuangan 100%.

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.814.090.000,00 (satu milyar delapan ratus empat belas juta sembilan puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

f. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program BOK di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 adalah :

1. Juknis BOK 2014 terlambat di terima Dinas Kesehatan
2. Dalam penentuan alokasi dana BOK per puskesmas tidak tersedianya tata cara perhitungan yang jelas dan tidak tersedianya ukuran tingkat kesulitan wilayah menjadi hambatan dalam menentukan alokasi dana BOK per puskesmas secara objektif sepenuhnya;
3. Dalam proses perencanaan ketersediaan dan kemampuan SDM puskesmas yang belum merata diseluruh puskesmas menjadi hambatan dalam tersedianya Rencana Usulan Kegiatan dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan secara keseluruhan pada awal tahun;
4. Dalam penyusunan perencanaan ditingkat puskesmas kurangnya keterlibatan pengelola program secara aktif dibeberapa puskesmas menjadi hambatan dalam tersusunya POA yang mampu mengakomodasi kebutuhan program;

5. Dalam proses penyusunan pertanggungjawaban kegiatan BOK di puskesmas kemampuan SDM puskesmas dibidang administrasi keuangan dan padatnya aktifitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi hambatan dalam penyusunan pertanggungjawaban yang sesuai dan tepat waktu;
6. Dalam proses bimtek dan monev dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas belum dilibatkannya pengelola program di puskesmas secara keseluruhan menjadi hambatan dalam merangsang keterlibatan pengelola program di puskesmas untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOK;
7. Penyerapan anggaran untuk kegiatan penunjang di Dinas Kesehatan menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebagai akibat banyaknya kegiatan perjalanan dinas ke puskesmas yang tidak terlaksana.

SOLUSI

Beberapa solusi yang dilakukan berdasar pada permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program BOK di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2013 adalah antara lain :

1. Sosialisasi dilaksanakan melalui kunjungan bimtek berintegrasi dengan bimtek program bersumber dana APBD di triwulan I;
2. Membuat tata cara perhitungan sendiri dengan tetap berpedoman pada indikator seperti yang tertulis pada petunjuk teknis;
3. Pemberian bimtek kepada petugas melalui kunjungan ke puskesmas dan pada saat verifikasi, termasuk membentuk tim verifikasi POA (1 orang verifikator untuk 2 puskesmas);
4. Pemberian bimbingan kepada pengelola program secara langsung mulai dari pimpinan puskesmas, penanggungjawab program di tingkat Kabupaten dan pengambil kebijakan;
5. Mengangkat verifikator pertanggungjawaban bersumber dana APBD sebanyak 2 orang untuk membantu puskesmas dalam memverifikasi pertanggungjawaban BOK yang disusun pengelola keuangan BOK puskesmas;
6. Dalam proses bimtek dan monev tidak hanya fokus pada pengelola BOK puskesmas namun juga melibatkan pengelola program.

2. Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-024.04.4.140561/2014.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Ditjen Bina Upaya Kesehatan.

c. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tugas pembantuan pada tahun anggaran 2014 adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

d. Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan

Pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan tugas pembantuan melalui Program Pembinaan Upaya Kesehatan, kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar.

Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.9
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2014

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REAL. FISIK (%)	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
			(Rp)	%			
1.	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	1.000.000.000	938.650.000	93,87	98,63	Meningkatnya ketersediaan alat kesehatan di puskesmas	
	1) Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	1.000.000.000	938.650.000	93,87	98,63		

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Capaian Pelaksanaan Kegiatan :

1. Penyerapan Anggaran pada rekening belanja layanan perkantoran nomor rekening 2087.001 sebesar Rp. 11.530.000 (Sebelas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Honor pengelolaan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati dan SK kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas Honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), honor pejabat pembuat komitmen (PPK), honor pejabat penguji dan penandatanganan SPM, honor bendahara pengeluaran dan honor staff administrasi, masing-masing 1 (satu) orang dibayarkan selama 3 (tiga) bulan. Jumlah dana Rp. 9.030.000 (Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah), realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%
 - b. Honor pengelola SAI yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas penanggung jawab SAKPA dan SIMAK-BMN, masing-masing 1 (satu) orang dan dibayarkan selama 3 (tiga) bulan. Jumlah dana Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
 - c. Belanja ATK dan penggandaan untuk 3 (tiga) bulan, jumlah dana Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
2. Penyerapan Anggaran pada rekening belanja Alat Kesehatan/kedokteran dalam mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar nomor rekening 2087.013 sebesar Rp. 987.100.000 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Honor panitia penerima Barang/Jasa yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk 3 (tiga) bulan sebanyak 5 (lima) orang untuk pagu 500 juta s/d 1 milyar, jumlah dana Rp.3.100.000 (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah), realisasi fisik 80%, realisasi keuangan 80% disebabkan satu anggota panitia sedang cuti.
 - b. Pengadaan alat-alat Kesehatan/Kedokteran berupa peralatan poliklinik umum set dan poliklinik gigi set, jumlah dana sebesar Rp.984.000.000 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) realisasi fisik pekerjaan tersebut sebesar 98,63% dan realisasi keuangan sebesar Rp.924.640.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) atau 94,93%.

3. Penyerapan Anggaran pada rekening belanja output cadangan nomor rekening 2087.999 sebesar Rp.1.370.000 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) realisasi fisik 100%

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ditjen Bina Upaya Kesehatan.

f. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana Tugas Pembantuan tahun 2014 terutama pada pengadaan peralatan kesehatan puskesmas.

Proses terbitnya DIPA pada penghujung tahun 2014 menyebabkan rekanan kesulitan untuk memenuhi seluruh peralatan kesehatan yang tercantum di dalam kontrak sehingga ada 2 (dua) jenis alat kesehatan yang tidak bisa direalisasikan karena kekosongan alat tersebut pada distributor resmi.

Dampaknya pada realisasi keuangan berdasarkan kontrak tidak bisa seluruhnya sehingga realisasi keuangan berdasarkan jumlah barang yang mampu disediakan oleh rekanan.

5.1.5 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor SP DIPA-040.05.4.140558/2014.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata.

c. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tugas pembantuan pada tahun anggaran 2014 adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat.

d. Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan

Pada tahun 2014, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan tugas pembantuan melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata. Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.10

Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2014

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REAL. FISIK (%)	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
			(Rp)	%			
1.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.536.500.000	2.411.615.653	95,08	98,00	Meningkatnya :)Devisa dan pengeluaran wisatawan)Investasi di sektor pariwisata)Kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional)Citra kepariwisataan Indonesia)Keragaman destinasi pariwisata)Keragaman produk wisata minat khusus dan zona kreatif di Indonesia)Kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program)Kualitas pengelolaan keuangan Ditjen PDP)Kualitas organisasi Ditjen PDP	
	1) Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata	2.536.500.000				Terlaksananya fasilitasi/ pendukung amenities fasilitas pariwisata	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.536.500.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata.

f. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan tidak ditemui permasalahan dan kendala yang cukup berarti. Kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target capaian yang telah direncanakan.

5.1.6 RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor DIPA-024.04.4.149256/2014.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Ditjen BUK).

c. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tugas pembantuan pada tahun anggaran 2014 adalah RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat.

d. Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan

Pada tahun 2014, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Tugas Pembantuan melalui Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.11
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2014

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REAL. FISIK (%)	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
			(Rp)	%			
I.	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	20.000.000.000	19.467.145.000	97,34	100	Meningkatkan upaya kesehatan dasar, rujukan, tradisional, alternatif dan komplementer, kesehatan kerja, olah raga dan matra, serta standarisasi, akreditasi, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.	
	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	20.000.000.000	19.467.145.000	97,34	100	) Layanan Perkantoran) Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB dalam rangka menuju pelayanan kelas dunia	
	Layanan Perkantoran	30.400.000	26.450.000	87,01	100	) Terlaksananya Layanan Perkantoran (3 bulan), Belanja Honor Operasional Satker, dan Belanja Honor Staff Administrasi	Layanan perkantoran untuk belanja bahan/ATK dan penggandaan
	Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB	19.543.455.000	19.440.695.000	99,47	100	) Terlaksananya Belanja Honor PPHP dan ULP, dan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan	Realisasi honor sesuai paket, dan alat-alat sesuai kontrak
	Output Cadangan	426.145.000	0	0	0	) Output Cadangan	Tidak digunakan dalam kegiatan

Sumber : RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

RSUD Sultan Imanuddin Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ditjen Bina Upaya Kesehatan.

f. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan tidak ditemui permasalahan dan kendala yang cukup berarti. Kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target capaian yang telah direncanakan.

5.2 PENYELENGGARAAN URUSAN BERSAMA

Pada Tahun Anggaran 2014, Kabupaten Kotawaringin Barat menerima alokasi anggaran Dana Urusan Bersama (DUB) yang berasal dari dana APBN. Sebagaimana Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-0010.05.5.149257/2014 tanggal 5 Desember 2013, bahwa alokasi Dana Urusan Bersama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 9.328.880.000,00,-. Pada bulan Juli 2014, Pemerintah Pusat melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 perihal Pemotongan DUB PNPM Mandiri Perdesaan, mengeluarkan kebijakan penghematan dan pemotongan DUB PNPM Mandiri Perdesaan yang berasal dari APBN sebesar 11.8%. Kebijakan Pemerintah Pusat ini mengakibatkan alokasi Dana Urusan Bersama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014 turun menjadi Rp. 8.721.180.000,-. Alokasi ini sebagaimana tercantum dalam Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-0010.05.5.149257/2014 yang diterbitkan pada tanggal 15 September 2014. Realisasi Keuangan Dana Urusan Bersama Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 8.708.783.800 atau sebesar 99,86%, sedangkan untuk realisasi fisiknya sebesar 100 %. Anggaran tersebut dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Kotawaringin Barat. Terkait dengan pelaksanaan Urusan Bersama di Kabupaten Kotawaringin Barat selengkapnya dapat dilihat pada uraian sebagai berikut.

5.2.1 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2014 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor SP DIPA-0010.05.5.149257/2014.

b. Instansi Pemberi Urusan Bersama

Instansi Pemerintah yang memberikan Dana Urusan Bersama adalah Kementerian Dalam Negeri Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa.

c. SKPD Pelaksana Urusan Bersama

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana Dana Urusan Bersama pada tahun anggaran 2014 adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.

d. Program Dan Kegiatan Urusan Bersama

Pada tahun 2014, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Dana Urusan Bersama melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM). Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.12
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Bersama pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kotawaringin Barat,Tahun 2014

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REAL. FISIK (%)	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
		(Rp)	%			
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	8.721.180.000	8.708.783.800	99,86	100	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa/ kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis.	Dana UB 2014 tersebut terdiri dari 1. Administrasi Kegiatan Satker BPMD sebesar Rp. 230.702.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 218.330.800,- 2. Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah sebesar Rp.65.015.000,- dengan realisasi Rp. 64.990.000,- 3. Bantuan Sosial PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM MPd Integrasi SPP- SPPN untuk 6 kecamatan sebesar Rp. 8.411.113.000,- dengan realisasi Rp. 8.411.113.000,- 4. Pembinaan dan Pengawasan PNPM MPd oleh Inspektorat Kabupaten sebesar Rp. 14.350.000,- dengan realisasi Rp. 14.350.000,-
1) Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)	8.721.180.000	8.708.783.800	99,86	100	Tercapainya cakupan PNPM Mandiri Perdesaan pada 6 kecamatan	- Dana Administrasi Kegiatan merupakan dana untuk mebiayai Belanja Keperluan Perkantoran, Honor Operasional Satker, Belanja Sewa, Belanja Bahan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Luar Kota. Pada tahun 2013, dana yang tidak terserap sebesar Rp. 12.371.200,- diantaranya :) honor pejabat pengadaan barang sebesar Rp. 6.120.000,- karena tidak ada personilnya pejabat pengadaan barang dan honor staff pengelola sebesar Rp. 885.000,-) Terdapat sisa biaya kirim pos sebesar Rp.1.125.000,- dan belanja bahan Rp. 62.000,-) Sisa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Bimtek sebesar Rp. 4.204.200,- - Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 8.411.113.000,- dengan realisasi Rp. 8.411.113.000,- atau 100% merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) terdiri dari :) BLM Kegiatan PNPM MPd sebesar Rp. 4.542.300.000,- yakni : - Arut Selatan sebesar Rp. 758.520.000,- - Kumai sebesar Rp. 1.093.680.000,- - Kotawaringin Lama sebesar Rp. 674.730.000,- - Arut Utara sebesar Rp. 674.730.000,- - Pangkalan Lada sebesar Rp. 670.730.000,- - Pangkalan Banteng sebesar Rp. 670.730.000,-) BLM Kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan realisasi Rp.3.000.000.000- atau 100% yakni : - Arut Selatan sebesar Rp. 211.116.750,-

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REAL. FISIK (%)	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
		(Rp)	%			
						- Kumai sebesar Rp. 731.560.125,- - Kotawaringin Lama sebesar Rp. 595.143.750,- - Arut Utara sebesar Rp. 412.318.500,- - Pangkalan Lada sebesar Rp. 634.710.375,- - Pangkalan Banteng sebesar Rp. 415.150.500,-) BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp. 518.813.000,- dengan realisasi Rp. 518.813.000,- atau 100% terdiri : - Arut Selatan sebesar Rp. 97.942.00,- - Kumai sebesar Rp. 93.689.000,- - Kotawaringin Lama sebesar Rp. 91.562.000,- - Arut Utara sebesar Rp. 78.803.000,- - Pangkalan Lada sebesar Rp. 70.354.000,- - Pangkalan Banteng sebesar Rp. 86.463.000,-) BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi Rp. 200.000.000 atau 100% terdiri : - Arut Selatan sebesar Rp. 42.554.000,- - Kumai sebesar Rp. 38.298.000,- - Kotawaringin Lama sebesar Rp. 36.170.000,- - Arut Utara sebesar Rp. 23.404.000,- - Pangkalan Lada sebesar Rp. 23.404.000,- - Pangkalan Banteng sebesar Rp. 26.170.000,-) BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Rp. 150.000.000,- dengan realisasi Rp. 150.000.000,- atau 100% untuk 6 Kecamatan yang dikelola oleh Pokja RBM Kabupaten Kotawaringin Barat. - Pembinaan dan Pengawasan PNPM MPd oleh Inspektorat Kabupaten sebesar Rp. 14.350.000,- dengan realisasi Rp. 14.350.000,- merupakan dana untuk audit dukungan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat atas pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2013. Pelaksanaan Audit tahun 2013 dengan mengambil sampel di Kecamatan Kumai dan Kecamatan Arut Utara dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotawaringin Barat

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.721.180.000,00 {Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Dalam Negeri Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa.

f. Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan kegiatan Dana Urusan Bersama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014 berjalan dengan lancar, tidak terdapat kendala yang berarti.

g. Keterangan Lain-lain

Sebelum Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan pemotongan DUB PNPM Mandiri Perdesaan, alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 5.400.000.000,- dengan komposisi Rp. 5.150.000.000,- dari APBN dan 250.000.000,- dari APBD.

Pemotongan Dana Urusan Bersama (DUB) dari APBN sebagaimana surat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 sebesar 11,8 atau sebesar Rp. 607.700.000,- telah ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui APBD Perubahan Tahun 2014. Alokasi tersebut sudah direalisasikan dan dicairkan ke masyarakat melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan. Dengan penambahan ini, maka alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014 tetap sebesar Rp. 5.400.000.000,- dengan komposisi sebesar Rp. 4.542.000.000,- dari APBN dan Rp. 857.700.000,- dari APBD.

5.3 PENYELENGGARAAN DANA KANTOR PUSAT

Pada Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Kotawaringin Barat menerima alokasi anggaran Kantor Pusat yang berasal dari dana APBN Kementrian Pekerjaan Umum dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 2.360.000.000,00 ,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.360.000.000,00,- atau 100 %, sedangkan untuk realisasi fisiknya juga terealisasi sebesar 100 %. Anggaran tersebut dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat. Terkait dengan pelaksanaan Dana Kantor Pusat di Kabupaten Kotawaringin Barat selengkapnya dapat dilihat pada uraian sebagai berikut.

5.3.1 DINAS PEKERJAAN UMUM**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor SP DIPA-033.05.1.504101/2014.

b. Instansi Pemberi Dana Kantor Pusat

Instansi Pemerintah yang memberikan Dana Kantor Pusat adalah Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya.

c. SKPD Pelaksana Dana Kantor Pusat

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan dana kantor pusat pada tahun anggaran 2014 adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;

d. Program Dan Kegiatan Kantor Pusat

Pada tahun 2014, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Dana Kantor Pusat melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan

Permukiman dan kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.13
Realisasi Program dan Kegiatan Dana Kantor Pusat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2014

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REAL. FISIK (%)	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
			(Rp)	%			
1.	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	2.360.000.000	2.360.000.000	100	100	Meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/ kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman serta jumlah kawasannya.	
	Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman.	600.000.000	600.000.000	100	100	Terlaksananya Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) pada 6 desa sasaran	
	Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.760.000.000	1.760.000.000	100	100	Terlaksananya Program Sistem Penyediaan Air Minum pada 8 desa sasaran	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kotawaringin Barat

e. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.360.000.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya.

f. Permasalahan Dan Solusi

Selama pelaksanaan tidak ditemui kendala dan permasalahan yang berarti, baik yang bersifat teknis dilapangan maupun administratif.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

6.1 KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

6.1.1 DINAS KESEHATAN

6.1.1.1 Program Tuberculosis (TB) Kejasama dengan Global Funds ATM

a. Kebijakan dan Kegiatan

Sasaran strategi nasional pengendalian TB mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 yaitu menurunkan prevalensi TB dari 235 per 100.000 penduduk menjadi 224 per 100.000 penduduk. Sasaran keluaran adalah :

- 1) Meningkatkan presentase kasus TB paru (BTA positif) yang ditemukan dari 73 % menjadi 90 % ;
- 2) Meningkatkan persentase keberhasilan pengobatan kasus baru TB paru (BTA positif) mencapai 88 % ;
- 3) Meningkatkan persentase provinsi dengan CNR 5 % per Tahun ;
- 4) Meningkatkan persentase provinsi dengan keberhasilan pengobatan di atas 85 % dari 80 % menjadi 88 %.

Guna mencapai sasaran – sasaran di atas maka strategi – strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan perluasan pelayanan DOTS yang bermutu;
- 2) Menangani TB/HIV, MDR-TB, TB anak dan masyarakat miskin serta rentan lainnya;
- 3) Melibatkan seluruh penyedia pelayanan kesehatan milik pemerintah, masyarakat dan swasta mengikuti International Standards of TB Care;
- 4) Memberdayakan masyarakat dan pasien TB;
- 5) Memperkuat sistem kesehatan, termasuk pengembangan SDM dan manajemen program pengendalian TB;
- 6) Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah terhadap program TB;
- 7) Meningkatkan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan informasi strategik.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Penyakit TB paru telah mendapatkan perhatian di tingkat global sebagai target penyakit yang harus diturunkan angka kesakitannya. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

- 1) Puskesmas melakukan survey kontak pada keluarga dan tetangga pasien BTA positif. ;

- 2) Dinas kesehatan berupaya meningkatkan jejaring eksternal dengan berbagai perusahaan, klinik swasta, dokter praktek swasta dan upaya meningkatkan jejaring internal dengan pihak RSUD Sultan Imanuddin;
- 3) Untuk meningkatkan keterampilan petugas kesehatan di Puskesmas dilakukan On the Job Training (OJT) secara khusus pelatihan tentang pembuatan sediaan dahak dan pewarnaan pada petugas Puskesmas, Poskesdes dan Polindes di Puskesmas yang belum pernah dilatih, seperti di Puskesmas Riam Durian;
- 4) Mengadakan pertemuan monitoring, evaluasi dan validasi data TB 2 tahun sekali pada triwulan 1 dan triwulan 4.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ada adalah :

- 1) Masih kurangnya koordinasi dengan pihak RSUD Sultan Imanuddin melaksanakan program TB dengan baik, tetapi sistem pencatatan dan pelaporan belum lengkap dan benar. Hal ini berdampak pada turunnya angka konversi dan success rate tahun 2014;
- 2) Programmer TB RSUD Sultan Imanuddin mempunyai tugas rangkap, maka pada bulan Januari tahun 2015 akan diadakan pelatihan Juru TB RSUD Sultan Imanuddin selama 5 hari di Provinsi Palangka Raya, hal tersebut dapat membantu sistem pelaporan TB elektronik oleh Programmer TB RSUD Sultan Imanuddin;
- 3) Adanya pengurangan dana GF pada tahun 2014, biaya case finding TB yang semula dibayarkan penuh, hanya dibayarkan dengan perbandingan BTA positif atau GF hanya membiayai 60 % Program TB;
- 4) Adanya gangguan sistem pelaporan TB elektronik dari pusat dan provinsi selama beberapa bulan sehingga juru TB Kabupaten menjadi kesulitan dalam mengentri dan upload data TB selama tri wulan 2 dan 3 tahun 2014;
- 5) Sistem keuangan program TB masih terbatas untuk melakukan peningkatan program kegiatan;
- 6) Program kerja wasor TB kabupaten yang masih satu orang mempunyai tugas rangkap dengan program kerja lain seperti program entomologi, program P2 Kusta, program STP penyakit menular dan STP penyakit tidak menular, dan membantu program kerja lainnya yang ada di seksi PPP, sehingga tugas pokok wasor TB kabupaten kurang optimal. Selain itu tidak adanya dana insentif kerja wasor TB kabupaten dan pengelola program TB Puskesmas untuk setiap bulan.

Solusi yang disarankan adalah :

- 1) Sangat diperlukan dukungan dana APBD yang lebih banyak agar tidak tergantung pada dana Global Fund TB, sehingga wasor TB kabupaten dan pengelola program TB Puskesmas dapat mengembangkan dan meningkatkan program kerja TB seperti menambah tenaga honor, melengkapi peralatan ATK khusus program TB dan lain sebagainya;
- 2) Sangat diperlukan dukungan dari gudang Farmasi Dinas Kesehatan agar membantu dalam proses pengeluaran dan pemasukan logistik program TB secara FIFO, dimana proses pengeluaran logistik yang akan expired dikeluarkan terlebih dahulu sehingga dapat meminimalisir OAT yang sudah expired dan tidak terpakai;
- 3) Pembentukan POS ATM – Plus (TB Desa);
- 4) Aktifkan kader posyandu, tokoh masyarakat dan masyarakat terpilih lainnya untuk dijadikan penanggungjawab program TB sehingga penjangkauan kasus penderita TB dan pengawasan pengobatan TB dapat optimal;

6.1.1.2 Program Malaria Kejasama dengan Global Funds ATM**a. Kebijakan dan Kegiatan**

Kebijakan program malaria berdasarkan pada Global Malaria Programme (WHO) yang dirumuskan dalam pertemuan WHO 60 tanggal 18 Mei 2007, dengan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Eliminasi malaria dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah, pemerintah daerah bersama mitra kerja pembangunan termasuk LSM, dunia usaha, lembaga donor organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat;
- 2) Eliminasi malaria dilakukan secara bertahap dari kabupaten/ kota, provinsi, dan dari satu pulau atau ke beberapa pulau sampai ke seluruh wilayah Indonesia menurut tahapan yang didasarkan pada situasi malaria dan kondisi sumber daya yang tersedia.

Strategi yang dilaksanakan adalah :

- 1) Melakukan penemuan dini dan pengobatan yang tepat;
- 2) Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung secara aktif upaya eliminasi malaria;
- 3) Menjamin akses pelayanan berkualitas terhadap masyarakat yang beresiko;
- 4) Melakukan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendukung eliminasi malaria secara aktif;
- 5) Menggalang kemitraan dan sumber daya baik local, nasional maupun

sektor swasta, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan melalui forum gebrak malaria atau forum kemitraan lainnya;

- 6) Menyelenggarakan sistem surveilans, monitoring dan evaluasi serta informasi kesehatan;
- 7) Melakukan upaya eliminasi malaria melalui forum kemitraan gebrak malaria atau forum kemitraan lain yang sudah terbentuk;
- 8) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi dalam upaya eliminasi malaria.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Jumlah penemuan penderita tahun 2014 sebanyak 15 kasus dengan rincian plasmodium falcifarum 6 kasus, plasmodium vivak 9 kasus dan plasmodium mix 0 kasus dengan API 0,06 permil;
- 2) API Puskesmas tertinggi pada tahun 2013 adalah Puskesmas Arut Utara 5,6% dan Puskesmas Pangkalan Lada 1,51%, dan pada tahun 2014 API pada kedua Puskesmas tersebut menurun dan tidak termasuk High Case Incidence (HCI). Hal tersebut dikarenakan adanya kegiatan penemuan penderita secara aktif yaitu Survei Darah Massal (MBS), dilakukan pemeriksaan langsung pada para pekerja di daerah pemukiman tambang emas lokal yang tersebar di wilayah kerja Puskesmas Arut Utara dan Sambi.
- 3) Distribusi kelambu berinsektisida dilakukan ke seluruh wilayah Puskesmas se – Kabupaten Kotawaringin Barat dengan sasaran ibu hamil ANC, bayi imunisasi lengkap dan kelompok resiko tinggi penularan di pemukiman khususnya daerah tambang emas.

c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Pada tahun 2014 masih ditemukan 15 kasus penderita malaria;
- 2) Pengelola program Malaria di Puskesmas mempunyai tugas rangkap dengan program lainnya;
- 3) Solusi dari permasalahan tersebut adalah Kabupaten Kotawaringin Barat akan tetap melanjutkan program pemberantasan penyakit malaria dengan cara distribusi kelambu berinsektisida sampai ke daerah resiko tinggi penularan, meningkatkan kegiatan penemuan penderita secara aktif dengan MBS dan meningkatkan program entomologi malaria seperti survey jentik nyamuk malaria yang ada di daerah sekitar pemukiman tambang emas wilayah kerja Puskesmas. Untuk pengelola program malaria di Puskesmas, sangat diperlukan adanya pengurangan beban kerjanya oleh Pimpinan Puskesmas.

6.1.1.3 Program HIV Kejasama dengan Global Funds ATM

a. Kebijakan

- 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 440/060/KD.GF-AIDS;
- 2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 20 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1984 No. 3273);
- 3) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144 Tambahan Lembaran Negara No. 5063);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
- 5) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 9/Kep/Menko/Kesra/IV/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS;
- 6) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 293/ Menkes/SK/IV/2009 tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual;
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/PER/IX/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007.

b. Kegiatan

- 1) Pertemuan Peningkatan Kapasitas Layanan dan Program di Klinik VCT dan IMS;
- 2) Pertemuan koordinasi jejaring Program Kolaborasi TB-HIV;
- 3) Pertemuan Pengembangan Sistem Pendukung dan Jaringan Pelayanan Klinik VCT;
- 4) Pertemuan Internal Triwulanan Klinik;
- 5) IMS Mobile ke Populasi Kunci;
- 6) VCT Mobile ke Populasi Kunci.

c. Realisasi Kegiatan

Semua kegiatan dapat terealisasi dengan baik.

d. Kendala

- 1) Penyusunan rencana kegiatan atau Work Plan masih belum sesuai dengan situasi di lapangan;

- 2) Belum semua tenaga kesehatan yang ada di klinik VCT dan IMS memahami tupoksinya masing – masing;
- 3) Belum adanya payung hukum atau peraturan daerah untuk tim yang bekerja di lapangan pada saat mobile VCT/ IMS;
- 4) Belum adanya jaminan atau asuransi kesehatan untuk petugas lapangan terhadap resiko tertularnya penyakit menular seperti HIV/AIDS;
- 5) Kelompok resiko yang di konseling masih terfokus pada populasi kunci, belum masuk pada ke kelompok resiko lainnya;
- 6) Belum adanya payung hukum atau peraturan daerah yang jelas untuk melakukan kegiatan mobile VCT ke instansi – instansi pemerintah yang beresiko tinggi terkena HIV/AIDS;
- 7) Tim Klinik VCT kesulitan untuk melaksanakan kegiatan di luar lapangan/ VCT Mobile.

e. Solusi

- 1) Mengajukan usulan rencana kegiatan/*Work Plan* ke Dinas Provinsi untuk diusulkan ke Kementerian Pusat;
- 2) Berkoordinasi dengan viar yang lain untuk merancang dan mengusulkan peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan daerah yang mendukung program ke institusi pemerintah yang terkait;
- 3) Mengembangkan sistem layanan untuk memperluas jangkauan layanan, salah satunya dengan membuat klinik-klinik baru di puskesmas dan polibun yang mempunyai potensi adanya kasus;
- 4) Mengusulkan pelatihan dalam upaya pengembangan sistem layanan salah satunya dengan membuat klinik-klinik baru di puskesmas.

6.1.1.4 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

a. Kebijakan dan Kegiatan

Untuk mendukung upaya pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk miskin dan tidak mampu baik itu program Jaminan Kesehatan Nasional ataupun program Jamkesda KOBAR Sehat, Dinas Kesehatan melalui puskesmas dan jajaran dalam menjalankan program yang seiring dengan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu yang ada diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat secara optimal dengan prinsip portabilitas yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam upaya penjaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang kesehatan Cabang Sampit yang sebelumnya berupa Jaminan Kesehatan Daerah di rubah menjadi Jaminan Kesehatan Nasional.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2014 Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan dan memberikan penjaminan pelayanan kesehatan kepada 35.150 jiwa warga miskin dan tidak mampu di luar penjaminan Jamkesmas yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat.

Adapaun selama tahun 2014 jumlah kunjungan rawat jalan yang ada di puskesmas dan jajarannya sebanyak 33.945 kunjungan, rawat inap 705 kunjungan dan rujukan sebanyak 3.535 rujukan.

Dalam pembayaran iuran/ premi selama tahun 2014 sebanyak 35.150 Jiwa x 19.225 x 12 = Rp. 8.109.105.000 (Delapan Milyar Seratus Sembilan Juta Seratus Lima Ribu Rupiah)

Sedangkan realisasi pembayaran kapitasi yang di bayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang kesehatan (BPJS Kesehatan) sebesar Rp. 2.322.848.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang disebarkan ke 16 Puskesmas.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan:

- 1) Data kepesertaan masih banyak kekurangan terutama Nomor Induk Kependudukan
- 2) Tingginya angka mutasi dan migrasi peserta Jamkesda
- 3) Sering berubah dan kurangnya sosialisasi terkait dengan aturan dan petunjuk teknis dalam menjalankan program
- 4) Kurang pahamnya aturan terkait program yang dilaksanakan
- 5) Sistem pencatatan dan pelaporan tentang kapitasi dan klaim masih banyak yang belum dipahami
- 6) Data yang ada di Kartu Identitas JKN banyak yang tidak sesuai dengan data Base dan Kartu Keluarga peserta
- 7) Datangnya kartu peserta di akhir anggaran/ tahun

Strategi dalam pelaksanaan kegiatan

- 1) Melakukan pendataan ulang terkait dengan kepesertaan yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan
- 2) Melakukan Verifikasi kepesertaan dengan aparat desa / kelurahan terkait
- 3) Melakukan konsultasi dengan mengikuti pertemuan tentang sosialisasi aturan JKN
- 4) Melakukan sosialisasi ke jajaran yang terendah
- 5) Melakukan kerja sama dengan bagian keuangan
- 6) Menambah aturan terkait dengan penerbitan kartu identitas JKN

6.1.2 RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

a. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan kerjasama RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan pihak ketiga yang dilaksanakan adalah dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang proporsional dengan mitra pelaku kerjasama. Pelaksanaan kerja sama RSUD Sultan Imanuddin dengan pihak ketiga juga merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas kehidupan masyarakat.

Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga adalah efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan bersama, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Sampai dengan akhir tahun 2014, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun telah menjalin kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang masih berlaku hingga saat ini sebanyak 81 buah. Secara rinci pihak yang bekerjasama dan hal yang dikerjasamakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Daftar Kesepakatan/Perjanjian Kerjasama dengan
Pihak Ketiga Pemkab Kotawaringin Barat (RSUD Sultan Imanuddin)

SKPD yang Melaksanakan	Pihak yang Bekerjasama/ Daerah	Hal yang Dikerjasamakan	Tgl. No. & Jadwal MoU	Hasil yang Dicapai
RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	- Assuransi Zakirah Health Care - Assuransi BNI Life - ASKES Sosial - ASKES Komersial - Argo Menara Rahmat (AMR) - Asuransi Bumi Putra Muda - Bakrie Sentosa Persada KAL - BRI - Bumi Langgeng Perdana Trada - Bumi Perdana Prima - Bumitama Gunajaya Abadi - Cipta Tani Kumai Sejahtera - Depnakertrans - Dinkes Seruyan - Dinkes Sukamara - First Lamandau Timber - Gemareksa Mekarsari PKS - Graha Cakra Mulia - Graha Cakra Mulya Mill - Group Cintra Borneo Indah - GSDI - GSIP - GSPP - GSYM - Harapan Sawit Lestari - HHK Lipat Gunting Estate	Kerjasama pelayanan kesehatan meliputi : - Rawat Inap dengan atau tanpa tindakan pembedahan; - Persalinan; - Rawat Jalan dengan atau tanpa tindakan pembedahan; - Pemeriksaan penunjang; - Rawat Darurat; - One Day Care dengan atau tanpa tindakan pembedahan. - Pembakaran sampah medis - Pemeriksaan MCU - Sewa menyewa tempat - Peminjaman Alat kesehatan - Sewa Menyewa Alat Gas Oksigen	454/PKS/2HC-RSUDSIPB/VIII 500-PKS.BL.DIR.1109 24/PKS/1402/0409 24/PKS/1402/0409 - RS/U.08.06.249.I1 01-E/MOU/BPM/1/2010 - BSP-045/KAL-RSUD/II/2010 - B-0033/KC-X/SDM/01/2010 01-E/MOU/BPM/1/2010 002/BPP-RSUD/II/2009 179/BGA-KX/EXT/IX/I1 - CTKS-056/RSUD/II/2009 10.BUM.01.11.2010 401/938/DINKES/II/2010 842.3/528-A/DINKES/2011 001/FLTI-HRD/PK/X/2010 - RS/U.11.05.676.I1 001/GUM-RSUD/II/2010 002/MILL-RSUD/II/2010 01/CBI/PKPK/II/2010 - GSDI-004/RSUD/II/2008 - RS/U.08.06.250.I1 - RS/U.10.01.251.I1 - RS/U.10.01.....I1 - RS/U.10.01.2010.I1 003/HHK-LGE-RSUD/II/2010	Telah dilakukan pelayanan kesehatan kepada pasien dan sampah medis yang dikirim oleh pihak yang melakukan kerjasama, dengan outcome : - Kunjungan rumah sakit meningkat; - Pendapatan operasional bertambah.

SKPD yang Melaksanakan	Pihak yang Bekerjasama/ Daerah	Hal yang Dikerjasamakan	Tgl. No. & Jadwal MoU	Hasil yang Dicapai
	27. HHK Sungai Bila Estate 28. Hutanindo Lestari Timber 29. Indoturba Tengah PKS SKNYR 30. Indoturba Tengah SKNYR ESTT 31. Indoturba Tengah SRYN ESTT 32. Indoturba Timur 33. Jamkesda-SKTM Kobar 34. Jamkesmas dan Jampersal 35. Jamsostek 36. Karda Tranders 37. Korinda Ariabima 38. Koritiga Hutani 39. Kapuas Prima Coal 40. KSK Group 41. Minamas Plantation 42. Mega Central Finance 43. Meta Epsi Agro 44. NAL 45. PBNA 46. Pertamina 47. Petro Andalan Nusantara 48. Pilar Wana Persada 49. PLN 50. PTP. Nusantara XIII 51. Sabut Mas Abadi 52. SEI. Rangit 53. Satria Hupasarana 54. Sinar Alam Permai 55. SINP 56. Sumber Mahardika Graha		27. 004/HHK-SBE-RSUD/II/2010 28. 005/HHK-HLT-RSUD/II/2010 29. SKNYR-090/RSUD/II/2008 30. ESTT-018/RSUD/II/2009 31. SRYN-019/RSUD/II/2009 32. RS/U-10.01.205.II 33. RS/U.11.01.466.I.1 34. KD-D.16.12011.724 35. PER/02/012011 36. 060/KDS-RSUD/II/2009 37. 699-3A/KAS-BC/XII/2009 38. 698-3A/KTH-BC/XII/2009 39. 001/KPC-PK-PB/09/2011 40. 001/SPK/UM-KSK/013/XI/2010 41. 011/MGG-Plant/KS-RS/II/2011 42. 001/PK/MCF/PBN/VI/2011 43. 678/MEA-RSUD/III/2008 44. 036/ADM-SPK/II/2011 45. 098/ADM/BNA/EKS/XI/2010 46. 376/KI632/2011-58 47. 009/SAP-PGA/N/2010 48. 009/PWP/JKT/2011 49. RS/U.11.05.840.I.1 50. KUMAI/X/02/III/2011 51. SMA/956-RSUD/VI/2008 52. 425/SIR-RSUD/VI/2008 53. RS/U.11.05.675.I.1 54. 009/SAP-PGA/N/2010 55. 098/ADM/INP/EKS/X/2011 56. 005/SMG-RSUD/II/2010	

SKPD yang Melaksanakan	Pihak yang Bekerjasama/ Daerah	Hal yang Dikerjasamakan	Tgl. No. & Jadwal MoU	Hasil yang Dicapai
	57. Surya Sawit Sejati 58. Tapan Nadegan 59. TH. Felda Nusantara 60. BNI Life Insurance 61. Klinik Pratama Kasih Ibu 62. Bangun Jaya Alam Permai 63. Zakirah Helth Care 64. Trakindo Utama Cabang P.Bun 65. BWP MILL 66. Yayasan Samudra Ilmu Cendikia 67. Ensburly Kalteng Mining 68. Sukses Karya Mandiri 69. Adira 70. Trieka Agro Nusantara 71. BFI Finance 72. WSLI 73. BJAP 74. MAF 75. Sampoerna Argo 76. PT. Jasa Raharja (Persero) 77. PT. Waskita Karya (Persero) 78. PT. BPD Kalteng 79. PT. Bank BNI 80. PT. Suma Barga 81. PT. Gas Generators Indonesia		57. SSS/795-RSUD/XII/2008 58. RS/U.11.10.1026.I.1 59. RS/U.11.05.677.I.1 60. 500.PKS.BL.DIR.1109 61. 187./XI/RBKI/2013 62. RS/U.12.01.942.I.1 63. PKS/ZHC-RSUDSIPB/VIII/2011 64. 036/HRGA-PBN/XI/02011 65. RS/U.11.01.1159.I.1 66. 045/YSIC/XII/2011 67. 006/AMD-EKM/I/2012 68. 317/HR-HRO/IV/12 69. 004/HRDGA-MCU/PKBN/VIII/2012 70. 003/HRGS/TAN/XI/12 71. RS/U.13.03.1107.I.1 72. 05/SPK/FAC-WSLI/VIII/2013 73. 024/FAC-B1/VIII/13 74. RS/U.13.11.2066.I.1 75. 445/0387/RSD/III/2011 76. P/II/SP/2014 77. RS/U.14.01.179.I.1 78. KC3.304/SB-0671/X.14 79. PKB/2/001/PS 80. 016/MSM/SPK/VI/2013 81. RA-A 00131/GGI/X/2013	

per : RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

c. Permasalahan dan Solusi**Permasalahan :**

- 1) Kegiatan pembentukan dan penanganan kerjasama sangat bergantung pelaksanaannya dengan pihak/mitra yang ada, sehingga sering terjadi kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diperkirakan ataupun terdapat kegiatan baru yang tidak direncanakan secara khusus sebelumnya;
- 2) Pada beberapa kesepakatan kerjasama belum ada titik temu dengan mitra kerjasama sehingga belum ada tindak lanjut yang signifikan;
- 3) Masih terdapat kerjasama yang stagnan.

Solusi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi secara lebih intensif dengan pihak mitra kerjasama;
- 2) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada mitra kerjasama serta semua pihak terkait (pemerintah daerah, dinas, masyarakat), pelaksanaan sosialisasi serta penyusunan *draft annual exchange program* yang digunakan sebagai koridor atau acuan pelaksanaan tindak lanjut kerjasama dan pengembangan program;
- 3) Pengembangan hubungan ataupun *contact person* dan secara lebih intensif berkoordinasi dengan mitra kerjasama dan atau instansi pemerintah di kabupaten-kota/instansi swasta/kementrian/lembaga terkait yang memiliki kemungkinan untuk dapat mengembangkan kerjasama.

Selanjutnya, ada beberapa catatan penting berdasarkan monitoring dan evaluasi kerjasama antar daerah maupun dengan pihak ketiga Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2013. Catatan tersebut adalah :

- 1) Secara umum semua kerja sama sudah sesuai dengan yang diharapkan dan dapat terus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu kerjasama;
- 2) Terkait dengan hambatan yang muncul dalam implementasi kegiatan kerjasama, komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* perlu peningkatan lebih lanjut. Peran monitoring dan evaluasi kerjasama mutlak dibutuhkan untuk melihat secara lebih jauh dampak serta kemanfaatan kerjasama tersebut bagi pemerintah serta masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

6.1.3 INSPEKTORAT KABUPATEN

a. Kebijakan dan Kegiatan

Pengawasan merupakan salah satu aspek dalam manajemen, keberadaannya sangat menentukan guna keberhasilan program pembangunan secara adil, transparan dan akuntabel. Kondisi saat ini banyak permasalahan yang dihadapi bangsa kita khususnya dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, melemahnya citra pemerintah di mata masyarakat dan ketidaktahuan publik terhadap hukum serta masih belum terwujudnya pembangunan yang berbasis pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan hal tersebut perlu adanya komitmen untuk melakukan pencegahan dan pengawasan pada bidang pembangunan yang strategis serta rawan terjadinya penyimpangan.

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk segera mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan tuntutan untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan melalui suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam hal ini pengawasan internal pemerintah memegang peranan penting untuk memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggungjawaban melalui sistem akuntabilitas tersebut dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. Salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut maka pemerintah daerah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan kerjasama di bidang pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, dan BPKP perwakilan Kalimantan Tengah. Kerjasama ini diimplementasikan melalui :

- 1) Koordinasi antar instansi pengawasan fungsional;
- 2) Pendampingan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kerjasama yang selama ini dilakukan dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan :

- 1) Adanya keseragaman pola dalam pelaksanaan pengawasan antara Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota serta aparat pengawasan fungsional lainnya;
- 2) Tersusunnya laporan Review atas laporan keuangan daerah tahun 2013;

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang menjadi penghambat pencapaian kinerja antar lain adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat, kurangnya komitmen entitas terperiksa melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, kurangnya sosialisasi perundang-undangan kepada entitas terperiksa, masih terbatasnya aparatur pengawasan yang professional dan aparatur yang telah mengikuti Diklat/Bimtek, Motivasi, komitmen dan integritas aparatur pengawasan masih belum merata.

Untuk itu upaya pemecahan masalah yang harus dilakukan adalah dengan mengirimkan aparatur pengawasan untuk mengikuti Diklat Teknis terkait, mengusulkan penambahan dana untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta sosialisasi peraturan perundang-undangan, meningkatkan koordinasi dan informasi melalui pertemuan berkala dan gelar pengawasan sebagai pengendalian dan evaluasi.

6.1.4 SEKRETARIAT DPRD

6.1.4.1 Jaminan Pemeliharaan Gedung Kantor

a. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam rangka memenuhi jaminan pemeliharaan gedung kantor DPRD dan rumah jabatan Ketua DPRD Kotawaringin Barat maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan kerjasama dengan PT. Asuransi Sinar Mas, berkenaan dengan jaminan pemeliharaan gedung kantor DPRD dan rumah jabatan Ketua DPRD Kotawaringin Barat yang diimplementasikan melalui kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan gedung kantor DPRD dan rumah jabatan Ketua DPRD Kotawaringin Barat dalam bentuk Asuransi Keselamatan Tahun Anggaran 2014.

Kerjasama ini di laksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dan pihak ketiga berdasarkan :

- 1) Polis Asuransi Kebakaran Gedung DPRD Kotawaringin Barat Nomor Renewal : 01.080.2014.00497 tanggal 10 Oktober 2014;
- 2) Polis Asuransi Kebakaran Rumah Jabatan Ketua DPRD Kotawaringin Barat Nomor Renewal : 01.080.2014.00495, tanggal 10 Oktober 2014.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan gedung kantor DPRD dan rumah jabatan Ketua DPRD Kotawaringin Barat Tahun 2014 :

- 1) Belanja Premi Asuransi Kebakaran Rumah Jabatan Ketua DPRD Kotawaringin Barat, dari pagu dana sebesar 1.000.000,- terealisasi sebesar Rp.979.200,- atau sebesar 97,92 %;

- 2) Belanja Premi Asuransi Kebakaran Gedung DPRD Kotawaringin Barat, dari pagu dana sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.014.000,- atau sebesar 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak terdapat permasalahan yang berarti.

6.1.4.2 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

a. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam rangka memenuhi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Keluarga maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan kerjasama dengan PT. Asuransi Jiwa Kresna. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yang diimplementasikan melalui kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Tahun Anggaran 2014.

Kerjasama ini di laksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dan pihak ketiga berdasarkan MOU dengan PT. Asuransi Jiwa Kresna tentang Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kotawaringin Barat, Nomor : 14/PA-SETWAN/IV/2014 Tanggal 30 April 2014.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Tahun Anggaran 2014 dari pagu dana sebesar Rp. 450.000.000,- terealisasi sebesar Rp 446.700.000,- atau sebesar 99,27 %.

c. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak terdapat permasalahan yang berarti.

6.2 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH**6.2.1 FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH****a. Kebijakan dan Kegiatan**

Sesuai dengan pasal 27 huruf (j) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

Hubungan kerja ini selanjutnya diimplementasikan melalui kegiatan koordinasi pemerintahan daerah. Kegiatan koordinasi ini merupakan upaya untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

Dengan demikian kebijakan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah diarahkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan di daerah yang merupakan proses komunikasi dan interaksi antar penyelenggara pemerintahan dan instansi vertikal di daerah. Adapun kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain melalui :

- 1) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, forum ini dilaksanakan dalam rangka lebih memudahkan dan mempercepat pengambilan keputusan terhadap berbagai permasalahan yang ada. Melalui kegiatan ini dapat terhimpun segala informasi dan masukan dari anggota FKPD yang memberikan manfaat terhadap lancarnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- 2) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah pemerintah daerah maupun dalam rangka penyelesaian permasalahan pertanahan yang ada. Melalui kegiatan ini dapat terhimpun berbagai informasi dan masukan dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum maupun penyelesaian permasalahan pertanahan di daerah;
- 3) Koordinasi dengan Kantor Statistik, dimaksudkan dalam rangka penyediaan data dan kontribusi sektor ekonomi serta data Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat di berbagai sektor. Melalui kegiatan ini dihasilkan antara lain penyusunan Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka, Penduduk dan PDRB yang menggambarkan tentang pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita serta kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;

- 4) Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak, dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pembayaran pajak bagi para wajib pajak agar memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak sesuai ketentuan dan tidak melebihi tanggal jatuh temponya. Melalui kegiatan ini dapat diupayakan peningkatan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan di daerah.

Selain itu juga senantiasa dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal lainnya termasuk dengan BUMN dan BUMD yang ada di daerah. Melalui kegiatan koordinasi ini pemerintah daerah dapat melakukan upaya penyelesaian atas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi vertikal dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dilaksanakan secara rutin maupun insidentil selama satu tahun anggaran terutama dalam rangka pembahasan permasalahan strategis daerah yang memerlukan penanganan dan tindak lanjut segera.

Hasil dan manfaat yang diperoleh dari koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, adalah :

- 1) Terwujudnya keselaran dan keterpaduan langkah antara pemerintah daerah dan instansi vertikal, sesuai tugasnya dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat terutama dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum sehingga tercipta kondisi sosial masyarakat yang kondusif;
- 2) Media Komunikasi bersama terhadap kegiatan-kegiatan sektoral, koordinatif serta evaluasi terhadap kasus-kasus yang terjadi, sehingga :
 - a. Dapat diambil kebijakan dan tindakan implementatif pemecahan masalah;
 - b. Teridentifikasinya permasalahan-permasalahan penyelenggaraan pemerintahan umum yang ada untuk diambil kebijakan yang dapat mengakomodasi dari semua kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas baik dari Pemerintah Daerah, instansi vertikal maupun kepentingan masyarakat;
 - c. Mendapatkan informasi dan kebijakan untuk menghadapi tantangan kondisi di masa depan terutama dalam meminimalkan konflik-konflik yang ada di masyarakat, serta setiap permasalahan dapat diupayakan penyelesaiannya secara cepat dan tepat.

c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Belum adanya data base bersama tentang permasalahan-permasalahan di daerah yang dapat digunakan sebagai bahan koordinasi, sehingga menyulitkan penanganan secara komprehensif. Solusi yang ditempuh adalah mengintensifkan komunikasi dengan instansi vertikal di daerah;
- 2) Aturan teknis pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah belum memiliki dasar hukum yang kuat. Solusi yang ditempuh melalui kesepakatan dan menyesuaikan kondisi di daerah.

6.2.2 PEMELIHARAAN KEAMANAN**a. Kebijakan dan Kegiatan**

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja) dengan Instansi vertikal di daerah adalah berkaitan dengan kerjasama operasional di bidang pemeliharaan keamanan.

Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Polres Kotawaringin Barat, Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, Kantor Bea dan Cukai Pangkalan Bun, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Bun, Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun, Kodim 1014, Lanud Iskandar, Yonif 631, TNI AL Kumai, Sub Denpom XII/2-2, dan BIN.

Jumlah kegiatan yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kegiatan yaitu Kegiatan Tim Pembinaan dan Operasi Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat, Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, Kegiatan Pengamanan Pemilu (DPRD dan Presiden/Wakil Presiden), Kegiatan Komunitas Intelejen Daerah, dan Kegiatan Pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Nasional dengan aparat keamanan dan dilakukan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kerjasama tersebut meliputi :

- 1) Koordinasi penanganan permasalahan yang berhubungan dengan isu yang berkembang/bergejolak di masyarakat yang bernuansa dan berpotensi menimbulkan konflik SARA, anarkisme, separatisme dan lain-lain;
- 2) Koordinasi penanganan permasalahan yang berkaitan dengan gangguan pelaksanaan fungsi sosial masyarakat akibat terjadinya bencana dan pemberlakuan kebijakan pemerintah daerah dan pusat;
- 3) Koordinasi penanganan permasalahan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat, permasalahan perkehidupan, prostitusi liar dan sebagainya.

Kerjasama tersebut dilaksanakan secara terkoordinasi dengan maksud agar terwujud pembagian peran, tugas dan tanggung jawab dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- 1) Terbatasnya kemampuan dan jumlah SDM personil Badan Kebangpolinmas khususnya dalam hal teknik pencegahan dan penanganan tindak kejahatan;
- 2) Keterbatasan anggaran untuk mendukung kerjasama dengan instansi terkait dibidang keamanan dan ketertiban.

Solusi yang bisa ditempuh :

- 1) Mengikutsertakan personil dalam kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang keamanan dan ketertiban;
- 2) Ketersediaan anggaran yang memadai untuk menunjang kerjasama dengan instansi terkait dibidang keamanan dan ketertiban.

6.3 PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Batas daerah merupakan elemen penting pada era otonomi daerah. Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara implisit telah mengatur dimensi spasial suatu daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang otonom, yakni memiliki batas-batas wilayah tertentu. Adanya wilayah yang jelas dapat menjadi alas hak bagi pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Batas daerah harus memenuhi aspek yuridis dan aspek teknis. Aspek yuridis berupa ditetapkannya legalitas hukum batas daerah melalui Permendagri yang berisi cakupan wilayah yang berbatasan, koordinat titik batas, posisi pilar batas dan unsur geografis lainnya, seperti sungai, jalan. Sedangkan aspek fisik di lapangan ditandai dengan pemasangan pilar batas dan teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas.

a. Kebijakan dan Kegiatan

Sejalan dengan penyebaran penduduk, pemekaran wilayah desa dan kecamatan serta pertumbuhan investasi di bidang perkebunan yang sangat besar di Kabupaten Kotawaringin Barat, membawa konsekuensi terhadap munculnya konflik yang menyangkut masalah perbatasan, baik antar desa/kelurahan, kecamatan dan antar Kabupaten.

Penanganan sengketa batas wilayah antar desa dan kelurahan terakhir mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Antar Desa, sedangkan penanganan masalah perbatasan antar daerah terakhir mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Pembinaan batas daerah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui program pengembangan wilayah perbatasan dengan kegiatan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah berupa sosialisasi batas daerah, rapat koordinasi perbatasan (rakortas), serta penegasan batas daerah.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai kondisi geografisnya berbatasan dengan 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Seruyan. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan rapat pembahasan terkait kesepakatan batas antar Tim Tata Batas Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Tim Tata Batas Kabupaten Lamandau yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2013 di Kantor Bupati Kotawaringin Barat. Hasil kesepakatan batas sementara yang telah dicapai dengan ketiga kabupaten tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 6.3
Hasil Kesepakatan Batas Sementara Tata Batas
Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Tata Batas Wilayah Dengan	Jenis Kesepakatan	Yang Menetapkan	No. Surat Penetapan / Lampiran
1	Kab. Seruyan	BA.Kesepakatan Bersama	Tim Tata Batas Kobar – Seruyan	- No.- tgl 9 Okt 2004 - No.- tgl 10 Sept 2006
		Peta Acuan Batas Kobar – Seruyan	Tim Tata Batas Provinsi	-
		Nota Kesepakatan	Bupati Kobar, Seruyan, Lamandau dan Sukamara	Tanpa No. tanggal 5 Juli 2007 di Palangka Raya
		Penegasan Gubernur	Gubernur Kalteng	130/1838/Tapra, tgl 1 Desember 2007
		Berita Acara penyerahan kepada Gubernur Kalteng untuk penetapan Batas Kobar-Seruyan	Bupati Kobar- Bupati Seruyan	BA (tanpa No.) tgl. 21 April 2009
		Surat Gubernur Kalimantan Tengah perihal Penegasan Batas Daerah (Kobar-Seruyan)	Gubernur Kalteng	No. 130/23/Adpum tgl. 10 Januari 2011

No.	Tata Batas Wilayah Dengan	Jenis Kesepakatan	Yang Menetapkan	No. Surat Penetapan / Lampiran
2.	Kab. Lamandau	Penetapan Peta Batas Sementara	Bupati Lamandau, Sukamara dan Ktw. Barat	BA Tgl 18 Pebruari 2006 dan Nota Kesepahaman tgl 28 Sept 2006
		Berita Acara Rapat Penataan Batas antara Kab. Kobar dengan Kab. Lamandau	Tim Tata Batas Kab. Kobar – Tim Tata Batas Kab. Lamandau	BA Rapat Tgl. 13 November 2012
		Berita Acara Rapat Penataan Tata Batas Kab. Lamandau dan Kab. Kobar	Tim Tata Batas Kab. Kobar – Tim Tata Batas Kab. Lamandau	BA Rapat Tgl. 7 November 2013
3.	Kab. Sukamara	Penetapan Peta Batas Sementara	Bupati Lamandau, Sukamara dan Ktw. Barat	BA Tgl 18 Pebruari 2006 dan Nota Kesepahaman tgl 28 Sept 2006

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Ktw. Barat

Pada Tahun 2014, program penataan batas wilayah lebih difokuskan pada pemetaan batas desa di kabupaten kotawaringin barat. Batas desa merupakan salah satu element penting dalam menyusun kerangka batas wilayah kabupaten. Berikut data beberapa desa yang sudah berhasil di digitasi oleh tim tata batas kabupaten kotawaringin barat :

DATA DESA YANG SUDAH MENYERAHKAN DATA BATAS DESA SEMENTARA

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	LENGKAP	SUDAH TERDIGITASI
1	MULYA JADI	P. BANTENG	L	BLM
2	KARANG SARI	P. BANTENG	L	BLM
3	PALIH BARU	KOLAM	L	SUDAH
4	SUNGAI PULAU	P. BANTENG	L	SUDAH
5	RIAM DURIAN	KOLAM	L	SUDAH
6	BUMI HARJO	KUMAI	L	SUDAH
7	SUNGAI TENDANG	KUMAI	L	SUDAH
8	RANGDA	ARSEL	KL	BLM
9	MENDAWAI	ARSEL	L	SUDAH
10	TELUK PULAI	KUMAI	KL	BLM
11	RAJA SEBERANG	ARSEL	L	BLM
12	MENDAWAI SEBERANG	ARSEL	L	BLM
13	SULUNG	ARSEL	L	SUDAH
14	SUMBER MUKTI	KOLAM	KL	BLM

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Ktw. Barat

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

-) Kesepakatan yang telah dicapai tersebut masih perlu ditindaklanjuti dalam beberapa tahapan, yang dituangkan dalam peta batas definitif dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
-) Kurangnya tenaga ahli dalam penanganan permasalahan batas desa dan batas wilayah antar kabupaten.

Solusi :

-) Kesepakatan yang telah dicapai tersebut masih perlu ditindaklanjuti dalam beberapa tahapan hingga pada dituangkan kedalam peta batas definitif dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini difasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah yang akan disesuaikan dengan peraturan terbaru mengenai Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang ditetapkan pada 12 Desember 2012 oleh Menteri Dalam Negeri.

6.4 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**6.4.1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya**

Kejadian bencana di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di tahun 2014 hanya terjadi bencana kebakaran sebanyak 9 kali dan bencana alam sebanyak 1 kali. Pada Tahun 2014 terjadi Bencana Kebakaran dan Bencana Alam. Kebakaran rumah terjadi di beberapa desa dan Kelurahan yakni 1 kali di Desa Batu Belaman, 2 kali di Kelurahan Mendawai, 3 kali di Kelurahan Baru, 1 kali di Kelurahan Raja, 1 kali di Desa Sumber Agung, dan 1 kali di Desa Riam Durian.

Selain bencana kebakaran juga terjadi bencana alam yaitu bencana banjir 1 kali di Dusun Catur dan Dusun Sapta Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng. Untuk rincian data selengkapnya mengenai bencana kebakaran dan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 disajikan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 6.4
Data Bencana Kebakaran Kabupaten Kobar Tahun 2014

NO	Alamat	Tanggal	Jenis dan Jumlah Kerusakan Bangunan					Tafsiran Kerugian dan Korban	
			Rusak Berat	Rusak Ringan	RMH	Tempat Usaha	Kantor/ Fasilitas Umum	Tafsiran Kerugian (Rp)	KK/ Jiwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jl. Pasir Panjang/Paleleng RT.02 Desa Batu Belaman Kec. Kumai	30-04-2014	1		1			25.000.000	1/4
2.	Jl. Jend. Sudirman RT. 24 Kel. Mendawai Kec. Arut Selatan	03-06-2014	1		1			50.000.000	1/3
3.	Jl. A. Yani Gg Sabil RT.17B Kel. Baru Kec. Arut Selatan	30-06-2014	5	2	7			Tidak diketahui	7/23
4.	Jl. A. Yani KM.35 RT.5 Gg. Mawar Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada	21-08-2014	1		1			50.000.000	1/4
5.	Jl. Mantir Anum RT.002 Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama	23-08-2014	1		1			35.000.000	1/4
6.	Jl. Adipati RT.12 Gg Beringain Kel. Raja Kec. Arut Selatan	28-08-2014	3		1		2	1.150.000.000	2/8
7.	Jl. A. Yani KM.3,5 Jl. Tengku Usman RT.20A Kel. Baru Kec. Arut Selatan	30-08-2014	1		1			100.000.000	1/4
8.	Jl. Berunai Gg. Kelabau RT.05 dan RT.06 Kel. Baru Kec. Arut Selatan	31-08-2014	14	4	14	4		Tidak diketahui	29/119
9.	Jl. Abdullah Mahmud RT.14B Kel. Mendawai Kec. Arut Selatan	16-09-2014	6	4	9	1		Tidak diketahui	8/40

Sumber : Laporan Kepala Desa dan Camat Masing-Masing Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Tahun 2014

Tabel 6.5
Data Bencana Alam Kabupaten Kobar Tahun 2014

NO	Alamat	Tanggal	Jenis dan Jumlah Kerusakan Bangunan					Tafsiran Kerugian dan Korban	
			Rusak Berat	Rusak Ringan	RMH	Tempat Usaha	Kantor/ Fasilitas Umum	Tafsiran Kerugian (Rp)	KK/ Jiwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	RT.09 dan RT.10 Dusun Catur Tunggal dan Dusun Sapta Jaya Kec. P. Banteng	18/03/2014	2	36	36		2	Tidak diketahui	36/172

Sumber : Laporan Kepala Desa dan Camat Masing-Masing Desa dan Kecamatan Tahun 2014

Untuk penanganan bencana kebakaran sebagaimana yang tersebut dalam table diatas, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan penanganan bencana yakni dengan segera memberikan bantuan kepada korban bencana sesuai dengan standarisasi tanggap darurat bencana non-alam dan alam dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

6.4.2. Status Bencana

Status bencana dilihat kualitas dan kuantitasnya termasuk kategori kecil dalam skala kabupaten.

6.4.3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Bantuan yang disalurkan kepada korban bencana kebakaran dan bencana alam bersumber dari bantuan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Bantuan yang diberikan berupa bantuan makanan, sandang, perlengkapan keluarga, dan perlengkapan tidur. Bantuan makanan berupa beras 725,7 Kg, mie instan 7.072 bks, sarden 988 klg, gula 142 Kg, garam dapur 152 bks, minyak goreng 31,5 btl, lauk pauk 50 paket, dan makanan siap saji 2 paket.

Bantuan sandang berupa seragam SD laki-laki 27 stel, seragam SD perempuan 26 stel. Perlengkapan keluarga berupa wajan 18 buah, piring melamin 70 buah, gelas melamin 132 buah, panci 10 buah, tempat nasi 37 buah, sendok nasi 53 buah, sutil 35 buah, teko 56 buah, family kit 63 tas, foodware 18 tas dan rantang 56 buah dan kidware 14 tas. Perlengkapan tidur berupa tikar plastik 85 lembar, matras 243 lbr, selimut 19 bh, dan terpal 57 lembar.

6.4.4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

- 1) Penyuluhan penanggulangan bencana oleh Kesbangpollinmas;
- 2) Gelar kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Bhakti Sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Tingkat Nasional Tahun 2014 di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.;
- 3) Kegiatan Kemah Bhakti dan Apel Siaga Bencana Provinsi Kalimantan Tengah di Desa Kujan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- 4) Pemantapan Kemampuan Petugas Pendamping Sosial dan Pemantapan Shelter Korban Bencana Alam di Palangka Raya;
- 5) Kegiatan Pemantapan Petugas Psikososial Korban Bencana Alam di Palangka Raya;
- 6) Kegiatan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana (KSB) dan Pengukuhan Tim Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;

- 7) Pelatihan Potensi SAR Water Rescue dan Medical First Responder (MFR) di Kota Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 8) Kegiatan Pemantapan Kemampuan Pengelolaan Logistik Korban Bencana Alam di Palangka Raya, baik kesiapsiagaan yang sifatnya pra bencana, tanggap darurat (saat terjadi bencana) maupun pasca bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi kewajiban pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, karena itu disebut Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas/Masyarakat (*CBDM-Community Based Disaster Management*) yang merupakan serangkaian aktivitas masyarakat (komunitas) pada saat sebelum, saat dan setelah bencana terjadi untuk mengurangi jumlah korban baik jiwa, kerusakan sarana/prasarana dan terganggunya peri kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup dengan mengandalkan sumber dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat.

Penanggulangan bencana berbasis komunitas juga merupakan upaya mengkolaborasikan penanggulangan bencana sebagai upaya bersama antara masyarakat, LSM, swasta dan Pemerintah. Pembangunan kemampuan penanggulangan bencana ditekankan pada peningkatan kemampuan masyarakat khususnya masyarakat pada kawasan rawan bencana, agar secara dini menekan bahaya tersebut.

Dari aspek bantuan bencana senantiasa diupayakan barang *buffer stock* di gudang Dinas Sosial dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tanggap darurat diberikan bantuan darurat bencana yaitu upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. Status keadaan darurat bencana suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Hal yang dilakukan dalam tanggap darurat bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

Standar bantuan sosial bencana alam: Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Nomor : 03/BJS-BSKBA/2003 :

- a. Bantuan pangan dan lauk pauk, dengan indeks minimal :
 - 1) Beras sebanyak 400 gram/ orang/ hari.
 - 2) Permakanan/lauk pauk sebanyak Rp. 6.000,-/orang/hari atau dapat diwujudkan dalam bentuk natura seperti:

- a) Mie instan
 - b) Sarden
 - c) Kecap
 - d) Sambal / Saus
 - e) Minyak goreng
 - f) Gula pasir
 - g) Telor
 - h) Lainnya
- b. Jangka waktu bantuan pangan disesuaikan dengan jenis dan besaran bencana sesuai kebutuhan seperti :
- 1) Bencana banjir : bantuan diberikan selama 3-7 hari atau dapat diperpanjang hingga 12 hari.
 - 2) Bencana tanah longsor : bantuan diberikan selama 3-7 hari.
 - 3) Bencana alam angin ribut/angin topan/tsunami : bantuan diberikan selama 3 hari.
 - 4) Bencana gempa bumi : bantuan diberikan selama 5-10 hari.
 - 5) Bencana letusan gunung berapi : bantuan diberikan selama 5-10 hari.
 - 6) Bencana kekeringan/kekurangan pangan : bantuan diberikan selama 15-30 hari.
- c. Bantuan sandang diprioritaskan kepada para korban yang tidak mampu dan sangat membutuhkan serta dilaksanakan secara selektif.
- 1) Kain sarung : 1 potong.
 - 2) Kain panjang : 1 potong.
 - 3) Kaos berkerah : 1 potong.
 - 4) Daster dewasa : 1 potong.
 - 5) Pakaian anak laki-laki : 1 set.
 - 6) Pakaian anak wanita : 1 set.
 - 7) Seragam SD laki-laki : 1 set.
 - 8) Seragam SD wanita : 1 set.
- d. Bantuan peralatan dapur diberikan secara selektif diprioritaskan korban yang tidak mampu memenuhi dan melakukan kegiatan pemenuhan makanan secara mandiri.
- 1) Kompor minyak tanah : 1 buah.
 - 2) Panci aluminium serba guna : 1 buah.
 - 3) Wajan nomor 16 : 1 buah.
 - 4) Sodet stainless : 1 buah.
 - 5) Tempat nasi aluminium : 1 buah.
 - 6) Sendok nasi stainless : 1 buah.
 - 7) Piring melamin/plastik : - lusin.
 - 8) Gelas melamin/plastik : - lusin.

6.4.5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Potensi bencana yang diperkirakan terjadi antara lain:

- a. Bencana Kebakaran Hutan, Lahan Kering dan Pekarangan yang selalu terjadi disebabkan adanya iklim yang panas / kemarau yang berkepanjangan tanpa adanya hujan, sehingga menimbulkan terjadinya kebakaran hutan, lahan kering yang bukan karena faktor kesengajaan ulah manusia, melainkan terjadi akibat gesekan ranting-ranting kering yang ditiup oleh angin dengan berulang-ulang, maka tidak terbantahkan akan menimbulkan percikan api kemudian membakar lahan disekitarnya yang lama kelamaan akan menjalar keseluruh area hutan.
- b. Bencana Banjir Musiman berupa banjir di Daerah Aliran Sungai yang ada di Kotawaringin Barat yang melintasi Kecamatan Arut Utara, Kotawaringin Lama, Arut Selatan dan Kumai, yang terjadi apabila setiap musim penghujan tiba dengan curah hujan cukup tinggi sehingga debit air naik diatas normal.
- c. Bencana akibat Angin Puting Beliung kadang bisa terjadi berdasarkan iklim dan potensi cuaca yang berubah.
- d. Bencana Alam Gunung Meletus atau Gempa Bumi serta Tanah Longsor tidak pernah terjadi, sedangkan untuk Bencana akibat Gelombang Ekstrim jarang terjadi dan apabila ada, hal ini hanya terjadi berkisar disepanjang daerah pinggiran pantai.

Yang tidak kalah penting adalah bencana sosial, karena latar belakang kemajemukan penduduk memungkinkan terjadinya konflik antar etnis yang mengarah pada konflik sosial yang dapat berujung pada bencana sosial.

6.5 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.5.1. Gangguan Yang Terjadi

Dalam kurun waktu pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2014, gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di temukan adalah :

- a. Terdapat beberapa titik lokasi Pedagang Kaki Lima (Bundaran Pancasila, Bundaran Lapangan Tugu, depan Pasar Indra Sari, depan Pangkalan Bun Park, beberapa titik di sepanjang jalan Iskandar, depan TPU MUSLIM) yang masih membandel untuk tidak berjualan di atas trotoar dan/atau tempat yang dilarang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan PKL;
- b. Ditemukannya beberapa lokasi Pabrik pembuatan minuman beralkohol jenis arak di wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

- c. Ditemukannya pasangan tidak sah yang menginap di beberapa penginapan, baik di dalam kota maupun luar kota Pangkalan Bun dan indikasi adanya sejumlah warung remang-remang disekitar Jalan A. Yani Km 12 (Arah Luar Kota) yang diindikasikan digunakan sebagai tempat prostitusi terselubung, sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin. Barat Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Larangan Pelacuran;
- d. Ditemukan dan di amankan pelajar (SD,SMP) sedang menghisap jenis LEM (merk lem fox dan Q-Bond) yang dapat menghilangkan kesadaran / mabuk;
- e. Masih ditemukannya masyarakat yang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempat yang ditentukan, hal ini melanggar ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Ketertiban Umum dan Kebersihan Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat.

6.5.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerjasama dengan aparat keamanan daerah dari jajaran Kepolisian Resort Kotawaringin Barat (POLRI), Komando Distrik Militer 1014 Panju Panjung, Pangkalan Udara TNI AU Iskandar, Kompi Senapan B Antang, Pos TNI AL Kumai.

6.5.3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Total anggaran untuk penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum sebesar Rp. 13.208.988.000,- yang dialokasikan pada 2 SKPD yaitu Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Untuk Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan total anggaran sebesar 7.923.473.000,- yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung berupa Gaji dan Tunjangan Pegawai sebesar Rp. 2.388.126.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.340.671.914,- atau 98,01 % dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.535.347.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.060.894.439,- atau 91,42 %.

Untuk Satuan Polisi Pamong Praja Total Anggaran sebesar Rp. 5.285.515.000,00 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung yang berupa Gaji dan Tunjangan Pegawai sebesar Rp. 3.027.294.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.882.206.270,00 atau 95,20% dan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.258.221.000,00, dengan realisasi sebesar Rp. 2.178.379.532,00 atau 96 46 %

6.5.4. Penanggulangan dan Kendalanya

Dalam pelaksanaan tugas menjaga ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi Tugas, Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat selalu melaksanakan tindakan preventif untuk menanggulangi permasalahan yang diduga akan muncul. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2014 adalah :

- a. Keterbatasan jumlah personil Satpol PP (kapasitas ideal) di lapangan untuk menertibkan Perda, Perbup, Keputusan Bupati dengan luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup luas;
- b. Keterbatasan alat, sarana dan prasarana serta personil;
- c. Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar;
- d. Lintas koordinasi instansi yang terkadang terhambat oleh panjangnya rantai birokrasi;
- e. Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.5.5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Seperti telah disebutkan diatas bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat juga mengikut sertakan aparat SKPD lainnya dan aparat keamanan dari kesatuan lain untuk mengamankan dan menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban Umum di wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Barat. Bentuk pengikutsertaan tersebut adalah:

- a. Melaksanakan giat operasi bersama dengan jajaran POLRI dan TNI di kecamatan-kecamatan terhadap distribusi BBM Bersubsidi;
- b. Melaksanakan giat operasi bersama dengan jajaran POLRI dan TNI di daerah terhadap penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol;
- c. Melaksanakan Giat Operasi Pengawasan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan bersama dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat;
- d. Bimbingan dan Penyuluhan Mengenai Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Kegiatan Masyarakat Serta Bimbingan Pembentukan Kelompok Sadar Lingkungan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat Dengan Nara Sumber dari Kepolisian Resort Kotawaringin Barat.
- e. Operasi Gabungan bersama Polres Kotawaringin Barat dalam rangka pengamanan pelaksanaan perayaan hari-hari besar keagamaan dan Tahun Baru.

BAB VII

PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2014 menghasilkan keluaran (*output*) berupa hasil-hasil pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelayanan umum dalam arti luas, yang merupakan wujud pelaksanaan tugas dari segenap aparatur Pemerintah Daerah.

Keberhasilan dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Legislatif (DPRD), maupun masyarakat luas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan yang dicapai merupakan hasil upaya optimal yang mampu diekspresikan oleh seluruh jajaran eksekutif selaku penyelenggara pemerintahan, sehingga semua itu sekaligus dapat mencerminkan tingkat kinerja yang diharapkan.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun Anggaran 2014 diantaranya :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun mendapatkan penghargaan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi untuk kelima kalinya dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta salah satu Rumah Sakit yang mendapat penghargaan dari Gubernur Kalimantan Tengah sebagai Rumah Sakit dengan layanan prima di Kalimantan Tengah;
2. Penghargaan Adipura selama 8 tahun berturut-turut dengan kategori Kota kecil terbersih;
3. SMAN-3 Pangkalan Bun mendapat penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional;
4. Kabupaten Kotawaringin Barat meraih peringkat Hijau pada kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup Tahun 2013-2014;
5. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan penghargaan sebagai perpustakaan dengan penyimpangan positif.
6. Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan penghargaan Eliminasi Malaria dan Mandala Karya Bhakti dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Keberhasilan tersebut patut disyukuri, mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Dalam kurun waktu tersebut, jajaran Pemerintah Daerah berupaya seoptimal mungkin untuk mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya yang relatif terbatas.

Meskipun demikian, disadari sepenuhnya bahwa kerja keras dan berbagai upaya yang dilakukan jajaran eksekutif tidak akan bermakna dan berguna lebih tanpa dukungan dan kerja sama segenap jajaran legislatif sebagai wakil rakyat maupun dukungan rakyat sendiri. Untuk itu disampaikan rasa terima kasih atas keserasian komunikasi yang terjalin selama ini. Semoga hasil pembangunan yang telah dicapai

dapat merata ke seluruh pelosok wilayah, serta menyentuh dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.

Berbagai capaian keberhasilan dan permasalahan selama tahun 2014 yang telah dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2014 ini diharapkan akan selalu menjadi kesepahaman untuk mengarahkan cara pandang perbaikan-perbaikan ke depan. Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, berlandaskan prosedur yang berlaku, sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sangat disadari, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama. Akhirnya saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita semua. Amiin.